



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018**





**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018.

BAB I
RENCANA KETENTUAN UMUM DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2018 serta prakiraan maju Tahun 2019.
- (3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018; dan
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2018.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
 - c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan dan pembentukan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2018.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Mei 2017


WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 38

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| DAFTAR ISI | i |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-2 |
| 1.3. Hubungan antar Dokumen | I-3 |
| 1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | I-4 |
| 1.5. Maksud dan Tujuan | I-4 |
| BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | II-1 |
| 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah | II-1 |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi | II-1 |
| 2.1.1.1 Aspek Geografi | II-1 |
| 2.1.1.2 Aspek Demografi | II-12 |
| 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-18 |
| 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | II-18 |
| 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat | II-31 |
| 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... | II-48 |
| 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum..... | II-53 |
| 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar | II- 53 |
| 2.1.3.2.Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | II-150 |
| 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan..... | II-243 |
| 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah | II-259 |
| 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... | II-259 |
| 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... | II-262 |
| 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi | II-275 |
| 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia..... | II-281 |
| 2.2. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016 | II-284 |
| 2.2.1 Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 | II-284 |
| 2.2.2 Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016 | II-288 |
| 2.2.3 Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 | II-342 |
| 2.3. Permasalahan Pembangunan | II-346 |
| 2.3.1 Bidang Sosial | II-346 |
| BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | III-1 |
| 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 | III-2 |
| 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018..... | III-6 |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 3.2. | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-17 |
| 3.2.1. | Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan | III-18 |
| 3.2.2. | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-20 |
| 3.2.2.1. | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah | III-20 |
| 3.2.2.2. | Arah Kebijakan Belanja Daerah | III-25 |
| 3.2.2.3. | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | III-32 |
| BAB IV | TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1. | Tujuan, Sasaran, dan Tema Pembangunan Daerah | IV-1 |
| 4.2. | Prioritas dan Sasaran Pembangunan | IV-2 |
| 4.3. | Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 | IV-10 |
| 4.4. | Penyelarasan Program Prioritas Kota Yogyakarta ke OPD Terkait | IV-11 |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH | V-1 |
| | Dinas Pertanian dan Pangan | V-2 |
| | Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja | V-5 |
| | Dinas Lingkungan Hidup | V-10 |
| | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | V-13 |
| | Dinas Perhubungan | V-17 |
| | Dinas Pariwisata | V-21 |
| | Dinas Kebudayaan | V-24 |
| | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | V-26 |
| | Dinas Pemuda dan Olahraga | V-29 |
| | Dinas Sosial | V-31 |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | V-34 |
| | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | V-40 |
| | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | V-43 |
| | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | V-47 |
| | Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan | V-50 |
| | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | V-52 |
| | Sekretariat DPRD | V-57 |
| | Bagian Hukum | V-60 |
| | Inspektorat | V-62 |
| | Kantor Kesatuan Bangsa | V-65 |
| | Bagian Organisasi | V-67 |
| | Bagian Perekonomian Pengembangan PAD dan Kerjasama | V-71 |
| | Bagian Layanan Pengadaan | V-74 |
| | Bagian Protokol | V-76 |
| | Bagian Tata Pemerintahan | V-77 |
| | Bagian Umum | V-79 |
| | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | V-81 |
| | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | V-86 |
| | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | V-89 |

| | |
|---|-------|
| Dinas Kesehatan | V-92 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak | V-104 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | V-106 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | V-109 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | V-112 |
| Dinas Kebakaran | V-113 |
| Dinas Pendidikan | V-115 |
| BPBD | V-120 |
| Kecamatan Kraton | V-122 |
| Kecamatan Kotagede | V-132 |
| Kecamatan Mergangsan | V-137 |
| Kecamatan Mantriheron | V-141 |
| Kecamatan Wirobrajan | V-146 |
| Kecamatan Ngampilan | V-153 |
| Kecamatan Pakualaman | V-158 |
| Kecamatan Gedongtengen | V-163 |
| Kecamatan Danurejan | V-167 |
| Kecamatan Gondokusuman | V-171 |
| Kecamatan Jetis | V-176 |
| Kecamatan Tegalarjo | V-179 |
| Kecamatan Umbulharjo | V-184 |
| Kecamatan Gondomanan | V-190 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| BAB VI PENUTUP | VI-1 |
|-----------------------------|-------------|

**PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2018 diarahkan pada tema: : ***“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”***

1. **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas**, dimaknai sebagai upaya wilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
2. **Mandiri**, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.
3. **Sejahtera**, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pengembangan Gender (IPG).
4. **Berlandaskan Semangat Segoro Amarto**, memiliki makna Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta. Segoro memiliki sifat dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber daya alam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan transformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang menggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang menggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pemimpinnya dapat dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negara. Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah Kemandirian, Kepedulian Sosial, Gotong Royong, dan Kedisiplinan. Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian serta nilai-nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
- 10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
- 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

1.3. Hubunganantar Dokumen

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2012-2017, dan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 –2035.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN |
| BAB III | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB VI | PENUTUP |

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2017 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- 2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD Tahun 2018;
- 3) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 4) Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun *'image'* Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Letak Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Secara geografis, kota ini terletak antara 110°24'1"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63 Ha atau sebesar 1,94% luas Kota Yogyakarta. Berikut luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

| No | Kecamatan | Kelurahan | Luas Area (km ²) | Jumlah RW | Jumlah RT |
|----|-------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 1. | Mantrijeron | Gedongkiwo | 0,90 | 18 | 86 |
| | | Suryodiningratan | 0,85 | 17 | 70 |
| | | Mantrijeron | 0,86 | 20 | 75 |
| | | | 2,61 | 55 | 231 |
| 2. | Kraton | Patehan | 0,40 | 10 | 44 |
| | | Panembahan | 0,66 | 18 | 78 |
| | | Kadipaten | 0,34 | 15 | 53 |

| No | Kecamatan | Kelurahan | Luas Area (km ²) | Jumlah RW | Jumlah RT |
|-----|--------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|
| | | | 1,40 | 43 | 175 |
| 3. | Mergangsan | Brontokusuman | 0,93 | 23 | 84 |
| | | Keparakan | 0,53 | 13 | 58 |
| | | Wirogunan | 0,85 | 24 | 76 |
| | | | 2,31 | 60 | 218 |
| 4. | Umbulharjo | Giwangan | 1,26 | 13 | 42 |
| | | Sorosutan | 1,68 | 18 | 70 |
| | | Pandean | 1,38 | 13 | 52 |
| | | Warungboto | 0,83 | 9 | 38 |
| | | Tahunan | 0,78 | 12 | 50 |
| | | Muja-muju | 1,53 | 12 | 55 |
| | | Semaki | 0,66 | 10 | 34 |
| | | | 8,12 | 87 | 341 |
| 5. | Kotagede | Prenggan | 0,99 | 13 | 57 |
| | | Purbayan | 0,83 | 14 | 58 |
| | | Rejowinangun | 1,25 | 13 | 49 |
| | | | 3,07 | 40 | 164 |
| 6. | Gondokusuman | Baciro | 1,06 | 21 | 87 |
| | | Demangan | 0,74 | 12 | 44 |
| | | Klitren | 0,68 | 16 | 63 |
| | | Kotabaru | 0,71 | 4 | 20 |
| | | Terban | 0,80 | 12 | 58 |
| | | | 3,99 | 65 | 272 |
| 7. | Danurejan | Suryatmajan | 0,28 | 14 | 43 |
| | | Tegalpanggung | 0,35 | 16 | 66 |
| | | Bausasran | 0,47 | 12 | 49 |
| | | | 1,10 | 42 | 158 |
| 8. | Pakualaman | Purwokinanti | 0,33 | 10 | 47 |
| | | Gunungketur | 0,30 | 9 | 36 |
| | | | 0,63 | 19 | 83 |
| 9. | Gondomanan | Prawirodirjan | 0,67 | 18 | 61 |
| | | Ngupasan | 0,45 | 13 | 49 |
| | | | 1,12 | 31 | 110 |
| 10. | Ngampilan | Notoprajan | 0,37 | 8 | 50 |
| | | Ngampilan | 0,45 | 13 | 70 |
| | | | 0,82 | 21 | 120 |
| 11. | Wirobrajan | Patangpuluhan | 0,44 | 10 | 51 |
| | | Wirobrajan | 0,67 | 12 | 58 |
| | | Pakuncen | 0,65 | 12 | 56 |
| | | | 1,76 | 34 | 165 |
| 12. | Gedongtengen | Pringgokusuman | 0,46 | 22 | 85 |
| | | Sosromenduran | 0,50 | 14 | 54 |
| | | | 0,96 | 36 | 139 |
| 13. | Jetis | Bumijo | 0,58 | 13 | 57 |
| | | Gowongan | 0,46 | 13 | 52 |
| | | Cokrodiningratan | 0,66 | 11 | 57 |
| | | | 1,70 | 37 | 166 |
| 14. | Tegalrejo | Tegalrejo | 0,82 | 12 | 47 |
| | | Bener | 0,57 | 7 | 26 |
| | | Kricak | 0,82 | 13 | 61 |

| No | Kecamatan | Kelurahan | Luas Area (km ²) | Jumlah RW | Jumlah RT |
|----|-----------|------------|------------------------------|------------|--------------|
| | | Karangwaru | 0,70 | 14 | 56 |
| | | | 2,91 | 46 | 190 |
| | Jumlah | 45 | 32,50 | 616 | 2.532 |

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016)

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa bagian Selatan.

B. Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berikut ini merupakan kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lahan di Kota Yogyakarta (Ha)

| No | Kecamatan | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | | | |
|----|--------------|----------------------------|-------|--------|------|
| | | 0-2% | 2-15% | 15-40% | >40 |
| 1 | Mantrijeron | 244,43 | 12,18 | 4,38 | 0 |
| 2 | Kraton | 140,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mergangsan | 105,05 | 25,94 | 0 | 0 |
| 4 | Umbulharjo | 764,54 | 45,04 | 1,66 | 0,73 |
| 5 | Kotagede | 277,80 | 23,26 | 2,52 | 3,94 |
| 6 | Gondokusuman | 328,58 | 67,76 | 2,66 | 0 |
| 7 | Danurejan | 75,86 | 27,64 | 5,94 | 0,56 |
| 8 | Pakualaman | 63,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gondomanan | 105,92 | 6,08 | 0 | 0 |
| 10 | Ngampilan | 50,92 | 31,08 | 0 | 0 |
| 11 | Wirobrajan | 147,44 | 21,26 | 6,06 | 1,33 |
| 12 | Gedongtengen | 84,44 | 8,32 | 2,82 | 0,42 |
| 13 | Jetis | 148,32 | 20,74 | 0,48 | 0,46 |

| No | Kecamatan | Luas Kemiringan Lahan (Ha) | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 0-2% | 2-15% | 15-40% | >40 |
| 14 | Tegalrejo | 254,66 | 24,02 | 8,82 | 3,50 |
| Jumlah | | 2.890,38 | 313,32 | 35,34 | 10,94 |
| Persentase (%) | | 88,92 | 9,63 | 1,07 | 0,33 |

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta sebagian besar memiliki kemiringan lahan 0-2% dengan persentase mencapai 88,92% dari luas wilayah. Sementara 9,63% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,07 berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,33% berada pada kemiringan di atas 40%. Kemiringan lahan yang curam dan sangat curam berada di bantaran sungai.

Tabel 2.3
Kelas Ketinggian di Kota Yogyakarta (Ha)

| No | Kecamatan | Luas Ketinggian (Ha) | | | Jumlah |
|---------------|--------------|----------------------|--------------|----------|--------------|
| | | <100m | 100-199m | >200m | |
| 1 | Mantrijeron | 261 | 0 | 0 | 261 |
| 2 | Kraton | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 3 | Mergangsan | 202 | 29 | 0 | 231 |
| 4 | Umbulharjo | 607 | 206 | 0 | 813 |
| 5 | Kotagede | 302 | 5 | 0 | 307 |
| 6 | Gondokusuman | 0 | 399 | 0 | 399 |
| 7 | Danurejan | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 8 | Pakualaman | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 9 | Gondomanan | 42 | 70 | 0 | 112 |
| 10 | Ngampilan | 31 | 51 | 0 | 82 |
| 11 | Wirobrajan | 72 | 103 | 0 | 175 |
| 12 | Gedongtengen | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 13 | Jetis | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 14 | Tegalrejo | 0 | 291 | 0 | 292 |
| Jumlah | | 1.657 | 1.593 | 0 | 3.250 |

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016)

Kondisi ketinggian wilayah di Kota Yogyakarta berada pada ketinggian kurang dari 200 mdpl. Kondisi ketinggiannya dapat dibagi menjadi dua kelas ketinggian, yaitu 1.657 Ha wilayah berada pada ketinggian <100 mdpl dan 1.593 Ha berada pada ketinggian 100-199 m dpl. Ketinggian <100 mdpl berada di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Ngampilan, Wirobrajan dan Gondomanan. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketinggian 100-199 mdpl berada di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Jetis, Gedongtengen, dan Tegalrejo.

C. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi di Kota Yogyakarta dilihat dari suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan hari hujan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2015 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 366 mm. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 88 persen dan terendah pada bulan Oktober sebesar 77 persen. Tahun 2015 rata-rata tekanan udara sebesar 998,01 mb dan suhu udara rata-rata 26,13 °C.

Tabel 2.4
Kondisi Klimatologi di Kota Yogyakarta Tahun 2015

| No | Bulan | Suhu Udara (°C) | Kelembaban Udara (%) | Tekanan Udara (Mbs) | Curah Hujan (Mm) | Hari Hujan |
|----|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|
| 1 | Januari | 23,0-31,0 | 85 | 996,9 | 366 | 19 |
| 2 | Februari | 23,1-31,8 | 85 | 996,7 | 332 | 17 |
| 3 | Maret | 23,2-32,0 | 86 | 997,4 | 313 | 21 |
| 4 | April | 23,4-31,9 | 87 | 996,3 | 303 | 16 |
| 5 | Mei | 22,7-31,9 | 84 | 998,1 | 172 | 7 |
| 6 | Juni | 21,1-31,2 | 82 | 998,3 | 14 | 2 |
| 7 | Juli | 20,1-31,0 | 80 | 998,9 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 20,0-31,2 | 79 | 999,3 | 0 | 0 |
| 9 | September | 20,9-31,7 | 77 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 21,7-33,3 | 79 | 999,8 | 32 | 2 |
| 11 | November | 24,4-33,1 | 81 | 997,2 | 228 | 7 |
| 12 | Desember | 23,8-31,6 | 88 | 997,2 | 239 | 10 |

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016

D. Kondisi Geologi

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah lereng Gunung Merapi mempunyai jenis tanah regosol atau vulkanis muda. Formasi Geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen old andesit. Sebagian besar tanahnya adalah regosol. Terdapat tiga sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota.

E. Kondisi Hidrologi

Kota Yogyakarta dialiri oleh 3 sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. Daerah Alirang Sungai (DAS) yang ada di Kota Yogyakarta adalah DAS Opak Oyo. DAS Opak Oyo terdiri dari 3 Sub DAS antara lain Sub DAS Opak, Sub DAS Oyo I, dan Sub DAS Winongo.

F. Penggunaan Lahan

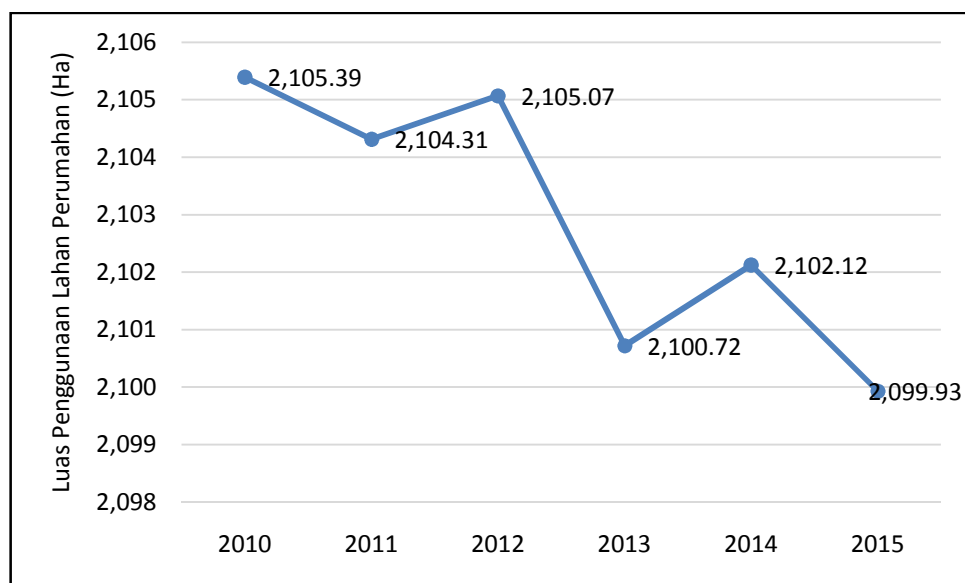
Penggunaan lahan dominan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2012-2016 adalah lahan perumahan. Namun jika dilihat dari grafiknya, luas lahan perumahan mengalami fluktuasi. Luas lahan perumahan dari 2.105,39 Ha pada tahun 2010, menjadi 2.099,93 Ha tahun 2015. Guna lahan pertanian mengalami penurunan, dari 118,59 Ha di tahun 2010 menjadi 102,77Ha di tahun 2015.

Tabel 2.5
Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2010-2015

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas Penggunaan Lahan (Ha) | | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Perumahan | 2.105,39 | 2.104,31 | 2.105,07 | 2.100,72 | 2.102,12 | 2.099,93 |
| 2. | Jasa | 279,37 | 279,64 | 279,59 | 280,57 | 281,06 | 281,33 |
| 3. | Perusahaan | 286,14 | 289,58 | 294,19 | 300,73 | 303,25 | 307,99 |
| 4. | Industri | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 |
| 5. | Pertanian | 118,59 | 115,96 | 111,81 | 109,15 | 105,60 | 102,77 |
| 6. | Non Produktif | 20,11 | 20,11 | 18,94 | 18,43 | 17,59 | 17,59 |
| 7. | Lain-lain | 388,16 | 388,16 | 388,16 | 388,16 | 388,16 | 388,16 |
| Jumlah | | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |

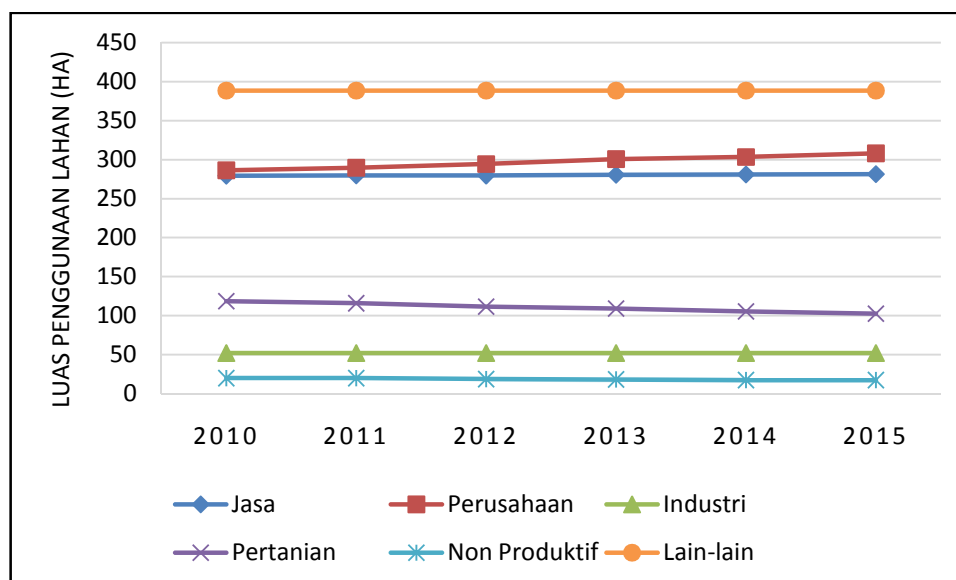
Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2011-2016)

Sementara untuk penggunaan lahan yang mengalami peningkatan adalah sektor jasa seperti kegiatan perdagangan. Peningkatan dari luas guna lahan jasa 279,37 Ha pada tahun 2010, menjadi 281,33 Ha pada tahun 2015. Peningkatan ini menggambarkan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa. Berikut grafik perkembangan guna lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015.



Gambar 2.1
Grafik Luas Penggunaan Lahan Perumahan
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017



Gambar 2.2
Grafik Luas Penggunaan Lahan berdasarkan Status Peruntukan Lahan
Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2019 antara lain:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - a. Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi :
 - 1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di Kecamatan Danurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan.
 - 2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo.
 - b. Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi :
 - 1) Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi di Seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perwujudan Sistem Transportasi
 - a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi :
 - 1) Jaringan arteri primer

Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yang terdiri atas Jaringan lintas lingkar luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan ring road lintas selatan.
 - 2) Jaringan jalan arteri sekunder
 - a) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas :

- i. Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo.
 - ii. Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.
 - b) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yang terdiri atas :
 - i. Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.
 - 3) Jembatan

Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.
3. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya
- a. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi :
 - 1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :
 - 1) Rehabilitasi jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - 2) Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - 3) Jaringan pelayanan *feeder*, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - c. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), meliputi :
 - 1) Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - d. Jaringan persampahan, meliputi :
 - 1) Penambahan lahan TPA Piyungan, yang berlokasi di Kabupaten Bantul.
 - 2) Pengadaan sarana truk sampah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - e. Air limbah, meliputi :
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

- 2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - 3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
- f. Air Minum, melalui :
- 1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - 2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - 3) Pembelian truk tangki air minum.

H. Wilayah Rawan Bencana

Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mempunyai kerentanan bencana cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi alam seperti geografis, geologis, dan iklim di Kota Yogyakarta yang dapat menjadi ancaman bencana. Beberapa ancaman bencana tersebut antara lain:

a. Gempa Bumi (Gempa Tektonik)

Di bawah bumi Kota Yogyakarta dan sekitarnya terdapat gerakan sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan sehingga mengakibatkan gempa bumi. Seperti pada tanggal 27 Mei 2006 Kota Yogyakarta diguncang gempa dengan kekuatan 5,8-6,2 SR (BMG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) yang disebabkan adanya gerakan sesar aktif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut sebagai Sesar Kali Opak. Pusat gempa diperkirakan dipinggir pantai selatan Yogyakarta atau bagian selatan Kabupaten Bantul dengan kedalaman 17 km -33 km di bawah permukaan tanah. Gempa tersebut dirasakan tidak hanya di wilayah Provinsi DIV tetapi juga beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan. Akibat gempa tersebut, beberapa wilayah khususnya di Kota Yogyakarta bagian Selatan yaitu Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, Mantrijeron, dan Gondokusuman mengalami kerusakan yang cukup parah baik kerusakan bangunan maupun infrastruktur lainnya.

b. Letusan Gunung Merapi (Gempa Vulkanik)

Kedekatan Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman menjadi faktor kerentanan penyebab bencana yang diklasifikasikan menjadi bencana ikutan. Karena dampak gempa letusan gunung tersebut bisa dirasakan dan menimbulkan korban di Kota Yogyakarta. Gunung Merapi merupakan gunung api aktif, bahkan teraktif di dunia karena periodisitas letusannya relatif pendek (3-7 tahun). Dalam kegiatannya, Gunung Merapi menunjukkan terjadinya guguran kubah lava yang terjadi

setiap hari. Jumlah dan letusannya bertambah sesuai tingkat kegiatannya. Volume guguran kubah lava biasa disebut dengan “wedhus gembel” atau awan panas. Pengalaman letusan 6 periode waktu yaitu tahun 1994, 1997, 1998, 2001, 2006, dan 2010 telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia.

Bahaya letusan gunung api terdiri atas bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung (awan panas). Sedangkan bahaya sekunder terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada purna letusan (lahar, kerusakan lahan pertanian/rumah). Tingkat bahaya dari suatu gunung api sangat tergantung dari kerapatan dari suatu letusan dan kepadatan penduduk yang bermukim di sekitar gunung api tersebut. Sehingga ancaman letusan Gunung Merapi menjadi konsekuensi masyarakat Kota Yogyakarta untuk tetap waspada akan bahaya Merapi.

c. Banjir

Banjir terjadi karena faktor alam maupun ulah tangan manusia. Faktor alam yang menjadi penyebab contohnya curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air sehingga luncuran air sangat deras, selain itu kurangnya daya serap tanah disebabkan banyaknya penebangan pohon. Sedangkan faktor ulah manusia contohnya banyak masyarakat yang masih buang sampah sembarangan di saluran air maupun sungai, selain itu juga bisa disebabkan kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya, bangunan-bangunan yang tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang.

Sementara itu, penyebab banjir di Kota Yogyakarta pada umumnya karena buruknya saluran drainase di beberapa lokasi. Menurut data survei Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ada 32 titik/lokasi genangan air terjadi di beberapa jalan kota dan daerah permukiman. Analisisnya mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo serta Sungai Belik yang mengalir di tengah kota, hal tersebut menjadi kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, setiap terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu cukup lama, bisa dipastikan permukiman di bantaran sungai dilanda banjir. Contohnya yang terjadi pada 22 April 2015, telah terjadi banjir mencapai tinggi 1,5 meter di Kampung Bintaran Kidul dan Bintaran Lor yang menyebabkan sedikitnya 200 keluarga mengungsi akibat dari luapan dari Sungai Code yang disebabkan hujan deras dengan waktu yang cukup lama.

Selain banjir karena hujan deras, sejak Gunung Merapi meletus tahun 2010, Sungai Code sebagai sungai yang berhulu di Sungai Boyong sudah

beberapa kali dialiri lahar dingin jika terjadi hujan deras di puncak merapi. Banjir lahar dingin juga kerap membanjiri permukiman dibantaran sungai jika hujan di puncak Merapi terjadi cukup deras dalam waktu yang lama.

d. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Kota Yogyakarta terjadi pada titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasa berada pada dinding sungai. Mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo. Ketiga sungai tersebut ditumbuhi kegiatan-kegiatan perumahan, sehingga dibutuhkan kewaspadaan masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi potensi bahaya tanah longsor. Terjadinya musibah banjir dan tanah longsor di Sungai Belik dan Sungai Gajah Wong pada tanggal 13 Desember 2006 dikarenakan oleh kondisi tanah yang labilm kelerengan yang curam, beban peruntukan lahan dan hujan lebat.

e. Kebakaran

Bencana kebakaran terjadi karena faktor alam berupa cuaca yang kering dan ulah manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Bencana kebakaran di Kota Yogyakarta terjadi umumnya di lokasi-lokasi permukiman yang padat penduduk. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 63 kejadian, sedangkan di tahun 2015 tercatat ada 49 kejadian. Penyebab kebakaran lebih banyak dikarenakan kelalaian manusia, sedangkan penyebab lainnya dikarenakan faktor teknis/listrik. Titik rawan kebakaran terjadi pada bangunan-bangunan perumahan warga dan bangunan industri, karena pada lokasi-lokasi tersebut mobilitas aktivitas manusia lebih tinggi dan tingkat kelalaiannya juga lebih tinggi.

f. Angin Puting Beliung

Angin puting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat ekstrim, biasanya terjadi pada musim hujan, sehingga terbentuk angin disertai putaran yang kencang dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Pada hari Minggu, 18 Februari 2007 telah terjadi angin puting beliung dengan kategori kecepatan angin antara Strong Gale dengan kecepatan 74-85 km/jam dan Storm dengan kecepatan 87-100 km/jam yang melanda Kecamatan Gondokusuman, Danurejan, Umbulharjo dan Pakualaman dengan radius bencana sekitar 1 km mengalami kerusakan yang cukup parah. Bencana tersebut telah mengakibatkan 1.182 orang mengalami luka ringan dan menjalani rawat jalan, sedangkan sebanyak 51 orang harus dibawa ke rumah sakit dengan rincian 44 orang menjalani rawat jalan dan 7 orang harus rawat inap. Selain itu, angin puting beliung juga merusak 1.255 rumah penduduk.

g. **Epidemi, Wabah Penyakit, dan Kejadian Luar Biasa**

Epidemi, wabah penyakit dan kejadian luar biasa merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar, epidemi, wabah penyakit maupun kejadian luar biasa dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita dan korban jiwa. Beberapa penyebaran penyakit dengan status kejadian luar biasa yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta dan sampai sekarang masih terus diwaspadai antara lain demam berdarah, campak, diare dan keracunan makanan.

2.1.1.2. Aspek Demografi

A. Struktur Penduduk

1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti kualitas pelayanan publik dan sebagainya.

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 mencapai 411.282 jiwa yang terdiri dari 200.595 laki-laki dan 210.687 perempuan. Tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah penduduk 0,004% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 409.487 jiwa. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2011 sampai 2016, jumlah penduduk tertinggi ada pada tahun 2011 yang mencapai 440.143 jiwa, sedangkan yang terendah ada di tahun 2013. Berikut ini data perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2011-2016.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2011-2016

| No | Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laju Pertumbuhan (%) |
|----|-------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| 1. | 2011 | 217.378 | 222.765 | 440.143 | -0,04 |
| 2. | 2012 | 210.468 | 217.123 | 427.591 | -0,03 |
| 3. | 2013 | 198.892 | 207.768 | 406.660 | -0,05 |
| 4. | 2014 | 202.296 | 211.640 | 413.936 | 0,02 |
| 5. | 2015 | 199.724 | 209.763 | 409.487 | -0,01 |
| 6. | 2016 | 200.595 | 210.687 | 411.282 | 0,004 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

2. Kepadatan

Kepadatan penduduk dihitung untuk mengetahui rata-rata jumlah penduduk dalam 1 km. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, kepadatan penduduk mencapai 13.543 jiwa/km², kemudian mengalami penurunan hingga 12.513 jiwa/km² pada tahun 2013. Namun kembali mengalami peningkatan hingga 12.736 jiwa/km² pada tahun 2014 dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 12.600 jiwa/km². Pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 12.655 jiwa/km².

Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2011-2016

| No | Tahun | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) |
|----|-------|---------------------------------|------------------------|--|
| 1. | 2011 | 32,5 | 440.143 | 13.543 |
| 2. | 2012 | 32,5 | 427.591 | 13.157 |
| 3. | 2013 | 32,5 | 406.660 | 12.513 |
| 4. | 2014 | 32,5 | 413.936 | 12.736 |
| 5. | 2015 | 32,5 | 409.487 | 12.600 |
| 6. | 2016 | 32,5 | 411.282 | 12.655 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

3. Distribusi (kepadatan penduduk per kecamatan)

Distribusi penduduk di Kota Yogyakarta tersebar ke dalam 14 kecamatan. Pada tahun 2016, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Ngampilan dengan kepadatan mencapai 22.817 jiwa/km². Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk di Kecamatan Ngampilan telah mengalami banyak penurunan, kepadatan penduduk tahun 2011 mencapai 24.711 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Umbulharjo dengan kepadatan penduduk hanya 8.424 jiwa/km². Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan ini sudah mengalami fluktuasi, pada tahun 2011 kepadatan penduduk mencapai 8.532 jiwa/km². Berikut data kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Yogyakarta tahun 2011-2016.

Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2016

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Tegalrejo | 2,91 | 13.800 | 13.222 | 12.481 | 12.703 | 12.585 | 12.609 |
| 2 | Jetis | 1,70 | 17.809 | 16.810 | 16.318 | 16.435 | 16.147 | 16.074 |

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 3 | Gondokusuman | 3,99 | 11.922 | 11.638 | 10.607 | 10.775 | 10.468 | 10.543 |
| 4 | Danurejan | 1,10 | 21.488 | 21.202 | 19.191 | 19.580 | 19.366 | 19.296 |
| 5 | Gedongtengen | 0,96 | 23.001 | 22.394 | 21.644 | 21.935 | 21.389 | 21.377 |
| 6 | Ngampilan | 0,82 | 24.771 | 23.268 | 22.706 | 22.977 | 22.763 | 22.817 |
| 7 | Wirobrajan | 1,76 | 16.605 | 15.995 | 15.468 | 15.773 | 15.735 | 15.866 |
| 8 | Mantrijeron | 2,61 | 14.402 | 14.431 | 13.392 | 13.647 | 13.387 | 13.534 |
| 9 | Kraton | 1,40 | 17.243 | 16.599 | 15.824 | 16.073 | 15.740 | 15.704 |
| 10 | Gondomanan | 1,12 | 15.036 | 14.472 | 13.563 | 13.758 | 13.463 | 13.472 |
| 11 | Pakualaman | 0,63 | 18.667 | 17.919 | 17.113 | 17.219 | 16.917 | 17.044 |
| 12 | Mergangsan | 2,31 | 14.660 | 14.244 | 13.639 | 13.859 | 13.781 | 13.830 |
| 13 | Umbulharjo | 8,12 | 8.532 | 8.381 | 8.121 | 8.329 | 8.360 | 8.424 |
| 14 | Kotagede | 3,07 | 10.884 | 10.650 | 10.447 | 10.689 | 10.757 | 10.855 |
| Kota Yogyakarta | | 32,5 | 14.082 | 13.543 | 13.157 | 12.513 | 12.600 | 12.655 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-besa. Berikut komposisi penduduk menurut usia tahun 2015.

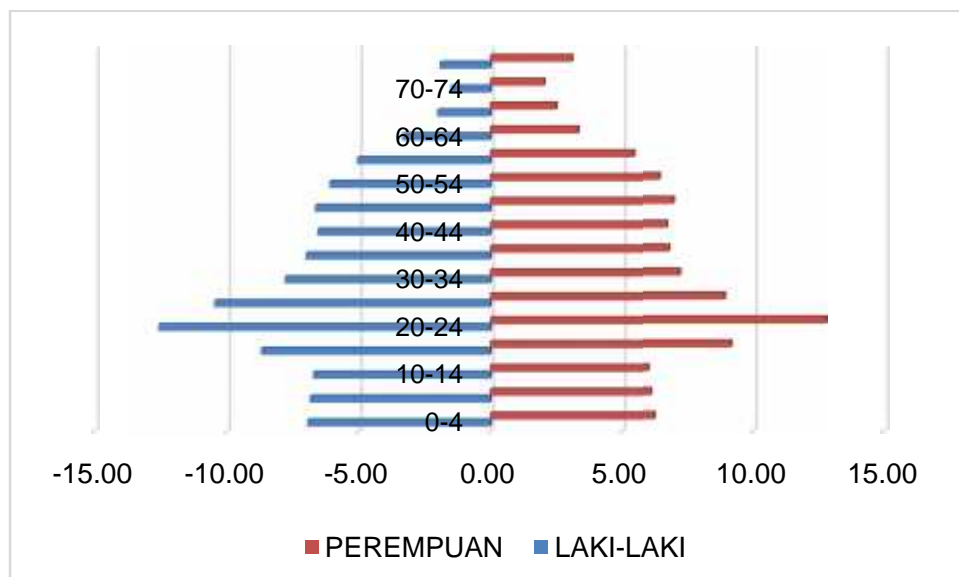
Tabel 2.9
Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2015

| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | 0-4 | 13.931 | 13.280 | 27.211 |
| 2. | 5-9 | 13.744 | 12.994 | 26.738 |
| 3. | 10-14 | 13.493 | 12.776 | 26.269 |
| 4. | 15-19 | 17.474 | 19.389 | 36.863 |
| 5. | 20-24 | 25.287 | 27.000 | 52.287 |
| 6. | 25-29 | 21.033 | 18.889 | 39.922 |
| 7. | 30-34 | 15.649 | 15.309 | 30.958 |
| 8. | 35-39 | 14.039 | 14.437 | 28.476 |
| 9. | 40-44 | 13.154 | 14.264 | 27.418 |
| 10. | 45-49 | 13.342 | 14.813 | 28.155 |
| 11. | 50-54 | 12.245 | 13.688 | 25.933 |

| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|-----------|--------|
| 12. | 55-59 | 10.140 | 11.529 | 21.669 |
| 13. | 60-64 | 6.686 | 7.073 | 13.759 |
| 14. | 65-69 | 4.027 | 5.295 | 9.322 |
| 15. | 70-74 | 2.996 | 4.329 | 7.325 |
| 16. | 75+ | 3.842 | 6.557 | 10.399 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

Berdasarkan data yang ada, penduduk dengan kelompok usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun mempunyai jumlah yang paling tinggi di Kota Yogyakarta. Jumlah menurut kelompok usia 20-24 tahun mencapai 52.287 jiwa dan usia 25-29 tahun mencapai 39.922 jiwa. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah 41,94%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.



Gambar 2.3
Grafik Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2015

Sumber: Hasil Analisis, 2017

B. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Yogyakarta, mengalami fluktuasi kenaikan maupun penurunan, baik di migrasi masuk maupun

migrasi keluar. Pada tahun 2015, terdapat 11.781 jiwa yang masuk ke Kota Yogyakarta, dan 10.634 jiwa meninggalkan Kota Yogyakarta.

Tabel 2.10
Migrasi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

| No | Jenis Mutasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | Migrasi Masuk | 9.341 | 10.591 | 5.318 | 5.165 | 9.293 | 11.781 |
| 2. | Migrasi Keluar | 10.258 | 9.231 | 8.003 | 8.814 | 8.798 | 10.634 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usaha/lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah.

Tabel 2.11
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

| No | Lapangan Pekerjaan | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | <i>Agriculture</i> (Pertanian) | Jiwa | 1.062 | 756 | 471 | 1.314 | 3.379 |
| 2 | <i>Manufacture</i> (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, air dan Bangunan/ Kontruksi) | Jiwa | 55.881 | 30.897 | 31.753 | 40.462 | 34.726 |
| 3 | <i>Service</i> (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan) | Jiwa | 154.450 | 169.987 | 162.512 | 174.212 | 184.213 |
| Jumlah | | Jiwa | 211.393 | 201.640 | 194.736 | 216.168 | 222.318 |

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2012-2016
Statistik Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016
Olahan 2017

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2011 – 2015 di kota Yogyakarta kelompok usaha service (perdagangan, angkutan dan jasa) sangat dominan dalam menyerap tenaga kerja. Sementara peringkat kedua dalam penyerapan tenaga kerja terjadi pada kelompok lapangan usaha manufacture (industri, listrik, gas, air dan konstruksi) dan sisanya bekerja di sektor pertanian.

D. Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan

program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Berdasarkan data yang ada, terdapat 7 (tujuh) agama yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diantaranya Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan. Pada tahun 2015, mayoritas penduduk di Kota Yogyakarta memeluk agama islam, yaitu sebesar 82,72% penduduk, kemudian diikuti pemeluk agama Katholik sebesar 10,36% dan pemeluk Kristen sebesar 6,46%. Berikut data jumlah penduduk menurut agama di Kota Yogyakarta Tahun 2015.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2015

| No | Kecamatan | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya |
|-------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Mantrijeron | 29.217 | 1.386 | 4.228 | 30 | 77 | 2 |
| 2. | Kraton | 18.752 | 576 | 2.682 | 24 | 1 | 1 |
| 3. | Mergangsan | 26.864 | 1.945 | 2.902 | 57 | 62 | 3 |
| 4. | Umbulharjo | 60.097 | 2.862 | 4.758 | 57 | 62 | 3 |
| 5. | Kotagede | 30.955 | 910 | 1.104 | 32 | 24 | 0 |
| 6. | Gondokusuman | 31.405 | 5.304 | 4.824 | 111 | 116 | 9 |
| 7. | Danurejan | 17.570 | 1.365 | 2.272 | 22 | 70 | 4 |
| 8. | Pakualaman | 8.337 | 684 | 1.572 | 31 | 34 | 0 |
| 9. | Gondomanan | 11.048 | 1.735 | 2.063 | 14 | 218 | 0 |
| 10. | Ngampilan | 15.938 | 1.012 | 1.615 | 29 | 72 | 0 |
| 11. | Wirobrajan | 22.506 | 1.174 | 3.913 | 39 | 60 | 1 |
| 12. | Gedongtengen | 15.753 | 1.700 | 2.833 | 28 | 215 | 4 |
| 13. | Jetis | 20.593 | 2.686 | 3.967 | 24 | 168 | 12 |
| 14. | Tegalrejo | 29.692 | 3.111 | 3.706 | 34 | 72 | 6 |
| Jumlah | | 338.727 | 26.450 | 42.439 | 532 | 1.296 | 43 |
| Persentase | | 82,72% | 6,46% | 10,36% | 0,13% | 0,32% | 0,01% |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pertumbuhan PDRB

Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik di masa mendatang.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2015 yaitu sebesar 22.412.175,7 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,16% atau meningkat sebesar 1,10 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2012-2015, PDRB Kota Yogyakarta secara konsisten menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,33%. Namun, persentase pertumbuhan PDRB selama kurun waktu 2012-2015 cenderung menurun.

Tabel 2.13
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Lapangan Usaha | Nilai PDRB (Juta Rupiah) | | | |
|-----|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** |
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 35.709,1 | 36.100,0 | 35.733,8 | 36.052,7 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 837,1 | 839,0 | 850,0 | 851,2 |
| C | Industri Pengolahan | 2.630.976,6 | 2.813.952,7 | 2.943.834,5 | 2.995.839,5 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 45.056,7 | 47.599,0 | 49.150,8 | 48.689,7 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 30.166,8 | 30.712,0 | 31.963,4 | 32.797,8 |
| F | Konstruksi | 1.526.571,8 | 1.600.097,5 | 1.674.189,0 | 1.740.508,1 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.326.260,7 | 1.407.238,6 | 1.468.894,1 | 1.552.644,8 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 785.335,2 | 815.841,3 | 838.086,9 | 870.914,5 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.183.269,6 | 2.320.365,4 | 2.450.064,8 | 2.596.749,8 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 2.654.507,8 | 2.779.291,4 | 2.900.953,3 | 3.041.921,6 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.077.853,5 | 1.196.258,9 | 1.275.249,8 | 1.374.111,3 |
| L | Real Estate | 1.782.655,3 | 1.848.546,3 | 1.973.548,8 | 2.089.601,9 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 238.288,9 | 245.485,7 | 259.521,0 | 278.211,9 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 1.729.732,9 | 1.813.729,6 | 1.921.203,7 | 2.019.480,1 |

| No | Lapangan Usaha | Nilai PDRB (Juta Rupiah) | | | |
|-------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** |
| | Wajib | | | | |
| P | Jasa Pendiidkan | 1.889.249,1 | 1.960.166,2 | 2.088.605,8 | 2.231.519,7 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 721.038,9 | 766.206,6 | 818.611,5 | 879.118,7 |
| S,T,U | Jasa Lainnya | 531.565,1 | 557.127,4 | 581.682,5 | 623.162,3 |
| | PDRB Kota Yogyakarta ADHK | 19.189.074,8 | 20.239.557,7 | 21.312.143,8 | 22.412.175,7 |
| | PDRB Provinsi DIY ADHK | 71.702.449 | 75.627.450 | 79.532.277 | 83.461.574 |

Keterangan:*) sementara **) sangat sementara

Sumber:

1. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2015)*
2. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016 (BPS DIY, 2016)*

Berdasarkan PDRB ADHK tahun dasar 2010, sektor industri pengolahan; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan tiga sektor dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi adalah yang terbesar, yaitu mencapai 3,04 triliun rupiah atau sebesar 13,57% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 13,37% atau 2,99 triliun rupiah di tahun 2015. Selanjutnya, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menghasilkan PDRB sebesar 2,59 triliun rupiah atau 11,6% dari total PDRB.

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2012-2015 didominasi sektor-sektor tersier. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi yang sangat kecil yaitu sebesar 36,05 miliar atau 0,16% dari total PDRB di tahun 2015. Kontribusi sektor primer juga terus menurun dari tahun 2012-2015. Hal ini wajar apabila dikaitkan dengan karakteristik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dan menjadi pusat perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.14
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Lapangan Usaha | Pertumbuhan PDRB (%) | | | | Rata-rata pertumbuhan PDRB per Tahun (%) |
|----|------------------------------------|----------------------|------|-------|--------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | |
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,66 | 1,09 | -1,01 | 0,89 | 0,41 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,70 | 0,23 | 1,31 | 0,14 | 0,60 |
| C | Industri Pengolahan | -2,87 | 6,95 | 4,62 | 1,77 | 2,62 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 10,32 | 5,64 | 3,26 | -0,94 | 4,57 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan | 3,16 | 1,81 | 4,07 | 2,61 | 2,91 |

| No | Lapangan Usaha | Pertumbuhan PDRB (%) | | | | Rata-rata pertumbuhan PDRB per Tahun (%) |
|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | |
| | Sampah, Limbah dan Daur Ulang | | | | | |
| F | Konstruksi | 4,70 | 4,82 | 4,63 | 3,96 | 4,53 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,32 | 6,11 | 4,38 | 5,70 | 5,63 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,75 | 3,88 | 2,73 | 3,92 | 3,07 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,18 | 6,28 | 5,59 | 5,99 | 6,26 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 10,89 | 4,70 | 4,38 | 4,86 | 6,21 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,16 | 10,99 | 6,60 | 7,75 | 7,38 |
| L | Real Estate | 7,39 | 3,70 | 6,76 | 5,88 | 5,93 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 8,95 | 3,02 | 5,72 | 7,20 | 6,22 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,27 | 4,86 | 5,93 | 5,12 | 5,80 |
| P | Jasa Pendidikan | 5,81 | 3,75 | 6,55 | 6,84 | 5,74 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,08 | 6,26 | 6,84 | 7,39 | 7,14 |
| S,T,U | Jasa Lainnya | 5,33 | 4,81 | 4,41 | 7,13 | 5,42 |
| Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta | | 5,40 | 5,47 | 5,30 | 5,16 | 5,33 |
| Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY | | 5,37 | 5,47 | 5,16 | 4,94 | 5,24 |

Keterangan:

*) sementara **) sangat sementara

Sumber:

1. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016, diolah)*
2. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016 (BPS DIY, 2016, diolah)*

Sementara itu, pada tahun 2015, berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, hanya sektor pengadaan listrik dan gas yang pertumbuhannya negatif, yaitu sebesar -0,94%. Pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas cenderung menurun pada tahun 2012-2015. Selanjutnya, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi, yaitu sebesar 7,38%. Sebaliknya, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terkecil yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 0,41%. Sementara itu, dari 3 sektor yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Yogyakarta, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi (6,26% per tahun), disusul oleh sektor informasi dan komunikasi (6,21% per tahun), dan sektor industri pengolahan (2,62% per tahun). Meski kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Yogyakarta cukup besar, tetapi rata-rata pertumbuhannya tergolong rendah dibanding sektor lain.



Gambar 2.4
Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015 Berdasarkan PDRB ADHK 2010

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Secara keseluruhan, PDRB Kota Yogyakarta di tahun 2015 menyumbang sekitar 26,85% dari PDRB Provinsi DIY, sedangkan 73,15% sisanya disumbang oleh empat kabupaten lain di DIY. Pertumbuhan rata-rata nilai PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2015 adalah sebesar sebesar 5,33%. Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta tersebut lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi DIY, yaitu sebesar 5,24% setiap tahunnya.

2. Laju Inflasi Kota Yogyakarta

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Pada periode tahun 2012-2016, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,62% per tahun dan kecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi para tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini sejalan dengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional, inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2016. Meski demikian, nilai inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional.

Tabel 2.15
Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2012-2016

| No | Kelompok Pengeluaran | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|--------------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Bahan Makanan | % | 8,10 | 12,31 | 7,70 | 4,64 | 4,77 | -12,40 |
| 2 | Makanan Jadi, Minuman dan Rokok | % | 6,90 | 8,15 | 2,95 | 5,04 | 3,84 | -13,63 |
| 3 | Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar | % | 2,99 | 5,18 | 8,92 | 4,41 | 1,64 | -13,94 |
| 4 | Sandang | % | 3,56 | 0,00 | 3,61 | 5,87 | 3,04 | -3,87 |
| 5 | Kesehatan | % | 1,93 | 3,08 | 5,49 | 4,21 | 4,17 | 21,24 |
| 6 | Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | % | 1,43 | 3,17 | 2,37 | 1,36 | 2,40 | 13,82 |
| 7 | Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan | % | 1,30 | 10,45 | 9,36 | 2,51 | -2,06 | 12,00 |
| Inflasi Kota Yogyakarta | | % | 4,31 | 7,32 | 6,59 | 3,09 | 2,29 | -14,62 |
| Inflasi Nasional | | % | 4,30 | 8,38 | 8,36 | 3,35 | 3,02 | -8,46 |

Sumber : Data Perekonomi and Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2012-2015 (Bank Indonesia 2012-2015); Statistik Ekonomi Keuangan Daerah DIY terbitan BI Vol.18 No.12 Tahun 2016

Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2012-2016, penyumbang nilai inflasi tertinggi pada setiap tahun berbeda-beda. Kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang nilai inflasi terbesar pada tahun 2012, 2013, dan 2016. Pada tahun 2014, penyumbang nilai inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, kelompok pengeluaran sandang adalah penyumbang terbesar nilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2015.

3. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB per kapita Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2012-2015 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,05% per tahun. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Kota Yogyakarta yaitu sebesar 51,65 juta rupiah dan meningkat menjadi 65,15 juta rupiah di tahun 2015.

Tabel 2.16
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Lapangan Usaha | PDRB per Kapita (Juta Rupiah) | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|---|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,1008 | 0,1076 | 0,1088 | 0,1091 | 2,67 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,0022 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0025 | 4,35 |
| C | Industri Pengolahan | 7,1065 | 7,8542 | 8,5944 | 8,8638 | 7,64 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,0916 | 0,0867 | 0,0892 | 0,0920 | 0,15 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,0804 | 0,0859 | 0,0967 | 0,1019 | 8,22 |
| F | Konstruksi | 4,2365 | 4,613 | 4,9222 | 5,2680 | 7,53 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,6849 | 4,0285 | 4,3617 | 4,6796 | 8,29 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2,0755 | 2,2309 | 2,4812 | 2,6545 | 8,55 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,1551 | 7,0553 | 7,7936 | 8,6041 | 11,81 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 6,5029 | 6,6017 | 6,562 | 6,7830 | 1,42 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,1101 | 3,5916 | 3,9744 | 4,3312 | 11,67 |
| L | Real Estate | 4,8535 | 5,1597 | 5,6537 | 6,1038 | 7,94 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,6165 | 0,6123 | 0,6637 | 0,7175 | 5,19 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,8146 | 5,366 | 5,9089 | 6,4959 | 10,50 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,8761 | 5,0129 | 5,5227 | 6,1435 | 8,01 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,9503 | 2,0645 | 2,2173 | 2,4634 | 8,10 |
| S,T,U | Jasa Lainnya | 1,3919 | 1,4967 | 1,6144 | 1,7396 | 7,72 |
| PDRB per Kapita Kota Yogyakarta ADHK | | 51,650 | 55,970 | 60,567 | 65,154 | 8,05 |
| PDRB per Kapita Provinsi DIY ADHK | | 21,745 | 23,624 | 25,693 | 22,7 | 1,44 |

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut lapangan Usaha 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016)

Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi DIY. Pada tahun 2015, nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta hampir tiga kali lipat dari PDRB per kapita DIY yang hanya sebesar 22,70 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Kota Yogyakarta juga lebih tinggi (8,05% per tahun) dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Provinsi DIY (1,44% per tahun). Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta dibandingkan dengan Provinsi DIY didukung oleh karakteristik wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya jauh lebih beragam dan kompleks. Sedangkan PDRB per kapita Provinsi DIY

dibentuk oleh kelima kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak semuanya lebih baik dari Kota Yogyakarta.

4. Indeks Gini

Dari sudut pandang ekonomi, ketimpangan perekonomian penduduk dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih mendetil:

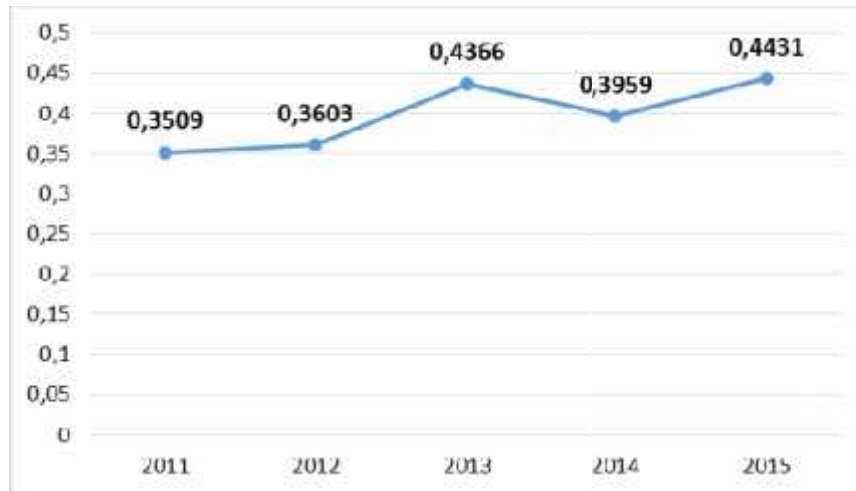
1. Indeks Gini < 3 = Ketimpangan rendah
2. 3=< Indeks Gini <=5 = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini >5 = Ketimpangan tinggi

Tabel 2.17
Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

| No | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (% tahun) |
|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 | Indeks Gini | 0.3603 | 0.4366 | 0.3959 | 0,4431 | 7,14 |
| 2 | Kriteria Ketimpangan | Moderat | Moderat | Moderat | Moderat | |

Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2014-2016)

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Secara umum, indeks gini Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2012-2015 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14% per tahun. Semakin meningkatnya indeks gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin besar, yaitu peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah.



Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Selain Indeks Gini, terdapat indikator lain yang digunakan untuk melihat gambaran ketimpangan pendapatan penduduk, indikator tersebut adalah pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Dalam versi Bank Dunia, pendapatan penduduk dikategorikan ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu kelompok 40% berpendapatan terendah, 40% berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaran bagian pendapatan yang dapat dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan
2. Ketimpangan moderat → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12-17% jumlah pendapatan
3. Ketimpangan tinggi → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan.

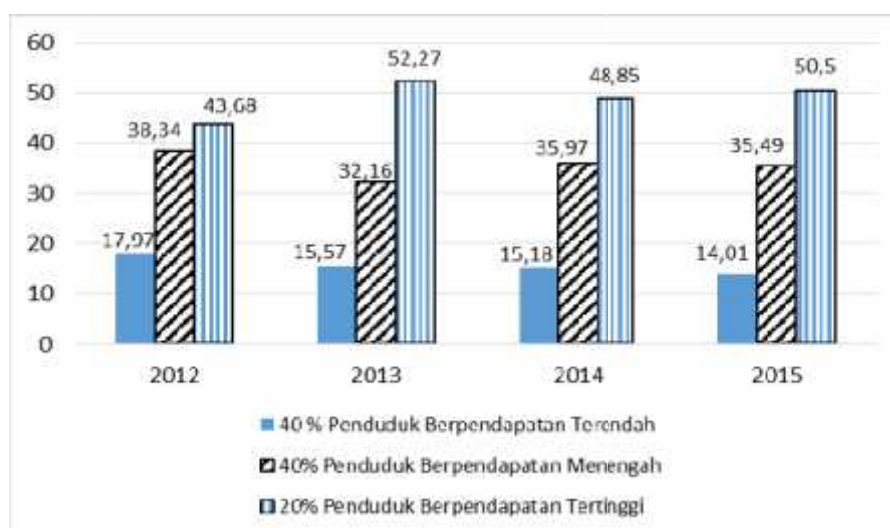
Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai apabila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menikmati lebih dari sama dengan 17% dari total pendapatan yang ada.

Tabel 2.18
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Kelompok Penduduk | Persentase Pendapatan (%) | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 40 % Penduduk Berpendapatan Terendah | 17,97 | 15,57 | 15,18 | 14,01 | -7,96 |
| 2 | 40% Penduduk Berpendapatan Menengah | 38,34 | 32,16 | 35,97 | 35,49 | -2,54 |
| 3 | 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi | 43,68 | 52,27 | 48,85 | 50,50 | 4,95 |
| Kriteria Ketimpangan | | Rendah | Moderat | Moderat | Moderat | |

*Sumber :Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
 (BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016 diolah)*

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah memiliki persentase pendapatan yang menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata -7,96% per tahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan terendah yaitu sebesar 17,97%. Namun, di tahun 2013 persentase tersebut menurun menjadi 15,57%. Jumlah tersebut terus menurun sampai tahun 2014 menjadi 15,18% dan menjadi 14,01% di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta cenderung meningkat. Pertumbuhan penduduk dengan penghasilan 20% tertinggi lebih cepat dari pertumbuhan penduduk dengan penghasilan 40% terendah. Itu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah.



Gambar 2.6
Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

6. Indeks Ketimpangan Williamson

IndeksWilliamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada data PDRB per kapita masing-masing daerah dan jumlah penduduknya. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. $IW < 0,4$ artinya tingkat ketimpangan rendah.
- b. $0,4 < IW < 0,5$ artinya tingkat ketimpangan moderat.
- c. $IW > 0,5$ artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 itu artinya semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Tabel 2.19
PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Kecamatan | Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (juta rupiah) | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Mantrijeron | 9,21 | 9,59 | 10,05 | 10,24 |
| Kraton | 8,97 | 9,40 | 10,05 | 10,31 |
| Mergangsan | 9,98 | 10,44 | 11,08 | 11,36 |
| Umbulharjo | 17,09 | 17,75 | 18,11 | 18,13 |
| Kotagede | 8,21 | 8,44 | 8,50 | 8,50 |
| Gondokusuman | 23,46 | 24,51 | 25,94 | 26,64 |
| Danurejan | 32,02 | 34,35 | 36,55 | 37,77 |
| Pakualaman | 8,11 | 8,50 | 9,08 | 9,35 |
| Gondomanan | 40,62 | 42,74 | 44,76 | 45,91 |
| Ngampilan | 8,011 | 8,39 | 8,77 | 8,94 |
| Wirobrajan | 13,93 | 14,54 | 15,33 | 15,71 |
| Gedongtengen | 14,46 | 15,40 | 16,07 | 16,44 |
| Jetis | 20,30 | 21,44 | 23,06 | 23,82 |
| Tegalrejo | 8,98 | 9,30 | 9,78 | 9,94 |
| Rata-Rata PDRB per Kapita Kota Yogyakarta | 15,61 | 16,33 | 17,09 | 18,08 |

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
(BPS Kota Yogyakarta, 2016)

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2012-2015

| No | Kecamatan | Jumlah penduduk (jiwa) | | | |
|----|-------------|------------------------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Mantrijeron | 31.695 | 32.383 | 31.901 | 32.791 |

| No | Kecamatan | Jumlah penduduk (jiwa) | | | |
|----|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2 | Kraton | 17.561 | 17.874 | 17.217 | 17.547 |
| 3 | Mergangsan | 29.448 | 29.965 | 29.537 | 30.275 |
| 4 | Umbulharjo | 78.831 | 81.073 | 83.031 | 86.580 |
| 5 | Kotagede | 32.052 | 32.986 | 33.811 | 35.285 |
| 6 | Gondokusuman | 45.526 | 46.335 | 45.697 | 46.840 |
| 7 | Danurejan | 18.433 | 18.764 | 18.454 | 18.905 |
| 8 | Pakualaman | 9.366 | 9.533 | 9.164 | 9.336 |
| 9 | Gondomanan | 13.097 | 13.327 | 13.171 | 13.507 |
| 10 | Ngampilan | 16.402 | 16.696 | 16.429 | 16.829 |
| 11 | Wirobrajan | 24.969 | 25.411 | 25.039 | 25.662 |
| 12 | Gedongtengen | 17.273 | 17.583 | 17.549 | 18.042 |
| 13 | Jetis | 23.570 | 23.992 | 23.331 | 23.834 |
| 14 | Tegalrejo | 35.789 | 36.757 | 36.136 | 37.271 |
| | Jumlah | 394.012 | 402.679 | 400,467 | 412.704 |

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2012-2016
(BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016)

Ketimpangan di Kota Yogyakarta berdasarkan nilai Indeks Williamson makin meningkat dari tahun 2012-2014, tetapi sedikit menurun di tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson selama 2012-2015 yaitu sebesar -0,07% per tahun. Meski pertumbuhannya tergolong rendah, ketimpangan di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2015 tergolong kategori tinggi. Hal ini dikarenakan selisih nilai PDRB per kapita antara kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi dan kecamatan dengan PDRB per kapita terendah cukup jauh. Pada tahun 2015, Kecamatan Gondomanan menjadi kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 45,91 juta rupiah, sementara Kecamatan Kotagede berada di posisi terendah dengan PDRB per kapita sebesar 8,50 juta rupiah.

Tabel 2.21
Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Indikator | Indeks Williamson (%) | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Indeks Williamson | 0,506 | 0,513 | 0,517 | 0,505 | -0,07 |
| Kategori Ketimpangan | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | |

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kota Yogyakarta yang maju secara ekonomi, namun ternyata masih terdapat daerah-daerah yang relatif

tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi sehingga ketimpangan antar daerah tidak semakin melebar.

7. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Selama kurun waktu 2012-2016, perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2012, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu sekitar 37 ribu jiwa (9,38% dari total penduduk Kota Yogyakarta). Pada tahun 2014-2015, persentase dan jumlah penduduk miskin sempat turun menjadi 8,61%. Namun, di tahun 2016, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan naik kembali menjadi 8,75% atau setara 35,99 ribu jiwa.

Tabel 2.22
Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

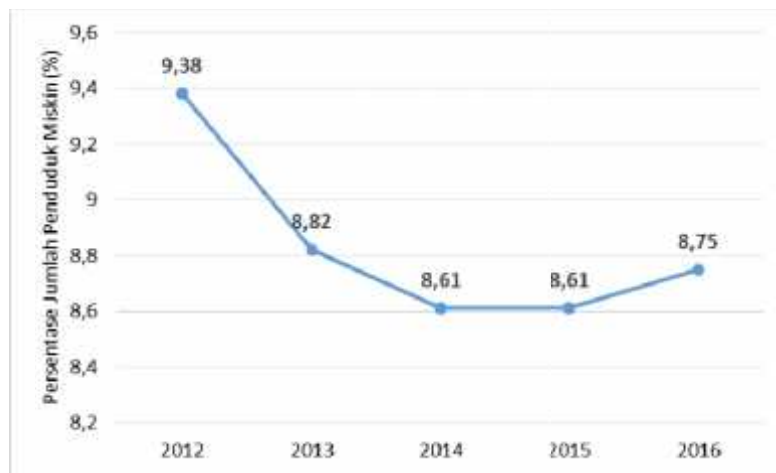
| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kota Yogyakarta | | | | | | |
| Garis Kemiskinan | Rupiah | 333.232 | 353.602 | 366.520 | | |
| Jumlah penduduk miskin | 000 Jiwa | 37 | 34 | 34 | 35,26 | 35,99 |
| Persentase Jumlah Penduduk Miskin | (%) | 9,38 | 8,82 | 8,61 | 8,61 | 8,75 |
| Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan | (%) | 90,62 | 91,18 | 91,39 | 91,39 | 91,25 |
| Provinsi DIY | | | | | | |
| Garis Kemiskinan | Rupiah | 270.110 | 303.843 | 321.056 | 347.721 | 360.169 |
| Jumlah penduduk miskin | 000 jiwa | 566 | 542 | 533 | 485,56 | 488,83 |
| Persentase Jumlah Penduduk Miskin | (%) | 15,88 | 15,03 | 14,55 | 13,16 | 13,10 |
| Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan | (%) | 84,12 | 84,97 | 85,45 | 86,84 | 86,90 |

Sumber :

1. *DIY dalam Angka 2012, 2013 dan 2014 (BPS Provinsi DIY, 2015); Profil Kemiskinan DIY September 2015 dan 2016 (BPS Provinsi DIY, 2016-2017)*

Dibandingkan dengan Provinsi DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Pada tahun 2012, persentase penduduk miskin Provinsi DIY mencapai 15,88% sementara pada tahun 2016

adalah sebesar 13,10%. Meskipun pada tahun 2016, persentase penduduk miskinnya lebih rendah dari tahun 2012, tetapi fluktuasi jumlah penduduk miskin selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berhasil dan perlu dievaluasi lagi.



Gambar 2.7
Grafik Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin tahun 2012-2016
 Sumber: Hasil Olahan, 2017

8. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kriminalitas sebagai variabel yang penting untuk diperhatikan. Di satu sisi kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi terkait dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat juga menjadi visualisasi tidak sejahteranya masyarakat. Jadi ada hubungan *reciprocal* antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Yogyakarta. Angka tersebut harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Berikut adalah angka kriminalitas Kota Yogyakarta pada tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2.23
Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Tindak Kriminal | Kasus | 457 | 2.078 | 1.956 | 2002 | 1640 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 |
| Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk | Kasus | 10,69 | 51,1 | 47,25 | 48,89 | 39,88 |

Sumber : Poltabes Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016

Angka kriminalitas tersebut meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Angka angka yang tertera menunjukkan tindak kriminalitas yang

fluktuatif sejak tahun 2012 hingga 2016, pernah menurun drastis pada tahun 2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara itu menurun lagi pada tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat kembali pada angka 2002 kasus. Akan tetapi perbedaan angka kriminal yang cukup tajam dalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan cara perhitungan. Perhitungan angka kriminalitas di tahun 2012 berbeda dengan cara perhitungan di tahun 2013, 2014, dan 2015. Pada tahun 2016 angka kriminalitas mampu ditekan dengan menurunnya jumlah tindak kriminal menjadi 1640 kasus. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan perlu dilakukan terus menerus untuk menekan angka kriminalitas.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Merujuk pada pengertian menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu kabupaten/kota maka, semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Berikut adalah tabel Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

Tabel 2.24
Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

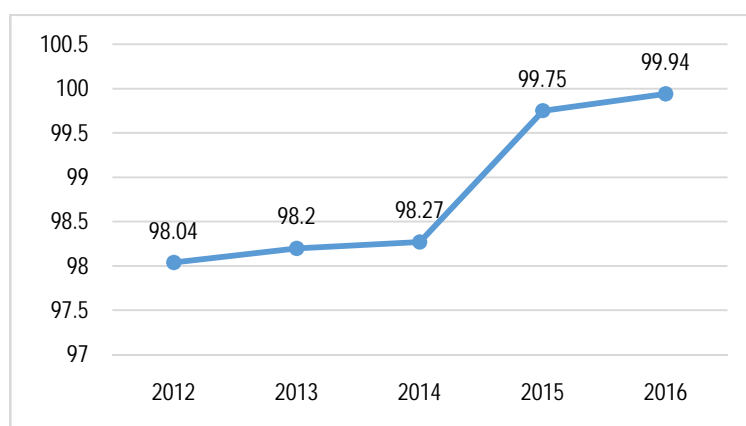
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|-------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Angka Melek Huruf | Persen | 98,04 | 98,2 | 98,27 | 99,75 | 99,94 | 0,48 |

Sumber :

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas, pertumbuhan rerata angka melek huruf dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 0,48%. Persentase angka melek huruf di Kota Yogyakarta sudah berada dalam kategori baik karena dalam kurun waktu 2012-2016 grafik persentase cenderung mengalami peningkatan. Sebagaimana yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya, bahwa Angka Melek Huruf menggambarkan kemampuan warga dalam

membaca dan menulis, sehingga dari data yang didapat pada tahun 2016 hampir seluruh warga kota Yogyakarta mampu membaca dan menulis. Persentase angka melek huruf yang meningkat tersebut diiringi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik.



Gambar 2.8
Grafik Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut sudah cukup baik. Berikut ini merupakan tabel angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 2.25
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

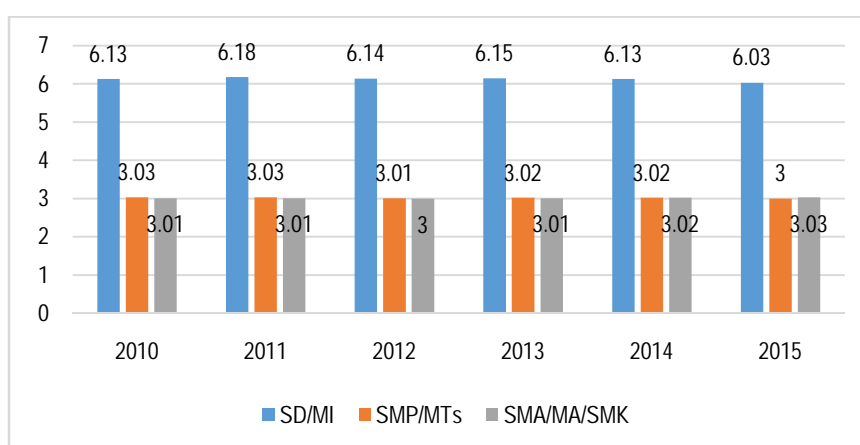
| No | Indikator | Satuan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | SD/MI | tahun | 6,13 | 6,18 | 6,14 | 6,15 | 6,13 | 6,03 | -0,325 |
| 2. | SMP/MTs | tahun | 3,03 | 3,03 | 3,01 | 3,02 | 3,02 | 3,00 | -0,198 |
| 3. | SMA/MA/SMK | tahun | 3,01 | 3,01 | 3 | 3,01 | 3,02 | 3,03 | 0,133 |

Sumber :

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016
- 2) Hasil Olahan 2016

Apabila melihat tabel di atas, rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI yang ditempuh selama 6 tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah

menunjukkan angka 6,03 pada tahun 2015, menurun sekitar 0,1 tahun dibanding tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sudah menunjukkan angka ideal pada tahun 2015. Selanjutnya untuk jenjang SMA/MA/SMK yang normalnya ditempuh selama 3 tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 menunjukkan angka 3,03 tahun, terjadi peningkatan sebanyak 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dilihat secara keseluruhan, angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta berada dalam kategori yang baik karena mendekati angka ideal yang biasa dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK tersebut.



Gambar 2.9
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah tabel APK di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

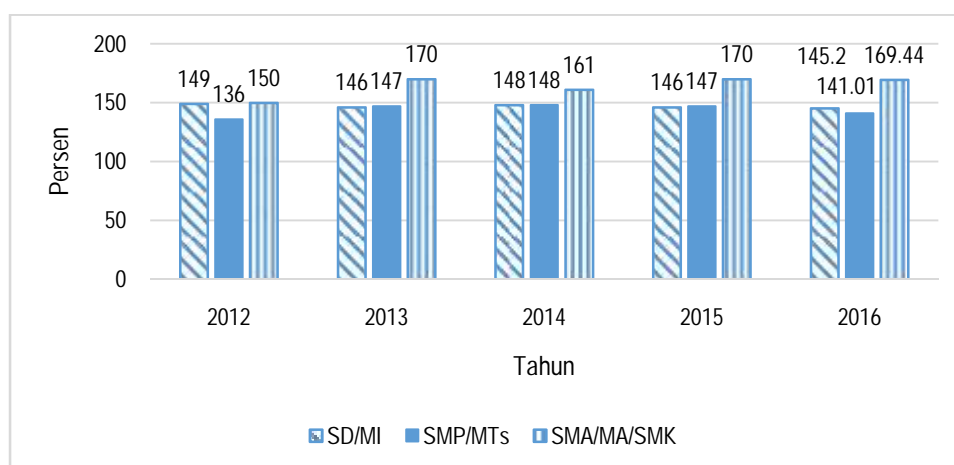
Tabel 2.26
Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|------------|--------|------|------|------|------|--------|--------------------------------|
| 1. | SD/MI | persen | 149 | 146 | 148 | 146 | 145,2 | -0,64 |
| 2. | SMP/MTs | persen | 136 | 147 | 148 | 147 | 141,01 | 0,91 |
| 3. | SMA/SMK/MA | persen | 150 | 170 | 161 | 170 | 169,44 | 3,09 |

Sumber :

- 1) Profil Pendidikan 2013-2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada tabel berikut, bahwa nilai persentase APK dari masing masing jenjang pendidikan cenderung naik dari tahun ke tahun. Hanya saja, pada tahun 2015 dan 2016 terdapat penurunan angka partisipasi kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. APK SD/MI pada tahun 2012 adalah sebesar 137% dan kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 145,2% pada tahun 2016. APK SMP/MTs mengalami peningkatan, dari 136% dari tahun 2012 menjadi 141,01% pada tahun 2016. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pun mengalami hal yang serupa dimana, pada tahun 2012 APK SMA/SMK/MA adalah sebesar 150% dan meningkat menjadi 169,44% pada tahun 2016.



Gambar 2.10
Grafik Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Apabila diperhatikan, APK seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan angka di atas 100% dari tahun ke tahun. Nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya siswa dari daerah luar kota/daerah yang bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta karena kualitas yang dianggap lebih baik daripada di daerah-daerah sekitarnya. Ditambah lagi, disebabkan karena terdapatnya penduduk di luar batasan usia sekolah pada suatu jenjang, yang justru bersekolah pada jenjang yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan karena

siswa terlalu dini masuk jenjang sekolah tertentu, atau pun disebabkan karena tidak berhasil melanjutkan ke kelas selanjutnya.

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yang mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkan berbeda dengan angka rata-rata lama sekolah, jika angka rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah pada suatu kabupaten/kota. Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut, dengan demikian dapat dirumuskan rekomendasi dan masukan untuk meningkatkan angka ini, apabila kondisi yang terjadi sangat buruk. Angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini terbagi menjadi tujuh kategori.

Tabel 2.27
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

| No | Indikator Kinerja | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|----|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 1 | Tidak/Belum Tamat SD | (%) | 11,3 | 9,92 | 9,55 | 7,51 | -12,99 |
| 2 | SD/MI/Sederajat | (%) | 14,26 | 12,26 | 14 | 14,29 | 7,96 |
| 3 | SLTP/MTs/Sederajat | (%) | 16 | 16,81 | 16,89 | 16,52 | -0,87 |
| 4 | SLTA/Sederajat | (%) | 38,86 | 41,47 | 40,75 | 45,54 | 4,79 |
| 5 | DI/II | (%) | 1,06 | 0,88 | 0,84 | 0,58 | -18,82 |
| 6 | AKADEMI/DIII | (%) | 5,02 | 4,91 | 4,19 | 4,32 | -6,20 |
| 7 | PT/D-IV/S1/S2/S3 | (%) | 13,5 | 13,75 | 13,78 | 11,24 | -9,59 |

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka (2012-2016), dengan Hasil Olahan, 2017

Terlihat dari tabel di atas tersebut bahwa terdapat penurunan persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD, hal tersebut merupakan kondisi positif dimana dapat terlihat bahwa semakin sedikitnya warga kota Yogyakarta yang tidak menamatkan SD. Kondisi positif terlihat pada jenjang jenjang pendidikan lain, seperti SD/MI/Sederajat dan SLTA/Sederajat yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif. Sedangkan kondisi kurang baik ditunjukkan pada jenjang pendidikan SLTP/MTs/Sederajat, DI/DII dan Akademi/DIII yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang negatif dan

penurunan persentase dari tahun 2012-2014. Hal tersebut diduga disebabkan kurangnya minat warga kota Yogyakarta untuk menempuh pendidikan jenjang Diploma. Sedangkan minat untuk menempuh pendidikan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang negatif, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Diploma (DI/DII dan Akademi/DIII).

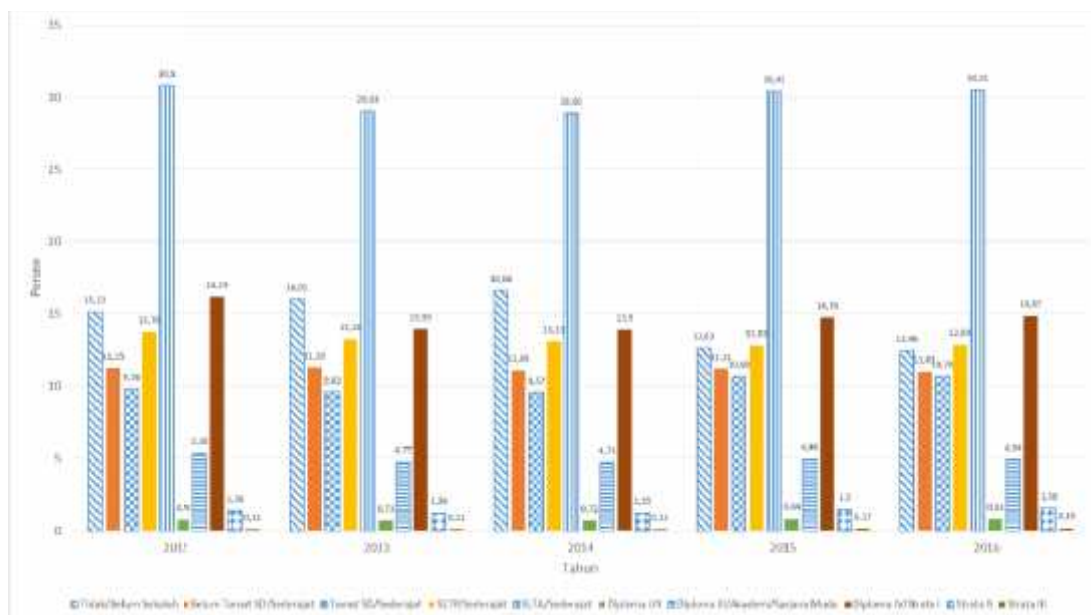
Tabel 2.28
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|-----|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Tidak/Belum Sekolah | (%) | 15,15 | 16,01 | 16,64 | 12,63 | 12,46 | -4,77 |
| 2. | Belum Tamat SD/Sederajat | (%) | 11,25 | 11,28 | 11,09 | 11,21 | 11,03 | -0,49 |
| 3. | Tamat SD/Sederajat | (%) | 9,78 | 9,63 | 9,57 | 10,68 | 10,70 | 2,27 |
| 4. | SLTP/Sederajat | (%) | 13,76 | 13,24 | 13,13 | 12,83 | 12,89 | -1,62 |
| 5. | SLTA/Sederajat | (%) | 30,80 | 29,03 | 28,86 | 30,41 | 30,51 | -0,24 |
| 6. | Diploma I/II | (%) | 0,78 | 0,73 | 0,72 | 0,84 | 0,83 | 1,57 |
| 7. | Diploma III/Akademi/Sarjana Muda | (%) | 5,38 | 4,77 | 4,73 | 4,96 | 4,94 | -2,11 |
| 8. | Diploma IV/Strata I | (%) | 16,19 | 13,95 | 13,90 | 14,76 | 14,87 | -2,10 |
| 9. | Strata II | (%) | 1,38 | 1,24 | 1,25 | 1,50 | 1,58 | 3,44 |
| 10. | Strata III | (%) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 14,64 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017

Berbeda dengan pendataan dari BPS, data Angka Pendidikan yang ditamatkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih terklasifikasi ke tiap-tiap jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pada kategori SD/Sederajat, Diploma I/II, Strata II dan Strata III. Meningkatnya persentase pada kategori tersebut menandakan kondisi baik dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Untuk kategori pendidikan tinggi (pasca SLTA/Sederajat), jenjang pendidikan Diploma I/II Strata II, dan Strata III cenderung mengalami peningkatan. Pada jenjang Diploma I/II mengalami peningkatan sebesar 1,57%, sedangkan pada jenjang Strata II terdapat peningkatan sebesar 3,44%, peningkatan juga terlihat pada jenjang Strata III sebesar 14,64%. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya kemudahan-kemudahan memperoleh beasiswa, serta didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi yang meningkat.



Gambar 2.11
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
 Sumber : Hasil Olahan, 2017

5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah tabel angka partisipasi murni di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

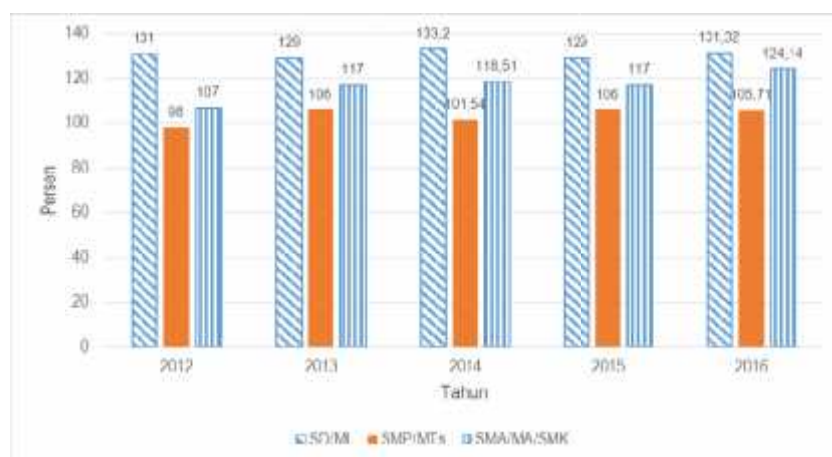
Tabel 2.29
Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|------------|--------|------|------|--------|------|--------|--------------------------------|
| 1. | SD/MI | persen | 131 | 129 | 133,2 | 129 | 131,32 | 0,06 |
| 2. | SMP/MTs | persen | 98 | 106 | 101,54 | 106 | 105,71 | 1,91 |
| 3. | SMA/MA/SMK | persen | 107 | 117 | 118,51 | 117 | 124,14 | 3,78 |

Sumber :

- 1) Profil Pendidikan 2013-2016
- 2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa terdapat peningkatan APM pada jenjang SD/MI dari tahun 2015-2016, penurunan tersebut sebesar 2,32%,. Sedangkan APM pada SMP/MTS mengalami penurunan persentase sebesar kurang lebih 0,29%. Dan peningkatan sebesar 7,14% terjadi pada APM jenjang SMA/MA/SMK. Nilai-nilai APM tersebut kesemuanya berada di atas angka 100%. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang lebih baik. Hal tersebut juga dirasa lebih tepat sasaran karena menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.



Gambar 2.12
Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Kematian perinatal menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa 7 hari setelah persalinan. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian *neonatal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian *post neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan

sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

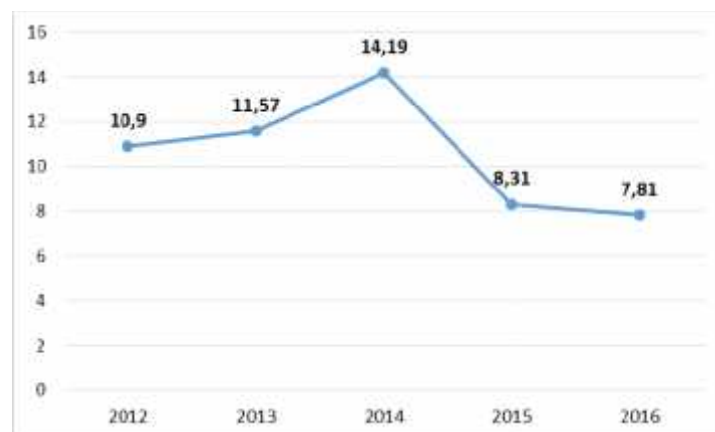
Tabel 2.30
Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------|-------|-------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | % | 10,9 | 11,57 | 14,19 | 8,31 | 7,81 | -8,00 |

Sumber :

- 1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015(Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)*
- 2) *Hasil Olahan, 2017*

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun 2012-2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, dan kemudian menurun pada tahun 2015-2016. Pertumbuhan rata-ratanya adalah -8,00% per tahun dengan penurunan dari 11 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 8 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi.



Gambar 2.13
Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Angka Kematian Balita

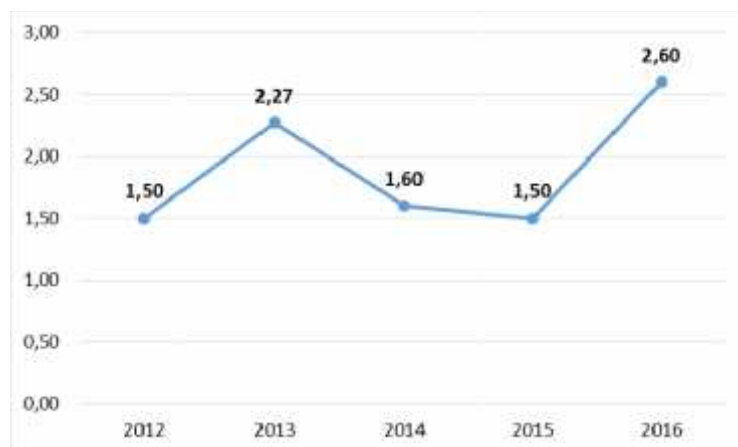
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematian Balita menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.31
Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup | % | 1,50 | 2,27 | 1,60 | 1,50 | 2,60 | 14,74 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka kematian balita di Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, AKABA sebesar 1,50 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup, lalu meningkat menjadi 2,27 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013, kembali turun di tahun 2014 menjadi 1,60 kematian balita, lalu turun menjadi 1,50 kematian balita tahun 2015, dan justru meningkat menjadi 2,60 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup di tahun 2016. Angka kematian balita yang mengalami turun naik pada 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam mengendalikan angka kematian balita perlu dievaluasi lagi.



Gambar 2.14
Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Angka kematian balita yang cenderung mengalami kenaikan ini disebabkan beberapa faktor diantaranya masih adanya ibu yang kurang memperhatikan kualitas gizi dari makanan yang dikonsumsi anak, kebersihan lingkungan sekitar dan kebiasaan hidup sehat, selain karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian balita dapat dilakukan melalui sosialisasi arti pentingnya hidup sehat bagi ibu pada saat kegiatan posyandu balita. Selain itu, banyak kematian

balita yang disebabkan karena kasus penyakit infeksi. Balita yang kurang atau tidak mendapatkan gizi yang baik akan mudah terserang penyakit khususnya penyakit infeksi. Selain itu juga kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit.

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

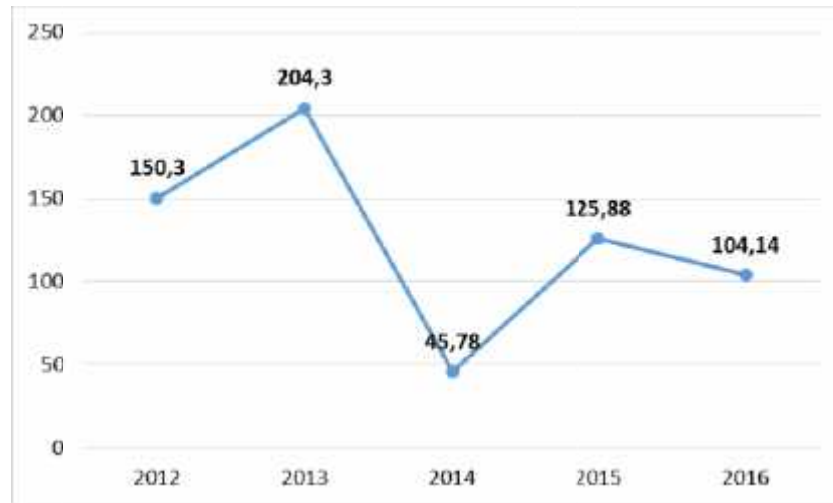
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.32
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | % | 150,3 | 204,3 | 45,78 | 125,88 | 104,14 | -8,76 |

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016); Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

Pada tabel di atas terlihat bahwa AKI cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun dengan AKI tertinggi adalah pada tahun 2013 (sebesar 204,3) dan tahun dengan AKI terendah adalah tahun 2014 (sebesar 45,78). AKI cenderung meningkat pada tahun 2012-2013 dan 2014-2015, kemudian menurun pada tahun 2014 dan 2016. Fluktuasi angka kematian ibu melahirkan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan kecukupan gizi bagi ibu hamil belum terjamin dengan baik, sehingga berisiko kematian yang tinggi saat melahirkan.



Gambar 2.15
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Angka kematian ibu yang cenderung naik turun tetapi masih dapat dikatakan nilainya cukup besar, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan saat menjelang melahirkan saja sehingga meningkatkan resiko bagi ibu dan bayi. Selain itu, adanya penyakit menular juga menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, serta Program P4K yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya. Pada tahun 2014 jumlah kematian ibu melahirkan menurun cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanya manual rujukan untuk periksa kehamilan maupun melahirkan.

Selain itu, terdapat dukungan biaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan, serta kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Kenaikan AKI pada tahun 2015, kemungkinan disebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko kematian. Selain itu, ditemukan pula penyebab kematian Ibu pada tahun 2015, yaitu terdapatnya penyakit TBC Milier, TBC HIV, pendarahan, dan sepsis. Penyakit yang menyebabkan kematian ibu tersebut dominan dialami oleh ibu yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta tetapi melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta.

4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta.

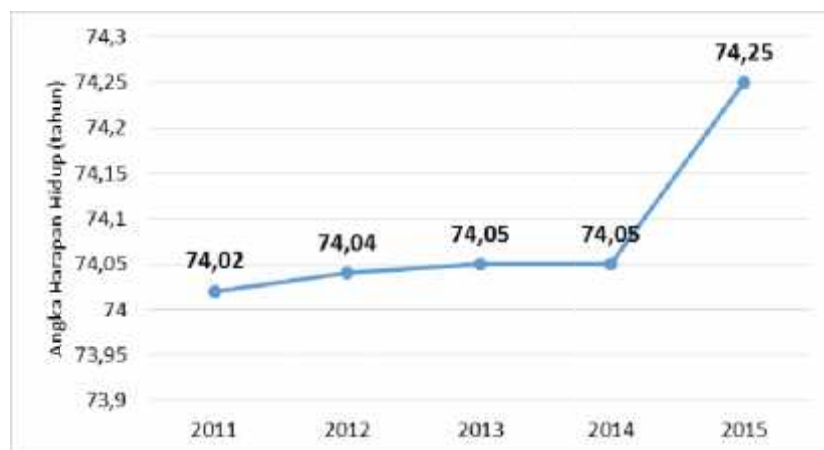
Tabel 2.33
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

| No | Indikator | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Angka usia harapan hidup | tahun | 74,02 | 74,04 | 74,05 | 74,05 | 74,25 | 0,09 |

Sumber :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2015 (BPS Kota Yogyakarta)
- 2) Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2015, angka harapan hidup di Kota Yogyakarta sedikit meningkat menjadi 74,25 dari tahun sebelumnya (74,05). Angka usia harapan hidup penduduk Yogyakarta di tahun 2014 masih sama dibanding tahun sebelumnya yaitu 74,05. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Yogyakarta cenderung masih baik. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jamkesda (jaminan kesehatan khusus pemegang KTP Yogyakarta), Jamkesmas (jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dimana keanggotaannya ditentukan melalui TNP2K), dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena fasilitas kesehatan yang selalu ramai dikunjungi masyarakat dan tingkat okupansi ruang inap di berbagai rumah sakit yang meningkat tajam (BPS, 2015).



Gambar 2.16
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itulah untuk meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan hal-hal seperti jumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan, hingga latar belakang pendidikan masyarakat. Perlu menjadi perhatian bahwa dengan peningkatan usia harapan hidup, berarti harus meningkat pula pelayanan dan penjaminan hidup yang layak untuk lansia, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan untuk para lansia maupun tempat tinggal yang layak, serta pelayanan dan fasilitas umum lainnya yang memungkinkan para lansia masih untuk tetap dapat beraktivitas dengan baik. Dengan demikian dapat tercipta kota yang ramah lansia.

5. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur (BB/U) dan jumlah balita yang ditimbang. Jadi belum mencakup seluruh balita yang ada di Kota Yogyakarta, hanya berupa survei terhadap sebagian balita (yang ditimbang). Perhitungan ini untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaan program penanganan masalah gizi buruk di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data prevalensi balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

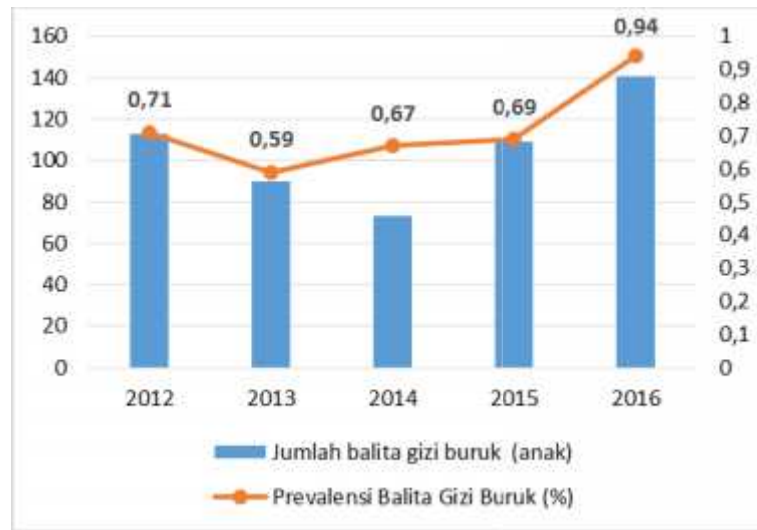
Tabel 2.34
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Balita Gizi Buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur | Anak | 113 | 90 | 73 | 109 | 141 | 5,69 |
| 2. | Jumlah Balita yang ditimbang | Anak | 15.967 | 15.270 | 10.845 | 15.832 | 15.074 | -1,43 |
| 3. | Prevalensi balita gizi buruk | persen | 0,71 | 0,59 | 0,67 | 0,69 | 0,94 | 7,27 |

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2012-2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

Berdasarkan data di atas, prevalensi balita gizi buruk menunjukkan fluktuasi dengan tren meningkat dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012, prevalensi balita gizi buruk mencapai 0,71% lalu turun menjadi 0,59% di tahun 2013. Prevalensi balita gizi buruk naik menjadi 0,67% di tahun 2014

dan 0,69% di tahun 2015, hingga mencapai 0,94% di tahun 2016. Meningkatnya prevalensi balita gizi buruk ini sebanding dengan peningkatan jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur.



Gambar 2.17
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan analisis dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Yogyakarta tahun 2015, peningkatan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang disebabkan adanya kesulitan pemantauan status gizi karena beberapa orang tua/keluarga tidak membawa anaknya ke posyandu/puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak dapat terpantau oleh kader pendamping maupun tenaga kesehatan. Selain itu, angka prevalensi balita gizi buruk juga dipengaruhi oleh tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga terdapatnya pendatang yang memiliki balita gizi buruk pun ikut mempengaruhi jumlah balita gizi buruk yang tercatat.

6. Penyakit

Data tentang penyakit penting diketahui untuk melihat derajat kesehatan di masyarakat tersebut. Informasi mengenai penyakit juga berguna untuk melihat pola penyakit, kejadian luar biasa, atau gaya hidup masyarakat setempat. Berikut merupakan data penyakit yang bersumber dari RSUD Kota Yogyakarta.

Tabel 2.35
Data 10 Besar Diagnosa Penyakit Penyebab Kematian
di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

| No | 2014 | Jumlah | 2013 | Jumlah |
|----|--|--------|--|--------|
| 1 | Stroke, not specified as haemorrhage or infarction | 65 | Stroke, not specified as haemorrhage or infarction | 31 |
| 2 | Non-insulin-dependent diabetes | 25 | Congestive heart failure | 14 |

| No | 2014 | Jumlah | 2013 | Jumlah |
|----|---|--------|---|--------|
| | mellitus without complications | | | |
| 3 | Congestive heart failure | 19 | Chronic ischaemic heart disease, unspecified | 11 |
| 4 | Chronic renal failure, unspecified | 19 | Chirrosis of Liver | 7 |
| 5 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus With renal complication | 19 | Leptospirosis, unspecified | 6 |
| 6 | Septicaemia, unspecified | 18 | Septicaemia, unspecified | 6 |
| 7 | Chronic ischaemic heart disease, unspecified | 16 | Tuberculosis of Lung | 5 |
| 8 | Unspecified diabetes mellitus without complications | 13 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus With renal complication | 5 |
| 9 | Cerebral infarction | 11 | Acute myocardial infarction, unspecified | 5 |
| 10 | Tuberculosis of lung | 10 | Heart disease, unspecified | 4 |

Berdasarkan data penyakit penyebab kematian di atas, dapat kita lihat bahwa sebagian besar penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular atau sering dikenal dengan sebutan penyakit degenerative. Penyakit-penyakit tersebut erat hubungannya dengan pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Pada dua tahun terakhir pun stroke tetap menjadi yang teratas sebagai penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta. Sedangkan jika melihat data 10 besar penyakit rawat jalan di RSUD penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan stroke juga selalu menempati posisi 5 besar sejak tahun 2012 hingga 2014. Selain data di atas, berikut data penyakit yang juga perlu menjadi perhatian karena kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.36
Jumlah Kasus baru HIV/AIDS
di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2015

| Indikator | Satuan | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HIV | Orang | 62 | 59 | 13 | 43 | 34 | 81 | 96 | 59 |
| AIDS | Orang | 5 | 78 | 10 | 12 | 47 | 30 | 29 | 22 |
| HIV/AIDS | Orang | 67 | 137 | 23 | 55 | 81 | 111 | 125 | 81 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

Kasus HIV/AIDS tidak bisa dibiarkan begitu saja, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi melihat trend yang semakin naik dari tahun ke tahun. Namun perlu diperhatikan juga, peningkatan penemuan jumlah penderita karena didukung sistem pencatatan dan pelaporan semakin akurat.

Kemampuan petugas, jumlah saran pelayanan dan kelengkapan alat untuk mendiagnosa penyakit serta jejaring pelayanan kesehatan semakin baik. Usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini bisa dibilang cukup baik, seperti membuat program *One stop service* (Pelayanan satu atap untuk penanggulangan HIV-AIDS), dan Layanan Komperehesif Berkelanjutan untuk IMS dan HIV-AIDS. Untuk melaksanakan tersebut Pemerintah menetapkan 2 puskesmas di Kota Yogyakarta sebagai tempat rujukan untuk penanggulangan masalah HIV/AIDS ini yaitu di Umbulharjo dan Gedongtengen.

Kasus lain yang juga harus mulai diperhatikan adalah masalah gangguan jiwa dan emosi. Berdasarkan data dari RISKESDAS (riset kesehatan dasar) 2013, prevalensi gangguan jiwa berat menurut provinsi di Indonesia tahun 2013, Provinsi DIY menempati peringkat teratas yaitu 2,7‰. Sedangkan untuk prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur ≥ 15 tahun berdasarkan *self reporting questionnaire-20* menurut provinsi tahun 2013, DIY menempati peringkat 4 di Indonesia. Meskipun data tersebut merupakan angka dalam satu provinsi, namun harus tetap menjadi perhatian di tingkat kota.

C. Ketenagakerjaan

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 0,96 di tahun 2016.

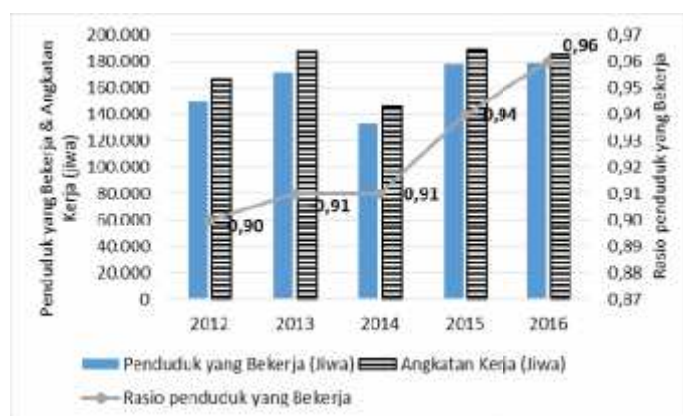
Tabel 2.37
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 | Penduduk yang Bekerja | Jiwa | 149.189 | 171.108 | 132.713 | 177.895 | 178.200 | 4,54 |
| 2 | Angkatan Kerja | Jiwa | 166.406 | 187.205 | 145.850 | 188.555 | 184.921 | 2,67 |
| 3 | Rasio penduduk yang Bekerja | | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 1,63 |

Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2017, diolah

Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari

tren perkembangannya, diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerja cenderung meningkat, meski pertumbuhannya lambat. Peningkatan rasio ini diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja maupun jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,96 atau sebesar 96% dari total angkatan kerja telah memperoleh kesempatan bekerja, sementara untuk 4% lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur.



Gambar 2.18
Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlah grup kesenian di suatu daerah. Jumlah grup kesenian menunjukkan jumlah grup kesenian dibandingkan dengan 10.000 penduduk. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.38
Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

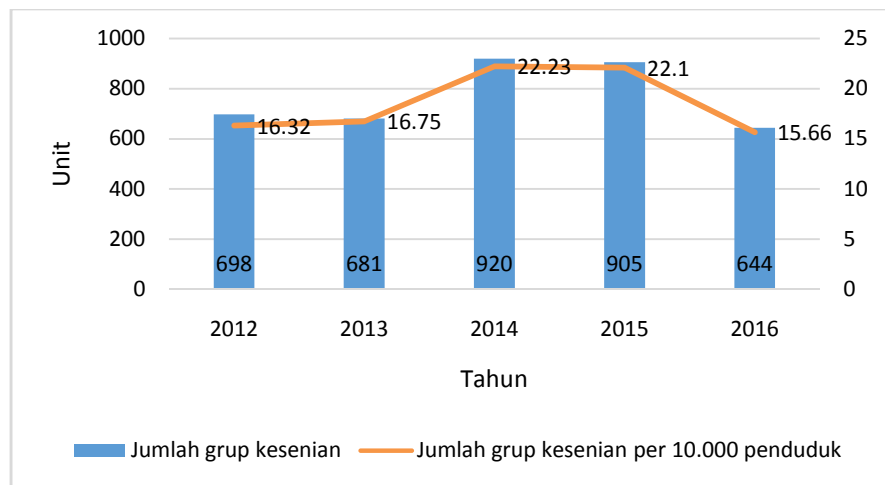
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah grup kesenian | Unit | 698 | 681 | 920 | 905 | 644 | 4,806 |
| 2. | Jumlah penduduk/ 10.000 | Jiwa | 42,76 | 40,67 | 41,39 | 40,95 | 41,13 | -2,447 |
| 3. | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk | Unit | 16,32 | 16,75 | 22,23 | 22,10 | 15,66 | 8,988 |

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2013-2016, *Kebudayaan Kota Yogyakarta 2017*

2. Hasil Olahan, 2017

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah grup kesenian meningkat pesat. Dengan adanya dana keistimewaan memunculkan munculnya grup kesenian baru pada tahun 2014 dan 2015. Namun grup kesenian tersebut belum memenuhi syarat dalam mengakses dana keistimewaan sehingga pada tahun 2016 jumlah grup kesenian mengalami penurunan. Sampai akhir tahun 2016, sebagian data dari kelurahan belum masuk.



Gambar 2.19
Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah Gedung Kesenian

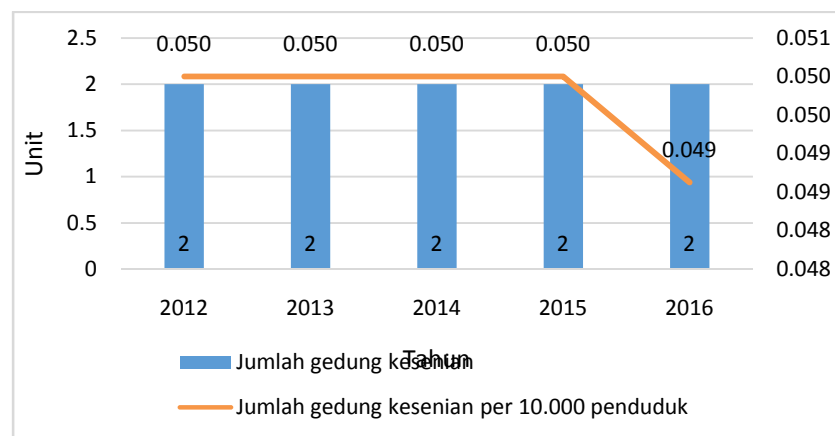
Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Berikut merupakan data jumlah kesenian di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.39
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah gedung kesenian | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Jumlah penduduk/10.000 | Jiwa | 42,76 | 40,67 | 41,39 | 40,95 | 41,13 | -0,96 |
| 3. | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk | Unit | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,049 | -0,69 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2013-2016, Kebudayaan Kota Yogyakarta 2017

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, selama tahun 2012-2016 tidak terdapat peningkatan jumlah gedung kesenian. Jumlah gedung kesenian hanya berjumlah 2 unit, yaitu Plaza Ngasem dan XT Square. Kedua gedung kesenian tersebut dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Gedung kesenian di Kota Yogyakarta seringkali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik. Gedung kesenian juga merupakan tempat publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Walaupun hanya berjumlah 2 unit, perlu diperhatikan bahwa penyelenggaraan pertunjukan kesenian tidak harus selalu diadakan di gedung kesenian, melainkan ruang terbuka publik lainnya dapat menjadi wadah untuk berekspresi bagi para seniman. Ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat peningkatan jumlah gedung kesenian.



Gambar 2.20
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

B. Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga merupakan indikator yang menjelaskan tolok ukur sejumlah kelompok kegiatan untuk mendukung aktivitas bidang olahraga. Indikator ini berguna untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Berikut ini merupakan jumlah klub olahraga di Kota Yogyakarta.

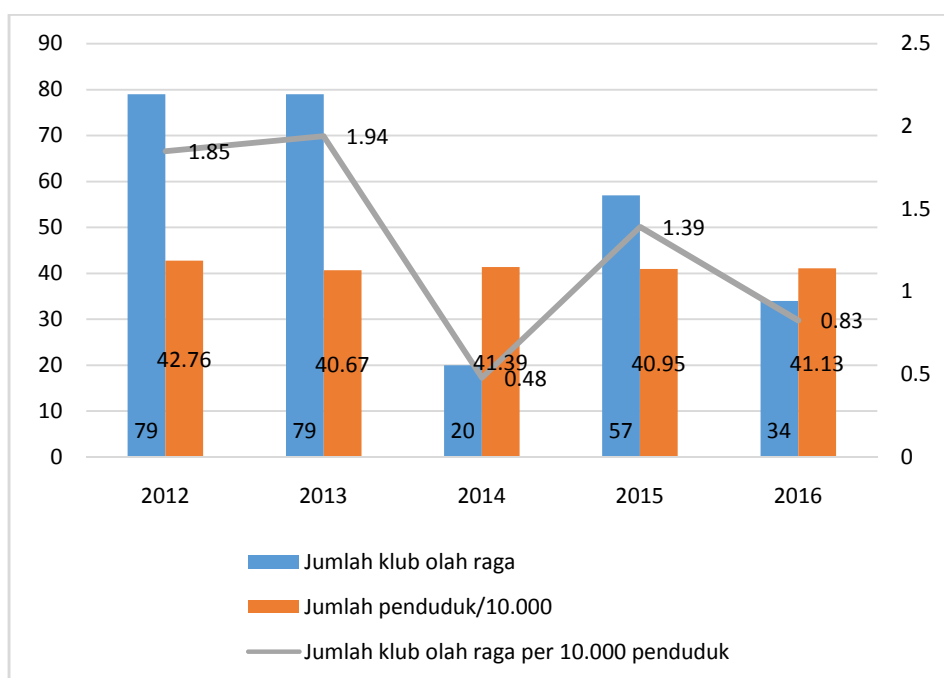
Tabel 2.40
Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah klub olahraga | Unit | 79 | 79 | 20 | 57 | 34 | -19,00 |
| 2. | Jumlah | Jiwa | 42,76 | 40,67 | 41,39 | 40,95 | 41,13 | -0,97 |

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| | penduduk/10.000 | | | | | | | |
| 3. | Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk | Unit | 1,85 | 1,94 | 0,48 | 1,39 | 0,83 | -18,24 |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017

Pada tabel diatas terlihat bahwa, jumlah klub olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012-2013 terdapat 79 klub dan kembali turun menjadi 20 klub pada tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlahnya bertambah menjadi 57 klub (data DPA). Penambahan ini terjadi akibat adanya pendataan ulang dan pedefinisian ulang klub olahraga, sehingga kini terdapat perbedaan jumlah yang signifikan. Kemudian pada tahun 2016 tertulis klub olahraga sejumlah 34 klub yang menunjukkan data cabang per kota. Kelak dibutuhkan penyepakatan definisi dan kriteria agar pendataan jumlah klub olahraga dapat berjalan dengan baik, tanpa terkendala perbedaan definisi yang digunakan pada tiap periode pendataan.



Gambar 2.21
Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
 Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah Gedung Olahraga

Gedung olahraga merupakan sarana pendukung kegiatan olahraga di suatu daerah. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi

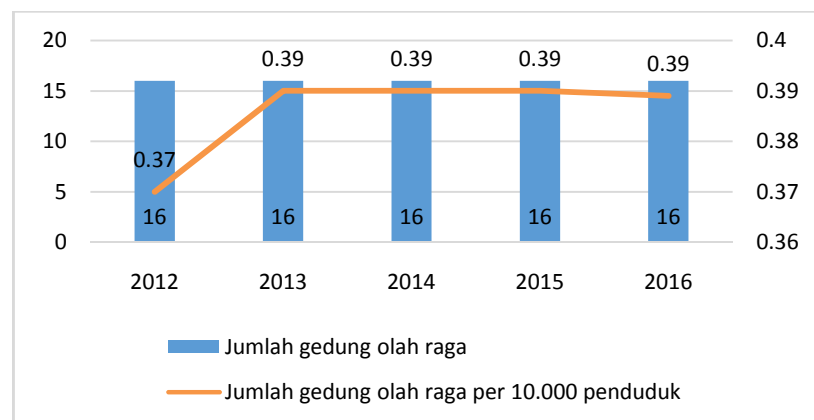
pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Berikut merupakan data jumlah gedung olahraga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.41
Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah gedung olah raga | Unit | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0,00 |
| 2. | Jumlah penduduk/10.000 | Jiwa | 42,76 | 40,67 | 41,39 | 40,95 | 41,13 | -0,97 |
| 3. | Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk | Unit | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,26 |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017

Pada data yang tertera di atas terlihat jumlah gedung olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 mempunyai jumlah yang tetap yaitu 16 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, maka mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016, yaitu dari 0,37 unit per 10.000 penduduk menjadi 0,39 unit per 10.000 penduduk. Jumlah gedung olahraga yang tidak berkurang ini menunjukkan adanya pemanfaatan sarana olahraga secara baik, sehingga tidak adanya perubahan fungsi/pemanfaatan bangunan. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa jumlah gedung olahraga tersebut tidak serta merta menggambarkan stagnannya kegiatan olahraga yang dilakukan warga kota, karena warga kota Yogyakarta pun kerap kali memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana berolahraga.



Gambar 2.22
Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS SD/MI di Kota Yogyakarta dihitung berdasarkan jumlah siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlah penduduk kota usia 7-12 tahun. Begitu juga dengan APS SMP/MTs disesuaikan dengan perhitungan usia SMP/MTs (13-15 tahun). Berikut merupakan tabel angka partisipasi sekolah di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.42
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

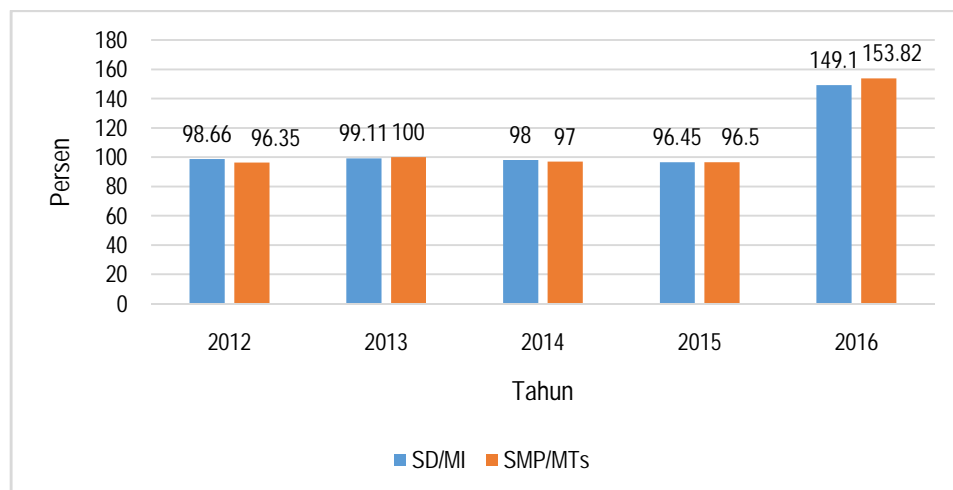
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|-----------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------------------------------|
| 1. | SD/MI | persen | 98,66 | 99,11 | 98 | 96,45 | 149,1 | 10,88 |
| 2. | SMP/MTs | persen | 96,35 | 100 | 97 | 96,50 | 153,82 | 12,41 |

Sumber :

1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017

2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung meningkat. Pada tahun 2012 APS SD/MI persentasenya 99,86% kemudian meningkat pada tahun 2013 dan menurun pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016 mengalami meningkat menjadi 149,1%.



Gambar 2.23
Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Dilihat dari data di atas, APS SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan pula. Pada tahun 2012 APS untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 96,35%. Angka persentase tersebut terus meningkat hingga mencapai 153,82% pada tahun 2016.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut ini merupakan data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.43
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs | Unit | 234 | 227 | 235 | 234 | 233 | -0,11 |
| 2. | Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun | Orang | 48.424 | 45.756 | 47.197 | 47.838 | 39.604 | -4,90 |
| 3. | Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs | | 48 | 50 | 50 | 49 | 59 | 5,22 |

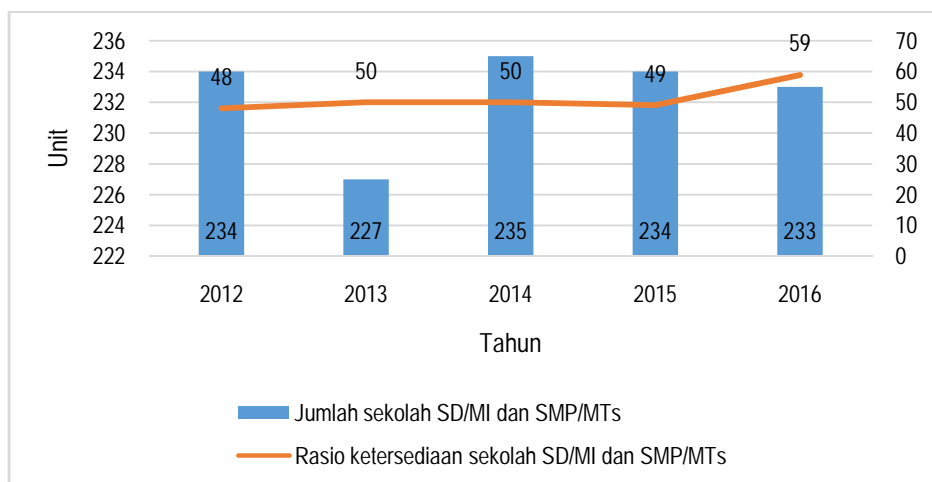
Sumber:

1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017

2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tersedia 48 sekolah setiap 10.000 penduduk jumlah sekolah menjadi 234 unit. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah kembali naik menjadi 50 sekolah per 10.000 penduduk namun dengan kondisi jumlah sekolah yang berkurang dan jumlah penduduk usia sekolah yang menurun. Pada tahun 2014, rasio ketersediaan sekolah kembali naik dengan jumlah sekolah meningkat menjadi 235 unit sedangkan rasio ketersediaan sekolah masih tetap 50 unit sekolah dalam setiap 10.000 penduduk dikarenakan jumlah

penduduk usia sekolah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015, terdapat penurunan rasio ketersediaan sekolah karena terdapatnya peningkatan pada penduduk usia sekolah dan berkurangnya jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs menjadi 49 sekolah per 10.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2016 rasio meningkat menjadi 59 sebab jumlah sekolah yang cenderung tetap dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah menurun.



Gambar 2.24
Grafik Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

c. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru). Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.44
Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|-----|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | SD/MI | murid/ 1 guru | 15,76 | 16,81 | 16,82 | 16,29 | 15,79 | 0,05 |
| 2. | SMP/MTs | | 12,06 | 13,29 | 13,66 | 13,64 | 13,87 | 3,56 |

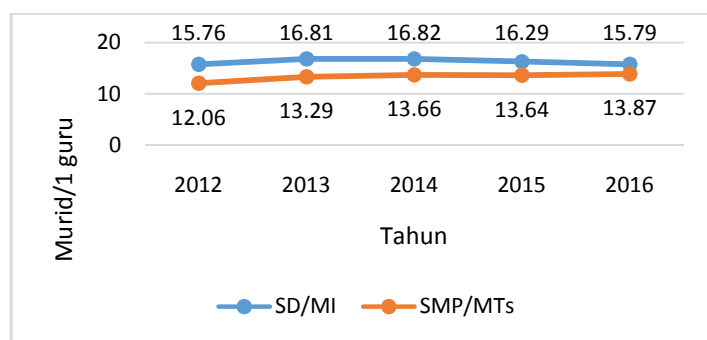
Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data diatas, rasio guru/murid SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, rasio guru/murid SD/MI sebesar 15,76, yang berarti

bahwa 1 orang guru mengajar 15 sampai 16 murid. Angka rasio ini kemudian mengalami perkembangan yang naik turun hingga mencapai angka 15,79 pada tahun 2016, yang berarti 1 orang guru mengajar 15 sampai 16 murid. Hal ini menggambarkan bahwa sudah terpenuhinya SPM, bahkan jumlah murid yang di ajar oleh 1 orang guru cenderung melampaui SPM yang mana standarnya adalah 32 murid untuk 1 orang guru.

Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya jumlah guru. Padahal, semakin menurunnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh terhadap semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya, pada akhirnya diharapkan kualitas murid akan semakin lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif.



Gambar 2.25
Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rasio guru/murid SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, rasio guru murid SMP/MTs sebesar 12,06, yang artinya 1 orang guru mengajar 12 hingga 13 siswa. Angka rasio ini kemudian di tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2016 mencapai 13,87, yang artinya 1 orang guru mengajar 13 hingga 14 siswa. Guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas. Guru yang mengajar siswa SMP/MTs merupakan guru untuk setiap mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam 1 kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda.

d. Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTs

Indikator rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada. Idealnya, dalam satu kelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar

menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta.

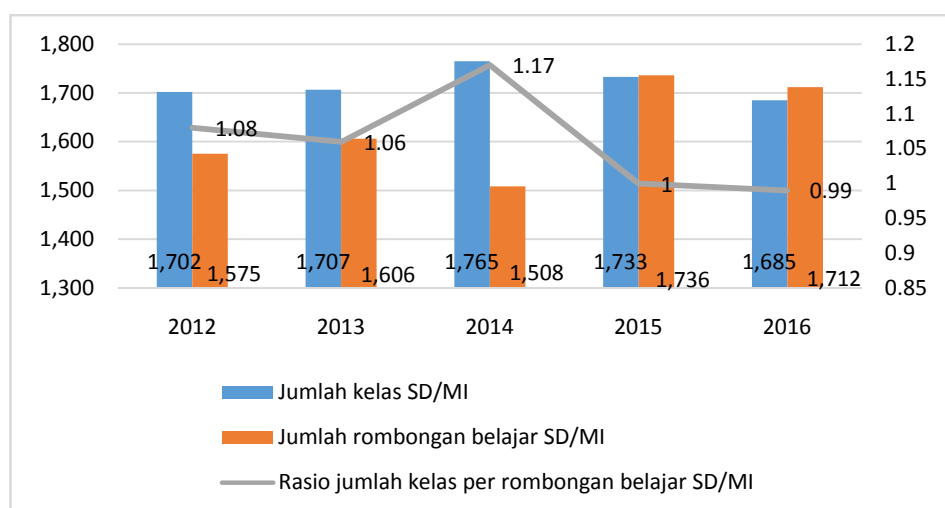
Tabel 2.45
Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah kelas SD/ MI | unit | 1.702 | 1.707 | 1.765 | 1.733 | 1.685 | -0,25 |
| 2. | Jumlah rombongan belajar SD/MI | kelompok | 1.575 | 1.606 | 1.508 | 1.736 | 1.712 | 2,11 |
| 3. | Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI | orang | 1,08 | 1,06 | 1,17 | 1,00 | 0,99 | -2,15 |

Sumber:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan, namun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi dengan peningkatan jumlah kelas. Pada tahun 2012-2015 rasio jumlah kelas per rombongan belajar mengalami peningkatan menjadi lebih dari 1,00 yang artinya seluruh rombongan belajar sudah mempunyai kelas masing-masing dan/atau kebutuhan kelas sudah tercukupi. Menurun 0,01 pada tahun 2016 yang tidak begitu signifikan, namun perlu menjadi perhatian untuk tahun tahun sebelumnya agar kembali meningkat.



Gambar 2.26
Grafik Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs dihitung berdasarkan jumlah kelas SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta. Idealnya, dalam satu kelas SMP/MTs terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

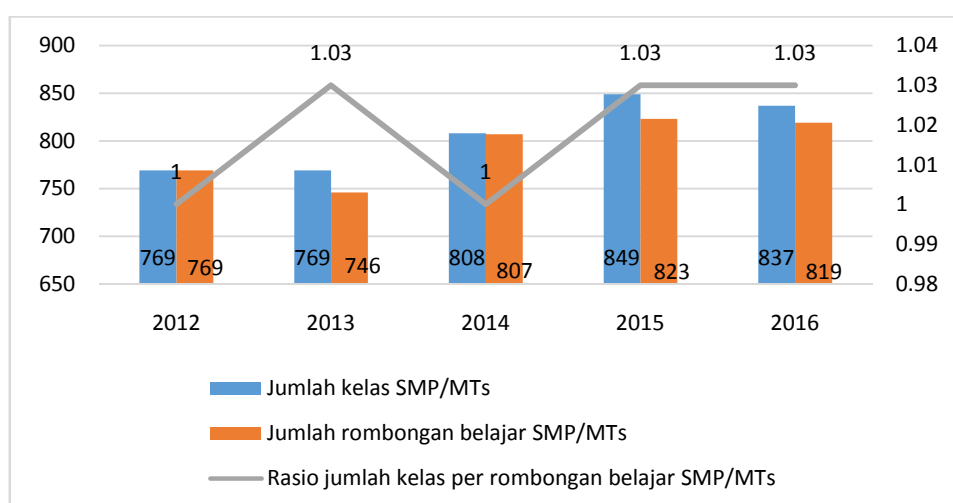
Tabel 2.46
Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun) |
|----|--|-------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah kelas SMP/MTs | unit | 769 | 769 | 808 | 849 | 837 | 2,14 |
| 2. | Jumlah rombongan belajar SMP/MTs | kelompok | 769 | 746 | 807 | 823 | 819 | 1,59 |
| 3. | Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs | unit/ kelompok | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 0,74 |

Sumber:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi dengan meningkatnya jumlah kelas SMP/MTs. Pada tahun 2012-2016 rasio jumlah kelas per rombongan belajar mengalami peningkatan dari 1,00 menjadi 1,03, yang menandakan bahwa kebutuhan kelas sudah tercukupi.



Gambar 2.27
Grafik Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

2. Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA dihitung berdasarkan jumlah siswa SMA/SMK/MA yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlah penduduk kota usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.47
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

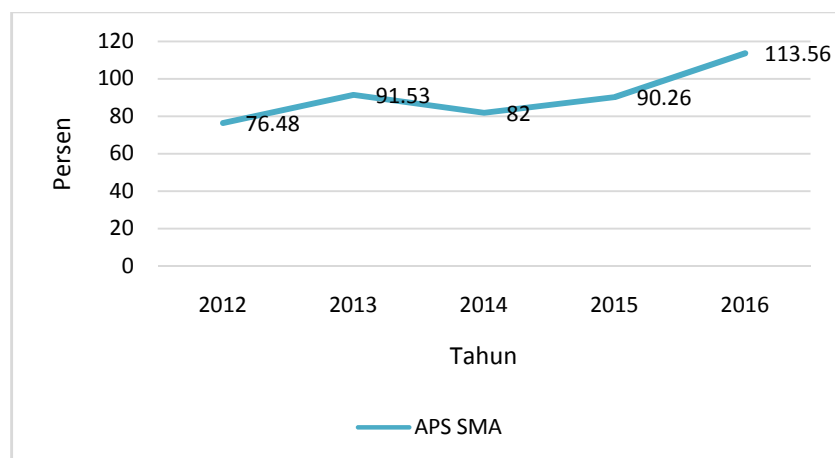
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|-----------|--------|-------|-------|------|-------|--------|--------------------------------|
| 1. | APS SMA | Persen | 76,48 | 91,53 | 82 | 90,26 | 113,56 | 10,39 |

Sumber:

1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017

2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah jenjang SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2012, APS SMA/SMK/MA hanya sebesar 76,48%, kemudian naik turun hingga mencapai angka 113,56% pada tahun 2016. APS SMA/SMK/MA yang cukup fluktuatif disebabkan oleh karena banyaknya penduduk kota yang bersekolah SMA tidak bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan adanya persaingan dengan calon pelajar dari daerah lain untuk memperebutkan bangku sekolah di Kota Yogyakarta. Diharapkan kelak, penduduk kota yang bersekolah dapat bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta saja sehingga APS dapat dipertahankan pada angka 100% atau meningkat.



Gambar 2.28
Grafik Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

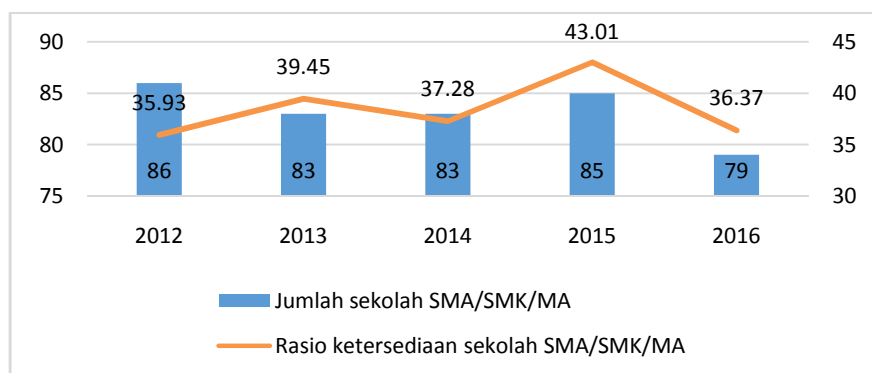
Tabel 2.48
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah sekolah SMA/SMK/MA | Unit | 86 | 83 | 83 | 85 | 79 | -2,10 |
| 2. | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun | Orang | 23.938 | 21.040 | 22.263 | 19.765 | 21.724 | -2,40 |
| 3. | Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA | Unit/10.000 orang | 35,93 | 39,45 | 37,28 | 43,01 | 36,37 | 0,30 |

Sumber:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami kecenderungan cukup fluktuatif. Pada tahun 2012, rasio ketersediaan sekolah hanya 35 sekolah dalam 10.000 penduduk disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada saat itu, sedangkan jumlah sekolah mencapai 86 unit. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan dan penurunan rasio ketersediaan sekolah hingga mencapai 36 sekolah dalam 10.000 penduduk pada tahun 2016.



Gambar 2.29
Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Jumlah sekolah mengalami penurunan pada tahun 2012-2016, dari 86 sekolah menjadi 79 sekolah. Penurunan jumlah sekolah merupakan dampak dari program pemerintah mengenai sekolah gratis (khususnya negeri). Sekolah gratis memberikan dampak pada sekolah sulit berkembang, dana yang digunakan untuk program belajar mengajar dan perlengkapan fasilitas lainnya hanya dari pemerintah, sekolah tidak dapat memungut biaya yang tinggi pada orang tua/wali siswa, akibatnya beberapa orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke swasta yang dianggap mempunyai kualitas fasilitas pendidikan yang lebih baik walaupun dengan konsekuensi membayar biaya sekolah yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa sekolah tutup karena kekurangan siswa, jadi siswa yang ada digabungkan ke sekolah lain. Oleh karena itu, jumlah sekolah semakin berkurang dan gedung sekolah dialih fungsikan untuk sarana lainnya.

c. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru). Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut ini merupakan rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.49
Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah guru SMA/SMK/MA | Orang | 3.473 | 3.251 | 2.968 | 3445 | 3322 | -0,72 |
| 2. | Jumlah murid SMA/SMK/MA | Orang | 35.863 | 33.534 | 35.734 | 35.734 | 36.810 | 0,32 |
| 3. | Rasio guru murid SMA/SMK/MA | murid/1 guru | 10,33 | 10,31 | 12,04 | 10,37 | 11,08 | 1,82 |

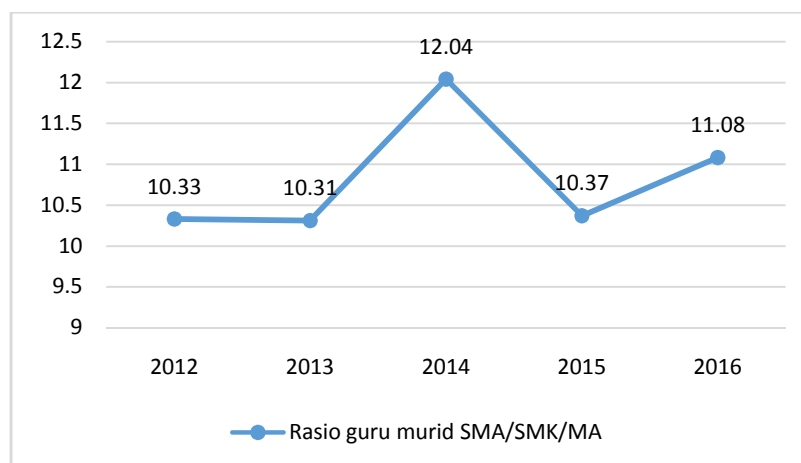
Sumber:

1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017

2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang menunjukkan angka positif. Pada tahun 2012, rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA sebesar 10,33, yang artinya 1 orang guru mengajar 10 hingga 11 siswa. Kemudian mengalami peningkatan hingga besaran rasio bernilai 11,08 yang artinya 1 orang guru mengajar 11 hingga 12 siswa. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah guru yang dibutuhkan untuk

mengajar siswa SMA/SMK/MA memang cukup banyak karena guru berperan sebagai pengajar dan pendidik untuk setiap mata pelajaran, bukan guru kelas seperti jenjang pendidikan SD/MI.



Gambar 2.30
Grafik Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

d. Rombongan Belajar SMA/SMK/MA

Indikator rombongan belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada. Perhitungan rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA dihitung berdasarkan jumlah kelas dibagi jumlah rombongan belajar. Idealnya, dalam satu kelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.50
Rombongan Belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

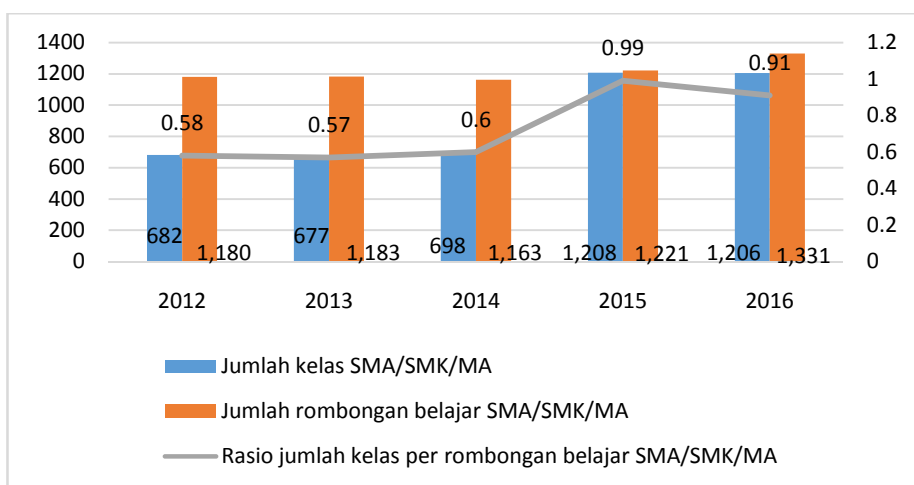
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah kelas SMA/SMK/MA | unit | 682 | 677 | 698 | 1.208 | 1.206 | 15,32 |
| 2. | Jumlah rombongan belajar SMA/SMK/MA | kelompok | 1.180 | 1.183 | 1.163 | 1.221 | 1.331 | 3,06 |
| 3. | Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA | orang | 0,58 | 0,57 | 0,60 | 0,99 | 0,91 | 11,92 |

Sumber:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 cenderung

mengalami fluktuasi. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi meningkatnya jumlah kelas SMA/SMA/MA. Pada tahun 2015, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA mencapai angka tertinggi hingga 0,99. Pada tahun 2015, ketersediaan kelas sudah cukup untuk menampung rombongan belajar karena rasionya yang berada pada angka 0,99 (mendekati 1). Kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 0,91 karena jumlah kelas yang menurun sementara jumlah rombongan belajar meningkat.



Gambar 2.31
Grafik Rombongan Belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

3. Fasilitas Pendidikan

a. Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik

Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan. Data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik. Data tersebut didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, berikut adalah Data Kelas dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

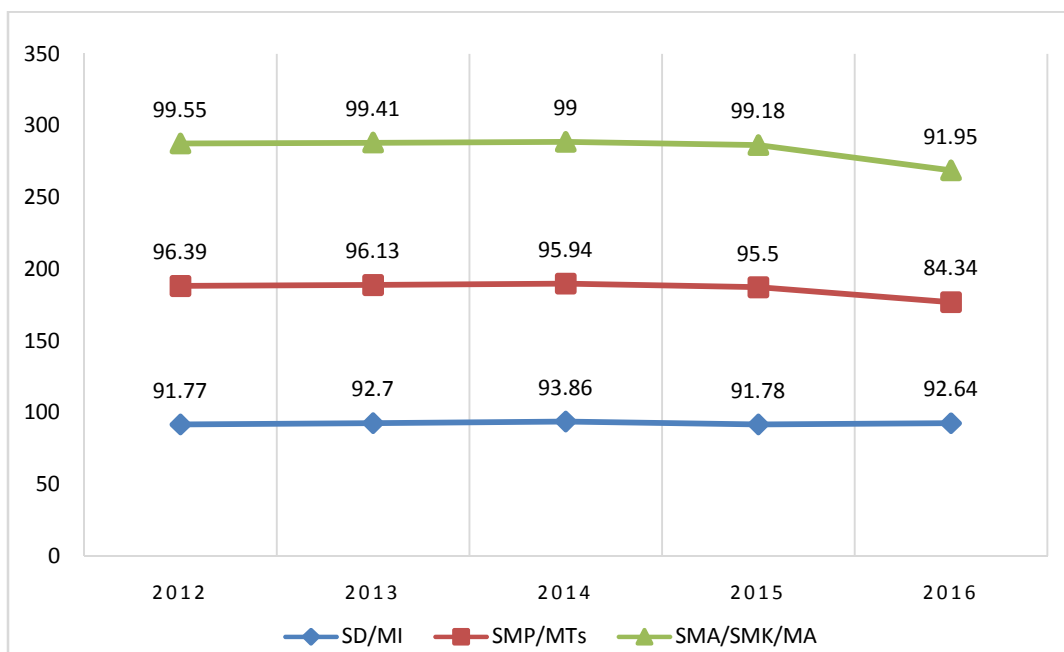
Tabel 2.51
Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|---------------------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Jumlah Kelas Kondisi Baik | | | | | | | | |
| 1 | SD/MI | (unit) | 1573 | 1575 | 1606 | 1508 | 1561 | -1,34 |
| 2 | SMP/MTs | (unit) | 747 | 769 | 803 | 807 | 706 | 2,40 |
| 3 | SMA/SMK/MA | (unit) | 1112 | 1180 | 1185 | 1091 | 1109 | -0,22 |

| No | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| Jumlah Seluruh Kelas | | | | | | | | |
| 1 | SD/MI | (unit) | 1714 | 1699 | 1711 | 1643 | 1685 | -0,52 |
| 2 | SMP/MTs | (unit) | 775 | 800 | 837 | 845 | 837 | 3,46 |
| 3 | SMA/SMK/MA | (unit) | 1117 | 1187 | 1197 | 1100 | 1206 | -0,06 |
| Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik | | | | | | | | |
| 1 | SD/MI | (%) | 91,77 | 92,7 | 93,86 | 91,78 | 92,64 | -0,82 |
| 2 | SMP/MTs | (%) | 96,39 | 96,13 | 95,94 | 95,5 | 84,34 | -1,04 |
| 3 | SMA/SMK/MA | (%) | 99,55 | 99,41 | 99 | 99,18 | 91,95 | -0,15 |

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017, Hasil Olahan, 2017

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan ruang kelas pada semua jenjang pendidikan sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baik yang semuanya menunjukkan angka di atas 90%. Hanya jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 yang berada di bawah 90% . Hasil dari indikator ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hanya saja perlu ditingkatkan hingga mencapai angka 100% agar para pelajar di Kota Yogyakarta dapat terfasilitasi dengan baik khususnya dalam kegiatan belajar mengajar.



Gambar 2.32
Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan data PAUD di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

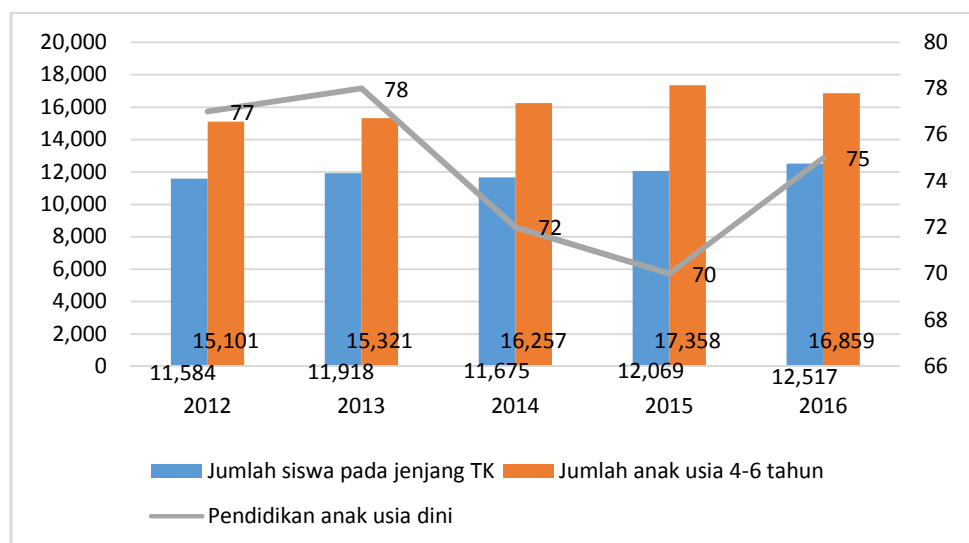
Tabel 2.52
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah siswa pada jenjang TK | anak | 11.584 | 11.918 | 11.675 | 12.069 | 12.517 | 1,96 |
| 2. | Jumlah anak usia 4-6 tahun | anak | 15.101 | 15.321 | 16.257 | 17.358 | 16.859 | 2,79 |
| 3. | Pendidikan anak usia dini | persen | 77 | 78 | 72 | 70 | 75 | -0,66 |

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio PAUD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2016 cenderung mengalami penurunan, terdapat penurunan pada tahun 2014, dan menurun kembali pada tahun 2015. Tahun 2016, rasio PAUD meningkat menjadi sebesar 75%.



Gambar 2.33
Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

5. Angka Putus Sekolah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Berikut ini merupakan data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

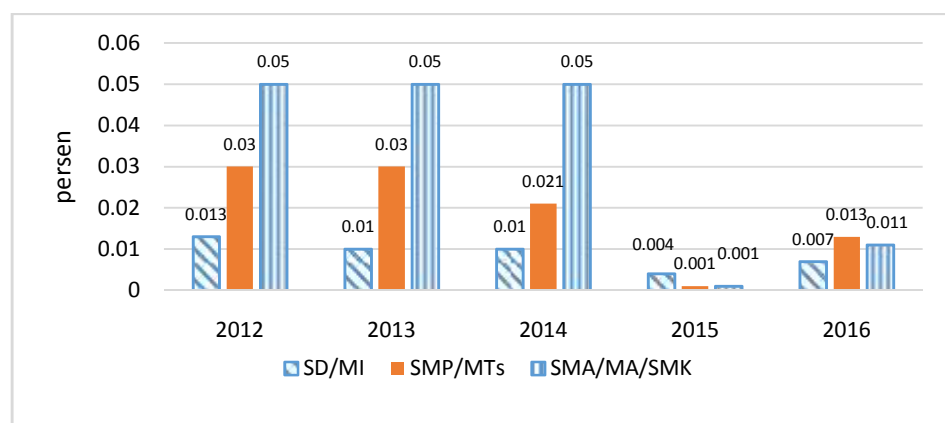
Tabel 2.53
Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | SD/MI | persen | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,007 | -14,34 |
| 2. | SMP/MTs | persen | 0,03 | 0,03 | 0,021 | 0,001 | 0,013 | -18,87 |
| 3. | SMA/MA/SMK | persen | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | 0,011 | -31,51 |

Sumber:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menurun. Pada tahun 2012, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,13% dan terus mengalami penurunan hingga 0,007% pada tahun 2016. Berbeda dengan kondisi angka putus sekolah jenjang SMP/MTs yang mengalami peningkatan, dari 0,03% pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,013%. Angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA juga cenderung mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016 menjadi 0,011 dari 0,001. Namun jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata pada tiap jenjang pun menunjukkan angka negatif, yang mengisyaratkan adanya rata-rata penurunan angka putus sekolah. Hal tersebut mengisyaratkan kondisi yang baik di tiap jenjang pendidikan di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.34
Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Sebagaimana yang terlihat dalam kolom pertumbuhan rata-rata pertahun, pertumbuhan rata-rata Angka Putus sekolah menunjukkan bilangan negatif yang menggambarkan kondisi yang baik. Hal tersebut menjadi sebuah prestasi bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah melakukan berbagai program untuk menekan angka putus sekolah. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik menjadi modal utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu di masa yang akan datang diharapkan upaya yang terus menerus dari Dinas Pendidikan untuk mendorong masyarakat agar semakin tertarik bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga mampu menekan angka putus sekolah hingga 0,000%. Pada tahun berikutnya, angka putus sekolah tidak lagi dinyatakan dalam persentase, melainkan dalam jumlah siswa. Sehingga diharapkan jumlah siswa yang putus sekolah dapat diketahui secara lebih riil.

6. Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 2.54
Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | SD/MI | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 2. | SMP/MTs | persen | 99,6 | 98,68 | 99,99 | 99,83 | 99,93 | 0,08 |
| 3. | SMA/MA/S MK | persen | 99,74 | 99,53 | 99,98 | 99,88 | 99,88 | 0,04 |

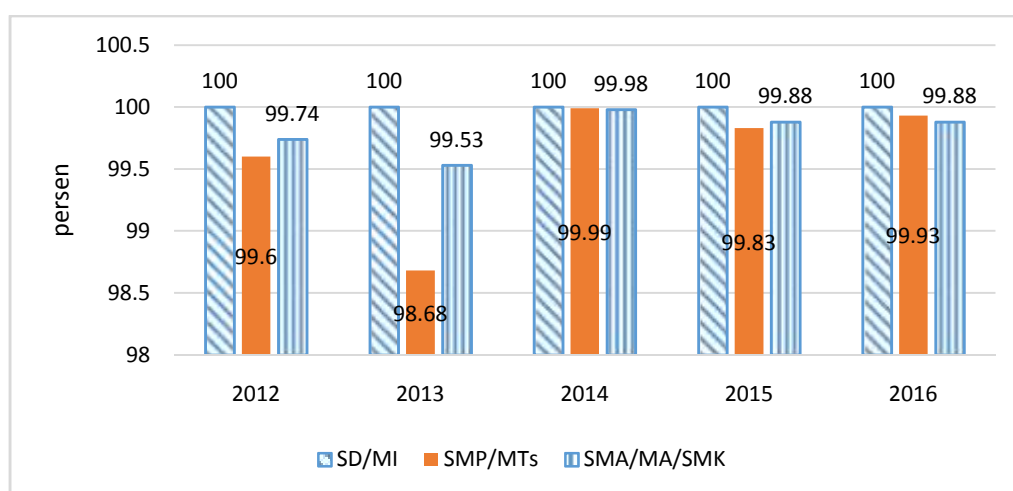
Sumber:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung tetap yakni mendekati angka 100%. Angka kelulusan jenjang SD/MI selama 5 tahun terakhir telah mencapai 100%. Selanjutnya untuk angka kelulusan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun ke

tahun, namun sayangnya ada sedikit penurunan yang terdapat di tahun 2015. Angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014, dan sedikit penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 dan 2016, angka kelulusan SMA/SMK/MA tetap yakni sebesar 99,88%.

Apabila dilihat secara keseluruhan terdapat pertumbuhan rata-rata pertahun yang positif. Kecenderungan tersebut mengindikasikan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan telah mampu mempertahankan angka kelulusan, walaupun terdapat sedikit penurunan namun tidak terlalu signifikan.



Gambar 2.35
Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

b. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Tabel 2.55
Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Angka Melanjutkan (AM) dari | persen | 114,14 | 113,29 | 108,64 | 113,29 | 105,67 | -1,91 |

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------------------------|
| | SD/MI ke SMP/MTs | | | | | | | |
| 2. | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK | persen | 162,87 | 155,56 | 158,3 | 155,56 | 158,39 | -0,69 |

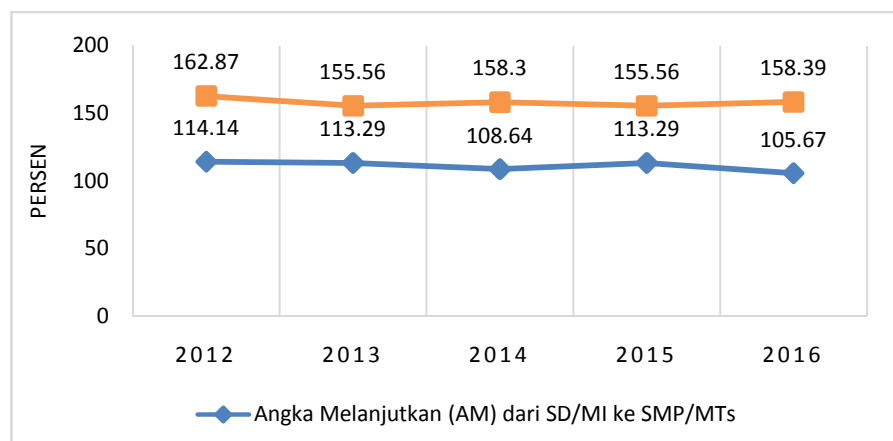
Sumber:

1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017

2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 114,14% dan menurun menjadi 105,67% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan kondisi yang membutuhkan perhatian sebab data tersebut mengisyaratkan menurunnya pelajar yang melanjutkan pendidikannya menuju jenjang yang lebih tinggi.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga bersifat fluktuatif, namun dengan kecenderungan sedikit menurun. Pada tahun 2012, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 162,87%, dan kemudian menurun menjadi 158,39% pada tahun 2016. Walaupun terjadi penurunan, namun angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tetap menunjukkan angka diatas 100%. Hal ini disebabkan banyaknya pelajar dari luar kota yang melanjutkan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta. Fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan jenjang SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta masih dianggap lebih baik jika dibandingkan daerah di sekitarnya.



Gambar 2.36

Grafik Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

c. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

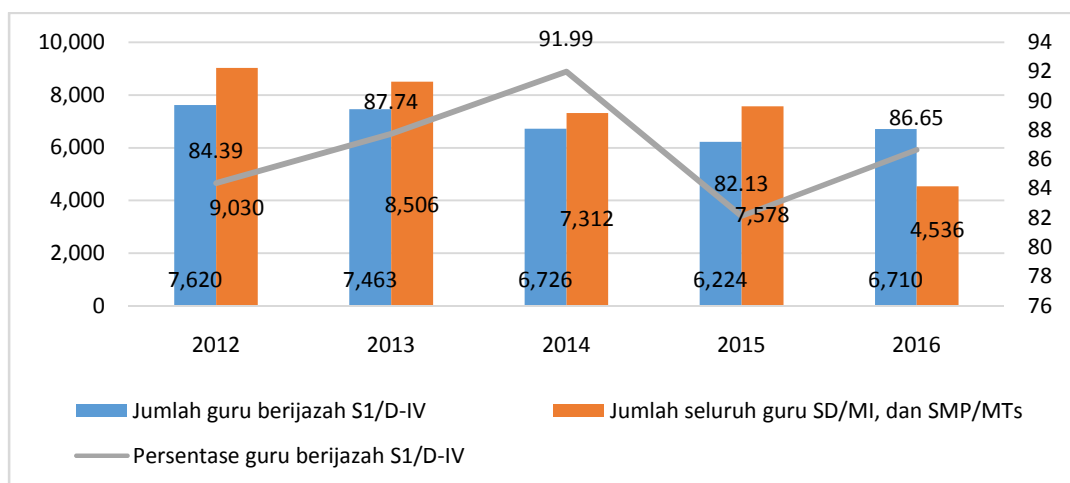
Tabel 2.56
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah guru berijazah S1/D-IV | persen | 7.620 | 7.463 | 6.726 | 6.224 | 6.710 | -3,13 |
| 2. | Jumlah seluruh guru SD/MI, dan SMP/MTs | persen | 9.030 | 8.506 | 7.312 | 7.578 | 4.536 | -15,81 |
| 3. | Persentase guru berijazah S1/D-IV | persen | 84,39 | 87,74 | 91,99 | 82,13 | 86,65 | 0,66 |

Sumber:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, prosentase guru berijazah S1/D-IV di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, persentase guru berijazah S1/D-IV hanya 84,39%, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 91,99% menurun pada 2015 menjadi 82,13 dan meningkat kembali pada tahun 2016 hingga ke angka 86,65%. Kenaikan ini disebabkan semakin banyaknya lulusan S1/D-IV yang menjadi guru, selain itu juga sudah menjadi syarat wajib bahwa untuk menjadi guru harus minimal lulusan S1/D-IV. Ditambah lagi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang menawarkan beasiswa bagi para guru. Guru yang belum S1/D-IV semakin berkurang juga karena banyak yang telah menjalani pensiun di setiap tahunnya.



Gambar 2.37
Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2017 kelak, kewenangan pengelolaan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA akan berada di bawah pemerintah pusat. Sehingga, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hanya akan mengelola pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs saja. Terkait hal tersebut, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang nantinya akan di proyeksikan hanyalah persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs saja (tanpa mengikutsertakan jumlah dan persentase guru pada jenjang SMA/SMK/MA).

B. Kesehatan

1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai.

Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi 4 macam, yaitu posyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk

mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 2.57
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

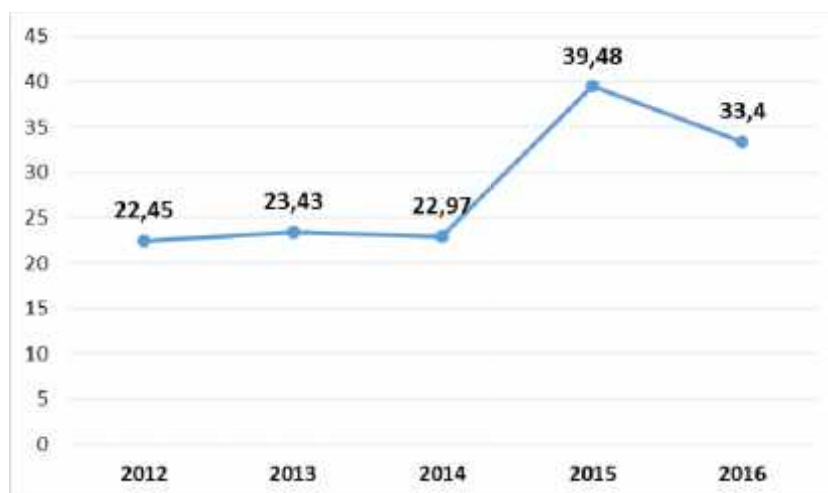
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Posyandu | Unit | 622 | 625 | 625 | 625 | 625 | 0,12 |
| 2. | Jumlah Balita | Anak | 27.701 | 26.671 | 27.209 | 15.832 | 18.713 | -9,34 |
| 3. | Rasio posyandu per satuan balita | Unit/ anak | 22,45 | 23,43 | 22,97 | 39,48 | 33,40 | 10,44 |

Sumber :

1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2016 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)*

2) *Hasil Olahan, 2017*

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung naik, kecuali pada tahun 2016. Pada tahun 2012, rasio posyandu per satuan balita sebesar 22,45, artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 22 posyandu atau 23 posyandu. Rasio posyandu per satuan balita meningkat menjadi 33,40 pada tahun 2016. Kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkan peningkatan layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di 45 kelurahan. Selain itu, peningkatan rasio posyandu juga dikarenakan menurunnya jumlah balita mulai tahun 2015 hingga hampir 10.000 balita dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah posyandu masih konsisten sebanyak 625 unit sejak tahun 2013.



Gambar 2.38
Grafik Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

2. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

Tabel 2.58
Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------------|
| 1. | Puskesmas | Unit | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,00 |
| | Puskesmas Pembantu | Unit | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | -4,89 |
| | Klinik | Unit | 23 | 65 | 56 | 74 | 86 | 39,06 |
| | Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik | Unit | 52 | 93 | 72 | 101 | 113 | 21,41 |
| 2. | Jumlah penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| 3. | Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk | | 12,16 | 22,87 | 17,39 | 24,67 | 27,48 | 22,60 |

Sumber :

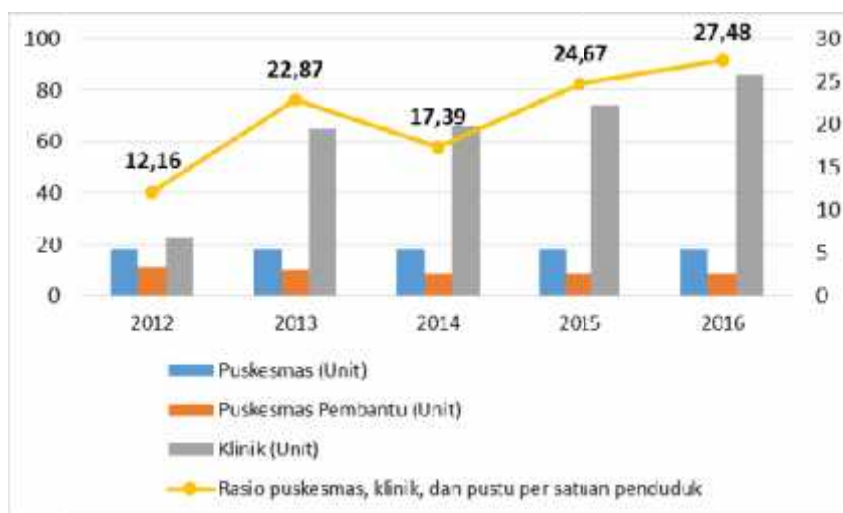
1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2016 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)*

2) *Hasil Olahan, 2017*

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, Pada tahun 2012, rasio puskesmas/klinik/pustu sebesar 12,16 yang artinya terdapat 12 puskesmas/klinik/pustu yang melayani 100.000 penduduk. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 23 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk pada tahun 2013. Namun, di tahun 2014, rasio menurun menjadi 17 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk.

Kemudian meningkat kembali menjadi 24 puskesmas/klinik/pustu melayani 100.000 penduduk pada tahun 2015. Rasio puskesmas/klinik/pustu kembali meningkat hingga menjadi 27 puskesmas/klinik/pustu per 100.000 penduduk.

Meningkatnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2015-2016 disebabkan oleh meningkatnya jumlah klinik, sedangkan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2014-2016. Jumlah klinik di tahun 2012 yaitu sebanyak 23 unit dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 86 unit di tahun 2016, sehingga pertumbuhan rata-ratanya bernilai positif sebesar 39,06% per tahun. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status fasilitas kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan yang tadinya terdaftar sebagai rumah sakit ada yang berganti status menjadi klinik, dan kemudian berefek pada peningkatan jumlah klinik di Kota Yogyakarta. Sebaliknya, jumlah puskesmas pembantu (pustu) semakin berkurang dalam kurun waktu yang sama. Di tahun 2012, jumlah pustu yaitu sebanyak 11 unit dan turun menjadi 9 unit sejak tahun 2014-2016. Penurunan jumlah pustu disebabkan beberapa pustu sepi pasien sehingga dirasa kurang optimal dalam melayani penduduk.



Gambar 2.39
Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta

sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

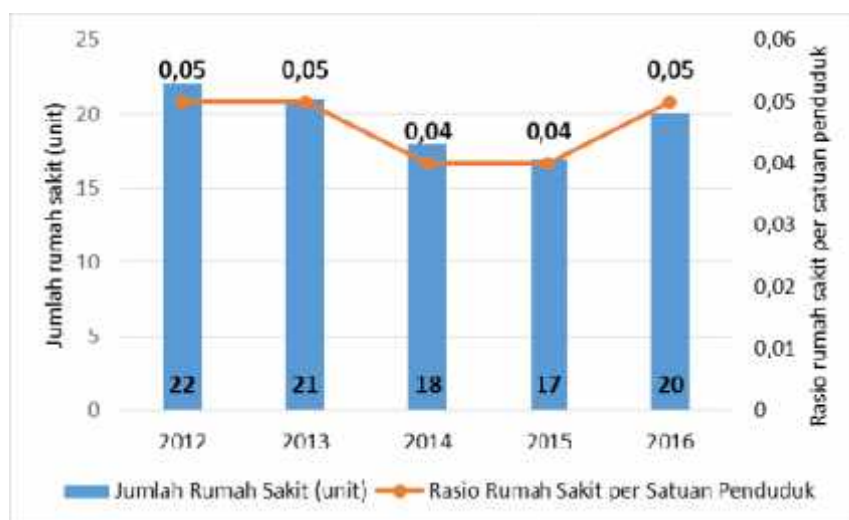
Tabel 2.59
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Rumah Sakit | unit | 22 | 21 | 18 | 17 | 20 | -2,35 |
| 2. | Jumlah penduduk | jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| 3. | Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk | | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |

Sumber :

- 1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
- 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2017
- 3) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2015 sedikit menurun, meskipun pada tahun 2016 kembali lagi seperti tahun 2012. Pada tahun 2016, rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 rumah sakit. Cakupan rumah sakit sempat menurun menjadi 0,04 rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2014-2015. Pertumbuhan rata-rata rasio rumah sakit per satuan penduduk selama tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 0,00%. Rasio rumah sakit yang berkisar di angka 0,05 dipengaruhi oleh jumlah rumah sakit yang kembali menjadi 20 rumah sakit. Penurunan jumlah rumah sakit pada tahun 2014-2015 kemungkinan dipengaruhi oleh adanya perubahan status beberapa rumah sakit menjadi klinik. Berikut ini merupakan grafik rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.40
Grafik Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan seberapa banyak jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan rasio praktek dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 2.60
Rasio Praktik Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Dokter | Orang | 980 | 619 | 1.444 | 1.815 | 806 | -4,77 |
| 2. | Jumlah penduduk | Orang | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| 3. | Rasio dokter per satuan penduduk | | 2,29 | 1,52 | 3,49 | 4,43 | 1,96 | -3,82 |

Sumber :

- 1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)*
- 2) *Hasil Olahan, 2017*

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 cenderung meningkat, tetapi menurun cukup banyak pada tahun 2016. Pada tahun 2012, rasio dokter sebesar 2,29, yang artinya terdapat 2 dokter di setiap 1.000 penduduk. Angka ini meningkat menjadi 4,43 pada tahun 2015, karena jumlah dokter yang membuka praktik mengalami kenaikan. Namun, pada tahun

2016, jumlah dokter turun menjadi hanya 806 dokter, sementara itu jumlah penduduk lebih besar dari tahun 2015, sehingga rasio dokter per satuan penduduk ikut turun menjadi 1,96.



Gambar 2.41
Grafik Rasio Praktek Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Namun meningkatnya rasio dokter tersebut perlu dicermati lagi. Dikhawatirkan penyebab peningkatan jumlah praktik dokter secara signifikan terjadi karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Pada kenyataan di lapangan pun, menurut Dinas Kesehatan, penghitungan didasarkan pada jumlah Izin Praktik, dan pada saat ini terdapat banyak dokter yang telah habis izin praktiknya. Menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, perlu waktu yang cukup lama untuk memperbaharui izin praktik dokter. Sehingga apabila pada saat ini dilakukan penghitungan jumlah dokter dengan dasar penghitungan jumlah izin praktik, maka diprediksikan akan menurun jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya, karena izin praktik yang sudah habis dan sedang dalam masa menunggu izin praktik yang baru yang belum rilis.

5. Rasio Perawat, Perawat Gigi dan Bidan Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 100.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud adalah meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah pemaparannya per masing-masing profesi.

Perawat gigi adalah profesi tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara profesional. Rasio perawat gigi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat gigi dan jumlah

penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Berdasarkan perhitungan tersebut, rasio perawat gigi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 cenderung meningkat, tetapi rasionya sedikit menurun di tahun 2016. Pada tahun 2012, terdapat 16 perawat gigi dalam setiap 100.000 penduduk, kemudian menjadi 24 perawat gigi per 100.000 penduduk di tahun 2015, dan kembali turun menjadi 22 perawat gigi per 100.000 penduduk pada tahun 2016. Selama tahun 2012-2016, rasio perawat gigi per satuan penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,29%. Pertumbuhan rata-rata per tahun yang bernilai positif tersebut menggambarkan penambahan jumlah perawat gigi yang memengaruhi besaran rasio perawat gigi per satuan penduduk.

Tabel 2.61
Rasio Perawat Gigi Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Perawat gigi | Orang | 68 | 67 | 74 | 99 | 7,56 |
| 2. | Jumlah Penduduk | orang | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | -0,97 |
| 3. | Rasio perawat gigi per satuan penduduk | | 16 | 16 | 18 | 24 | 8,29 |

Sumber :

1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)*

2) *Hasil Olahan, 2017*

Perawat, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Sebagaimana cara penghitungan rasio perawat gigi, rasio perawat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat dan jumlah penduduk dalam 100.000 penduduk. Berdasarkan proses penghitungan, dalam kurun waktu 2012-2016, rasio perawat per satuan penduduk bersifat fluktuatif.

Pada tahun 2012, rasio perawat sebanyak 197 perawat per 100.000 penduduk, kemudian naik menjadi 239 perawat per 100.000 penduduk. Di tahun 2014, jumlah perawat turun menjadi 147 perawat per 100.000 penduduk, lalu jumlah perawat di tahun 2015 kembali meningkat menjadi 202 perawat per 100.000 penduduk hingga pada tahun 2016, jumlah perawat per 100.000 penduduk menjadi 533. Meningkatnya rasio perawat per satuan penduduk pada tahun 2016 dikarenakan penambahan jumlah perawat hingga hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, dalam kurun waktu 2012-2016, rata-rata

pertumbuhan rasio perawat per satuan penduduk cukup baik yaitu sebesar 28,25% per tahun.

Tabel 2.62
Rasio Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|-----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Perawat | Orang | 844 | 970 | 609 | 827 | 26,95 |
| 2. | Jumlah Penduduk | orang | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | -0,97 |
| 3. | Rasio perawat per satuan penduduk | | 197 | 239 | 147 | 202 | 28,25 |

Sumber :

- 1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)*
- 2) *Hasil Olahan, 2017*

Merujuk pada Ikatan Bidan Indonesia (2006), definisi bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik (membantu proses persalinan/melahirkan). Seperti perawat dan perawat gigi, rasio bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah bidan dan jumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio bidan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,55%.

Pada tahun 2012, terdapat 71 bidan per 100.000 penduduk, lalu meningkat menjadi 76 bidan per 100.000 penduduk di tahun 2013. Pada tahun 2014-2015 jumlah bidan menjadi 75 bidan per 100.000 penduduk. Namun, di tahun 2016, rasio bidan per satuan penduduk sedikit turun menjadi 72 bidan per 100.000 penduduk. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan rasio bidan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 2.63
Rasio Bidan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Bidan | Orang | 303 | 309 | 310 | 307 | -0,42 |
| 2. | Jumlah Penduduk | orang | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | -0,97 |
| 3. | Rasio bidan per satuan penduduk | | 71 | 76 | 75 | 75 | 0,35 |

Sumber :

1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)*

2) *Hasil Olahan, 2017*

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda, dan (3) Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

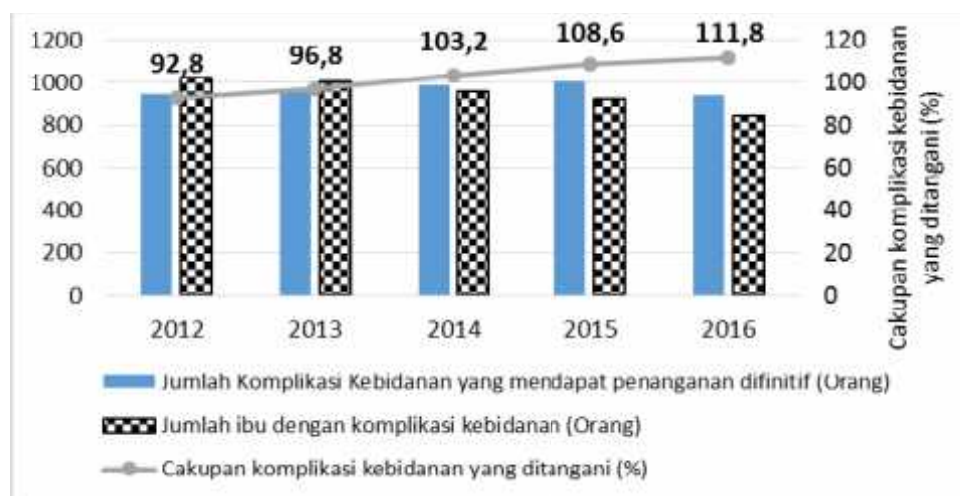
Tabel 2.64
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan difinitif | Orang | 946 | 972 | 987 | 1.005 | 942 | -0,1 |
| 2. | Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan | Orang | 1.020 | 1.005 | 956 | 925 | 843 | -4,7 |
| 3. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | persen | 92,8 | 96,8 | 103,2 | 108,6 | 111,8 | 4,8 |

Sumber :

- 1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
- 2) Hasil Olahan, 2017

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung meningkat. Pada tahun 2012, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani yaitu sebesar 92,8%, dan terus meningkat hingga menjadi 111,8% pada tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka besaran cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kota Yogyakarta sudah melebihi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 80%. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar seluruh komplikasi pada ibu hamil dan melahirkan dapat selalu ditangani dengan baik.



Gambar 2.42
Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan merupakan perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani nakes dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.65
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan | Orang | 4.577 | 4.787 | 4.658 | 4416 | 4353 | 3981 | -2,65 |
| 2. | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin | Orang | 4.578 | 4.787 | 4.660 | 4416 | 4358 | 3982 | -2,65 |
| 3. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | persen | 99,98 | 100 | 99,96 | 100 | 99,9 | 99,97 | -0,02 |

Sumber:

1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 dapat dikatakan cukup baik karena masih berada di kisaran 90%-100%. Namun, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,28% per tahun. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sempat mencapai 100% pada tahun 2013, tetapi justru menurun pada tahun 2014-2016 hingga menjadi 91,15% pada tahun 2016. Hal ini menandakan perlunya peningkatan indikator ini hingga mencapai 100% setiap tahun, agar seluruh ibu melahirkan mendapatkan pertolongan yang baik dan sesuai standar hingga nantinya akan memberikan efek positif yaitu berupa menurunnya angka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan. Angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir sudah berada di atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang besarnya 90%.



Gambar 2.43
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam

meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan di masa mendatang. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.66
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Kelurahan UCI | Unit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0,00 |
| 2. | Jumlah Seluruh Kelurahan | Unit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0,00 |
| 3. | Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |

Sumber :

- 1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)*
- 2) *Hasil Olahan, 2017*

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 telah mencapai 100% sesuai dengan target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas maupun rumah sakit.

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

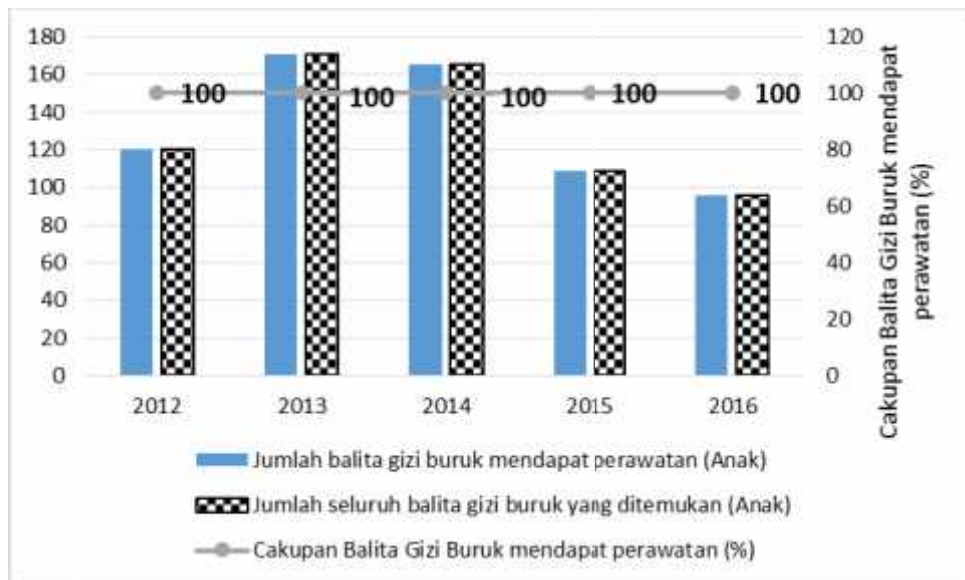
Tabel 2.67
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatandi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan | Anak | 120 | 171 | 165 | 109 | 96 | -5,43 |
| 2. | Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan | Anak | 120 | 171 | 165 | 109 | 96 | -5,43 |
| 3. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |

Sumber:

- 1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017*
- 2) *Hasil Olahan, 2017*

Merujuk pada tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100%). Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sebesar 100%, maka cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta sudah mampu mencapainya. Untuk mencapai angka 100% tersebut, sudah dilakukan beberapa upaya antara lain melalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT (Pemberian makanan tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Operasional Rumah Pemulihan Gizi serta Peningkatan Pembinaan terhadap Posyandu.



Gambar 2.44
Grafik Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yang Ditemukan
di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama 1 tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasien baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Berikut ini merupakan perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.68
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati | Orang | 245 | 251 | 428 | 355 | 369 | 10,78 |
| 2. | Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA | orang | 197 | 251 | 260 | 265 | 262 | 7,39 |
| 3. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | persen | 124,37 | 100 | 164,62 | 133,96 | 140,84 | 3,16 |

Sumber:

- 1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017*
- 2) *Hasil Olahan, 2017*

Dapat dilihat pada tabel 2.68 cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA mencapai 124,37%, tetapi di tahun 2013 turun menjadi 100%. Tahun 2014, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA meningkat menjadi 164,62%, tetapi turun lagi di tahun 2015 menjadi 133,96%, dan kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 140,84%. Selama tahun 2012-2016, rata-rata pertumbuhan jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati yaitu 10,78% per tahun. Selama 5 tahun terakhir, penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati tersebut lebih banyak dari jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA per tahunnya.



Gambar 2.45
Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal yang sebesar 100%, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 sudah mampu melampauinya. Akan tetapi, tetap diperlukan penanganan yang maksimal agar jumlah penderita TBC BTA tidak meningkat di masa mendatang. Untuk penanganan sejak dini kasus TBC di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit se-Kota Yogyakarta, dokter praktik dan Kelompok Aisyah. Melalui jaringan tersebut, warga yang ditemukan sakit dengan gejala batuk selama 3 minggu dan tidak sembuh, maka akan didampingi untuk melakukan pemeriksaan BTA-Basil Tahan Asam. Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut.

Walaupun Dinas Kesehatan dan jejaring kerjasamanya sudah berusaha keras untuk menangani penyakit ini, namun penanganan kasus TBC tetap memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Hal tersebut disebabkan karena penderita harus meminum obat selama 6 bulan berturut turut tanpa putus. Faktor kebosanan dan kejenuhan diprediksi akan timbul, untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplin meminum obat. Untuk memotivasi penderita, terdapat penghargaan berupa uang bagi penderita dan pendamping minum obat untuk penyakit ini. Para penderita sembuh TBC mendapatkan penghargaan berupa uang sebesar Rp 300.000,- sedangkan para pendamping minum obat-PMO mendapat penghargaan uang Rp 200.000,-.

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditandai dengan panas mendadak yang berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji *Torniquet* positif), disertai/tanpa pembesaran hati (*hepatomegali*), *trombositopenia* (trombosit $\leq 100.000/\mu\text{l}$), peningkatan *hematocrit* $\geq 20\%$. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun dan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.69
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------|------|------|------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah penderita baru DBD yang ditemukan dan diobati | Jiwa | 382 | 915 | 418 | 945 | 1.705 | 45,35 |
| 2. | Jumlah perkiraan penderita baru DBD | Jiwa | 382 | 915 | 418 | 945 | 759 | 18,73 |
| 3. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |

Sumber :

- 1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani. Jika dilihat dari jumlah penderita DBD yang ada, terjadi fluktuasi kasus dalam kurun 5 tahun terakhir. Jumlah penderita baru DBD yang ditemukan dan diobati pada tahun 2016 adalah yang tertinggi dalam kurun waktu 2012-2016. Jumlah penderita baru DBD yang ditemukan dan diobati pada tahun 2016 mencapai hampir dua kali lipat dari tahun 2015 dan melebihi perkiraan di tahun tersebut, yaitu sebesar 1.705 jiwa. Rata-rata pertumbuhan jumlah penderita DBD di Kota Yogyakarta per tahunnya cukup tinggi, yaitu sebesar 45,35%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan demam berdarah di lingkungan perkotaan belum berjalan dengan optimal.



Gambar 2.46
Grafik Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati
di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

DBD merupakan penyakit serius yang harus diberantas dan dicegah. Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vector, diagnosis dini dan pengobatan dini, serta peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) dan menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes berkembang biak. Diharapkan dengan rutin melakukan kegiatan tersebut dapat menekan jumlah kasus DBD di Kota Yogyakarta.

12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan perbandingan antara jumlah pelayanan kesehatan pasien

masyarakat miskin di strata 2 dan 3 dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.70
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskindi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3 | orang | 11.090 | 17.192 | 7.269 | 8.092 | 20.365 | 16,41 |
| 2. | Jumlah masyarakat miskin | orang | 11.090 | 17.192 | 7.269 | 60.230 | 60.195 | 52,64 |
| 3. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | persen | 100 | 100 | 100 | 13,43 | 33,83 | -23,73 |

Sumber :

- 1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012-2014, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin telah mencapai 100%. Namun, mulai tahun 2015-2016, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin justru semakin menurun, yaitu menjadi 13,43% di tahun 2015 dan 33,83% di tahun 2016.

Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3 serta jumlah masyarakat miskin di Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan di strata 2 dan 3 berubah jenisnya setiap tahun. Di tahun 2012-2013, seluruh masyarakat miskin yang terdaftar dalam Jamkesmas seluruhnya mendapat pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, seluruh masyarakat miskin yang terdaftar dalam BPJS & JKN juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, di tahun 2015-2016, jumlah masyarakat miskin yang tercatat merupakan penerima KMS (Kartu Menuju Sejahtera) sehingga jumlahnya jauh lebih

besar dibandingkan jumlah masyarakat miskin di tahun-tahun sebelumnya, sehingga meskipun jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin jumlahnya meningkat, tetapi persentasenya menjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan untuk periode selanjutnya tidak perlu lagi menyertakan indikator ini karena sudah ada fasilitas jaminan kesehatan (seperti BPJS) sehingga tidak ada lagi perbedaan masyarakat miskin dan non miskin.



Gambar 2.47
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

13. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahui efektivitas, *continuum of care* dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.71
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar | Bayi | 4.221 | 4.078 | 3.887 | 3.647 | 3.526 | -4,40 |
| 2. | Jumlah seluruh bayi lahir hidup | Bayi | 4.658 | 4.406 | 4.369 | 3.972 | 3.841 | -4,71 |
| 3. | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 90,6 | 92,56 | 88,97 | 91,82 | 91,80 | 0,33 |

Sumber :

1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu sebesar 0,33%. Pada tahun 2012, cakupan kunjungan bayi mencapai 90,6%, kemudian mengalami fluktuasi hingga mencapai 91,80% pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%, maka cakupan kunjungan bayi selama 5 tahun terakhir telah mencapai SPM tersebut.



Gambar 2.48
Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

14. Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh

kecamatan di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.72
Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Puskesmas | Unit | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,00 |
| 2. | Jumlah Seluruh Kecamatan | Unit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0,00 |
| 3. | Cakupan puskesmas | Persen | 128,57 | 128,57 | 128,57 | 128,57 | 128,57 | 0,00 |

Sumber :

- 1) *Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017*
- 2) *Hasil Olahan, 2017*

Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 masih stabil dengan persentase 128,57%. Hal ini menandakan bahwa di seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas. Persentase cakupan puskesmas mencapai lebih dari 100% karena beberapa kecamatan memang memiliki lebih dari 1 puskesmas. Kecamatan-kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas umumnya dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduknya lebih besar dibandingkan kecamatan lain, yaitu Kecamatan Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, dan Danurejan. Tersedianya puskesmas di setiap kecamatan diharapkan memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan terdekat bagi masyarakat.

15. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan puskesmas pembantu dihitung berdasarkan perbandingan jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kota. Berikut ini merupakan cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta.

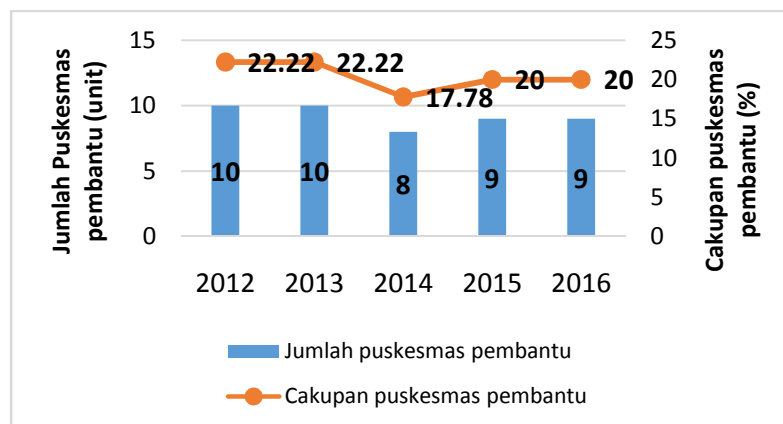
Tabel 2.73
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah puskesmas pembantu | Unit | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | -2,60 |
| 2. | Jumlah Kelurahan | Unit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0,00 |
| 3. | Cakupan puskesmas pembantu | Persen | 22,22 | 22,22 | 17,78 | 20,00 | 20,00 | -2,60 |

Sumber :

- 1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menurun. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2012-2013 tersedia 10 puskesmas pembantu (pustu), kemudian turun menjadi 8 pustu di tahun 2014, dan sedikit meningkat menjadi 9 pustu di tahun 2015-2016. Berkurangnya jumlah puskesmas pembantu dikarenakan penutupan beberapa pustu yang dianggap kurang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat karena jumlah pasien yang ditangani sangat sedikit. Beberapa pustu juga dialihfungsikan menjadi klinik rawat inap maupun rumah sehat lansia.



Gambar 2.49
Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

16. Jaminan Kesehatan

Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah saat ini adalah BPJS. BPJS ini masih sangat baru sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang menyertainya. Kendala yang terjadi ini cukup serius mengingat berhubungan dengan

kondisi kesehatan pasien. Menurut keterangan dari Bagian ADP RSUD Kota Yogyakarta beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan BPJS di RSUD Kota Yogyakarta adalah:

1) Verifikator merambah diagnosis dokter.

Sebagai contoh pasien di diagnosis Bronchopneumonia, namun hasil Rontgen Foto mengatakan Bronchitis, maka pihak rumah sakit diminta mengganti diagnosis menjadi Bronchitis. Seharusnya jika secara klinis bronchopneumonia, rumah sakit bertahan dengan diagnosis bronchopneumonia. Namun kenyataannya kalau menurut pihak BPJS, apabila diagnosis Bronchopneumonia hasil rontgen fotonya harus menunjukkan Seperti Pneumonia (sesuai hasil dari DPM).

2) Permenkes tentang Kegawatdaruratan perlu ditinjau ulang karena belum semua kondisi gawat darurat terakomodir, seperti contoh Vulnus lacerasi di extrememitas.

3) Belum ada Juknis verifikasi klaim untuk verifikator BPJS, sehingga tidak ada dasar dalam memverifikasi (menolak klaim).

4) Belum ada SDM (Petugas BPJS) di Poliklinik Sore, sehingga apabila petugas tidak ada (tidak standby), maka tidak terverifikasi karena kewenangan SEP pada Petugas BPJS.

5) Ada beberapa kasus rawat inap yang dipaksakan untuk kasus rawat jalan tanpa mau tahu kondisi umum pasien.

6) Permasalahan Obat Farmasi

a. Ada penyakit kronis yang belum masuk kedalam kategori 10 besar penyakit kronis versi BPJS, seperti: Gastritis.

b. Obat-obat dari diagnosis penyerta atau komplikasi dari DM (Diabetes Melitus) tidak bisa diklaim, Seperti: Ca Carbonat, Calos, Anemolat, dll.

C. Pekerjaan Umum

Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dimana mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa indikator pada aspek pekerjaan umum ini yang disesuaikan dan atau ditiadakan karena tidak tepat apabila digunakan untuk mengukur kinerja kewilayahan di Kota Yogyakarta, juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

1. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Dalam Sistem Pelayanan Minimum (SPM) kondisi jalan sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan didapatkan dari perbandingan antara kondisi jalan baik dengan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan sebagai kondisi jalan dengan kondisi baik dan sedang.

Tabel 2.74
Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Kondisi jalan baik | Km | 211,16 | 223,8 | 205 | 216 | 206,95 | -0,50 |
| 2. | Panjang jalan penghubung pusat kota | Km | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 0 |
| 3. | Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan | % | 85,11 | 90,21 | 82,63 | 87,06 | 83,42 | -0,50 |

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 menunjukkan kecenderungan yang negatif. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 kondisi jalan baik di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -0,50% per tahun, sedangkan di tahun yang sama, panjang jalan penghubung pusat kota di Kota Yogyakarta tidak mengalami pertumbuhan (stagnan). Sehingga dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi penurunan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai -0,50%. Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) menjadi 100%, persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas) menjadi 100%, persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) menjadi 100%, dan persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) menjadi 100%.



Gambar 2.50
Grafik Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan
di Kota Yogyakarta 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Meskipun dari tahun 2012 hingga tahun 2016 kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan khususnya pada kondisi jalan yang baik mengalami penurunan setiap tahunnya, namun di tahun 2015 kondisi jalan yang baik sempat mengalami peningkatan. Di tahun 2016 kondisi jalan yang baik kembali menurun menjadi 206,95 km atau 83,42% dari keseluruhan jalan yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Pemeluk Agama

Indikator rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama per 1000 penduduk. Berdasarkan tabel jumlah tempat ibadah berikut terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak dan cenderung mengalami peningkatan adalah masjid yang jumlahnya hingga tahun 2016 sebanyak 979 unit masjid, sedangkan jumlah gereja kristen dan pura memiliki jumlah dengan kecenderungan tetap dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Hal tersebut berbeda dengan jumlah gereja katolik dan vihara yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel 2.75
Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-----------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah Tempat Ibadah | | 961 | 1.015 | 1.033 | 1039 | 1032 | 1,80 |
| | a. Masjid | Unit | 906 | 958 | 979 | 979 | 979 | 1,96 |

| No. | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | b. Gereja Kristen | Unit | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |
| | c. Gereja Katolik | Unit | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | -13,06 |
| | d. Pura | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | e. Vihara | Unit | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3,93 |
| 2. | Jumlah Pemeluk Agama | Jiwa | | | | | | |
| | a. Islam | Jiwa | 336.339 | 335.389 | 344.995 | 335.389 | 339.087 | 0,20 |
| | b. Kristen | Jiwa | 31.193 | 26.478 | 26.995 | 26.478 | 26.452 | -4,04 |
| | c. Katolik | Jiwa | 46.195 | 43.196 | 40.638 | 42.691 | 42.472 | -2,08 |
| | d. Hindu | Jiwa | 803 | 552 | 565 | 552 | 536 | -9,61 |
| | e. Budha | Jiwa | 2.155 | 1.366 | 1.362 | 1.366 | 1.307 | -11,75 |

Sumber: SIPD Numerik Tahun 2016

Jumlah tempat ibadah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan kecuali gereja katolik yang mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata -13,06% pertahun. Jumlah tempat ibadah berupa masjid mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,96% pertahun dan jumlah vihara mengalami pertumbuhan rata-rata 3,93% pertahun, sedangkan untuk tempat ibadah lain seperti gereja kristen dan pura tidak mengalami penambahan jumlah tempat ibadah. Berbeda dengan tren pertumbuhan tempat ibadah, jumlah pemeluk agama dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Untuk mengetahui rasio ketersediaan tempat ibadah dilakukan perbandingan antara jumlah fasilitas tempat ibadah dengan jumlah pemeluk masing-masing agama dikalikan 1.000.

Tabel 2.76
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 1. | Rasio Tempat ibadah per 1.000 penduduk | unit per 1000 pemeluk agama | | | | | | |
| | a. Masjid | unit per 1000 pemeluk agama | 2,69 | 2,86 | 2,84 | 2,92 | 2,89 | 1,75 |
| | b. Gereja Kristen | unit per 1000 pemeluk agama | 1,31 | 1,55 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 4 |
| | c. Gereja Katolik | unit per 1000 pemeluk agama | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,26 | 0,09 | -11,21 |
| | d. Pura | unit per | 1,25 | 1,81 | 1,77 | 1,81 | 1,87 | 11 |

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| | | 1000 pemeluk agama | | | | | | |
| | e. Vihara | unit per 1000 pemeluk agama | 2,78 | 5,86 | 3,67 | 5,12 | 5,36 | 17,77 |

Sumber : SIPD Numerik Tahun 2016

Secara umum, perkembangan jumlah tempat ibadah per 1.000 pemeluk agama di Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan, kecuali rasio gereja katolik per 1.000 pemeluk agama katolik yang memiliki pertumbuhan rata-rata - 11,21% pertahun. Sesuai dengan jumlah pemeluk masing-masing agama, rasio tempat ibadah berupa vihara per 1.000 pemeluk agama paling banyak dibandingkan tempat ibadah lainnya. Sebaliknya jumlah gereja kristen paling sedikit dibandingkan dengan tempat ibadah yang lain.

3. Tempat Pemakaman Umum yang Dikelola Pemerintah Kota

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah. Terdapat empat TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu TPU Sasanalaya dengan luasan sebesar 12,65 hektar yang terletak di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan; TPU Sarilaya memiliki luas sebesar 6,497 hektar yang terletak di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; TPU Pracimalaya dengan luasan sebesar 12,213 hektar yang terletak di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan; serta TPU Utaralaya yang terletak di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo dan memiliki luasan 16,764 hektar, dan kesemuanya merupakan tanah milik negara. Keempat TPU tersebut dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki daya tampung sebanyak 12.579 unit dengan rincian 4611 unit untuk TPU Sasanalaya, 1779 unit untuk TPU Sarilaya, 3632 unit untuk TPU Pracimalaya, dan 3421 unit untuk TPU Utaralaya. Melihat daya tampung TPU yang tetap ini menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan cara untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman umum di masa mendatang yang semakin meningkat.

Tabel 2.77
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum | Unit | 12.579 | 12.579 | 12.579 | 12.579 | 12.579 |
| 2. | Jumlah penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 |
| 3. | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Sumber :

1. *Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017*
2. *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2017*

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikan dengan bilangan 1000. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk relatif tidak meningkat. Hal ini mengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2012 sampai tahun 2016, ditambah dengan luas dan daya tampung tempat pemakaman umum di Kota Yogyakarta yang cenderung stagnan (tidak bertambah).

4. Rasio Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PU No.01/PRT/M/2014 permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasio permukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Tabel 2.78
Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Luas Permukiman Layak Huni | Ha | 82.970 | 89.989 | 89.661 | 89.661 | 90.215 | 2,11 |
| 2. | Luas Wilayah Permukiman | Ha | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| 3. | Rasio permukiman layak huni | | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 3,66 |

Sumber :

1. SIPD Numerik Tahun 2015 dengan Hasil Olahan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017

Rasio rumah layak huni cenderung meningkat diikuti dengan penurunan jumlah penduduk yang ada di Kota Yogyakarta yang semula berjumlah 427.591 jiwa di tahun 2012 menjadi 411.282 jiwa di tahun 2016 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,97% per tahun. Di samping itu, peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh pelaksanaan bantuan untuk rumah tidak layak huni yang mendorong peningkatan jumlah rumah layak huni setiap tahunnya. Oleh karena itu rasio rumah layak huni dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,66% per tahun.

5. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota.

Tabel 2.79
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah Panjang Jalan *) | km | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 0,00 |
| 2. | Jumlah Penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -1 |
| 3. | Rasio panjang jalan per satuan penduduk | km/ jiwa | 0,000580 | 0,000610 | 0,000600 | 0,000599 | 0,000603 | 0,99 |

Sumber :

1. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Keterangan :

*) Jumlah Panjang Jalan Bernomor Ruas Jalan

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-rata sebesar 0,99% per tahun. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat ini diduga dipengaruhi oleh semakin menurunnya jumlah penduduk yang dihadapkan dengan panjang jalan yang tidak bertambah dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Meskipun relatif tidak mengalami peningkatan, namun semakin meningkatnya nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk ini dapat diantisipasi dengan meningkatkan kuantitas penggunaan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan yang menyebabkan akses jalan ke bagian kota semakin padat (belum dapat dicapai dengan mudah).



Gambar 2.51

Grafik Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalui roda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

6. Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota (Aksesibilitas)

Formula yang digunakan untuk menghitung jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk adalah dengan membagi jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda empat dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dan dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tidak ada pendataan mengenai formula pembagi untuk perhitungan indikator ini. Indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat) ini digunakan untuk menghitung aksesibilitas wilayah, namun pada dasarnya kondisi Kota Yogyakarta tidak terdapat wilayah yang terisolir, sehingga dapat dikatakan bahwa kesemua jalan di Kota Yogyakarta dapat diakses dan atau dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Tabel 2.80
Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota Yogyakarta (Aksesibilitas) Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Total panjang jalan eksisting | Km | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 |
| 2. | Total rencana panjang jalan | Km | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 |
| 3. | Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Dalam indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menghitung aksesibilitas (persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota) menggunakan formula jumlah panjang jalan eksisting dibagi dengan total rencana panjang jalan dikalikan dengan bilangan 100. Panjang jalan eksisting dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sepanjang 248,09 km (panjang jalan bernomor ruas jalan), sedangkan total rencana panjang jalan yang ditetapkan di Kota Yogyakarta adalah sepanjang 248,09 km, sehingga dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 2016 nilai indikator aksesibilitas di Kota Yogyakarta adalah 100%.

7. Panjang dan Kondisi Trotoar

Permendagri 54/2010 menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air adalah dengan membagi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, perhitungan mengenai panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sulit dilakukan pendataannya, hal ini dikarenakan dalam satu ruas jalan belum tentu terdapat drainase dan atau trotoar, atau hanya terdapat drainase dan atau trotoar di salah satu sisinya saja (ruas jalan kanan atau kiri saja), sehingga indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air diganti dengan panjang dan kondisi trotoar (umum) di wilayah Kota Yogyakarta, selain trotoar yang sudah ada tegel difabel di wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.81
Jumlah Panjang Jalan yang Dilengkapi Trotoar dan Kondisi
di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 1. | Jumlah panjang trotoar | M | 183,65 | | 184,10 | | 184,41 | |
| 2. | Trotoar yang sudah ada tegel difabel | M | 18,76 | 10,22 | 20,93 | 11,27 | 26,64 | 14,45 |
| 3. | Trotoar yang belum ada tegel difabel | M | 164,89 | 89,78 | 163,16 | 87,97 | 157,76 | 85,55 |
| 4. | Kondisi trotoar | M | | | | | | |
| | a. Baik | M | 115,36 | 62,81 | 117,79 | 63,96 | 118,71 | 64,37 |
| | b. Sedang | M | 54,13 | 29,48 | 54,13 | 28,1 | 54,13 | 29,35 |
| | c. Rusak | M | 14,15 | 7,71 | 12,17 | 7,42 | 11,56 | 6,27 |

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Panjang trotoar, baik yang sudah bertegel difabel dan yang belum bertegel difabel di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan dari yang semula di tahun 2012 sepanjang 182,72 Km menjadi 184,41 Km di tahun 2016. Di tahun 2016 sepanjang 26,64 Km (14,45%) trotoar sudah memiliki fasilitas tegel difabel. Ditinjau dari kondisinya di tahun yang sama sebesar 64,37% atau sepanjang 118,71 Km trotoar dalam kondisi yang baik. Meskipun peningkatan kondisi trotoar belum begitu signifikan, namun dari tahun ke tahun perbaikan kondisi trotoar terus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari

panjang trotoar yang berada pada kondisi baik dari tahun 2012 hingga tahun 2016 yang terus meningkat.

8. Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai

Formula yang dipergunakan untuk menghitung sempadan sungai yang dipakai bangunan rumah liar adalah panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi dengan panjang seluruh sempadan sungai kota dikali dengan bilangan 100. Namun data untuk indikator tersebut tidak dapat ditemukan karena belum pernah dilakukan pendataan, sehingga indikator ini diganti dengan data mengenai luasan areal permukiman di bantaran sungai.

Tabel 2.82
Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 1. | Luas areal permukiman di bantaran sungai | Ha | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | - |

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Luas areal permukiman di bantaran sungai wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan luasan yang sama dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kondisi Kota Yogyakarta sendiri yang secara administratif belum memiliki Perwal mengenai panjang sempadan sungai, sehingga selama ini sempadan sungai yang ditentukan oleh Kota Yogyakarta masih mengikuti sempadan sungai yang ditetapkan oleh provinsi (15 meter dari sungai). Namun apabila ditarik garis dari sungai, sempadan sungai di Kota Yogyakarta tidak ada yang berjarak 15 meter, bangunan di pinggir sungai tersebut melanggar aturan sempadan sungai, baik di Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong.

Sungai yang mengalir di wilayah Kota Yogyakarta berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, sempadan sungai sesuai PP No. 38 tahun 2011 tentang sungai kewenangan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak, sehingga data terkait sempadan sungai yang digunakan sebagai bangunan liar tidak dapat diperoleh. Selain itu, kondisi di lapangan saat ini cukup banyak bangunan yang terletak di kawasan sempadan sungai di Kota Yogyakarta. Namun tanah di sepanjang sungai tersebut sebagian besar merupakan tanah Magersari (tanah milik Keraton Yogyakarta). Tanah dan bangunan

yang berdiri di atasnya memiliki sertifikat hak pinjam pakai, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai bangunan liar.

9. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri PU No.01/PRT/M/2014 tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.83
Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Panjang Drainase Kondisi Baik | Km | 279,55 | 284,79 | 285,97 | 287,91 | 290,08 | 0,93 |
| 2. | Panjang Seluruh Drainase | Km | 321,42 | 324,92 | 328,63 | 330,57 | 332,74 | 1 |
| 3. | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 86,97 | 87,65 | 87,02 | 87,10 | 87,18 | 0,06 |

Sumber : Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni sebesar 279,55 Km pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 290,08 Km pada tahun 2016. Panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan angka pertumbuhan rata-rata 0,93% pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.



Gambar 2.52
Grafik Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Nilai persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan presentase tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta terutama dalam perbaikan drainase berhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

10. Persentase Kualitas Talud/Bronjong dan Saluran Pengairan

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor didapatkan dari hasil perhitungan formula jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikalikan dengan bilangan 100. Data untuk indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kota Yogyakarta tidak dapat ditemukan, hal ini dikarenakan tidak ada pembangunan turap di wilayah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman hanya melakukan kegiatan pembangunan talud, sehingga indikator ini disesuaikan dengan kondisi di Kota Yogyakarta dengan menghitung persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan. Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antara panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik dengan total panjang talud atau bronjong dan saluran air secara keseluruhan.

Tabel 2.84
Persentase Kualitas Talud atau Bronjong dan Saluran Pengairan Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| 1. | Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik | Km | 109,98 | 110,76 | 108,86 | 250 | 252,30 |
| 2. | Total panjang talud atau bronjong dan saluran air | Km | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 348 | 348 |
| 3. | Persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan | % | 72,23 | 72,74 | 71,50 | 72 | 72,5 |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik di Kota Yogyakarta memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni sepanjang 109,98 Km atau sebesar 72,23% pada tahun 2012 meningkat menjadi 252,30 Km atau sebesar 72,50% pada tahun 2016. Kondisi talud atau bronjong dan saluran air yang baik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi talud atau bronjong dan saluran air yang baik di tahun 2015.

D. Penataan Ruang

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, di antaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya. Dari ketiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, terdapat indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula dari Lampiran 1 Permendagri 54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta di masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, diantaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya. Dari ketiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, terdapat indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula dari Lampiran 1 Permendagri 54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

Perbandingan dilakukan dengan melihat persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah di Kota Yogyakarta. Melalui perhitungan tersebut terlihat pertumbuhan persentase RTH dengan

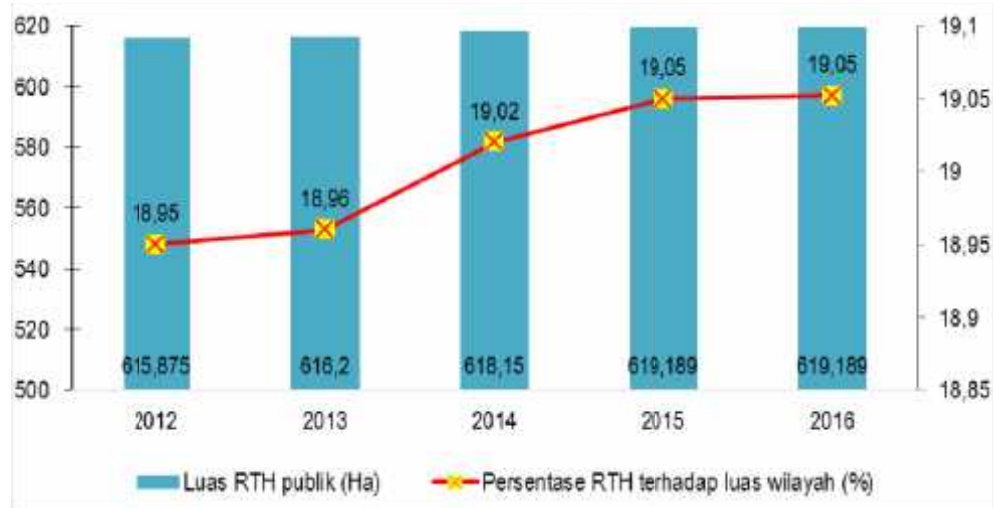
kecenderungan meningkat. Dari data diketahui bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0,13% pertahun. Hal tersebut berbanding lurus dengan nilai yang ditunjukkan oleh persentase RTH publik terhadap luas wilayah, yakni sebesar 18,95% di tahun 2012 dan meningkat menjadi 19,05% di tahun 2016.

Tabel 2.85
Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--------------------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Luas RTH publik | Ha | 615,875 | 616,2 | 618,15 | 619,189 | 619,189 | 0,15 |
| 2. | Luas wilayah | Ha | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | - |
| 3. | Persentase RTH terhadap luas wilayah | % | 18,95 | 18,96 | 19,02 | 19,05 | 19,05 | 0,14 |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

Dibalik peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, terdapat permasalahan dalam upaya peningkatan luasan ruang terbuka hijau untuk masa mendatang, yakni adanya kendala mengenai keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Hal tersebut mengingat luasan wilayah Kota Yogyakarta yang stagnan namun dihadapkan dengan berbagai perubahan pembangunan yang membutuhkan ruang kosong sebagai lahannya. Hal tersebut mulai ditunjukkan dari luasan RTH publik yang stagnan pada dalam kurun waktu 2015-2016.



Gambar 2.53
Grafik Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.86
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

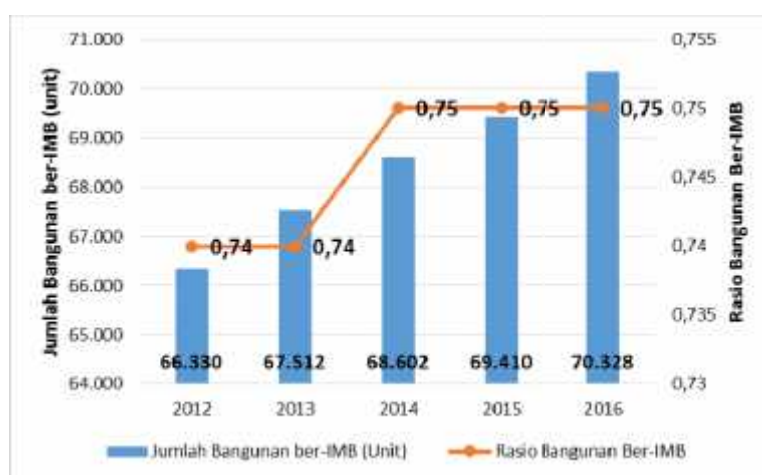
| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah Bangunan ber-IMB | Unit | 66.330 | 67.512 | 68.602 | 69.410 | 70.328 | 1,47 |
| 2. | Jumlah Bangunan | Unit | 89.649 | 90.649 | 91.921 | 92.729 | 92.965 | 0,91 |
| 3. | Rasio Bangunan | | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,34 |

Sumber:

- 1) *Data Berbasis Sembilan Fungsi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 (Data Tahun 2010-2013)*
- 2) *LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 (Data Tahun 2014); Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2017*

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2016 terus meningkat, yakni sebanyak 66.330 unit pada tahun 2012 hingga menjadi 70.328 unit di tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,47% per tahun. Kondisi yang meningkat juga terjadi pada jumlah bangunan di Kota Yogyakarta dengan

peningkatan bangunan rata-rata sebesar 0,91% per tahun. Namun, rasio bangunan yang ber-IMB hanya meningkat sedikit dalam kurun waktu 2012-2016. Nilai rasio bangunan ber-IMB pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,75 atau 75% dari seluruh bangunan yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua bangunan yang ada di Kota Yogyakarta memiliki izin saat bangunan tersebut dibangun.



Gambar 2.54
Grafik Rasio IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Formula yang digunakan dalam perhitungan ruang publik yang berubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publik yang tersedia. Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat pada tahun 2013 terdapat perubahan ruang publik yaitu Tempat Hiburan Rakyat (THR) atau yang biasa dikenal dengan Purawisata yang terletak di jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, yang berubah menjadi bangunan hotel dengan luas 24.690 m². Sedangkan ditahun 2012, 2014, 2015, dan 2016 tidak tercatat perubahan apapun pada ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.87
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|----------------|------|--------|------|------|------|
| 1. | Jumlah ruang publik yang berubah fungsi | m ² | 0 | 24.690 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2017

E. Perumahan

Terdapat lima indikator yang dirinci dalam urusan perumahan, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, penyediaan sanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layak huni. Sama halnya dengan urusan sebelumnya, pada urusan perumahan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010 yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah tangga pengguna air bersih adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Data untuk faktor pembilang (jumlah rumah tangga pengguna air bersih) menggunakan data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk penyebutnya (jumlah seluruh rumah tangga) menggunakan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perbedaan kedua sumber data mengakibatkan persentase rumah tangga pengguna air memiliki nilai yang fluktuatif.

Tabel 2.88
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

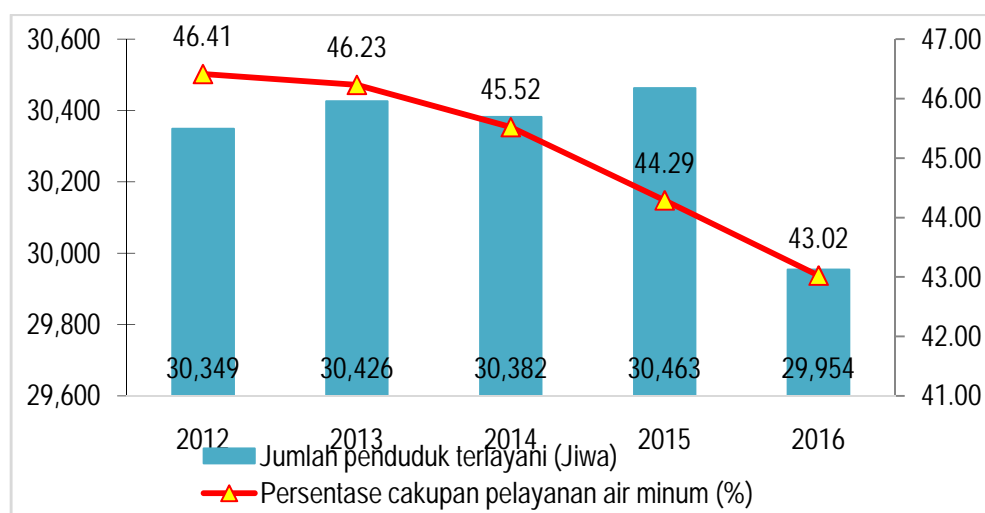
| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumb Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 1. | Jumlah rumah tangga pengguna air bersih | Unit | 30.349 | 30.426 | 30.382 | 30.463 | 29.954 | -0,33 |
| 2. | Jumlah seluruh rumah tangga | Unit | 87.808 | 94.092 | 92.965 | 92.965 | 92.965 | 1,44 |
| 3. | Persentase rumah pengguna air bersih | % | 34,60 | 32,34 | 32,68 | 32,77 | 32,22 | -1,77 |

Sumber :

1. Kinerja PDAM Tirtamarta, Tahun 2012-2015, dengan Hasil Olahan
2. SIPD Numerik Tahun 2016

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan sumber PDAM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni 30.349 rumah tangga di tahun 2012 menurun menjadi 29.954 rumah tangga di tahun 2016. Menurunnya jumlah rumah tangga pengguna air

bersih ini menyebabkan terjadinya penurunan persentase rumah tangga pengguna air bersih dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar - 1,77%. Minimnya jumlah pengguna air bersih dengan sumber PDAM, belum dapat mewakili jumlah rumah tangga pengguna air bersih, karena terdapat sumber-sumber air bersih lainnya yang mungkin juga digunakan oleh masyarakat seperti sumber air tanah, sumur, ataupun sumber lainnya. Namun penggunaan air bersih yang berasal dari sumber non-perpipaan juga dapat menimbulkan berbagai macam masalah khususnya terkait dengan kualitas baku mutu air yang tidak bisa terjamin. Hal ini juga menjadi salah satu kendala PDAM dalam meningkatkan jumlah persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.55
Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Selanjutnya, Kota Yogyakarta juga memiliki data mengenai fasilitas air bersih/ water purifier (non perpipaan) yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Data tersebut memiliki nilai yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni sebanyak 257 unit di tahun 2012 meningkat menjadi 313 unit di tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,05% per tahun.

Tabel 2.89
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 1. | Fasilitas air bersih/ water purifier (non perpipaan) | Unit | 257 | 266 | 266 | 303 | 313 | 5,05 |

Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan

Keterbatasan data membuat data yang disajikan belum dapat mewakili kondisi rumah tangga pengguna air bersih secara umum di Kota Yogyakarta. Namun dari peningkatan fasilitas air bersih/ water purifier non perpipaan yang ada dari tahun ke tahun, terjadi perkembangan yang positif. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa akses rumah tangga di Kota Yogyakarta terhadap air bersih semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator persentase rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dirasa kurang cocok apabila digunakan untuk perhitungan di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga penyebut dari formula ini yang semula adalah jumlah rumah tangga diganti menjadi jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya satu rumah yang ditinggali oleh beberapa rumah tangga.

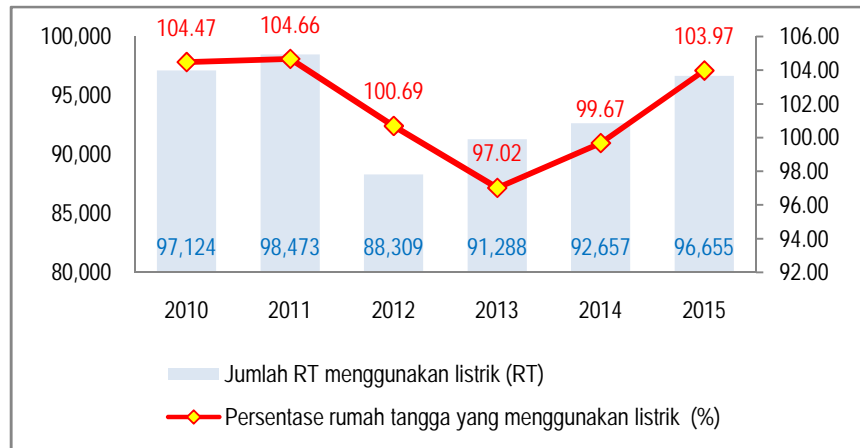
Tabel 2.90
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

| No. | Indikator | Satuan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik | RT | 97.124 | 98.473 | 88.309 | 91.288 | 92.657 | 96.655 | -0,096 |
| 2. | Jumlah Seluruh Rumah | Unit | 92.965 | 94.092 | 87.707 | 94.092 | 92.965 | 92.965 | - |
| 3. | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik | % | 104,47 | 104,66 | 100,69 | 97,02 | 99,67 | 103,969 | -0,096 |

Sumber :

- 1). Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan
- 2). Badan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, pertumbuhan rata-rata jumlah rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar -0,096% per tahun. Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif, yakni 97.124 rumah tangga di tahun 2010 menurun menjadi 966.655 rumah tangga di tahun 2015.



Gambar 2.56
Grafik Persentase Rumah Taggayang Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di tahun 2015 memiliki nilai lebih dari 100%. Hal ini mungkin terjadi karena satu rumah tangga dapat memiliki lebih dari satu pengguna listrik. Penurunan besaran persentase rumah yang menggunakan listrik diduga karena adanya penyambungan listrik secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi karena selain merugikan, menyambung secara ilegal juga membahayakan, dengan dampak yang besar, seperti terjadinya konsleting bahkan kebakaran. Selain itu masih adanya kendala dalam pendataan jumlah rumah juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka rumah tangga yang menggunakan listrik.

Tabel 2.91
Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta
Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

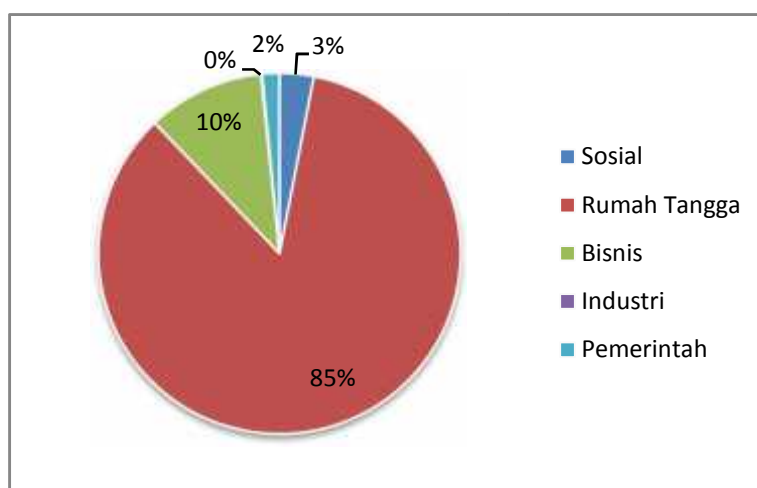
| Jenis Pelanggan | 2015 | | | 2016*) | | |
|-----------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| | Pelanggan | % | Daya (MVA) | Pelanggan | % | Daya (MVA) |
| Sosial | 3.329 | 3,03 | 42,58 | 3.488 | 3,05 | 47,64 |
| Rumah Tangga | 93.478 | 85,18 | 112,43 | 97.129 | 84,84 | 117,84 |
| Bisnis | 11.123 | 10,14 | 92,01 | 11.996 | 10,48 | 123,23 |
| Industri | 112 | 0,1 | 14,25 | 116 | 0,1 | 14,61 |
| Pemerintah | 1.705 | 1,55 | 19,56 | 1.761 | 1,54 | 20,95 |
| Total | 109.747 | 100 | 280,84 | 114.490 | 100 | 324,27 |

*)Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta per 29 Februari 2016

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Jenis pelanggan listrik di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 109.747 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 280,84 MVA. Jenis pelanggan listrik terbanyak adalah pelanggan rumah tangga, yakni

sebesar 85,18% dengan daya sebesar 112,43 MVA, sedangkan pelanggan dengan jumlah paling sedikit adalah pelanggan untuk industri yakni sebesar 0,10% dengan daya sebesar 14,25 MVA. Sedangkan di tahun 2016 terhitung per tanggal 29 Februari 2016, jumlah pelanggan listrik mencapai 114.490 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 324,27 MVA. Meskipun cenderung menurun dari tahun sebelumnya, jenis pelanggan listrik terbanyak masih dari pelanggan rumah tangga yakni sebesar 84,84% dengan daya sebesar 117,84 MVA cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pelanggan dengan jumlah paling sedikit adalah untuk industri yakni dengan jumlah 116 industri atau 0,1% dengan daya sebesar 14,61 MVA.



Gambar 2.57
Grafik Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2016
Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Penyediaan Sanitasi

Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Dari definisi tersebut, didapatkan keterangan bahwa penyediaan sanitasi terbagi menjadi lima indikator, yakni persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentase pengangkutan sampah, persentase pengoperasian tempat pembuangan akhir (TPA), dan persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Kota Yogyakarta tidak memiliki TPA

sehingga untuk indikator persentase pengoperasian tempat pembuangan akhir tidak digunakan.

a. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai

Indikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai di lingkup wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua indikator, yakni indikator cakupan sistem air limbah setempat yang memadai dan indikator cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Indikator persentase cakupan sistem air limbah setempat yang memadai didapatkan dari perbandingan antara jumlah kumulatif tangki septik yang baik (kondisinya / terlayani pengolahan limbah) dengan jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki masyarakat.

Tabel 2.92
Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai Tahun 2013-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah kumulatif tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah) | % | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 2. | Jumlah kumulatif tangki yang dimiliki masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase cakupan sistem air limbah setempat yang memadai | % | 30 | 40 | 50 | 60 |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

Jumlah kumulatif tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah) mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2012 jumlah kumulatif tangki septik yang baik sebesar 30% mengalami peningkatan hingga 60% di tahun 2016. Hal tersebut berbanding lurus dengan persentase cakupan sistem air limbah setempat yang memadai yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 30% di tahun 2012 meningkat menjadi 60% di tahun 2016.

b. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

Indikator cakupan air limbah skala komunitas/kawasan/kota didapatkan dari perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah penduduk kota. Indikator ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diakibatkan oleh pencemaran lingkungan akibat pengelolaan air limbah yang tidak benar.

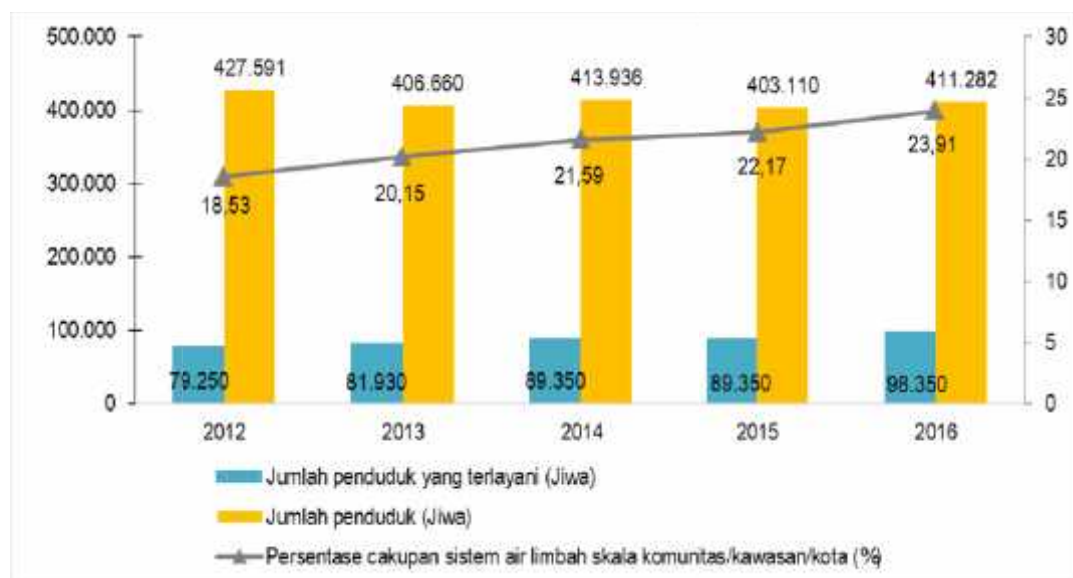
Tabel 2.93
Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah penduduk yang | Jiwa | 79.250 | 81.930 | 89.350 | 89.350 | 98.350 | 5,55 |

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | terlayani | | | | | | | |
| 2. | Jumlah penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 403.110 | 411.282 | -0,97 |
| 3. | Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota | % | 18,53 | 20,15 | 21,59 | 22,17 | 23,91 | 6,58 |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

Peningkatan jumlah penduduk yang terlayani pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 berbanding lurus dengan nilai persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota di lingkup wilayah Kota Yogyakarta yang juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu yang sama (tahun 2012 hingga tahun 2016), yakni 18,53% pada tahun 2012 meningkat menjadi 23,91% di tahun 2016 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,58% per tahun.



Gambar 2.58
Grafik Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

c. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan

Indikator selanjutnya adalah persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun, yang didapatkan dari perbandingan antara total luasan daerah bebas genangan dengan total luas daerah rawan genangan.

Tabel 2.94
Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, Selama 2 Jam) lebih dari 2 Kali Setahun Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Total luasan daerah bebas genangan | Ha | 10,2752 | 8,2348 | 7,1258 | 8,2348 | -16,72 |
| 2. | Total luasan daerah rawan genangan | Ha | 10,2972 | 10,2972 | 10,2972 | 10,2972 | - |
| 3. | Persentase Tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun | % | 99,79 | 79,97 | 69,20 | 79,97 | -16,73 |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Kurun waktu 2013 hingga tahun 2016 tercatat seluas 10,2972 hektar kawasan di Kota Yogyakarta masih menjadi daerah rawan genangan. Di tahun 2013, sebesar 99,79% luas daerah rawan genangan sudah terbebas dari genangan. Kondisi yang cenderung menurun justru terjadi di tahun 2014 dan tahun 2015, secara berturut-turut terjadi penurunan persentase luas wilayah tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun yakni 79,97% menjadi 69,20%. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu sebesar 79,97% dengan pertumbuhan rata-rata -7,11% per tahun. Kecenderungan pertumbuhan yang menurun ini kemungkinan dapat terjadi akibat kondisi kualitas drainase yang ada, namun selain itu kondisi curah hujan pada tahun tersebut yang cenderung sulit untuk diprediksi juga membuat penanganan genangan menjadi terhambat.

Selanjutnya, indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan yang mulai tahun 2015 berganti menjadi indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah. Indikator ini dijelaskan secara mendetail dalam urusan lingkungan hidup poin 6. Sama halnya dengan persentase pengurangan sampah di perkotaan, indikator persentase pengangkutan sampah juga mengalami pergantian nama indikator menjadi persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), dimana indikator ini dirinci secara mendetail pada urusan lingkungan hidup poin 1.

4. Lingkungan Permukiman Kumuh

Indikator lingkungan permukiman kumuh memiliki kesamaan formula dengan indikator lingkungan permukiman pada urusan pekerjaan umum. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah dengan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.95
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dan Luas Wilayah di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

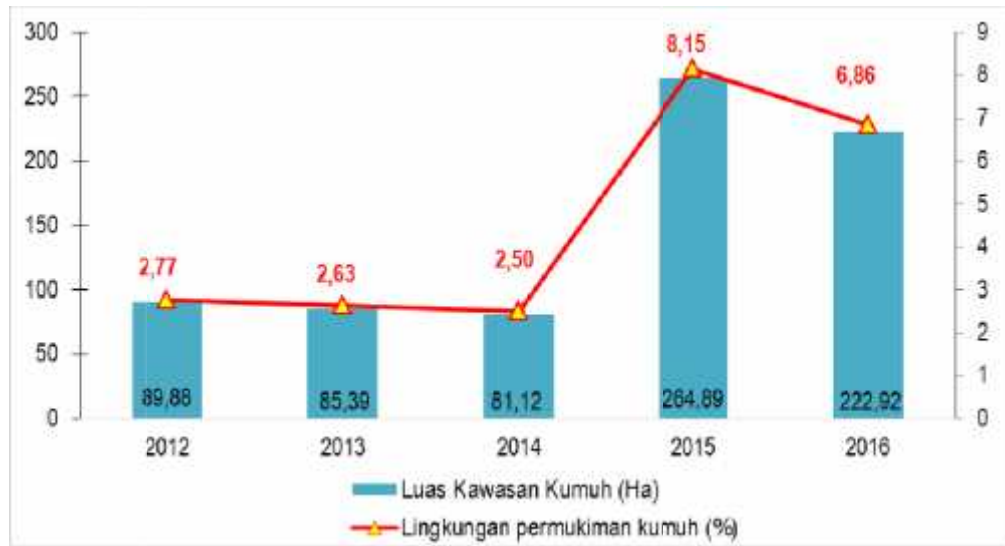
| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Luas Kawasan Kumuh | Ha | 89,88 | 85,39 | 81,12 | 264,89 | 222,92 | 25,49 |
| 2. | Luas Wilayah | Ha | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | - |
| 3. | Lingkungan permukiman kumuh | % | 2,77 | 2,63 | 2,50 | 8,15 | 6,86 | 25,44 |

Sumber :

1. SIPD Numerik Tahun 2014 dengan Hasil Olahan

2. Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017

Luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Peningkatan luasan tersebut terjadi secara signifikan, yakni sebesar 89,88 hektar pada tahun 2012 meningkat menjadi 222,92 hektar atau sekitar 6,86% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan SK Walikota No. 393 Tahun 2014, sebagian besar permukiman tersebut umumnya terdapat di sepanjang bantaran Kali Winongo, Kali Code dan Kali Gajah Wong. Peningkatan luas kawasan kumuh ini kemungkinan terjadi karena adanya pembaharuan data dengan kriteria penghitungan yang lebih detil, mengingat luasan permukiman kumuh dari tahun ke tahun diketahui justru mengalami kenaikan meskipun dengan luas wilayah permukiman yang cenderung stagnan.



Gambar 2.59
Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
 Sumber : Hasil Olahan, 2017

Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya rumah tidak layak huni (BSPS RTLH) di beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementerian Perumahan Rakyat, dan salah satu pihak swasta.

5. Persentase Rumah Layak Huni

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah layak huni adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah seluruh rumah dikalikan dengan bilangan 100. Persentase yang ditunjukkan oleh indikator persentase rumah layak huni di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

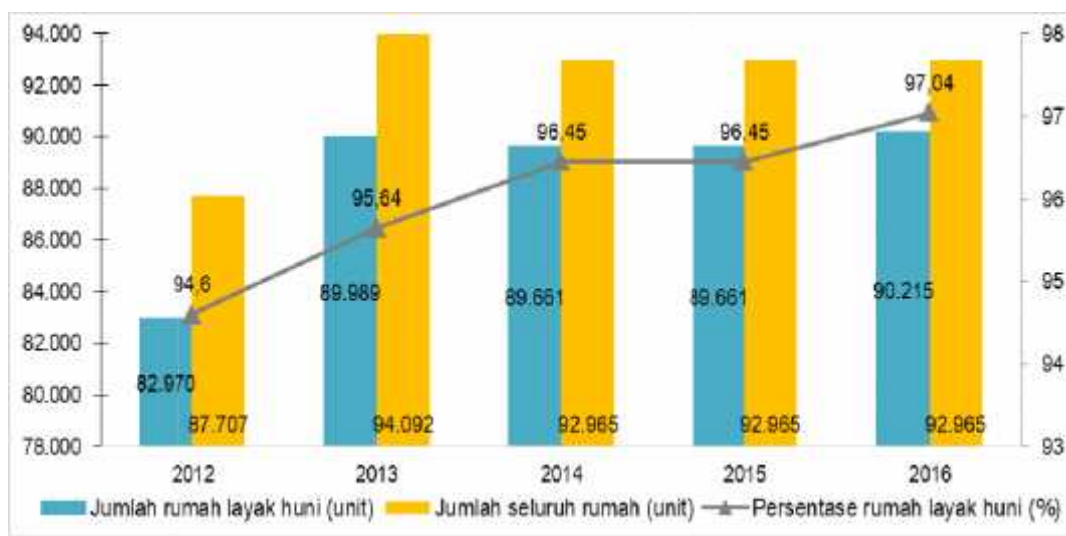
Tabel 2.96
Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah rumah layak huni | Unit | 82.970 | 89.989 | 89.661 | 89.661 | 90.215 | 2,11 |
| 2. | Jumlah seluruh rumah | Unit | 87.707 | 94.092 | 92.965 | 92.965 | 92.965 | 1,47 |
| 3. | Persentase rumah layak huni | % | 94,60 | 95,64 | 96,45 | 96,45 | 97,04 | 0,64 |

Sumber :

1. LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, dengan Hasil Olahan
2. SIPD Numerik Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebanyak 82.970 unit jumlahnya fluktuatif dengan kecenderungan meningkat hingga tahun 2016 jumlahnya menjadi 90.215 unit. Disamping itu, pada tahun 2014 hingga tahun 2015 jumlah rumah layak huni stagnan, yakni sebanyak 89.661 unit. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan persentase rumah layak huni yang juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni sebesar 94,60% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 97,04% pada tahun 2016 dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 0,64% per tahun.



Gambar 2.60
Grafik Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Indikator persentase rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Yogyakarta. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Persepsi rumah tidak layak huni menurut Profil Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2004 adalah keluarga yang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis, estetika, dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak huni diantaranya adalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan, bambu yang mudah rusak tertiuip angin; (c) tidak memiliki ventilasi; (d) atap mudah bocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukan ruang; (f) tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, sempit, dan berhimpitan.

Faktor penyebab keluarga tinggal di rumah tidak layak huni adalah (a) miskin secara ekonomi; (b) pengaruh lingkungan rumah tinggal; (c) sekedar untuk tempat berteduh selama tinggal dan bekerja di kota; (d) tidak memiliki pengetahuan tentang rumah sehat; (e) penghuninya malas

dan masa bodoh. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpai di wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, maupun Gajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel kereta api, kolong-kolong jembatan, atau terminal.

Selanjutnya, menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni di Kota Yogyakarta. Kriteria yang dimaksudkan mengenai kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di Kota Yogyakarta diantaranya adalah (a) luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m² per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m² per orang (bobot nilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2); (c) bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan gedheg, kayu kualitas rendah (bobot nilai 2); serta (d) adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2). Berdasarkan dengan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlah antara 1-4 maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah kurang layak huni, sedangkan apabila bobot nilai berjumlah sama dengan atau lebih dari lima maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni.

Tabel 2.97
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-------------------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | Unit | 667 | 667 | 3.343 | 3.304 | 3.304 |

Sumber :

1. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013 (Data Tahun 2012)
2. Rekapitulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Bappeda Kota Yogyakarta, 2015 (Data Tahun 2013)
3. SIPD Numerik Tahun 2016 (Data Tahun 2014-2016)

Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedong Tengen, Jetis, dan Tegalrejo, dengan luasan sebesar 278,70 hektar. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi

syarat. Dalam kurun waktu 2013 hingga tahun 2014 jumlah rumah idak layak huni mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 667 unit rumah di tahun 2012 meningkat menjadi 3.343 unit di tahun 2014. Hal tersebut berlaku hingga tahun 2016 dengan jumlah rumah tidak layak huni yang tidak mengalami perubahan secara signifikan yaitu berjumlah 3.304 unit di tahun 2016. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan sumber pendataan yang berbeda. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri masih terus melakukan kajian terkait jumlah dan luas kawasan permukiman tidak layak huni untuk menentukan strategi yang harus dilakukan selanjutnya

F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk di dalamnya adalah pemerataan ekonomi memerlukan langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Otonomi daerah telah memberikan amanah untuk menyelenggarakan urusan wajib. Manifestasi penyelenggaraan urusan wajib ini divisualisasikan dengan eksisnya SKPD yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan urusan wajib tersebut.

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Untuk mendukung trantibum dan penegakan Perda diperlukan dukungan Satpol PP yang memadai, agar mampu menjangkau seluruh fungsi dan tugas di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu jumlah polisi pamong praja (Pol PP) perlu dipastikan, sehingga diketahui rasionalitas antara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Pol PP dengan jumlah beban kerja.

Rasio Pol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah Pol PP dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Pol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Pol PP pada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada level individu Pol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat

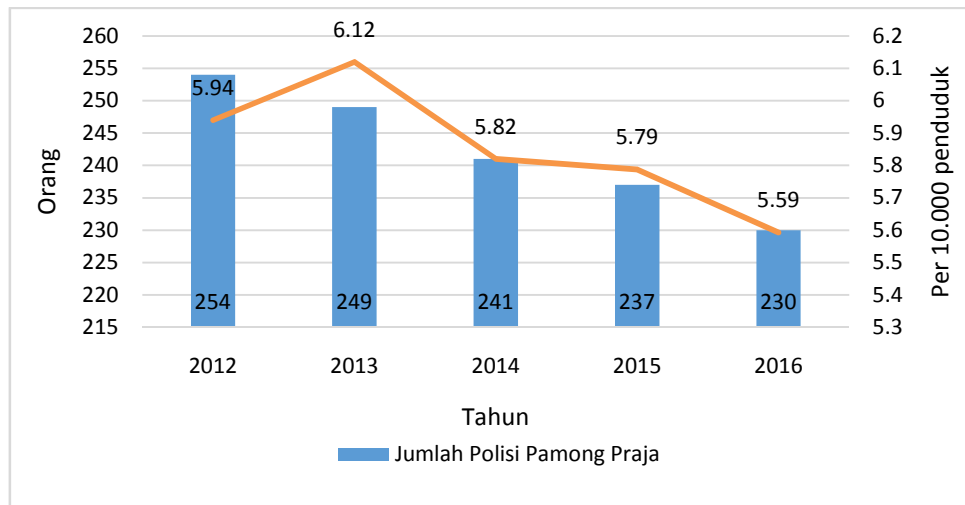
potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Hakikat dari rasio Pol PP per 10.000 penduduk selanjutnya akan memberikan kepastian tentang tingkat keterpenuhan SDM dalam pelayanan trantibum dan penegakan Perda, dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel2.98
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| Jumlah Polisi Pamong Praja | Orang | 254 | 249 | 241 | 237 | 230 | -2,45 |
| Jumlah Penduduk per 1000 penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk | | 5,94 | 6,12 | 5,82 | 5,79 | 5,59 | -1,50 |

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017, Jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2017

Jumlah SDM Satpol PP yang secara berangsur-angsur mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga 2016. Linearitas penurunan jumlah penduduk dengan jumlah personil Pol PP ini menyebabkan rasio antara Pol PP per 10.000 juga mengalami stagnasi, yang berada di kisaran 6 orang. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah Pol PP setiap tahunnya mengalami penurunan. Tren penurunan jumlah Pol PP ini dikarenakan belum adanya rekrutmen polisi pamong praja, sementara banyak Pol PP yang sudah pensiun. Meskipun demikian, rasio jumlah Pol PP mengalami fluktuasi. Fluktuasi rasio jumlah Pol PP ini dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah penduduk yang jika dihitung rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami rata-rata penurunan sebesar 1,50 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya, tren menurunnya jumlah Pol PP dan fluktuasi rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk dapat dijelaskan melalui grafik di bawah ini.



Gambar2.61
Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Makna grafik tersebut adalah pada tahun 2012-2016 setiap 10.000 penduduk Kota Yogyakarta dilayani oleh kurang lebih 6 orang Pol PP. Kendati telah mengalami penurunan jumlah penduduk, akan tetapi perbandingan Pol PP tidak mengalami peningkatan sebab terjadinya pensiun dan kebijakan rotasi pegawai memengaruhi akumulasi jumlah Pol PP, sementara kebijakan moratorium pegawai masih berlaku. Dengan demikian rekrutmen belum dilakukan untuk menambah pasukan Pol PP. Upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi dalam penanganan trantibum dan penegakan Perda dengan dukungan SDM yang terbatas, adalah memaksimalkan program dan kegiatan yang bersifat preventif, dengan memasukkan pembiasaan perilaku budaya tertib, sopan santun, tatakrama dan tatasusila. Sosialisasi budaya tertib di jalan, di tempat umum perlu diagendakan, agar mencegah pelanggaran trantibum dan Perda.

2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas). Kota Yogyakarta merupakan wilayah *urban* yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas. Banyaknya perbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakin memantik kemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisi tertentu gesekan antar kelompok maupun komunitas dimungkinkan dapat terjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti

kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk diharapkan dapat menggambarkan perbandingan jumlah Sumber Daya Aparatur Linmas dengan jumlah penduduk sebagai objek penerima layanan, sehingga dari rasio tersebut dapat diketahui beban kerja personil Linmas dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini merupakan tabel informasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2012 hingga 2016.

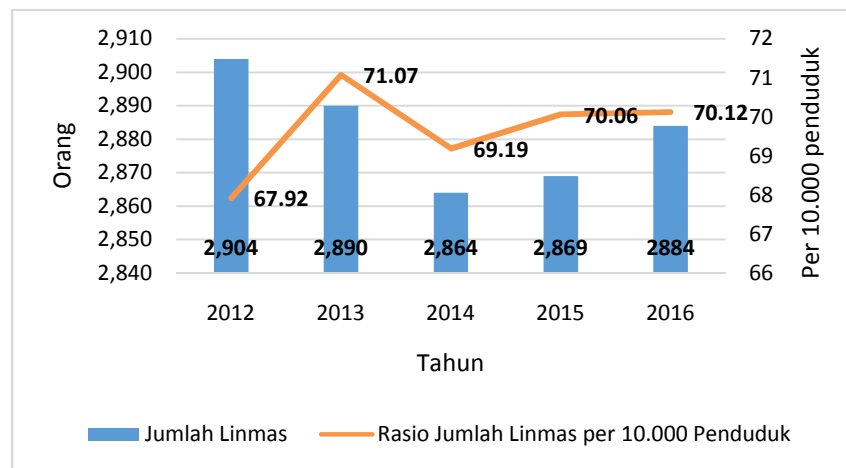
Tabel2.99
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| Jumlah Linmas | Orang | 2.904 | 2.890 | 2.864 | 2.869 | 2884 | -0,17 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk | | 67,92 | 71,07 | 69,19 | 70,06 | 70,12 | 0,80 |

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017, Jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah petugas Linmas secara akumulatif sangat besar hingga mencapai angka ribuan, karena pelayanan Linmas menjangkau hingga di Kelurahan. Kendati demikian, jumlah petugas Linmas berangsur-angsur mengalami penurunan. Penurunan jumlah personil Linmas sesuai data merupakan penurunan yang bersifat signifikan hingga menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 0,17. Hal ini secara umum dikarenakan faktor usia yaitu pensiun dan belum ada regenerasi.

Terjadinya tren penurunan jumlah petugas Linmas ini tidak diikuti dengan penurunan rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk justru mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Dengan terjadinya penurunan jumlah penduduk, maka rasio personil Linmas per 10.000 menjadi meningkat. Grafik di bawah ini menggambarkan penurunan jumlah personil Linmas dari tahun 2012 hingga 2016 dan fluktuasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk:



Gambar 2.62
Grafik Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2002-2016
 Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rasio petugas Linmas yang dikonsentrasikan untuk menjalankan tugas dalam trantibmas mencapai perbandingan yang lebih baik dalam 10.000 penduduk jika dibandingkan dengan personil Pol PP. Hal ini disebabkan wilayah kerja Linmas menjangkau tingkat Kelurahan/padukuhan, sedangkan Pol PP dengan substansi trantibum dan penegakan Perda hanya menjangkau tempat-tempat umum/fasilitas umum. Dari data di atas dapat dilihat rata-rata jumlah linmas adalah 70-71 orang dalam 10.000 penduduk.

3. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

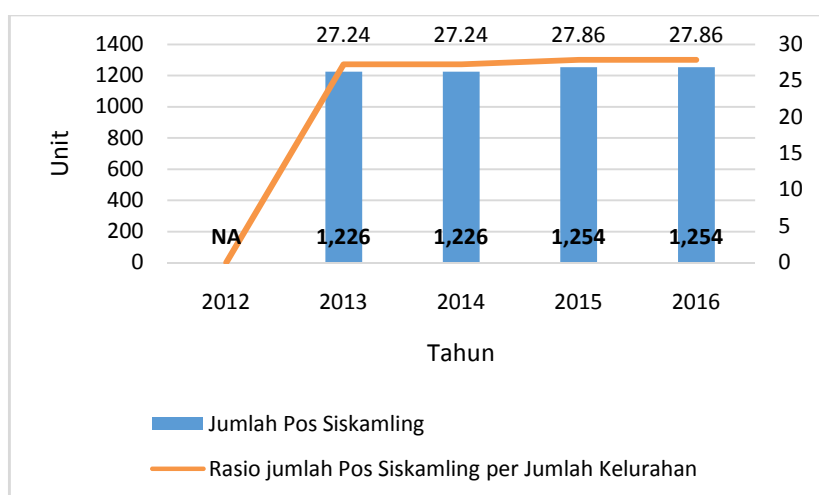
Pos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamanan lingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Siskamling adalah kelembagaan sosial terbawah yang lahir dari rembug warga sebagai inisiatif untuk menciptakan keamanan lingkungan secara *bottom up*. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah seluruh kelurahan di kota Yogyakarta. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.100
Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah Pos Siskamling | Unit | N/A | 1.226 | 1.226 | 1.254 | 1.254 |
| Jumlah Kelurahan | Kelurahan | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rasio jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan | | - | 27,24 | 27,24 | 27,86 | 27,86 |

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah Pos Siskamling di kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 28 unit dan pada tahun 2016 jumlah pos siskamling tetap. Penurunan jumlah pos siskamling ini terjadi karena adanya pengalihan status tanah. Penurunan jumlah Pos Siskamling mencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibat sistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yang telah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modern yang memerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan keluarga kecil/inti (nucleus family), banyaknya pendatang yang kurang memiliki ikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tata kehidupan bermasyarakat, dll. Meningkatnya jumlah pos siskamling pada tahun 2015 sebanyak 28 unit semoga menjadi cikal bakal meningkatnya kembali semangat gotong royong warga yang semakin lama kian terkikis. Sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menjalankan konsep kekeluargaan dan kekerabatan dalam tata kehidupan bermasyarakat.



Gambar2.63
Grafik Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Ketertiban, 2016 diolah

Perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan Siskamling. Pembinaan terhadap kelompok Siskamling perlu dilakukan. Monitoring dan evaluasi pihak pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Pemkot terhadap kelompok Siskamling perlu diadakan secara periodik.

4. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah

Sistem informasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta pertama kali *dilaunching* pada tahun 2002. Sistem informasi pelayanan perizinan merupakan pelayanan strategis dalam menumbuh-kembangkan investasi daerah. Geliat perekonomian diharapkan dapat semakin dinamis dengan difasilitas sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif. Pelayanan perizinan satu pintu menjadi pintu pembuka tumbuhnya investasi sehingga banyak tersedia peluang kerja, meningkatnya *income* per kapita dan pendapatan asli daerah. Untuk itulah sistem informasi pelayanan perizinan menjadi sangat penting. Berikut ini merupakan tabel informasi adanya sistem pelayanan perizinan dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Tabel 2.101
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2013,2015,2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2012-2016 tersedia sistem informasi pelayanan perizinan. Hasil identifikasi jenis-jenis sistem informasi pelayanan perizinan perlu dilakukan sehingga secara jelas. Sistem informasi pelayanan perizinan yang dimiliki Dinas Perizinan hingga tahun 2015 meliputi:

- a. SIM Perizinan meliputi pendaftaran, routing slip, dan cetak SK,
- b. SIM dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan),
- c. SIM IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dan
- d. SIM Pengawasan Pengaduan.

Pemanfaatan SIM pelayanan perizinan perlu dioptimalkan agar mendukung pertumbuhan investasi, peningkatan ketertiban secara luas ke dalam banyak aspek, diimbangi dengan peningkatan perilaku positif masyarakat yang taat pada regulasi dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Di samping itu peningkatan aksesibilitas SIM pelayanan perizinan perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan.

5. Persentase Peningkatan Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu tugas yang melekat pada Dinas Ketertiban. Penegakan Perda menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan

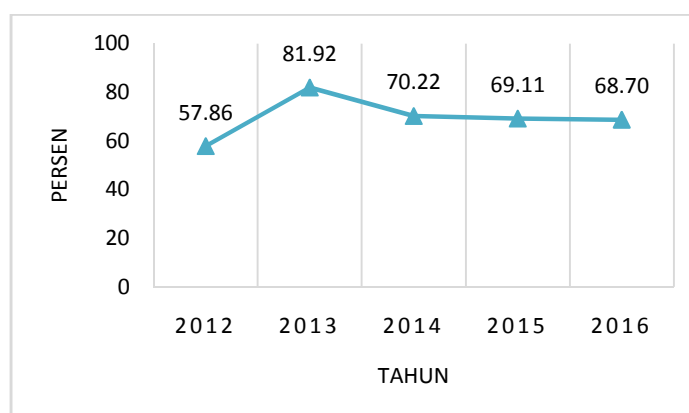
tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalam mengatur suatu subyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

Tabel2.102
Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA | Kasus | 842 | 965 | 941 | 960 | 1058 | 5,87 |
| Jumlah Pelanggaran PERDA | Kasus | 1.455 | 1.178 | 1.340 | 1389 | 1.540 | 1,43 |
| Penegakan PERDA | Persen | 57,86 | 81,92 | 70,22 | 69,11 | 68,70 | 4,39 |

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Angka penyelesaian perda mengalami fluktuasi. Sementara itu jika dilihat pada pertumbuhan rata-ratanya, jumlah penyelesaian penegakan perda dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,87 persen per tahun, sementara tingkat pelanggaran Perda mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 persen per tahun. Pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan persentase pelanggaran perda. Jumlah penyelesaian penegakan perda meningkat namun jumlah pelanggaran perda yang juga meningkat. Jika dianalisis penurunan penegakan perda pada 2 tahun terakhir ini adalah karena banyaknya oknum pelanggar perda yang tidak mau menghadiri persidangan dan terjadinya tren penurunan jumlah polisi pamong praja sebagai satuan petugas yang bertugas untuk menegakan pelanggaran Perda.



Gambar2.64
Grafik Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Banyaknya pelanggar perda yang tidak hadir memenuhi panggilan persidangan perlu ditindaklanjuti dengan diikuti sanksi yang tegas. Dengan demikian, masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memenuhi ketentuan yang diatur oleh setiap Perda. Perlu adanya target tentang upaya menekan pelanggaran Perda, dan dengan tindakan yang lebih preventif dalam mensosialisasikan Perda secara intensif. Hal ini akan mampu mengantisipasi pelanggaran Perda di lapangan, dan menjadi salah satu solusi mengingat jumlah Pol PP yang terbatas, sehingga tentunya akan mengalami kesulitan jika permasalahan penegakan Perda terlalu berat di tindakan kuratif.

6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Satpol PP merupakan sebuah institusi yang berperan penting dalam penegakan Perda dan trantibum. Untuk memenuhi fungsi dan tugas pokok maka Pol PP perlu melakukan kegiatan patroli secara rutin. Pengamanan kondisi tempat-tempat umum dan memonitor pelaksanaan Perda dapat dilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli di lapangan. Indikator ini dihitung dari banyaknya kelompok patroli dikalikan tiga kali patroli dalam sehari.

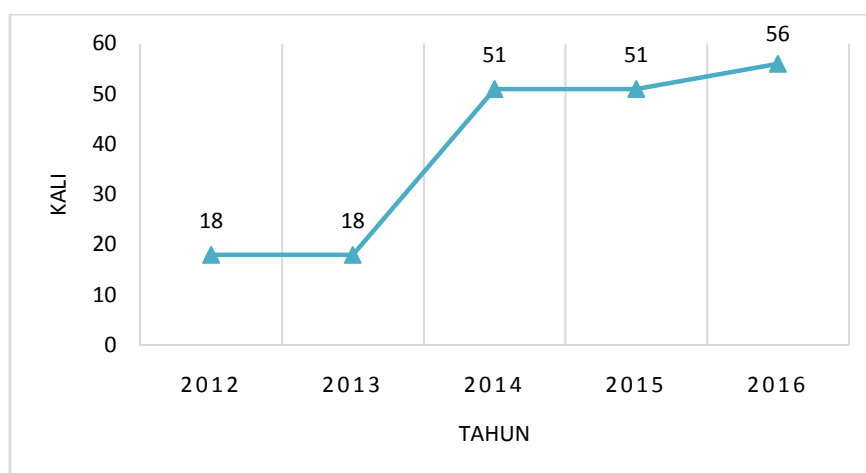
Tabel 2.103
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Jumlah patroli petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam | kali | 18 | 18 | 51 | 51 | 56 | 18 | 32,81 |

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Jika angka dalam tabel di atas diperoleh dari jumlah kelompok patroli dikali tiga kali patroli, maka data di atas menunjukkan bahwa dalam pada tahun 2012 hanya terdapat 6 kelompok patroli di Kota Yogyakarta, sementara di tahun 2015 meningkat menjadi 17 kelompok. Bertambahnya jumlah kelompok ini disebabkan oleh adanya kebijakan penempatan kelompok patroli Satpol PP di setiap kecamatan mulai tahun 2014, setiap satu kelompok patroli terdiri dari tiga hingga lima orang petugas. Sehingga, jumlah pelaksanaan patroli yang menjadi tugas Pol PP dari tahun 2012 yaitu 18 kali dalam 24 jam, namun pada tahun 2014 dan 2015 meningkat tajam menjadi 51 kali. Kemudian meningkat kembali

menjadi 56 kali pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan jumlah Pol PP yang semakin menurun, namun jumlah patroli yang dilakukan mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat yaitu dari hanya 18 kali per 24 jam menjadi 56 kali per 24 jam, maka ini merupakan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan rata-rata jumlah patroli adalah 32,81 persen per tahun.



Gambar 2.65
Grafik Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Kebutuhan patroli semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat logis jika dikaitkan dengan terjadinya banyak pelanggaran Perda sebagaimana data penegakan perda yang dipaparkan di bagian lain. Perubahan sosial yang menurunkan semangat kebersamaan dan gotong-royong, proses monetisasi yang berjalan terus akibat tuntutan hidup semakin tinggi, maka semakin menjadi pemicu pelanggaran terhadap Perda. Untuk itulah proses preventif perlu lebih digalakkan dengan melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah lokal di Kelurahan dan koordinasi dengan OPD terkait. Mengingat personil Pol PP yang terbatas maka perlu ditingkatkan kemampuan Satpol PP dalam upaya mencapai koordinasi, sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait. Arus koordinasi dengan Linmas dan tokoh masyarakat serta kelompok Siskamling hendaknya lebih intensif.

7. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kota

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran K3 yang terjadi dengan jumlah penyelesaiannya. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 55,21 persen

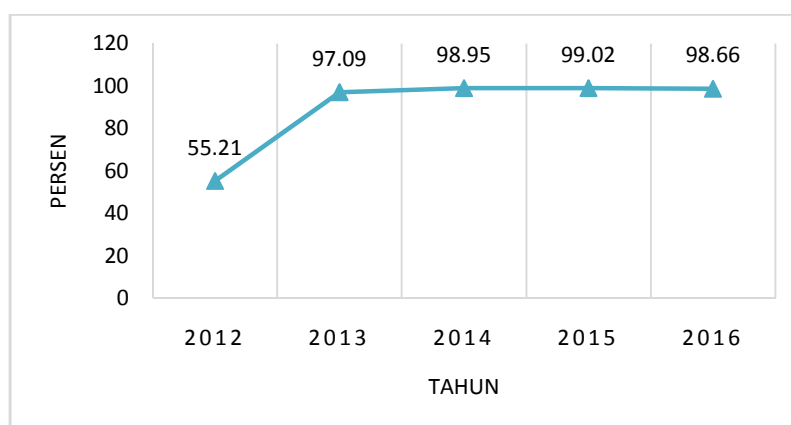
kemudian pada tahun 2013 dan 2014 persentase penyelesaian K3 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 98,95 persen dan meningkat kembali menjadi 99,02 persen pada tahun 2015 kemudian turun menjadi 98,66 persen pada tahun 2016. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.104
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)
di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | Kasus | N/A | 7.113 | 7.252 | 8.568 | 6529 | -2,82 |
| Jumlah Pelanggaran K3 | Kasus | N/A | 7.326 | 7.329 | 8.652 | 6.618 | -3,33 |
| Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | Persen | 55,21 | 97,09 | 98,95 | 99,02 | 98,66 | 15,62 |

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Peran serta masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan penegakan K3 perlu digalang secara intensif. Agar dalam masyarakat tumbuh kesadaran untuk saling peduli dan saling menjaga merupakan langkah startegis untuk menciptakan trantibum dan trantibmas. Kelembagaan sosial di tingkat padukuhan dan kelurahan sebaiknya dioptimalkan peran sertanya dalam menjaga penegakan K3.



Gambar 2.66
Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Dilihat dari data di atas tampak pencapaian penyelesaian K3 sudah sangat baik. Namun penyelesaian K3 ini memiliki beban kuratif yang sangat tinggi. Agar terjadi trantibum dan trantibmas yang efektif maka langkah preventif dengan meningkatkan peran serta pemerintah lokal, kelembagaan sosial di masyarakat serta pemuka masyarakat maupun

perorangan perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi masalah K3 dan menekan pelanggaran K3 ini perlu diprogramkan ke depan peningkatan kesadaran generasi muda dan masyarakat luas untuk menghidupkan budaya Siskamling dan kesadaran hukum (kadarkum).

Pengukuran terhadap ketertiban yang didasarkan pada penyelesaian K3 tentunya bukan merupakan indikator yang tuntas. Kinerja yang didasarkan pada output saja dapat mengantarkan pada bias pemaknaan. Jika pelanggaran K3 tidak terjadi tentunya tidak ada masalah yang perlu diselesaikan, sehingga kinerja yang dicapai berdasarkan indikator ini buruk. Sementara itu jika tidak ada pelanggaran K3 secara riil justru merupakan sebuah prestasi dalam fasilitasi ketertiban dan keamanan. Untuk itu perlu diarahkan pada indikator outcome dengan menempatkan penilaian terhadap turunnya pelanggaran K3 sampai ke nilai “nol” adalah sebagai capaian kinerja tertinggi.

Sejak tahun 2015, upaya preventif yang dilakukan Dinas Ketertiban (Saat ini Satpol PP) dalam menegakkan K3 salah satunya adalah dengan memunculkan Gerakan Panca Tertib untuk Jogja Istimewa. Dalam gerakan ini seluruh lapisan masyarakat ikut menangani kasus ketertiban. Munculnya Gerakan Panca Tertib ini menjadi penting mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Ketertiban, apalagi berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja, pemenuhan kebutuhan SDM di Dinas Ketertiban baru mencapai 64 persen. Untuk menyisiati kondisi tersebut, masyarakat perlu digerakkan dan disadarkan untuk bersama-sama menegakkan K3. Gerakan Panca Tertib meliputi Tertib Sosial, Tertib Lingkungan, Tertib Daerah Pinggir Jalan, Tertib Bangunan dan Tertib Usaha.

8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota

Linmas merupakan petugas yang sangat dekat dengan masyarakat. Keberadaan Linmas hingga di instansi terbawah yaitu pedukuhan/kampung. Hal ini disebabkan Linmas memiliki tugas pokok dalam perlindungan masyarakat, sehingga perlu dilihat perbandingan rasional dalam pelayanan terhadap jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah petugas Linmas dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Linmas dari tahun 2012 hingga 2016 terlihat fluktuatif.

Tabel2.105
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| Jumlah Petugas Linmas | Orang | 2.904 | 2.890 | 2.864 | 2.869 | 2894 | -0,09 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| Persentase Jumlah Linmas | Persen | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,86 |

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2017, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Kebijakan moratorium telah menekan jumlah Linmas dari tahun ke tahun karena banyak personil yang menjalani masa pensiun. Pada tahun 2016 setiap 10.000 penduduk secara rerata dilayani oleh 70 orang petugas. Secara internal Kota Yogyakarta memiliki gerakan panca tertib yang dapat mewadahi kiprah dan partisipasi masyarakat dalam melakukan perlindungan masyarakat. di samping itu secara eksternal DIY memiliki program “jaga warga” atau Civil of Police berdasarkan peraturan daerah yang dapat bersinergi dengan gerakan panca tertib.

9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Untuk itulah pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikota Yogyakarta mencapai 100 persen. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Luas wilayah kota Yogyakarta adalah 32,5 km² dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran.

Tabel2.106
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|-----------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | km ² | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 2. | Luas potensi ancaman kebakaran | km ² | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 3. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2017

Semua wilayah Kota Yogyakarta memiliki potensi bencana kebakaran. Dari data tersebut di atas, mulai tahun 2012 hingga 2016 luas WMK 32,5 km² seluruhnya merupakan wilayah potensi bencana kebakaran. Untuk itulah baik wilayah permukiman, pertokoan, pasar, pusat pelayanan publik, tempat-tempat umum maupun jaringan jalan memiliki potensi bahaya kebakaran. Jalan raya yang dilalui oleh kendaraan bermotor yang sangat ramai juga tidak terhindar dari potensi terjadinya bencana kebakaran. Oleh karena perilaku disiplin dan kesadaran untuk saling menjaga agar dapat menghilangkan potensi bencana kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan.

10. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap pemerintah terhadap terjadinya bahaya kebakaran. Untuk melihat daya tanggap pemerintah ini maka perlu dihitung *response time rate* (RTR) dalam pelayanan manajemen kebakaran. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa persentase waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran mencapai 100 persen. Hal ini berarti bahwa seluruh kasus kebakaran di Kota Yogyakarta mendapatkan respon tindakan pemadam kebakaran kurang dari 15 menit setelah pelaporan.

Tabel2.107
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|---|----------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<15 jam setelah pengaduan) | Kejadian | 50 | 51 | 55 | 49 | 63 | 5,95 |
| Jumlah Kejadian Kebakaran | Kejadian | 50 | 51 | 55 | 49 | 63 | 5,95 |
| Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2017, dengan Hasil Olahan

Dari data diketahui bahwa mulai tahun 2012 hingga 2016 jumlah bencana kebakaran mengalami tren peningkatan yang fluktuatif karena pada tahun 2015 jumlah bencana kebakaran sempat mengalami

penurunan dan kembali mengalami peningkatan signifikan di tahun 2016. Namun dari seluruh aduan tentang bencana kebakaran yang terjadi dari tahun 2012 hingga 2016 dapat tertangani 100 persen. Sementara itu, tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016 tetap berada pada angka 11 menit.

Tabel 2.108
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|---|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | menit | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2017

Seiring dengan kepadatan perkampungan dan jalan raya di kota Yogyakarta waktu tanggap bencana 11 menit merupakan respons yang bagus. Dengan penambahan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, Kota Yogyakarta masih dapat meningkatkan pelayanan terhadap bahaya kebakaran. Namun demikian tidak mudah untuk mempertahankan angka 11 menit waktu tanggap bencana kebakaran pada masa mendatang. Untuk itulah teknik-teknik paling efektif selalu perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Permasalahan kemungkinan perlunya waktu tanggap bencana yang lebih panjang dapat dikelola dalam bentuk: upaya untuk memecah/membagi titik pelayanan, dengan menempatkan armada/mobil pelayanan di beberapa titik, sehingga jangkauan pelayanan menjadi lebih sempit. Demikian pula mobil pelayanan pemadam kebakaran dapat ditempatkan di beberapa titik layanan, dan dengan dilengkapi dengan mobil yang berukuran lebih kecil sehingga dapat menerobos jalan yang padat. Namun demikian tentunya memecah titik pelayanan ini punya konsekuensi terhadap jumlah petugas pendukung yang perlu dikonsentrasikan di beberapa titik pelayanan tersebut.

11. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di Kota Yogyakarta. Data di bawah ini diperoleh dari survei

terhadap 150 responden di tiap kelurahan. Survei tersebut dilakukan dua kali dalam setahun yaitu semester pertama dan semester kedua. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas kantor kelurahan di Kota Yogyakarta dalam kondisi baik.

Tabel2.109
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Sangat Baik | | 4 | 8 | 10 | NA | 14 |
| Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Baik | | 40 | 36 | 33 | 15 | 9 |
| Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Kurang Baik | | 1 | 1 | 2 | NA | 22 |
| Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | Persen | 88,89 | 80 | 73,33 | 33,33 | 51,11 |

Sumber: *Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan, 2017*

Pengukuran cakupan pada tahun 2015 menggunakan IKM. Tahun 2015, terjadi perubahan unsur yang semula 14 unsur menjadi 9 unsur dan bisa ditambah muatan lokal. Dari 9 unsur tersebut, dimana tidak ada unsur kenyamanan lingkungan. Berdasarkan kebijakan karena di Kelurahan tidak ada biaya/tarif maka untuk khusus kelurahan, unsur biaya/tarif diganti dengan kenyamanan lingkungan. Namun dikarenakan adanya ketidaksesuaian koordinasi dan informasi yang didapat oleh pelaksana teknis pengukuran SKM, maka dari 45 kelurahan, hanya 15 kelurahan yang mengganti unsur biaya /tarif menjadi kenyamanan lingkungan. Dari 15 kelurahan, unsur kenyamanan lingkungan rata-rata : 3,148 dengan kategori B (Baik). Kemudian pada tahun 2016 perhitungan kembali seperti tahun 2012-2014 yang menghasilkan angka 51,11 persen kelurahan dalam kondisi baik dan sangat baik.

12. Sistem Informasi Manajemen Pemda

Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta sudah dimulai sejak tahun 2002. SIM ini pertama kali digunakan oleh Dinas Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memudahkan administrasi. Pembuatan SIM ini sendiri merupakan tugas yang melekat pada Sekretariat Daerah bagian Teknologi, Informasi, dan Telematika (TIT). Hingga tahun 2014 TIT minimal membuat lima SIM dalam tiap

tahunnya. Berikut ini merupakan tabel informasi tentang adanya SIM Pemda Kota Yogyakarta.

Tabel 2.110
Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Sistem Informasi Manajemen Pemda | 28 | 30 | 35 | 39 | 41 |

Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017

Ketersediaan SIM Pemda sangat efektif dalam membantu memudahkan sistem administrasi. Produktivitas kerja dan prestasi kerja setiap instansi yang telah memiliki SIM dapat meningkat seiring dengan kebutuhan aksesibilitas informasi yang semakin penting. Kinerja Pemkot akan meningkat dengan adanya SIM tersebut. Akan tetapi hal yang jauh lebih sulit dibanding dengan pengadaan SIM adalah perawatan dan update data dalam SIM yang telah tersedia. Konsistensi dan semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan secara on line juga merupakan langkah lanjut yang memerlukan dukungan kebijakan, etos kerja dan sumberdaya yang memadai.

Sistem Teknologi Informasi diperlukan oleh semua OPD sehingga membutuhkan dukungan kompetensi yang memadai untuk semua pegawai dan pejabat. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai, sehingga beban TI dipustkan ke bidang TI. Jika setiap pejabat/pegawai memiliki komitmen untuk pengembangan skill dalam penggunaan TI sebagai pendukung kinerja, maka pelayanan akan lebih efektif. Dengan demikian TI bukan permasalahan yang berada pada level kelembagaan, namun hanya diturunkan sebagai permasalahan aparatur terkait dengan kompetensi teknis.

Sistem informasi seringkali hanya dibatasi dengan pemaknaan SIM. Namun sesungguhnya pada kepentingan yang lebih luas diperlukan sistem inovasi yang mencakup teknologi yang lebih luas seperti teknologi pangan, teknologi pengolahan, tekonologi pemasaran dll. Untuk kepentingan ini maka diperlukan suatu wadah sistem teknologi inovasi.

13. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Survei tentang indeks kepuasan masyarakat di kota Yogyakarta sudah lama diselenggarakan. Di tahun 2012 mulai terjadi penertiban pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat untuk seluruh instansi perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu jumlah instansi perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan

publik yang telah menyelenggarakan IKM dari taun 2012 hingga 2015 berturut-turut dengan jumlah layanan mencapai 259, 326, 135 (data per tanggal 29 Januari 2015 dari total 326 layanan), dan 216(data per tanggal 27 Januari 2016 dari total 326 layanan). Untuk survey kepuasan masyarakat tahun 2016 sejumlah 284 layanan (data per tanggal tanggal 27 januari 2017) terdiri dari kecamatan/kelurahan 56 layanan, puskesmas 34 layanan, OPD 81 layanan, dan sekolah 113 layanan.

Tabel2.111
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1. | Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Bagian Organisasi, 2017

Survei kepuasan masyarakat merupakan data autentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Data primer dari survei IKM ini secara umum bersifat inspiratif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu, tindak lanjut pengolahan data hasil survei IKM perlu dilakukan secara lebih serius untuk mengkritisi kualitas pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Untuk itulah identifikasi terhadap jenis survei IKM dalam bentuk layanan tertentu sebaiknya secara lengkap dapat direkap setiap tahun. Sisi peningkatan kualitas pelayanan perlu diprogramkan untuk setiap jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan, sehingga ada peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya mencakup semua jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran IKM dilakukan secara spesifik berdasarkan kekhususan pelayanan yang diberikan, sasaran yang dilayani. Beberapa jenis pelayanan yang diberikan misalnya kesehatan, pendidikan, catatan sipil, perizinan dll.

G. Sosial

1. Sarana Sosial

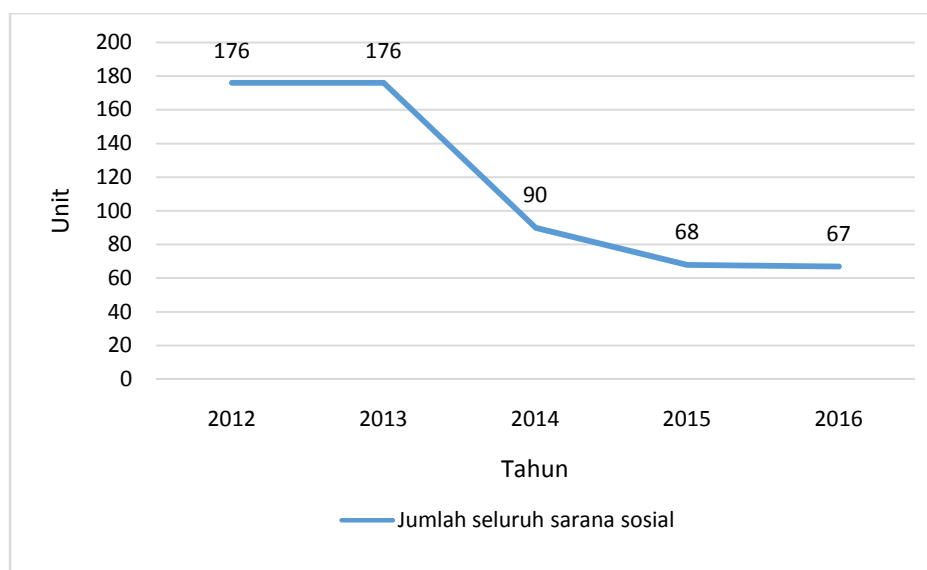
Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.112
Sarana Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Panti Asuhan | Unit | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2,67 |
| 2. | Panti Jompo | Unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 |
| 3. | Panti Rehabilitas | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4. | Rumah Singgah | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 5. | Sarana Sosial lainnya | Unit | 161 | 161 | 75 | 53 | 52 | -24,61 |
| 6. | Jumlah seluruh sarana sosial | Unit | 176 | 176 | 90 | 68 | 67 | -21,45 |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016, Dinas Sosial Kota Yogyakarta 2017

Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah sarana sosial di Kota Yogyakarta cenderung menurun, yaitu dari 176 sarana sosial menjadi 67 sarana sosial pada tahun 2016. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Kota Yogyakarta terdiri dari panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitas, rumah singgah dan sarana sosial lainnya untuk anak cacat netra, cacat ganda dan tuna grahita. Sementara untuk panti rehabilitasi sudah tidak ada lagi di kota Yogyakarta. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.



Gambar 2.67
Grafik Sarana Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu

hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

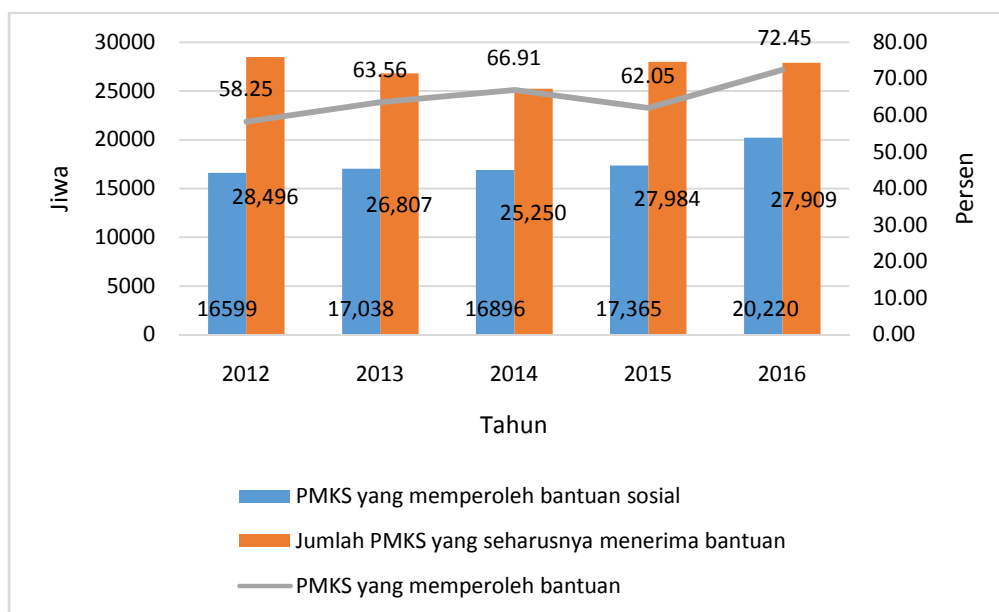
Tabel 2.113
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Kelompok | 16.599 | 17.038 | 16896 | 17.365 | 20.220 | 5,06 |
| 2. | Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan | Kelompok | 28.496 | 26.807 | 25.250 | 27.984 | 27.909 | -0,52 |
| 3. | PMKS yang memperoleh bantuan | Persen | 58,25 | 63,56 | 66,91 | 62,05 | 72,45 | 5,61 |

Sumber :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 58,25%, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 menjadi 72,45%. Penghitungan pada tahun 2016 menggunakan satuan orang yang menerima bantuan bukan lagi kelompok yang menerima bantuan. Angka PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta termasuk penerima rastra(beras kesejahteraan). Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.



Gambar 2.68
Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan persentase. Jumlah PMKS di Kota Yogyakarta masih tergolong cukup banyak. PMKS dapat tertangani hingga lebih dari 80 persen. Hal ini menunjukkan kondisi yang membaik untuk tahun mendatang PMKS dapat tertangani sepenuhnya. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Tabel 2.114
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | PMKS yang tertangani | jiwa | 17.728 | 17.975 | 17.310 | 17.981 | 22.899 | 6,61 |
| 2. | PMKS yang ada | jiwa | 28.680 | 27.011 | 25.724 | 28.394 | 28.220 | -0,40 |
| 3. | Penanganan PMKS | % | 61,81 | 66,55 | 67,29 | 63,33 | 81,14 | 7,04 |

Sumber :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

4. Anak Terlantar yang Dibina

Sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Kota Yogyakarta seharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

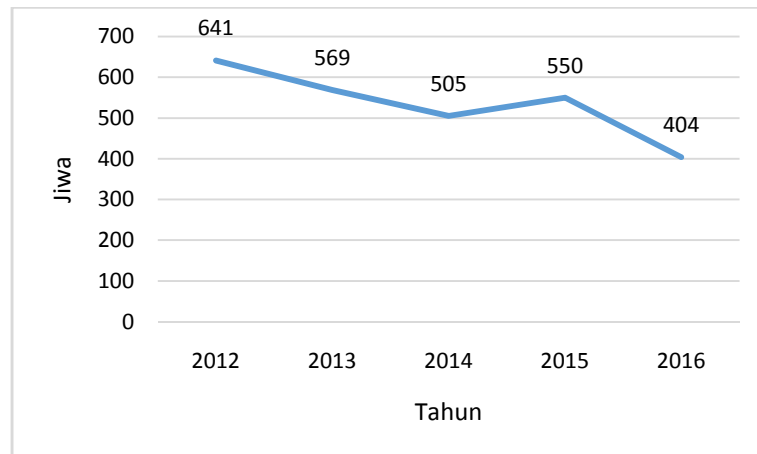
Tabel 2.115
Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2012 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Anak terlantar yang dibina | jiwa | 641 | 569 | 505 | 550 | 404 | 641 | -10,90 |

Sumber :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 614 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 404 jiwa pada tahun 2016.



Gambar 2.69

Grafik Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

H. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang

mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, karena di dalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJP Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2007. Dengan adanya dokumen RPJP ini maka pada rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 terdapat arahan perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan oleh Perda yang relevan.

Tabel 2.116
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD
yang Telah Ditetapkan dengan Perda

| No. | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017

Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normative. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

Visi Kota Yogyakarta yang dirumuskan dalam RPJPD 2005-2025 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan.” Dengan visi tersebut maka Kota Yogyakarta dapat mengembangkan misi yang relevan. Terkait dengan detail misi maka dalam RPJPD Kota Yogyakarta terdapat sepuluh misi yaitu:

- a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan;
- b. Mempertahankan kota Yogyakarta sebagai kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
- c. Mewujudkan daya saing kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
- d. Mewujudkan kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
- e. Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
- f. Mewujudkan kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean governance* (pemerintah yang bersih, berkeadilan dan berlandaskan hukum);

- g. Mewujudkan kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
- h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, dan
- i. Mewujudkan kota Yogyakarta yang sehat.

Dari sepuluh misi ini dapat menjadi arahan program pembangunan dan kegiatan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tentunya dalam rentang waktu tahun 2005-2015 ini telah banyak capaian hasil pembangunan, khususnya pada Tahun 2012-2016 beberapa pencapaian sesuai dengan arahan visi dan misi ini. Pada tahun 2015 indikator di atas tidak akan berubah sebab acuan yang digunakan relatif makro dan berlaku dari 2005-2025.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Bertolak dari RPJPD selanjutnya diturunkan ke dalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016. Sehingga dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah.

Tabel2.117
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda

| No. | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017

Berdasarkan Perda-Perda penetapan RPJMD ini selanjutnya dilakukan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaan pembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yang menjadi dasar selanjutnya adalah RKPD. Jaminan keberlanjutan program akan sangat terdukung oleh adanya dokumen RPJMD. Konsistensi arah pembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian visi dan misi lebih optimal.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2012 hingga 2016 telah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2011 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2013 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 2.118

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

| No. | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017

Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa perwal yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

4. Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk “*up date*” sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100, sehingga akan didapatkan penjabaran data seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.119
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| Jumlah program RKPD tahun berkenaan | Buah | 122 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan | Buah | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD | Persen | 111,9 | 99,1 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017

Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan sequence antar RKPD. Oleh karena itu dengan hanya melihat jumlah program yang ada di dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD belum dapat secara substansial dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, karena bentuk program di RKPD lebih operasinal, maka tentunya jumlahnya bisa lebih banyak, mengingat program di RPJMD merupakan prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan merencanakan RKPD untuk tahun depan sudah lebih eksplisit dengan didukung oleh data yang nyata.

Jumlah program yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD belum memiliki perbedaan yang signifikan. Jarak perbedaan jumlah program dalam RPJMD sangat dekat dengan jumlah program dalam RKPD. Melihat fakta dan data tersebut dapat disimpulkan beberapa asumsi yaitu; pertama kecakapan dalam mendetailkan program dari RPJMD ke dalam

RKPD perlu ditingkatkan; kedua kemungkinan rumusan program dalam RPJMD sudah sangat operasional sehingga tidak dapat diturunkan ke dalam nama program yang lebih spesifik, sehingga nama program di RPJMD sama dengan nama program di RKPD.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai Angka Partisipasi Angkatan Kerja.

Tabel 2.120
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 | Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas | jiwa | 166.406 | 187.205 | 145.850 | 188.555 | 184.921 | 2,67 |
| 2 | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas | Jiwa | 328.737 | 320.121 | 323.255 | 347.403 | 472.415 | 9,49 |
| 3 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | % | 50,62 | 58,48 | 45,12 | 54,28 | 39,14 | -6,23 |

Sumber : Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun, 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2012-2016), DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017.

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2012-2016, angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -6,32% per tahun. Pada tahun 2012,

angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta adalah sebesar 50,62%, sedangkan pada tahun 2016, angka ini menurun hingga menjadi 39,14%. Semakin menurunnya angka partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.70
Grafik Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

2. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2012-2016, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -12,97% per tahun. Sementara itu jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta semakin meningkat dengan pertumbuhan 3,83% per tahun. Pada tahun 2012, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja mencapai 60 kasus, sempat turun

hingga menjadi 35 kasus di tahun 2014, dan kembali naik menjadi 40 kasus di tahun 2016.

Tabel 2.121
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah sengketa pengusaha pekerja | kasus | 60 | 56 | 35 | 36 | 40 | -9,64 |
| 2 | Jumlah Perusahaan | unit | 1.256 | 1.300 | 1.341 | 1.405 | 1.460 | 3,83 |
| 3 | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja | | 47,77 | 43,08 | 26,10 | 25,62 | 27,40 | -12,97 |

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2014, 2015); DiskopuKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2017.

Penurunan angka sengketa merupakan sebuah pertanda baik khususnya untuk dinamika perekonomian di Kota Yogyakarta. Turunnya angka sengketa mengindikasikan bahwa komunikasi dan kebijakan yang diterapkan di dalam perusahaan mampu mengakomodasi kepentingan antara pengusaha dan juga pekerja. Selain itu, rendahnya angka sengketa juga mencerminkan bahwa kegiatan industri yang ada cukup kondusif dan mampu menjadi nilai plus bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Yogyakarta.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dari tahun 2012-2016, persentase pencari kerja yang ditempatkan cenderung naik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,54% per tahun. Meski persentase pencari kerja yang ditempatkan terus meningkat, tetapi sebenarnya jumlah pencari kerja yang mendaftar cenderung menurun.

Tabel 2.122
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | jiwa | 2.306 | 2.593 | 1.592 | 2.044 | 2.151 | -1,72 |
| 2 | Pencari kerja yang mendaftar | jiwa | 3.422 | 4.950 | 1.849 | 1.866 | 1.563 | -17,79 |
| 3 | Pencari kerja yang ditempatkan | % | 67,4 | 52,4 | 86,1 | 109,54 | 137,62 | 19,54 |

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2014, 2015); DiskopuKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2017.

Ketidaksesuaian antara jumlah pendaftar kerja dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dimana pencari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar adalah akibat dari penduduk yang mencari kerja tidak seluruhnya mencari kartu kuning. Sedangkan tenaga kerja yang mendaftar tersebut didata dari penduduk yang mencari kartu kuning. Oleh karenanya, jumlah pencari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar, padahal lazimnya jumlah pencari kerja yang mendaftar adalah lebih besar atau sama dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan.



Gambar 2.71
Grafik Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber :Hasil Olahan, 2017

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Tabel 2.123
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah pengangguran terbuka | jiwa | 17.217 | 16.097 | 13.137 | 10.879 | 6.721 | -20,96 |
| 2 | Jumlah penduduk | jiwa | 166.406 | 187.205 | 145.850 | 188.555 | 184.921 | 2,67 |

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|---------------------------------|
| | angkatan kerja | | | | | | | |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 10,34 | 8,59 | 9,01 | 5,77 | 3,63 | -23,03 |

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2012-2014): Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017.

Selama tahun 2012-2016, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta adalah sebesar -23,03%. Pada tahun 2012, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 10,34% dan turun menjadi 3,63% pada tahun 2016. Apabila dilihat dari jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerja yang ada pada tahun 2014, besaran yang dimiliki memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



Gambar 2.72

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber :Hasil Olahan, 2017

5. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Perlindungan dan keselamatan kerja tersebut merupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja.

Selama tahun 2012-2016, persentase keselamatan dan perlindungan yang diterapkan oleh perusahaan mengalami pertumbuhan positif yaitu 3,78% per tahun. Peningkatan tersebut terjadi seiring bertambahnya jumlah perusahaan dan jumlah perusahaan yang menerapkan K3. Pada tahun 2012, tercatat ada 1.016 unit perusahaan yang menerapkan K3 atau sekitar 80,89% dari total perusahaan sebanyak 1.256 unit. Sedangkan pada tahun 2016, dari total perusahaan sebanyak 1.460 unit, sebanyak 1.370 unit perusahaan sudah menerapkan K3 atau setara dengan 93,84% dari total perusahaan.

Tabel 2.124 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 | unit | 1.016 | 1.000 | 1.197 | 1.333 | 1.370 | 7,76 |
| 2 | Jumlah perusahaan | unit | 1.256 | 1.300 | 1.341 | 1.405 | 1.460 | 3,83 |
| 3 | Keselamatan dan Perlindungan | % | 80,89 | 84,62 | 89,26 | 94,88 | 93,84 | 3,78 |

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015, 2016: dengan Hasil Olahan, 2017.

Secara umum, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menerapkan K3. Pemberian pemahaman mengenai pentingnya penerapan K3 bagi perusahaan, pekerja, dan lingkungan oleh dinas terkait kepada perusahaan turut membantu meningkatkan persentase perusahaan yang menerapkan K3 sehingga akan tercipta perlindungan kerja.

6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta adalah mengenai upah minimum kota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Secara umum, penyelesaian buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah penyelesaian perselisihan dan jumlah kejadian perselisihan juga cenderung menurun pada kurun waktu yang sama. Meski demikian, pada tahun 2015, terdapat satu dari dua kasus yang belum terselesaikan. Kasus tersebut terkait dengan THR yang tidak diberikan pengusaha kepada buruh.

Tabel 2.125
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah penyelesaian perselisihan | kasus | 50 | 50 | 30 | 25 | 27 | -14,28 |
| 2 | Jumlah kejadian perselisihan | kasus | 60 | 56 | 36 | 30 | 35 | -12,61 |
| 3 | Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha | % | 83,33 | 89,29 | 83,33 | 83,33 | 77,14 | -1,91 |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017: dengan Hasil Olahan.2017

B. Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan di dapat dari BKD, dan jumlah seluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari BKD serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Berikut ini merupakan data presentasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 2.126
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

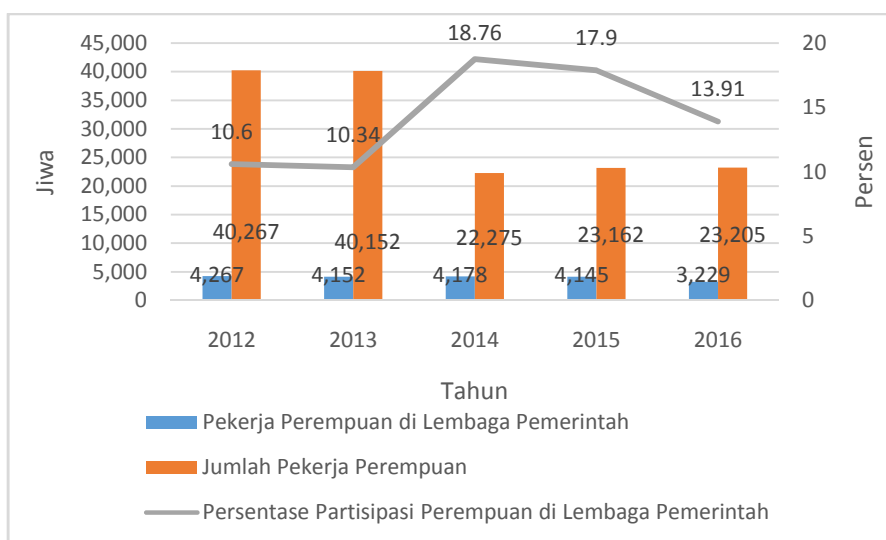
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1. | Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah | jiwa | 4.267 | 4.152 | 4.178 | 4.145 | 3.229 | -6,73 |
| 2. | Jumlah Pekerja Perempuan | Jiwa | 40.267 | 40.152 | 22.275 | 23.162 | 23.205 | -12,87 |
| 3. | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | Persen | 10,60 | 10,34 | 18,76 | 17,90 | 13,91 | 7,03 |

Sumber :

1. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, 2015
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
5. Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan mengalami penurunan dari 4.267 jiwa di tahun 2012, menjadi 3229 jiwa di tahun 2016. Namun, persentasenya meningkat dari 10,60% tahun 2012, menjadi 13,91% di tahun 2016, karena jumlah seluruh pekerja perempuan yang juga mengalami penurunan sebesar kurang lebih tujuh belas ribu jiwa.

Menurut Badan Kepegawaian Daerah, dari dua periode penerimaan CPNS terakhir, didominasi oleh CPNS perempuan yang diterima. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah persentase pekerja perempuan seluruhnya di Kota Yogyakarta, persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah masih terbilang cukup rendah. Melihat kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, dikabarkan akan ada penerimaan CPNS dari bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga diprediksikan pula akan ada lebih banyak pekerja perempuan di lembaga pemerintah.



Gambar 2.73
Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Pada indikator ini dihitung persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan pada indikator ini merupakan data yang berasal dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan data jumlah seluruh pekerja perempuan di Kota Yogyakarta merupakan data yang

didapat dari penjumlahan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta. Berikut adalah tabel persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

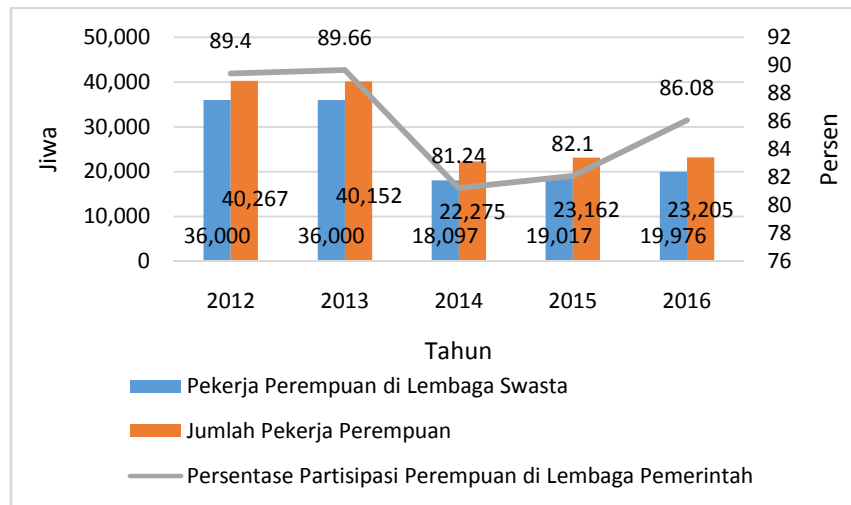
Tabel 2.127
Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah | jiwa | 36.000 | 36.000 | 18.097 | 19.017 | 19.976 | -13,69 |
| 2. | Jumlah Pekerja Perempuan | Jiwa | 40.267 | 40.152 | 22.275 | 23.162 | 23.205 | -12,87 |
| 3. | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | Persen | 89,40 | 89,66 | 81,24 | 82,10 | 86,08 | -0,94 |

Sumber :

1. *Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016*
2. *Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016*
3. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017*
4. *Hasil Olahan, 2016*

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami penurunan dari 36.000 jiwa di tahun 2012, menjadi 19.976 jiwa di tahun 2016. Begitu pula dengan persentasenya yang mengalami penurunan, dari 89,40% di tahun 2012, menjadi 86,08% di tahun 2016. Meskipun pada kurun waktu lima tahun terakhir persentase pekerja perempuan mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan data tahun 2014, jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan, begitu juga dengan persentasenya. Hal tersebut mengindikasikan makin terbuka luasnya kesempatan bekerja bagi perempuan di ranah lembaga swasta dibandingkan tahun 2014. Hal tersebut juga dapat dianggap sebagai kondisi yang baik dimana perempuan sudah mendapat kesetaraan dalam bidang ekonomi.



Gambar 2.74
Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016,

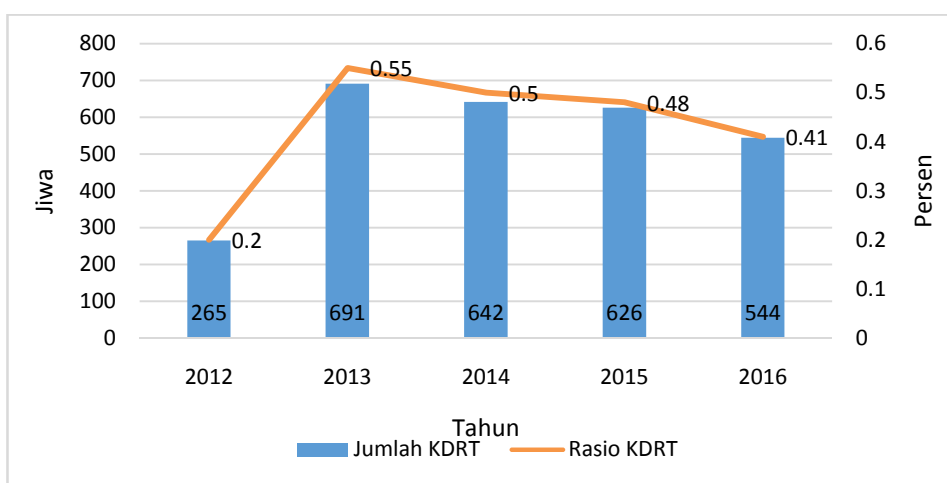
Tabel 2.128
Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah KDRT | jiwa | 265 | 691 | 642 | 626 | 544 | 19,70 |
| 2. | Jumlah Rumah Tangga (KK) | Jiwa | 129.439 | 124.744 | 128.843 | 129.092 | 131.092 | 0,32 |
| 3. | Rasio KDRT | Persen | 0,20 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,41 | 19,66 |

Sumber : Seksi Perlindungan Kelompok Rentan (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 berada dalam kondisi yang kurang baik,

ditunjukkan dengan rasio KDRT yang meningkat hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2012, ditemukan 256 kasus KDRT. Jumlah kasus ini semakin meningkat hingga mencapai 544 kasus di tahun 2016. Rendahnya kasus KDRT di tahun 2012 bukan berarti memang hanya terjadi sedikit kasus KDRT, namun disebabkan karena masyarakat belum berani melaporkan adanya tindakan KDRT atau ketidaktahuan harus melaporkan kemana. Pada tahun 2013, terdapat peningkatan yang cukup besar, hal ini menandakan makin sadarnya korban KDRT untuk melaporkan kasus KDRT. Pada kurun waktu 2013-2016 terjadi penurunan rasio KDRT hal tersebut mengindikasikan adanya kondisi yang sedikit demi sedikit membaik dengan berkurangnya kasus KDRT.



Gambar 2.75
Grafik Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.

4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan

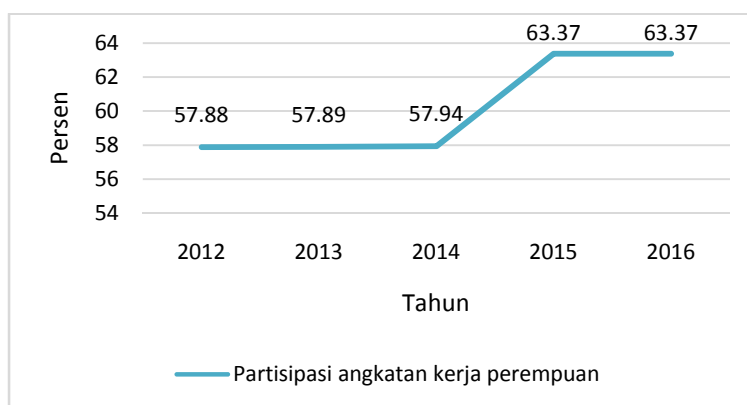
kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 2.129
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 57,88 | 57,89 | 57,94 | 63,37 | 63,37 | 2,29 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan data di atas, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 57,88%. Kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 63,37% pada tahun 2016. Artinya, terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Yogyakarta ini yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Sumber penghasilan keluarga tidak hanya dari suami, namun istri juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain bisa menambah penghasilan keluarga, beberapa perempuan bekerja untuk mengaktualisasikan diri, mengisi kegiatan sehari-hari atau bersosialisasi, serta untuk menambah wawasan pengetahuan.



Gambar 2.76
Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian

pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan proporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan terhadap jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Berikut ini merupakan data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

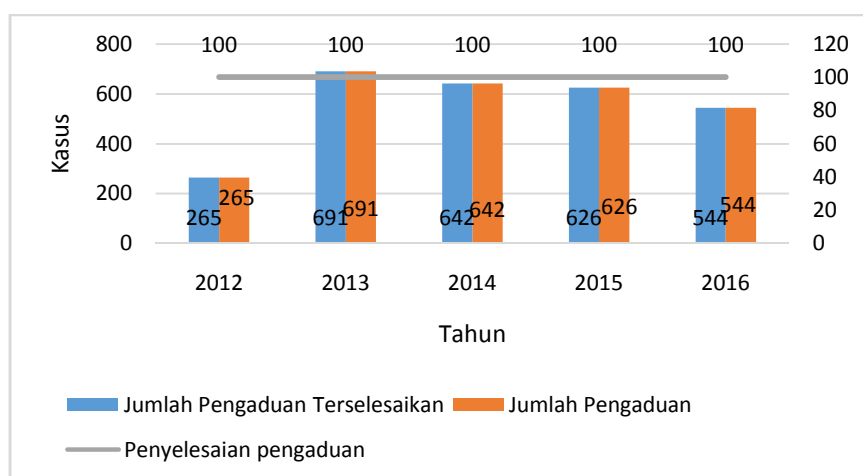
Tabel 2.130
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Pengaduan Terselesaikan | Kasus | 265 | 691 | 642 | 626 | 544 | 19,70 |
| 2. | Jumlah Pengaduan | Kasus | 265 | 691 | 642 | 626 | 544 | 19,70 |
| 3. | Penyelesaian pengaduan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

Sumber :

1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 telah terselesaikan semuanya (100%). Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus yang dilaporkan semakin banyak. Namun untuk masa yang akan datang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karena hanya sedikit kasus yang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurang jumlah kasusnya.



Gambar 2.77
Grafik Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut ini merupakan data IPG di Kota Yogyakarta tahun 2012-2015.

Tabel 2.131
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

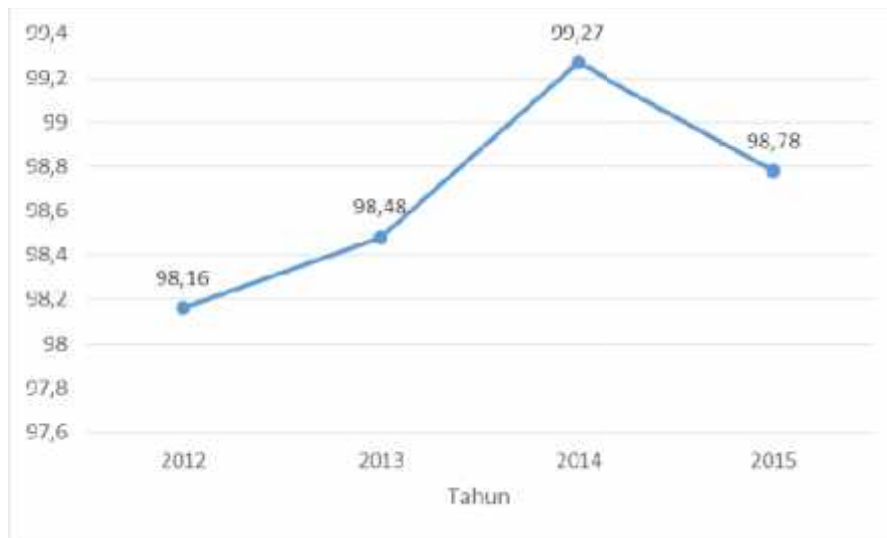
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Indeks Pembangunan Gender | | 98,16 | 98,48 | 99,27 | 98,78 | 0,21 |

Sumber :

- 1) *Badan Pusat Statistik, 2016*
- 2) *Hasil Olahan, 2016*

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2016), IPG baru dihitung sampai tahun 2015, sedangkan setelah itu belum dilakukan pembaruan perhitungan. IPG di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, IPG di Kota Yogyakarta mencapai 98,16 dan mengalami peningkatan menjadi 98,78 pada tahun 2015. Jika dibandingkan IPG nasional tahun 2012 yang hanya mencapai 68,52,

Kota Yogyakarta sudah mampu melampaui IPG nasional. Hal ini mengindikasikan persamaan dan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta sudah semakin tinggi. Berikut ini merupakan grafik peningkatan IPG di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.78
Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2017

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut ini merupakan data IDG Kota Yogyakarta tahun 2012-2015.

Tabel 2.132
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Indeks Pemberdayaan Gender | | 70,70 | 71,75 | 79,44 | 79,33 | 3,91 |

Sumber :

- 1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2015
- 2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, IDG baru dihitung sampai tahun 2015, sedangkan setelah itu belum dilakukan perhitungan. IDG di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan, dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang bernilai 3,91%. Pada tahun 2012, IDG Kota Yogyakarta mencapai 70,70 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 79,33 pada tahun 2015. IDG

Kota Yogyakarta sudah melebihi capaian IDG nasional yang mencapai 70,5 pada tahun 2013 (BPS dalam BAPPENAS, 2014). Artinya, persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan di Kota Yogyakarta semakin tinggi.



Gambar 2.79
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2017

C. Ketahanan Pangan

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Selama tahun 2010, Kota Yogyakarta telah memiliki regulasi ketahanan pangan. Regulasi ini berupa peraturan walikota yang terdiri dari Perwal No.64 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan dan Perwal No.51 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan daerah tersebut masih diberlakukan sampai pada tahun 2016.

Tabel 2.133
Regulasi Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Regluasi ketahanan pangan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017

2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan rata-rata ketersediaan pangan utama mencapai 26,59% per tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata jumlah ketersediaan pangan yaitu sebesar 25,48% per tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah yang paling besar pada kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2015, ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta mencapai 143,24 kg/jiwa,

sedangkan pada tahun 2016, ketersediaan pangan utama turun menjadi sebesar 135,76 kg/jiwa.

Ketersediaan pangan yang ada di Kota Yogyakarta berasal dari daerah lain di sekitar Kota Yogyakarta dan juga hasil produksi di wilayah Kota Yogyakarta. Di samping hal tersebut, perhitungan ketersediaan pangan di kota Yogyakarta didapat dari akumulasi cadangan pangan ketika bencana terjadi. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

Tabel 2.134
Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|--|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama | kg | 22.603.000 | 25.882.000 | 23.892.000 | 58.656.000 | 56.029.000 | 25,48 |
| 2 | Jumlah Penduduk | jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 412.704 | -0,88 |
| 3 | Ketersediaan Pangan Utama | kg/jiwa | 52,86 | 63,65 | 57,72 | 143,24 | 135,76 | 26,59 |

Sumber :

1. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2017

D. Pertanahan

Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusan pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah

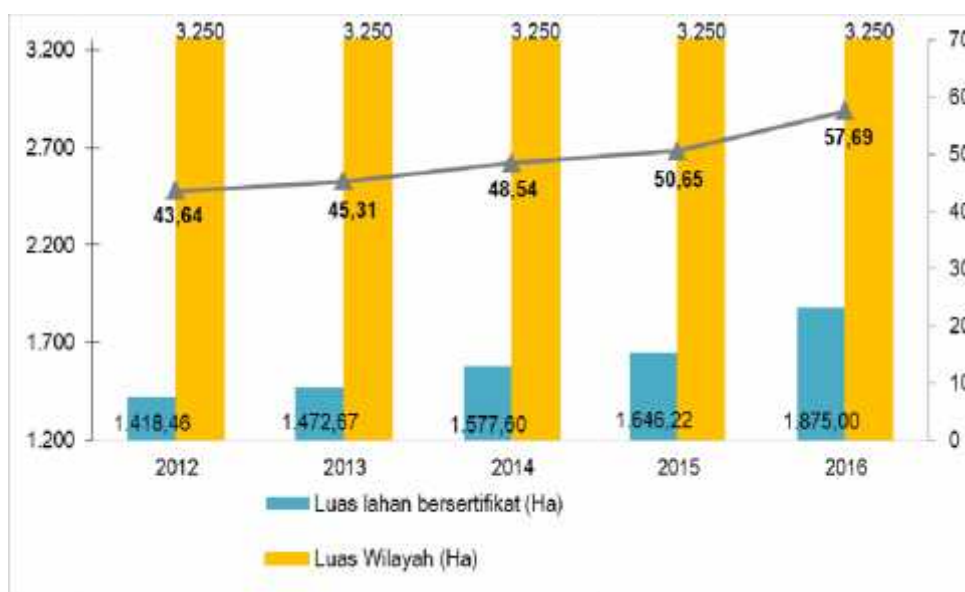
Sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, formula yang digunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah penduduk dikalikan dengan bilangan 100. Formula tersebut dirasa meragukan dengan bilangan pembanding adalah jumlah penduduk, sehingga indikator ini diganti dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah.

Tabel 2.135
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 1. | Luas lahan bersertifikat | Ha | 1.418,46 | 1.472,67 | 1.577,60 | 1.646,22 | 1.875,00 | 7,22 |
| 2. | Luas Wilayah | Ha | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250 | 3.250 | 0,00 |
| 3. | Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah | % | 43,64 | 45,31 | 48,54 | 50,65 | 57,69 | 7,23 |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Tercatat seluas 1.418,46 hektar lahan bersertifikat di tahun 2012 kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 1.875 hektar lahan bersertifikat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,22% per tahun. Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah juga mengalami peningkatan yakni 43,64% pada tahun 2012 meningkat menjadi 57,69% pada tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,23% per tahun.



Gambar 2.80
Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Penyelesaian Kasus Tanah

Formula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasus tanah adalah dengan perbandingan antara jumlah kasus yang

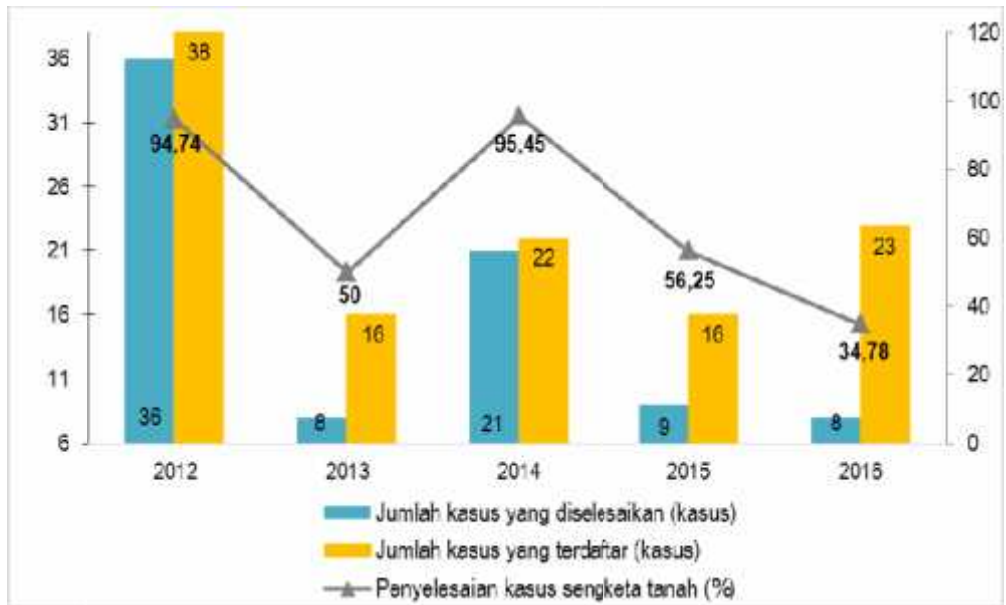
diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.136
Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah kasus yang diselesaikan | Kasus | 36 | 8 | 21 | 9 | 8 | -31,34 |
| 2. | Jumlah kasus yang terdaftar | Kasus | 38 | 16 | 22 | 16 | 23 | -11,80 |
| 3. | Penyelesaian kasus sengketa tanah | % | 94,74 | 50,00 | 95,45 | 56,25 | 57,69 | -22,16 |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Jumlah kasus sengketa yang dihitung merupakan data dari Badan Pertanahan Nasional yang berupa kasus sengketa tanah dari semua tanah persil milik perorangan. Secara umum, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -31,34% per tahun. Dalam kurun waktu yang sama (tahun 2012 hingga tahun 2016), tidak ada kasus yang dapat terselesaikan seluruhnya (100%), bahkan pada tahun 2013 hanya 50% kasus tanah saja yang dapat terselesaikan. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2016 yang hanya berhasil menyelesaikan 8 kasus sengketa tanah dari 23 kasus yang terdaftar. Meskipun demikian, jumlah kasus dari tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -11,80%. Hal tersebut dapat mengindikasikan semakin berkurangnya permasalahan dibidang pertanahan yang sekaligus mengindikasikan adanya peningkatan administrasi pertanahan di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.81
Grafik Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah dengan perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.137
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah izin lokasi | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2. | Permohonan izin lokasi | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 3. | Penyelesaian izin lokasi | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Data penyelesaian izin lokasi Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat jumlah izin lokasi di tahun 2012 merupakan izin lokasi untuk pembangunan kondominium/hotel seluas 12.227 m² terletak di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; sedangkan pada tahun 2013 merupakan izin lokasi untuk pembangunan hotel (semula Purawisata) seluas 24.690 m² terletak di Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Sedangkan di tahun 2015 permohonan izin lokasi dilakukan sebatas untuk mengganti kepemilikan tanah gudang susu milik Perusahaan SGM.

E. Lingkungan Hidup

Dalam Lampiran 1 Permendagri disebutkan bahwa terdapat delapan indikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan.

Dari kedelapan indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, yaitu misalnya indikator persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang menggantikan indikator persentase penanganan sampah, indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R yang menggantikan data tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, juga indikator persentase kegiatan pengawasan limbah usaha yang menggantikan indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Adapun selain adanya beberapa indikator yang tidak dapat diisikan, juga terdapat penggantian indikator yang dikarenakan belum adanya pendataan.

1. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

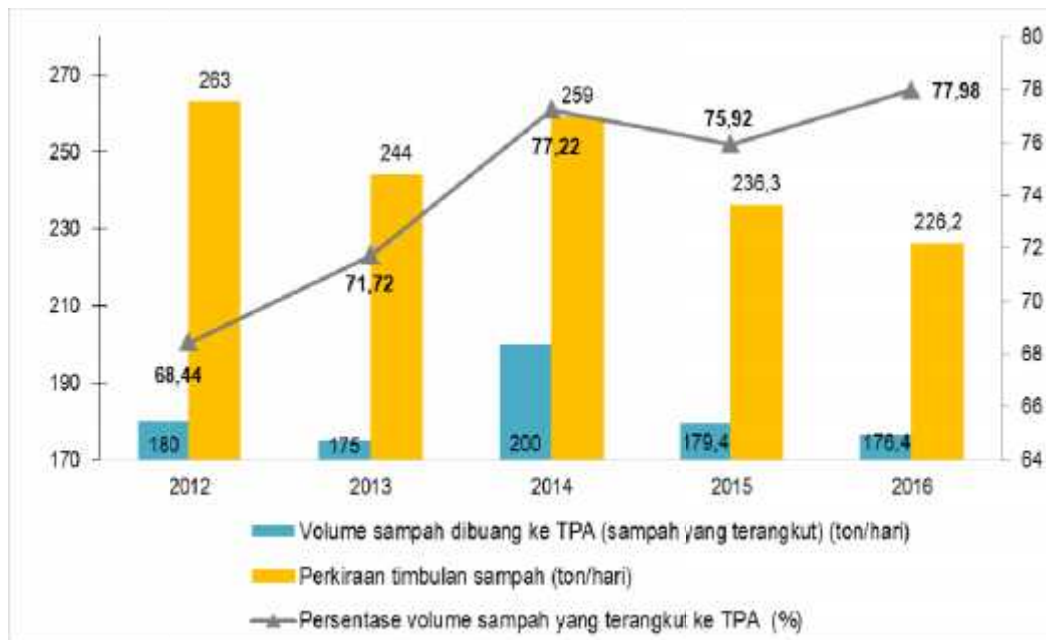
Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, untuk menghitung indikator persentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta digunakan perbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA dengan perkiraan timbulan sampah dikalikan dengan bilangan 100, serta dengan penggantian judul indikator menjadi persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Tabel 2.138
Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 1. | Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut) | ton/hari | 180 | 175 | 200 | 179,4 | 176,4 | -0,50 |
| 2. | Perkiraan timbulan sampah | ton/hari | 263 | 244 | 259 | 236,3 | 226,2 | -3,70 |
| 3. | Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA | % | 68,44 | 71,72 | 77,22 | 75,92 | 77,98 | 3,32 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Jumlah timbulan sampah dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni 263 ton/hari pada tahun 2012 berkurang menjadi 226,2 ton/hari pada tahun 2016. Penurunan volume timbulan sampah tersebut disebabkan karena adanya pergeseran komposisi sampah yang saat ini didominasi oleh sampah plastik. Sampah plastik memiliki volume yang lebih kecil dibandingkan jenis sampah lainnya, hal tersebut menyebabkan volume perkiraan timbulan sampah cenderung menurun. Penurunan perkiraan volume timbulan sampah ini berbanding lurus dengan perkembangan jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA yang cenderung menurun, di tahun 2012 volume sampah yang dibuang ke TPA sebesar 179,4 ton/hari, berkurang menjadi 176,4 ton/hari pada tahun 2016. Dengan demikian pertumbuhan rata-rata volume sampah yang terangkut ke TPA dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 3,32% per tahun dengan kecenderungan meningkat. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk siang di Kota Yogyakarta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah penduduk malam hari. Selain itu sebagai kota pariwisata, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta juga diduga memiliki pengaruh terhadap jumlah timbulan sampah.



Gambar 2.82
Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya pendekatan kepada masyarakat terkait penanganan sampah di perkotaan. DLH telah melakukan pelatihan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah, sekarang ini telah dikurangi karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah, antara lain sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap (menyengat), serta menjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu TPS juga akan disentralkan pada satu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal). Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman tersebut. Telah dilakukan penutupan 2 unit TPS dengan dipersiapkan pengganti di lokasi lain. Meskipun dilakukan penutupan TPS, daya tampung TPS di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan karena dilakukan peningkatan volume pada TPS yang tersedia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengupayakan penanganan masalah persampahannya secara lebih baik.

2. Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum

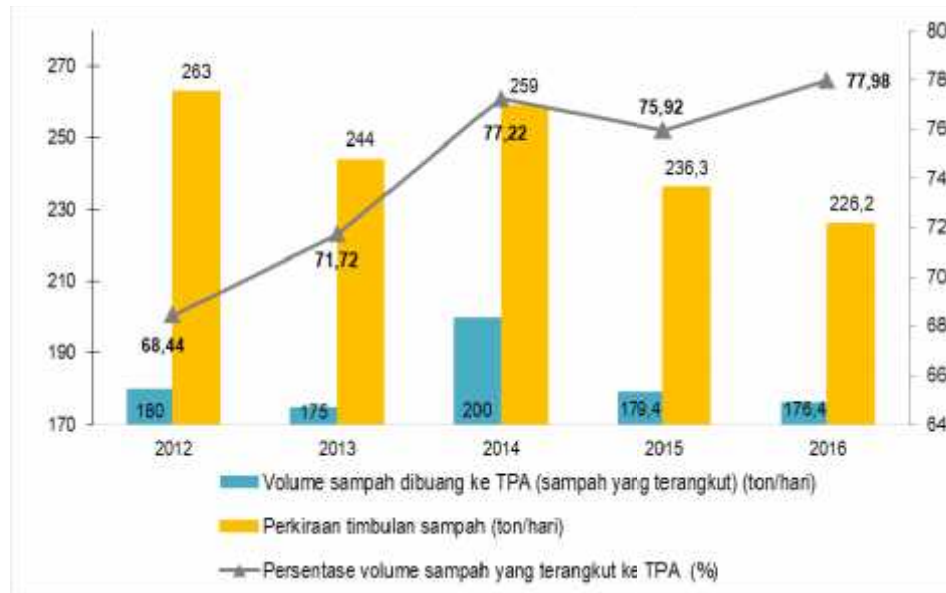
Indikator persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Yogyakarta didapatkan dari persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk terlayani di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,58% per tahun.

Tabel 2.139
Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah penduduk terlayani | Jiwa | 182.094 | 182.556 | 182.292 | 182.778 | 179.724 | -0,33 |
| 2. | Jumlah penduduk wilayah pelayanan | Jiwa | 392.330 | 394.879 | 400.467 | 412.704 | 417.744 | 1,58 |
| 3. | Persentase cakupan pelayanan air minum | % | 46,41 | 46,23 | 45,52 | 44,29 | 43,02 | -1,88 |

Sumber : Kinerja PDAM, PDAM Tirtamarta, Tahun 2012-2016 dengan Hasil Olahan

Meningkatnya jumlah penduduk terlayani berbanding terbalik dengan persentase cakupan pelayanan air minum yang memiliki kecenderungan menurun hingga -1,88% per tahun dalam kurun waktu yang sama (tahun 2012 hingga tahun 2016). Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh banyaknya sumur komunal yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir, selain itu juga banyaknya penduduk yang masih menggunakan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Gambar 2.83
Grafik Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu

Pencemaran status mutu air didapatkan dari perbandingan antara jumlah kawasan permukiman atau industri dengan sumber mata air yang dipantau mutu airnya dibagi dengan jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air dikalikan dengan bilangan 100. Data pembentuk indikator ini sendiri belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, baik oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah maupun Badan Lingkungan Hidup. Indikator pencemaran status mutu air ini digantikan dengan indikator persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu.

Tabel 2.140
Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|--------|------|------|------|-------|-------|
| 1. | Parameter yang memenuhi baku mutu | | 72 | 74 | 75 | 72 | 78 |
| 2. | Jumlah sampel parameter | | 100 | 100 | 135 | 135 | 136 |
| 3. | Persentase peningkatan kualitas air sungai sesuai baku mutu | % | 72 | 74 | 55,5 | 55,33 | 57,34 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Indikator persentase kualitas air sungai diukur dengan cara pemeriksaan laboratorium terhadap tiga parameter yakni BOD, COD, dan DO, masing-masing pada lima titik lokasi pengambilan sampel pada tiga sungai di wilayah Kota Yogyakarta yaitu Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong. Di tahun 2016, diketahui bahwa terdapat 78 sampel parameter dengan hasil pengukurannya berada pada ambang batas baku mutu dari 136 jumlah sampel parameter kunci penentu, atau sebesar

57,34%. Terjadi peningkatan persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu, yang berarti terjadi pengurangan beban pencemaran air sungai, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah limbah padat rumah tangga maupun limbah cair industri yang dibuang ke sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu.

4. Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan Luasnya

Formula yang digunakan untuk menghitung cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 adalah dengan perbandingan antara jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air dikalikan dengan bilangan 100. Indikator cakupan penghijauan wilayah longsor dan sumber mata air ini seharusnya diaplikasikan untuk kabupaten, tidak relevan apabila digunakan untuk lingkup Kota Yogyakarta, sehingga indikator ini tidak dapat dihitung.

Tidak didapatkan data dan informasi mengenai indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Data yang bersumber dari Badan Lingkungan Hidup ini hanya sebatas jumlah taman yang dibangun di bantaran sungai, beserta dengan perkiraan luas taman tersebut. Taman-taman tersebut dibangun di tepian sungai, selain untuk menambah ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh penduduk Kota Yogyakarta sebagai sarana rekreasi, juga untuk melindungi daerah tepian sungai dari pembangunan yang tidak diharapkan, seperti permukiman liar. Tidak ada daerah rawan longsor maupun daerah tepian sungai yang rawan longsor di Kota Yogyakarta. Beberapa sungai yang ada mempunyai potensi membawa banjir lahar dingin bila musim penghujan tiba.

Tabel 2.141
Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan Luasnya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah taman di bantaran sungai | Unit | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Perkiraan luas taman Pinggir Sungai | m ² | 550 | 640 | 640 | 640 | 640 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017

Hingga tahun 2016, terdapat 12 taman di bantaran sungai yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan perkiraan luasan taman sebesar 640 m². Keterbatasan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tidak adanya perkembangan jumlah ataupun luas taman khususnya di bantaran sungai

di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus melakukan perbaikan, dari segi penghijauan dengan berbagai usaha salah satunya dengan meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi-lokasi lainnya.

Selain diketahui jumlah data taman yang dibangun di bantaran sungai, menurut Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disebutkan bahwa terdapat lima unit taman yang dibuat bekerjasama dengan FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri), yakni di Kricak (berupa jembatan dan ruang terbuka hijau); Pringgokusuman (berupa ruang terbuka hijau); Serangan, Notoprajan (berupa ruang terbuka hijau, pergola, flying fox, dan taman kuliner); Badran (berupa ruang terbuka hijau, kolam renang, gazebo), serta Dukuh (Gedongkiwo) yang berupa ruang terbuka hijau. Selain itu juga didapatkan data mengenai jumlah mata air yang terdapat di Kota Yogyakarta, antara lain tujuh buah mata air yang terdapat di Sungai Winongo (yang telah dikelola 3 buah mata air); 22 mata air di Sungai Gajah Wong (yang telah dikelola 4 buah mata air); dan beberapa mata air di Sungai Code.

5. Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha

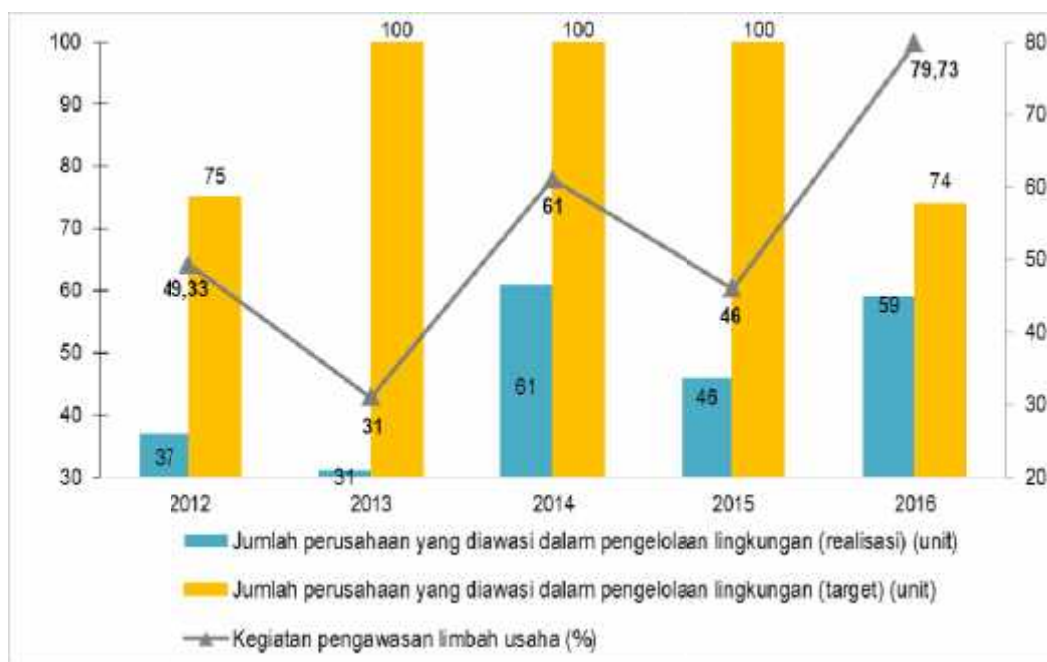
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dihitung dengan formula jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi dibagi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal dikalikan dengan bilangan 100. Sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak Badan Lingkungan Hidup, indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal di Kota Yogyakarta ini diganti menjadi Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha.

Tabel 2.142
Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|--------|-------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (realisasi) | Unit | 37 | 31 | 61 | 46 | 59 | 12,37 |
| 2. | Jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (target) | Unit | 75 | 100 | 100 | 100 | 74 | -0,34 |
| 3. | Kegiatan pengawasan limbah usaha | % | 49,33 | 31 | 61 | 46 | 79,3 | 12,75 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Pengolahan

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kegiatan pengawasan limbah usaha adalah dengan perbandingan antara realisasi jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan dengan target jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan dikalikan dengan bilangan 100. Persentase kegiatan pengawasan limbah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni 49,33% pada tahun 2012 meningkat menjadi 79,3% pada tahun 2016.



Gambar 2.84
Grafik Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Pertumbuhan rata-rata yang ditunjukkan oleh indikator kegiatan pengawasan limbah usaha pada tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sebesar 12,75% per tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan untuk mengelola limbah dalam usaha menjaga (mengelola) lingkungan terus meningkat, hal ini mengindikasikan tingkat kesadaran pengelola perusahaan akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan sudah semakin baik.

6. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R

Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang menuju pada sistem zero waste. Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume

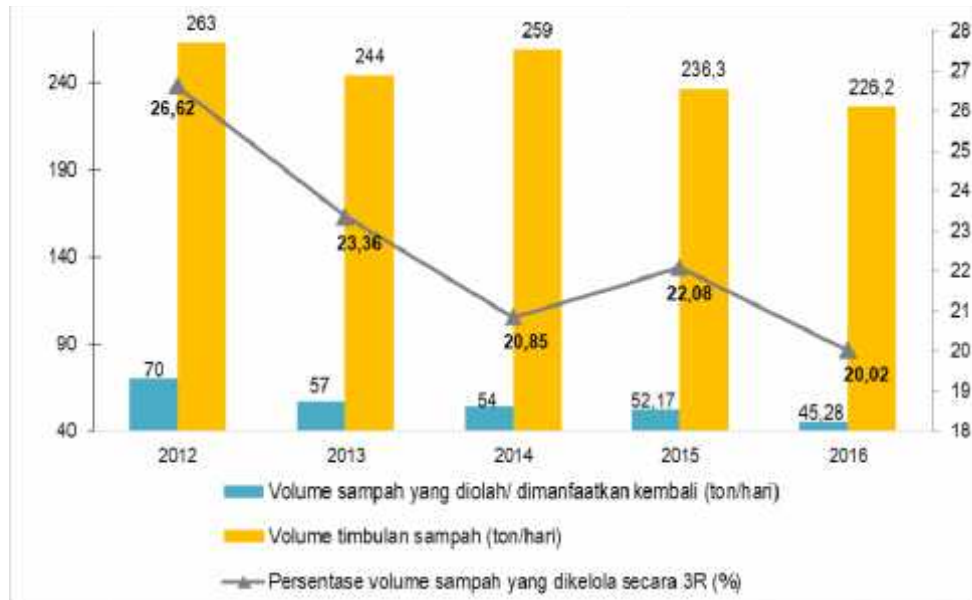
sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah kota dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.143
Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 1. | Volume sampah yang diolah/dimanfaatkan kembali | ton/hari | 70 | 57 | 54 | 52,17 | 45,28 | -10,32 |
| 2. | Volume timbulan sampah | ton/hari | 263 | 244 | 259 | 236,3 | 226,2 | -3,70 |
| 3. | Persentase volume sampah yang dikelola secara 3R | % | 26,62 | 23,36 | 20,85 | 22,07 | 20,01 | -6,88 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali didapatkan dari pengurangan volume timbulan sampah dengan volume sampah yang dibuang ke TPA serta volume sampah yang tidak terbuang dan tidak termanfaatkan kembali, sehingga mendapatkan hasil dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni 70 ton/hari turun menjadi 45,28 ton/hari, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -10,32% per tahun. Hal tersebut berbanding lurus dengan persentase volume sampah yang dikelola secara 3R di perkotaan dimana nilai yang ditunjukkan juga memiliki kecenderungan menurun, yakni 26,62% tahun 2012 menjadi 20,01% tahun 2016. Jika dibandingkan, pertumbuhan rata-rata volume sampah yang diolah kembali memiliki nilai penurunan yang lebih besar yaitu -10,32% pertahun jika dibandingkan dengan penurunan volume timbulan sampah sebesar -3,70% pertahun. Angka persentase volume sampah yang dikelola secara 3R ini meliputi jumlah sampah yang dikelola oleh bank sampah serta jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali oleh pihak pemulung.



Gambar 2.85
Grafik Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Penerapan upaya pengelolaan sampah secara 3R disertai dengan kebijakan pengurangan jumlah TPS. Masyarakat dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Di Kota Yogyakarta terdapat pula kelompok bank sampah yang dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yakni sebesar 60,52% pertahun.

Tabel 2.144
Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-----------------------------|----------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah kelompok bank sampah | Kelompok | 61 | 136 | 315 | 405 | 405 | 60,52 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Di tahun 2012 terdapat 61 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta, dimana semakin tahun antusiasme penduduk semakin meningkat yang diidentifikasi dari peningkatan kelompok bank sampah yang sangat tinggi hingga pada tahun 2016 terdapat 405 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu TPS akan disentralkan pada satu titik tertentu dan akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal. Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan

kualitas lingkungan permukiman tersebut. Selain itu pengelolaan sampah secara kelompok melalui bank sampah juga mulai dikembangkan sebagai usaha kreatif yang bernilai ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan bank sampah dan masyarakat di wilayah itu sendiri. Adanya peningkatan jumlah bank sampah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan angka pengelolaan sampah secara 3R.

7. Penegakan Hukum Lingkungan

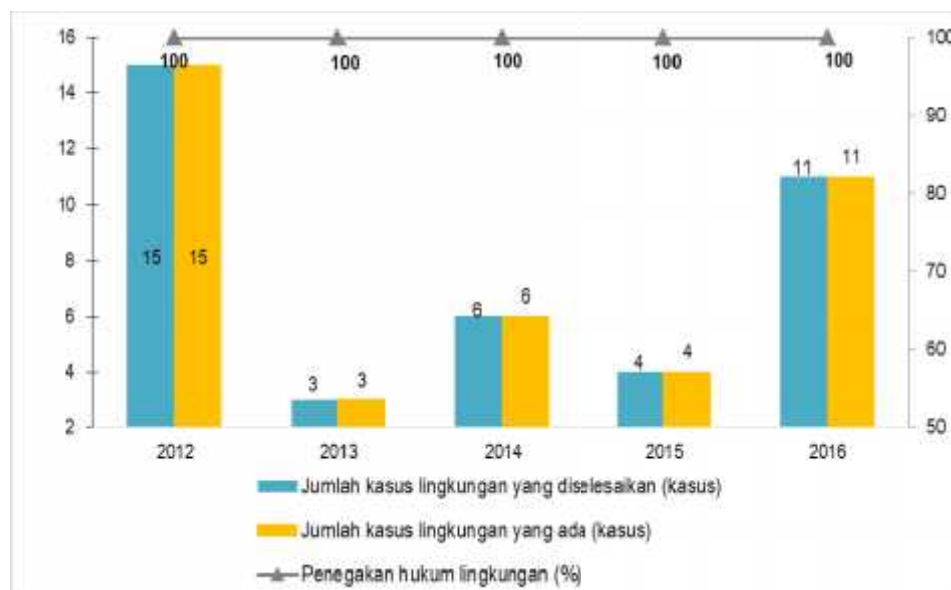
Penegakan hukum lingkungan dihitung dengan menggunakan perbandingan antara jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah kota dengan jumlah kasus lingkungan yang ada dikalikan dengan bilangan 100. Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, jumlah kasus lingkungan yang ada semuanya dapat diselesaikan, dengan kata lain penegakan hukum lingkungan di Kota Yogyakarta dapat seluruhnya terselesaikan (100%). Jumlah kasus lingkungan yang terjadi di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni sebanyak 15 kasus pada tahun 2012 menurun menjadi 11 kasus pada tahun 2016.

Tabel 2.145
Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|--------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan | Kasus | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7,46 |
| 2. | Jumlah kasus lingkungan yang ada | Kasus | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7,46 |
| 3. | Penegakan hukum lingkungan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih peduli akan lingkungan di sekitarnya dan segera melakukan laporan atau pengaduan apabila terjadi pencemaran lingkungan di wilayahnya. Disamping itu juga senantiasa dilakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait dugaan pencemaran, agar penanganan pencemaran dapat diselesaikan secepat mungkin.



Gambar 2.86
Grafik Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014
Sumber : Hasil Olahan, 2017

F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta.

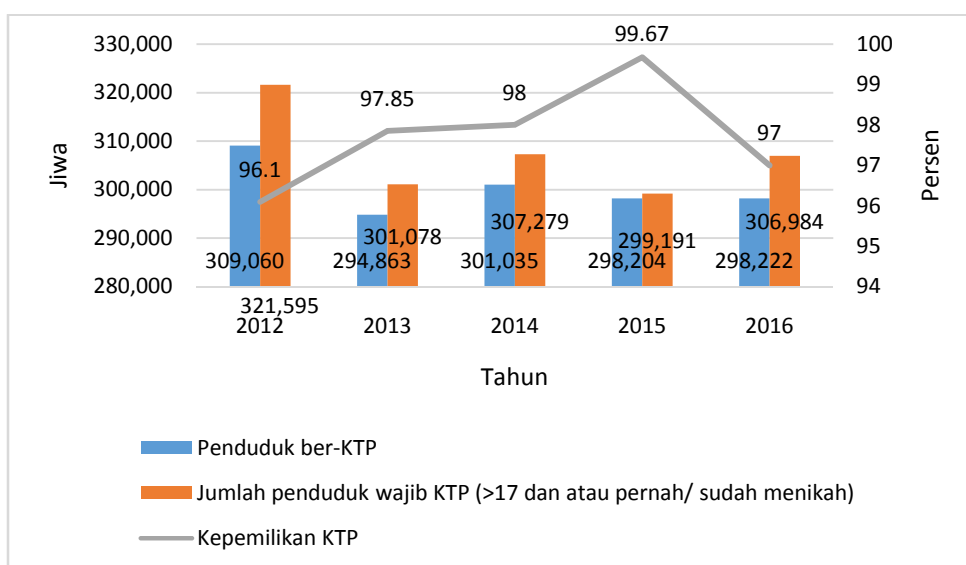
Tabel 2.146
Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Penduduk ber-KTP | Jiwa | 309.060 | 294.863 | 301.035 | 298.204 | 298.222 | -0,89 |
| 2. | Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/ sudah menikah) | Jiwa | 321.595 | 301.078 | 307.279 | 299.191 | 306.984 | -1,16 |
| 3. | Kepemilikan KTP | Persen | 96,10 | 97,85 | 98,00 | 99,67 | 97 | 0,23 |

Sumber :

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada data di atas, kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012, persentase kepemilikan KTP hanya 94,88%, kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 99,67% pada tahun 2015, kemudian hanya menurun sekali pada tahun 2016 menjadi 97 persen. Penyebab meningkatnya jumlah kepemilikan KTP disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang tertib wajib KTP, serta adanya kemudahan sistem dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk pelayanan wajib KTP, seperti jemput bola dan mobile E-KTP.



Gambar 2.87
Grafik Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk

Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Berikut merupakan data kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.147
Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah penduduk yang | Jiwa | 301.959 | 289.216 | 289775 | 257.977 | 273.447 | -2,45 |

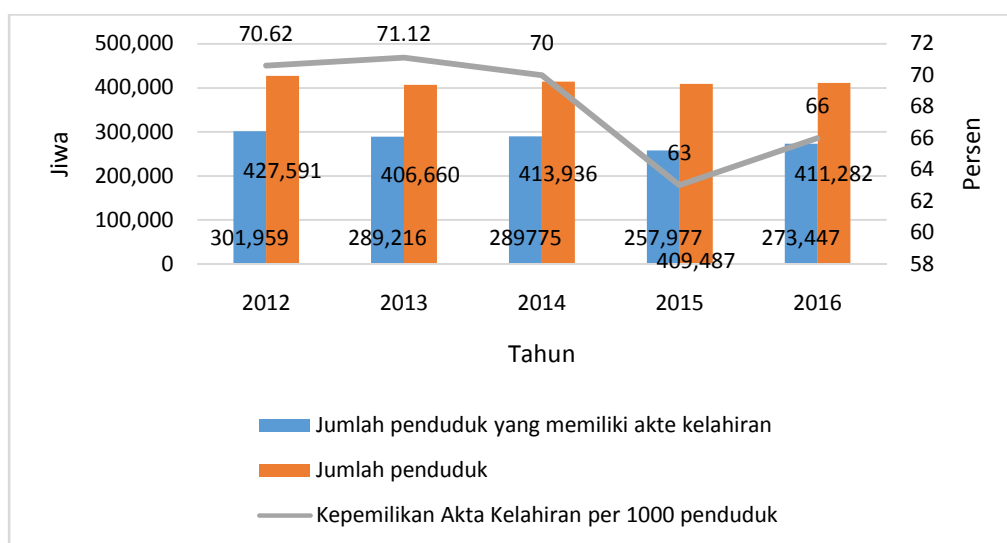
| | | | | | | | | |
|----|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | memiliki akte kelahiran | | | | | | | |
| 2. | Jumlah penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| 3. | Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk | Persen | 70,62 | 71,12 | 70,00 | 63,00 | 66 | -1,68 |

Sumber :

1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017

2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menunjukkan fluktuasi, dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 kepemilikan akta kelahiran sebesar 70.62%, kemudian mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 66,00% pada tahun 2016.



Gambar 2.88

Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diketahui bahwa seluruh pasangan

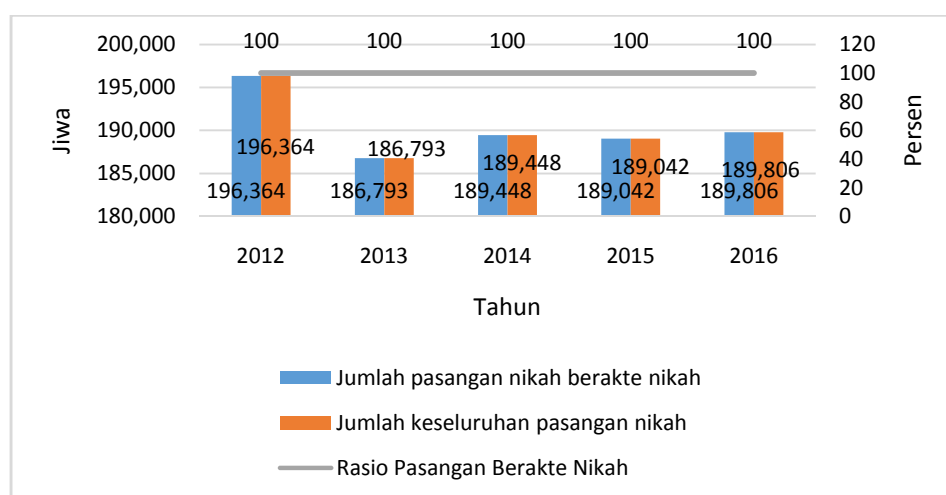
nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakte nikah. Berikut adalah data rasio pasangan berakte nikah di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

Tabel 2.148
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah pasangan nikah berakte nikah | Jiwa | 196.364 | 186.793 | 189.448 | 189.042 | 189.806 | -0,85 |
| 2. | Jumlah keseluruhan pasangan nikah | Jiwa | 196.364 | 186.793 | 189.448 | 189.042 | 189.806 | -0,85 |
| 3. | Rasio Pasangan Berakte Nikah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |

Sumber :

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017



Gambar 2.89
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kota Yogyakarta memiliki database kependudukan pada skala kota. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala kota berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah tersedia. Database kependudukan di Kota Yogyakarta dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kota Yogyakarta dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.

Tabel 2.149
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1. | Ketersediaan database kependudukan skala kota | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2009. Berikut adalah tabel data penerapan KTP Nasional Berbasis NIK dari tahun 2012-2016 di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.150
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Jumlah LPMK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Mengingat lembaga ini merupakan inisiatif masyarakat, maka bersifat mengakar secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya

baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun *tanggung renteng*, tidak jauh berbeda dengan LSM. Untuk itulah maka lembaga ini juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Perbedaan dengan LSM adalah lembaga ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerak pembangunan secara struktural dengan organisasi kelurahan. Dengan demikian LPM menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan.

Indikator jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPM, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. Tetapi data yang diperoleh hanya menunjukkan jumlah LPMK di Kota Yogyakarta. LPMK pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan.

Tabel 2.151
Jumlah LPMK di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-------------|----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah LPMK | kelompok | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan data di atas, seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta memiliki LPMK. Salah satu fungsi LPMK adalah mengelola dana hibah yang diberikan oleh Pemda seperti Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk memajukan kelurahan. LPMK hendaknya menjadi mitra yang efektif dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dapat menjadi kontributor yang efektif. Untuk itulah pemerintah yang mampu memfungsikan LPMK ini akan mencapai tujuan pembangunan sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Koordinasi yang intensif perlu dilakukan di tingkat kelurahan, agar optimalisasi peran LPMK menjadi lebih nyata kiprahnya dalam pembangunan.

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK atau yang biasa dikenal sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan,

keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mamu berperan dalam masyarakat berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, PKK memiliki 10 program pokok PKK. Dalam geraknya PKK berorientasi kepada 10 program pokok tersebut. Melalui 10 program pokok ini maka aktivitas dan kreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif. Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan warga dalam saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menyambungkan program-program Kota Yogyakarta hingga menyentuh ke masyarakat terbawah.

Data kelompok binaan PKK yang tersedia adalah data jumlah kelompok Dasawisma yang notabene merupakan kelompok binaan PKK. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah PKK di Kota Yogyakarta cukup banyak yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,48 persen per tahun. Sementara untuk data kelompok binaan PKK mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,26 persen per tahun. Sehingga hal ini memengaruhi jumlah rata-rata kelompok binaan yang juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,76 persen per tahun. Penurunan jumlah tiap tahunnya menunjukkan ada beberapa dasawisma ataupun PKK yang bergabung menyesuaikan dengan RT maupun RW di lingkungannya.

Tabel2.152
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|-----|---|----------|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma) | Kelompok | 5.228 | 5.228 | 5.146 | 5.146 | 5173 | -0,26 |
| 2. | Jumlah PKK | Kelompok | 3.147 | 3.147 | 3.143 | 3204 | 3208 | 0,48 |
| 3. | Rata-rata binaan PKK | | 1,66 | 1,66 | 1,64 | 1,61 | 1,61 | -0,76 |

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Jumlah organisasi PKK didasarkan pada keberadaan kampung, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kampung dan kelurahan. Di bawah organisasi PKK ada organisasi kecil yang disebut dasa wisma. Dasa wisma yaitu kelompok yang terdiri atas sepuluh wisma (Kepala Keluarga), dengan mengambil peran ibu sebagai anggota dasa wisma.

Dasa Wisma bertanggung jawab kepada PKK terbawah, sedangkan PKK tersebut dibina secara terstruktur terkait dengan integral kepada PKK di atasnya.

3. Jumlah LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. LSM biasanya melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.

Dilihat dari bentuknya, lembaga ini merupakan inisiatif dan dibentuk dari masyarakat, maka bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng. Untuk itulah maka lembaga ini memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam pembangunan segala bidang. Di bawah ini merupakan tabel informasi jumlah LSM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016.

Tabel2.153
Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|-----|-----------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah LSM yang Aktif | unit | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | -1,34 |

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah LSM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 mengalami penurunan sebesar 1,34 persen per tahun. Penurunan terjadi di tahun 2014 dan tahun 2015. Meskipun angka persentase penurunan relatif kecil akan tetapi perlu diperhatikan karena kontribusi dalam pembangunan sekecil apapun itu bermakna. Untuk itulah setiap penurunan LSM dalam masyarakat tetap diperhatikan sebagai sebuah fenomena penting yang segera perlu ditindaklanjuti.

Belum diketahui alasan penurunan jumlah LSM ini, kemungkinan penurunan jumlah ini dikarenakan LSM bersangkutan belum melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar ke Pemkot Yogyakarta. Bentuk tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemkot adalah dengan bersikap pro aktif untuk mendata LSM secara periodik dengan mengirimkan formulir atau menyediakan pelayanan SIM secara on line. Dengan hanya bersikap menunggu adalah kurang bijak. LSM yang merupakan kelembagaan yang melekat dengan masyarakat harus dipelihara. Upaya tindak lanjut lainnya yaitu memonitor aktivitas LSM dan mendata kegiatan serta prestasi yang dicapai.

Gambar2.90



Grafik Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

LSM sebagai organisasi yang memiliki kekuatan di akar rumput, merupakan wadah efektif untuk menggerakkan masyarakat. Jika Pemkot memberikan perhatian yang lebih baik tentunya mobilisasi energi pembangunan, seperti sumberdaya manusia, bantuan moril dan materiil akan menjadi sangat besar. Dengan memperkuat LSM ini maka akan semakin banyak kampung dan kelurahan yang lebih mandiri dalam banyak aspek.

4. LPMK Berprestasi

Ajang kompetisi dan mengoptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPMK untuk mendapatkan LPMK berprestasi merupakan kebijakan yang sangat startegis untuk meningkatkan gerak keaktifan lemabaga-lembaga tersebut. LPMK berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota

Yogyakarta untuk LPMK yang memiliki prestasi baik. KPMP memiliki sepuluh kriteria dalam menentukan LPMK berprestasi, di antaranya:

- a. Ketaatan antara realisasi dengan proposal kegiatan,
- b. Ketaatan volume pekerjaan dengan proposal,
- c. Besarnya swadaya masyarakat,
- d. Perencanaan sesuai Musrenbang,
- e. Ketepatan waktu realisasi pelaksanaan,
- f. Fokus pelaksanaan,
- g. Realisasi pelaksanaan,
- h. Ketertiban administrasi,
- i. Persentase pemegang KMS, dan
- j. Persentase ketaatan membayar pajak PBB.

Tabel2.154
Jumlah LPM Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|----------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah LPMK Berprestasi | kelompok | 6 | NA | 6 | 6 | - |
| 2. | Jumlah LPMK | kelompok | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| 3. | Persentase LPM Berprestasi | persen | 13 | NA | 13 | 13 | - |

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2012, 2014 dan 2015 terdapat enam LPMK yang berprestasi. Sementara untuk tahun 2016 tidak ada data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait LPM berprestasi. Pemberian apresiasi LPMK berprestasi ini diharapkan dapat memacu semangat dan motivasi seluruh LPMK di Kota Yogyakarta untuk semakin unggul dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Namun, LPMK berprestasi ini tidak setiap tahun diselenggarakan sehingga terdapat kekosongan data di tahun 2013. Perlu dijaga rutinitas pemilihan LPMK berprestasi sehingga setiap tahun diadakan. Antara pengorbanan alokasi anggaran Pemkot untuk pemilihan LPMK berprestasi adalah tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat merangsang seluruh LPMK untuk bergerak, melakukan inovasi-inovasi di tingkat lokal. Setidaknya LPMK berhasil mempertahankan keaktifan peran serta dalam pembangunan, menjaga stabilitas kondisi di tingkat lokal itu sudah merupakan kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah. Apalagi dengan seleksi

LPMK berprestasi akan mampu mendongkrak semangat peningkatan kualitas kegiatan yang dilakukan secara rutin maupun periodik.

5. PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Yogyakarta muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2.155
Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|-----|--|----------|-------|-------|------|------|------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta | kelompok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| 2. | Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta | kelompok | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0,00 |
| 3. | Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta | kelompok | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0,00 |
| 4. | Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta | kelompok | 625 | 625 | 627 | 615 | 616 | -0,36 |
| 5. | Jumlah kel. PKK RT | kelompok | 2.507 | 2.507 | 2501 | 2529 | 2532 | 0,25 |
| 6. | Jumlah kel. Dasawisma | kelompok | 5.228 | 5.228 | 5146 | 5146 | 5173 | -0,26 |

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Pada tabel tersebut di atas tampak bahwa organisasi PKK secara terstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitu dasawisma, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKK Kota Yogyakarta. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhan pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

6. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

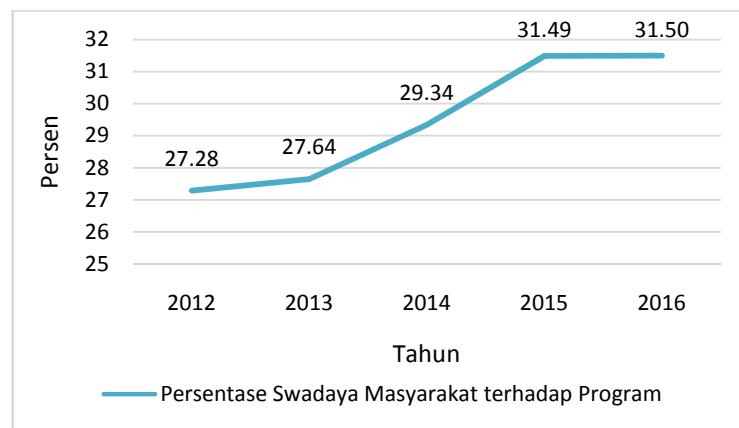
Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, bahwa kecilnya jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel2.156
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|-----|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah Swadaya Masyarakat | rupiah | 1.046.371.829 | 1.060.000.694 | 1.125.343.579 | 1.207.896.050 | 1.308.416.080 | 5,75 |
| 2. | Total Program | rupiah | 3.835.000.000 | 3.835.000.000 | 3.835.000.000 | 3.835.000.000 | 4.218.500.000 | 2,41 |
| 3. | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program | persen | 27,28 | 27,64 | 29,34 | 31,49 | 31,50 | 3,66 |

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan dihitung dengan membandingkan jumlah swadaya masyarakat terhadap total stimulan yang diberikan kepada 45 LPMK di Kota Yogyakarta yang kemudian dikali 100 persen. Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 jumlah swadaya masyarakat mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5,75 persen per tahun. Dana tersebut merupakan dana swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun oleh LPMK di 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta. Sementara total stimulan LPMK di 45 Kelurahan merupakan dana hibah yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dana penunjang program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Pertumbuhan persentase swadaya masyarakat terhadap program dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 dapat terlihat dalam grafik berikut.



Gambar 2.91
Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa sumbangan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan mengalami tren meningkat. Jika dirata-rata, pertumbuhan rata-rata swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan mencapai 3,66 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut bukan merupakan sumbangan yang kecil. Mengingat mobilisasi dana, tenaga, pikiran yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk kekuatan bottom up maka perlu mendapatkan apresiasi. Jika pemerintah tanggap terhadap segala bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, maka semangat untuk mandiri akan semakin besar. Untuk itulah diperlukan perhatian dan kemampuan untuk memonitor, membina serta memberikan perhatian terhadap kelembagaan sosial menjadi sangat penting dan

menjadi pintu strategis untuk meningkatkan inspirasi pembangunan di kalangan bawah.

7. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mencapai 100 persen. Angka tersebut dihasilkan dari perbandingan jumlah program pemberdayaan masyarakat dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk program yang bersangkutan pada tahun berkenaan. Berikut adalah data pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta tahun 2012 hingga 2016:

Tabel 2.157
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat | | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2. | Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat | | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 3. | Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015, 2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Program yang ada sesuai dengan program yang ada di KPMP dan kecamatan. Program pertama adalah program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat yang diampu oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang sifatnya berupa hibah dengan monitoring dan evaluasi tahunan. Sedangkan program kedua adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi tahunan juga dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Namun berdasarkan informasi dari OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat data untuk indikator ini pada tahun 2016.

Bentuk efektivitas penggunaan dana pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat memang sebaiknya diikuti dengan program pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketika dana diberikan harus disertai dengan proses pendampingan yang memberikan perhatian dan sikap proaktif dengan rencana-rencana pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan jangan hanya dinilai dari ketersediaan dana, namun hendaknya diikuti dengan monitoring dan konsultasi. Para penerima dana hibah dikumpulkan secara berkala dan diminta untuk memberikan laporan pencapaian hasil, mengkonsultasi kesulitan dan hambatan. Dengan demikian pemakaian anggaran pemberdayaan dapat tepat sasaran.

H. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dan keluarga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Berikut merupakan data rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.158
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Anak (Penduduk usia di bawah 17 tahun) | Anak | 118.531 | 111.797 | 112.901 | 110.296 | 110.296 | -1,78 |
| 2. | Jumlah Keluarga | Keluarga | 129.439 | 124.744 | 128.843 | 129.092 | 131.092 | 0,32 |
| 3. | Rata-rata jumlah anak per jiwa dalam keluarga | Anak | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 2,19 |

Sumber :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Dalam hal ini, digunakan data jumlah penduduk dengan usia 0-17 tahun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartu keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Dari pendataan dari tahun 2012-2016 menunjukkan kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah anak dalam keluarga.

Berdasarkan hasil perhitungan data di atas pula, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016 cenderung menunjukkan bahwa dalam satu keluarga masih memiliki jumlah anak yang sama, yaitu satu anak per keluarga. Jumlah ini sudah memenuhi (tidak melebihi) target program keluarga berencana dengan jumlah anak tidak lebih dari dua orang.

2. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Berikut ini merupakan data cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.159
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

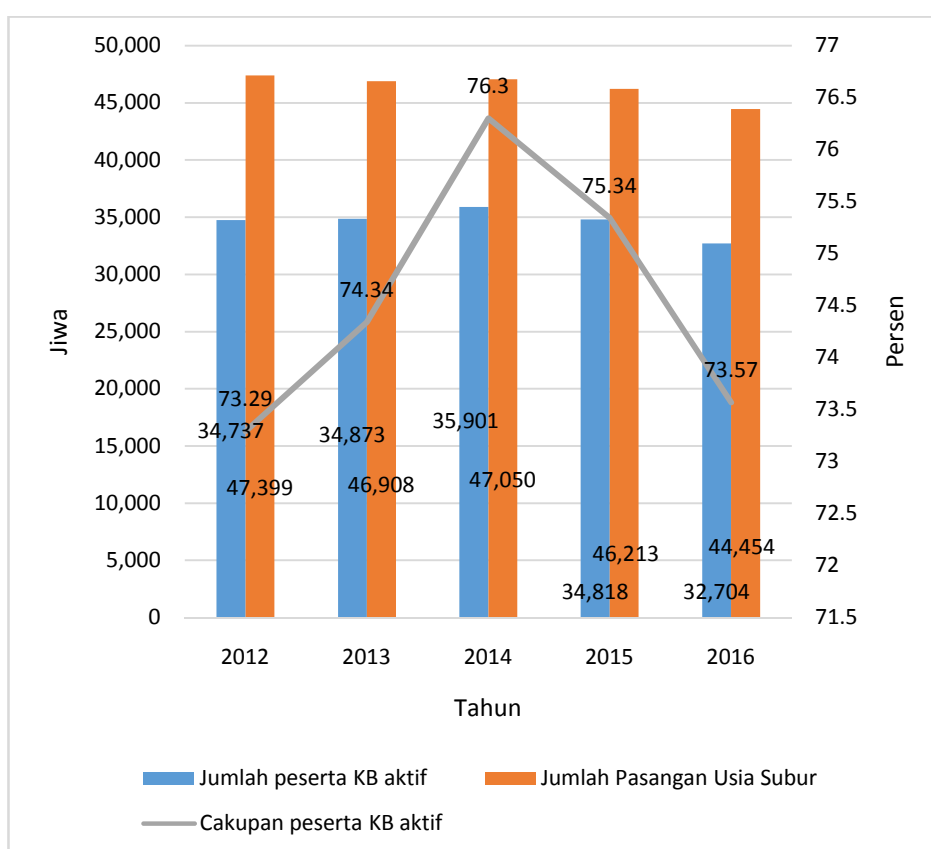
| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 1 | Jumlah peserta KB aktif | Jiwa | 34.737 | 34.873 | 35.901 | 34.818 | 44.454 | 6,36 |
| 2 | Jumlah Pasangan Usia Subur | Jiwa | 47.399 | 46.908 | 47.050 | 46.213 | 32.704 | -8,86 |
| 3 | Cakupan peserta KB aktif | Persen | 73,29 | 74,34 | 76,3 | 75,34 | 73,57 | 0,10 |

Sumber :

1. Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, besaran cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menunjukkan

peningkatan, namun sayangnya persentase tersebut turun di tahun 2015 dan 2016 walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2012, cakupan peserta KB aktif mencapai 73,29%. Kemudian mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya sehingga mencapai 73,57% pada tahun 2016. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana. Di masa yang akan datang diharapkan jumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlah penduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.



Gambar 2.92
Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pengertian Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh kebutuhan dasar minimal yaitu dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dalam hal spiritual,

sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya.

Indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I berdasarkan informasi dari Kantor KB Kota Yogyakarta tidak digunakan untuk mengukur angka kemiskinan, melainkan untuk mengukur 8 fungsi keluarga menurut BKKBN, diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan. Berikut ini merupakan data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta.

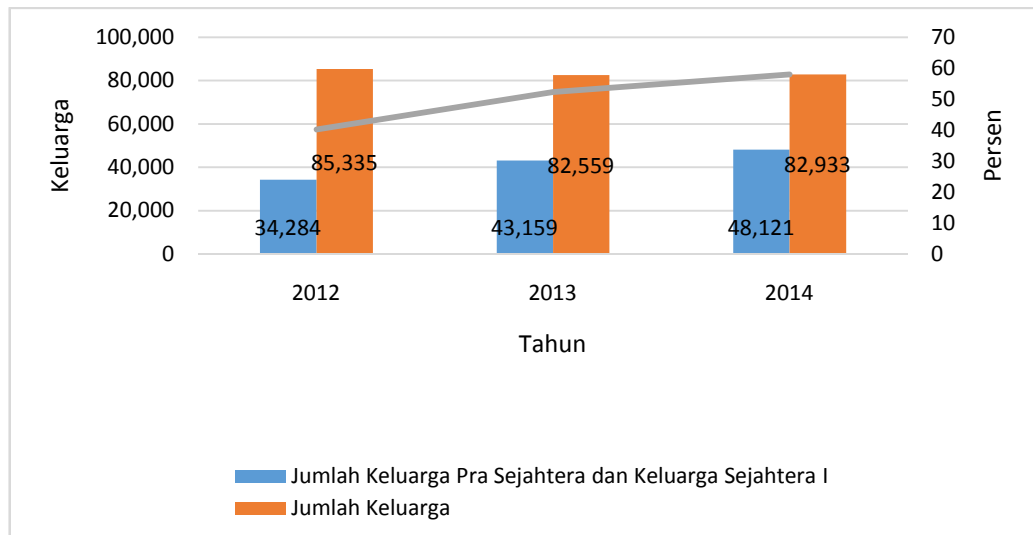
Tabel 2.160
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | Keluarga | 34.284 | 43.159 | 48.121 | - | - | |
| 2. | Jumlah Keluarga | Keluarga | 85.335 | 82.559 | 82.933 | - | - | |
| 3. | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | Persen | 40,18 | 52,28 | 58,02 | - | - | |

Sumber :

1. Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, terdapat 40,18% keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Jumlah itu terus meningkat hingga mencapai 58,02% pada tahun 2014, atau terdapat 48.121 keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.



Gambar 2.93
Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

I. Perhubungan

Sesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010, terdapat sembilan indikator pada urusan perhubungan, di antaranya adalah jumlah arus penumpang umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah terminal bis, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu. Dalam urusan perhubungan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, misalnya adalah indikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota yang menggantikan indikator jumlah arus penumpang umum.

1. Angkutan Umum yang Melewati Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota

Indikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota merupakan indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan. Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada dan yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota dengan jumlah angkutan umum yang seharusnya ada dan yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota.

Tabel 2.161
Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---|--------|------|------|------|
| 1. | Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota | Unit | 9640 | 9797 | 9650 |
| 2. | Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota | Unit | 9640 | 9797 | 9650 |
| 3. | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota | % | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 seluruh jaringan jalan kota di Kota Yogyakarta sudah terlewati angkutan umum. Sehingga persentase jaringan jalan kota terlewati angkutan umum sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 sudah mencapai 100%. Keberhasilan tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan yang diukur menggunakan panjang jalan. Adapun panjang jaringan jalan di kota Yogyakarta adalah sebanyak 248.087,1 meter sedangkan jaringan jalan yang terlayani adalah 64.155 meter untuk kendaraan umum trayek dan 174.931,6 meter untuk jalur non trayek.

2. Rasio Izin Trayek

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase izin trayek adalah jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Lampiran 1 Permendagri 54/2010 menjelaskan bahwan izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Trayek diartikan sebagai lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Indikator persentase ijin trayek untuk lingkup Kota Yogyakarta, tidak dapat diisikan datanya. Hal ini dikarenakan kewenangan ijin trayek dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi izin trayek yang melewati wilayah Kota Yogyakarta saja. Disamping itu, angkutan darat lainnya, seperti travel dan taksi juga merupakan kewenangan provinsi.

Angkutan kota yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta hanya “Si Thole” yang merupakan angkutan wisata. “*Si Thole*” mulai dioperasikan pada bulan November tahun 2014. Angkutan wisata ini memiliki tiga rute utama, yakni (1) dari Taman Parkir Ngabean menuju Keraton Yogyakarta, dimana rute ini melewati Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Keraton Yogyakarta, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (2) dari Taman Parkir Ngabean menuju Tamansari, dimana rute ini melintasi jalan Rotowijayan, Ngasem, Sompilan, Tamansari, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (3) dari Taman Parkir Ngabean menuju Taman Pintar, dimana rute ini melintasi Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Brigjen Katamso, Taman Parkir Senopati, Titik Nol Kilometer, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean.

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

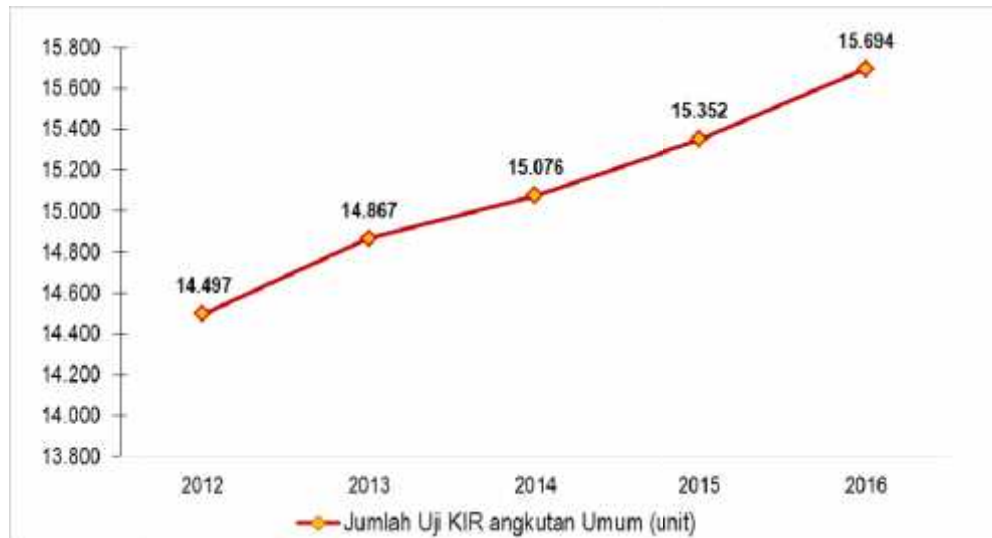
Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.162
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah Uji KIR angkutan Umum | Unit | 14.497 | 14.867 | 15.076 | 15.352 | 15.694 | 2,00 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilai yang terus meningkat, yakni sebanyak 14.497 unit angkutan umum pada tahun 2012 meningkat menjadi 15.694 unit angkutan umum pada tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,00% per tahun.



Gambar 2.94
Grafik Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Nilai indikator jumlah uji KIR angkutan umum yang fluktuatif diduga karena dalam satu tahun, uji KIR diadakan sebanyak dua kali, dan tidak setiap kendaraan melakukan uji KIR sebanyak dua kali. Selain itu juga pengujian KIR tidak terikat batasan administratif, sehingga angkutan maupun kendaraan yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dapat melakukan pengujian KIR di Kota Yogyakarta atau dikenal dengan istilah “numpang uji”.

4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belum tentu berdomilisi di Kota Yogyakarta, dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang lewat wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.163
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum | Unit | 7.249 | 7.434 | 7.548 | 7.676 | 7.849 | 1,99 |
| 2. | Jumlah angkutan umum pada tahun | Unit | 11.382 | 12.011 | 11.663 | 12.803 | 12.106 | 1,55 |
| 3. | Kepemilikan KIR angkutan umum | % | 63,68 | 61,89 | 64,7 | 59,95 | 64,83 | 1,49 |

Sumber : Data Sektoral Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikator kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 1,99% per tahun.



Gambar 2.95
Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Menurunnya nilai kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta ini diduga karena adanya kendaraan yang hanya mengikuti uji KIR sekali dalam satu tahun, sedangkan kegiatan uji KIR ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun, selain itu juga dimungkinkan ada

angkutan umum yang mengikuti uji KIR diluar wilayah Kota Yogyakarta. Faktor pembanding pada indikator kepemilikan KIR angkutan umum, yakni jumlah angkutan umum pada tahun n juga mengakibatkan rendahnya capaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap indikator ini. Menurut data yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di tahun 2016 jumlah populasi kendaraan wajib uji di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 9.509 kendaraan, jumlah ini cukup jauh tentunya apabila dibandingkan dengan jumlah data angkutan umum pada tahun n yang dijadikan pembanding dalam indikator ini.

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Yogyakarta adalah 45 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 5 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 15-20 menit, pengetokan plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit untuk masing-masing kendaraan.

Tabel 2.164
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | menit | 45 menit | 45 menit | 45 menit | 45 menit | 45 menit |

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2017

6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Data mengenai indikator biaya pengujian kelayakan angkutan umum didapatkan dari Perda Nomor 17 Tahun 2009 yang dirinci sesuai dengan jenis kendaraan bermotornya.

Tabel 2.165
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Macam Pelayanan | Rincian Tarif Retribusi | Jumlah Tarif Retribusi |
|-----|---|-------------------------|------------------------|
| 1. | Pengujian Kendaraan Bermotor: a. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg, | | |

| No. | Macam Pelayanan | Rincian Tarif Retribusi | Jumlah Tarif Retribusi |
|-----|---|--|--|
| | dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya uji 2) Penggantian buku uji 3) Plat uji, kawat, segel 4) Tanda samping/ stiker b. Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg, dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya uji 2) Penggantian buku uji 3) Plat uji, kawat, segel 4) Tanda samping/ stiker c. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg, dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya uji 2) Penggantian buku uji 3) Plat uji, kawat, segel 4) Tanda samping/ stiker | Rp 30.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,- Rp 40.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,- Rp 50.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,- | Rp 65.000,- Rp 75.000,- |
| | | | Rp 85.000,- |
| 2. | Kendaraan uji lengkap a. Biaya uji b. Penggantian buku uji | Rp 30.000 Rp 10.000 | Rp 40.000,- |
| 3. | Pengujian khusus emisi gas buang : a. Mobil 1) Biaya uji 2) Stiker tanda lulus uji emisi b. Sepeda motor 1) Biaya uji 2) Stiker tanda lulus uji emisi | Rp 11.000,- Rp 4.000,- Rp 6.000,- Rp 4.000,- | Rp 15.000,- Rp 10.000,- |
| 4. | Registrasi kendaraan bermotor: a. Baru dan mutasi masuk b. Mutasi keluar c. Modifikasi/ perubahan bentuk atau tipe | | Rp 25.000,- Rp 50.000,- Rp 25.000,- |
| 5. | Numpang uji keluar/ masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya | | Sebesar biaya uji berkala |
| 6. | Penggantian tanda lulus uji : a. Buku uji rusak b. Buku uji hilang c. Plat, kawat, dan segel rusak d. Plat, kawat, dan segel hilang e. Tanda samping rusak | | Rp 20.000,- Rp 50.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,- |
| 7. | Pengecatan identitas/ lokasi | | Rp 10.000,- |

Sumber : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009

7. Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api

Terminal bis diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis di Kota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di Kecamatan

Umbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan.

Tabel 2.166
Jumlah Terminal Bis, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Terminal Bis | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah Halte Permanen Transjogja | Unit | 34 | 34 | 34 | 34 | 110 |
| 3. | Jumlah Halte Portable Bis Transjogja | Unit | - | 23 | 23 | 30 | 40 |
| 4. | Jumlah Stasiun Kereta Api | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, dimana terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Disamping itu juga terdapat jumlah halte untuk armada atau bus Transjogja. Bus Transjogja menggunakan dua jenis halte, yakni halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dipinjam pakaikan ke provinsi, sehingga semua halte sekarang dioperasikan semuanya oleh provinsi. Selain terdapat halte permanen, mulai tahun 2013 terdapat pembangunan halte portable untuk bus Transjogja, yakni sebanyak 23 unit dan tidak ada penambahan halte portable pada tahun 2014 kemudian bertambah lagi di tahun 2015 menjadi 30 halte dan di tahun 2016 menjadi 40 halte portable.

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan berada dibawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Gedongtengen. Stasiun ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Danurejan. Stasiun Lempuyangan melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas ekonomi.

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut, diduga saat ini bus bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan dugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta. Bisa diamati tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbang masuk/keluar Kota Yogyakarta selalu habis (sold out) di akhir pekan atau pada saat hari-hari libur nasional.

8. Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan

Indikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator kriteria transportasi berkelanjutan, dimana indikator ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah penumpang angkutan umum dengan jumlah kendaraan. Jumlah angkutan umum dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilai yang cenderung meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,55% per tahun, hal tersebut diikuti juga dengan peningkatan jumlah kendaraan yang lebih besar dari peningkatan jumlah angkutan umum. Pada tahun 2012, jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta sebanyak 257.233 unit yang meningkat hingga mencapai 626.274 unit kendaraan pada tahun 2016, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 24,91% per tahun.

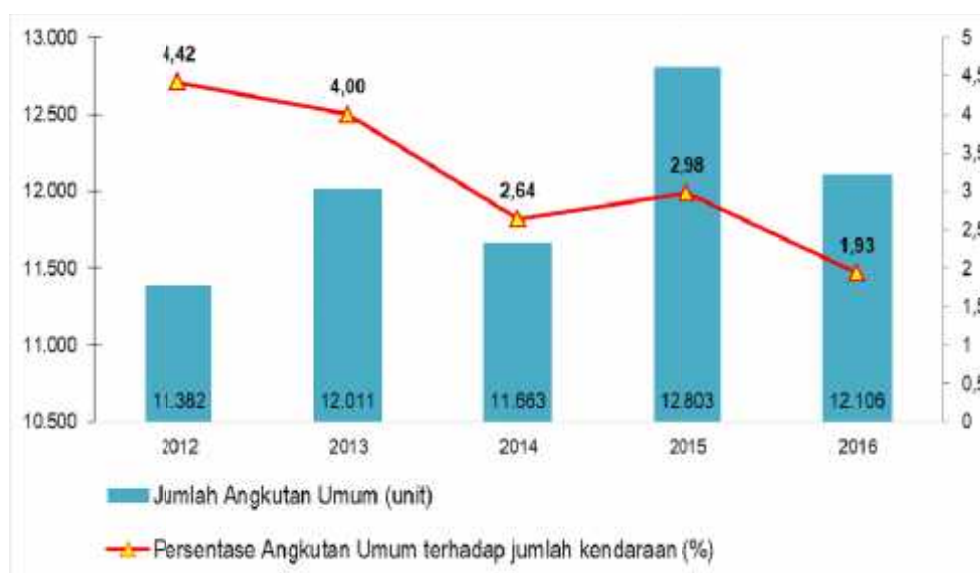
Tabel 2.167
Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah Angkutan Umum | Unit | 11.382 | 12.011 | 11.663 | 12.803 | 12.106 | 1,55 |
| 2. | Jumlah Kendaraan | Unit | 257.233 | 300.444 | 441.708 | 430.177 | 626.274 | 24,91 |
| 3. | Persentase Angkutan Umum terhadap jumlah kendaraan | % | 4,42 | 4,00 | 2,64 | 2,98 | 1,93 | -18,68 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Nilai yang ditunjukkan oleh indikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni sebesar 4,42% di tahun 2012 turun menjadi 1,93% di tahun 2016, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -18,68% per tahun. Meskipun memiliki kecenderungan

menurun, jumlah angkutan umum dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 justru cenderung bertambah. Namun dengan angka pertumbuhan rata-rata yang cenderung menurun mengindikasikan bahwa penduduk banyak yang beralih dari angkutan umum ke kendaraan pribadi.



Gambar 2.96
Grafik Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan
Sumber : Hasil Olahan, 2017

9. Pemasangan Rambu-rambu

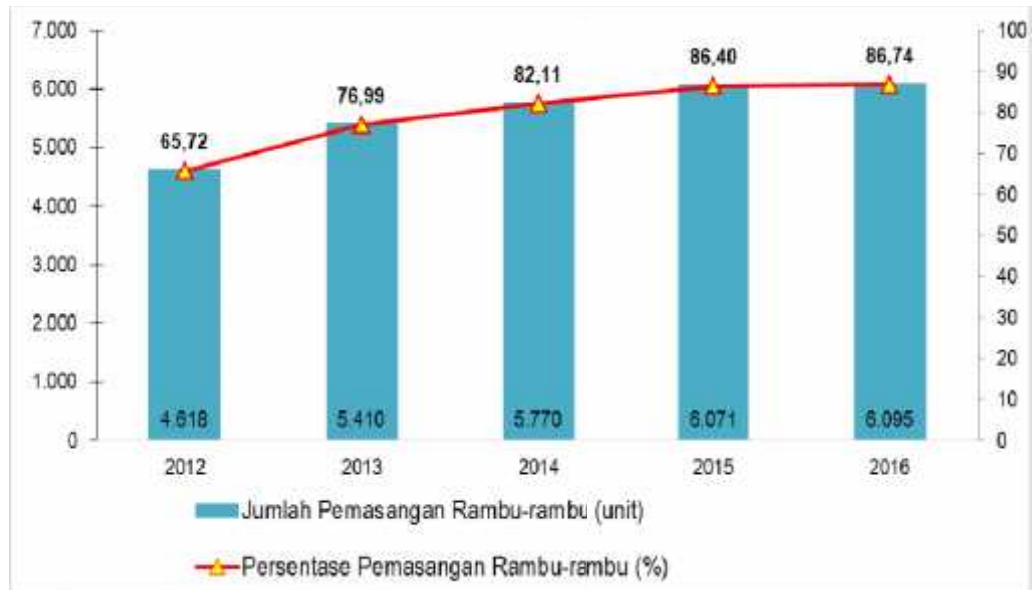
Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.168
Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah Pemasangan Rambu-rambu | Unit | 4.618 | 5.410 | 5.770 | 6.071 | 6.095 | 7,18 |
| 2. | Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Tersedia | Unit | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | - |
| 3. | Pemasangan Rambu-rambu | % | 65,72 | 76,99 | 82,11 | 86,40 | 86,73 | 7,18 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikator pemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan nilai yang terus mengalami peningkatan, yakni sebesar 65,72% pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,73% pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,18% per tahun.



Gambar 2.97
Grafik Pemasangan Rambu-rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan jumlah rambu-rambu yang ada di berbagai sudut kota.

10. Kinerja Lalu Lintas

Analisis kinerja lalu lintas dilakukan dengan membandingkan antara volume dan kapasitas jaringan jalan yang ada (V/C ratio) dan kecepatan perjalanan dibandingkan dengan standar pada MKJI. Berdasarkan hasil survei didapatkan nilai volume lalu lintas berdasarkan masing-masing jenis kendaraan dan kecepatan perjalanan pada masing-masing ruas. Masing-masing jenis kendaraan tersebut dikonversi untuk mendapatkan volume lalu lintas dalam satuan mobil penumpang (smp). Secara teoretis nilai derajat kejenuhan tersebut (V/C) maksimal sebesar 1.

Nilai derajat kejenuhan semakin mendekati angka 1, menunjukkan kondisi lalu lintas yang macet. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, nilai derajat kejenuhan lalu lintas di jalan perkotaan lebih besar atau sama dengan 0,8 menunjukkan adanya kemacetan lalu lintas.

Jaringan jalan di Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan dalam MKJI 1997 merupakan bagian dari jaringan jalan perkotaan. Segmen jalan perkotaan/semi perkotaan memiliki ciri-ciri: mempunyai perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atau hampir seluruhnya, minimal pada satu sisi jalan tersebut, apakah itu pengembangan pita atau bukan.

Tabel 2.169
Nilai Rata-Rata Perbandingan Volume Lalu Lintas dengan Kapasitas Jalan Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2013

| Kelas jalan | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arteri Sekunder | 0,44 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,58 |
| Kolektor sekunder | 0,60 | 0,65 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,81 |
| Lokal sekunder | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,77 |

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

Kinerja lalu lintas kota Yogyakarta sejak tahun 2008 hingga 2013 menunjukkan penurunan terlihat dari nilai rata-rata perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang semakin meningkat. Semakin besar nilai V/C rasio suatu ruas jalan semakin buruk kondisi lalu lintasnya yang ditunjukkan dengan munculnya kemacetan lalu lintas maupun penurunan kecepatan kendaraan.

11. Kecepatan Lalu Lintas Rata-rata

Kinerja lalu lintas dapat ditunjukkan pula dengan nilai kecepatan rata-rata yang diukur per ruas jalan. Nilai kecepatan lalu lintas rata-rata pada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kecepatan lalu lintas.

Tabel 2.170
Kecepatan lalu lintas rata-rata (km/jam) Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

| Klas jalan | 2013 | 2014 |
|-------------------|-------|-------|
| Arteri Sekunder | 31,54 | 34,11 |
| Kolektor sekunder | 34,55 | 30,30 |
| Lokal sekunder | 36,10 | 27,99 |

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

12. Fatalitas Kecelakaan Lalulintas

Indikator ini didasarkan pada nilai perbandingan antara jumlah korban meninggal akibat kecelakaan dengan jumlah kecelakaan. Dari tabel berikut, terlihat ada kecenderungan fatalitas kecelakaan yang meningkat meski jumlah kejadian kecelakaannya berkurang. Fatalitas sendiri mencerminkan tingkat kekerasan kejadian kecelakaan. Dengan demikian kondisi lalulintas di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2013 belum menunjukkan kinerja keselamatan lalulintas yang membaik.

Tabel 2.171
Fatalitas kecelakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

| No. | Indikator | Satuan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan | Orang | 19 | 6 | 23 | 10 | 31 | 16 | 32 |
| 2. | Jumlah kecelakaan | Kejadian | 728 | 497 | 551 | 680 | 831 | 678 | 526 |
| 3. | Tingkat fatalitas | | 0,0261 | 0,0121 | 0,0417 | 0,0147 | 0,0373 | 0,0236 | 0,0608 |

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2014, Badan Pusat Statistik

J. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, urusan komunikasi dan informatika memiliki lima indikator, yakni jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, serta website milik pemerintah daerah. Berdasarkan kesepakatan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, indikator jaringan komunikasi tidak relevan apabila diterapkan untuk wilayah Kota Yogyakarta, sehingga indikator ini ditiadakan.

1. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Sedangkan warnet atau

warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Tabel 2.172
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah Wartel | Unit | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 45,65 |
| 2. | Jumlah Warnet | Unit | 17 | 15 | 6 | 6 | 55 | 34,12 |
| 3. | Jumlah penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| 4. | Persentase wartel terhadap penduduk | Unit Per 1.000 penduduk | 0,0005 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0022 | 44,64 |
| 5. | Persentase warnet terhadap penduduk | Unit Per 1.000 penduduk | 0,0040 | 0,0037 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0134 | 35,22 |

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Jumlah wartel dan warnet yang bersumber dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tersebut merupakan data wartel dan warnet yang berizin, dimana keduanya memiliki jumlah yang cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Akan tetapi, jumlah warnet dan wartel mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2016. Jumlah wartel dan warnet di Kota Yogyakarta sebenarnya masih cukup banyak (diatas jumlah yang tertulis didalam data), namun tidak memiliki izin resmi (tidak melapor ke Dinas Perizinan).



Gambar 2.98
Grafik Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat masyarakat dapat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi via internet. Apalagi predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar sangat mendukung pertumbuhan warnet-warnet tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya mengakses internet di kota-kota besar lainnya. Namun, keberadaan warnet semakin terancam dengan adanya fasilitas hotspot di berbagai sudut Kota Yogyakarta yang menawarkan akses internet gratis. Fasilitas hotspot ini tersebar di berbagai tempat, mulai dari pusat pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, cafe/restoran, hingga rumah-rumah pondokan mahasiswa (kos).

2. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Indikator jumlah surat kabar nasional dan lokal seperti yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010 adalah jenis surat kabar nasional dan lokal yang masuk ke daerah. Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tertulis dalam tabel merupakan surat kabar yang menjadi langganan dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, yakni sebanyak 16 surat kabar.

Tabel 2.173
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-----------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal | Buah | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan surat kabar lokal dan nasional untuk mendukung semua SKPD umumnya dan pelaksanaan tupoksi setiap pegawai/pejabat pada khususnya. Dalam upaya meningkatkan kepekaan terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dll diperlukan surat kabar lokal dan nasional. Namun indikator pengukuran kinerja hanya sebatas pada output yang berupa banyaknya langganan surat kabar lokal dan nasional. Untuk sampai pada indikator outcome, maka perlu ditindaklanjuti dengan mengukur pemanfaatan berita terkait dengan tupoksi SKPD untuk kepentingan pengambilan keputusan, pengayaan data maupun pertimbangan dan solusi.

3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Indikator jumlah penyiaran radio dan televisi lokal adalah jumlah penyiaran radio dan televisi yang masuk ke daerah. Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, pada tahun 2012 hingga tahun 2016 bekerjasama dengan empat televisi lokal, yakni TVRI, Jogja TV, RBTv, dan Adi TV. Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta bekerjasama dengan delapan radio dari beberapa radio yang sering digunakan kurang lebih 13 stasiun radio, diantaranya adalah RRI, MBS, Sonora, Geronimo, PTDI Kota Perak, Q-Radio, Arma Sebelas, EMC, Retjo Buntung, Global FM, dan Star FM.

Tabel 2.174
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah penyiaran radio | Channel | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 2. | TV lokal | Channel | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan radio/TV lokal dan nasional untuk mendukung semua SKPD umumnya dan pelaksanaan tupoksi setiap pegawai/pejabat pada khususnya. Dalam upaya meningkatkan kepekaan terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dll diperlukan radio/TV lokal dan nasional. Namun indikator pengukuran kinerja hanya sebatas pada output yang berupa banyaknya langganan radio/TV lokal dan nasional. Untuk sampai pada indikator *outcome*, maka perlu ditindaklanjuti dengan mengukur pemanfaatan berita terkait dengan tupoksi SKPD untuk kepentingan pengambilan keputusan, pengayaan data maupun pertimbangan dan solusi.

4. Website Milik Pemerintah Daerah

Kota Yogyakarta memiliki website yang rutin diisi oleh Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yakni jogjakota.go.id. Website tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Selain itu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (running text).

Disamping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengampu subdomain klipings.jogjakota.go.id. Website tersebut mengunggah (upload) berita-berita mengenai kabar dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dimuat pada surat kabar yang beredar di

Yogyakarta. Website kliping.jogjakota.go.id juga diperbarui (update) setiap hari.

Dalam website jogjakota.go.id terdapat 12 sub domain yang merupakan website dinas dan beberapa lembaga terkait, seperti Layanan Pengadaan Secara Online (LPSE), Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Baznas Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, Kliping Berita, KPU Kota Yogyakarta, Konsultasi Belajar Siswa Dinas Pendidikan, Bidang Kerjasama Kota Yogyakarta, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, Dinas Pendidikan, serta Perpustakaan Kota Yogyakarta.

Secara konten atau isi dari sub domain tersebut secara umum cukup lengkap, misalnya website dari Bagian Hukum Setda. Konten dari website ini mencakup produk hukum baik dari pusat, provinsi, dan juga pemerintah kota sendiri. Produk hukum tersebut diantaranya terdiri dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (tahun 1951 hingga tahun 2015), Peraturan Walikota (tahun 1969, tahun 2005 hingga tahun 2015), Peraturan DPRD (tahun 2010 dan tahun 2014), serta memuat tentang Keputusan Walikota (tahun 2006, tahun 2013 hingga tahun 2014).

Website Dinas Pendidikan memiliki konten yang cukup lengkap, diantaranya mengenai kalender pendidikan, informasi mengenai ujian nasional, jaminan pendidikan daerah, produk hukum, serta informasi pendidikan lainnya. Selain itu juga terdapat website konsultasi siswa dimana website ini dirasa cukup membantu siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang dirasa sulit. Hal ini dikarenakan pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa dijawab dengan relatif cepat. Hingga tanggal 20 April 2015 (tanggal diaksesnya website konsultasi siswa), sudah terdapat 10.480 pertanyaan masuk, dan 10.158 pertanyaan yang terselesaikan (terjawab).

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki konten yang dapat dikatakan lebih lengkap dari konten website sub domain lainnya. Konten website Dinas Perizinan diantaranya berisi jenis perizinan dan jenis permohonan yang memuat mengenai syarat pengajuan, dasar hukum, hingga formulir pengajuan. Disamping itu, Dinas Perizinan memiliki online services atau pelayanan perizinan online yang dapat digunakan untuk membuat perizinan khususnya penelitian, KKN, PKL, SIUP, dan TDP yang diakses melalui <http://perizinan.jogjakota.go.id/online>. Pada web Dinas Perizinan juga memuat tentang produk hukum mengenai penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta. Berbagai website pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini secara keseluruhan menyajikan

informasi tentang berita, agenda, serta informasi dan keluhan dari masing-masing OPD.

5. Pameran/Expo

Indikator pameran/expo sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 merupakan jumlah yang menunjukkan banyaknya kegiatan pameran/expo yang dilaksanakan per tahun. Banyaknya pameran/expo yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta bersumber dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimana pameran dan atau expo tersebut terdiri dari dua jenis pameran/expo yang meliputi pameran perindustrian dan perdagangan.

Terdapat banyak jenis pameran baik yang diselenggarakan ataupun diikuti Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Namun dari data yang tersedia baru tercatat jumlah pameran/expo yang diselenggarakan dan diikuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Di tahun 2016 sendiri jumlah pameran/expo yang diselenggarakan dan diikuti oleh Disperindagkoptan Kota Yogyakarta berjumlah 17 pameran yang terdiri dari 3 pameran perindustrian dan 14 pameran perdagangan.. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya berbagai kegiatan pameran baik yang ada di dalam Kota Yogyakarta maupun di luar kota. Disperindagkoptan melibatkan Usaha Kecil Menengah dalam berbagai pameran/expo yang diadakan setiap tahunnya.

Tabel 2.175
Jumlah Pameran/Expo Perdagangan yang Dilaksanakan per Tahun oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---------------------|------------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah pameran/expo | Kali/tahun | 13 | 11 | 13 | 17 |
| | a. perindustrian | | | | | 3 |
| | b. perdagangan | | | | | 14 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Tahun 2017

K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor

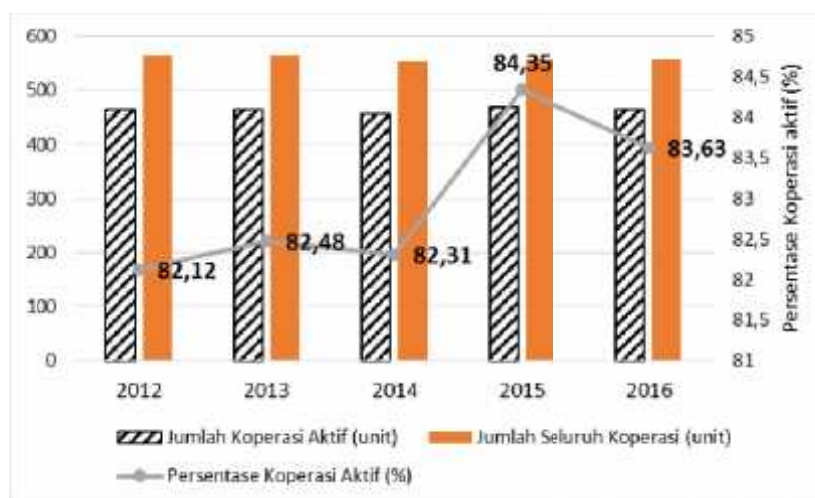
formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016 cenderung menurun. Dari 565 unit koperasi di tahun 2012, turun menjadi 556 unit koperasi pada tahun 2016. Jumlah koperasi aktif di Kota Yogyakarta cenderung naik turun tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2012, jumlah koperasi aktif yaitu sebanyak 464 unit. Jumlah tersebut sempat turun menjadi 456 unit di tahun 2014 kembali naik menjadi 469 unit di tahun 2015, dan turun lagi menjadi 465 unit di tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah koperasi aktif yaitu sebesar 83,63% dari jumlah seluruh koperasi. Persentase koperasi aktif pada tahun 2012-2016 juga naik turun seiring jumlah koperasi aktif.

Tabel 2.176
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016

| Variabel | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| Jumlah Koperasi Aktif | unit | 464 | 466 | 456 | 469 | 465 | 0,05 |
| Jumlah Seluruh Koperasi | unit | 565 | 565 | 554 | 556 | 556 | -0,40 |
| Persentase Koperasi Aktif | % | 82,12 | 82,48 | 82,31 | 84,35 | 83,63 | 0,46 |

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017



Gambar 2.99
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan data tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan

berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di Kota Yogyakarta, meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dari perkembangannya, jumlah LKM di Kota Yogyakarta secara umum mengalami peningkatan selama tahun 2012-2016. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya. Jumlah LKM ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah UMKM. Meski demikian, hanya Koperasi Simpan Pinjam yang meningkat jumlahnya pada tahun 2012-2016. Sedangkan jumlah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) tidak meningkat jumlahnya selama tahun 2012-2016. Bahkan, jumlah UED-SP mengalami penurunan dari 27 unit di tahun 2012 menjadi 20 unit di tahun 2016. Secara umum, jumlah LKM di Kota Yogyakarta cenderung meningkat, sehingga diharapkan akan mampu mendorong perkembangan usaha kecil di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.177
Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

| No | Variabel | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|---------------|------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1. | Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam | unit | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | -7,23 |
| 2. | Badan Usaha Kredit Pedesaan | unit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0,00 |
| 3. | Koperasi Simpan Pinjam | unit | 28 | 32 | 44 | 46 | 47 | 13,82 |
| Jumlah | | unit | 68 | 69 | 73 | 85 | 80 | 81 |

Sumber : Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu

sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Persentase usaha mikro dan kecil sangat mendominasi dari keseluruhan UKM di Kota Yogyakarta, yaitu berkisar pada 97% per tahunnya. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan persentase usaha mikro dan kecil menunjukkan nilai negatif. Jumlah seluruh UKM maupun jumlah usaha mikro dan kecil sama-sama mengalami perkembangan positif pada tahun 2012-2016. Hal ini merupakan sebuah sinyal yang baik bagi kegiatan perekonomian penduduk khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.

Tabel 2.178
Banyaknya Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|------------------------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Jumlah usaha mikro dan kecil | unit | n.a | 21.965 | 22.165 | 22.418 | 22.707 | 1,11 |
| Jumlah seluruh UKM | unit | n.a | 22.591 | 22.841 | 23.341 | 23.468 | 1,28 |
| Usaha Mikro dan Kecil | % | n.a | 97,23 | 97,04 | 96,05 | 96,76 | -0,16 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Yogyakarta banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi DIY dengan morfologi perkotaan.

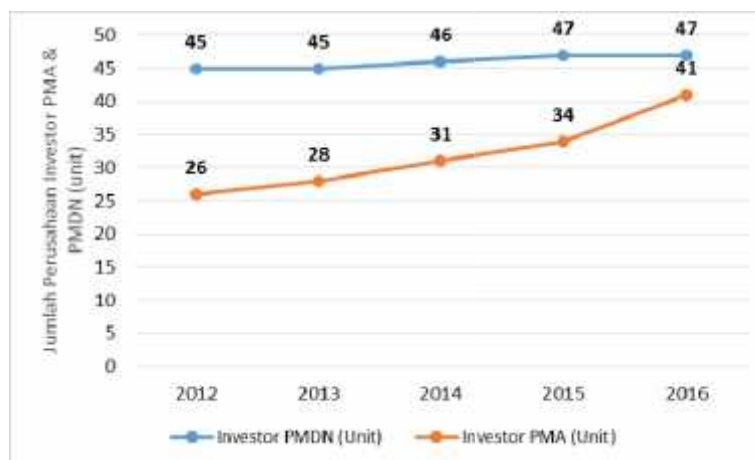
Tabel 2.179
Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Jenis Perusahaan | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1 | Investor PMDN | Unit | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 1,09 |

| No | Jenis Perusahaan | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 2 | Investor PMA | Unit | 26 | 28 | 31 | 34 | 41 | 12,06 |
| | Total | Unit | 12 | 71 | 73 | 77 | 81 | 88 |

Sumber : BKM Provinsi DIY, 2017; dengan Hasil Olahan, 2017

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel di atas merupakan jumlah kumulatif perusahaan investor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum, jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama kurun waktu 2012-2016 terjadi peningkatan secara signifikan pada jumlah investor PMA, dimana pada tahun 2012 hanya terdapat 26 perusahaan penanam modal yang melakukan izin berinvestasi di Kota Yogyakarta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 41 unit perusahaan. Sebaliknya, jumlah perusahaan investor PMDN hanya mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari sebanyak 45 unit perusahaan di tahun 2012 menjadi 47 perusahaan di tahun 2016. Sementara itu, dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebih mendominasi kegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.100

Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : BKM Provinsi DIY, 2017, Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Sejalan dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang terus meningkat setiap tahun, nilai investasi yang ditanamkan di Kota Yogyakarta juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor adalah sebesar 2.951.686 juta Rupiah, sedangkan pada tahun 2016, nilai investasi yang ditambahkan adalah sebesar 5.118.645 juta Rupiah.

Ditinjau dari kontribusinya, nilai investasi perusahaan PMDN pada tahun 2012 lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi perusahaan PMA. Pada tahun 2012, nilai investasi perusahaan PMDN adalah sebesar 1.303.134 juta Rupiah, sedangkan nilai investasi perusahaan PMA adalah sebesar 1.648.552 juta Rupiah. Secara umum, jumlah nilai investasi perusahaan PMA pada tahun 2012-2016 juga lebih besar dibandingkan dengan perusahaan PMDN. Sementara itu, nilai investasi PMDN mengalami peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan PMA, dan nilainya selama tahun 2012-2016 masih di bawah 2.000.000 juta Rupiah.

Tabel 2.180
Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Jenis Perusahaan | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | PMDN | Juta Rp | 1.303.134 | 1.311.868 | 1.551.559 | 1.722.410 | 1.814.799 | 8,63 |
| 2 | PMA | Juta Rp | 1.648.552 | 2.157.338 | 2.193.868 | 3.220.222 | 3.303.846 | 18,98 |
| Total | | Juta Rp | 2.951.686 | 3.469.206 | 3.745.427 | 4.942.632 | 5.118.645 | 14,75 |

Sumber : BKPM Provinsi DIY, 2017; dengan Hasil Olahan, 2017

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing.

Pertambahan tenaga kerja pada perusahaan PMA terkecil terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 39 orang dengan 11 jumlah perusahaan baru. Pada tahun tersebut, rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA adalah yang paling rendah selama rentang tahun 2012-2015, yaitu sebesar 3,55. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu sekitar 314 tenaga kerja mampu terserap di 7 perusahaan. Penyerapan tenaga kerja perusahaan PMA ini cenderung menurun.

Tabel 2.181
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Variabel | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|--|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Penanam Modal Asing (PMA) | | | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | Jiwa | 2.357 | 2.560 | 2.589 | 2.937 | 3.036 | 6,53 |
| 2 | Perusahaan | Unit | 26 | 28 | 31 | 34 | 41 | 12,06 |
| 3 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | 90,65 | 91,43 | 83,52 | 86,38 | 74,05 | -4,93 |
| Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) | | | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | Jiwa | 8.206 | 6.721 | 6.721 | 6.721 | 6.862 | -4,37 |
| 2 | Perusahaan | Unit | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 1,09 |
| 3 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | 182,36 | 149,36 | 146,11 | 143,00 | 146,00 | -5,41 |
| Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | | 148,77 | 127,14 | 120,91 | 119,23 | 112,48 | -6,75 |

Sumber : BKPM Provinsi DiY, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Rasio daya serap tenaga kerja di perusahaan PMDN pada rentang tahun 2012-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah tenaga kerja di perusahaan PMDN pada tahun 2012 yaitu sebanyak 8.206 orang, tetapi mengalami penurunan sejak tahun 2013-2016, hingga menjadi 6.862 orang di tahun 2016. Penurunan jumlah tenaga kerja di perusahaan PMDN ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang hanya mengalami sedikit peningkatan, sehingga rasio daya serap tenaga kerja di perusahaan PMDN ikut menurun. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di perusahaan PMA selama tahun 2012-2016 cenderung meningkat, sebanding dengan peningkatan jumlah perusahaan PMA pada kurun waktu yang sama. Meski demikian, rasio daya serap tenaga kerja di perusahaan PMA cenderung menurun. Selanjutnya, jika ditinjau dari keseluruhan PMA dan PMDN, maka total rasio daya serap tenaga kerja cenderung menurun.

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Secara umum, nilai realisasi PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai realisasi PMA tertinggi adalah pada tahun 2011-2012, yaitu sebesar 467.725 juta Rupiah. Sedangkan perubahan nilai realisasi PMA yang terkecil ada pada tahun 2012-2013. Secara umum, nilai realisasi PMA selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi perubahan/kenaikan nilai realisasi PMA selama kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung menurun pertumbuhannya.

Nilai realisasi pada PMDN secara umum mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. Kenaikan tertinggi pada PMDN terjadi pada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 1.026.354 juta Rupiah. Namun, di tahun 2016,

perubahan nilai realisasi PMDN tidak sebesar pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 83.624 juta Rupiah. Jika ditinjau dari keseluruhan kenaikan/penurunan pada PMA dan PMDN, maka total kenaikan realisasi PMA dan PMDN juga cenderung menurun pertumbuhannya.

Tabel 2.182
Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Variabel | Satuan | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
|---|--------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Penanam Modal Asing (PMA) | | | | | | | |
| 1 | Perubahan Nilai Realisasi PMA | Juta Rp | 467.725 | 8.734 | 236.691 | 170.851 | 92.389 |
| 2 | Pertumbuhan | % | 55,99 | 0,67 | 18,27 | 11,01 | 5,36 |
| Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) | | | | | | | |
| 1 | Perubahan Nilai Realisasi PMDN | Juta Rp | 19.709 | 507.786 | 36.530 | 1.026.354 | 83.624 |
| 2 | Pertumbuhan | % | 1,21 | 30,86 | 1,69 | 46,78 | 2,60 |
| Total Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA | | Juta Rp | 487.434 | 517.520 | 276.221 | 1.197.205 | 176.013 |

Sumber : BKPM Provinsi DIY, 2017; dengan Hasil Olahan, 2017

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Tabel 2.183
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah organisasi pemuda | organisasi | 157 | 162 | 162 | 64 | 94 | -12,04 |

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017, Hasil Olahan, 2017

Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah organisasi pemuda di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014. Pada

tahun 2012 hanya berjumlah 157 organisasi dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 162 organisasi pada tahun 2014 dan menurun menjadi 64 pada tahun 2015. Pada tahun 2015 pendataan organisasi pemuda yang dilakukan adalah dengan mendata organisasi pemuda yang aktif, sehingga antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2015 terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan cara pendataan yang sama didapatkan angka 94 organisasi pada tahun 2016.

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Berdasarkan informasi jumlah organisasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa organisasi olahraga yang dimaksud merupakan cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan kota. Jumlah organisasi olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menunjukkan peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun 2012 jumlah organisasi olahraga sejumlah 34 organisasi. Kemudian jumlah organisasi mengalami peningkatan menjadi 48 organisasi pada tahun 2015 dan 2016. Berikut merupakan data jumlah organisasi olahraga.

Tabel 2.184
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah organisasi olahraga | organisasi | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 | 0,09 |

Sumber :

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2014, namun terdapat penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2012, jumlah kegiatan pemuda sebanyak 26 kegiatan dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 64 kegiatan pada tahun 2015. Kemudian mengalami penurunan hingga berjumlah 24 kegiatan pada tahun 2016. Angka 26 tersebut menunjukkan jenis kegiatan kepemudaan. Berikut merupakan data perkembangan jumlah kepemudaan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.185
Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------|----------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah kegiatan kepemudaan | kegiatan | 26 | 37 | 43 | 64 | 26 | 0,00 |

Sumber :

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, dijelaskan bahwa data yang tersedia hanya tahun 2013, 2014, dan 2015. Dalam kurun waktu dua tahun terjadi peningkatan jumlah organisasi olahraga, dari 221 organisasi pada tahun 2013, meningkat menjadi 227 pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 162 kegiatan olahraga kemudian menjadi 227 pada tahun 2016. Beberapa kegiatan olahraga yang ada di Kota Yogyakarta antara lain, kejuaraan kota, senam kesbang, Popnas, Popda, Tri Lomba Juang, Porkar, dan Lomba Senam. Berikut adalah tabel jumlah kegiatan olahraga di kota Yogyakarta.

Tabel 2.186
Jumlah Kegiatan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015

| No | Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------|------------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah kegiatan olahraga | organisasi | 221 | 227 | 162 | 227 | 0,90 |

Sumber :

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

5. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Gelanggang remaja merupakan suatu bangunan yang digunakan para remaja untuk memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Bangunan tersebut bertujuan untuk menjadi pemusatan aktivitas remaja dalam menampung dan menyalurkan minat serta bakat para remaja dengan memanfaatkan fasilitas dalam bangunan tersebut baik untuk kegiatan rutin maupun insidental. Dengan tersedianya bangunan tersebut diharapkan dapat mendorong pembentukan pribadi remaja yang mandiri dan berprestasi, terutama di kegiatan olahraga dan seni budaya.

Kota Yogyakarta pada tahun 2014 dan tahun 2015 melakukan pendataan jumlah gelanggang remaja yang berlokasi di dalam wilayah kota.

Menurut data yang didapat dari Kantor Kesatuan Bangsa, terdapat penurunan jumlah unit gelanggang/balai remaja dari tahun 2014-2015. Penurunan jumlah tersebut kemungkinan disebabkan karena pengalihfungsian gelanggang/balai remaja menjadi gedung untuk keperluan lainnya dan juga dilakukan pemutakhiran data gelanggang/balai remaja di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan jumlah gelanggang remaja yang ada di Kota Yogyakarta.

Gelanggang Remaja di Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2016

| No | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|--|---------------------|------|------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah gelanggang/balai remaja di kota | unit | N/A | N/A | 16 | 5 | 5 |
| 2 | Jumlah penduduk | jiwa | N/A | N/A | 413.936 | 409.487 | 411.282 |
| 3 | Rasio jumlah gelanggang/balai remaja | unit/ 1.000 jiwa | N/A | N/A | 0,04 | 0,01 | 0,01 |

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017

6. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan salah satu sarana pendukung bagi kegiatan warga kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah lapangan olahraga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2016. Jumlah lapangan olahraga tahun 2012 sebanyak 553 unit dan meningkat menjadi 604 unit pada tahun 2014 hingga 2016. Peningkatan tersebut juga berpengaruh pada jumlah lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Pada tahun 2012, tersedia 1,32 unit lapangan olahraga per 1.000 penduduk dan mengalami peningkatan menjadi 1,47 unit per 1.000 penduduk pada tahun 2016. Jumlah lapangan olahraga yang dimaksud adalah beragam sesuai dengan jenis kegiatan olahraga, bentuk, dan jenis lapangan olahraga, sehingga bukan hanya lapangan olahraga yang berumput. Berikut data lapangan olahraga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.187
Lapangan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah lapangan olahraga | Unit | 563 | 560 | 604 | 604 | 604 | 1,77 |
| 2. | Jumlah penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| 3. | Lapangan olahraga per 1.000 penduduk | Unit | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 2,70 |

Sumber :

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

N. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukan kesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Bahkan hampir setiap bulan ada pertunjukan kesenian dan budaya baik diselenggarakan secara gratis maupun berbayar. Berikut ini merupakan data penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta.

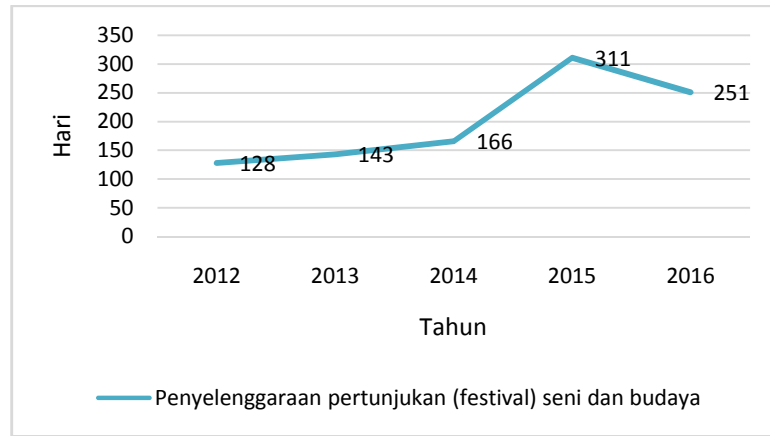
Tabel 2.188
Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya | hari | 128 | 143 | 166 | 311 | 251 | 18,34 |

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Kebudayaan, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Data menunjukkan bahwa jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, diselenggarakan pertunjukan seni selama 40 hari sehingga pertunjukan mencapai 311 hari di tahun tersebut. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin tingginya minat masyarakat terhadap pertunjukan seni dan budaya, karena di Kota Yogyakarta ini tidak jarang mengadakan pertunjukan seni budaya tanpa memungut biaya penonton, jika berbayarpun biayanya masih terjangkau, jadi masyarakat dapat mendapatkan hiburan yang menarik dan menghibur dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 2016 pertunjukan menurun sebab tahun tersebut merupakan tahun politik, pembatasan pertunjukan tersebut guna mengantisipasi acara yang berlangsung disisipi muatan politik kelompok tertentu. Selain itu durasi Pasar Malam Perayaan Sekaaten (PMPS) berkurang dari 40 hari menjadi 24 hari.



Gambar 2.101
Grafik Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta yang dimaksud adalah gedung kesenian. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Yogyakarta ada 2 unit, yaitu Plaza Ngasem dan XT Square. Kedua tempat ini dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta sering kali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik. Fasilitas ini merupakan wadah untuk para seniman Kota Yogyakarta dalam menunjukkan bakat seninya, sekaligus sebagai tempat publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Tabel 2.189
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1. | Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |

Sumber :

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016
- 2) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2017
- 3) Hasil Olahan, 2017

3. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa. Berdasarkan data di bawah ini, persentase

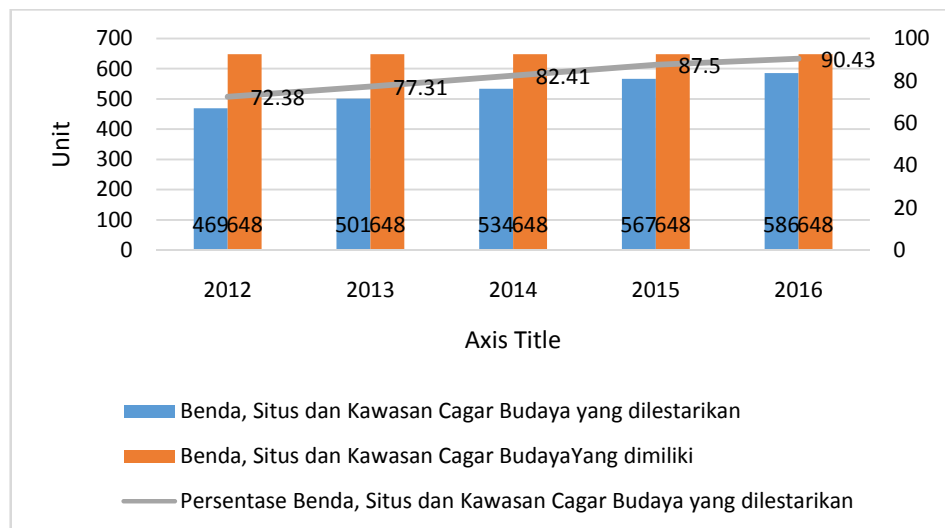
benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.190
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------------------|
| 1. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Unit | 469 | 501 | 534 | 567 | 586 | 5,73 |
| 2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dimiliki | Unit | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 0,00 |
| 3. | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 72,38 | 77,31 | 82,41 | 87,5 | 90,43 | 5,72 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2017, Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2012, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan hanya mencapai 72,38% dan terus mengalami kenaikan hingga menjadi 90,43% pada tahun 2016. Kenaikan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bukti bahwa memang Kota Yogyakarta memiliki keragaman benda budaya yang pantas dilestarikan.



Gambar 2.102

Grafik Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

O. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

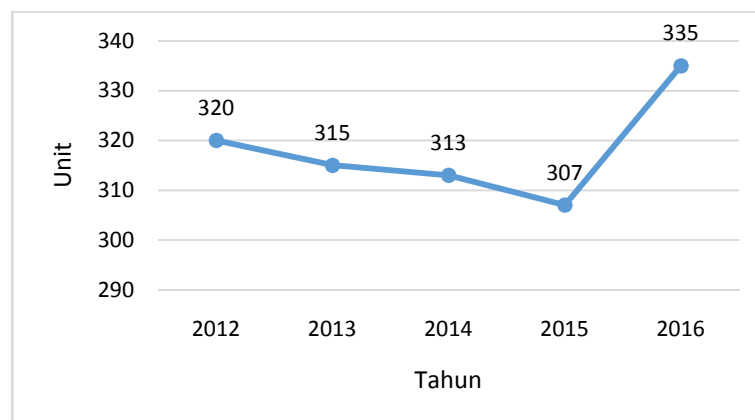
Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Jumlah perpustakaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan adanya regrouping dan beberapa sekolah swasta yang tutup. Kemudian pada tahun 2016 dimasukkan komponen baru yakni jumlah perpustakaan milik OPD yang berdampak cukup signifikan. Berikut ini merupakan tabel terperinci tentang jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2016.

Tabel2.191
Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri | Unit | 135 | 131 | 130 | 128 | 107 | -5,65 |
| Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda (Sekolah Swasta) | Unit | 184 | 183 | 182 | 178 | 105 | -13,09 |
| Total Jumlah Perpustakaan | Unit | | | | | 112 | |

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Jumlah perpustakaan yang bersifat minus meskipun hanya kecil tetapi memiliki dampak yaitu berkurangnya fasilitas pelayanan pendidikan. Karena dengan berkurangnya jumlah perpustakaan tentu memiliki imbas terhadap berkurangnya garda depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.



Gambar2.103
Grafik Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Selain menggambarkan jumlah perpustakaan perlu untuk menampilkan jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kota Yogyakarta karena keberadaan TBM yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dengan mudah.

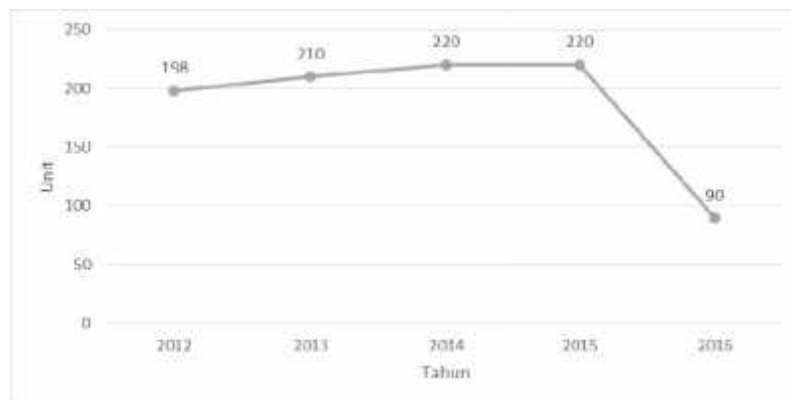
Tabel 2.192
Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* |
|---------------------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Jumlah Perpustakaan (TBM) | unit | 207 | 216 | 220 | 220 | 90 |

Sumber :

1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2016
2. Dinas Pendidikan 2017

Jumlah TBM dari tahun 2012 hingga 2014 terus mengalami peningkatan dan stagnan pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016 diperoleh informasi bahwa TBM sudah diampu oleh Dinas Pendidikan sehingga data yang tercantum di bawah merupakan data terbaru yang dimiliki oleh dinas pendidikan terkait jumlah TBM. Kecenderungan meningkatnya jumlah TBM ini memang suatu hal yang sangat baik, hal ini berarti minat membaca masyarakat dari tahun ke tahun dapat semakin lama semakin meningkat. Hal ini juga akan menambah wawasan dan informasi masyarakat. Berikut ini merupakan tabel dan grafik bertambahnya jumlah TBM di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan TBM memberikan bukti bahwa masyarakat memiliki motivasi yang besar untuk meningkatkan budaya membaca sesuai dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan tentunya budaya membaca harus dikembangkan secara terus menerus. Data pada tahun 2016 berbeda karena sudah melalui pemutakhiran data oleh Dinas Pendidikan. Sementara sumber data pada tahun 2012-2015 didapat dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Yogyakarta.



Gambar 2.104
Grafik Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Jika keaktifan pelayanan perpustakaan ditingkatkan dengan alokasi buku-buku yang dibutuhkan masyarakat, maka ke depan akan semakin meningkat daya tarik perpustakaan di mata masyarakat. Kesanggupan manajemen perpustakaan yang efisien dan efektif dengan menggunakan pelayanan on line dan SIM yang selalu ditingkatkan maka akan menambah gairah para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk mengakses pelayanan tersebut.

2. Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk

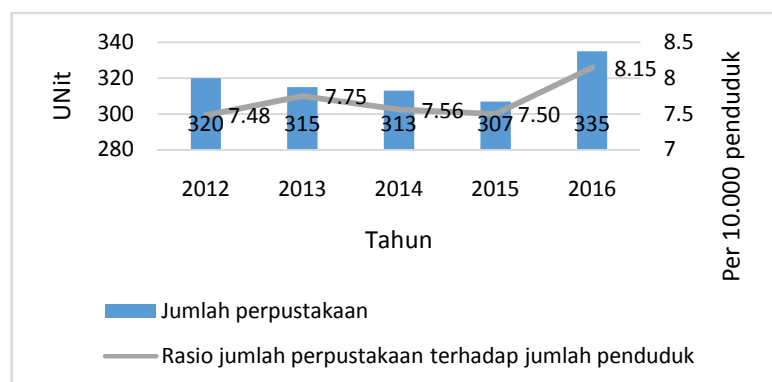
Penting untuk mengetahui sejauhmana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Meskipun jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan, rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,15 persen per tahun.

Tabel2.193
Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| Jumlah perpustakaan | unit | 320 | 315 | 313 | 307 | 335 | 1,15 |
| Jumlah Penduduk | jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk | | 7,48 | 7,75 | 7,56 | 7,50 | 8,15 | 2,15 |

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016

Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk lebih jelasnya digambarkan melalui grafik di bawah ini. Bahwa penurunan jumlah perpustakaan di tahun 2014 dan 2015 ternyata juga menurunkan rasio perpustakaan per 10.000 penduduk. Rasio perpustakaan meningkat pada tahun 2016 karena jumlah perpustakaan juga bertambah. Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar2.105
Grafik Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

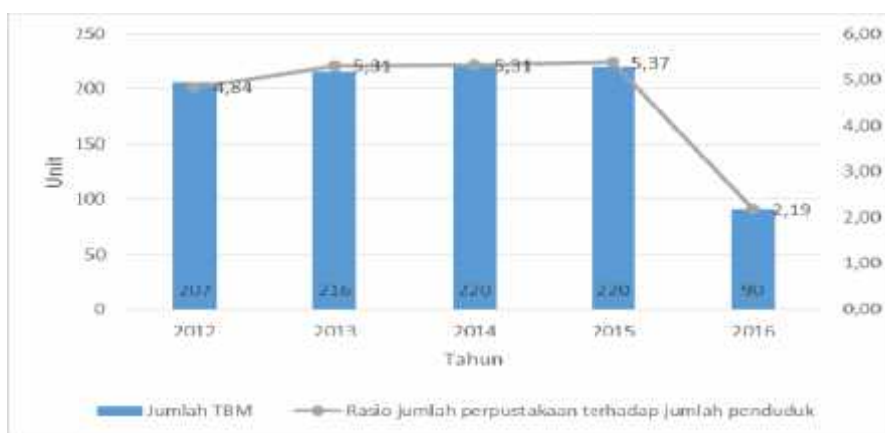
Sementara itu rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Kemudian menurun pada tahun 2016 sebab telah mengalami pemutakhiran data dari OPD baru yang menanganinya (Dinas Pendidikan). Berikut ini merupakan tabel rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk.

Tabel2.194
Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| Jumlah TBM | unit | 207 | 216 | 220 | 220 | 90 | -18,80 |
| Jumlah Penduduk | jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk | | 4,84 | 5,31 | 5,31 | 5,37 | 2,19 | -18,00 |

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017

Kenaikan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk ini merupakan sebuah pencapaian yang positif. Kenaikan ini berarti dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Grafik di bawah ini menggambarkan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk:



Gambar2.106

Grafik Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahun:

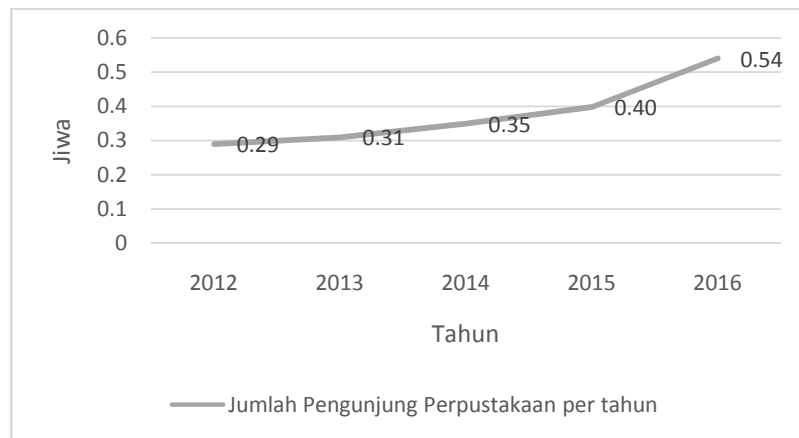
Tabel2.195
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan | Jiwa | 126.205 | 126.554 | 143.838 | 163.111 | 222.588 | 15,24 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun | | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,54 | 16,82 |

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, bahkan pada tahun 2016 lonjakan jumlah pengunjung dapat dikatakan paling menonjol dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar. Berikut ini merupakan grafik perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan berdasarkan

jumlah kunjungan dan perkembangan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016.



Gambar 2.107
Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Dilihat dari grafik tersebut pengunjung perpustakaan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian daya tarik perpustakaan dalam memberikan pelayanan juga meningkat. Namun kondisi ini perlu ditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik, dengan melengkapi informasi yang selalu up date dan fasilitas yang lebih baik.

4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

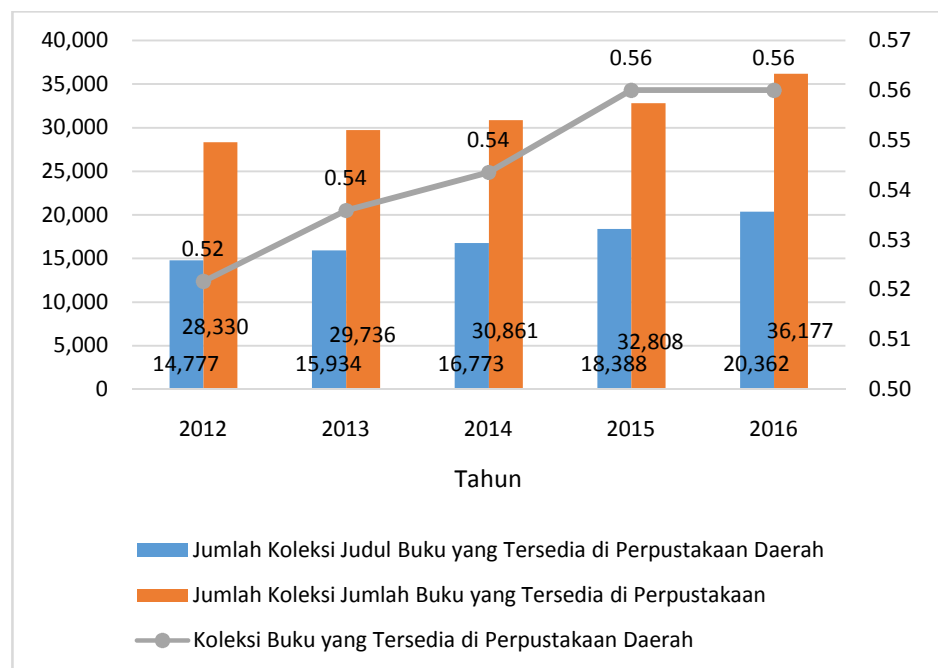
Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Di bawah ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2.196
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | Judul | 14.777 | 15.934 | 16.773 | 18.388 | 20.362 | 8,34 |
| Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan | Eksemplar | 28.330 | 29.736 | 30.861 | 32.808 | 36.177 | 6,30 |
| Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 1,79 |

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Kemudian pada kurun waktu lima tahun, antara 2012-2016, jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata jumlah koleksi judul buku mencapai 8,34 persen per tahun. Kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan yaitu mencapai kenaikan rata-rata sebesar 6,30 persen per tahun.



Gambar 2.108
Grafik Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Terdapat tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Peningkatan jumlah koleksi judul yang berangsur meningkat dari waktu-ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan. Sedangkan penambahan koleksi buku yaitu menambah jumlah eksemplarnya merupakan pencerminan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

P. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa secara rutin dua kali dalam setahun. Kegiatan pembinaan tersebut biasanya berupa sarasehan yang membicarakan tentang wawasan kebangsaan dan berbagai informasi terkait pengelolaan lembaga yang baik. Sarasehan tersebut juga seringkali melibatkan personil TNI dari Kodim, Karang Taruna, dan dosen sebagai pemantiknya.

Tabel2.197
Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Kali | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017

Sejak tahun 2012 hingga 2014, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP diYogyakarta berlangsung 2 kali, kemudian pada tahun 2015 meningkat drastis menjadi 8 kali dan menjadi 9 kali pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan perbaikan kantor kesatuan bangsa yang menaruh perhatian lebih besar untuk mengembangkan dan membina LSM, Ormas dan OKP yang ada di Kota Yogyakarta. Pembinaan sebaiknya mencakup substansi pengorganisasian, manajemen, perencanaan program dan model evaluasi. Pembinaan harus mampu menjawab kebutuhan pematangan organisasi dalam memfungsikan diri sebagai wahana kreatif bagi masyarakat. Mungkin bentuk forum komunikasi (Forkom) perlu ditambahkan agar antar organisasi yang tumbuh dalam masyarakat dapat terhubung satu dengan lainnya. Pemanfaatan organisasi yang kuat untuk memberikan saling asah, asih dan asuh kepada organisasi yang baru tumbuh akan sangat membantu pemerintah. Dengan memanfaatkan organisasi yang sudah berkembang untuk memberikan kontribusi kepada organisasi yang lebih lemah, akan menopang kekuatan pemerintah

mengingat keterbatasan sumberdaya. Namun visi dan misi tetap tercapai dengan menyambungkan antar organisasi ini.

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan partai politik daerah ini merupakan kegiatan pembinaan politik yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa. Di tahun tahun 2012 hingga 2013 kegiatan pembinaan politik daerah dilakukan selama 38 kali. Banyaknya pembinaan yang diselenggarakan ini berkaitan erat dengan jumlah parpol yang ada. Banyak atau sedikitnya parpol biasanya dipengaruhi oleh siklus pemilihan umum, jumlah parpol bisa bertambah maupun berkurang ketika akan mendekati pemilihan umum. Sementara di tahun 2014 kegiatan pembinaan politik hanya diselenggarakan delapan kali, kegiatan tersebut merupakan pemberian dana bantuan kepada delapan parpol. Tentunya pemberian dana bantuan tidak cukup sebagai teknik pembinaan yang mumpuni. Pada tahun 2015 bantuan politik kepada partai politik menurun menjadi 6 sebab 2 parpol Golkar dan PPP sedang memiliki kasus sengketa di pusat. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat tajam menjadi 51 kali karena menuju pilkada serentak. Mengingat keberadaan parpol seringkali menjadi sumber mobilisasi massa besar-besarnya, maka tentunya pembinaan hendaknya mencakup penumbuhan kepedulian parpol terhadap keharmonisan dan keselarasan lingkungan.

Tabel 2.198
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-----------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | kali | 38 | 38 | 8 | 6 | 51 |

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017

Antara kegiatan kepartaian dengan kegiatan pemerintah seringkali tidak berjalan secara linear. Hal ini dapat diatasi dengan mensesuaikan gerak langkah antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimanapun partai politik merupakan base home setiap anggota DPRD. Namun gerak langkah pembangunan pemerintah kurang didukung oleh partai politik. Komunikasi dengan partai politik tentunya akan dapat berjalan lancar jika komunikasi dengan DPRD berjalan lancar. Dengan demikian pembinaan partai politik bentuknya bukan sekedar memberikan dana bantuan, akan tetapi melakukan komunikasi yang intensif. Kesadaran partai politik hidup dalam wilayah Kota Yogyakarta yang harus ikut bertanggungjawab dalam menjaga ketertiban dan ketentraman warga dan sekitarnya perlu

ditekankan. Kegiatan politik dan geliat demokrasi yang sering muncul tidak menyimpang dari tatakrama dan sopan santun sebagai penduduk kota Yogyakarta. Pembinaan terhadap sikap santun berpolitik perlu dilakukan, sebab selama ini aktivitas politik terutama ketika apel akbar dan berkampanye sangat jauh dari tatakrama dan adat istiadat. Bahkan kesan arogansi yang berlebihan yang sering muncul. Ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap partai politik perlu menekankan budaya Yogyakarta. Ke depan yang perlu diefektifkan dalam pembinaan parpol adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran berpolitik dan beraktivitas politik yang damai dan menjaga ketertiban lingkungan.

Q. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date.

Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2012 hingga 2016 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi.

Tabel2.199
Publikasi Buku Statistik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Buku “Kota Dalam Angka” | eksemplar | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Buku “PDRB Kota” | eksemplar | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 2017

Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kota Yogyakarta telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan yang bersifat

periodik, dengan batasan anggaran yang jelas. Semestinya penyebutan jumlah eskemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.

R. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku, tetapi inisiatif untuk mengelola arsip secara baku sangat tergantung dari kesadaran setiap SKPD di Kota Yogyakarta. Pada dasarnya arsip yang ada di setiap SKPD memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap SKPD. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan oleh semua SKPD yang ada di Kota Yogyakarta dan terus berlangsung hingga tahun 2016.

Tabel2.200
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku | Unit | 150 | 150 | 156 | 156 | 154 |
| Jumlah SKPD | Unit | 150 | 150 | 156 | 156 | 154 |
| Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2012,2015,2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

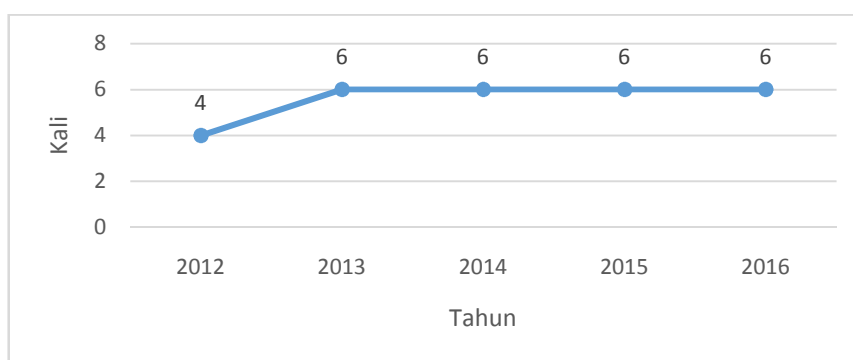
Terkait dengan pengelolaan arsip, pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki 21 pejabat fungsional arsiparis. Pejabat tersebut berada di Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah yang memiliki tugas keliling ke setiap OPD. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM dalam pengelola kearsipan.

Tabel2.201
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | kali | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2012,2015,2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan ini di tahun 2012 dilakukan 4 kali dalam setahun, dan diikuti oleh semua OPD. Empat kegiatan tersebut adalah kegiatan bimbingan teknis, pendampingan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan untuk penyusutan arsip-arsip dan kegiatan akuisisi. Kegiatan peningkatan pengelolaan SDM masih terus dilakukan hingga tahun 2013, 2014, 2015 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi enam kali. Kegiatan tersebut berupa bimbingan teknis petugas arsip, bimbingan teknis pengembangan profesi Arsiparis, FKA (Forum Komunikasi Arsiparis Kota Yogyakarta), FKPK (Forum Komunikasi Petugas Kearsipan), FMK (Forum Masyarakat Kearsipan) DIY dan Pendampingan ke OPD.



Gambar 2.109
Grafik Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Kendati telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan peningkatan SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di tingkat daerah, khususnya ke dalam OPD, akan tetapi masih perlu dioptimalkan terus menerus, seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1. Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Analisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2) lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Jika dilihat dari produksinya, padi merupakan jenis tanaman utama di Kota Yogyakarta sementara bahan pangan lokal lainnya masih memiliki

kontribusi yang sangat kecil. Sedangkan apabila dilihat dari perkembangan produksi tanaman padi selama tahun 2012-2016, diketahui bahwa produksinya cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -11,23% per tahun.

Tabel 2.202
Produksi Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Jenis Tanaman | Produksi (ton) | | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|---------------|----------------|-------|------|------|------|---------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | Padi | 1.121 | 1.101 | 954 | 764 | 696 | -11,23 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 2017

Penurunan produksi padi tersebut terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan umumnya disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam. Baik hasil panen maupun luasan panen menunjukkan pertumbuhan yang negatif setiap tahunnya. Meski demikian, penurunan hasil panen terjadi lebih cepat dibandingkan penurunan luas panen, sehingga hal tersebut menyebabkan produktivitas padi mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 2.203
Luas Panen Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Jenis Tanaman | Luas Panen (Ha) | | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|---------------|-----------------|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | Padi | 169 | 166 | 149 | 130 | 108 | -10,59 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017

Hasil panen padi di tahun 2016 adalah sebesar 696 ton. Jumlah tersebut merupakan penurunan yang cukup besar dari tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -11,23% per tahun. Luas panen padi juga menurun dalam kurun waktu 2012-2016 dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -10,59%. Meskipun hal ini wajar terjadi di perkotaan, akan tetapi penurunan ini tetap harus dikelola dan dikendalikan agar Kota Yogyakarta memiliki ketahanan dalam penyediaan pangan untuk penduduknya dan tidak terlalu bergantung pada wilayah lainnya.

2. Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah dapat dilihat berdasarkan kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB total. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB

cenderung menurun dari tahun 2012-2015 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,85% per tahun. Nilai PDRB sektor pertanian cenderung naik turun pada kurun waktu tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, nilai PDRB sektor pertanian sedikit meningkat dari tahun 2014, yaitu menjadi 36,05 miliar rupiah.

Sektor pertanian di Kota Yogyakarta merupakan sektor minoritas dan perkembangannya kalah cepat dengan sektor-sektor basis di daerah perkotaan. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan PDRB sektor pertanian bernilai positif yaitu sebesar 12,87% per tahun. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta semakin menurun. Pada tahun 2012, sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,18% dari total seluruh PDRB. Persentase tersebut terus menurun hingga sebesar 0,16% di tahun 2015. Meski kontribusi sektor pertanian cenderung menurun, pertumbuhan positif dari PDRB sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor ini masih mampu bertahan di tengah kompetisi perkembangan sektor lainnya.

Tabel 2.204
Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Nilai PDRB | Juta Rupiah | 19.189.074,90 | 20.239.557,70 | 21.312.143,80 | 22.412.175,70 | 5,31 |
| 2 | Nilai PDRB sektor Pertanian | Juta Rupiah | 35.066,90 | 36.100,00 | 35.733,80 | 36.052,70 | 0,93 |
| 3 | Kontribusi pertanian terhadap PDRB | % | 0,62 | 2,95 | -1,01 | 0,89 | 12,87 |

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016): dengan Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

3. Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dalam PDRB

Sektor pertanian/perkebunan memiliki beberapa sub sektor dengan kontribusi berbeda-beda. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan masih kalah besar bila dibandingkan dengan sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. Nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan pada tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif, seiring dengan nilai PDRB sektor pertanian yang juga menunjukkan fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan sebesar 0,04% per tahun juga lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nilai PDRB

sektor pertanian dengan besaran 0,32%. Meski pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan tergolong lambat, tetapi pertumbuhan tahunannya cenderung positif. Sebaliknya, kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB sektor pertanian cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,30% per tahun.

Tabel 2.205
Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB ADHK
Pertanian/Perkebunan

| No | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Nilai PDRB sektor pertanian/ perkebunan | Juta Rupiah | 19.189.074,90 | 20.239.557,70 | 21.312.143,80 | 22.412.175,70 | 5,31 |
| 2 | Nilai PDRB sub sektor Pertanian tanaman pangan | Juta Rupiah | 35.066,90 | 36.100,00 | 35.733,80 | 36.052,70 | 0,93 |
| 3 | Kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB sektor pertanian / perkebunan | % | 0,62 | 2,95 | -1,01 | 0,89 | 12,87 |

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016): dengan Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

4. Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) dalam PDRB

Sektor pertanian/perkebunan memiliki beberapa sub sektor dengan kontribusi berbeda-beda. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan masih kalah besar bila dibandingkan dengan sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. Nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan pada tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif, seiring dengan nilai PDRB sektor pertanian yang juga menunjukkan fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan sebesar 0,04% per tahun juga lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nilai PDRB sektor pertanian dengan besaran 0,32%. Meski pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan tergolong lambat, tetapi pertumbuhan tahunannya cenderung positif. Sebaliknya, kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB sektor pertanian cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,30% per tahun.

Tabel 2.206
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Nilai PDRB sektor pertanian/perkebunan | Juta Rupiah | 35.709,10 | 36.100,0 | 35.733,80 | 36.052,70 | 0,32 |
| 2 | Nilai PDRB sub sektor perkebunan | Juta Rupiah | 3.163,10 | 3.165,90 | 3.119,40 | 3.166,70 | 0,04 |
| 3 | Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap sektor pertanian/perkebunan | % | 0,75 | 0,09 | -1,47 | 1,52 | 26,53 |

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016) : dengan Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

5. Cakupan bina kelompok tani

Kelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Yogyakarta. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahannya dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Tabel 2.207
Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Variabel | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|---|----------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1 | Kelompok petani yang mendapat bantuan pemda | kelompok | 53 | 6 | 0 | 19 | 24 | -17,97 |
| 2 | Total Kelompok Petani/ Cakupan Bina Kelompok Tani | kelompok | 165 | 175 | 175 | 206 | 210 | 6,21 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 6,21% per tahun pada rentang waktu 2011-2015. Namun, apabila dilihat

dari segi kelompok petani yang mendapat bantuan dari pemda, jumlahnya cenderung fluktuatif, bahkan sempat mencapai angka 0 pada tahun 2014. Ketiadaan kelompok tani yang mendapat bantuan pada tahun 2014 dikarenakan adanya peralihan pemerintahan (periode pergantian presiden) sehingga pada saat itu terjadi banyak perubahan sistem pada instansi-instansi pemerintah sehingga beberapa pelaksanaan program ditunda, salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial. Meski demikian, jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemda kembali meningkat di tahun 2015 menjadi 19 kelompok dan di tahun 2016 terdapat 24 kelompok yang mendapat bantuan tersebut.

B. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertumbuhan Sektor penggalian dalam PDRB

Sama halnya dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian bukan merupakan sektor basis di Kota Yogyakarta. Dari tahun 2012-2015, nilai PDRB sektor penggalian di Kota Yogyakarta hanya berada pada kisaran 830-850 juta rupiah. Rendahnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Yogyakarta disebabkan oleh sumber bahan galian berupa pasir yang hanya berasal dari endapan aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

Apabila dilihat dari segi perkembangannya, nilai PDRB sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang positif meskipun lambat. Nilai sektor pertambangan ini terus meningkat setelah adanya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 0,56% per tahun. Pertumbuhan PDRB sektor penggalian dan pertambangan yang paling tinggi selama tahun 2012-2015 yaitu sebesar 1,31% di tahun 2014. Meski demikian, pada tahun 2012-2015, kontribusi sektor ini cenderung tetap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,00% per tahun.

Tabel 2.208
Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Nilai PDRB | Juta Rupiah | 19.189.074,8 | 20.239.557,7 | 21.312.143,8 | 22.412.175,7 | 5,31 |
| 2 | Nilai PDRB ADHK sektor pertambangan dan penggalian | Juta Rupiah | 837,1 | 839,0 | 850,0 | 851,2 | 0,56 |

| No | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|--------|------|------|-------|--------|---------------------------------|
| 3 | Kontribusi sektor penggalian dan perdagangan terhadap PDRB | % | 0,70 | 0,23 | 1,31 | 0,14 | -41,29 |

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016): dengan Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

C. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Tabel 2.209
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | Kunjungan Wisman | Kunjungan | 283.727 | 179.387 | 273.448 | 393.082 | 208.023 | -7,47 |
| 2 | Kunjungan Wisnu | Kunjungan | 2.611.453 | 2.536.093 | 2.733.805 | 2.857.599 | 3.053.725 | 3,99 |
| | Jumlah | Kunjungan | 2.891.703 | 2.895.180 | 2.715.480 | 3.007.253 | 3.250.681 | 3.261.748 |
| | Target Daerah | Kunjungan | 2.215.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.704.000 | 2.812.160 | 3.041.632 |
| | Tingkat Realisasi Kunjungan | % | 115,67 | 111,35 | 100,42 | 106,93 | 111,15 | 107,24 |

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2017 :dengan Hasil Olahan, 2017

Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kota Yogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Dilihat dari perkembangan realisasi kunjungan wisata, selama tahun 2012-2016, kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta berhasil melampaui target kunjungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, persentase tingkat realisasi kunjungan pada tahun 2012-2016 memiliki rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,94% per tahun.

Pada tahun 2012, kunjungan wisatawan mencapai 2.895.180 kunjungan dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 3.261.748 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara cenderung naik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan fluktuasi. Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta tentunya tidak terlepas dari promosi wisata dan branding yang telah banyak dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Selama ini, kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Dari tahun 2012-2015, nilai PDRB akomodasi dan makan minum terus menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 5,95% per tahun. Dari segi kontribusinya, sektor ini juga mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2012-2015. Pertumbuhan rata-ratanya mencapai 0,61% per tahun. Pada tahun 2012, kontribusinya sebesar 11,38% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 11,59%. Meski demikian, pertumbuhan tahunan dari PDRB sektor akomodasi dan makan minum cenderung menurun dari tahun 2012-2015.

Tabel 2.210
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Nilai PDRB | Juta Rupiah | 19.189.074,8 | 20.239.557,7 | 21.312.143,8 | 22.412.175,7 | 5,31 |
| 2 | Nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum | Juta Rupiah | 2.183.269,6 | 2.320.365,4 | 2.450.064,8 | 2.596.749,8 | 5,95 |
| 3 | Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB | % | 7,18 | 6,28 | 5,59 | 5,99 | -5,89 |

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016): dengan Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

D. Perdagangan

1. Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Yogyakarta. Sektor perdagangan dalam PDRB Kota Yogyakarta tahun 2015 terdiri dari dua sub sektor, yaitu perdagangan besar dan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Dilihat dari segi pertumbuhannya, nilai PDRB sektor perdagangan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 5,39% per tahun. Namun, pertumbuhan tahunan dari sektor perdagangan ini cenderung menurun. Sementara itu, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama kurun waktu 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan tren meningkat serta rata-rata pertumbuhan yang lambat yaitu sebesar 0,10% per tahun.

Tabel 2.211
Kontribusi Sektor Perdagangandalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Nilai PDRB | Juta Rupiah | 19.189.074,8 | 20.239.557,7 | 21.312.143,8 | 22.412.175,7 | 5,3 |
| 2 | Nilai PDRB sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran; raparasi mobil dan sepeda motor) | Juta Rupiah | 1.326.260,7 | 1.407.238,6 | 1.468.894,1 | 1.552.644,8 | 5,3 |
| 3 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | % | 6,3 | 6,1 | 4,3 | 5,7 | -3,3 |

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016); dengan Hasil Olahan.2017

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 6,91%. Kontribusi sektor perdagangan tertinggi yaitu pada tahun 2013, yaitu sebesar 6,95%, dan turun menjadi 6,93% di tahun 2015. Penurunan kontribusi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan belum mampu mengimbangi pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta secara keseluruhan dan rastic lebih lambat dari sektor-sektor potensial lainnya seperti sektor informasi dan komunikasi.

2. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2012-2016, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai -41,91%/tahun. Nilai ekspor di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebesar 119 juta US\$, tetapi turun drastis menjadi 17,2 juta US\$ di tahun 2013, dan terus menurun hingga sebesar 13,5 juta US\$ di tahun 2016. Meski menurun, nilai ekspor masih lebih besar dibandingkan nilai impor yang cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2012-2016. Hal ini menyebabkan ekspor bersih perdagangan juga cenderung fluktuatif, bahkan sempat mencapai -20 juta US\$ di tahun 2013 karena nilai impor di tahun tersebut 2 kali lipat lebih besar dari nilai ekspor.

Tabel 2.212
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | Nilai Ekspor | US \$ | 119.048.049 | 17.217.091 | 16.626.476 | 13.057.831,64 | 13.555.070 | -41,91 |
| 2 | Nilai Impor | US \$ | 13.061.918 | 37.269.427 | 228.241 | 6.832.100 | 8.198.257 | -10,99 |
| | Ekspor Bersih Perdagangan | US \$ | 114.321.543 | 105.986.131 | -20.052.336 | 16.398.235 | 6.225.731 | 5.356.813 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Untuk meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif, perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangan kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskan untuk membantu UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perak dan pemanfaatan limbah yang dijadikan produk kerajinan. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha semakin baik dan berdaya saing.

3. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki

keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Salah satu pelaku usaha informal di Kota Yogyakarta adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari tahun 2012-2016, jumlah eksisting PKL di Kota Yogyakarta terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 16,11% per tahun. Pada tahun 2012 tercatat jumlah PKL sebanyak 3.907 unit dan meningkat menjadi 7.100 unit di tahun 2016.

Tabel 2.213
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah Eksisting PKL | Unit | 3.907 | 6.406 | 6.776 | 7.070 | 7.100 | 16,11 |
| 2 | PKL Berizin | Unit | 1.858 | 2.242 | 2.371 | 5.495 | 5.495 | 31,14 |
| 3 | Persentase PKL Berizin | % | 47,56 | 35,00 | 34,99 | 77,72 | 77,39 | 12,94 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017

Seluruh PKL di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 belum sepenuhnya memiliki izin dari pemerintah daerah. Persentase PKL yang berizin menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2014-2016 dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 12,94% per tahun. Rata-rata pertumbuhan PKL berizin jauh lebih tinggi dari jumlah eksisting PKL, sehingga diharapkan kedepannya seluruh eksisting PKL di Kota Yogyakarta memiliki izin dari pemda. Untuk mewujudkan hal itu, perlu diadakan pendataan sekaligus pembinaan PKL agar seluruh PKL yang ada di Kota Yogyakarta mendapat legalitas dalam berjualan dan mengurangi resiko perselisihan dengan pemerintah.

E. Perindustrian

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang berkontribusi paling besar dalam PDRB Kota Yogyakarta. Nilai PDRB sektor industri pengolahan mengalami kenaikan dari tahun 2012-2015 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,42% per tahun. Pada tahun 2012, nilai PDRB sektor industri pengolahan sebesar 2,63 triliun rupiah dan meningkat menjadi 2,99 triliun rupiah di tahun 2015.

Nilai PDRB sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif tetapi pertumbuhan tahunannya cenderung fluktuatif. Sebaliknya, kontribusi sektor industri cenderung menurun dari tahun 2012-2015.

Pertumbuhan rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan adalah sebesar -0,83% per tahun. Kontribusi yang terus menurun tersebut diakibatkan pertumbuhan sektor lainnya yang lebih tinggi dibandingkan sektor industri dalam konteks PDRB Kota Yogyakarta. Berdasarkan data PDRB ADHK Kota Yogyakarta tahun 2012-2015, kontribusi terbesar dalam PDRB sektor industri disumbang dari sub sektor industri makanan dan minuman.

Tabel 2.214
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Uraian | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Nilai PDRB | Juta Rupiah | 19.189.074,80 | 20.239.557,70 | 21.312.143,80 | 22.412.175,70 | 5,31 |
| 2 | Nilai PDRB sektor industri | Juta Rupiah | 2.630.976,60 | 2.813.952,70 | 2.943.834,50 | 2.995.839,50 | 4,42 |
| 3 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | % | -2,87 | 6,95 | 4,62 | 1,77 | 2,62 |

Sumber . PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016): dengan Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

2. Pertumbuhan industri

Industri yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari industri rumah tangga, kecil, sedang dan besar. Dari tahun 2012-2015, jumlah unit industri terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 15% per tahun. Pada tahun 2012, jumlah unit industri di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 4.888 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 6.968 unit pada tahun 2016. Pertumbuhan unit industri paling besar adalah pada tahun 2013, dimana pertumbuhan unit industri adalah sebesar 16,94% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.215
Pertumbuhan Industri di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| Unit usaha industri | Unit | 4.888 | 5.716 | 5.929 | 6.222 | 6.968 | 9,27 |
| Pertumbuhan | % | 6,86 | 16,94 | 3,73 | 4,94 | 12 | 15,00 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan 2017

Berdasarkan data PDRB ADHK tahun 2011-2015, diketahui bahwa sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi serta sub sektor industri makanan dan minuman memiliki pertumbuhan paling pesat dibandingkan dengan sub sektor industri lain dalam rentang waktu 2011-2015. Adanya karakteristik masyarakat maupun morfologi wilayah yang mengarah pada daerah perkotaan mendorong tumbuhnya industri di Kota Yogyakarta.

3. Cakupan bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, diketahui bahwa keseluruhan pengrajin di Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016 tergabung dalam kelompok/paguyuban. Pada tahun 2012, terdapat 33 kelompok pengrajin dan pada tahun 2016 jumlah tersebut meningkat menjadi 50 kelompok. Semua kelompok ini mendapatkan bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk modal alat maupun pembinaan pada tahun 2012-2015, tetapi pada tahun 2016, hanya 8 kelompok saja yang mendapatkan bantuan dari pemda.

Jumlah kelompok pengrajin mengalami rata-rata pertumbuhan positif setiap tahunnya sebesar 10,95%. Peningkatan jumlah kelompok pengrajin tersebut terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang industri. Namun, jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari pemda justru menurun cukup banyak pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok pengrajin yang sudah ada, diharapkan dapat terus berkembang secara mandiri meskipun bantuan dari pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh kelompok pengrajin. Selain itu, pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutama bagi yang tergabung dalam kelompok tersebut.

Tabel 2.216
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|--|----------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1 | Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda | kelompok | 33 | 39 | 40 | 42 | 8 | -29,83 |
| 2 | Total Kelompok Pengrajin | kelompok | 33 | 39 | 40 | 42 | 50 | 10,95 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017

F. Perikanan

1. Produksi Perikanan Darat

Berdasarkan kondisi geografis Kota Yogyakarta, jenis kegiatan perikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yang dibudidayakan dalam keramba. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam antara lain nila, lele, dan bawal. Apabila dilihat dari perkembangannya selama tahun 2012-2016, diketahui bahwa tingkat realisasi produksi yang ada menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, tingkat realisasi hanya sebesar 82,67% sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 55,59%. Rata-rata pertumbuhannya bernilai negatif sebesar -9,45% per tahun. Secara umum, produksi ikan tertinggi ada di tahun 2013, yaitu sebesar 132.351 kg. Pada tahun itu pula, target daerah mencapai angka tertinggi, yaitu mencapai 90.000 kg. Target produksi ikan yang ditetapkan mungkin terlalu tinggi sehingga produksi ikan sulit untuk mencapainya.

Tabel 2.217
Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|--------------------------|---------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| 1 | Produksi Ikan | Kg | 72.662 | 132.351 | 63.000 | 46.183 | 36.132 | -16,03 |
| 2 | Target Daerah | Kg | 88.000 | 90.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | -7,29 |
| Tingkat Realisasi | | % | 19,20 | 82,67 | 147,06 | 96,92 | 71,05 | 55,59 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah perairan laut sehingga ikan yang ada di Kota Yogyakarta merupakan hasil budidaya penduduk kota dan juga hasil nelayan dari daerah lain.

Konsumsi ikan di Kota Yogyakarta berada pada kisaran angka 32 ton setiap tahunnya. Tingkat realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -1,21% per tahun. Secara umum, realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 telah melebihi target yang

dikehendaki. Namun, jumlah konsumsi ikan cenderung fluktuatif, sementara itu target konsumsi ikan terus meningkat. Pada tahun 2012, tingkat realisasi konsumsi ikan adalah sebesar 107,07% dan pada tahun 2016 turun menjadi 102,00 %.

Tabel 2.218
Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|--------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah Konsumsi Ikan | Ton | 32,12 | 32,14 | 32,15 | 32,15 | 32,13 | 0,01 |
| 2 | Target Daerah | Ton | 30,00 | 30,50 | 30,50 | 31,50 | 31,50 | 1,23 |
| Tingkat Realisasi | | % | 101,69 | 107,07 | 105,38 | 105,41 | 102,06 | 102,00 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017.

3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Perikanan Budidaya

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Namun, karena di Kota Yogyakarta tidak ada nelayan, maka indikator tersebut disesuaikan menjadi bina kelompok pengusaha perikanan budidaya. Pembinaan terhadap kelompok budidaya perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya perikanan sampai pemasaran.

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, jumlah kelompok pengusaha budidaya perikanan di Kota Yogyakarta memiliki pertumbuhan negatif sebesar -10,18% per tahun. Pada tahun 2012, jumlah kelompok budidaya perikanan adalah sebesar 63 kelompok dan pada tahun 2016 turun menjadi 41 kelompok. Pada tahun 2012, dari total kelompok pengusaha perikanan budidaya sebanyak 63 kelompok, hanya 5 kelompok yang mendapatkan bantuan/binaan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2016, tidak ada kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapatkan bantuan dari pemda. Sejak tahun 2014-2015, jumlah kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapatkan bantuan dari pemda memang menurun.

Tabel 2.219
Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Variabel | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|--|----------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1 | Kelompok Pengusaha Budidaya Ikan yang mendapat bantuan pemda | Kelompok | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | -100,00 |
| 2 | Total kelompok pengusaha budidaya | Kelompok | 63 | 51 | 38 | 58 | 41 | -10,18 |

| No | Variabel | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|-----------|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| | perikanan | | | | | | | |

Sumber :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017

G. Ketransmigrasian

1. Jumlah Transmigran Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2012-2016, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dari Kota Yogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasi swakarsa berbantu maupun swakarsa mandiri. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunya akibat kekhawatiran masyarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa. Sementara itu, jumlah KK dan individu yang mengikuti transmigrasi umum pada tahun 2012-2016 cenderung turun naik. Pada tahun 2012, jumlah KK yang mengikuti transmigrasi umum yaitu sebesar 19 KK (64 individu) dan sempat turun menjadi hanya 5 KK saja pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2014-2015, jumlah KK dan individu yang ikut transmigrasi umum kembali meningkat.

Tabel 2.220
Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|----------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1 | Transmigrasi Swakarsa | | | | | | |
| | Kepala Keluarga | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Individu | Jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Transmigrasi Umum | | | | | | |
| | Kepala Keluarga | KK | 19 | 15 | 5 | 12 | 13 |
| | Individu | Jiwa | 64 | 46 | 15 | 39 | 43 |
| 3 | Jumlah Total Transmigrasi | | | | | | |
| | Kepala Keluarga | KK | 19 | 15 | 5 | 12 | 13 |
| | Individu | Jiwa | 64 | 46 | 15 | 39 | 43 |

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengeluaran Konsumsi per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Selama rentang waktu tahun 2012-2015, pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan tertinggi ada pada kelompok pengeluaran non makanan yaitu sebesar 9,82% per tahun. Sebaliknya, pengeluaran untuk makanan cenderung turun naik selama 5 tahun terakhir. Nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanan tidak lebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok non makanan ini mencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Tabel 2.221
Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Pengeluaran makanan | Juta Rupiah | 3.029.122 | 3.113.589 | 3.200.650 | 2.324.031 | -8,45 |
| Pengeluaran non makanan | Juta Rupiah | 7.186.957 | 7.606.609 | 8.095.979 | 9.518.585 | 9,82 |
| Jumlah pengeluaran | Juta Rupiah | 10.216.079 | 10.720.198 | 11.296.629 | 11.842.616 | 5,05 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 394.012 | 402.679 | 400.467 | 409.487 | 1,29 |
| Pengeluaran per kapita per tahun | Rupiah | 25,93 | 26,62 | 28,21 | 28,92 | 3,70 |
| Pengeluaran per kapita per bulan | Rupiah | 2,16 | 2,22 | 2,35 | 2,41 | 3,72 |

Sumber: PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016): dengan Hasil Olahan, 2017.

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

Selama rentang tahun 2012-2015, diketahui bahwa pola konsumsi rumah tangga per kapita untuk non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanan. Lebih tingginya konsumsi non pangan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh tipologi masyarakat yang merupakan penduduk perkotaan dimana kebutuhan penduduk relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Ditinjau dari pertumbuhannya, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga seluruhnya mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,54% per tahun.

Tabel 2.222
Pengeluaran Konsumsi Non pangan Perkapita Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Pengeluaran non makanan | Juta Rupiah | 7.186.957 | 7.606.609 | 8.095.979 | 9.518.585 | 9,82 |
| Jumlah pengeluaran | Juta Rupiah | 10.216.079 | 10.720.198 | 11.296.629 | 11.842.616 | 5,05 |
| Persentase Pengeluaran Non Pangan | % | 70,35 | 70,96 | 71,67 | 80,38 | 4,54 |

Sumber: PDRB Menurut Penggunaan ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016); dengan Hasil Olahan, 2017

Keterangan: () Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara*

3. Produktivitas Total Kota

Penghitungan produktivitas total daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam 3 sektor besar yaitu agriculture, manufacture, dan services. Sektor agriculture terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor manufacture terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan

sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor service terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta adalah manufacture, meskipun jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di sektor services. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor services merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor manufacture. Meskipun demikian, produktivitas sektor service ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,75%/tahun.

Tabel 2.223
Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Nilai PDRB ADHK | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Lapangan Usaha | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
| <i>Agriculture</i> | juta rupiah | 35.709,1 | 36.100,1 | 35.733,8 | 36.052,7 | 0,32 |
| <i>Manufacture</i> | juta rupiah | 4.233.608,80 | 4.493.200,10 | 4.699.987,50 | 4.818.686,30 | 4,41 |
| <i>Service</i> | juta rupiah | 14.919.757,00 | 15.710.257,50 | 16.576.422,20 | 17.557.436,60 | 5,58 |
| Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja | | | | | | |
| Lapangan Usaha | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
| <i>Agriculture</i> | jiwa | 756 | 471 | 1.314 | 3.200 | 61,76 |
| <i>Manufacture</i> | jiwa | 30.897 | 31.753 | 40.642 | 32.805 | 2,02 |
| <i>Service</i> | jiwa | 169.987 | 162.512 | 174.212 | 174.044 | 0,79 |
| Total Produktivitas | | | | | | |
| Lapangan Usaha | Satuan | 2012 | 2013 | 2014* | 2015** | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
| <i>Agriculture</i> | juta rupiah/ jiwa | 47,23 | 76,65 | 27,19 | 11,27 | -37,97 |
| <i>Manufacture</i> | juta rupiah/ jiwa | 137,02 | 141,50 | 115,64 | 146,89 | 2,35 |
| <i>Service</i> | juta rupiah/ jiwa | 87,77 | 96,67 | 95,15 | 100,88 | 4,75 |

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Kota Yogyakarta dalam Angka 2016 dengan Hasil Olahan, 2017.
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur terdiri atas lima urusan, yakni urusan perhubungan; penataan ruang; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; lingkungan hidup; serta komunikasi dan informatika. Sama halnya dengan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur pada aspek pelayanan wajib, terdapat beberapa indikator yang memiliki kesamaan juga adanya beberapa indikator dalam urusan yang tidak relevan apabila diterapkan di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan indikator yang berkaitan lebih cocok apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten, bukan wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta, sehingga indikator tersebut ditiadakan.

A. Perhubungan

Aspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakni indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yang sama di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak memiliki terminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni Terminal Giwangan.

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah dengan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.224
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Panjang Jalan | Km | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 248,09 | 0,00 |
| 2. | Jumlah Kendaraan | Unit | 257.233 | 300.444 | 441.708 | 430.177 | 626.274 | 24,91 |
| 3. | Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan | km/unit | 0,00096 | 0,00083 | 0,00056 | 0,00057 | 0,00040 | -19,85 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Panjang jalan yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah panjang jalan bernomor ruas jalan yang dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki panjang yang sama, yakni sepanjang 248,09 Km. Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta terbilang cukup tinggi setiap tahunnya yang dibuktikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 24,91% per tahun, yakni 257.233 unit kendaraan pada tahun 2012 meningkat menjadi 626.274 unit kendaraan. Meskipun demikian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebenarnya terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor sebesar 2,6% atau sejumlah 11.531 unit kendaraan.



Gambar 2.110
Grafik Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
 Sumber : Hasil Olahan, 2017

Jumlah panjang jalan yang cenderung tetap dan jumlah kendaraan yang terus meningkat menyebabkan nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2014 memiliki kecenderungan menurun namun kembali meningkat hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan jumlah kendaran yang bertambah setiap tahunnya cukup besar dan tidak sebanding dengan penambahan panjang jalan yang ada. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

2. Rasio Jumlah Angkutan Umum yang Melewati Kota Yogyakarta Per 1000 Penduduk

Rasio jumlah angkutan darat per penumpang angkutan darat adalah angka yang memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan

darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio jumlah angkutan darat adalah jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat pada tahun tersebut.

Tabel 2.225
Rasio Jumlah Angkutan Darat per Penumpang Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah angkutan darat | Unit | 11.737 | 12.011 | 11.663 | 12.803 | 12.106 | 0,78 |
| 2. | Jumlah penumpang angkutan darat | Jiwa | 2.324.913 | 2.488.859 | 2.364.416 | 2.121.076 | 1.970.096 | -4,06 |
| 3. | Rasio jumlah angkutan darat dengan penumpang angkutan darat | Unit/Jiwa | 0,005 | 0,0048 | 0,0049 | 0,006 | 0,006 | 6,21 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Mulai tahun 2012 hingga tahun 2016, jumlah penumpang angkutan darat cenderung mengalami penurunan, meskipun demikian jumlah unit angkutan darat di Kota Yogyakarta tidak serta merta mengalami penurunan yang sama, namun cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 jumlah kendaraan cenderung meningkat dari yang semula di tahun 2012 hanya berjumlah 11.737 unit menjadi 12.106 unit di tahun 2016. Kenaikan jumlah ini memperbesar rasio jumlah angkutan darat dengan penumpang angkutan yang semula di tahun 2012 menunjukkan rasio 0,005 menjadi 0,006 di tahun 2016.

3. Jumlah Penumpang dan Barang yang Melalui Terminal dan Stasiun

Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki terminal dengan tipe terminal barang (cargo). Jumlah penumpang bis melalui terminal di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar -4,06% per tahun, yakni 2.324.913 orang pada tahun 2012 menurun menjadi 1.970.096 orang pada tahun 2016.

Tabel 2.226
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah orang yang melalui terminal per tahun | Jiwa | 2.324.913 | 2.488.859 | 2.364.416 | 2.121.076 | 1.970.096 | -4,06 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan (Data Tahun 2015-2016)

Data mengenai indikator jumlah arus penumpang angkutan umum diperoleh dari jasa ruang tunggu terminal (Terminal Giwangan), bukan dari penjualan karcis sehingga tidak diketahui apakah penumpang tersebut menggunakan jasa bis antar kota atau dalam kota, sehingga diduga masih banyak penumpang angkutan umum (bus khususnya) yang tidak terhitung. Dengan kata lain, jumlah arus penumpang angkutan umum masih lebih tinggi lagi apabila dibandingkan dengan data yang terdata oleh Dinas Perhubungan tersebut, karena penumpang bis yang tidak turun ke ruang tunggu (tetap berada di dalam bis) tidak dihitung.



Gambar 2.111
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun 2012 hingga tahun 2015 memiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan meningkat, yakni 2.648.727 penumpang pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.543.139 penumpang pada tahun 2015. Jumlah penumpang kelas ekonomi memiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan meningkat paling signifikan pada tahun yang sama (tahun

2012 hingga tahun 2015) yakni dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,54% per tahun. Sementara itu penumpang kelas eksekutif dan kelas bisnis juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 12,05% per tahun dan 2,20% per tahun. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah penumpang kereta dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10,18% per tahun.

Tabel 2.227
Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kelasnya Tahun 2012-2015

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah penumpang kelas eksekutif | Orang | 697.261 | 775.144 | 801.674 | 980.982 | 12,05 |
| 2. | Jumlah penumpang kelas bisnis | Orang | 612.806 | 590.776 | 590.661 | 654.134 | 2,20 |
| 3. | Jumlah penumpang kelas ekonomi | Orang | 1.338.660 | 1.263.593 | 1.347.769 | 1.908.023 | 12,54 |
| 4. | Total penumpang melalui stasiun | Orang | 2.648.727 | 2.629.513 | 2.740.104 | 3.543.139 | 10,18 |

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik

Selain penumpang, kedua stasiun di wilayah Kota Yogyakarta juga mengangkut bahan bakar minyak dan barang hantaran potongan. Jumlah bahan bakar minyak yang melalui stasiun di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2012 hingga tahun 2015, yakni sebanyak 166.154 ton pada tahun 2012 meningkat menjadi 190.640 ton pada tahun 2015. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah barang hantaran potongan yang melalui stasiun, yakni sebanyak 11.170 ton pada tahun 2012 menurun menjadi 8.910 ton pada tahun 2015 (pertumbuhan rata-rata -7,26% per tahun).

Tabel 2.228
Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2015

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Bahan bakar minyak | Ton | 166.154 | 214.456 | 195.929 | 190.640 | 4,69 |
| 2. | Barang hantaran potongan | Ton | 11.170 | 12.465 | 13.040 | 8.910 | -7,26 |
| 3. | Total angkutan barang | Ton | 177.324 | 226.921 | 208.969 | 199.550 | 4,01 |

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| | melalui terminal | | | | | | |

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik

B. Penataan Ruang

Dalam urusan penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 ini terdapat enam indikator, yakni ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Seperti halnya dengan urusan yang lain, terdapat indikator yang tidak relevan apabila diterapkan di Kota Yogyakarta, seperti indikator luas wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan seluruh wilayah Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan, sehingga indikator wilayah perkotaan pada urusan penataan ruang ini ditiadakan. Indikator tersebut lebih relevan apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten. Selain itu juga terdapat beberapa indikator yang menggunakan data isian yang lain, yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

1. Persentase Luas Wilayah Produktif

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah produktif adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sebagai wilayah perkotaan, wilayah produktif di Kota Yogyakarta didekati dengan penjumlahan luasan jenis penggunaan lahan perumahan, jasa, perusahaan, industri, dan pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.229
Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2015

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--------------------------------------|--------|----------|----------|---------|----------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah luas wilayah produktif | Ha | 2.842,89 | 2.843,40 | 2.827,5 | 2.112,50 | -9,42 |
| 2. | Jumlah luas seluruh wilayah budidaya | Ha | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | - |
| 3. | Persentase luas wilayah produktif | % | 87,47 | 87,49 | 87 | 65,00 | -9,42 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2013-2016, dengan Hasil Olahan

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembandingan dalam indikator luas wilayah produktif merupakan data yang bersumber dari lampiran data RPJMD Kota Yogyakarta. Jumlah luas wilayah produktif di Kota Yogyakarta berbanding lurus dengan persentase luas wilayah produktif yang dihasilkan, yakni memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -9,42% per tahun. Secara karakteristik wilayah, indikator yang lebih tepat digunakan untuk wilayah Kota Yogyakarta adalah dengan menggunakan indikator persentase penggunaan lahan hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penggunaan lahan.

Tabel 2.230
Persentase Penggunaan Lahan Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2015

| Peruntukan | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|---------------|--------|-------|-------|-------|------|-----------------------------------|
| Perumahan | % | 64,77 | 64,64 | 64,68 | 0 | -100 |
| Jasa | % | 8,60 | 8,63 | 8,65 | 24 | 40,79 |
| Perusahaan | % | 9,05 | 9,25 | 9,33 | 27 | 43,96 |
| Industri | % | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 5 | 45,90 |
| Pertanian | % | 3,44 | 3,36 | 3,25 | 9 | 37,79 |
| Non Produktif | % | 0,58 | 0,57 | 0,54 | 1 | 19,91 |
| Lain-lain | % | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 34 | 41,74 |
| Jumlah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2013-2016, dengan Hasil Olahan

Tabel di atas mengindikasikan bahwa peruntukan perumahan memiliki luasan yang menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015, meskipun demikian di tahun 2014 luas peruntukkan permukiman justru mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan menjadi 64,68%. Sehingga dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pertumbuhan rata-rata untuk luasan peruntukkan perumahan sebesar -100% per tahun. Peruntukan lahan selain perumahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2015.

2. Persentase Luas Wilayah Industri

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah industri adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sama halnya dengan indikator luas wilayah produktif, perhitungan jumlah luas wilayah

industri juga menggunakan sumber data dari publikasi Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.231
Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah luas wilayah industri | Ha | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 |
| 2. | Jumlah luas seluruh wilayah budidaya | Ha | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 3. | Persentase luas wilayah industri | % | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2013-2016, dengan Hasil Olahan

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembanding dalam indikator luas wilayah industri juga bersumber dari lampiran data RPJMD Kota Yogyakarta. Baik jumlah luas wilayah industri maupun persentase luas wilayah industri menunjukkan nilai yang sama dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, dengan nilai persentase luas wilayah industri sebesar 1,61%.

Luas wilayah industri di Kota Yogyakarta relatif kecil karena sektor industri memang bukanlah sektor utama dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Wilayah industri di Kota Yogyakarta lebih banyak berupa sentra-sentra industri skala rumah tangga dan bukan industri skala besar dengan pabrik yang modern. Menurut informasi yang diperoleh, seharusnya tidak ada lagi wilayah industri di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan wilayah industri telah dipindahkan ke daerah pinggiran kota, misalnya ke wilayah Piyungan.

3. Persentase Luas Wilayah Genangan

Indikator luas wilayah kebanjiran sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010 adalah dengan membandingkan antara jumlah wilayah kebanjiran dengan jumlah luas wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Tidak didapatkan data mengenai data luas wilayah kebanjiran, sehingga data mengenai luas wilayah kebanjiran diganti dengan data luasan daerah rawan genangan.

Tabel 2.232
Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Yogyakarta
Tahun 2013-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---------------------|--------|-------|------|------|------|-----------------------------------|
| 1. | Luasan daerah rawan | Ha | 10,08 | 7,62 | 7,76 | 7,54 | -9,22 |

| No. | Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| | genangan | | | | | | |
| 2. | Jumlah luas seluruh wilayah budidaya | Ha | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0,00 |
| 3. | Persentase luas wilayah genangan | % | 0,31 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -9,22 |

Sumber : Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017

Luas daerah rawan genangan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2013-2016 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan berkurang. Pada tahun 2012 luasan daerah rawan genangan mencapai 10,08 hektar, menurun hingga 7,54 hektar pada tahun 2016 dengan angka pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -9,22%.

Tabel 2.233
Jumlah Titik Genangan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-----------------|--------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah genangan | Titik | 50 | 35 | 31 | 28 |

Sumber : Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Jumlah titik genangan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan kecenderungan menurun, yakni 50 titik pada tahun 2013 menurun menjadi 28 titik pada tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada usaha yang cepat dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperbaiki sistem pembuangan air hujan agar genangan-genangan yang terjadi setelah hujan dapat diminimalisir.

C. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pertumbuhan rata-rata jumlah bank umum dan BPR secara umum pada tahun 2012-2015 adalah sebesar 1,85% per tahun. Bank umum mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan BPR. Pertumbuhan BPR yang lebih tinggi ini salah satunya disebabkan oleh

bunga pinjaman dari BPR lebih kecil dibandingkan bank umum sehingga banyak masyarakat yang menggunakan BPR dibandingkan bank umum untuk memperoleh pinjaman.

Tabel 2.234
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2012-2015

| Variabel | Satuan | Per Desember 2012 | Per Desember 2013 | Per Desember 2014 | Per November 2015 | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| KC Bank Umum | unit | 42 | 44 | 45 | 46 | 4,21 |
| KCP Bank Umum | unit | 87 | 88 | 87 | 87 | -14,13 |
| KK Bank Umum | unit | 40 | 41 | 43 | 43 | 3,83 |
| KP BPR | unit | 9 | 9 | 9 | 10 | 2,67 |
| KC BPR | unit | 4 | 6 | 7 | 7 | 62,66 |
| KK BPR | unit | 12 | 12 | 12 | 12 | 4,66 |
| Jumlah | unit | 194 | 200 | 203 | 205 | -5,5 |

Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2011-2015 dan November 2015 (Bank Indonesia:2011-2015); dengan Hasil Olahan, 2017

2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Berdasarkan fungsinya, terdapat empat kategori perusahaan asuransi di Kota Yogyakarta yang meliputi asuransi jiwa, kredit, kerugian dan lainnya. Data jumlah perusahaan asuransi pada tabel 4.2.3.B.1 merupakan jumlah perusahaan yang mendapatkan izin berdiri pada tahun 2011-2014 dan bukan merupakan data akumulasi jumlah perusahaan asuransi di Kota Yogyakarta. Pada rentang tahun tersebut, jumlah perusahaan asuransi terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 22,3%/tahun dengan jumlah asuransi paling banyak yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung kerugian finansial akibat meninggalnya seseorang atau terlalu lamanya hidup seseorang.

Tabel 2.235
Jumlah Perusahaan Asuransi di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

| Jenis Perusahaan | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Asuransi Jiwa | unit | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11,68 |
| Asuransi Kredit | unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

| Jenis Perusahaan | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Asuransi Kerugian | unit | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 27,79 |
| Asuransi Lainnya | unit | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 45,65 |
| Jumlah | unit | 14 | 22 | 26 | 28 | 32 | 22,96 |

Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2017.

3. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Dari tahun 2012-2016, jumlah restoran dan jasa boga di Kota Yogyakarta cenderung meningkat. Sementara itu, jumlah kafe menurun pada tahun 2016. Secara keseluruhan, jumlah restoran, kafe, dan jasa boga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,87% per tahun. Perkembangan kafe adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan perkembangan restoran dan jasa boga.

Tabel 2.236
Jumlah Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Jenis Restoran | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Restoran | unit | 271 | 280 | 313 | 328 | 350 | 6,60 |
| Kafe | unit | 2 | 20 | 16 | 20 | 11 | 53,14 |
| Jasa Boga | unit | 86 | 92 | 103 | 118 | 125 | 9,80 |
| Jumlah | unit | 359 | 392 | 432 | 466 | 486 | 7,87 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2017

4. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang terkenal dengan wisata budayanya banyak menarik wisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hotel atau penginapan di kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Yogyakarta.

Terdapat dua jenis hotel di Kota Yogyakarta, yaitu hotel berbintang dan hotel non bintang/melati. Selama kurun waktu 2012-2016, jumlah hotel kelas melati jauh lebih banyak dibandingkan hotel berbintang. Pada

tahun 2016, jumlah hotel kelas melati di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 358 unit, sedikit menurun dari tahun 2015. Sementara itu, jumlah hotel bintang di tahun 2015 yaitu sebanyak 62 unit. Jumlah hotel berbintang terus meningkat sejak tahun 2012-2016 dengan pertumbuhan rata-rata 18,92% per tahun. Rata-rata pertumbuhan hotel bintang lebih besar dibandingkan pertumbuhan rata-rata hotel melati yang hanya sebesar 3,33% per tahun.

Tabel 2.237
Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 1 | Hotel Bintang | Unit | 31 | 38 | 38 | 41 | 62 | 18,92 |
| | Hotel Bintang 5 | Unit | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7,46 |
| | Hotel Bintang 4 | Unit | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 22,47 |
| | Hotel Bintang 3 | Unit | 9 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22,09 |
| | Hotel Bintang 2 | Unit | 3 | 11 | 11 | 11 | 20 | 60,69 |
| | Hotel Bintang 1 | Unit | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | -6,94 |
| 2 | Hotel Non Bintang/ Melati | Unit | 314 | 330 | 353 | 367 | 358 | 3,33 |
| | Jumlah | Unit | 320 | 345 | 368 | 391 | 408 | 420 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2015; Direktori Hotel & Akomodasi Lain di DIY, 2016 dengan Hasil Olahan, 2017

D. Komunikasi dan Informatika

Urusan terakhir pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam aspek daya saing daerah ini memiliki tiga indikator, yakni indikator rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, serta indikator persentase penduduk yang menggunakan *handphone*/telepon. Sama halnya dengan indikator-indikator sebelumnya, terdapat indikator yang tidak relevan apabila digunakan untuk lingkup perkotaan seperti Kota Yogyakarta, yakni indikator mengenai persentase penduduk yang menggunakan *handphone*/telepon, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator tersebut ditiadakan. Sedangkan indikator rumah tangga yang menggunakan listrik sudah dibahas dalam urusan perumahan pada fokus layanan urusan wajib.

1. Persentase Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik

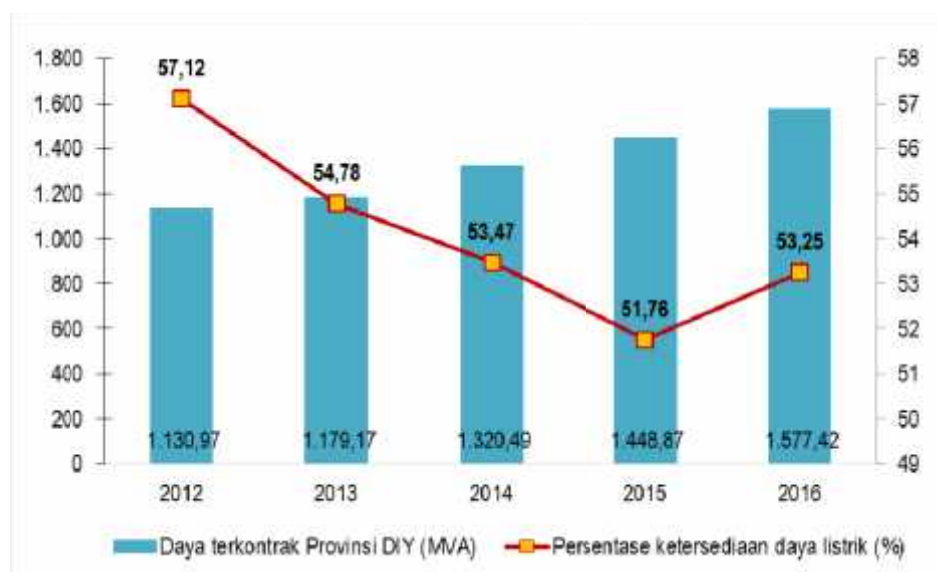
Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.238
Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|----|--------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 1. | Daya listrik terpasang | MVA | 646 | 646 | 706 | 750 | 840 | 6,79 |
| 2. | Daya terkontrak Provinsi DIY | MVA | 1.130,97 | 1.179,17 | 1.320,49 | 1.448,87 | 1.577,42 | 8,67 |
| 3. | Persentase ketersediaan daya listrik | % | 57,12 | 54,78 | 53,47 | 51,76 | 53,25 | -1,74 |

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Daya listrik terpasang di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 memiliki daya 646 MVA kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 706 MVA hingga di tahun 2016 sebesar 840 MVA, sehingga setiap tahun rata-rata pertumbuhan daya listrik terpasang di Kota Yogyakarta mencapai 6,79%. Kondisi ini dihadapkan dengan jumlah kebutuhan listrik dalam kurun waktu yang sama selalu mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,67% per tahun, yakni 1.130,97 MVA pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.577,42 MVA pada tahun 2016. Kenaikan besaran daya listrik terpasang dan juga disertai dengan pertumbuhan rata-rata kebutuhan listrik yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan rasio ketersediaan daya listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni sebesar 57,12% pada tahun 2012 menurun menjadi 53,25% di tahun 2016 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,74% per tahun.



Gambar2.112
Grafik Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kota berkewajiban untuk mengaliri listrik hingga dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Pertumbuhan suatu daerah sangat tergantung dari kemampuan investasi. Upaya memotivasi investasi daerah sangat diperlukan. Pemerintah hendaknya memiliki cara strategis untuk menumbuhkan investasi di daerah. Kota Yogyakarta yang sudah sangat padat tentunya tidak memungkinkan lagi untuk memiliki kawasan industri. Namun demikian Kota Yogyakarta perlu meningkatkan investasi daerah dengan melalui pelayanan jasa. Sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan melalui RPJPD 2005-2025 tentunya sudah memberikan arahan untuk memperbesar investasi di bidang pelayanan jasa.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dukungan *goodwill* dan *political will* untuk meningkatkan investasi di bidang pelayanan jasa tidak terlepas dari *image* pelayanan SKPD. Pada implementasi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan wajib dan urusan

pilihan yang dapat diusahakan oleh daerah. Terkait dengan upaya meningkatkan iklim investasi lebih dekat dengan urusan yang bersifat konkuren atau pilihan. Keunggulan daerah khususnya dalam komoditas yang dapat mendongkrak investasi perlu dimunculkan. Jasa merupakan bagian komoditas unggulan yang dapat ditingkatkan di Kota Yogyakarta. Jasa pariwisata, jasa pendidikan dan jasa lainnya merupakan pintu masuk investasi yang dapat ditingkatkan. Setidaknya menyambungkan antara kekayaan budaya, pariwisata, pendidikan, tata kehidupan yang tertib, aman dan damai sebagai prakondisi dalam peningkatan investasi merupakan modal dasar yang penting.

1. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi kota yang terkendali dari kekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi perlu ditumbuhkembangkan. Berikut adalah tabel mengenai angka kriminalitas di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.239
Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Tindak Kriminal | Kasus | 457 | 2.078 | 1.956 | 2002 | 1640 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 |
| Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk | Kasus | 10,69 | 51,1 | 47,25 | 48,89 | 39,88 |

Sumber : Polresta Kota Yogyakarta 2016

Data angka kriminalitas di tahun 2013 dan 2014 dalam tabel di atas merupakan jumlah kriminalitas di Kota Yogyakarta yang dicatat oleh Polresta Kota Yogyakarta. Angka kriminalitas tersebut meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Dilihat dari data di atas terjadi fluktuasi tindak kriminalitas sejak tahun 2012 hingga 2016, pernah rendah pada tahun 2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara itu menurun lagi pada tahun 2014 dan 2016. Akan tetapi perbedaan angka kriminal yang cukup tajam dalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan cara perhitungan, perhitungan angka kriminalitas di tahun 2012 berbeda dengan cara perhitungan di tahun 2013, 2014 dan 2015. Angka kejahatan yang relatif tinggi akan dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Yogyakarta. Tentunya angka tersebut harus ditekan dengan

mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Kota Yogyakarta yang aman akan menimbulkan daya tarik investasi.

2. Jumlah Demo

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Di satu sisi unjuk rasa merupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakat untuk berpolitik, namun di sisi lain demonstrasi menjadi sebuah aktivitas yang menimbulkan gangguan baik kecil maupun besar terhadap rutinitas masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politis oleh kepentingan kelompok. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah demonstrasi di Kota Yogyakarta tahun 2012 hingga 2016 mengalami tren penurunan setiap tahunnya.

Tabel 2.240
Jumlah Demo di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Demo dalam 1 Tahun | Kasus | 158 | 122 | 108 | 135 | 151 |

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta 2016

Jumlah demonstrasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, akan tetapi cenderung menurun. Jika dilihat secara sepihak untuk memanfaatkan stabilitas sosial ekonomi akan dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi. Namun jika dilihat dari dinamika masyarakat dalam berpolitik hal ini dapat pula diartikan penurunan responsivitas terhadap perkembangan kekinian. Hal ini sangat dimungkinkan ketika masyarakat lebih fokus kepada kepentingan sendiri dibandingkan dengan upaya untuk memperjuangkan rakyat. Terlepas dari masalah tersebut turunnya angka demonstrasi ini juga dapat dibaca dari perspektif positif bahwa kemungkinan kebijakan pemerintah sudah diterima masyarakat luas.

3. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan sebuah instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan

(dalam hari). Jenis perizinan yang dianalisis dalam indikator ini diantaranya:

1. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
2. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
3. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
4. IUI : Izin Usaha Industri
5. TDI : Tanda Daftar Industri
6. HO : Izin Gangguan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perizinan, lama proses mengurus perizinan dalam rentang waktu 2012-2015 tidak banyak mengalami perubahan. Namun, pada tahun 2016, lama proses perizinan menjadi 2-4 hari lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Proses untuk pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang sebelumnya rata-rata memerlukan waktu 12 hari, kini rata-rata hanya membutuhkan 7-10 hari saja.

Tabel 2.241
Lama Proses Perizinan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Jenis Perizinan | Lama Penyelesaian | | | | | | |
|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| IMB | | | | | | | |
| Bangunan sederhana | Hari | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| Bangunan tidak pakai hitungan konstruksi | Hari | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 |
| Bangunan pakai hitungan konstruksi | Hari | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
| Gangguan kecil dan sedang (non tim) | Hari | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| Gangguan besar | Hari | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| HO | | | | | | | |
| SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) | Hari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| TDP (Tanda Daftar Perusahaan) | Hari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| IUI (Izin Usaha Industri)/TDI (Tanda Daftar Industri) | Hari | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |

Sumber :Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2017

Secara umum, lama izin untuk pengurusan sebuah usaha lebih singkat dibandingkan dengan pengurusan IMB. Belum ada perubahan yang berarti sejak Kota Yogyakarta menyanggah prestasi sebagai percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang efisien. Evaluasi perlu

dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan perizinan. Terkait dengan jumlah perizinan yang dilakukan dalam satu pintu juga perlu dicermati agar dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga iklim investasi dapat tetap meningkat terus.

4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2012-2016 masih konstan dengan 10 jenis pajak. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat saat ini pengelolaannya menjadi kewenangan daerah. Pajak yang mengalami perubahan pengelolaan ini antara lain adalah PBB dan pajak BPHTB. Pada tahun 2015, pajak yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, BPHTB dan PBB. Sementara itu, jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Jenis retribusi daerah yang awalnya sejumlah 15 macam, sempat meningkat menjadi 16 macam di tahun 2014 dan turun menjadi 14 macam pada tahun 2015-2016. Retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 meliputi pelayanan kesehatan; persampahan; pemakaman, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah; tempat parkir khusus; rumah potong hewan; pengelolaan air limbah; penjualan produksi usaha daerah; IMBB, ijin gangguan; perijinan usaha bidang pariwisata; dan retribusi terminal.

Tabel 2.242
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Variabel | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|------------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Pajak Daerah | jenis | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00 |
| Retribusi Daerah | jenis | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | -1,71 |
| Jumlah | jenis | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | -1,02 |

Sumber :Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017.

Ditinjau dari besaran nilai realisasi pajak dan retribusi yang diterima oleh Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2012-2016, penerimaan yang ada terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,15% per tahun. Pada tahun 2012, nilai pajak dan retribusi daerah adalah sebesar 246,5 miliar rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 376,17 miliar rupiah. Apabila dilihat dari perkembangan masing-masing pajak maupun retribusi, perkembangan yang relatif lebih besar dialami oleh pajak daerah dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,61% per tahun dibandingkan penerimaan retribusi yang hanya meningkat sebesar 2,09% per tahun. Sejak tahun 2012-2016, pajak daerah banyak dihasilkan oleh pajak hotel, sedangkan retribusi tertinggi dihasilkan oleh retribusi pelayanan pasar.

Tabel 2.243
Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1 | Pajak Daerah | Juta Rupiah | 207.703,5 | 227.748,9 | 253.461,9 | 304.434,5 | 334.057,9 | 12,61 |
| 2 | Retribusi Daerah | Juta Rupiah | 38.770,6 | 40.338,7 | 56.095,9 | 40.349,2 | 42.111,1 | 2,09 |
| | Jumlah | Juta Rupiah | 154.866,0 | 246.474,1 | 268.087,6 | 309.557,8 | 344.783,7 | 376.169,0 |

Sumber :Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017.

5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu goodwill dan political will pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas

perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 jumlah Perda di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 terdapat dua buah perda yang mendukung iklim usaha yang merupakan perda baru. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.244
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha | Buah | 34 | 23 | 24 | 28 | 30 |

Sumber :Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta 2017

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan tokoh utama yang berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.

Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta. Pemaparan data dapat dilihat pada tabel di

bawah yang besumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2012 rasio lulusan S1, S2, dan S3 merupakan angka yang tertinggi yaitu 1.768 per 10.000 penduduk. Tingginya rasio tersebut dikarenakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun terkait juga jumlah penduduk tertinggi selama kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2013, rasio lulusan ini hanya mencapai 1.530 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2016 rasionya bertambah menjadi 1.663 per 10.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan perubahan yang positif, meskipun jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata per tahunnya mengalami penurunan sebesar 1,52%.

Tabel 2.245
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|-------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3 | Jiwa | 75.603 | 62.218 | 63.196 | 67.268 | 68.428 | -2,46 |
| 2 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 409.487 | 411.282 | -0,97 |
| 3 | Rasio Lulusan S1, S2, dan S3 | | 1.768 | 1.530 | 1.527 | 1.643 | 1.663 | -1,52 |

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Sementara pada tabel di bawah dapat dilihat data rasio lulusan S1/S2/S3 yang didapat dari perhitungan jumlah kartu pencari kerja (AK-1) atau yang biasa disebut kartu kuning yang dikeluarkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Perkembangan rasio lulusan S1, S2, dan S3 yang mengajukan permohonan penerbitan kartu AK-1 di Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2014 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2012, rasio lulusan ini hanya mencapai 42 sampai 43 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2015 rasionya bertambah menjadi 135 hingga 136 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.246
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

| No | Indikator | Satuan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|-------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah Lulusan S1/S2/S3 | Jiwa | 3.970 | 6.337 | 1.797 | 3.274 | 5.599 | 35,30 |
| 2 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 457.668 | 440.143 | 427.591 | 406.660 | 413.936 | -2,45 |
| 3 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | | 86,74 | 143,98 | 42,03 | 80,51 | 135,26 | 38,69 |

Sumber :Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2015,: dengan Hasil Olahan, 2016

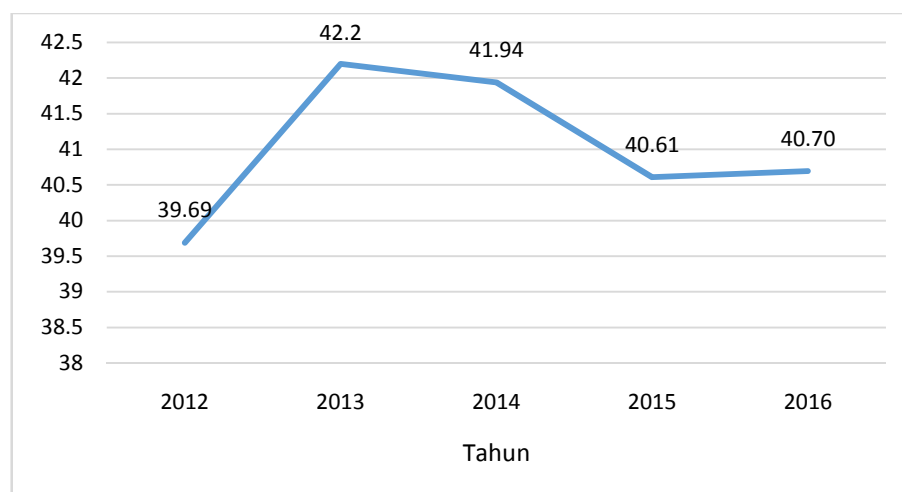
2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Yogyakarta pada tahun 2016 adalah 40,70%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2012 hingga 2016, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 0,63% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Yogyakarta semakin besar setiap tahunnya.

Tabel 2.247
Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun | Jiwa | 121.490 | 120.627 | 122.318 | 118.261 | 118.964 | -0,52 |
| 2 | Penduduk usia 15-64 tahun | Jiwa | 306.101 | 285.827 | 291.648 | 291.226 | 292.318 | -1,15 |
| 3 | Rasio Ketergantungan | | 39,69 | 42,20 | 41,94 | 40,61 | 40,70 | 0,63 |

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta 2017: dengan Hasil Olahan.



Gambar 2.113

Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan. 2016

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup. Terdapat empat komponen yang dapat mencerminkan IPM yakni: angka

harapan hidup saat lahir yang menjadi wakil bidang kesehatan; harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 84,86 meningkat bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing sebesar 83,61 dan 83,78. Bila diukur berdasar skala internasional nilai IPM ini masuk kategori tinggi (IPM diatas 80). Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2015 meningkat bila dibandingkan tahun 2014, sebesar 74,05, hal ini menunjukkan salah satu indikasi bahwa kualitas kesehatan penduduk Kota Yogyakarta semakin baik.

Tabel 2.248
IPM Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

| Indikator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kota Yogyakarta | 82,98 | 83,29 | 83,61 | 83,78 | 84,86 |
| Provinsi D.I. Yogyakarta | 75,93 | 76,15 | 76,44 | 76,81 | 77,59 |

Sumber: IPM Kota Yogyakarta Tahun 2015

Kebijakan pembangunan sosial, karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi serta demografi penduduk merupakan faktor yang turut menjadi penentu keberhasilan capaian pembangunan manusia.

2.2. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016

2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.260
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|---|---|-------------|-------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaa pemerintah daerah yang berkualitas | Nilai Kinerja Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta | B | BB | 100% |
| | | Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal | Wajar (WTP) | Wajar (WTP) | - |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|------------------|------------------|
| | | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) | Tinggi | Sangat Tinggi | - |
| II | Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup (Tahun) | 74 | 74 | 100% |
| | | Angka Kematian Ibu Per seratus ribu Kelahiran Hidup | <102 | 104,14 | 97,90% |
| | | Angka Kematian Bayi PerSeribu Kelahiran Hidup | 6,7 | 7,81 | 83,43% |
| | | Prevalensi gizi buruk dangizi kurang | 8% | 9,05% | 86,88% |
| III | Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau | Indeks Kepuasan LayananRumah Sakit | 74 | 77,52 | 104,75% |
| | | Indeks Kepuasan LayananKesehatan | 80 | 78,67 | 98,34% |
| IV | Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai | Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota | 100% | 69,41% | 69,41% |
| | | Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota | 18% | 22,18% | 123,28% |
| | | Persentase volume sampahyang terangkut ke TempatPembuangan Akhir | 80% | 77,98% | 97,48% |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Persentase cakupan Pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase cakupan Pelayanan kesiapsiagaandan penanganan bencana alam | 100% | 100% | 100% |
| V | Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 74,9 | 79,51 | 106% |
| | | Presentase tindak lanjut pengaduan masyarakat Lewat Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (Upik) | 94% | 96,77% | 102,95% |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| VI | Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua | Angka Partisipasi Sekolah(APS) | 97% | 94,92% | 97,86% |
| | | Persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi | 9,4% | 11,96% | 127,23% |
| | | Angka Melek Huruf | 98,30% | 99,92% | 101,65% |
| VII | Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat | Pendapatan Perkapita (Rp) | Rp. 53.739 jt | Rp 54.306 jt | 100% |
| | | Jumlah koperasi aktif | 481 | 469 | 97,51% |
| | | Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) | 23.341 UMKM | 23.468 UMKM | 101% |
| VIII | Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat | Angka kemiskinan | 8,40% | 8,75% | 95,83% |
| | | Tingkat Intensitas pengendalian Frekuensi Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Karena Isu SARA dan Kesenjangan Sosial | 22,03% | 21,01% | 104,85% |
| IX | Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul | Indeks Pembangunan Manusia | 80,1 - 83,0 | 84,56 | 102% |
| | | Tingkat Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) | 99% | 98,67 | 99,67% |
| | | Angka Pengangguran terbuka | 8,10 - 5,75% | 5,52 | 105% |
| X | Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat | Pertumbuhan Ekonomi | 5,2 - 5,5% | 5,16% | 99,23% |
| | | Inflasi | 6 - 7,5 % | 4,06% | 132,33 |
| | | Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 225 - 231 Milyar | 376.170.979 .336 | 162,84% |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| XI | Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha | Persentase penerbitan izinsesuai Standar Operasional Prosedur | 100% | 102,17 | 102,17% |
| | | Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) | 94% | 98,55 | 104,84% |
| | | Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau Kota | 35,30% | 33,77% | 95,68% |
| | | Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air | 100% | 79,73% | 79,73% |

| | | | | |
|--|---|------|--------|--------|
| | Persentase Usaha Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaranudara dari sumber tidakbergerak | 100% | 79,73% | 79,73% |
|--|---|------|--------|--------|

2.2.2. Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2016

Evaluasi hasil pelaksanaan program pada RKPD dan pencapaian RPJMD sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.261
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2016 Kota Yogyakarta

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Seluruh SKPD Kota Yogyakarta |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Seluruh SKPD Kota Yogyakarta |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya aparatur yang tertib dan disiplin | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Seluruh SKPD Kota Yogyakarta |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Seluruh SKPD Kota Yogyakarta |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Seluruh SKPD Kota Yogyakarta |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Pemerintah Daerah | Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dijabat | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | Organisasi |
| | Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaann ya | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Jumlah tata laksana/mekan isme kerja yang bersifat umum/lintas SKPD | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar | 90% | 92% | 102,57% | 95% | 98% | 103,24% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | | | | | | | | | | | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | pelayanan | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Pengadaan Barang/jasa | Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | Dalbang |
| Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu | 48 SKPD | 39 SKPD | 81,25% | 48 SKPD | 48 SKPD | 100,00% | 48 SKPD | 41 SKPD | 85,42% | Tapem |
| | Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu | 7 jenis | 7 jenis | 100,00% | 7 jenis | 7 jenis | 100,00% | 7 jenis | 7 jenis | 100,00% | |
| | Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan | 82 | 80,27 | 97,89% | 83 | 80,94 | 97,52% | 84 | 81,21 | 96,68% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | TR |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | JT |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | GK |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | DN |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | GT |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | NG |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 15 | 150,00% | 10 | 15 | 150,00% | 10 | 12 | 120,00% | KT |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | GM |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | PA |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 12 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | MG |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | UH |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | KG |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | MJ |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan | Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 12 | 120,00% | WB |
| Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum | Jumlah Raperda/Perwal yang tersusun | 10 Raperda dan 50 Perwal | 8 Raperda dan 94 Perwal | 170,00% | 10 Raperda dan 50 Perwal | 10 Raperda dan 84 Perwal | 156,67% | 10 Raperda dan 50 Perwal | 17 Raperda dan 125 Perwal | 210,00% | Hukum |
| | Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan | 12 Produk Hukum | 88 Produk Hukum | 733,33% | 12 Produk Hukum | 79 Produk Hukum | 658,33% | 12 Produk Hukum | 132 Produk Hukum | 1100,00% | |
| | Jumlah penanganan persoalan hukum Pemkot Yogyakarta | 4 perkara/sengketa | 8 perkara/sengketa | 200,00% | 4 perkara/sengketa | 8 perkara/sengketa | 200,00% | 4 perkara/sengketa | 9 perkara/sengketa | 225,00% | |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal | Menurunnya Jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah | 22 | 15 | 131,82% | 20 | 75 | -175,00% | 18 | 60 | -133,33% | Inspektorat |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | (APIP) | | | | | | | | | | |
| | Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti | 78% | 66% | 84,62% | 81% | 49% | 60,49% | 85% | 84,04% | 98,87% | |
| Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah | Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | P3ADK |
| Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah | Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah | 100% | 95,83% | 95,83% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | P3ADK |
| Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah | Meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah | 0,50% | 0,51% | 102,00% | 0,5% | 0,47% | 94,00% | 0,5% | 2,21% | 442,00% | DPDPK |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pengelolaan Barang Daerah | Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89% menjadi 94% | 92% | 92,17% | 100,18% | 93% | 92,99% | 99,99% | 94% | 93,99% | 99,99% | DBGAD |
| Program Peningkatan Barang Daerah | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85% | 83% | 83,07% | 100,08% | 84% | 83,96% | 99,95% | 85% | 85,00% | 100,00% | DBGAD |
| Program Pengelolaan Anggaran Daerah | Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel | Tepat waktu | Tepat waktu | 100,00% | Tepat waktu | Tepat waktu | 100,00% | Tepat waktu | Tepat waktu | 100,00% | DPDPK |
| Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan | Terwujudnya pengendalian belanja daerah | 93% | 75% | 80,65% | 94% | 95% | 101,06% | 95% | 100% | 105,26% | DPDPK |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku | Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit | 93% | 72% | 77,42% | 94% | 94% | 100,00% | 95% | 95% | 100% | DPDPK |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERDA/PERWAL | Ada | Ada | 100,00% | Ada | Ada | 100,00% | Ada | Ada | 100,00% | Bappeda |
| | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERWAL | Ada | Ada | 100,00% | Ada | Ada | 100,00% | Ada | Ada | 100,00% | |
| Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | Bappeda |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pengembangan Data/Informasi | Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan | 90% | 90% | 100,00% | 95% | 95% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | Bappeda |
| | Ketersediaan informasi pembangunan | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | Bappeda |
| | Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan | 8% | 7,47% | 106,63% | 7% | 7,4% | 94,71% | 6% | 6,98% | 83,67% | Dalbang |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | ketentuan yang berlaku | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah, radio, dan TV) | 509 | 1766 | 346,95% | 512 | 1965 | 383,79% | 515 | 2665 | 517,48% | Humas |
| | Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website (internet) | 1 kali/hari | 1 kali/hari | 100,00% | 1 kali/hari | 1 kali/hari | 100,00% | 1 kali/hari | 1 kali/hari | 100,00% | |
| | Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat | 1 kali/tahun | 10 kali/tahun | 1000,00% | 1 kali/tahun | 8 kali/tahun | 800,00% | 1 kali/tahun | 5 kali/tahun | 500,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, atau diskusi | 1 kali/tahun | 15 kali/tahun | 1500,00% | 1 kali/tahun | 16 kali/tahun | 1600,00% | 1 kali/tahun | 18 kali/tahun | 1800,00% | |
| | Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, atau baliho | 77 kali | 398 kali | 516,88% | 78 kali | 427 kali | 547,44% | 79 kali | 550 kali | 696,20% | |
| Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika | Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola | 50 aplikasi | 50 aplikasi | 100,00% | 52 aplikasi | 56 aplikasi | 107,69% | 54 aplikasi | 56 aplikasi | 103,70% | TIT |
| | Tertanganinya keluhan telekomunikasi | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Kenaikan bandwidth internet | 20 mbps | 50 mbps | 250,00% | 26 mbps | 150 mbps | 576,92% | 34 mbps | 400 mbps | 1176,47% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Kenaikan bandwidth intranet | 1.5 mbps | 2 mbps | 133,33% | 2 mbps | 5 mbps | 250,00% | 2.5 mbps | 25 mbps | 1000,00% | |
| Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan | Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | Umum |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah | Jumlah Pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli | 1370 | 1416 | 103,36% | 1425 | 1210 | 84,91% | 1482 | 1214 | 81,92% | Protokol |
| | Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah | 788 | 718 | 91,12% | 811 | 1088 | 134,16% | 843 | 1010 | 119,81% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB) | 20% | 20% | 100,00% | 20% | 100% | 500,00% | 20% | 100% | 500,00% | Arpusda |
| | Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB) | 20% | 20% | 100,00% | 20% | 100% | 500,00% | 20% | 100% | 500,00% | |
| | Terlaksananya pengelolaan arsip statis. | 20% | 20% | 100,00% | 20% | 20% | 100,00% | 20% | 30% | 150,00% | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan. | 30% | 30% | 100,00% | 30% | 100% | 333,33% | 30% | 100% | 333,33% | |
| | Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan | 4 lembaga | 4 lembaga | 100,00% | 4 lembaga | 6 lembaga | 150,00% | 4 lembaga | 4 lembaga | 100,00% | |
| | Penyusunan pedoman kearsipan. | 4 pedoman | 4 pedoman | 100,00% | 4 pedoman | 4 pedoman | 100,00% | 4 pedoman | 4 pedoman | 100,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pengembangan Kerjasama Daerah | Realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah | 20 perikatan | 84 perikatan | 420,00% | 20 perikatan | 67 Perikatan | 335,00% | 20 perikatan | 133 perikatan | 665,00% | P3ADK |
| | Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah | 100% | 51,01% | 51,01% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 98,34% | 98,34% | |
| Program Peningkatan Layanan Pada DPRD | Pengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD | 100% | 48,06% | 48,06% | 100% | 84% | 83,53% | 100% | 85% | 84,93% | Sekretariat DPRD |
| Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian | Presentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian | 54% | 127,88% | 236,81% | 62% | 89.53% | 144,40% | 89.53% | 94,46% | 105,51% | BKD |
| Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional | Presentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan | 93% | 109,90% | 118,17% | 94% | 99.26% | 105,60% | 95% | 95,35% | 100,37% | BKD |
| Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian | 90,6% | 123,92% | 136,78% | 90,8% | 73.32% | 80,75% | 91% | 100,0% | 109,89% | BKD |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan | Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% | Tapem |
| Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS | 57% | 98,87% | 173,46% | 59% | 82,24% | 139,39% | 61% | 191,57% | 314,05% | BKD |
| | Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP | 90% | 89% | 99,11% | 95% | 95% | 99,62% | 100% | 100% | 100,00% | Dintib |
| Program Upaya Pelayanan Kesehatan | Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar | 73% | 88,51% | 121,25% | 76% | 91,11% | 119,88% | 80% | 121,85% | 152,31% | Dinkes |
| | Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin | 100% | 151,70% | 151,70% | 100% | 274,25% | 274,25% | 100% | 303,52% | 303,52% | |
| | Cakupan penanganan | 70% | 97,27% | 138,96% | 75% | 133,33% | 177,78% | 80% | 112,86% | 141,08% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | keawatdaruratan | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis | Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BPS/PPGD/GE LS/ALS) | 88% | 89,22% | 101,39% | 94% | 89,22% | 94,91% | 100% | 100% | 100,00% | RSUD |
| | Waktu tunggu di Rawat Jalan | 69 menit | 90 menit | 69,57% | 63 menit | 90 menit | 57,14% | 57 menit | 90,6 menit | 41,05% | |
| | Waktu tunggu operasi elektif | 2,1 hari | 1,017 hari | 151,57% | 1,9 hari | 1,017 hari | 146,47% | 1,7 hari | 1,017 hari | 146,47% | |
| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang | Meningkatnya Mutu Pelayanan Penunjang | 98% | 99,5% | 101,53% | 99% | 99% | 100,00% | 100% | 99% | 100,00% | RSUD |
| | Waktu tunggu hasil pelayanan | 135 menit | 140,57 menit | 95,87% | 125 menit | 50,49 menit | 159,61% | 115 menit | 50,49 menit | 159,61% | |
| | kejadian kegagalan pelayanan rontgen karena kerusakan foto | 1,8% | 2% | 88,89% | 1,6% | 2% | 75,00% | 1,4% | 2% | 75,00% | |
| Program Peningkatan Mutu | Meningkatnya Mutu Pelayanan | 98% | 81,2% | 82,86% | 99% | 99% | 100,00% | 100% | 99% | 100,00% | RSUD |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Pelayanan Keperawatan | Keperawatan | | | | | | | | | | |
| | Kejadian pulang paksa | 6% | 6.13% | 97,83% | 5% | 2,30% | 157,41% | 5% | 2,30% | 157,41% | |
| | Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3 | 97% | 92.16% | 95,01% | 98% | 100% | 101,63% | 100% | 100% | 101,63% | |
| Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit | 88% | 79.7% | 90,57% | 90% | 90% | 100,00% | 90% | 90% | 100,00% | RSUD |
| | Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap | 72% | 100% | 138,89% | 77% | 100% | 129,87% | 85% | 100% | 129,87% | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan | Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas | 93% | 91,90% | 98,82% | 94% | 99,98% | 106,36% | 95% | 100,02% | 105,28% | Dinkes |
| Program Keluarga Berencana dan Keluarga | Terkendalinya / penurunan angka kelahiran | 14,42 | 10,75 | 125,45% | 14,212 | 9,67 | 131,96% | 14 | 9,34 | 133,29% | Kantor KB |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Sejahtera | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikuti program KB | 72,2% | 71,50% | 99,03% | 72,6% | 73,8% | 101,65% | 73% | 75,78% | 103,81% | |
| Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga | cakupan balita ditimbang berat badannya (MDG's) | 81% | 74,90% | 92,47% | 85% | 85,31% | 100,36% | 85% | 89,47% | 105,26% | Dinkes |
| | Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's) | 9% | 7,93% | 111,89% | 8% | 7,93% | 100,88% | 8% | 9,05% | 86,88% | |
| | cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM) | 100% | 54,53% | 54,53% | 100% | 67,21% | 67,21% | 100% | 85,35% | 85,35% | |
| | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's), (SPM) | 100% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Prevalensi anemia pada ibu hamil | 28% | 28,10% | 99,64% | 27% | 23,20% | 114,07% | 26% | 22,78% | 112,38% | |
| | Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM) | 94% | 92,85% | 98,78% | 95% | 99,97% | 105,23% | 96% | 94,75% | 98,70% | |
| | Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) | 94% | 99,89% | 106,27% | 95% | 99,97% | 105,23% | 96% | 99,97% | 104,14% | |
| | Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN Lengkap) (SPM) | 87% | 94,37% | 108,47% | 89% | 82,6% | 92,81% | 90% | 100,47% | 111,63% | |
| | Cakupan Peserta KB Aktif (SPM) | 76% | 75,54% | 99,39% | 77% | 59,88% | 77,77% | 78% | 100,99% | 129,47% | |
| Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's) | 94% | 96,93% | 103,12% | 95% | 90,74% | 95,52% | 95% | 97,61% | 102,75% | Dinkes |
| | Cakupan imunisasi anak sekolah dasar | 99% | 97,35% | 98,33% | 99,5% | 96,91% | 97,40% | 100% | 98,57% | 98,57% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---------|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | (SPM) | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Desa/Keluraha n Universal Child Immunization (UCI) (SPM) | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM) | 73% | 85,00% | 116,44% | 94% | 126,28% | 134,34% | 94% | 154,30% | 164,15% | |
| | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM) | 100% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat | 93% | 98,22% | 105,61% | 94% | 94,10% | 100,11% | 94% | 105,01% | 112,31% | |
| | Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's) | 33 kelurahan | 45 kelurahan | 136,36% | 45 kelurahan | 45 kelurahan | 100,00% | 45 kelurahan | 45 kelurahan | 100,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan | 100% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | Dinkes |
| | Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan | 100% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95% | 92% | 92,34% | 100,37% | 93% | 97,00% | 104,30% | 95% | 105,26% | 110,80% | Dinkes |
| | Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 % | 74% | 100,00% | 135,14% | 76% | 100,00% | 131,58% | 80% | 118,97% | 148,71% | |
| | Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan | 27 | 14 | 51,85% | 36 | 17 | 47,22% | 45 | 47 | 104,44% | |
| | Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan | 300 | 323 | 107,67% | 400 | 448 | 112,00% | 500 | 606 | 121,20% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) | 70% | 71,10% | 101,57% | 75% | 71,10% | 94,80% | 80% | 97,22% | 121,53% | Dinkes |
| | Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS | 65% | 77,22% | 118,80% | 70% | 75,09% | 107,27% | 75% | 103,40% | 137,87% | |
| | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM) | 100% | 98,50% | 98,50% | 100% | 98,1% | 98,10% | 100% | 97,45% | 97,45% | |
| Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan | persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan | 98% | 100,00% | 102,04% | 99% | 100% | 101,01% | 100% | 100% | 100,00% | Dinkes |
| | Cakupan Desa/Keluraha n Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM) | 100% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% | |
| Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan | Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota | 66% | 66% | 100,00% | 68% | 68% | 100,00% | 70% | 70% | 100,00% | Kimpraswil |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Penataan Kawasan Sungai | Cakupan penataan kawasan sungai | 3 sungai | 3 sungai | 100,00% | 3 sungai | 3 sungai | 100,00% | 3 sungai | 3 sungai | 100,00% | Bappeda |
| Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum | 93% | 93% | 100,00% | 94% | 94% | 100,00% | 95% | 95% | 100,00% | Kimpraswil |
| Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan | 80% | 83% | 103,75% | 81% | 87% | 107,41% | 82% | 83,45% | 101,77% | Kimpraswil |
| Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan | Meningkatnya kualitas saluran pengairan | 71,5% | 71,5% | 100,00% | 72% | 72% | 100,00% | 72,5% | 72,5% | 100,00% | Kimpraswil |
| Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase | Meningkatnya kualitas saluran drainase | 87,18% | 20,027% | 22,97% | 87,27% | 69,01% | 79,08% | 87,36% | 87,36% | 100,00% | Kimpraswil |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL | Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah | 15,8% | 22,19% | 140,44% | 17% | 22% | 130,41% | 18% | 22,18% | 123,22% | Kimpraswil |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman | 71% | 71% | 100,00% | 75% | 70% | 93,33% | 78% | 78% | 100,00% | Kimpraswil |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta | 445 penggal jalan | 445 penggal jalan | 100,00% | 500 penggal jalan | 500 penggal jalan | 100,00% | 556 penggal jalan | 505 penggal jalan | 90,83% | BLH |
| | Meningkatnya jumlah rumahtangga yang telah melakukan pemilahan sampah | 22.100 rumah | 21.720 rumah | 98,28% | 23.800 rumah | 19.981 rumah | 83,95% | 25.500 rumah | 21.675 rumah | 85,00% | |
| | Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan | 5 unit | 0 unit | 0,00% | 5 unit | 0 unit | 0,00% | 5 unit | 4 unit | 80,00% | |
| | Terkendalnya munculnya pembuangan sampah liar | 30 titik | 0 titik | 0,00% | 20 titik | 20 titik | 100,00% | 10 titik | 10 titik | 100,00% | |
| | Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan | 75.600 WR | 75.600 WR | 100,00% | 75.850 WR | 75.686 WR | 99,78% | 76.100 WR | 70.727 WR | 92,94% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | baru | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85% | 83% | 82,97% | 99,96% | 84% | 83,99% | 99,99% | 85% | 84,92% | 99,91% | DBGAD |
| Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran | Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM) | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | BPBD |
| Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam | Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | BPBD |
| Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan | 5529 | 5770 | 104,36% | 5810 | 6071 | 104,49% | 6091 | 6095 | 100,07% | Dishub |
| | Prosentase pengujian kendaraan bermotor | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan | Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan | 75% | 100% | 133,33% | 80% | 100% | 125,00% | 85% | 100% | 117,65% | Dishub |
| | Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 100 | 88 | 88,00% | 300 | 93 | 31,00% | 300 | 150 | 50,00% | |
| | Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas | Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan | 100% | 99,13% | 99,13% | 100% | 97% | 97,30% | 100% | 768 | 90,35% | Dishub |
| Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran | Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran | 82% | 83,18% | 101,44% | 86% | 90% | 104,79% | 90% | 89,66% | 99,62% | Dishub |
| Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan | Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 96% | 96,17% | 100% | 100% | 100,00% | Dukcapil |
| Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil | Penerbitan Dokumen pencatatan sipil | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 95% | 94,78% | 100% | 100% | 100,00% | Dukcapil |
| Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | SIAK berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 90% | 90,25% | 100% | 100% | 100,00% | Dukcapil |
| Program Wajar 12 Tahun | AP (Angka Putus Sekolah) | 0,02 | 0,027 | 65,00% | 0,015 | 0,02 | 66,67% | 0,01 | 0,01 | 100,00% | Dindik |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | AM (Angka Melanjutkan) | 120% | 133,50% | 111,25% | 125% | 134% | 107,54% | 130,55% | 158% | 121,33% | |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro | kenaikan omset pertahun | 10,0% | 2,69% | 26,90% | 10% | 18% | 179,30% | 10% | 18% | 179,30% | Perindag koptan |
| | kenaikan aset pertahun | 10% | 0,99% | 9,90% | 10% | 48% | 481,50% | 10% | 48% | 481,50% | |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | meningkatnya omset | 5% (151 M) | 5% (151 M) | 100,00% | 5% (158 M) | 6,00% | 120,00% | 5% (165 M) | 6,00% | 120,00% | Perindag koptan |
| | meningkatnya nilai Aset | 10% (1,900 M) | 10% (1,900 M) | 100,00% | 10% (2.260 M) | 12,00% | 120,00% | 10% (2.550 M) | 12,00% | 120,00% | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | peningkatan konsumsi pangan yg ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dg bahan dasar lokal yg diolah di unit usaha pangan yg menerapkan standar | PPH : 97,0; 120 unit usaha; pemotongan sapi: 7235 ekor, kambing/domba 5880 ekor | PPH : 80,0; 120 unit usaha; pemotongan sapi: 8667 ekor, kambing/domba 9573 ekor | 138,31% | PPH : 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 7600 ekor, kambing/domba 5980 ekor | PPH : 86,93; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 8053 ekor, kambing/domba 9880 ekor | 131,40% | PPH : 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi: 7965 ekor, kambing/domba 6080 ekor | PPH : 92,3; 150 unit usaha; pemotongan sapi: 8265 ekor, kambing/domba 9676 ekor | 127,20% | Perindag koptan |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | higiene- sanitasi | | | | | | | | | | |
| Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat | Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat | 29% | 29% | 100,00% | 30% | 31% | 104,93% | 31% | 78% | 251,61% | KPMP |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo | Meningkatnya swadaya masyarakat | 32,85% | 31,30% | 95,28% | 32,89% | 30,48% | 92,67% | 32,93% | 32,54% | 98,82% | TR |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis | Meningkatnya swadaya masyarakat | 25,28% | 28,45% | 112,54% | 27,18% | 30,08% | 110,67% | 28,98% | 29,16% | 100,62% | JT |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman | Meningkatnya swadaya masyarakat | 27,37% | 29,34% | 107,20% | 28,37% | 29,77% | 104,93% | 29,37% | 29,41% | 100,14% | GK |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan | Meningkatnya swadaya masyarakat | 26,23% | 31,79% | 121,20% | 27,73% | 29,88% | 107,75% | 29,23% | 31,74% | 108,59% | DN |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen | Meningkatnya swadaya masyarakat | 26,79% | 28,04% | 104,67% | 27,89% | 33,31% | 119,43% | 28,99% | 25,49% | 87,93% | GT |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan | Meningkatnya swadaya masyarakat | 25,32% | 24,59% | 97,12% | 26,92% | 30,11% | 111,85% | 28,52% | 29,26% | 102,59% | NG |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan | Meningkatnya swadaya masyarakat | 28,93% | 28,55% | 98,69% | 29,93% | 32,81% | 109,62% | 30,93% | 25,61% | 82,80% | KT |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Kraton | | | | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan | Meningkatnya swadaya masyarakat | 28,95% | 30,32% | 104,73% | 29,95% | 31,10% | 103,84% | 30,95% | 32,56% | 105,20% | GM |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman | Meningkatnya swadaya masyarakat | 26,07% | 17,49% | 67,09% | 27,47% | 30,00% | 109,21% | 28,87% | 27,15% | 94,04% | PA |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan | Meningkatnya swadaya masyarakat | 26,73% | 30,55% | 114,29% | 27,93% | 32,71% | 117,11% | 29,13% | 33,72% | 115,76% | MG |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo | Meningkatnya swadaya masyarakat | 39,73% | 32,56% | 81,95% | 39,77% | 31,86% | 80,11% | 39,81% | 35,48% | 89,12% | UH |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede | Meningkatnya swadaya masyarakat | 28,81% | 29,57% | 102,64% | 29,81% | 28,85% | 96,78% | 30,81% | 30,71% | 99,68% | KG |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron | Meningkatnya swadaya masyarakat | 36,37% | 31,20% | 85,78% | 36,41% | 37,21% | 102,20% | 36,45% | 36,41% | 99,89% | MJ |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan | Meningkatnya swadaya masyarakat | 26,64% | 25,58% | 96,02% | 27,84% | 32,41% | 116,42% | 29,04% | 21,62% | 74,45% | WB |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | KPMP |
| - | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---------|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 70% | 100% | 142,86% | 75% | 100% | 133,33% | 80% | 100% | 100,00% | |
| | Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 70% | 100% | 142,86% | 75% | 100% | 133,33% | 80% | 100% | 125,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. | 95% | 100% | 105,26% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 75% | 100% | 133,33% | 90% | 100% | 111,11% | 100% | 100% | 100,00% | |
| | Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 55% | 100% | 181,82% | 70% | 100% | 142,86% | 85% | 2% | 2,35% | |
| | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | perempuan dan anak korban kekerasan | | | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak | 24% | 24,03% | 100,13% | 24,5% | 24,53% | 100,12% | 25% | 24,53% | 98,12% | KPMP |
| Program Pemberdayaan Sosial | Meningkatnya Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat | 1610 orang | 1057 orang | 65,65% | 1680 orang | 1049 orang | 62,44% | 1750 orang | 1049 orang | 59,94% | Dinsos |
| | Meningkatnya Jumlah TAGANA | 319 orang | 56 orang | 17,55% | 347 orang | 108 Orang | 31,12% | 375 orang | 108 Orang | 28,80% | |
| | Cakupan pembinaan Karang Taruna | 45 | 45 | 100,00% | 45 | 45 | 100,00% | 45 | 45 | 100,00% | |
| | Cakupan pembinaan Lembaga/Orsoss | 176 | 90 | 51,14% | 176 | 67 | 38,07% | 176 | 67 | 38,07% | |
| | Cakupan pembinaan Panti Pemerintah | 3 panti | 3 panti | 100,00% | 3 panti | 3 panti | 100,00% | 3 panti | 3 panti | 100,00% | |
| | Cakupan pembinaan Panti Swasta | 15 panti | 14 panti | 93,33% | 15 panti | 14 panti | 93,33% | 15 panti | 13 panti | 86,67% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Meningkatnya Jumlah Kelompok Peduli Napza | 53 kelompok | 33 kelompok | 62,26% | 63 kelompok | 150 kelompok | 238,10% | 73 kelompok | 10 kelompok | 14,29% | |
| | Meningkatnya KUBE-FM | 295 kelompok | 461 klmpok | 156,27% | 302 kelompok | 553 kelompok | 183,11% | 309 kelompok | 452 kelompok | 146,28% | |
| | Meningkatnya USEP-KM | 59 Kelompok | 57 klmpok | 96,61% | 60 Kelompok | 57 Kelompok | 95,00% | 61 Kelompok | 56 kelompok | 91,80% | |
| Program Rehabilitasi Sosial | Meningkatnya penanganan anak jalanan | 23% | 25% | 108,70% | 24% | 100% | 416,67% | 25% | 25% | 100,00% | Dinsos |
| | Meningkatnya penanganan lansia terlantar | 22,52% | 22,52% | 100,00% | 23,52% | 41,95% | 178,36% | 24,52% | 24,52% | 100,00% | |
| | Meningkatnya penanganan penyandang cacat | 8,2% | 8,2% | 100,00% | 8,2% | 8,85% | 107,93% | 8,2% | 8,20% | 100,00% | |
| Program Penanggulangan Kemiskinan | Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan | 45 Kel | 45 Kel | 100,00% | 45 Kel | 45 Kel | 100,00% | 45 Kel | 45 Kel | 100,00% | Bappeda |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan | 750 orang | 750 orang | 100,00% | 750 orang | 1875 Orang | 250,00% | 750 orang | 1200 orang | 160,00% | Kesbang |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda | Cakupan pembinaan organisasi pemuda | 162 organisasi | 162 organisasi | 100,00% | 162 organisasi | 94 Organisasi | 58,02% | 162 organisasi | 94 organisasi | 58,02% | Kesbang |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Fasilitasi Olahraga | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang berprestasi | 34 organisasi olahraga | 34 organisasi olahraga | 100,00% | 34 organisasi olahraga | 34 organisasi olahraga | 100,00% | 34 organisasi olahraga | 34 organisasi olahraga | 100,00% | Kesbang |
| Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar | Rerata UN SD/SMP | 7,75 | 7,57 | 97,68% | 7,8 | 7,47 | 95,77% | 7,85 | 7,46 | 95,03% | Dindik |
| | Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional | 0,10% | 0,09% | 90,00% | 0,20% | 0,03% | 15,00% | 0,30% | 0,02% | 6,67% | |
| | Jumlah guru tersertifikasi | 80% | 85,32% | 106,65% | 85% | 73% | 86,07% | 90% | 96,95% | 107,72% | |
| | Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV | 86% | 89,52% | 104,09% | 94% | 91% | 96,78% | 100% | 92,93% | 92,93% | |
| | Jumlah Sekolah Terakreditasi | 98% | 99,60% | 101,63% | 99% | 100% | 101,01% | 100% | 100% | 100,00% | |
| Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah | Rerata UN SMA/SMK | 7,7 | 7,01 | 91,04% | 7,75 | 7,47 | 96,39% | 7,8 | 6,3 | 80,77% | Dindik |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional | 0,10% | 0,16% | 160,00% | 0,20% | 0,03% | 15,00% | 0,30% | 0,10% | 33,33% | |
| | Jumlah guru tersertifikasi | 90% | 87,31% | 97,01% | 85% | 73% | 86,07% | 100% | 96,95% | 96,95% | |
| | Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV | 95% | 95,58% | 100,61% | 94% | 91% | 96,78% | 100% | 97,26% | 97,26% | |
| | Jumlah Sekolah Terakreditasi | 94% | 98,80% | 105,11% | 99% | 100% | 101,01% | 98% | 98,74% | 100,76% | |
| Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal | Jumlah PAUD terakreditasi | 3% | 4% | 133,33% | 4% | 23% | 575,00% | 5% | 5,97% | 119,40% | Dindik |
| | Kelulusan UNPK warga belajar | 85% | 89% | 104,71% | 90% | 97% | 107,78% | 95% | 97,01% | 102,12% | |
| | Jumlah LKP terakreditasi | 18% | 20% | 111,11% | 24% | 21% | 87,50% | 30% | 26,09% | 86,97% | |
| Program Pengembangan Pendidikan | Jumlah Sarpras terstandar | 85% | 85% | 100,00% | 90% | 89% | 99,38% | 95% | 95% | 100,00% | Dindik |
| | Jumlah Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi | 50% | 50% | 100,00% | 60% | 59% | 98,77% | 70% | 70% | 100,00% | |
| | Jumlah Sekolah terstandar nasional(SSN) | 92% | 92% | 100,00% | 93% | 100% | 107,53% | 94% | 94% | 100,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pengembangan Taman Pintar | Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar | 78% | 76,47% | 98,04% | 79% | 77% | 97,47% | 80% | 81% | 101,35% | Tapin |
| Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi | Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan | naik 10% | naik 10% | 100,00% | naik 10% | naik 41,26 % | 412,60% | naik 10% | naik 88.63% | 886,30% | Arpusda |
| | Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital | 0:05 | 0,0451389 | 100,00% | 0:05 | 0,0451389 | 100,00% | 0:05 | 1.25:0.5 | 125,00% | |
| | Jumlah TBM di Kota Yogyakarta | 12 | 220 | 1833,33% | 12 | 220 | 1833,33% | 12 | 90 | 750,00% | |
| | Jumlah perpustakaan khusus/instansi | 2 unit | 2 unit | 100,00% | 2 unit | 2 unit | 100,00% | 2 unit | 85 unit | 4250,00% | |
| | Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih | 60 orang | 60 orang | 100,00% | 60 orang | 60 orang | 100,00% | 60 orang | 60 orang | 100,00% | |
| | | | | | | | | | | | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Jumlah pedoman perpustakaan | 2 jenis | 2 jenis | 100,00% | 2 jenis | 2 jenis | 100,00% | 2 jenis | 2 jenis | 100,00% | |
| Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan | 6577 pencaker | 7538 pencaker | 114,61% | 7077 pencaker | 7494 Pencaker | 105,68% | 7577 pencaker | 551 pencaker | 7,27% | Dinsos |
| Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja | Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan | 658 perush | 644 perush | 102,13% | 644 perush | 630 Perush | 102,17% | 630 perush | 630 Perush | 100% | Dinsos |
| Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Menurunnya jumlah penganggur | 16981 orang | 13137 orang | 122,64% | 16561 orang | 15181 Orang | 108,33% | 16141 orang | 15181 Orang | 94,05% | Dinsos |
| Program Pengembangan Kawasan transmigrasi | Prosentase transmigrasi yang ditempatkan | 85 | 5 KK/15 jiwa | 18,75% | 90 | 12 KK/39 jiwa | 43,33% | 95 | 12 KK/39 jiwa | 41,05% | Dinsos |
| Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata | Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan | 3 daerah pasar wisata potensial | 4 daerah pasar wisata potensial | 133,33% | 3 daerah pasar wisata potensial | 6 daerah pasar wisata potensial | 200,00% | 3 daerah pasar wisata potensial | 7 daerah pasar wisata potensial | 233,33% | Parbud |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | stakeholder | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder | 1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder | 3 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder | 200,00% | 1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder | 5 daerah kerjasama, 3 Jejaring kerja dg stakeholder | 400,00% | 1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder | 1 daerah kerjasama, 2 Jejaring kerja dg stakeholder | 150,00% | |
| Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata | 1 odtw | 1 odtw | 100,00% | 1 odtw | 1 odtw | 100,00% | 1 odtw | 1 odtw | 100,00% | Parbud |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata | Naiknya IKM dari 72% menjadi 80% | 76% | 76,77% | 101,01% | 78% | 79,70% | 102,18% | 80% | 82,30% | 102,88% | Parbud |
| Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya | Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/orga nisasi seni dan budaya | 120 kelompok seni budaya | 166 kelompok seni budaya | 138,33% | 120 kelompok seni budaya | 311 kelompok seni budaya | 259,17% | 120 kelompok seni budaya | 251 kelompok seni budaya | 209,17% | Parbud |
| | Cakupan kajian seni | 100% | 160% | 160,00% | 100% | 173% | 173,00% | 100% | 147% | 147,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---------|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Cakupan fasilitasi seni | 93% | 333% | 358,06% | 96% | 286% | 297,92% | 100% | 286% | 286,00% | |
| | Cakupan gelar seni | 100% | 133% | 133,00% | 100% | 294% | 294,00% | 100% | 133% | 133,00% | |
| | Cakupan misi kesenian | 100% | 600% | 600,00% | 100% | 800% | 800,00% | 100% | 400% | 400,00% | |
| | Cakupan SDM kesenian | 100% | 300% | 300,00% | 100% | 400% | 400,00% | 100% | 300% | 300,00% | |
| | Cakupan tempat kesenian | 100% | 600% | 600,00% | 100% | 600% | 600,00% | 100% | 600% | 600,00% | |
| | Cakupan organisasi kesenian | 100% | 294% | 294,00% | 100% | 294% | 294,00% | 100% | 294% | 294,00% | |
| | Tersosialisasikan dan teraktualisasikan nilai-nilai budaya di masyarakat | 4 nilai budaya | 6 nilai budaya | 150,00% | 4 nilai budaya | 7 nilai budaya | 175,00% | 4 nilai budaya | 6 nilai budaya | 150,00% | |
| | Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437BCB/BWB menjadi | 85% | 89% | 104,71% | 90% | 95% | 105,00% | 100% | 98% | 98,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | 600BCB/BWB | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar | Meningkatnya sarana prasarana pasar | 85% | 100% | 117,65% | 85% | 84% | 98,82% | 95% | 92,60% | 97,47% | Dinlopas |
| | Intensitas penanganan sampah pasar | 20' | 30' | 50,00% | 20' | 20' | 100,00% | 15' | 15' | 100,00% | |
| | Menurunnya pelanggaran perda pasar | 40% | 39% | 102,50% | 35% | 40% | 85,71% | 30% | 52,61% | 24,63% | |
| | Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar | 51 | 32 | 137,25% | 51 | 61 | 80,39% | 33 | 34 | 96,97% | |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi | Optimalisasi lahan pasar | 96% | 95,70% | 99,69% | 96% | 96,00% | 100,00% | 100% | 96,00% | 96,00% | Dinlopas |
| | Optimalisasi pengelolaan retribusi | 16 M | 19 M | 118,75% | 14,6 M | 14,9 M | 102,05% | 18 M | 14,9 M | 82,7% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|--|---|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pengembangan Pasar | Peningkatan jumlah pedagang yang dibina | 8.625 | 6.975 | 80,87% | 8625 | 6.070 | 70,38% | 11925 | 11.648 | 97,68% | Dinlopas |
| | Peningkatan frekuensi promosi | 70 | 70 | 100,00% | 70 | 89 | 127,14% | 110 | 110 | 100,00% | |
| Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) | Jumlah pelaku UMKM yg difasilitasi (di luar PEW) | 950 orang | 950 orang | 100,00% | 1050 orang | 2214 orang | 210,86% | 1200 orang | 2214 orang | 184,5% | Perindag koptan |
| | Jumlah pelaku usaha mikro kecil yg difasilitasi | 13.290 orang | 13.290 orang | 100,00% | 14420 orang | 15510 orang | 107,56% | 14920 orang | 15510 orang | 103,95% | |
| Program Peningkatan Perdagangan | meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil | 173 kali | 187 kali | 108,09% | 174 kali | 174 kali | 100,00% | 175 kali | 174 kali | 99,4% | Perindag koptan |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa | 340 | 340 | 100,00% | 340 | 340 | 100,00% | 340 | 340 | 100,00% | Perindag koptan |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan | Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok | 10%: klas kelompok: utama 16, madya 39, lanjut 101 dan pemula 132 | 10%: klas kelompok: utama 16, madya 39, lanjut 101 dan pemula 132 | 100,00% | 10%: klas kelompok: utama 19, madya 45, lanjut 111 dan pemula 133 | 10%;Total 264 kel | 91,67% | 10%: klas kelompok: utama 26, madya 56, lanjut 169 dan pemula 117 | 10%;Total 264 kel | 71,7% | Perindag koptan |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok | 38762,35 kg & pokdakan 80: klas kelompok utama, madya 3, lanjut 14 dan pemula 63 | 37.630,8 kg & pokdakan 80: klas kelompok utama, madya 3, lanjut 14 dan pemula 63 | | 42638,585 kg & pokdakan 90: klas kelompok utama 1, madya 3, lanjut 16 dan pemula 70 | 42.057 Kg & pokdakan 40: klas kelompok 1; madya 7; pemula 32 | | 46902,4435 kg & pokdakan 95: klas kelompok utama 2, madya 4, lanjut 18 dan pemula 71 | 42.057 Kg & pokdakan 40: klas kelompok 1; madya 7; pemula 32 | | Perindag koptan |
| Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | ketepatan waktu penerbitan Izin | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | Dinzin |
| Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban | Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi | 81,21% | 94,25% | 116,06% | 82,21% | 93,95% | 114,28% | 82,21% | 94,20% | 114,58% | Dintib |
| | Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | |
| Program Peningkatan Ketaatan Hukum | Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus) | 180 | 180 | 100,00% | 190 | 190 | 100,00% | 200 | 200 | 100,00% | Dintib |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| Program Perlindungan Masyarakat | Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat | 100% | 50% | 50,00% | 100% | 75,96% | 75,96% | 100% | 96,91% | 96,91% | Dintib |
| | Persentase petugas perlindungan masyarakat | 100% | 113% | 113,00% | 100% | 113% | 113,00% | 100% | 113% | 113,00% | |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Tersedianya luasan RTH publik (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : 14/PRT/M/20 10 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) | 19,21% | 19,02% | 99,01% | 19,71% | 19,05% | 96,65% | 20,21% | 17,68% | 87,48% | BLH |
| | Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta | 14,89% | 14,72% | 98,86% | 14,99% | 14,72% | 98,20% | 15,09% | 14,49% | 96,02% | |
| | Meningkatnya luasan taman kota | 67.180 m2 | 700 m2 | 1,04% | 68.805 m2 | 69.535 m2 | 101,06% | 70.430 m2 | 81.269 m2 | 115,39% | |
| | Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur | 36.237 pohon | 1.770 pohon | 4,88% | 39.737 pohon | 21.387 pohon | 53,82% | 43.237 pohon | 18.882 pohon | 43,67% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | hijau | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW | 135 RW | 56 RW | 41,48% | 180 RW | 66 RW | 36,67% | 225 RW | 33 RW | 0,15% | |
| Program Fasilitasi Pertanahan | Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik | 33 Kel | 33 Kel | 100,00% | 35 Kel | 36 Kel | 102,86% | 37 Kel | 37 Kel | 100,00% | Tapem |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yogyakarta | 11 parameter | 3 parameter | 172,73% | 9 parameter | 7 parameter | 122,22% | 7 parameter | 7 parameter | 100,00% | BLH |
| | Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY Nomor 281/KPTS/1998 | 80 usaha | 32 usaha | 40,00% | 90 usaha | 100 usaha | 111,11% | 100 usaha | 74 usaha | 74,00% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---------|---|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan | 5 parameter | 0 parameter | 200,00% | 4 parameter | 0 parameter | 200,00% | 3 parameter | 3 parameter | 100,00% | |
| | Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup | 150 usaha | 61 usaha | 40,67% | 200 usaha | 178 usaha | 89,00% | 250 usaha | 250 usaha | 100,00% | |
| | Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPL) | 400 usaha | 482 usaha | 120,50% | 425 usaha | 487 usaha | 114,59% | 450 usaha | 74 usaha | 16,44% | |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (Peraturan MENLH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) | 65% | 100% | 153,85% | 70% | 100% | 142,86% | 75% | 100% | 133,33% | |
| Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup | Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan | 27 kelurahan | 29 kelurahan | 107,41% | 36 kelurahan | 35 kelurahan | 97,22% | 45 kelurahan | 45 kelurahan | 100,00% | BLH |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Terlayannya pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai standar SNI | 17 parameter | 14 parameter | 82,35% | 20 parameter | 18 parameter | 90,00% | 24 parameter | 18 parameter | 75,00% | |
| | Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan | 6 menu | 8 menu | 133,33% | 7 menu | 7 menu | 100,00% | 8 menu | 8 menu | 100,00% | |
| | Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan | 263 sekolah | 124 sekolah | 47,15% | 285 sekolah | 165 sekolah | 57,89% | 339 sekolah | 311 sekolah | 91,74% | |
| | Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota | 12 sekolah | 21 sekolah | 175,00% | 15 sekolah | 48 sekolah | 320,00% | 18 sekolah | 51 sekolah | 283,33% | |
| Program Konservasi Sumber Daya Alam | Terpantaunya kualitas air tanah pada sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik) | 280 titik | 715 titik | 255,36% | 300 titik | 162 titik | 54,00% | 320 titik | 242 titik | 75,63% | BLH |

| PROGRAM | INDIKATOR | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | SKPD PENGAMPU |
|---------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PROGRAM | REALISASI KINERJA PROGRAM | TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM | |
| | Terkendalinya penurunan permukaan air tanah | 10 cm | 10 cm | 100,00% | 10 cm | 10 cm | 100,00% | 10 cm | 10 cm | 100,00% | |

2.2.3. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016

A. Kinerja Fisik

Berikut disajikan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja fisik pada tahun 2016

Tabel 2.262
Perbandingan Target dan Realisasi Fisik

| Bulan | Fisik | |
|-----------------------|------------|---------------|
| | Target (%) | Realisasi (%) |
| s.d. 31 Desember 2016 | 100% | 97,7% |

Adapun penyebab tidak tercapainya target fisik 100% adalah adanya belanja yang tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa diprediksi dalam perencanaan sejak awal. Seperti: suku cadang kendaraan, pemeliharaan alat-alat kantor, makan minum tamu, perjalanan dinas dan diklat. Selain itu juga terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai 100% yakni :

Tabel 2.263
Kegiatan Yang Tidak Mencapai 100%

| No | Nama Kegiatan | Output/Keluaran | Keterangan |
|----|--|--|---|
| 1. | Pembangunan Kantor Inspektorat | Pembangunan Kantor Inspektorat | Putus kontrak dengan progres fisik konstruksi 53,9% Nilai Kontrak Rp 4.435.151.000 Nilai Pagu Rp 4.825.000.000,00 |
| 2. | Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat | Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wil. Barat (Kec Jetis) | Putus kontrak dengan progres fisik konstruksi 87,86% Nilai Kontrak Rp 2.700.000.000 Nilai Pagu Rp 3.300.000.000,00 |
| 3 | Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur | Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD | Putus kontrak rehab SD Tegalpanggung dengan progres fisik konstruksi 46,69% Nilai Kontrak Rp 1.902.647.000 Nilai Pagu Rp 2.050.000.000,00 |
| 4 | Rehabilitasi Puskesmas | Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Bener serta Kantor Kelurahan Bener | Putus kontrak, progress fisik konstruksi 29,51% Nilai Kontrak Rp 2.516.070.600 Nilai Pagu Rp 2.850.000.000,00 |

Keempat pekerjaan tersebut putus kontrak dan dibayarkan sesuai progres fisik dan pada tahun anggaran 2017 sudah dianggarkan untuk penyelesaian keempat pekerjaan tersebut. Adapun faktor penghambatnya adalah penyedia tidak bisa memaksimalkan percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis mengingat waktu pelaksanaan yang disediakan relatif singkat dimana pekerjaan tersebut berakhir pada tata kala akhir tahun anggaran.

Adapun jika dilihat dari sisi pengadaan barang/jasa, kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.264
Relalisasi Paket Pengadaan Yang Dilelangkan

| Jumlah Paket Pengadaan 2016 (Yang Harus melalui lelang) | Realisasi Jumlah Paket selesai lelang s.d. Akhir 2016 | Total Pagu Seluruh Paket Pengadaan(Rp) (Yang Harus melalui lelang) | Realisasi Paket yang selesai lelang s.d. Akhir 2016 (dalam Rp) |
|--|--|---|---|
| 225 paket | 214 paket | Rp 216.948.456.260,- | Rp 207.650.413.260,- |

Beberapa paket yang mengalami lelang gagal yakni :

-) Belanja modal alat pemadam kebakaran (sarung tangan, baju, pagu Rp 544.000.000,- →dikarenakan waktu yang tidak mencukupi
-) Pemeliharaan trotoar Jl. C Simanjuntak, pagu Rp 289.575.000,00→ tidak ada yang menawar, di lokasi tersebut dinilai oleh penyedia risiko sosial tidak sebanding dengan nilai paket (dianggarkan lagi di tahun 2017).
-) Perkuatan dan Perbaikan Struktur UPT Bisnis Tahap I, pagu Rp 1.750.000.000,00→apabila dilakukan pelelangan ulang waktu pelaksanaan tidak mencukupi. (dianggarkan kembali di tahun anggaran 2017)
-) Konsultasi Pengembangan Support Manajemen Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu Rp 105.000.000,00→ efisiensi anggaran (pada tahun 2017 tidak dianggarkan untuk jasa konsultasi melainkan pelaksanaan swakelola monitoring SPIP)
-) Sedangkan sisa 7 paket tidak dilaksanakan dengan pertimbangan efisiensi (belum dilimpahkan ke ULP namun sudah tertuang di RUP)

Tabel 2.265
Paket Pekerjaan Yang Belum Dilimpahkan ke ULP

| No | SKPD | Kegiatan | Pekerjaan | Nilai Pagu (Rp) |
|-----------|-------------------|---|--|------------------------|
| 1 | Rumah Sakit Jogja | Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan PACS (Sumber Dana APBD) | 1.790.000.000 |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|------------------------|
| 2 | Rumah Sakit Jogja | Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Paket Non E-Catalog(Sumber Dana DAK Sarpras) | 3.150.000.000 |
| 3 | Kantor Kesatuan Bangsa | Pembinaan dan pengembangan keolahragaan | Belanja pakaian olahraga | 263.100.000 |
| No | SKPD | Kegiatan | Pekerjaan | Nilai Pagu (Rp) |
| 4 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian | Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) | Belanja Pengadaan Alat untuk Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016 | 610.000.000 |
| 5 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian | Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan | Pelatihan Animasi di BCIC/BDI Denpasar | 280.000.000 |
| 6 | Dinas Pengelolaan Pasar | Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis | Pengadaan Travo UPT Pusat Bisnis | 400.000.000 |
| 7 | Sekretariat DPRD | Penjaringan Aspirasi Masyarakat | Belanja Cetak (cetak majalah sebanyak 16.000 eks) | 208.000.000 |

B. Kinerja Keuangan

Untuk kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada realisasi belanja langsung berikut ini :

Tabel 2.266
Realisasi Belanja Langsung

| Bulan | Jenis Belanja | Keuangan (Belanja Langsung) | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi*(Rp) | Realisasi* (%) |
| s.d. 31 Desember 2016 | Belanja Pegawai | 171.747.019.722,00 | 100 | 165.010.870.392,28 | 96,08 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 521.782.567.591,00 | 100 | 468.194.525.280,18 | 89,73 |
| | Belanja Modal | 287.443.350.391,00 | 100 | 258.987.412.638,97 | 90,10 |
| | TOTAL | 980.972.937.704,00 | 100,00 | 892.192.808.311,43 | 90,95 |

Penyebab deviasi untuk belanja pegawai adalah adanya honor yang tidak terealisasi dikarenakan personil yang cuti, diklat, mutasi, tugas belajar, dan pensiun. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, deviasi dikarenakan adanya belanja yang tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa diprediksi dalam perencanaan sejak awal. Seperti: suku cadang kendaraan, pemeliharaan alat-alat kantor, makan minum tamu, perjalanan dinas dan diklat. Untuk belanja modal, rendahnya penyerapan anggaran keuangan disebabkan adanya pengadaan barang jasa yang lelang gagal, gagal lelang, dan tidak selesai 100% secara fisik.

2.3. Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Bidang Sosial

A. Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

AKI di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun dengan AKI tertinggi adalah pada tahun 2013 (sebesar 204,3) dan tahun dengan AKI terendah adalah tahun 2014 (sebesar 45,78). AKI mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2012-2013 dan 2014-2015, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2016. Fluktuasi angka kematian ibu melahirkan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan kecukupan gizi bagi ibu hamil menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar risiko kematian ibu saat melahirkan dapat berkurang.

Meskipun Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta cenderung naik turun tetapi nilainya cukup besar (melebihi angka 100 per 100.000 kelahiran hidup), kecuali pada tahun 2014. Tingginya Angka Kematian Ibu dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan saat menjelang melahirkan saja sehingga meningkatkan resiko bagi ibu dan bayi. Selain itu, adanya penyakit menular juga menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, serta Program P4K yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya.

Pada tahun 2014, jumlah kematian ibu melahirkan menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanya manual rujukan untuk periksa kehamilan maupun melahirkan. Selain itu, terdapat dukungan biaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan, serta kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Kenaikan AKI pada tahun 2015, kemungkinan disebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko

kematian. Kematian Ibu melahirkan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 beberapa diantaranya disebabkan oleh penyakit TBC Milier, TBC HIV, pendarahan, dan sepsis. Penyakit yang menyebabkan kematian ibu tersebut dominan dialami oleh ibu yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta tetapi melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta.

Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta yang cenderung naik turun pada kurun waktu 2012-2016, sama halnya dengan capaian target Angka Kematian Ibu pada kurun waktu yang sama. Ketika jumlah kematian ibu meningkat, maka capaian target Angka Kematian Ibu menjadi turun.

Tingginya Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2016 sesungguhnya tidak sepenuhnya mencerminkan bahwa seluruh kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta ini dialami oleh ibu melahirkan yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan tidak semua ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta merupakan penduduk yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Jumlah ibu melahirkan di Kota Yogyakarta mungkin tidak terkait langsung dengan jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) ke Kota Yogyakarta. Namun, jika ditinjau dari jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) ke Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016, jumlah penduduk perempuan yang berpindah ke Kota Yogyakarta semakin meningkat dan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang datang (migrasi masuk) pada kurun waktu yang sama. Jika jumlah penduduk perempuan yang masuk ke Kota Yogyakarta terus meningkat hingga beberapa tahun ke depan dengan tidak disertai kondisi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang memadai, maka ketika para penduduk perempuan ini melahirkan di Kota Yogyakarta dapat berpotensi meningkatkan Angka Kematian Ibu.

Sebenarnya terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan tingginya Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan penyebabnya, faktor-faktor yang memicu tingginya Angka Kematian Ibu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung menjadi mayoritas penyebab kematian ibu yang diantaranya terdiri dari perdarahan, eklamsi, infeksi, dan persalinan macet. Sementara itu, terdapat penyebab tidak langsung, misalnya usia ibu yang terlalu tua saat melahirkan (>35 tahun), usia ibu yang terlalu muda saat melahirkan (akibat pernikahan dini maupun kehamilan di luar nikah), terlalu sering melahirkan (jeda waktu antarkelahiran terlalu dekat), terlambat mengetahui bahaya kehamilan, terlambat dalam memutuskan ke fasilitas untuk melahirkan, serta terlambat mendapatkan fasilitas untuk melahirkan. Upaya-upaya yang

dapat dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu antara lain dengan meningkatkan kualitas dan cakupan layanan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan serta menjamin terpenuhinya kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil hingga saat melahirkan.

2. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Kematian perinatal menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa 7 hari setelah persalinan. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun 2012-2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, kemudian menurun pada tahun 2015-2016. Pertumbuhan rata-ratanya adalah -8,00% per tahun dengan penurunan dari 10,90 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 7,81 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi.

Realisasi kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta yang naik turun juga menyebabkan capaian target dari Angka Kematian Bayi ikut mengalami naik turun. Ketika angka kematian bayi meningkat, maka realisasinya menjadi turun.

Perkembangan angka kematian bayi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dengan capaian target indikator belum mencapai angka 100%. Capaian target tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 86,19%, tetapi kembali turun menjadi 83,43% di tahun 2016. Melihat capaian target angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup yang cenderung fluktuatif tersebut mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak terpenuhinya capaian target indikator tersebut diantaranya tingginya kasus kehamilan yang tidak diinginkan (orangtua yang merasa malu untuk memeriksakan kandungan sehingga tidak terdeteksinya kesehatan bayi). Selain itu, masih kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang mempunyai sarana NICU. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang kemungkinan

menyebabkan Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir, hal ini memerlukan analisis lebih lanjut.

3. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematian Balita menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Berikut merupakan data capaian target angka kematian balita di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

Tabel 2.267

Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator Kinerja | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|------|
| 1 | Target | % | 1,90 | 1,80 | 1,60 | 1,50 | 1,30 |
| 2. | Realisasi | % | 1,50 | 2,27 | 1,60 | 1,51 | 2,60 |
| 3 | Capaian Target | % | 121,05 | 73,89 | 100,00 | 99,33 | 0,00 |

Sumber :

- 1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016); Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017
- 2) Hasil Olahan, 2017

Angka kematian balita dalam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Berdasarkan hasil analisis, capaian target indikator kematian balita sudah mencapai angka 100% pada tahun 2014. Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut antara lain disebabkan oleh (1) adanya dukungan biaya dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan dan, (2) kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lain yang sangat mudah. Namun, capaian target menurun drastis pada tahun 2016 ketika realisasi angka kematian bayi justru 2 kali lipat dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan target (angka target yang makin kecil) selama 5 tahun terakhir belum bisa diimbangi.

B. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan. Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dievaluasi tiap tahunnya. Laporan evaluasi atas pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi dilakukan dengan mengisi form yang kemudian dinilai oleh pusat. Berikut adalah aspek Road Map Reformasi Brokrasi yang mengalami perubahan dari tahun 2015 dan 2016. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.249
Perkembangan Laporan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016

| POIN PENILAIAN | TAHUN 2015 | DOKUMEN PENDUKUNG | TAHUN 2016 | DOKUMEN PENDUKUNG |
|---|---|---|---|--|
| MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi | Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road map | Notulen penyusunan Road map | Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road map | SK Tim keseluruhan dan notulen |
| Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi | Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Komitmen Walikota dalam bentuk adanya kebijakan-kebijakan pendukung RB seperti Perwal Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kepwal Nomor 441 Tahun 2014 tentang Pembentukan Agen perubahan Reformasi Birokrasi | Sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perwal budaya pemerintahan 58 tahun 2015 tentang budaya pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, setiap SKPD mempunyai kelompok kerja budaya pemerintahan, SE Nomor: 130/87/SE/2015 tentang budaya pemerintahan. sudah 70% SKPD yang membuat. |
| PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron | Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis | Rekapitulasi data peraturan perundang-undangan yang sudah direvisi/disempurnakan | Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai | Data rekapitulasi produk hukum daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan Kesepakatan Prolegda Tahun 2015 |
| Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan | Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan, | SOP produk hukum masih berupa Keputusan Kepala Bagian Hukum blm berupa | Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian | SOP produk hukum Bagian Hukum Nomor Contoh dokumen proses peraturan |

| POIN PENILAIAN | TAHUN 2015 | DOKUMEN PENDUKUNG | TAHUN 2016 | DOKUMEN PENDUKUNG |
|---|--|--|--|--|
| adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan Paraf Koordinasi | | Keputusan Walikota, Jadwal kegiatan jasa konsultasi dan SE 065/13/SE/2014 | diimplementasikan | perundangan dan notulen rapat pembahasan |
| Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan | Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala | Notulen rapat koordinasi | Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala | Data hasil evaluasi |
| PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI | | | | |
| Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja | Perwal 57 tahun 2013: Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Di Pemerintah Kota Yogyakarta | elah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja | Hasil evaluasi implementasi Perwal 57 th 2013 |
| PENATAAN TATALAKSANA | | | | |
| Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi | Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi | Dokumen Peta Proses Bisnis/Mekanisme Kerja | Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi | Dokumen peta proses bisnis/mechanisme kerja. Perwal pedoman penyusunan tatalaksana, SE Nomor 060/...., Workshop, Keputusan kepala SKPD tentang penetapan proses bisnis |
| PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | | | | |
| Telah dilakukan asesment kepada pegawai | Telah dilakukan asesment kepada sebagian kecil pegawai | Daftar jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti assesmen psikologi | Telah dilakukan asesment kepada sebagian besar pegawai | Laporan Asesor kepada Ka.BKD Kota Yogyakarta perihal susunan hasil Pelaksanaan |

| POIN PENILAIAN | TAHUN 2015 | DOKUMEN PENDUKUNG | TAHUN 2016 | DOKUMEN PENDUKUNG |
|--|---|--|---|--|
| | | | | <p>Asesmen Psikologis Tahun 2004 s/d 2014 Pegawai yang mengikuti Assesment : Tahun 2004 s/d 2014 sebanyak 1165 orang -Surat Ka.BKD No x 812 / 021 tanggal 20 Januari 2016 perhal : Laporan Hasil Asesmen Psikologis Tahun 2015 - Surat Ka.BKD No x 893 / 080 tanggal 15 Maret 2016 perihal: Laporan Hasil Asesmen Psikologis Tahun 2015 Pegawai yang mengikuti asesmen Tahun 2015</p> <p>Sebanyak 75 orang dan 87 orang Rencana tahun 2016 : 140 orang (Sudah Dilaksanakan 2 angkatan) Nama, NIP dan jabatan pegawai yang telah mengikuti assessment termuat didalam Surat Laporan Hasil Asesmen</p> |
| Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan | Tidak terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan | Tidak ada bukti dukung terkait hal ini | Terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan | Dokumen terkait Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan dengan Perwal No 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan Perwal No 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal No 63 Tahun 2015 tentang tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka |

| POIN PENILAIAN | TAHUN 2015 | DOKUMEN PENDUKUNG | TAHUN 2016 | DOKUMEN PENDUKUNG |
|--|--|--|--|---|
| Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan | Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi | Tidak ada bukti dukung terkait hal ini | Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi | Pengumuman Ketua Pansel JPT Pratama No 01/Pansel/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkot Tahun 2016 |
| Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif | Belum ada pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif | Tidak ada bukti dukung terkait hal ini | Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama | Kriteria dan tatacara Seleksi JPT termuat dlm Pengumuman Ketua Pansel JPT Pratama No 01/Pansel/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkot Tahun 2016 |
| Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen | Belum ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen | Tidak ada bukti dukung terkait hal ini | Diitetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen | Kepwal No 434 Tahun 2015 Tentang pembentukan Panitia Seleksi JPT Pratama di Pemkot Kepwal No 259 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi JPT Pratama Pemkot Yk Tahun 2016 Nama dan Jabatan anggota Tim Seleksi termuat dalam lampiran Kepwal |
| Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka | Belum ada tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb | Tidak ada bukti dukung terkait hal ini | Tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb | Tahap2 seleksi; jumlah tahap: ada 3 tahap pengumuman 1. Pengumuman Lowongan JPT Pratama tgl 21 maret 016 s/d 30 maret 016 2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi tanggal 4 april 2016 3. Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka tanggal 27 April 2016 |

| POIN PENILAIAN | TAHUN 2015 | DOKUMEN PENDUKUNG | TAHUN 2016 | DOKUMEN PENDUKUNG |
|--|---|--|---|---|
| Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya | Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya | Tapkin, DPA, Renja, RKT, SKP | Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya | Naskah dinas/dokumen hasil evaluasi kesesuaian ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu di atasnya; prosentase yang memiliki ukuran yang sesuai Menunggu E-Kinerja |
| Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) | Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi | Data PNS yg dijatuhi hukuman disiplin. SPJ TPP setiap bulan di masing-masing SKPD | Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi | Belum ada data terkait penerapan reward dan punishment untuk skala unit organisasi |
| Kelas jabatan telah ditetapkan | Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan | Pemkot Yk sudah mengirimkan hasil evaluasi jabatan ke Menpan RB, tetapi sampai saat ini hasil validasi blm turun | Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan | Surat Walikota Yogyakarta kepada Men PAN Nomor 800/3939 tanggal 5 November 2015 perihal Usulan Validasi Hasil Evaluasi Jabatan |
| PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik | Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi | SPK dengan pihak ketiga terkait pembangunan sistem e-LAKIP | Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi | Printscreen SIM E-lakip |
| Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit | Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi | Belum ada bukti dukung yang terkait | Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi | sistem E-lakip |
| PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi | Belum terdapat evaluasi atas kebijakan | Belum ada bukti dukung | Terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan | Dokumen hasil evaluasi implementasi kebijakan |

| POIN PENILAIAN | TAHUN 2015 | DOKUMEN PENDUKUNG | TAHUN 2016 | DOKUMEN PENDUKUNG |
|--|--|---|---|---|
| | penanganan gratifikasi | | gratifikasi | pedoman pengendalian gratifikasi |
| Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti | Belum terdapat laporan tindak lanjut | Belum ada bukti dukung | Terdapat laporan tindak lanjut | Dokumen laporan tindak lanjut penanganan gratifikasi |
| Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Dokumen RTP, Dokumen hasil monev SPIP Th 2014 | Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Dokumen Hasil Monev 2015 |
| Whistle Blowing System telah disosialisasikan | Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi | Belum ada bukti dukung | Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi | Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi baru sebagian kecil : pada forum koordinasi, konsultasi, pelaksanaan audi |
| Whistle Blowing System telah diimplementasikan | Kebijakan whistle blowing system belum diimplementasikan | Belum ada bukti dukung | Kebijakan <i>whistle blowing</i> system telah diimplementasikan | Print screen WBS |
| Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan | Belum terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan | Baru disusun draft perwal tentang Penanganan Benturan Kepentingan | Terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan | Perwal Yk No.17 Th.2015 tentang pengaturan benturan kepentingan di Pemkot Yogyakarta |
| Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan | Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi | Baru disusun draft perwal tentang Penanganan Benturan Kepentingan | Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi | Sosialisasi ke seluruh SKPD (daftar hadir, notulen) |
| Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Belum Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Baru disusun draft perwal tentang Penanganan Benturan Kepentingan | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | SKPD membuat identifikasi benturan kepentingan |

| POIN PENILAIAN | TAHUN 2015 | DOKUMEN PENDUKUNG | TAHUN 2016 | DOKUMEN PENDUKUNG |
|--|---|---|--|---|
| Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi | Baru disusun draft perwal tentang Penanganan Benturan Kepentingan | Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala | Dokumen hasil evaluasi implementasi kebijakan pengaturan benturan kepentingan |
| Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti | Baru disusun draft perwal tentang Penanganan Benturan Kepentingan | Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi |
| APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. | Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas | Dokumen hasil leveling tatakelola APIP catatan: untuk kuantitas dukungan PFA <30% hasil anjab | Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas | Rekapitulasi jumlah SDM, data Diklat, Dokumen penilaian leveling APIP |
| PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) | Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima | Sertifikat service excellent, Laporan kegiatan Forkompanda | Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima | Laporan kegiatan (forkompanda, sosialisasi budayakerja, workshop pelayanan publik, workshop PPK BLUD) |

Sumber: Hasil Laporan Evaluasi Tahap 3 Tahun 2015 dan 2016

Evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Road Map Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta adalah berupa masukan untuk 8 area perubahan. Masukan untuk area Manajemen Perubahan adalah belum dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan “agen perubahan” sebagai upaya untuk melakukan perubahan pola pikir aparatur. Kemudian untuk area peraturan perundang-undangan adalah mengenai kajian atas peraturan perundangan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta belum optimal terutama terkait dengan identifikasi berbagai kebijakan yang tidak selaras, tidak lagi diperlukan serta kebijakan yang bersifat lintas sektor. Yang kedua adalah evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala. Untuk area Penataan dan Penguatan Organisasi masukan yang diberikan mengenai struktur organisasi yang belum sepenuhnya relevan dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD. Sementara untuk area Penataan Tatalaksana tercatat baru sebagian kecil unit organisasi yang telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian hasil evaluasi atas bisnis proses dan SOP belum menunjukkan efisiensi dan efektivitas. Masukan pada Sistem Manajemen SDM tercatat belum dilakukan asesmen pada seluruh pegawai, kinerja individu belum sepenuhnya memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta penilaian kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi. Pada area Penguatan akuntabilitas, catatan yang diberikan antara lain sasaran dan indikator kinerja beberapa SKPD masih belum berorientasi hasil, Tujuan belum dilengkapi dengan indikator dan target. Selanjutnya monitoring atas rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala, serta belum dilakukan perjanjian kinerja secara berjenjang/cascade. Untuk area Penguatan Pengawasan, evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penanganan benturan kepentingan, whistle blowing system serta penanganan gratifikasi. Kemudian perlu dilakukan monev terkait pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD. Terakhir, area Peningkatan Kualitas Pelayanan memiliki catatan belum terdapatnya sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar serta belum dilaksanakan evaluasi terhadap SOP pelayanan.

Berikut adalah penilaian yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait 8 area perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta.

Tabel 2.250
Nilai 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016

| No | Area Perubahan | Nilai 2015 | Nilai 2016 (Sementara) |
|----|------------------------------|------------|------------------------|
| 1 | Manajemen Perubahan | 3,13 | 3,44 |
| 2 | Peraturan Perundang-undangan | 2,71 | 2,71 |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 1,66 | 2,16 |
| 4 | Penataan Tatalaksana | 3,09 | 3,63 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 11,67 | 11,89 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 4,15 | 4,57 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 6,79 | 7,82 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 4,20 | 4,91 |
| Total | | 37,39 | 41,13 |

Sumber: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Kota Yogyakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait reformasi birokrasi, maka selama 2015-2016 terjadi peningkatan nilai yang diperoleh Kota Yogyakarta terkait reformasi birokrasi, yakni dari 37,39 tahun 2015 menjadi 41,13 tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan reformasi birokrasi sudah mengalami perkembangan yang lebih baik, ditunjukkan dengan peningkatan yang cukup baik. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah membuat tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 oleh Kementerian PAN dan RB. Tindak lanjut terhadap catatan dari masing-masing area perubahan dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

Tabel 2.251
Matriks Tidaklanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

| No. | Area Perubahan | Catatan | Tindak lanjut | OPD Pengampu | Keterangan |
|-----|--|--|---|---|---|
| 1 | Area Manajemen Perubahan | <ul style="list-style-type: none">) Belum dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan “agen perubahan” sebagai upaya untuk melakukan perubahan pola pikir aparatur. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan evaluasi manfaat “agen perubahan” menggunakan alat ukur yang sesuai) Melaksanakan perubahan keputusan Walikota Yogyakarta tentang Agen Perubahan sebagai tindaklanjut dari hasil perubahan organisasi perangkat daerah) Melaksanakan identifikasi lingkungan kerja dan menyusun rencana aksi) Menambah agen perubahan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah) Melaksanakan Workshop Agen Perubahan | Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta | Tahun 2017 |
| 2 | Area peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none">) Kajian atas peraturan perundangan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta belum optimal terutama terkait dengan identifikasi berbagai kebijakan yang tidak selaras, tidak lagi diperlukan serta kebijakan yang bersifat lintas sektor.) Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan pendataan produk hukum yang berupa perda dan perwal yang masih berlaku) Menyusun Peraturan Walikota tentang proses penyusunan produk hukum daerah untuk level kota sesuai dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015) Melaksanakan Bimtek <i>Regulatory Impact Assesment</i> tentang Harmonisasi Produk Hukum) Melaksanakan Harmonisasi Produk Hukum | Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta | <p>Bimtek RIA Tahun 2017 dengan menggunakan anggaran perubahan</p> <p>Harmonisasi produk hukum tahun 2018</p> |
| 3 | Area Penataan dan Penguatan Organisasi | <ul style="list-style-type: none">) Struktur organisasi yang belum sepenuhnya relevan dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan evaluasi Kelembagaan disesuaikan dengan RPJMD) Melaksanakan Evaluasi Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah | Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta | Tahun 2017 |
| 4 | Area Sistem Manajemen SDM | <ul style="list-style-type: none">) Belum dilakukan asesmen pada seluruh pegawai. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan Asesment untuk golongan IIIb keatas | Badan Kepegawaian, | Tahun 2017 |

| No. | Area Perubahan | Catatan | Tindak lanjut | OPD Pengampu | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | Pendidkan, dan Pelatihan Kota Yogyakarta | |
| | | <ul style="list-style-type: none">) Kinerja individu belum sepenuhnya memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.) Penilaian kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan Asesment ulang untuk calon Jabatan Pimpinan Tinggi) Melaksanakan Tunjangan Kinerja | Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta | Tahun 2017 |
| 5 | Area Penguatan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none">) Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penanganan benturan kepentingan <i>whistle blowing system</i>, serta penanganan gratifikasi.) Perlu dilakukan monev terkait pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan Sosialisasi <i>Wistle Blowing System</i>) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan) Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi SPIP | Inspektorat Kota Yogyakarta | Sosialisasi WBS Tahun 2017 |
| 6 | Area Peningkatan Kualitas Pelayanan | <ul style="list-style-type: none">) Belum terdapatnya sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.) Belum dilaksanakan evaluasi terhadap SOP pelayanan. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan penyusunan Peraturan Walikota tentang <i>reward and punishment</i> pelayanan untuk pelaksana pelayanan) Melaksanakan Evaluasi SOP Pelayanan Publik | Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta | Tahun 2017 |
| 7 | Area Penataan Tatalaksana | <ul style="list-style-type: none">) Baru sebagian kecil unit organisasi yang telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.) Hasil evaluasi atas bisnis proses dan SOP belum menunjukkan efisiensi dan efektivitas. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan evaluasi proses bisnis) Melaksanakan <i>Workshop</i> proses bisnis untuk OPD yang baru) Melaksanakan perubahan Peraturan Walikota tentang penyusunan proses bisnis) Melaksanakan evaluasi SOP dengan menyederhanakan nama jabatan | Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta | Evaluasi Proses Bisnis Tahun 2017 |

| No. | Area Perubahan | Catatan | Tindak lanjut | OPD Pengampu | Keterangan |
|-----|------------------------------|---|--|-------------------------|------------|
| 8 | Area Penguatan akuntabilitas | <ul style="list-style-type: none">) Sasaran dan indikator kinerja beberapa SKPD masih belum berorientasi hasil.) Tujuan belum dilengkapi dengan indikator dan target.) Monitoring atas rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala.) Belum dilakukan perjanjian kinerja secara berjenjang/cascade. | <ul style="list-style-type: none">) Melaksanakan penyusunan dan penyesuaian RPJMD) Melaksanakan Penyusunan <i>Cascading</i>) Melaksanakan Integrasi SIM SAKIP) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Akuntabilitas | Bappeda Kota Yogyakarta | |

Sumber: Tindaklanjut Evaluasi RB oleh Kemenpan dan RB, 2017

C. Kependudukan

1. Natalitas

Analisis kependudukan mengenai natalitas dapat dilakukan dengan melihat kecenderungan jumlah bayi lahir hidup. Jumlah bayi lahir hidup di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, jumlah bayi lahir hidup mencapai 4.658 jiwa, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 3.841 pada tahun 2016. Dugaan menurunnya jumlah kelahiran bayi adalah dikarenakan berhasilnya program keluarga berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta serta meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat. Jumlah peserta KB aktif pada tahun 2016 mencapai 44.454 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 6,63 persen per tahun. Sedangkan meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat ini ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 dengan rata-rata pertumbuhan 8,05 persen. Melihat kondisi tersebut masyarakat cenderung tidak memiliki jumlah anak yang banyak.

2. Migrasi

Migrasi baik masuk maupun keluar dibagi dalam 5 kategori yakni migrasi dalam satu desa/kelurahan, migrasi antar desa/kelurahan, migrasi antar kecamatan, migrasi antar kabupaten/kota dan migrasi antarprovinsi.

a. Migrasi Masuk Per Kecamatan Per Bulan Tahun 2016

Kondisi migrasi masuk tiap bulan cenderung fluktuatif selama tahun 2016. Migrasi masuk paling sedikit terjadi pada bulan Juli dengan jumlah jiwa 698 dengan rincian 9 jiwa dalam satu desa/kelurahan, 24 jiwa antar desa/kelurahan, 114 jiwa antar kecamatan, 171 jiwa antar kabupaten/kota dan 380 jiwa antarprovinsi. Dugaan migrasi masuk tertinggi akan terjadi di bulan Juni-Juli sepertinya tidak relevan dengan data. Migrasi masuk pada bulan Juni dan Juli saat tahun ajaran baru pendidikan dasar dan menengah cenderung stabil yakni 1.051 jiwa pada bulan Juni dan 698 jiwa pada bulan Juli. Namun demikian jika melihat migrasi masuk yang cukup tinggi bulan Maret-April, dapat diartikan bahwa pada bulan tersebut merupakan saat bagi migran yang akan masuk ke Kota Yogyakarta untuk bersekolah mempersiapkan tempat tinggal atau domisili terlebih dulu. Migrasi masuk tertinggi terjadi di bulan September dengan jumlah 1.362 jiwa dengan rincian 72 jiwa antar desa/kelurahan, 216 jiwa antar kecamatan, 418 jiwa antar

kabupaten/kota dan 656 jiwa Antarprovinsi. Pada bulan ini masyarakat yang masuk ke Kota Yogyakarta mayoritas berasal dari kabupaten/ kota dan provinsi lain. Untuk kecamatan dengan jumlah migrasi masuk tertinggi adalah Kecamatan Umbulharjo (2.336 jiwa) dan kecamatan dengan jumlah migrasi masuk terendah adalah Kecamatan Pakualaman (322 jiwa).

Tingginya migrasi masuk ke Kecamatan Umbulharjo salah satu faktor penyebab karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan terluas di Kota Yogyakarta dengan total area 812 hektar. Kemudian juga merupakan kecamatan dengan jumlah industri besar dan sedang terbanyak di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2013 jumlah industri besar di Kecamatan Umbulharjo sebanyak 4 buah dan jumlah industri sedang sebanyak 11 buah (Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2016: 260), yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang terkait dengan industri. Kemudian migrasi tertinggi kedua ada di Kecamatan Gondokusuman. Dugaan tingginya jumlah migrasi yang terjadi di Kecamatan Gondokusuman adalah letaknya yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi sehingga dapat dipahami jika banyak migrasi yang dilakukan di daerah tersebut. Sementara migrasi terendah ada di Kecamatan Pakualaman yang merupakan kecamatan dengan luas terkecil (63 hektar) di Kota Yogyakarta.

b. Migrasi Keluar per Kecamatan per Bulan Tahun 2016

Tidak berbeda dengan kecenderungan migrasi masuk, kondisi migrasi keluar tiap bulan juga cenderung fluktuatif selama tahun 2016. Migrasi keluar paling sedikit terjadi pada bulan Juli dengan jumlah jiwa 737 dengan rincian 5 jiwa dalam satu desa/kelurahan, 20 jiwa antar desa/kelurahan, 104 jiwa antar kecamatan, 296 jiwa antar kabupaten/kota dan 312 migrasi antarprovinsi. Bulan Juni-Juli merupakan tahun ajaran baru pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dapat menunjukkan kecenderungan masyarakat tetap berada di Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan urusan terkait persiapan tahun ajaran baru pendidikan.

Sementara migrasi keluar tertinggi terjadi di bulan September dengan jumlah 1.450 jiwa dengan rincian 67 jiwa migrasi antar desa/kelurahan, 201 jiwa antar kecamatan, 687 jiwa antar kabupaten/kota dan 495 jiwa antarprovinsi. Pada bulan ini masyarakat yang keluar dari Kota Yogyakarta mayoritas menuju kabupaten/kota lain kemudian diikuti dengan migrasi keluar ke

provinsi lain. Untuk kecamatan dengan jumlah migrasi keluar tertinggi adalah Kecamatan Umbulharjo (1.868 jiwa) dan kecamatan dengan jumlah migrasi keluar terendah adalah Kecamatan Pakualaman (286 jiwa).

c. Migrasi Masuk dan Keluar Antar Provinsi per Kecamatan Tahun 2016

Kecenderungan masing-masing kecamatan dalam melakukan migrasi masuk dan keluar antarprovinsi tidak jauh berbeda dengan kecenderungan migrasi masuk dan keluar antar kabupaten/kota. Kecamatan Umbulharjo menjadi kecamatan tertinggi yang melakukan migrasi baik migrasi masuk maupun keluar. Migrasi masuk sangat tinggi yakni 1.115 jiwa, sementara migrasi keluar sebanyak 694 jiwa. Kemudian Kecamatan Gondokusuman kembali menjadi kecamatan dengan migrasi tertinggi kedua yang memiliki jumlah migrasi masuk sebanyak 634 jiwa dan migrasi keluar 634 jiwa. Sementara Kecamatan Pakualaman dengan luas wilayah terkecil juga menjadi yang paling sedikit dalam migrasi antarprovinsi baik masuk (154 jiwa) maupun keluar (83 jiwa). Hal ini mengisyaratkan bahwa Kecamatan Pakualaman tidak menjadi kecamatan tujuan bagi para migran, selain karena luas wilayah yang cukup kecil, dengan kepadatan cukup tinggi tidak memungkinkan menjadi tempat tinggal baru bagi para migran. Secara umum dapat dilihat bahwa jumlah migrasi masuk Antarprovinsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah migrasi keluar antarprovinsi. Tingginya migrasi masuk antarprovinsi dapat dipahami karena Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, yang menjadikan daya tarik kota ini.

3. Bidang Ekonomi

A. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Jika nilai Indeks Gini semakin mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, jika Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2012-2015 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14% per tahun. Peningkatan Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin besar. Peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah. Meski demikian, ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta masih tergolong dalam kategori moderat.

B. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Indikator lain yang menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Dalam versi Bank Dunia, pendapatan penduduk dikategorikan menjadi 3 kelompok pendapatan, yaitu kelompok 40% berpendapatan terendah, 40% berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaran bagian pendapatan yang dapat dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

4. Ketimpangan rendah → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima >17% jumlah pendapatan
5. Ketimpangan moderat → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12-17% jumlah pendapatan
6. Ketimpangan tinggi → 40% penduduk berpendapatan terendah menerima <12% jumlah pendapatan.

Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadi fokus penggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menikmati $\geq 17\%$ dari total pendapatan yang ada.

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kota Yogyakarta memiliki persentase pendapatan yang terus menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata -7,96% pertahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah ada pada kategori ketimpangan rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan mereka masih wajar dan belum menunjukkan ketimpangan dengan penduduk yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Namun, pada tahun 2013 persentase tersebut turun menjadi 15,57%. Jumlah tersebut terus menurun sampai tahun 2014 menjadi 15,18% dan sedikit naik menjadi 14,01% di tahun 2015. Pada kedua tahun tersebut

persentase pendapatan penduduk dengan penghasilan 40% terbawah termasuk dalam kategori ketimpangan moderat.

Pertumbuhan pendapatan antara penduduk dengan pendapatan 40% terbawah dengan penduduk yang berpendapatan 20% teratas tidak sebanding karena penduduk dengan penghasilan 20% teratas tumbuh lebih cepat. Itu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, besarnya ketimpangan pendapatan dari kelompok-kelompok penduduk yang ada perlu diperhatikan agar kesenjangan/ketimpangan pendapatan tidak semakin besar.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah dan representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB per kapita Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2012-2015 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,05% per tahun. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Kota Yogyakarta adalah sebesar 51,65 juta rupiah dan meningkat menjadi 65,15 juta rupiah pada tahun 2015.

Tabel 2.252
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Lapangan Usaha | PDRB per Kapita (Juta Rupiah) | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|-----|---|-------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,1008 | 0,1076 | 0,1088 | 0,1091 | 2,67 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,0022 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0025 | 4,35 |
| C | Industri Pengolahan | 7,1065 | 7,8542 | 8,5944 | 8,8638 | 7,64 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,0916 | 0,0867 | 0,0892 | 0,0920 | 0,15 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,0804 | 0,0859 | 0,0967 | 0,1019 | 8,22 |
| F | Konstruksi | 4,2365 | 4,613 | 4,9222 | 5,2680 | 7,53 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3,6849 | 4,0285 | 4,3617 | 4,6796 | 8,29 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2,0755 | 2,2309 | 2,4812 | 2,6545 | 8,55 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,1551 | 7,0553 | 7,7936 | 8,6041 | 11,81 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 6,5029 | 6,6017 | 6,562 | 6,7830 | 1,42 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,1101 | 3,5916 | 3,9744 | 4,3312 | 11,67 |
| L | Real Estate | 4,8535 | 5,1597 | 5,6537 | 6,1038 | 7,94 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,6165 | 0,6123 | 0,6637 | 0,7175 | 5,19 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan | 4,8146 | 5,366 | 5,9089 | 6,4959 | 10,50 |

| No | Lapangan Usaha | PDRB per Kapita (Juta Rupiah) | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | dan Jaminan Sosial Wajib | | | | | |
| P | Jasa Pendidikan | 4,8761 | 5,0129 | 5,5227 | 6,1435 | 8,01 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,9503 | 2,0645 | 2,2173 | 2,4634 | 8,10 |
| S,T,U | Jasa Lainnya | 1,3919 | 1,4967 | 1,6144 | 1,7396 | 7,72 |
| PDRB per Kapita Kota Yogyakarta ADHK | | 51,650 | 55,970 | 60,567 | 65,154 | 8,05 |
| PDRB per Kapita Provinsi DIY ADHK | | 21,745 | 23,624 | 25,693 | 22,7 | 1,44 |

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut lapangan Usaha 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016)

Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi DIY. Pada tahun 2015, nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta hampir tiga kali lipat dari PDRB per kapita DIY yang hanya sebesar 22,70 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Kota Yogyakarta juga lebih tinggi (8,05% per tahun) dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Provinsi DIY (1,44% per tahun). Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta dibandingkan dengan Provinsi DIY didukung oleh karakteristik wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya jauh lebih beragam dan kompleks. Sedangkan PDRB per kapita Provinsi DIY dibentuk oleh kelima kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak semuanya lebih baik dari Kota Yogyakarta.

Sama halnya dengan PDRB per kapita menurut lapangan usaha, PDRB perkapita menurut kecamatan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2012-2015 juga cenderung mengalami peningkatan. Tiga kecamatan dengan nilai PDRB perkapita tertinggi pada tahun 2015 yaitu Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Gondokusuman. Selisih PDRB perkapita dari Kecamatan Gondomanan dengan Kecamatan Danurejan pada tahun 2015 yaitu sekitar 8 juta rupiah, sedangkan selisih PDRB perkapita Kecamatan Danurejan dengan Kecamatan Gondokusuman yaitu sekitar 11 juta rupiah. Sementara itu, selisih nilai PDRB Kecamatan Gondomanan (posisi tertinggi) dengan Kecamatan Kotagede (posisi terendah) yaitu sekitar 37 juta rupiah. Tingginya nilai PDRB per kapita di Kecamatan Gondomanan, salah satunya dapat disebabkan karena jumlah penduduknya tidak sebanyak jumlah penduduk di kecamatan lain, sehingga ketika nilai PDRB kecamatan tersebut dibagi dengan jumlah penduduk yang sedikit, maka nilai PDRB per kapita menjadi besar. Sebaliknya, rendahnya nilai PDRB per kapita Kecamatan Kotagede dapat disebabkan karena jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan kecamatan lain, sementara nilai PDRB kecamatan tersebut tergolong rendah.

Tabel 2.253
PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Kecamatan | Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (juta rupiah) | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Mantrijeron | 9,21 | 9,59 | 10,05 | 10,24 |
| Kraton | 8,97 | 9,40 | 10,05 | 10,31 |
| Mergangsan | 9,98 | 10,44 | 11,08 | 11,36 |
| Umbulharjo | 17,09 | 17,75 | 18,11 | 18,13 |
| Kotagede | 8,21 | 8,44 | 8,50 | 8,50 |
| Gondokusuman | 23,46 | 24,51 | 25,94 | 26,64 |
| Danurejan | 32,02 | 34,35 | 36,55 | 37,77 |
| Pakualaman | 8,11 | 8,50 | 9,08 | 9,35 |
| Gondomanan | 40,62 | 42,74 | 44,76 | 45,91 |
| Ngampilan | 8,01 | 8,39 | 8,77 | 8,94 |
| Wirobrajan | 13,93 | 14,54 | 15,33 | 15,71 |
| Gedongtengen | 14,46 | 15,40 | 16,07 | 16,44 |
| Jetis | 20,30 | 21,44 | 23,06 | 23,82 |
| Tegalrejo | 8,98 | 9,30 | 9,78 | 9,94 |
| Rata-Rata PDRB per Kapita Kota Yogyakarta | 15,61 | 16,33 | 17,09 | 18,08 |

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016)

Ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta juga dapat dibuktikan dengan perhitungan Indeks Williamson. Ketimpangan wilayah biasanya dianalisis menggunakan Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kota Yogyakarta didasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Jika nilai Indeks Williamson semakin mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin mendekati angka 1, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Indeks Williamson Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2015 yang tergolong dalam kategori tinggi karena besarnya masih di atas 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk antarkecamatan di Kota Yogyakarta juga tergolong tinggi.

D. Analisis PDRB Kecamatan

PDRB ADHK menurut kecamatan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2012-2015 cenderung meningkat. Tiga kecamatan dengan nilai PDRB ADHK terbesar pada tahun 2012-2015 yaitu Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondokusuman, dan Kecamatan Danurejan. Pada tahun 2015, nilai PDRB ADHK Kecamatan Umbulharjo sebesar 1,57 triliun rupiah, Kecamatan Gondokusuman sebesar 1,25 triliun rupiah, dan Kecamatan Danurejan sebesar 0,62 triliun rupiah. Meski nilai PDRB Kecamatan Danurejan berada di urutan ketiga terbesar, tetapi nilai PDRB-nya terpaut cukup jauh dengan Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman yaitu sekitar 0,53-0,85 triliun rupiah. Kecamatan Umbulharjo yang memiliki PDRB kecamatan dengan nilai tertinggi di Kota Yogyakarta memang

didukung oleh luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar dibandingkan kecamatan lain. Sebaliknya, Kecamatan Pakualaman memiliki nilai PDRB kecamatan yang terendah di Kota Yogyakarta karena luas wilayahnya paling kecil di Kota Yogyakarta, sehingga jumlah kegiatan ekonomi di kecamatan ini tidak sebanyak di kecamatan-kecamatan lain.

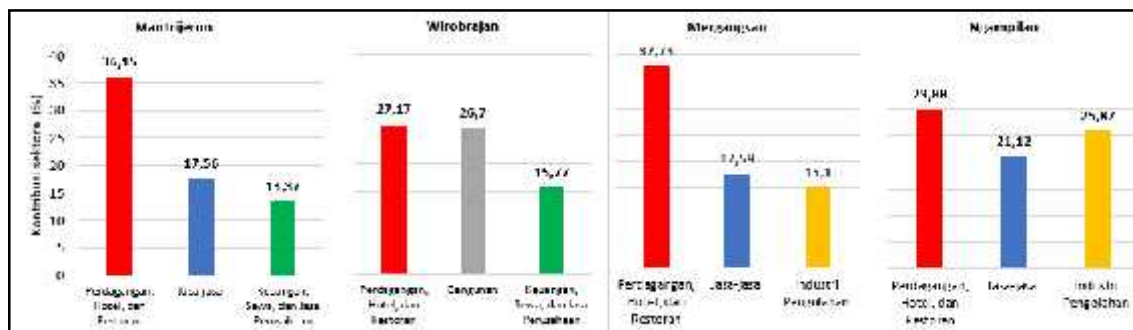
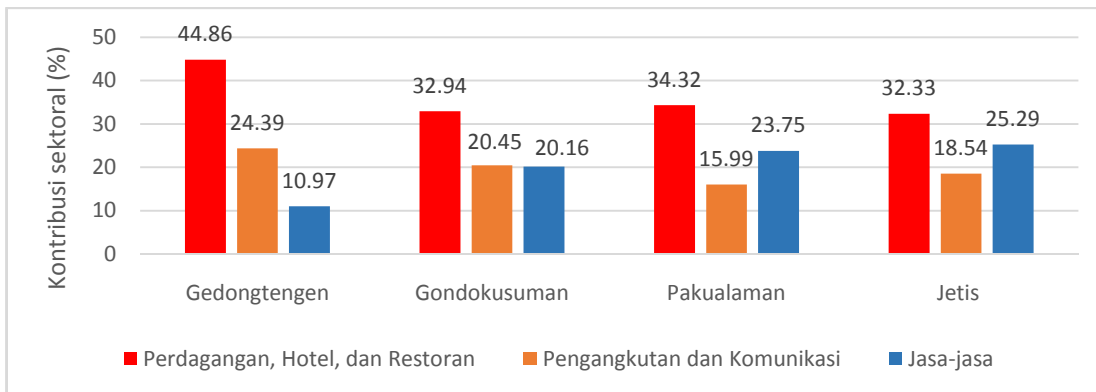
Tabel 2.254
PDRB ADHK Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Kecamatan | ADHK (Juta Rupiah) | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012* | 2013* | 2014* | 2015** |
| Kecamatan Mantrijeron | 292.144,10 | 306.835,70 | 320.772,45 | 335.863,71 |
| Kecamatan Kraton | 157.582 | 166.117,60 | 173.088,96 | 180.875,99 |
| Kecamatan Mergangsan | 294.049,70 | 309.305,70 | 327.560,72 | 343.880,14 |
| Kecamatan Umbulharjo | 1.347.707,47 | 1.421.816,13 | 1.503.796,09 | 1.570.116,09 |
| Kecamatan Kotagede | 263.235,50 | 275.155,80 | 287.437,10 | 299.917,28 |
| Kecamatan Gondokusuman | 1.068.439,10 | 1.122.395,20 | 1.185.665,77 | 1.247.994,86 |
| Kecamatan Danurejan | 590.385,10 | 636.938,20 | 674.675,28 | 713.992,12 |
| Kecamatan Pakualaman | 76.017,60 | 80.138,90 | 83.299,07 | 87.320,94 |
| Kecamatan Gondomanan | 532.017,80 | 562.812,10 | 589.616,09 | 620.047,77 |
| Kecamatan Ngampilan | 131.406,50 | 138.428,30 | 144.224,41 | 150.427,46 |
| Kecamatan Wirobrajan | 347.818,90 | 365.156,70 | 384.062,29 | 403.056,80 |
| Kecamatan Gedongtengen | 249.915,80 | 267.531,70 | 282.146,79 | 296.630,74 |
| Kecamatan Jetis | 478.566,40 | 508.306,80 | 538.130,12 | 567.665,75 |
| Kecamatan Tegalrejo | 321.603,30 | 337.906,50 | 353.485,10 | 370.653,36 |

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2013-2015 (BPS, 2014-2016)

E. Kontribusi Sektoral PDRB Kecamatan

Jika ditinjau dari kontribusi sektoralnya, masing-masing kecamatan didominasi oleh sektor tersier dan sekunder. Secara umum, sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjadi kontributor terbesar dari kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta. Meski demikian, terdapat beberapa kecamatan yang kontribusi sektoralnya didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Berikut ini rincian tiga kontributor terbesar PDRB dari masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015.

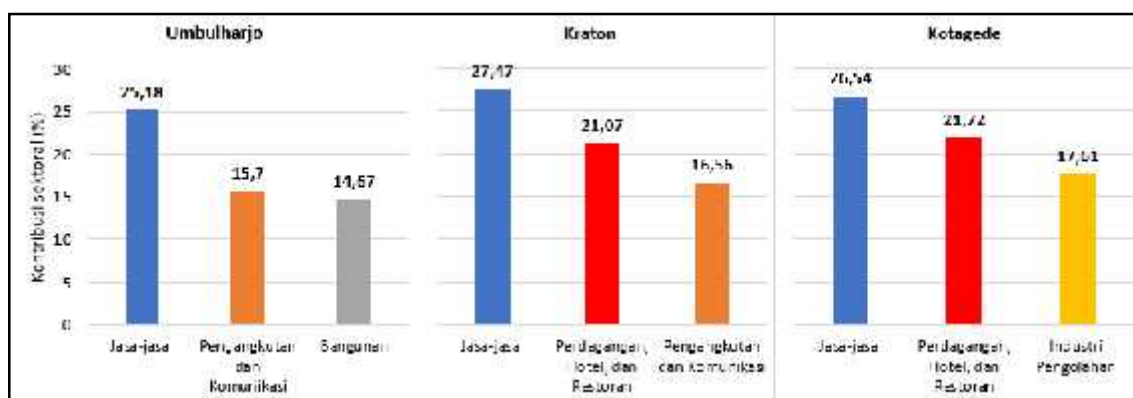


Gambar 2.114

Grafik Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebagai Kontributor Terbesar PDRB Kecamatan Tahun 2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Terdapat 8 kecamatan di Kota Yogyakarta yang PDRB-nya didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Delapan kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Mantriweron, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mergangsan, dan Kecamatan Ngampilan. Kontribusi sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di Kecamatan Gedongtengen menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, yaitu hingga sebesar 44,86% di tahun 2015. Hal ini dikarenakan Kecamatan Gedongtengen mencakup Kawasan Malioboro bagian barat yang memiliki banyak pertokoan dan hotel.

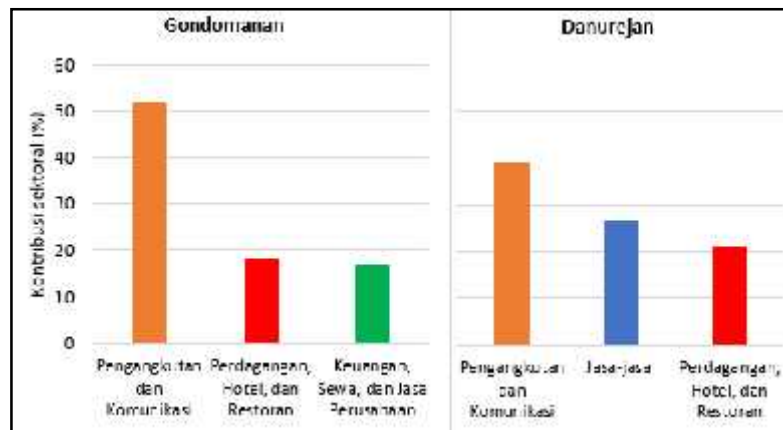


Gambar 2.115

Grafik Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan Sektor Jasa-jasa sebagai Kontributor Terbesar PDRB Kecamatan Tahun 2015

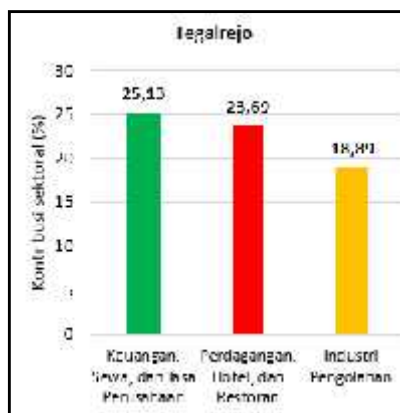
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Selain sektor perdagangan, hotel, dan restoran, terdapat sektor jasa-jasa yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Kotagede. Sektor jasa-jasa ini mencakup kegiatan terkait jasa pemerintahan umum dan jasa swasta (terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga). Selanjutnya, terdapat 2 kecamatan yang PDRB-nya didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Danurejan.



Gambar 2.116
Grafik Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebagai Kontributor Terbesar PDRB Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2015, Kecamatan Tegalrejo menjadi satu-satunya kecamatan di Kota Yogyakarta yang kontribusi sektoral PDRB-nya didominasi sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan dengan persentase sebesar 25,13%. Sektor ini terdiri dari kegiatan terkait usaha perbankan dan moneter, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, usaha persewaan bangunan dan tanah, serta jasa perusahaan. Selain itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan juga berkontribusi cukup besar dalam PDRB Kecamatan Tegalrejo tahun 2015.



Gambar 2.117
Grafik Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan Sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan sebagai Kontributor Terbesar PDRB Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Ketidakmerataan antar wilayah dapat disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumberdaya dan perbedaan kegiatan ekonomi. Untuk Kota Yogyakarta sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok atas kepemilikan sumberdaya alam, sementara untuk kegiatan ekonomi sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk masih dalam skala usaha kecil. Dari sisi sumberdaya manusia, Kota Yogyakarta juga memiliki penduduk usia produktif yang cukup besar (71% dari total penduduk) dan kelompok usia produktif ini tersebar merata untuk masing-masing kecamatan.

Bila dilihat dari pendidikan, sebagian besar penduduknya sudah mengenyam pendidikan menengah ke atas. Berdasarkan data yang sudah diolah, terdapat variasi persentase penduduk menurut tingkat pendidikan antar kecamatan. Apabila dipisahkan antara penduduk berpendidikan SMA dan berpendidikan Diploma I ke atas maka terlihat bahwa proporsi penduduk berpendidikan SMA masih lebih besar bila dibandingkan dengan proporsi penduduk berpendidikan Diploma I ke atas. Untuk Kota Yogyakarta diperkirakan besaran penduduk berpendidikan SMA adalah 53% dari total penduduk, sedangkan besaran penduduk berpendidikan Diploma I ke atas adalah 41%. Angka tersebut merupakan angka perkiraan karena merupakan angka hasil olahan dengan berbagai asumsi yang digunakan khusus dalam penelitian ini sesuai dengan ketersediaan data. Kecamatan Gondokusuman merupakan kecamatan dengan proporsi penduduk berpendidikan Diploma I ke atas paling tinggi dan proporsi antara penduduk berpendidikan Diploma I ke atas dan penduduk berpendidikan SMA hampir sama. Untuk kecamatan lainnya perbedaan proporsi antara penduduk berpendidikan Diploma I ke atas dan penduduk berpendidikan SMA berkisar antara 5-29% dengan yang perbedaan terbesar ada di Kecamatan Gedongtengen.

Bila dilihat dari pekerjaan, sebagian besar penduduk Kota Yogyakarta bekerja di sektor formal. Berdasarkan data, pada tahun 2016 diperkirakan terdapat 25% penduduk yang bekerja di sektor formal, 17% penduduk bekerja di sektor informal, 18% tidak/ belum bekerja (didalamnya terdapat anak dan orang lanjut usia), 13% mengurus rumah tangga, dan 22% pelajar/mahasiswa. Angka ini merupakan angka perkiraan karena merupakan angka hasil olahan dengan berbagai asumsi yang digunakan khusus dalam penelitian ini sesuai dengan ketersediaan data. Terdapat variasi pekerjaan untuk masing-masing kecamatan namun yang terbesar adalah penduduk yang bekerja di sektor formal. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.1.8 dan gambar 4.1.9.

Berdasarkan hasil analisis, ketidakmerataan pendapatan antar wilayah yang terjadi di Kota Yogyakarta diduga terkait dengan tingkat pendidikan penduduk serta jenis mata pencaharian penduduknya. Proporsi penduduk dengan pendidikan SMA masih relatif besar dan menyebabkan terbatasnya pekerjaan yang bisa didapat.

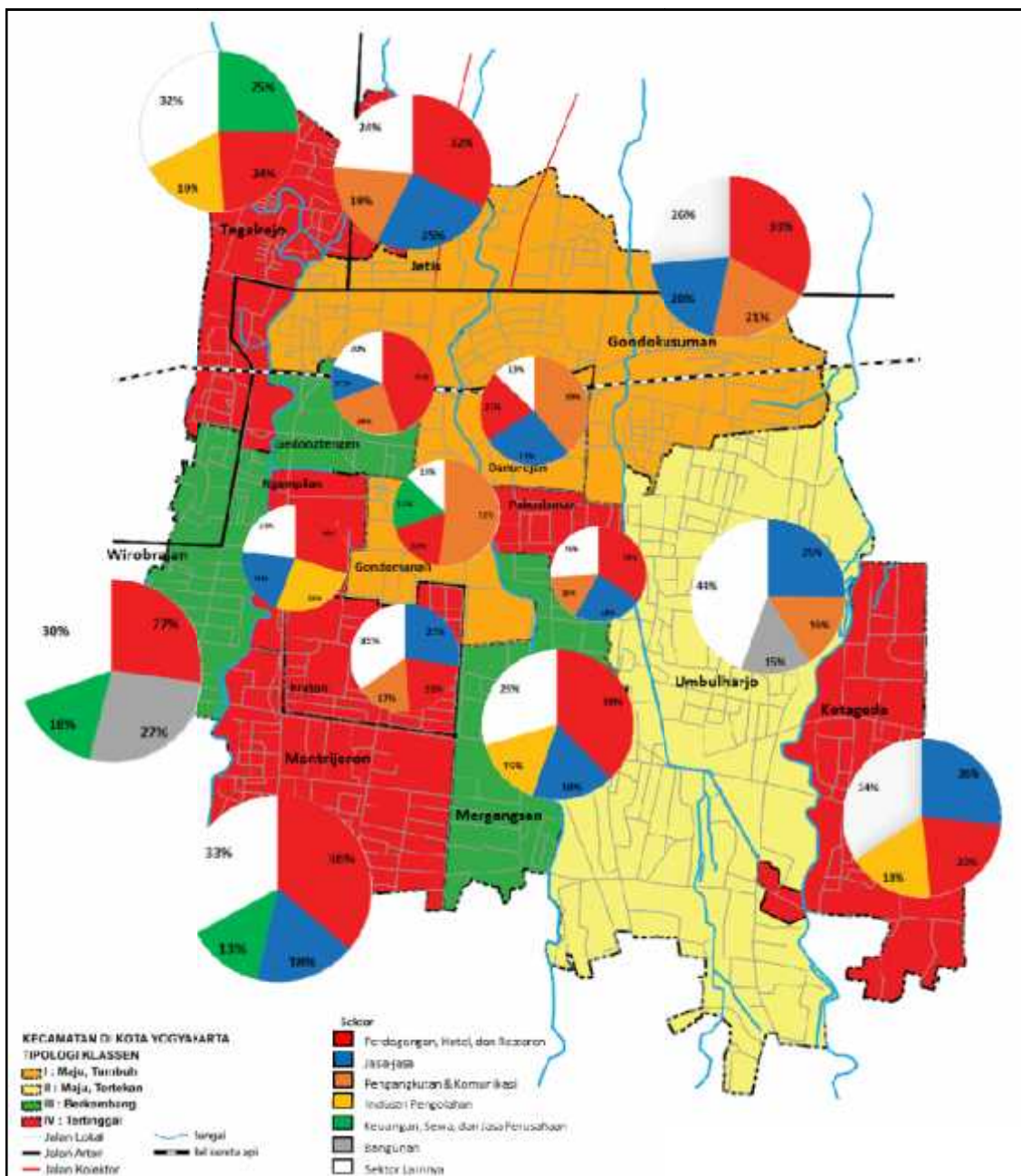
Sebagian penduduk juga bekerja di sektor informal yang memiliki penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan sektor formal. Selain itu adanya keterbatasan pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan-kawasan yang sifatnya istimewa, misalnya di Kecamatan Kraton dan Pakualaman juga diduga menjadi penyebab relatif rendahnya pendapatan per kapita di daerah tersebut.

F. Tipologi Klassen

Pola perkembangan ekonomi antar kecamatan di Kota Yogyakarta dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan Tipologi Klassen yang menghasilkan klasifikasi pola perkembangan ekonomi wilayah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dan tingkat PDRB per kapita, seperti berikut ini:

- a. Daerah maju dan tumbuh, yaitu daerah dengan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita lebih tinggi dari wilayah yang lebih luas.
- b. Daerah maju tetapi tertekan, yaitu daerah dengan laju pertumbuhan PDRB lebih cepat dari wilayah yang lebih luas (referensi) dan PDRB per kapita lebih rendah dari wilayah referensi.
- c. Daerah yang sedang berkembang atau berkembang cepat, yaitu daerah dengan laju pertumbuhan PDRB lebih lambat dari wilayah referensi dan PDRB per kapita lebih tinggi dari wilayah referensi.
- d. Daerah yang relatif tertinggal, yaitu daerah dengan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita yang lebih rendah dari wilayah referensi.

Berikut ini peta yang menggambarkan klasifikasi pola perkembangan ekonomi kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta berdasarkan perhitungan Tipologi Klassen tahun 2015.



Gambar 2.118
Kondisi Ekonomi Kecamatan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Tipologi Kelas Tahun 2015

Sumber : PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2015 (BPS, 2016); Hasil olahan, 2017

Berdasarkan perhitungan Tipologi Kelas tahun 2015, kecamatan di Kota Yogyakarta masih memiliki 6 kecamatan yang tergolong tertinggal (Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantriweron, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Kotagede). Kecamatan yang tergolong tertinggal tersebut lokasinya ada yang di tengah kota maupun di pinggiran Kota Yogyakarta. Sementara itu, terdapat 3 kecamatan yang tergolong berkembang ekonominya, yaitu Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Mergangsan. Kecamatan Umbulharjo menjadi satu-satunya kecamatan yang tergolong maju tetapi tertekan pada tahun 2015. Selanjutnya, terdapat 4 kecamatan yang sudah tergolong maju dan tumbuh, yaitu Kecamatan Jetis,

Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Gondomanan. Jika ditinjau dari lokasinya, sebagian besar kecamatan yang tergolong maju berada di Kota Yogyakarta bagian utara.

G. Pergeseran Klasifikasi dalam Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil tipologi Klassen tahun 2012 – 2015 maka dapat diketahui gambaran perkembangan wilayah di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2012 terdapat 3 daerah yang maju dan cepat tumbuh dan pada tahun 2015 terdapat 4 daerah maju dan cepat tumbuh. Tiga kecamatan yang selalu dalam kategori maju dan cepat tumbuh adalah Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Jetis, sedangkan satu kecamatan yang baru adalah Kecamatan Gondomanan. Sementara itu, pada tahun 2012 terdapat 7 daerah yang relatif tertinggal, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 6 daerah tertinggal. Kecamatan yang masih tetap berada dalam kategori tertinggal adalah Kecamatan Mantriheron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Ngampilan, sedangkan untuk Kecamatan Wirobrajan sudah masuk ke kategori daerah berkembang.

Tabel 2.255
Klasifikasi Kecamatan di Kota Yogyakarta Menurut Tipologi Klassen Tahun 2012-2015

| Kecamatan | Klasifikasi dalam Tipologi Klassen | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Mergangsan | berkembang | Tertinggal | berkembang | berkembang |
| Wirobrajan | tertinggal | Tertinggal | tertinggal | berkembang |
| Gedongtengen | berkembang | berkembang | berkembang | berkembang |
| Umbulharjo | maju tertekan | maju tertekan | maju tumbuh | maju tertekan |
| Gondokusuman | maju tumbuh | maju tertekan | maju tumbuh | maju tumbuh |
| Danurejan | maju tumbuh | maju tumbuh | maju tumbuh | maju tumbuh |
| Gondomanan | maju tertekan | maju tumbuh | maju tertekan | maju tumbuh |
| Jetis | maju tumbuh | maju tumbuh | maju tumbuh | maju tumbuh |
| Mantriheron | tertinggal | Tertinggal | tertinggal | tertinggal |
| Kraton | tertinggal | Tertinggal | tertinggal | tertinggal |
| Kotagede | tertinggal | Tertinggal | tertinggal | tertinggal |
| Pakualaman | tertinggal | Tertinggal | tertinggal | tertinggal |
| Ngampilan | tertinggal | Tertinggal | tertinggal | tertinggal |
| Tegalrejo | tertinggal | Tertinggal | tertinggal | tertinggal |

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2012, 2013, 2014, 2015, BPS; diolah

Empat kecamatan yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh memang merupakan pusat kegiatan ekonomi Kota Yogyakarta terutama kegiatan perdagangan dan jasa. Sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala

menengah dan besar maka PDRB ke-empat kecamatan ini relatif bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kontribusi PDRB dari empat kecamatan ini terhadap PDRB Kota Yogyakarta mencapai 43,82%. Kecamatan-kecamatan ini juga bukan daerah yang jumlah penduduknya banyak sehingga PDRB per kapitanya juga relatif besar bila dibandingkan dengan daerah lain. Sementara itu, untuk daerah yang masih relatif tertinggal merupakan daerah dengan berbagai variasi kegiatan ekonomi. Namun secara umum, kegiatan ekonomi yang dijalankan masih skala kecil sehingga outputnya tidak terlalu besar.

H. ICOR

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan produksi barang dan jasa karena penambahan kapasitas sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh adanya, antara lain kemajuan teknologi, kelembagaan, dan kemampuan SDM. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas input dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teknologi diukur melalui efisiensi dan efisiensi diukur dengan ICOR.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Kapital dan output dinilai dalam bentuk uang (nominal). Angka ICOR yang rendah mencerminkan efisiensi terhadap modal dan dengan adanya efisiensi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan output sebenarnya tidak semata-mata hanya disebabkan oleh investasi, namun untuk perhitungan ICOR maka faktor-faktor lain di luar investasi dianggap tidak berubah (*ceteris paribus*). Jadi perubahan output hanya disebabkan oleh perubahan kapital atau investasi. ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Perusahaan dianggap melakukan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Perubahan inventori/ stok merupakan bagian dari pembentukan modal (investasi).

I. ICOR Sektoral Tahunan

ICOR sektoral tahunan untuk Kota Yogyakarta dihitung dengan lag 0, artinya investasi yang ditanam pada tahun t akan menghasilkan nilai tambah pada tahun yang sama juga. Investasi dalam penghitungan ini sudah mempertimbangkan perubahan inventori. Hasil perhitungannya menunjukkan adanya variasi ICOR antar sektor. ICOR sektoral untuk Kota Yogyakarta tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.256
ICOR Sektoral Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi
PMTB + Perubahan Inventori, 2012-2015

| | Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,54 | 2,65 | 3,11 | 3,19 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,97 | 3,06 | 3,13 | 3,2 |
| C | Industri Pengolahan | 4,9 | 4,98 | 5,11 | 5,09 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 13,88 | 14,31 | 14,62 | 12,85 |
| E | Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 5,32 | 5,5 | 5,62 | 5,74 |
| F | Konstruksi | 4,34 | 4,48 | 4,59 | 4,68 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 4,18 | 4,24 | 4,4 | 4,39 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 10,11 | 10,68 | 10,53 | 11,05 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 4,05 | 4,1 | 4,04 | 4,25 |
| J | Informasi & Komunikasi | 5,39 | 5,57 | 5,8 | 5,69 |
| K | Jasa Keuangan & Asuransi | 3,11 | 2,44 | 2,85 | 2,93 |
| L | Real Estate | 4,33 | 4,47 | 4,57 | 4,24 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 4,99 | 5,15 | 5,27 | 5,37 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib | 6,28 | 6,48 | 6,63 | 6,76 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,63 | 4,78 | 4,89 | 4,99 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,98 | 5,14 | 5,26 | 5,36 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 4,81 | 4,96 | 5,08 | 5,18 |
| | PDRB | 4,91 | 4,83 | 5 | 5,03 |

Sumber: ICOR Sektoral Kota Yogyakarta 2015, BPS

Rendahnya ICOR untuk Kota Yogyakarta disebabkan dominasi kegiatan usahanya yang berupa jasa dan industri kecil. Tingginya ICOR di Kabupaten Sleman antara lain disebabkan oleh dominasi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum yang bersifat padat modal. Sementara itu, tingginya ICOR Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo menunjukkan jenis investasi yang ditanamkan biasanya padat modal karena gencarnya pembangunan di kedua daerah tersebut.

J. Perbandingan ICOR antar Kabupaten/ Kota

Angka ICOR Provinsi DIY dan kabupaten/ kota cenderung meningkat dan memiliki pola pergerakan yang relatif sama. Pada tahun 2015, angka ICOR Provinsi DIY mencapai 5,92 dan cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di DIY dapat dikatakan relatif kurang efisien. Bila melihat koefisien ICOR kabupaten/ kota lain di Povinsi DIY maka koefisien ICOR Kota Yogyakarta merupakan yang paling rendah dengan 3,87. Sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Sleman dengan 6,67, diikuti dengan Kabupaten Kulon Progo dengan 6,29, Kabupaten Gunungkidul dengan 5,55, dan Kabupaten Bantul dengan 4,9. Terdapatnya variasi angka ICOR ini

dapat disebabkan oleh variasi investasi yang terdapat di kabupaten/ kota sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

K. Kebutuhan investasi

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan investasi untuk Kota Yogyakarta dapat diproyeksi berdasarkan angka ICOR dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan investasi ini dapat dipenuhi oleh pihak Pemerintah Kota Yogyakarta maupun pihak swasta dan masyarakat.

Tabel 2.57
Skenario Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2022

| Tahun | Target Pertumbuhan | PDRB Konstan (Juta Rp) | Perubahan Y | % Investasi terhadap PDRB Konstan | Perkiraan Kebutuhan Investasi (Juta Rp) |
|-------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| 2017 | 5,12 | 24.759.968 | 1.207.013 | 25,46 | 5.878.153 |
| 2018 | 5,16 | 26.038.698 | 1.278.730 | 25,64 | 6.227.416 |
| 2019 | 5,20 | 27.391.918 | 1.353.219 | 25,77 | 6.590.178 |
| 2020 | 5,23 | 28.824.046 | 1.432.129 | 25,94 | 6.974.467 |
| 2021 | 5,27 | 30.343.446 | 1.519.400 | 26,10 | 7.399.476 |
| 2022 | 5,30 | 31.951.836 | 1.608.390 | 26,25 | 7.832.857 |

Sumber: Hasil analisis 2017

Catatan: ICOR metode standar lag 0, 2011-2015 = 4,87

Kebutuhan investasi Kota Yogyakarta untuk 5 tahun ke depan dapat diprediksi seperti terlihat dalam tabel di atas. Skenario tersebut menggunakan asumsi angka ICOR 4,87 dan asumsi pertumbuhan ekonomi seperti terlampir dalam bab proyeksi ekonomi indikator makro (bab 7). Pada tahun 2017, untuk skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% maka diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 5,8 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2022, untuk skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30% maka diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 7,8 triliun rupiah. Besaran kebutuhan investasi ini dapat dipenuhi oleh pemerintah dan swasta. Namun karena keterbatasan anggaran pemerintah maka pihak swasta dan masyarakat (rumah tangga) dapat menjadi investor dengan berbagai jenis bentuk investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor.

Sektor/subsektor dengan koefisien ICOR kecil mendapat prioritas untuk dilakukan investasi, karena dari segi ekonomi sektor ini menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan serapan tenaga kerja, kepemilikan sumberdaya, dan kebijakan pemerintah. Jika dilihat dari besaran ICOR, maka sektor perdagangan, sektor

penyediaan akomodasi makan dan minum, dan sektor jasa keuangan dapat menjadi pilihan investasi. Sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian meskipun memiliki nilai ICOR yang relatif rendah tidak direkomendasikan untuk menjadi pilihan investasi karena Kota Yogyakarta tidak menonjol dalam kepemilikan sumberdaya pertanian dan sumberdaya alam tambang dan mineral. Demikian pula sektor pengadaan listrik, sektor pengadaan air, serta sektor transportasi dan pergudangan juga bukan merupakan pilihan prioritas investasi karena angka ICOR-nya relatif tinggi dan bersifat padat modal.

4. Bidang Fisik

Analisis bidang fisik Kota Yogyakarta dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat permintaan penduduk dengan kemampuan *supply* layanan pemerintah. Adapun bidang fisik yang dimaksud meliputi air baku dan sanitasi (persampahan, limbah, dan drainase). Perhitungan *demand* masyarakat didasarkan pada jumlah penduduk Kota Yogyakarta, dalam hal ini penduduk yang dimaksud tidak hanya penduduk yang terdaftar, tetapi juga penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta. Sebagai salah satu tujuan pariwisata dan pendidikan di Indonesia, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk pendatang yang besar sehingga dalam perhitungan kebutuhan sarana prasarana bidang fisik tidak dapat diabaikan. Jumlah penduduk domisili didefinisikan sebagai jumlah penduduk dari luar wilayah yang tinggal dan menetap di Kota Yogyakarta dalam waktu yang cukup lama untuk suatu keperluan. Penduduk domisili ini meliputi mahasiswa maupun tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dan kos untuk sementara waktu. Jumlah penduduk domisili diasumsikan sebesar 1/5 dari jumlah penduduk terdaftar di Kota Yogyakarta. Selain jumlah penduduk terdaftar dan penduduk domisili, perhitungan jumlah penduduk untuk mengidentifikasi *demand* sarana prasarana wilayah ini juga meliputi jumlah wisatawan yang singgah dalam waktu yang relatif singkat. Jumlah wisatawan ini dihitung dari *occupation rate* kamar hotel di Yogyakarta dan dikalikan 60% dari kebutuhan ideal air bersih sebesar 60 liter/hari sesuai standar Dinas Pekerjaan Umum. Diambil angka 60% karena penggunaan air bersih oleh wisatawan bersifat tidak rutin dalam waktu yang terbatas.

A. Air Baku

1. Sumber dan Kapasitas Produksi Air Baku

Wilayah Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman sebagai lokasi Gunung Merapi menyebabkan Kota Yogyakarta memiliki potensi sumber daya air yang berasal dari curah hujan dan air tanah. Di samping itu, daerah Kota Yogyakarta memiliki potensi air tanah meliputi daerah lereng vulkan Merapi dan daerah endapan vulkanik. Lereng Gunung

Merapi yang menjadi area tangkapan hujan dimanfaatkan penduduk melalui pembuatan sumur dangkal yang menjadi sumber perolehan air non perpipaan bagi masyarakat.

Sumber air baku di Kota Yogyakarta diperoleh dari air permukaan dan air tanah. Sumber mata air permukaan dikelola oleh PDAM Tirtamarta, meliputi 2 buah mata air yaitu Umbul Wadon dan Karang Gayam I, Air permukaan sejumlah 1 (satu) buah yaitu Sungai Padasan dengan sistem pengolahan semi lengkap, sedangkan sumur dalam sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah, dan sumur dangkal sebanyak 20 (dua puluh) buah. Air yang berasal dari sumber-sumber tersebut selanjutnya diolah dan didistribusikan oleh PDAM Tirtamarta.

Pada tahun 2016, kehilangan air di Kota Yogyakarta mencapai 34,97% hal ini menunjukkan masih perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam proses distribusi air bersih untuk masyarakat. Mengingat potensi sumber daya air yang cukup melimpah di wilayah Kota Yogyakarta, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini maka dapat diasumsikan jumlah produksi air yang dapat dihasilkan PDAM Tirtamarta tetap.

2. Pengelolaan Air Baku

Sistem penyediaan air bersih (SPAB) di Kota Yogyakarta terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan dikelola oleh pemerintah daerah melalui PDAM Tirtamarta yang sekaligus menjadi supplier utama air minum untuk Kota Yogyakarta. Sementara penyediaan air bersih sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga dengan memanfaatkan sumur gali.

Sistem penyediaan air minum di Kota Yogyakarta telah mencakup seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta yang disuplai melalui 10 (sepuluh) sub sistem pelayanan yang terbagi berdasarkan instalasi pengolahan dan daerah pelayanan yang meliputi:

- a) Sub sistem Padasan
- b) Sub sistem Candi (Bak Pembagi)
- c) Sub sistem Ngaglik (Bak)
- d) Sub sistem Gemawang
- e) Sub sistem Gemawang Wilayah Barat
- f) Sub sistem Bedog
- g) Sub sistem Karanggayam
- h) Sub sistem Kotagede
- i) Sub sistem Pengok
- j) Sub sistem Bener

Sub sistem ini merupakan sistem jaringan yang sudah saling terinterkoneksi satu sama lain di jaringan pelayanan (terutama wilayah distribusi). Masing-masing sub sistem disuplai oleh beberapa sumber air baku yang berbeda kemudian dimasukkan dalam satu reservoir induk yang kemudian dialirkan ke area pelayanan masing-masing. Keberadaan instalasi pengolahan air (IPA) sebagian besar diperuntukkan untuk sumber air baku yang berasal dari sungai dan sumur dalam yang cenderung memiliki kandungan pencemar di atas ambang.

Sistem non PDAM merupakan sistem penyediaan air minum yang langsung dikelola oleh masyarakat terutama untuk wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan PDAM. Sarana prasarana sistem SPAM komunal ini pada umumnya dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang nantinya pengelolaan diserahkan oleh masyarakat. Pada tahun 2012, sistem penyediaan air minum komunal mampu melayani 11.636 jiwa atau 2,98% dari penduduk Kota Yogyakarta.

3. Cakupan Pelayanan Air Bersih

Cakupan pelayanan sistem perkotaan Yogyakarta sudah mencakup seluruh wilayah kecamatan di wilayah Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedingtengen, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Tegalrejo. Berdasarkan data PDAM Tirtamarta tahun 2016, persentase cakupan pelayanan air minum untuk masyarakat mencapai 43,02% dari total jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Cakupan pelayanan air minum dari PDAM tersebut memiliki kecenderungan yang menurun setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan adanya penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan sumber air PDAM yang mungkin beralih menggunakan sumber air bersih lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Di samping itu, adanya program pembangunan sumur komunal yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk dapat mengakses air bersih. Oleh karena itu adanya program tersebut mendorong terjadinya penurunan jumlah penduduk terlayani PDAM.

Jika ditinjau dari satuan rumah tangga pengguna air bersih yang bersumber dari PDAM, dalam kurun waktu tahun 2012-2016 juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren menurun. Adapun pertumbuhan persentase rumah tangga pengguna air bersih rata-rata sebesar -1,77% setiap tahunnya. Besarnya pemanfaatan sumur pribadi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ini mengindikasikan bahwa ketersediaan air tanah di Kota Yogyakarta sampai saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan air bersih di masa mendatang tidak cukup hanya dengan menggunakan sumber air tanah, oleh karena itu PDAM Tirtamarta perlu meningkatkan produksi air bersih untuk dapat memberikan cakupan pelayanan yang lebih besar.

4. Kebutuhan Air Bersih

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan total air bersih Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2022, kebutuhan air bersih Kota Yogyakarta mencapai 140.637.396 liter/hari pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan kapasitas produksi PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta saat ini maka terdapat selisih angka yang cukup signifikan yaitu mencapai 95.613.492 liter/hari di tahun 2022. Meskipun saat ini pemenuhan air bersih di Kota Yogyakarta masih dapat mengandalkan sumber air tanah, akan tetapi kapasitas produksi PDAM perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan air bersih mengingat ketersediaan air tanah yang dapat berkurang.

B. Sanitasi: Drainase, Sampah, dan Limbah.

1. Drainase

Jaingandrainase berfungsi untuk mengalirkan air hujan ataupun kelebihan air di permukaan yang disebabkan luapan sungai yang masuk ke permukaan, sehingga tidak menimbulkan genangan. Jaringan drainase Kota Yogyakarta merupakan satu kesatuan sistem jaringan drainase perkotaan Yogyakarta. Sistem drainase perkotaan terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan tersier. Fungsi utama dalam sistem drainase di Kota Yogyakarta adalah sebagai saluran air hujan, namun demikian masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan saluran air hujan. Saluran drainase tidak hanya digunakan sebagai saluran air hujan tetapi juga dipergunakan untuk pembuangan air limbah dan saluran irigasi. Terdapat juga saluran yang difungsikan untuk ketiganya yaitu Kali Belik dan Kali Widuri. Keberadaan tiga sungai yang mengalir di wilayah Kota Yogyakarta yaitu

Sungai Code, Winongo dan Gajahwong dimanfaatkan sebagai drainase induk saluran.

Jaringan drainase dikatakan berfungsi dengan baik jika kapasitas dari saluran drainase itu mencukupi kebutuhan untuk mengalirkan kelebihan air permukaan. Menurut Peraturan Menteri PU No.01/PRT/M/2014 tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Pada tahun 2016 panjang seluruh jaringan drainase di Kota Yogyakarta mencapai 332,74 Km dengan 87,18% dari total panjang drainase berada pada kondisi baik. Panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni sepanjang 279,55 Km pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 290,08 Km pada tahun 2016. Panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan angka pertumbuhan rata-rata 0,93% pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.

Keberadaan jaringan drainase ini erat hubungannya dengan terjadinya genangan di wilayah Kota Yogyakarta. Sampai saat ini masih terdapat lokasi-lokasi rawan genangan terutama pada saat curah hujan tinggi yang disebabkan berbagai faktor, meliputi faktor alam (morfologi lahan/cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase) serta tersumbatnya saluran drainase. Oleh karena itu keberadaan saluran drainase yang baik dapat menjadi sarana mengatasi timbulnya genangan. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan berdampak pada peningkatan jumlah kawasan terbangun. Hal ini akan mengurangi luas area resapan yang dapat menyebabkan tingkat kehilangan air semakin besar sehingga meningkatkan peluang timbulnya luapan air dan genangan air hujan.

Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2016, jumlah titik genangan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah genangan saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 50 titik genangan di tahun 2012 menurun menjadi 28 titik genangan di tahun 2016. Hal ini

mengindikasikan bahwa jaringan drainase di Kota Yogyakarta berfungsi dengan baik dan dapat mengurangi jumlah genangan yang ada.

Terjadinya penurunan jumlah titik genangan sebanding dengan penurunan luas daerah rawan genangan di wilayah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016 presentase luas wilayah genangan meliputi 0,23% dari seluruh luas wilayah, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah Kota Yogyakarta. Kejadian banjir di Kota Yogyakarta tergolong sangat rendah dan hanya terjadi di beberapa lokasi yang berada di daerah bantaran sungai. Meskipun untuk saat ini presentasi luas wilayah genangan dibawah angka 1% namun perlu dilakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi peningkatan potensi genangan, mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Yogyakarta.

2. Sampah

a. Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Yogyakarta umumnya dilakukan dengan mengumpulkan sampah untuk dibuang ke TPS. Pengelolaan sampah secara regional menggunakan mekanisme off-site management, sehingga sampah yang dikumpulkan kemudian dibuang di TPA yang terletak di Piyungan-Bantul. Luas TPA Piyungan ini kurang lebih 12 hektar dan dikelola dengan sanitary landfill untuk sampah residu akhir, yaitu sampah yang telah masuk ke TPA Piyungan kemudian kembali diolah dengan dilakukan pengurugan sampah dengan menggunakan tanah urug (cover soil). Tetapi pada kenyataan di lapangan, pengolahan yang dilakukan lebih bersifat *open dumping*, sampah yang telah masuk TPA tidak dilakukan pengurugan dengan tanah. Isu yang saat ini tengah disoroti adalah terkait kapasitas TPA Piyungan yang mendekati ambang batas maksimal untuk dapat menampung sampah. Oleh karena itu diperlukan alternatif pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan sehingga dapat memperpanjang usia TPA tersebut.

Hingga saat ini pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat di Kota Yogyakarta dilakukan melalui beberapa model, yaitu:

1. Produksi sampah (rumah tangga) dikumpulkan di depan rumah dengan bak sampah dan kemudian diambil oleh petugas sampah dengan gerobak sampah untuk ditampung di tempat pembuangan sampah sementara (TPSS). Selanjutnya dari TPSS diangkut

- dengan truk sampah oleh petugas dari dinas terkait ke tempat pembuangan akhir.
2. Sampah rumah tangga dibuang langsung ke TPSS, kemudian dari TPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas ke tempat pembuangan akhir.
 3. Sampah rumah tangga dipilah atau dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu organik, kertas, kaca, dan plastik oleh setiap rumah tangga, dan kemudian sampah kering dibawa ke bank sampah terdekat. Selanjutnya dari bank sampah dijual ke pengepul, sedangkan sampah organik dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara untuk diangkut petugas sampah, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.
 4. Sampah rumah tangga dikumpul di *armroll* dan diangkut oleh petugas dengan truk sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.
 5. Sampah rumah tangga dikumpul dan dibakar, sedangkan sampah organik dikumpul di lubang tanah dan ditimbun.

Di antara berbagai model pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Yogyakarta, sebagian besar masih dikumpulkan dan dibuang ke TPS yang kemudian akan diangkut ke TPA Piyungan. Persentase pengelolaan sampah yang dibuang ke TPS mencapai 88%. Selain dikumpulkan dan dibuang ke TPS, sebanyak 5% pengelolaan sampah rumah tangga dikumpulkan ke kolektor informal untuk didaur ulang serta 4% dibakar. Tingginya angka pengelolaan sampah dengan dikumpulkan ke TPS ini berimplikasi pada tingginya volume sampah Kota Yogyakarta yang masuk ke TPA Piyungan.

Pada tahun 2015 jumlah sampah Kota Yogyakarta yang terangkut ke TPA Piyungan mencapai lebih dari 204 ton/hari. Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2015 jumlah sampah yang terangkut ke TPA Piyungan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah, yaitu mencapai rata-rata lebih dari 211 ton/hari. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 jumlah timbulan sampah penduduk Kota Yogyakarta memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni 263 ton/hari pada tahun 2012 berkurang menjadi 226,2 ton/hari pada tahun 2016. Penurunan volume sampah di Kota Yogyakarta disebabkan adanya pergeseran

komposisi sampah yang sebagian besar berupa sampah plastik dengan volume yang lebih ringan.

Penurunan volume timbulan sampah di Kota Yogyakarta berbanding lurus dengan perkembangan jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan. Di tahun 2012 volume sampah yang dibuang ke TPA sebesar 179,4 ton/hari, berkurang menjadi 176,4 ton/hari pada tahun 2016. Dengan demikian pertumbuhan rata-rata volume sampah yang terangkut ke TPA dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 3,32% per tahun dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan presentase volume sampah yang dibuang ke TPA terjadi karena adanya penurunan jumlah perkiraan timbulan sampah serta volume sampah yang terangkut ke TPA.

Selain TPA Piyungan, Kota Yogyakarta sudah memiliki IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu) Migunani yang terletak di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo. Dalam IPST dapat dilakukan pengolahan terhadap sampah yang masuk untuk dijadikan sebagai kompos. Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk penyubur tanaman. Di samping itu, untuk mengurangi beban TPA maka Pemkot Yogyakarta telah mendirikan TPST di beberapa tempat. Sebelum sampah diangkut ke TPA maka diolah dulu di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), sehingga diharapkan yang diangkut ke TPA berupa sampah residu.

Beberapa Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yang sudah ada di Kota Yogyakarta menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah kota agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat secara optimal.

Model pengelolaan di masyarakat yang lainnya adalah dengan memilah dan kemudian melakukan 3 R yaitu mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali yang masih bisa dipakai (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) sampah menjadi barang yang lebih bernilai. Pengelolaan 3R oleh masyarakat di Kota Yogyakarta ini dilakukan melalui bank-bank sampah yang pada tahun 2016 berjumlah 405 unit bank sampah.

b. Timbulan Sampah di Kota Yogyakarta

Pada tahun 2016 timbulan sampah di Kota Yogyakarta mencapai 260.500 kg/hari atau 1.041 m³/hari dengan timbulan sampah terbesar berasal dari Kecamatan Umbulharjo, sementara sampah yang

terangkut ke tempat pembuangan akhir sebesar 213.750 kg/hari atau sebesar 82,05%. Timbulan sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan akan berimplikasi pada peningkatan produksi sampah. Berdasarkan hasil studi lapangan, permasalahan yang timbul dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta adalah bahwa masyarakat masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya, keterbatasan sarana prasarana, serta keterbatasan lahan. Sementara itu, kapasitas TPA yang semakin terbatas menyebabkan perlunya alternatif lain dalam pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya pendekatan kepada masyarakat terkait penanganan sampah di perkotaan. DLH telah melakukan pelatihan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 volume timbulan sampah mengalami penurunan. Penurunan volume sampah di Kota Yogyakarta salah satunya disebabkan oleh ketersediaan sarana prasarana persampahan di Kota Yogyakarta dalam memperlancar proses pengangkutan, di samping itu adanya pengelolaan sampah secara 3R juga menjadi salah satu upaya dalam mengurangi volume timbulan sampah. Pengolahan sampah secara 3R di Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -6,68%. Penurunan persentase pengelolaan sampah secara 3R ini dimungkinkan saat ini telah terjadi kejenuhan dalam pelaksanaan program 3R yang telah berlangsung sejak tahun 2009 sehingga untuk mengurangi volume timbulan sampah di Kota Yogyakarta diperlukan metode alternatif yang lebih efektif.

Volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali didapatkan dari pengurangan volume timbulan sampah dengan volume sampah yang dibuang ke TPA serta volume sampah yang tidak terbangun dan tidak dimanfaatkan kembali, sehingga mendapatkan hasil dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni 70 ton/hari turun menjadi 45,28 ton/hari, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -10,32% per tahun.

Penurunan volume sampah yang dikelola kembali berbanding lurus dengan persentase volume sampah yang dikelola secara 3R di perkotaan dimana nilai yang ditunjukkan juga memiliki kecenderungan menurun, yakni 26,62% tahun 2012 menjadi 20,01% tahun 2016. Volume sampah yang dikelola secara 3R dilakukan melalui bank sampah dan pemanfaatan kembali oleh pemulung. Keberadaan bank sampah berkontribusi dalam pengelolaan sampah sekitar 3%, sementara pihak pemulung mampu berkontribusi sekitar 15%, dan sisanya merupakan perkiraan pemanfaatan kembali sampah dari perkantoran, industri, dan sumber produksi sampah lain yang tidak termasuk dalam cakupan perhitungan.

Untuk menunjang penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) disertai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi jumlah TPS.TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah, sekarang ini telah dikurangi karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah, antara lain sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap (menyengat), serta menjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu TPS juga akan disentralkan pada satu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal). Telah dilakukan penutupan 2 unit TPS dengan dipersiapkan pengganti di lokasi lain. Meskipun dilakukan penutupan TPS, daya tampung TPS di Kota Yogyakarta tidak berubah karena dilakukan peningkatan volume pada TPS yang masih tersedia.

Meskipun angka persentase volume sampah yang dikelola secara 3R menurun, kelompok bank sampah yang terbentuk dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan secara signifikan dengan pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yakni sebesar 60,52% pertahun.

Program pembentukan bank sampah ini merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pembentukan bank sampah dilakukan dalam lingkup RW sehingga terjadi peningkatan jumlah bank sampah di Kota Yogyakarta. Di tahun 2012 terdapat 61 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 terdapat 405 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Keberadaan bank sampah ini dapat menjadi usaha kreatif yang bernilai ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan bank sampah dan

masyarakat di wilayah itu sendiri. Peningkatan jumlah kelompok bank sampah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengelolaan sampah secara 3R di Kota Yogyakarta.

Sementara itu, keberadaan sarana prasarana yang dimiliki pemerintah Kota Yogyakarta menjadi salah satu kunci pengelolaan sampah di perkotaan Yogyakarta untuk mengurangi volume timbulan sampah di Kota Yogyakarta melalui proses pengangkutan sampah. Adapun kondisi dan sarana prasarana persampahan di Kota Yogyakarta ditunjukkan oleh tabel berikut:

Keberadaan sarana dan prasarana persampahan di Kota Yogyakarta sebagian besar berada pada kondisi baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pengangkutan sampah secara optimal. Di samping itu, TPS dan depo sampah tersebar merata di seluruh Kota Yogyakarta. Akan tetapi, identifikasi jumlah TPS, container dan transfer depo yang ada belum mencukupi untuk memwadahi total timbulan sampah, selain itu di beberapa tempat terdapat beberapa konstruksi TPS yang tidak sesuai dengan spesifikasi peraturan yang ada (SNI 19-2454-2002) seperti:

1. Tidak sesuai desain
2. Letak/lokasi yang berada di trotoar sehingga mengganggu pengguna jalan dan mencemari lingkungan sekitar
3. Adanya penolakan dari masyarakat terkait penempatan TPS.

Permasalahan lain muncul dari penduduk di sekitar bantaran Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong yang masih membuang sampah di bantaran sungai disebabkan karena kurangnya sarana penampungan/pewadahan di kawasan tersebut. Selain itu, keberadaan sarana pengangkutan berupa 32 unit dumptruck dan 7 unit armroll memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengangkutan melebihi batas kapasitas sarana
2. Ritasi pengangkutan bertambah
3. Beberapa sarana melebihi masa aktif sehingga kurang optimal

c. Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Yogyakarta

Perhitungan timbulan sampah di masa mendatang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan rencana pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Perhitungan proyeksi timbulan sampah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perhitungan dengan melihat tren dari

data lima tahun terakhir serta proyeksi timbulan sampah berdasarkan hasil proyeksi penduduk.

Perhitungan proyeksi perkiraan timbulan sampah di Kota Yogyakarta berdasarkan tren dalam kurun waktu 2012-2016 menunjukkan bahwa timbulan sampah mengalami pertumbuhan yang menurun dengan jumlah timbulan sampah sebesar 180,43 ton/hari di tahun 2022. Perhitungan tersebut didasarkan dengan angka pertumbuhan rata-rata (-3,70%) setiap tahunnya. Meskipun menunjukkan tren yang menurun, diperlukan pengembangan program pengelolaan sampah secara mandiri mengingat keterbatasan kapasitas TPA serta persentase pengelolaan sampah secara 3R yang masih kecil dan cenderung menurun.

Sementara itu, perhitungan proyeksi timbulan sampah berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Di dalam SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, standar timbulan sampah kota besar adalah 3 liter/org/hari. Berdasarkan perhitungan menggunakan standar tersebut, diperkirakan pada tahun 2022 timbulan sampah di Kota Yogyakarta mencapai 1.579.653 L/orang/hari dengan tren sebagai berikut:

Tabel 2.258
Proyeksi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk

| No | Standar Timbulan Sampah (3 L/org/hari) | Proyeksi Jumlah Penduduk | | | | | |
|----|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Penduduk | 506.855 | 510.442 | 513.888 | 517.503 | 522.200 | 526.551 |
| 2 | Timbulan Sampah (L) | 1.520.564 | 1.531.327 | 1.541.664 | 1.552.510 | 1.566.599 | 1.579.653 |

Sumber : Analisis 2017

Jika dibandingkan proyeksi timbulan sampah berdasarkan tren dalam lima tahun terakhir dan berdasarkan proyeksi penduduk, terdapat perbedaan kecenderungan yang signifikan. Sebagai upaya pencegahan, perlu disusun alternatif pengelolaan sampah secara mandiri untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dikarenakan keterbatasan kapasitas dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

3. Limbah

Limbah domestik terbagi menjadi dua yaitu grey water dan black water. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah limbah rumah tangga yang dapat berupa limbah cucian dapur, limbah air sabun

cucian pakaian dan air buangan kamar mandi. Sedangkan black water berupa tinja manusia, urine, dan air limbah yang relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja diolah dengan tangki septik ataupun instalasi air limbah baik on site maupun off site.

a. Pengolahan Limbah

Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada. Sistem pengelolaan air limbah masyarakat di Kota Yogyakarta dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. *Black water*, ditampung dengan tangki septik, selanjutnya airnya diresapkan dalam sumur peresapan, sehingga meresap ke dalam tanah, dan menambah suplai air tanah.
2. *Black water* ditampung di IPAL komunal, kemudian *effluent*-nya dibuang ke sungai.
3. *Black water* langsung dibuang di IPAL regional dengan sistem perpipaan, dan *effluent*-nya dibuang ke sungai, masyarakat yang terhubung dalam saluran air limbah ini dikenakan wajib retribusi (WR).
4. *Black grey* dibuang langsung ke sungai tanpa diolah di tangki septik, sehingga dari kloset dialirkan langsung ke sungai. Hal ini disebabkan lokasi penduduk yang dekat dengan sungai, namun tidak tersedia lahan untuk membangun tangki septik maupun tangki septik komunal. Sebagian penduduk buang air besar langsung ke sungai dikarenakan lokasi permukiman dekat dengan sungai dan telah menjadi kebiasaan penduduk.
5. *Grey water* langsung diresapkan ke dalam sumur peresapan
6. *Grey water* langsung dibuang ke sungai
7. *Grey water* dibuang ke IPAL regional dengan sistem perpipaan, dan masyarakat dikenakan retribusi (WR)

Pengelolaan limbah domestik sebagian besar dilakukan secara pribadi, sebagian besar rumah penduduk telah dilengkapi dengan jamban dan septik tank. Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi (Kawasan Malioboro, Ngasem, dan Gunung Ketur) pengelolaannya dilakukan dengan saluran yang terhubung ke fasilitas IPAL Sewon di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Sementara itu, pengelolaan pada

permukiman di kawasan bantaran sungai dilakukan dengan mendirikan MCK komunal yang dilengkapi dengan septik tank. Kawasan bantaran sungai yang belum terjangkau oleh pelayananan perpipaan air limbah, pengolahan limbah domestik dilakukan dengan sistem komunal.

Selain pengolahan limbah on-site yang dimiliki pribadi maupun komunal, Kota Yogyakarta memiliki jaringan saluran pengolahan limbah perkotaan yang terintegrasi dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Sistem pengelolaan terdiri dari jaringan pipa lateral, pipa induk, dan satu unit pengolahan air limbah (IPAL) di Sewon. Jaringan pengolahan limbah yang terintegrasi dengan sistem IPAL Sewon pada tahun 2010 telah mencakup hampir seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta kecuali Kotagede dan Wirobrajan.

b. Cakupan Pelayanan

Pengolahan limbah rumah tangga dilakukan melalui septik tank pribadi serta septik tank komunal. Septik tank yang baik merupakan septik tank yang melayani pengolahan limbah sehingga dapat melakukan proses penguraian bakteri sebagaimana mestinya. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2016 presentase cakupan sistem air limbah setempat yang memadai mengalami peningkatan. Jumlah tangki septik tank yang baik terus mengalami peningkatan yaitu 30% di tahun 2013 meningkat hingga 60% di tahun 2016.

Sementara itu, untuk sistem air limbah skala komunitas di Kota Yogyakarta hingga tahun 2016 memiliki cakupan pelayanan sebesar 22,19%. Cakupan pelayanan tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 dengan pertumbuhan rata-rata 4,61% pertahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pelayanan sistem air limbah domestik di Kota Yogyakarta. Sementara itu, untuk pengolahan air limbah industri dilakukan dengan penerapan kewajiban untuk melakukan pengolahan limbah secara mandiri sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu disertai dengan pengawasan yang kuat agar dapat diberlakukan dengan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.259
Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun
2012-2016

| No. | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Jumlah penduduk yang terlayani | Jiwa | 79.250 | 81.930 | 89.350 | 89.350 | 98.350 | 5,55 |
| 2. | Jumlah penduduk | Jiwa | 427.591 | 406.660 | 413.936 | 403.110 | 403.110 | 0,90 |
| 3. | Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota | % | 18,53 | 20,15 | 21,59 | 22,20 | 22,19 | 4,61 |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misi pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 diharapkan dapat mencapai 5,8 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 3,02 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 10,70 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran angka 5,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi : (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2018 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2018 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari indikator pencapaian pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 dapat mencapai 5,16 persen. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar sejak tahun 2012 hingga 2014, pertumbuhannya cenderung naik, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yang rata-rata pertumbuhannya mendapai 7,75 setiap tahunnya. Berikut disajikan PDRB tahun 2012-2015.

Tabel 3.1. PDRB ADHK Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Kecamatan | ADHK (Juta Rupiah) | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012* | 2013* | 2014* | 2015** |
| Kecamatan Mantrijeron | 292.144,10 | 306.835,70 | 320.772,45 | 335.863,71 |
| Kecamatan Kraton | 157.582 | 166.117,60 | 173.088,96 | 180.875,99 |
| Kecamatan Mergangsan | 294.049,70 | 309.305,70 | 327.560,72 | 343.880,14 |
| Kecamatan Umbulharjo | 1.347.707,47 | 1.421.816,13 | 1.503.796,09 | 1.570.116,09 |
| Kecamatan Kotagede | 263.235,50 | 275.155,80 | 287.437,10 | 299.917,28 |
| Kecamatan Gondokusuman | 1.068.439,10 | 1.122.395,20 | 1.185.665,77 | 1.247.994,86 |
| Kecamatan Danurejan | 590.385,10 | 636.938,20 | 674.675,28 | 713.992,12 |
| Kecamatan Pakualaman | 76.017,60 | 80.138,90 | 83.299,07 | 87.320,94 |
| Kecamatan Gondomanan | 532.017,80 | 562.812,10 | 589.616,09 | 620.047,77 |
| Kecamatan Ngampilan | 131.406,50 | 138.428,30 | 144.224,41 | 150.427,46 |
| Kecamatan Wirobrajan | 347.818,90 | 365.156,70 | 384.062,29 | 403.056,80 |
| Kecamatan Gedongtengen | 249.915,80 | 267.531,70 | 282.146,79 | 296.630,74 |
| Kecamatan Jetis | 478.566,40 | 508.306,80 | 538.130,12 | 567.665,75 |
| Kecamatan Tegalrejo | 321.603,30 | 337.906,50 | 353.485,10 | 370.653,36 |

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2013-2015 (BPS, 2014-2016)

Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018 perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5.16 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pada kurun waktu 2012-2015, laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta cenderung mengalami perlambatan. Sektor-sektor utama Kota Yogyakarta adalah sektor tersier, antara lain akomodasi, transportasi, informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan.

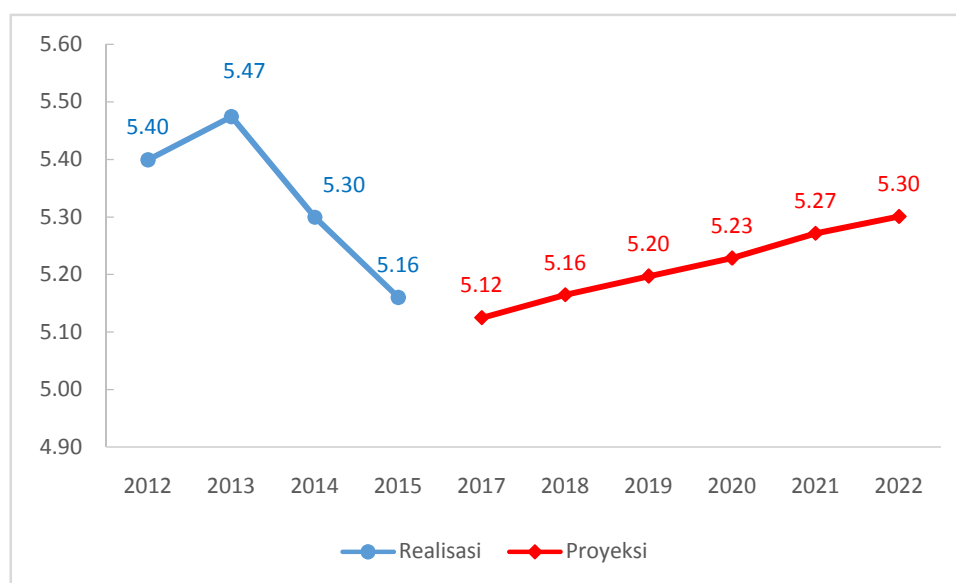
Tabel dibawah ini menyajikan pertumbuhan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta.

Tabel 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015 dan
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

| Realisasi/ Proyeksi | Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Realisasi | 2012 | 5,40 |
| | 2013 | 5,47 |
| | 2014 | 5,30 |
| | 2015 | 5,16 |
| Proyeksi | 2017 | 5,12 |
| | 2018 | 5,16 |
| | 2019 | 5,20 |
| | 2020 | 5,23 |
| | 2021 | 5,27 |
| | 2022 | 5,30 |

Sumber;

1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta 2011-2015, BPS Kota Yogyakarta
2. Hasil olahan 2017



Gambar 3.1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015 dan
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
 Sumber: Hasil Analisis 2016

Dengan menggunakan metode proyeksi geometrik maka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 20018-2022 diperkirakan akan terus meningkat. Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bahwa pertumbuhan sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan melambat, sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya diperkirakan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utama di Kota Yogyakarta adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa pendidikan.

▪ Inflasi

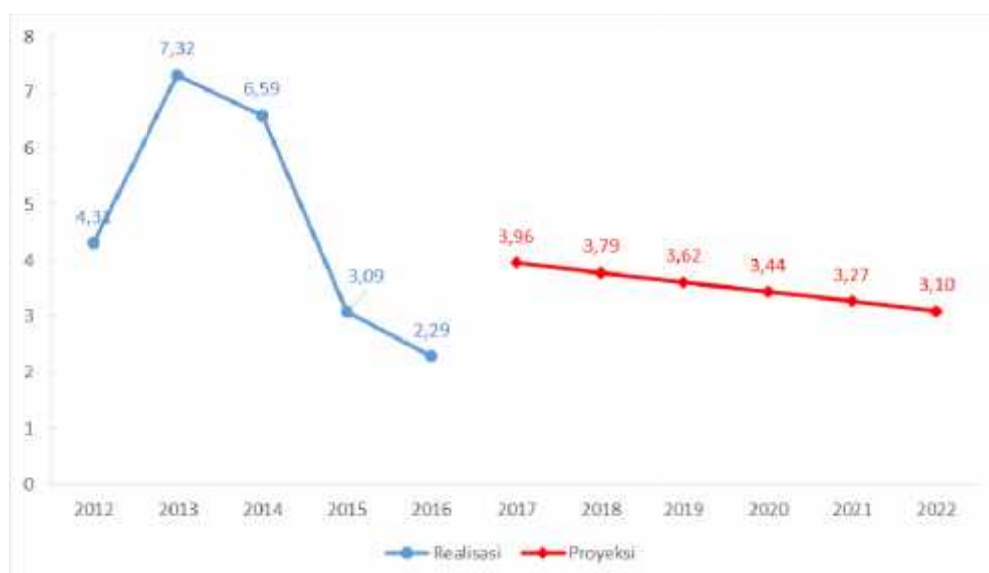
Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian dengan pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2016, tingkat inflasi Kota Yogyakarta mencapai 2,29%. Angka ini merupakan yang terendah selama beberapa tahun terakhir. Tingkat inflasi Kota Yogyakarta relatif lebih rendah daripada tingkat inflasi nasional yang mencapai 3,02%. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Dibawah ini disajikan tingkat inflasi dan proyeksi tingkat inflasi Kota Yogyakarta.

Tabel 3.
Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan
Proyeksi Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

| Realisasi/ Proyeksi | Tahun | Laju Inflasi |
|---------------------|-------|--------------|
| Realisasi | 2012 | 4,31 |
| | 2013 | 7,32 |
| | 2014 | 6,59 |
| | 2015 | 3,09 |
| | 2016 | 2,29 |
| Proyeksi | 2017 | 3,96 |
| | 2018 | 3,79 |
| | 2019 | 3,62 |
| | 2020 | 3,44 |
| | 2021 | 3,27 |
| | 2022 | 3,10 |

Sumber:

1. Data Perekonomian dan Perbankan DIY Desember 2012-2015, Bank Indonesia
2. Berita Utama Statistik Januari 2017



Gambar 3.
Grafik Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan
Proyeksi Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Hasil Analisis 2016

Bila pola pergerakan inflasi diasumsikan sama dengan pola pergerakan inflasi tahun-tahun sebelumnya maka tingkat inflasi Kota Yogyakarta diperkirakan menurun. Walaupun begitu tetap terdapat faktor resiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi. Beberapa faktor pendorong dan penghambat inflasi, antara lain adalah 1) ketersediaan bahan pangan utama, 2) fluktuasi kurs nilai tukar, 3) fluktuasi harga minyak dunia, dan 4) rasionalitas produsen dan konsumen. Pentingnya pengendalian inflasi akan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- **TenagaKerja**

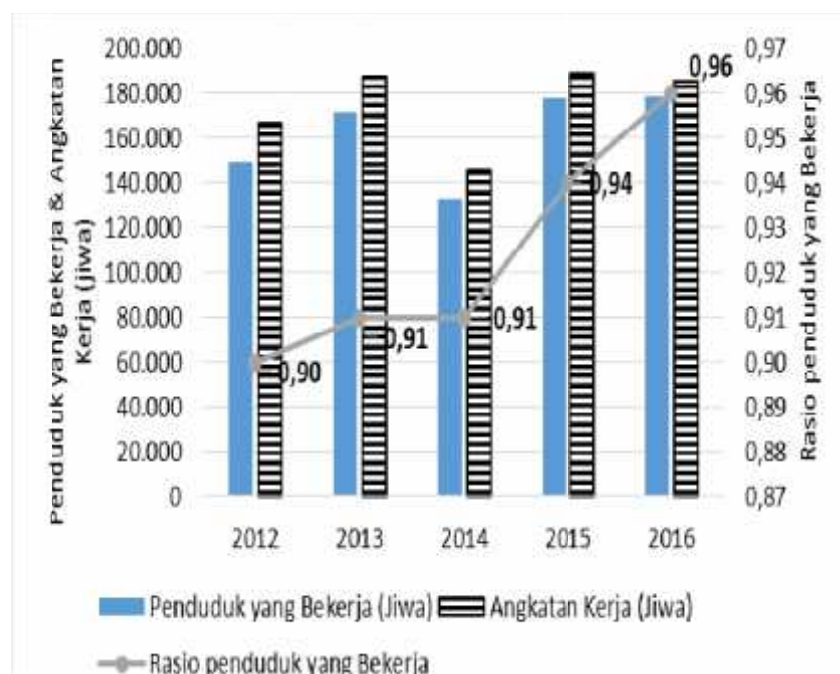
Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 0,96 di tahun 2016. Tabel dibawah ini menyajikan rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta.

Tabel 3. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 | Penduduk yang Bekerja | Jiwa | 149.189 | 171.108 | 132.713 | 177.895 | 178.200 | 4,54 |
| 2 | Angkatan Kerja | Jiwa | 166.406 | 187.205 | 145.850 | 188.555 | 184.921 | 2,67 |
| 3 | Rasio penduduk yang Bekerja | | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 1,63 |

Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2017, diolah

Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari tren perkembangannya, diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerja cenderung meningkat, meski pertumbuhannya lambat. Peningkatan rasio ini diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja maupun jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,96 atau sebesar 96% dari total angkatan kerja telah memperoleh kesempatan bekerja, sementara untuk 4% lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

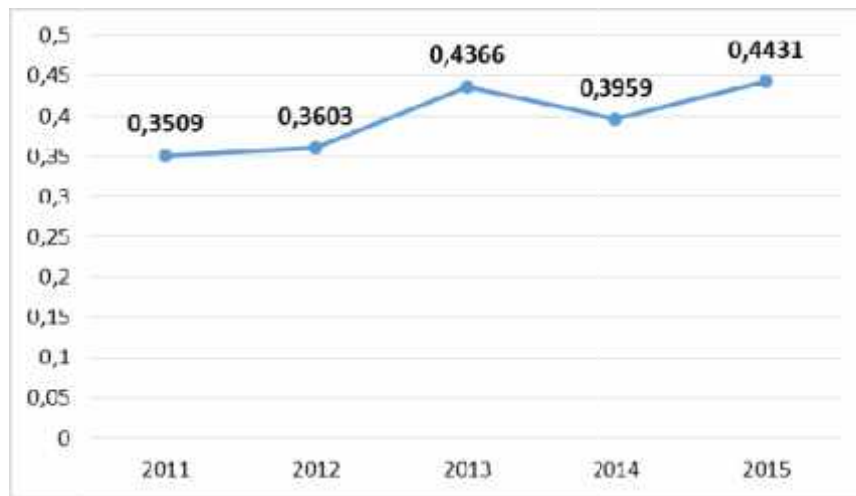
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

A. Ekonomi Makro

1. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatif baik. Selama kurun waktu 2012-2015, PDRB per kapita Kota Yogyakarta meningkat dari 51.652 juta rupiah di tahun 2012 menjadi 65.153 juta rupiah di tahun 2015. Meskipun demikian, peningkatan kesejahteraan ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2012-2015 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14% per tahun. Peningkatan Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin besar. Peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah. Meski demikian, ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta masih tergolong dalam kategori moderat. Gambar dibawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015.



Gambar 3.

Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017

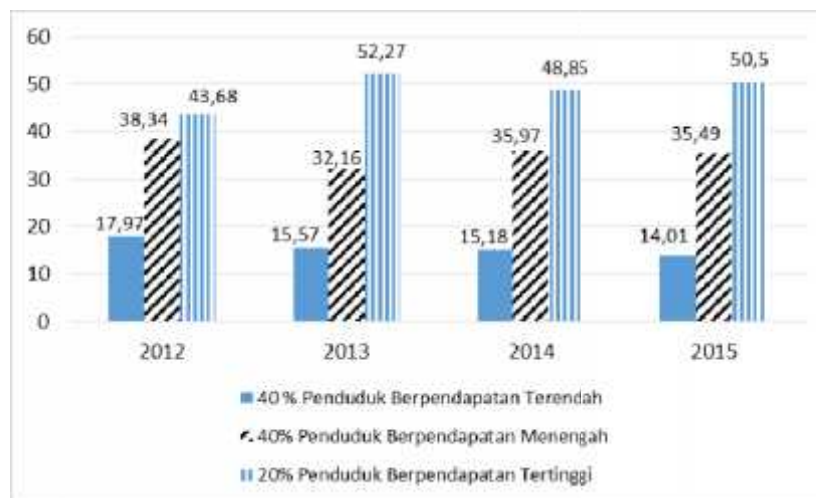
Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadi fokus penggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menikmati $\geq 17\%$ dari total pendapatan yang ada.

Tabel 4.1.2
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| No | Kelompok Penduduk | Persentase Pendapatan (%) | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 40 % Penduduk Berpendapatan Terendah | 17,97 | 15,57 | 15,18 | 14,01 | -7,96 |
| 2 | 40% Penduduk Berpendapatan Menengah | 38,34 | 32,16 | 35,97 | 35,49 | -2,54 |
| 3 | 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi | 43,68 | 52,27 | 48,85 | 50,50 | 4,95 |
| Kriteria Ketimpangan | | Rendah | Moderat | Moderat | Moderat | |

Sumber :Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016 diolah)

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kota Yogyakarta memiliki persentase pendapatan yang terus menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata -7,96% pertahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah ada pada kategori ketimpangan rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan mereka masih wajar dan belum menunjukkan ketimpangan dengan penduduk yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Namun, pada tahun 2013 persentase tersebut turun menjadi 15,57%. Jumlah tersebut terus menurun sampai tahun 2014 menjadi 15,18% dan sedikit naik menjadi 14,01% di tahun 2015. Pada kedua tahun tersebut persentase pendapatan penduduk dengan penghasilan 40% terbawah termasuk dalam kategori ketimpangan moderat. Grafik dibawah ini menunjukkan Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta tahun 2012-2015.



Gambar 3

Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta tahun 2012-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan antara penduduk dengan pendapatan 40% terbawah dengan penduduk yang berpendapatan 20% teratas tidak sebanding karena penduduk dengan penghasilan 20% teratas tumbuh lebih cepat. Itu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, besarnya ketimpangan pendapatan dari kelompok-kelompok penduduk yang ada perlu diperhatikan agar kesenjangan/ketimpangan pendapatan tidak semakin besar.

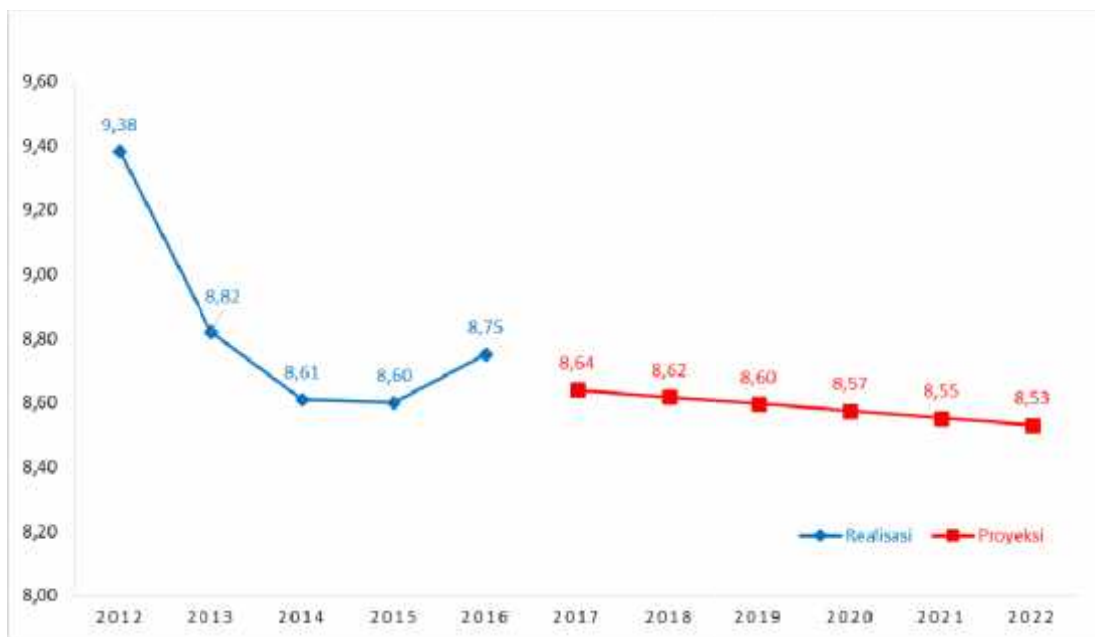
2. Kemiskinan

Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan setiap tahun selama kurun waktu 2012-2016 walaupun untuk tahun 2015-2016 terdapat sedikit peningkatan. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi DIY dan nasional. Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 9,38% dan pada tahun 2016 menurun hingga 8,75%. Kondisi ini berkesesuaian dengan indikator-indikator makro lainnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah pengangguran. Tabel dibawah ini menyajikan Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2004-2015 dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Tabel 3. Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2004-2015 dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

| Realisasi/ Proyeksi | Tahun | Tingkat Kemiskinan (%) |
|---------------------|-------|------------------------|
| Realisasi | 2012 | 9,38 |
| | 2013 | 8,82 |
| | 2014 | 8,61 |
| | 2015 | 8,60 |
| | 2016 | 8,75 |
| Proyeksi | 2017 | 8,64 |
| | 2018 | 8,62 |
| | 2019 | 8,60 |
| | 2020 | 8,57 |
| | 2021 | 8,55 |
| | 2022 | 8,53 |

Sumber: Hasil Olahan 2017



Gambar 3. Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Hasil Analisis 2017

Dengan menggunakan metode proyeksi geometrik untuk memprediksi tingkat kemiskinan pada tahun-tahun mendatang, maka tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta diperkirakan akan terus mengalami penurunan (Tabel 8.4). Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik dari pemerintah kota maupun dari masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kehidupan masyarakat yang minimum namun juga oleh sikap mental penduduk miskin untuk berusaha keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan program-program yang bersifat memberdayakan penduduk miskin agar mereka mau dan mampu berkarya bangkit dari kemiskinan.

B. Pertanian

- Keterbatasan lahan dalam pengembangan usaha

Pengembangan pertanian di Kota Yogyakarta terbatas pada ketersediaan lahan. Lahan kosong lebih menarik untuk dijadikan sebagai tempat usaha ataupun perumahan. Selain itu, tidak banyak warga yang

tertarik untuk melakukan kegiatan pertanian terutama untuk pertanian tanaman pangan. Oleh karena itu, bilapun terdapat kegiatan pertanian, kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk dijual kembali.

Potensi pertanian Kota Yogyakarta adalah pada tanaman non bahan makanan, seperti tanaman hias dan tanaman hortikultura. Kegiatan ini tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga cocok untuk daerah perkotaan. Untuk kegiatan tanaman pangan, akan dikembangkan usaha pembenihan padi. Sebagian lahan pertanian di Kota Yogyakarta akan dimanfaatkan untuk pembenihan padi guna mendukung kebutuhan benih DIY. Sementara itu, untuk kegiatan perikanan juga terkendala pada keterbatasan lahan dan ketersediaan air. Kegiatan perikanan yang umum dilakukan adalah budidaya lele. Namun, kegiatan tersebut terkendala oleh penyediaan kolam sehingga perkembangannya kurang memuaskan. Budidaya ikan hias juga sudah dikembangkan, namun karena masih dalam skala kecil sehingga perkembangannya juga belum signifikan.

C. Perdagangan

1. Peningkatan Jumlah Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, prasarana perdagangan juga mengalami perkembangan, terutama pusat perbelanjaan dan pasar modern. Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern ini untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah, lengkap, dan selalu tersedia. Dari tahun 2013-2017, secara umum jumlah pasar mengalami tetap 31 unit. Sedangkan keberadaan swalayan/ supermarket/ mall di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari 49 unit di tahun 2013 menjadi 72 unit di pertengahan tahun 2017.

Tabel 3.6
Jumah Sarana Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

| No | Jenis Sarana Perdagangan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Pasar | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2. | Swalayan/Supermarket/Mall | 49 | 52 | 52 | 59 | 72 |

Sumber: SIPD Numerik Kota Yogyakarta 2013-2017

Keberadaan pasar modern ini dirasa menguntungkan konsumen serta mampu menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang pasar tradisional. Saat ini, di Kota Yogyakarta, pendirian pasar modern sudah diatur melalui Peraturan Walikota. Perwal ini mengatur baik jumlah pasar/toko modern maupun jarak antar

pasar modern dan jarak dengan pasar tradisional. Pembatasan jumlah dan jarak ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat antar pedagang.

Selain pengaturan jarak dan jumlah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemilik modal. Untuk memulai usaha pasar/toko modern membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga perlu dicermati apakah pemodal ini merupakan warga Kota Yogyakarta atau berasal dari luar. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan adanya pasar/toko modern ini mampu menyerap tenaga kerja lokal/masyarakat sekitarnya. Keberadaan pasar tradisional juga diharapkan mampu menyerap pengusaha dan tenaga kerja lokal sebagai penggerak perekonomian kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung tumbuhnya pasar tradisional maupun pasar/toko modern agar keduanya bertumbuh bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Keterbatasan Lahan Pasar Tradisional

Keterbatasan lahan pasar merupakan salah satu permasalahan di bidang ekonomi karena dengan lahan yang terbatas tentunya pasar tradisional di Kota Yogyakarta akan sulit berkembang dan hal tersebut dapat berdampak pada perekonomian lokal. Pasar tradisional merupakan tempat jual beli dengan harga penawaran yang wajar sesuai dengan kemampuan beli masyarakat lokal. Kenyataan di lapangan, dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa secara umum terdapat penambahan usaha-usaha di area pasar. Dengan keterbatasan lahan yang ada memungkinkan pedagang pasar untuk tidak mendapat tempat usaha di dalam pasar sehingga mereka akan membuka usaha di sekeliling pasar yang tidak tertata serta berdagang pada tempat-tempat yang tidak berizin.

Lahan pasar tradisional di Kota Yogyakarta masih banyak yang merupakan tanah sultan sehingga kepemilikannya tidak dapat dipastikan selamanya. Sedangkan lahan kosong di Kota Yogyakarta dengan luas minimal untuk membangun pasar sudah mulai jarang ditemukan. Dengan adanya hal tersebut maka perlu adanya pengembangan pasar, baik secara vertikal maupun horisontal agar mampu menampung kegiatan jual beli pasar sehingga terwujud ekonomi kerakyatan.

3. Keterbatasan Modal Pedagang

Modal merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan seorang pedagang untuk membuka usahanya. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki modal tentu akan sulit untuk memulai atau melanjutkan usahanya.

Kasus yang ada di Kota Yogyakarta, beberapa pedagang ada yang berhenti dan tidak melanjutkan usahanya dikarenakan kekurangan modal (dana), dimana untuk memulai usahanya mereka menggunakan dana pinjaman dari bank atau lembaga lainnya dan ketika barang dagangannya laku, keuntungan yang didapat hanya bisa menutup pinjaman modal. Dengan adanya hal tersebut maka beberapa pedagang tersebut gulung tikar, namun bagi mereka yang tidak putus asa memutuskan untuk melanjutkan usahanya dan memulai dari awal. Kedepannya, perlu diberikan kredit modal bagi pedagang dengan bunga ringan serta pelatihan dalam memenejemen keuangan.

4. Belum Optimalnya Penataan Lahan Pasar

Keterbatasan lahan pasar di Kota Yogyakarta secara tidak langsung menyebabkan lahan pasar kurang tertata. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat lokasi-lokasi parkir yang berada di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar pasar. Di samping itu, adanya pedagang-pedagang yang berjualan di luar pasar turut menyebabkan kondisi pasar yang kurang tertata. Penataan ruang dalam pasar juga perlu diatur ulang terkait masih adanya lapak dagang yang penempatannya kurang tepat. Kedepannya, perlu ada optimalisasi pengelompokan pedagang jenis barang tertentu untuk mempermudah pembeli dalam berbelanja. Selain itu, penataan ruang diperlukan terkait dengan penempatan kelompok dagang barang tertentu. Hal tersebut dikarenakan beberapa pasar di Kota Yogyakarta tidak hanya terdiri dari 1 lantai saja sehingga penempatan barang dagangan di lantai atas perlu memperhatikan kondisi barang dan karakteristik konsumen.

5. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Salah satu pelaku usaha informal di Kota Yogyakarta adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari tahun 2012-2016, jumlah eksisting PKL di Kota Yogyakarta terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 16,11% per tahun. Pada tahun 2012 tercatat jumlah PKL sebanyak 3.907 unit dan meningkat menjadi 7.100 unit di tahun 2016. Berikut disajikan jumpah PKL di Kota Yogyakarta.

Tabel 3. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 1 | Jumlah Eksisting PKL | Unit | 3.907 | 6.406 | 6.776 | 7.070 | 7.100 | 16,11 |
| 2 | PKL Berizin | Unit | 1.858 | 2.242 | 2.371 | 5.495 | 5.495 | 31,14 |
| 3 | Persentase PKL Berizin | % | 47,56 | 35,00 | 34,99 | 77,72 | 77,39 | 12,94 |

Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017

Seluruh PKL di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 belum sepenuhnya memiliki izin dari pemerintah daerah. Persentase PKL yang berizin menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2014-2016 dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 12,94% per tahun. Rata-rata pertumbuhan PKL berizin jauh lebih tinggi dari jumlah eksisting PKL, sehingga diharapkan kedepannya seluruh eksisting PKL di Kota Yogyakarta memiliki izin dari pemda. Untuk mewujudkan hal itu, perlu diadakan pendataan sekaligus pembinaan PKL agar seluruh PKL yang ada di Kota Yogyakarta mendapat legalitas dalam berjualan dan mengurangi resiko perselisihan dengan pemerintah.

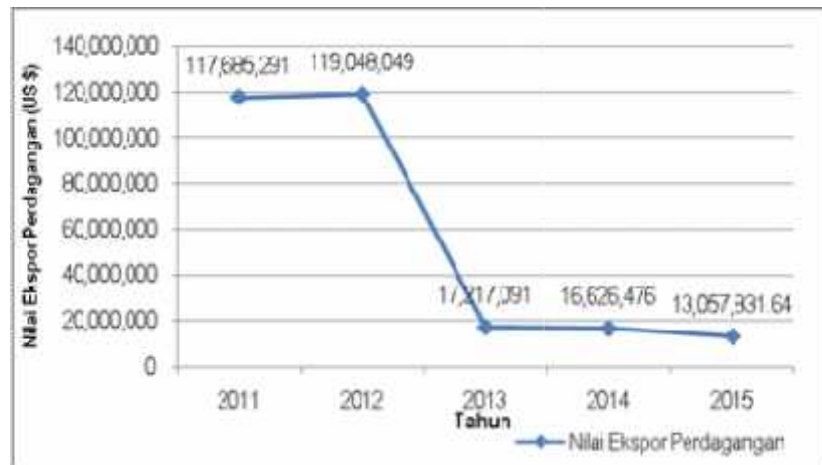
6. Menurunnya Nilai Ekspor Perdagangan

Ekspor perdagangan menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutan dapat menembus perdagangan di pasar internasional. Namun, ekspor perdagangan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011-2015 cenderung menurun berdasarkan data Disperindagkoptan. Pada tahun 2011, nilai ekspor perdagangan yang tercatat di Kota Yogyakarta mencapai 117,7 juta US\$. Nilai tersebut terus menurun sampai pada angka 13,1 juta US\$ di tahun 2015. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013.

Selama ini, pendataan ekspor tidak dilakukan secara langsung oleh Disperindagkoptan Kota Yogyakarta. Data nilai ekspor yang diperoleh Disperindagkoptan Kota Yogyakarta berasal dari instansi Provinsi DIY karena pelaporan kegiatan ekspor merupakan wewenang di tingkat provinsi. Selain hal tersebut, kegiatan ekspor Kota Yogyakarta banyak yang tidak termonitoring sehingga dari tahun ke tahun nilainya semakin menurun. Pelaku usaha biasanya melakukan pengiriman di pelabuhan sehingga data ekspor justru tersedia di pelabuhan. Selain itu, beberapa eksportir skala kecil lebih memilih untuk menitipkan barang dagangannya lewat cargo sehingga menghemat biaya produksi.

Untuk meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif, perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangan kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskan untuk membantu

UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perak dan pemanfaatan limbah agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha semakin baik dan berdaya saing. Selain hal tersebut, perlu adanya monitoring terhadap kegiatan ekspor di Kota Yogyakarta karena bila dilihat di lapangan, produk UMKM di Kota Yogyakarta sudah banyak yang menembus pasar internasional, namun yang tercatat masih belum seluruhnya.



Gambar 3.6
Nilai Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
Sumber: Disperindagoptan, 2016

D. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

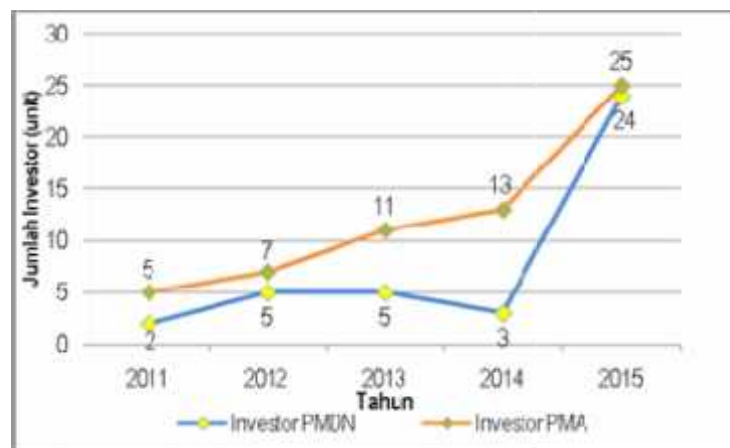
Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Yogyakarta banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi DIY dengan morfologi perkotaan. Tabel dibawah ini menunjukkan Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 3.
Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No | Jenis Perusahaan | Satuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|--------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------------|
| 1 | Investor PMDN | Unit | 5 | 5 | 3 | 24 | | |
| 2 | Investor PMA | Unit | 7 | 11 | 13 | 25 | | |
| Total | | Unit | 12 | 16 | 16 | 49 | | |

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel di atas merupakan perusahaan investor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum, jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama kurun waktu 2012-2015 terjadi peningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2012 hanya terdapat 12 perusahaan penanam modal yang melakukan izin berinvestasi di Kota Yogyakarta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 49 unit perusahaan. Dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebih mendominasi kegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta. Grafik dibawah ini menunjukkan Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015



Gambar 3.
Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016

E. Pariwisata

1. Kurangnya Pemahaman Sapta Pesona oleh Beberapa Pelaku Wisata

Kota Yogyakarta memiliki visi pariwisata berbasis budaya. Artinya kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan mendasarkan pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal tersebut secara tersirat menempatkan Kraton Yogyakarta sebagai

pusat budaya Kota Yogyakarta. Nilai-nilai Kraton diadopsi dan dikembangkan di masyarakat.

Selama ini, cerminan pariwisata berbasis budaya masih terbatas pada penggunaan pakaian adat dan penyajian tarian daerah pada penyelenggaraan acara-acara di Kota Yogyakarta. Selain itu adanya event kesenian, festival, dan pelestarian kesenian tradisi yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun sesungguhnya kebudayaan dibangun dengan membangun moral, perilaku, dan akhlak dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata budaya tidak hanya penyelenggaraan festival semata namun juga menumbuhkan kesadaran akan pariwisata di masyarakat.

Kunjungan wisata ke suatu daerah dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain ketersediaan obyek wisata yang menarik serta kenyamanan dan keamanan wisatawan. Kenyamanan dan keamanan wisatawan menjadi hal yang penting karena berkorelasi dengan kepuasan berwisata. Wisatawan yang merasa puas berpeluang untuk kembali dan merekomendasikannya ke orang lain. Citra positif pariwisata Kota Yogyakarta sudah terbangun. Wisatawan mengingat Kota Yogyakarta sebagai kota dengan penduduk yang ramah dan suka menolong. Namun di sisi lain, masih ada pelaku usaha wisata yang berperilaku kurang baik terhadap wisatawan. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha di bidang pariwisata yang rela menggunakan cara curang demi meningkatkan keuntungannya, misalnya pemaksaan kehendak tujuan wisata, penawaran harga yang tidak wajar, serta ketidaksesuaian harga barang dengan kualitas. Di Kota Yogyakarta, pelaku usaha wisata tidak terbatas hanya oleh warga asli Yogyakarta tetapi juga ada pendatang-pendatang bahkan dari luar Jawa. Pendatang ini memiliki karakteristik pribadi yang mungkin berbeda dengan penduduk asli sehingga memiliki pendekatan yang berbeda terhadap wisatawan. Namun, siapapun itu, mereka adalah pelaku wisata yang perlu memberikan nilai-nilai positif terhadap wisatawan. Kesadaran akan sikap dan perilaku positif terhadap wisatawan inilah yang perlu dibangun.

Selain hal tersebut, pemahaman sapta pesona wisata tidak hanya perlu dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pariwisata saja, melainkan oleh penduduk Kota Yogyakarta dan wisatawan yang berkunjung. Sikap sadar wisata perlu dimiliki oleh setiap warga Kota Yogyakarta. Partisipasi masyarakat diperlukan karena manusia tidak mungkin lepas dari keadaan sekelilingnya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakat terlibat dan tidak merasa terpinggirkan oleh majunya kegiatan pariwisata Kota Yogyakarta. Fungsi sosial masyarakat dalam memberikan kemandirian, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan

harus berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan pariwisata berdaya saing tinggi. Sedangkan pemahaman sapta pesona oleh wisatawan perlu dilakukan, terutama terkait dengan kebersihan di area wisata. Kebanyakan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta merupakan wisatawan rombongan dan ketika mereka meninggalkan lokasi wisata cenderung menimbulkan lingkungan kotor karena dipenuhi oleh sampah makanan. Oleh karenanya, pemahaman sapta pesona wisata ini perlu dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam pariwisata Kota Yogyakarta.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Kota Yogyakarta ditandai dari terbatasnya pos-pos yang melayani informasi pariwisata serta keberadaan kantong parkir yang masih belum terkelola dengan baik. Pos-pos informasi pariwisata sangat membantu wisatawan dalam memahami objek wisata di Kota Yogyakarta serta mendapatkan akomodasi wisata ketika ada di Yogyakarta. Adanya hal tersebut turut menghindarkan wisatawan dari tindakan merugikan oleh pelaku usaha wisata.

Keberadaan kantong parkir di Kota Yogyakarta sejauh ini masih perlu melalui beberapa penataan ulang. Di awal tahun 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mulai melakukan penataan ruang di kawasan Malioboro dengan merelokasi ruang parkir dari trotoar Jalan Malioboro ke taman parkir Abu Bakar Ali di sebelah utara kawasan malioboro. Sebenarnya, pada tahun 2014 pemerintah Kota Yogyakarta sudah membangun kantong parkir untuk kendaraan besar di daerah Ngabean. Namun, lokasi tersebut dirasa kurang strategis karena sedikit jauh dari kawasan Malioboro dan keraton. Tidak adanya kendaraan yang mengangkut wisatawan menuju lokasi wisata menyebabkan bus pariwisata enggan untuk memarkirkan busnya di Ngabean, mereka justru memilih memarkir kendaraan di depan Bank Indonesia sehingga tampak jurang tertata. Adanya kantong parkir Abu Bakar Ali menjadi alternatif wisatawan untuk memarkirkan kendaraanya karena lokasinya berdekatan dengan kawasan wisata Malioboro. Kedepannya, perlu ada penataan ruang parkir pada kawasan wisata lainnya, misalnya seperti daerah keraton dan sebagainya.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 35,44 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 57,41 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 7,15 persen. Kenaikan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta sebesar 10,03 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp1.550.750.540.759,- (satu trilyun lima ratus lima puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah). Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp.541.156.670.627,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp.893.448.864.132,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp.116.145.006.000,- |

Secara rinci Tabel 3.7 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2018.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

| URAIAN | Realisasi | | | APBD Tahun Berjalan | Proyeksi/Target Tahun Rencana |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | 2014 | 2015 (Perubahan) | 2016 (Perubahan) | 2017 | 2018 |
| PENDAPATAN DAERAH | 1,459,742,435,083,81 | 1,434,009,588,218.85 | 1,595,318,043,914.00 | 1,510,296,678,058 | 1,550,750,540,759 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 470,641,528,444.03 | 510,548,822,809.51 | 515,345,413,629.00 | 511,132,838,058 | 541,156,670,627 |
| Pajak Daerah | 253,461,936,189.00 | 304,068,622,926.00 | 326,850,000,000.00 | 336,106,500,000 | 348,756,500,000 |
| Retribusi Daerah | 56,095,909,175.00 | 40,057,651,205.00 | 38,638,041,078.00 | 35,045,667,950 | 33,934,346,301 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 14,087,531,070.13 | 12,938,168,143.00 | 16,270,773,163.00 | 25,909,452,193 | 25,924,504,087 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 146,996,152,009.90 | 153,484,380,535.51 | 133,586,599,388.00 | 114,071,217,915 | 132,541,320,239 |
| DANA PERIMBANGAN | 663,712,266,941.00 | 652,748,113,159.00 | 917,858,726,569.00 | 883,018,834,000 | 893,448,864,132 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 42,720,014,941.00 | 28,040,062,159.00 | 62,928,532,000.00 | 62,454,190,000 | 62,454,190,000 |
| Dana Alokasi Umum | 618,742,352,000.00 | 622,365,351,000.00 | 670,278,830,000.00 | - 670,278,830,000 | 670,278,830,000 |
| Dana Alokasi Khusus | 2,249,900,000.00 | 2,342,700,000.00 | 184,651,364,569,00 | 150,285,814,000 | 160,715,844,132 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 352,388,639,698.78 | 270,712,652,250.34 | 162,113,903,716.00 | 116,145,006,000 | 116,145,006,000 |
| Hibah | - | - | 3,093,000,000.00 | - | - |
| Dana Darurat | - | - | - | - | - |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 95,415,455,298.78 | 109,896,115,250.34 | 108,860,439,716.00 | 108,645,006,000 | 108,645,006,000 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 217,566,892,000.00 | 150,891,200,000.00 | 40,424,864,000.00 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 12,406,292,400.00 | 9,925,337,000.00 | 9,735,600,000.00 | | |

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta dan data diolah

3.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2017 masih pada kisaran 58,48 persen dan PAD menyumbang sebesar 33,84 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2018 masih mengacu kebijakan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.

7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Pada tahun 2016, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 540,5 Milyar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 104,88%. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target (lihat tabel 3.8).

Tabel 3.8
Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

| URAIAN | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) |
| 1. Hasil Pajak Daerah | 227.749 | 104,9 | 253.462 | 97,3 | 304,068 | 106,98 | 334,057 | 102,21 |
| 2. Hasil Retribusi Daerah | 40.339 | 108,4 | 56.096 | 132,2 | 40,057 | 101,87 | 42,111 | 108,99 |
| 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12.596 | 99,9 | 14.088 | 111,9 | 12,938 | 100,00 | 16,27 | 100,00 |
| 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 102.368 | 117,0 | 146.996 | 165,8 | 153,484 | 109,90 | 148,064 | 110,84 |
| Pendapatan Asli Daerah | 383.052 | 108,1 | 470.642 | 116,4 | 510,548 | 107,22 | 540.504 | 98,89 |

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2018, meliputi:

- Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2018, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

- Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatankualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
- Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
- Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

B. Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, definisi dari Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD tahun 2017 relatif besar mencapai 58,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Capaian realisasi untuk DAU sebesar 100 persen sedangkan DAK sebesar 82,12 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

| URAIAN | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) |
| 1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 55.338 | 91,2 | 42.720 | 66,3 | 28.040 | 54,74 | 53.510 | 85,03 |
| 2. Dana Alokasi Umum | 597.212 | 100,0 | 618.742 | 100,0 | 622.365 | 100,00 | 670.278 | 100 |
| 3. Dana Alokasi Khusus | 6.221 | 100,0 | 2.250 | 100,0 | 2.342 | 100,00 | 151.641 | 82,12 |
| Dana Perimbangan | 658.771 | 99,2 | 663.712 | 96,8 | 652.748 | 96,57 | 875.430 | 95,38 |

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2016; diolah.

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- J) Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2018 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2016, TA 2015 dan TA 2014 ; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2018.
- J) Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHTTA 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2018 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2016, TA 2015 dan TA 2014 ; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2018.
- J) Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2018 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2017.
- J) Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2018. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan.
- J) Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian

dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, nilai pendapatan ini mencapai 161,745 Milyar rupiah dengan capaian target sebesar 99,77 %.

Tabel 3.10
Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

| URAIAN | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) | Realisasi (Rp juta) | Capaian (%) |
| 1. Pendapatan Hibah | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | 3.093 | 100 |
| 2. Dana Darurat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0 |
| 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 78.308 | 103,3 | 95.415 | 115,3 | 109.896 | 98,9 | 108.491 | 99,66 |
| 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 177.684 | 100,0 | 217.567 | 899,5 | 150.891 | 80,00 | 40.424 | 100 |
| 5. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 11.765 | 100,0 | 12.406 | 91,9 | 9.735 | 88,20 | 9.735 | 100 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 267.757 | 100,9 | 325.389 | 270,2 | 153.484 | 109,90 | 161.745 | 99,77 |

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

-) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2018.
-) Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2018.
-) Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2018. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2018 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2018, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2016.

- J) Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- J) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbang belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih pada kisaran 45,52 persen pada tahun 2016 dan 41,52 pada tahun 2017, sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 54,48persen pada tahun 2016 dan 58,47pada tahun 2017. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja mencapai 46,06 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 90,84 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Realisasi belanja pada tahun 2016 hanya mencapai 92,49 persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 95,69 persen dan Belanja Langsung mencapai 89,91 persen.

Tabel 3.11

Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016 (juta rupiah)

| Uraian | 2015 | | | 2016 | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % |
| Belanja Tidak Langsung | 548.108 | 724.041 | 88,40 | 819.734 | 784.378 | 95,69 |
| - Pegawai | 527.196 | 669.675 | 89,39 | 741.905 | 716.343 | 96,55 |
| - Bunga | 21.719 | - | - | | | |
| - Subsidi | | - | - | | | |
| - Hibah | 10.000 | 47.372 | 87,31 | 69.460 | 62.046 | 89,33 |
| - Bantuan sosial | 3.358 | 4.534 | 90,93 | 2.173 | 1.545 | 71,09 |
| - Bantuan Keuangan | 2.531 | 2.434 | 94,14 | 3.194 | 3.031 | 94,89 |
| - belanja tidak terduga | 8.055 | 25 | 0,31 | 3.000 | 1.411 | 47,06 |
| Belanja langsung | 705.833 | 815.658 | 85,36 | 980.972 | 881.04 | 89,81 |
| - Pegawai | 162.52 | 143.505 | 88,29 | 171.747 | 163.774 | 95,36 |
| - Barang & jasa | 502.616 | 415.757 | 82,7 | 521.782 | 457.678 | 87,71 |
| - Modal | 290.351 | 256.395 | 88,31 | 287.443 | 259.589 | 90,31 |
| BELANJA | 1.253 | 1.539 | 86,76 | 1.800.707 | 1.665.420 | 92,49 |

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2017;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

2. Belanja Bunga

Alokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

3. Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

4. Belanja Hibah

Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

5. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

6. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2017 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

7. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.

8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran. 2018.

B. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakanbelanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

| URAIAN | Realisasi | | | APBD Tahun Berjalan | Proyeksi/Target Tahun Rencana |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | 2014 | 2015 (perubahan) | 2016 (perubahan) | 2017 | 2018 |
| BELANJA DAERAH | 1,336,610,467,867.75 | 1,434,009,588,218.85 | 1,665,420,970,708.79 | 1,644,123,791,796 | 1,661,319,532,387 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 662,059,134,664.75 | 724,041,324,573,83 | 784,378,707,695.00 | 682,708,902,028 | 693,550,695,528 |
| Belanja Pegawai | 615,751,884,198.00 | 669,675,278,786.83 | 716,343,371,571.00 | 620,187,654,610 | 620,187,654,610 |
| Belanja Bunga | 32,401,722.75 | - | - | - | - |
| Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| Belanja Hibah | 40,179,300,498.00 | 47,372,262,832.00 | 62,046,692,034.00 | 56,403,185,000 | 67,785,178,500 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3,060,900,000.00 | 4,534,392,000.00 | 1,545,555,000.00 | 1,907,400,000 | 1,836,200,000 |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | - | - | | | - |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa , Partai Politik | 2,490,776,524.00 | 2,434,210,440.00 | | | |
| Bantuan Keuangan Kepada Parpol | - | | 3,031,139,346.00 | 1,210,662,418 | 1,241,662,418 |

| URAIAN | Realisasi | | | APBD Tahun Berjalan | Proyeksi/Target Tahun Rencana |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| | 2014 | 2015 (perubahan) | 2016 (perubahan) | 2017 | 2018 |
| Belanja Tidak Terduga | 543,911,672.00 | - | 1,411,949,744.00 | 3,000,000,000 | 2,500,000,000 |
| | | | | | |
| BELANJA LANGSUNG | 674,551,333,203.00 | 815,658,019,711.61 | 881,042,263,013.79 | 961,414,889,768 | 967,768,836,859 |
| Belanja Pegawai | 127,625,790,224.00 | 143,505,508,220.50 | 163,774,278,478.28 | 173,574,964,230 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 353,847,263,385.0 | 415,757,355,058.11 | 457,678,643,111.66 | 493,438,681,176 | |
| Belanja Modal | 193,078,279,594.00 | 256,395,156,433.00 | 259,589,341,423.85 | 294,401,244,362 | |

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

| URAIAN | Realisasi | | | APBD Tahun Berjalan | Proyeksi/Target Tahun Rencana |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 | 2015(perubahan) | 2016 (perubahan) | 2017 | 2018 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 311,627,539,666.89 | 434.785.926.378,05 | 205.392.523.805,46 | 138,827,113,738 | 124,568,991,628 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 303,377,090,556.89 | 434,397,854,728,05 | 205,342,170,311.46 | 138,827,113,738 | 124,568,991,628 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 386,608,928.00 | 388,071,650.00 | 50,353,494.00 | - | - |
| Penerimaan Piutang Daerah | 7,863,840,182.00 | - | - | - | - |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 361,652,154.90 | 123,754,000,000.00 | - | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 |
| Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | - | 123,754,000,000.00 | - | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 |
| Pembayaran Pokok Utang | 361,652,154.90 | - | - | - | - |

| URAIAN | Realisasi | | | APBD Tahun Berjalan | Proyeksi/Target Tahun Rencana |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2014 | 2015(perubahan) | 2016 (perubahan) | 2017 | 2018 |
| Pemberian Pinjaman Dan Pembayaran Pinjaman Derah | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - |
| Pembiayaan Netto | 311,265,887,511.99 | 311,031,926,378.05 | 205.,92,523,805.46 | 133,827,113,738 | 110,568,991,628 |
| | | | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | - | 205,342,170,311.46 | 117,651,486,141.87 | - | - |

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2018

| No | URAIAN | Anggaran 2018 |
|------------|---|--------------------------|
| | | (Rp) |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.550.750.540.759 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 541.156.670.627 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 348.756.500.000 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 33.934.346.301 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 25.924.504.087 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 132.541.320.239 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 893.448.864.132 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 62.454.190.000 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 670.278.830.000 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 160.715.844.132 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 116.145.006.000 |
| 1.3.1 | Hibah | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | 108.645.006.000 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 7.500.000.000 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | |
| 2 | BELANJA DAERAH | 1.550.750.540.759 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 693.550.695.528 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 620.187.654.610 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 67.785.178.500 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 1.836.200.000 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | |
| 2.1.7 | Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan kepada Parpol | 1.241.662.418 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000 |

| No | URAIAN | Anggaran 2018 |
|------------|---|--------------------------|
| | | (Rp) |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 967.768.836.859 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | |
| 2.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | |
| | Surplus/(Defisit) | (110.568.991.628) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 124.568.991.628 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 124.568.991.628 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutan Daerah | |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 14.000.000.000 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 14.000.000.000 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | |
| | Pembiayaan Netto | 110.568.991.628 |
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | - |

Sumber: Data diolah.

BAB 4

TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan Daerah

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2018 yaitu ***“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”***.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2018 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2018 yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”***.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah: ***“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”***

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas**, dimaknai sebagai upaya wilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
2. **Mandiri**, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.
3. **Sejahtera**, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pengembangan Gender (IPG).
4. **Berlandaskan Semangat Segoro Amarto**, memiliki makna Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta. Segoro memiliki sifat dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber daya alam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dan transformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yang menggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada

ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang menggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pemimpinnya dapat dipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negara. Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah Kemandirian, Kepedulian Sosial, Gotong Royong, danKedisiplinan.

Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan.

Rencana kerja ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. RKPD merupakan dokumen secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD.
2. RKPD merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program APBD.
3. RKPD berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2018 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara.
- Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Rancangan Prioritas Nasional dalam rangka menjabarkan Nawacita tersebut pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Perumahan dan Permukiman
- 4) Pengembangan Dunia Usaha
- 5) Ketahanan Energi
- 6) Ketahanan Pangan
- 7) Penanggulangan Kemiskinan
- 8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
- 9) Pembangunan Wilayah
- 10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Dalam RKPD DIY tahun 2018 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- 2) Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
- 3) Penguatan kapasitas ekonomi;
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- 5) Pengembangan Pariwisata;
- 6) Penguatan kapasitas infrastruktur;
- 7) Pelestarian nilai budaya;
- 8) Peningkatan tata nilai dan etika.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2018 yaitu:

- 1) Sosial Budaya;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada matrik berikut:

Tabel 4.1
Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan
Kota Yogyakarta Tahun 2018

| No. | PRIORITAS NASIONAL | No. | PRIORITAS DIY | No. | PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA |
|-----|---|-----|-----------------------------------|-----|---|
| 1 | Pendidikan; | 1 | Peningkatan kapasitas SDM | 1 | Pendidikan |
| 2 | Kesehatan; | | | 2 | Kesehatan |
| 3 | Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; | 2 | Pengembangan Pariwisata | 3 | Pertumbuhan Ekonomi |
| 4 | Ketahanan Energi; | 3 | Penguatan Kapasitas Ekonomi | | |
| 5 | Ketahanan Pangan; | | | | |
| 6 | Penanggulangan Kemiskinan; | | | 4 | Sosial Budaya |
| 7 | Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; | 4 | Penguatan Kapasitas Infrastruktur | 5 | Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 8 | Perumahan dan Permukiman; | | | | |
| 9 | Pembangunan Wilayah; | 5 | Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan | 6 | Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang |
| | | 6 | Pelestarian nilai budaya | | |
| 10 | Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. | 7 | Peningkatan Tata Nilai dan Etika | 7 | Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
| | | 8 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan | | |

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Sosial Budaya

Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kesehatan

Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

3. Pendidikan

Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui :

1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui

pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.

7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

- 1 Kualitas sumber daya manusia meningkat
- 2 Kemiskinan masyarakat menurun
- 3 Kondusifitas iklim investasi meningkat
- 4 Pendapatan daerah meningkat
- 5 Pengangguran terbuka menurun
- 6 Pendapatan masyarakat meningkat
- 7 Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat
- 8 Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat
- 9 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
- 10 Pencemaran lingkungan hidup terkendali
- 11 Daya serap sistem pendidikan meningkat
- 12 Kesehatan keluarga meningkat
- 13 Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat

- 14 Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat
- 15 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Tabel 4.2
Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|--|---|---|
| Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Kota | Meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta | Kualitas sumber daya manusia meningkat |
| | | Kemiskinan masyarakat menurun |
| | | Kondusifitas iklim investasi meningkat |
| | | Pendapatan daerah meningkat |
| Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat | Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan | Pengangguran terbuka menurun |
| | | Pendapatan masyarakat meningkat |
| | Memperkuat keberdayaan masyarakat yang inklusif | Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat |
| Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta | Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta | Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat |
| Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat |
| | | Pencemaran lingkungan hidup terkendali |
| Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya | Meningkatkan Kualitas pendidikan | Daya serap sistem pendidikan meningkat |
| | Meningkatkan Usia harapan hidup | Kesehatan keluarga meningkat |
| | Meningkatkan pariwisata berbasis budaya | Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat |
| Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman | Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman | Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat |

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Matrik Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta

| No. | PRIORITAS NASIONAL | No. | PRIORITAS DIY | No. | PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA | SASARAN KOTA YOGYAKARTA |
|-----|--|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|--|
| 1 | Pendidikan; | 1 | Peningkatan kapasitas SDM | 1 | Pendidikan | Kualitas sumber daya manusia meningkat. Daya serap sistem pendidikan meningkat. |
| 2 | Kesehatan; | | | 2 | Kesehatan | Kesehatan keluarga meningkat |
| 3 | Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; | 2 | Pengembangan Pariwisata | 3 | Pertumbuhan Ekonomi | Pendapatan masyarakat meningkat Pengangguran terbuka menurun Kondusifitas iklim investasi meningkat Pendapatan daerah meningkat |
| 4 | Ketahanan Energi; | | | | | |
| 5 | Ketahanan Pangan; | 3 | Penguatan Kapasitas Ekonomi | 4 | Sosial Budaya | Kemiskinan masyarakat menurun Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat |
| 6 | Penanggulangan Kemiskinan; | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|--|
| 7 | Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; | 4 | Penguatan Kapasitas Infrastruktur | 5 | Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur | Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat |
| 8 | Perumahan dan Permukiman; | | | | | |
| 9 | Pembangunan Wilayah; | 5 | Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan | 6 | Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat Pencemaran lingkungan hidup terkendali |
| | | 6 | Pelestarian nilai budaya | | | Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat |
| 10 | Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. | 7 | Peningkatan Tata Nilai dan Etika | 7 | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat |
| | | 8 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan | | | |

4.3. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2018

| No | Sasaran Pembangunan Daerah | Indikator Sasaran | Target |
|----|---|---|-----------------|
| 1 | Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat | Persentase rintisan desa budaya dan kampung wisata yang aktif dalam pengembangan dan pelestarian budaya | 74% |
| 2 | Kesehatan keluarga meningkat | Indeks Kesehatan Keluarga | 40% |
| 3 | Kualitas sumber daya manusia meningkat | Rata-rata lama sekolah | 11,41 tahun |
| 4 | Daya serap sistem pendidikan meningkat | Angka Partisipasi Murni | 118,5 |
| 5 | Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat | Indeks Pemberdayaan Gender | 79,33 |
| 6 | Kemiskinan masyarakat menurun | Angka kemiskinan | 8,6% |
| 7 | Pendapatan masyarakat meningkat | Pendapatan perkapita | Rp 70.167.199,- |
| 8 | Pengangguran terbuka menurun | Angka Pengangguran | 5,52 |
| 9 | Kondusifitas iklim investasi meningkat | Nilai PMDN dan PMA | 5.118.645 juta |
| 10 | Pendapatan daerah meningkat | Pendapatan Asli Daerah | 528,079 Milyar |
| 11 | Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat | persentase cakupan layanan sarana prasarana jalan, transportasi, drainase, air minum, air limbah dan perumahan yang layak | 63,55 |
| 12 | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Persentase penilaian penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang | 96,12% |
| 13 | Pencemaran lingkungan hidup terkendali | Indeks pencemaran lingkungan hidup | 64 |
| 14 | Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat | jumlah pelanggaran/kejahatan | 2000 |
| 15 | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah | BB |
| | | Opini pemeriksaan BPK | WTP |

4.4. Penyelarasan Program Prioritas Kota Yogyakarta ke OPD terkait

Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana ditetapkan pada tabel 4.3 di atas, maka dilaksanakan dengan program dan kegiatan tahun 2018. Penyusunan program kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta memperhatikan penjabaran dari visi misi sampai dengan program prioritas pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022. Program Prioritas pada dokumen RPJMD tersebut akan diintervensi oleh OPD melalui program dan kegiatan OPD sebagaimana matriks bab V RKPD. Penyelarasan antara program prioritas RPJMD ke tiap OPD sebagaimana matriks berikut:

Tabel 4.4
Penyelarasan Program Prioritas ke OPD terkait

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Program Prioritas | OPD | Intervensi |
|--|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Kota | Meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta | Kualitas sumber daya manusia meningkat | Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul | Program Peningkatan Akses Pendidikan | Dinas Pendidikan | jaminan pendidikan daerah (beasiswa), BOS dan BOSDA, akses pendidikan inklusi; pusat sumber pendidikan inklusi |
| | | Kemiskinan masyarakat menurun | Menurunkan angka kemiskinan | Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis segoro amarto | Dinas Sosial | Bansos, Kube, Usep KM, PKH, permodalan dan bantuan alat bagi warga miskin |
| | | | | | Dinas PUPKP | RTLH, penanganan kawasan kumuh (air limbah, air minum, SPAH, drainase, jalan lingkungan) |
| | | | | | Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans | padat karya, transmigrasi |
| Dinas Kesehatan | jaminan kesehatan bagi warga miskin | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | Kecamatan | intervensi warga miskin |
| | | | | | Bappeda | Koordinasi TKPK dan optimalisasi CSR utk penanggulangan kemiskinan |
| | | Kondusifitas iklim investasi meningkat | Membangun daya dukung pengembangan usaha dan kemudahan investasi yang kondusif dan atraktif | Program Peningkatan Kondusifitas Iklim Investasi | Dinas Perizinan dan Penanaman Modal | kemudahan pelayanan perizinan dan penanaman modal, promosi investasi |
| | | Pendapatan daerah meningkat | Meningkatkan pendapatan daerah | Program Peningkatan Pendapatan Daerah | BPKAD | intensifikasi dan ekstensifikasi pajak |
| | | | | | Bagian P3ADK dengan koordinasi OPD penghasil | Optimalisasi pajak, retribusi, BUMD, BLUD, dan lain2 PAD yg sah; kerjasama utk peningkatan PAD |
| Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat | Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan | Pengangguran terbuka menurun | Meningkatkan peluang kesempatan kerja dan berusaha | Program Pengurangan Pengangguran | Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans | pelatihan produktif, kerjasama dg perusahaan/institusi pemberi kerja, job fair |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | | Pendapatan masyarakat meningkat | Memperkuat pemberdayaan Koperasi dan UKM menuju Kota Yogyakarta sebagai Kota Ekonomi Kreatif | Program Pengembangan Kampung Ekonomi Kreatif | Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans | gerai kampung ekonomi kreatif sbg wadah pertemuan, pelatihan dan ekspose hasil UKM (home bisness kamp); kemitraan UKM dg pengusaha besar; permodalan bunga rendah utk koperasi dan UKM |
| | | | | | Dinas Pariwisata | <i>Jogja Creative Week</i> |
| | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | pengembangan industri kreatif(animasi, perak, kulit, batik, makanan, logam); pengembangan teknologi tepat guna UKM; peningkatan promosi UKM |
| | | | Memperkuat keberadaan Pasar Tradisional | Program Revitalisasi Pasar Tradisional | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | penataan pedagang, kios, los, kebersihan, keamanan pasar; peningkatan kapasitas pedagang pasar |
| | | | memperkuat ekonomi berbasis industri jasa | Program Peningkatan Ekonomi Berbasis Industri Jasa | Dinas PUPKP | pembangunan/rehabilitasi berat bangunan pasar tradisional |
| | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | kemitraan antara pelaku industri jasa dengan pelaku UKM; standarisasi produk UKM |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Dinas Pariwisata | perbaikan akomodasi pendukung pariwisata(hotel, restoran, kuliner,pemandu wisata, agen perjalanan); paket wisata; penguatan kampung wisata; penambahan ODTW, kalender event; promosi wisata |
| | Memperkuat keberdayaan masyarakat yang inklusif | Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat | Memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak | Program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender | DPMP2A | pemberdayaan perempuan(P2WKSS, PKK, rintisan usaha) , perlindungan anak, penanganan korban kekerasan, penguatan kota layak anak, kampung ramah anak |
| | | | | | Dinas Sosial | penanganan anak terlantar, lansia terlantar,difabel |
| | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | Penguatan UPPKS |
| | | | | | Dinas Kesehatan | jamkesus bagi penyandang disabilitas, posyandu anak, posyandu lansia, pelayanan rumah sehat lansia (rusela), puskesmas ramah anak |
| | | | | | Dinas Pendidikan | sekolah ramah anak, |
| | | | | | Dinas Pariwisata | operasional taman pintar |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | Dinas Perhubungan | pembelajaran anak di taman edukasi keselamatan lalulintas |
| | | | | | Dinas Kebakaran | pembelajaran anak terkait tanggap bencana kebakaran |
| | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | ketahanan keluarga; penguatan Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Anak; Bina Keluarga Dissabilitas |
| | | | | | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Identitas anak (KIA), identifikasi difabel |
| Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta | Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta | Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat | Meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan jiwa nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat secara cerdas, penuh toleransi, dan mengedepankan budi pekerti luhur. | Program Penguatan Kampung Panca Tertib | Satpol PP | penguatan kapasitas kampung panca tertib (tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial) |
| | | | | | Kantor Kesbang | penguatan nilai kebangsaan/nasionalisme, keagamaan, dan politik |
| | | | | | DPMP2A | pencegahan dan penanganan KDRT |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | | Program pengembangan kreatifitas pemuda | Dinas Pemuda dan OR | fasilitasi dan ruang kreatifitas pemuda; penguatan pemuda pelopor; fasilitasi pramuka, paskibraka, pemuda anti napza, pemuda cinta damai lintas agama; olahraga, pencegahan dan penanganan vandalisme |
| | | | | | Dinas Sosial | penguatan karang taruna |
| | | | | | Dinas Pendidikan | penguatan pendidikan karakter siswa melalui Bimbingan Konseling (BK), muatan lokal pembelajaran karakter, budi pekerti |
| | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB | Bina Kelompok Remaja (BKR); PIK-R |
| Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat | Meningkatkan kualitas penataan kota | Program Penyelenggaraan penataan ruang | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | turbinlakwas penataan ruang dengan dengan RTRW dan RDTRK, penyusunan RTBL, Identifikasi dan pemanfaatan pertanahan, |
| | | | | | Dinas Perijinan dan Penanaman Modal | kesesuaian izin yang dikeluarkan dengan pembangunan |
| | | | | | Dinas PUPKP | pembangunan kawasan strategis; |
| | | | | Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau | Dinas Lingkungan Hidup | pembangunan dan pemeliharaan RTH Publik |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | pengadaan tanah RTH |
| | | Pencemaran lingkungan hidup terkendali | Meningkatkan pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan | Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | pengendalian pencemaran air, udara; pemantauan dokumen lingkungan; penyusunan SLHD(status lingkungan hidup daerah) |
| | | | | | Dinas Perhubungan | pengujian kendaraan bermotor |
| Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya | Meningkatkan Kualitas pendidikan | Daya serap sistem pendidikan meningkat | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun | Proram Penguatan Kota Pusat Pendidikan | Dinas Pendidikan | peningkatan kualitas pendidik; saprastepenuhi sesuai standar; perbaiki manajemen pendidikan |
| | | | Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan | | Dinas PUPKP | pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah negeri |
| | Meningkatkan Usia harapan hidup | Kesehatan keluarga meningkat | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Puskesmas, RS Pratama, RS Jogja, Penanganan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular |
| | Meningkatkan pariwisata berbasis budaya | Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat | Mengembangkan pelestarian seni dan budaya untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan | Program Penguatan Kota Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan | kampanye sadar budaya, pamong budaya, pembangunan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya; pelestarian nilai-nilai seni dan budaya |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Dinas Pariwisata | operasional penanganan kawasan malioboro, event budaya |
| | | | | | Dinas Pariwisata | pengembangan teknologi informasi pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama pariwisata, pengembangan objek daya tarik wisata unggulan, pengembangan kampung wisata, pentas Kangen Jogja |
| | | | | | Dinas PUPKP | pembangunan karakter dan citra Kota Yogyakarta, penguatan Kota Pusaka |
| | | | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | RTBL kawasan budaya, insentif dan disintensif BCB |
| Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman | Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman | Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat | Meningkatkan layanan sarana prasarana perkotaan yang merata dan berkualitas | Program Penguatan Kota Nyaman Huni | Dinas PUPKP | Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, saluran drainase, air limbah, SAH, air minum non perpipaan, talud permukiman dan energi |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | sekolah adiwiyata, program 3R, bank sampah |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Dinas Perhubungan | Penyelenggaraan dan optimalisasi perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pembangunan dan pemeliharaan sarpras perhubungan, penyelenggaraan angkutan umum orang dan barang dan pengaturan kendaraan tidak bermotor | |
| | | | Memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas | Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana | BPBD | Kampung Tangguh Bencana; YES 119 |
| | | | | | Dinas PUPKP | Rehabilitasi dan Rekonstruksi bangunan milik masyarakat yang terkena bencana level Kota |
| | | | | | Dinas Kesehatan | Pelayanan kesehatan khusus pertolongan gawat darurat |
| | | | | | Dinas Pendidikan | Pelatihan simulasi tanggap bencana di sekolah |
| | | | | | Dinas Sosial | Bantuan logistik korban bencana, Bansos korban bencana |
| | | | Membangun sarana prasarana lingkungan sungai untuk mendukung permukiman layak huni dan sehat | Program Revitalisasi Sungai | Dinas PUPKP | penataan kawasan kumuh di sekitar sungai, M3K (mundur munggah madep kali) |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | Dinas Pertanahan dan Tata ruang | edukasi sempadan sungai, pembelian tanah M3K, sungai sbg penyangga KCB |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | RTH sempadan sungai, uji parameter kualitas air sungai, sekolah sungai, merti sungai, prokasih(program kali bersih); penguatan peran lembaga forum komunikasi sungai |
| | | | | | Dinas Koperasi, UKM dan nakertrans | peningkatan ekonomi masyarakat pinggir sungai |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | Membentuk kelembagaan, ketatalaksanaan pemerintah daerah dan pendayagunaan aparatur yang berkualitas dan efisien dalam pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi | Program Pengembangan Jogja Smart City | Dinas Kominfo dan Persandian | pemanfaatan teknologi informasi utk pelayanan birokrasi dan pelayanan publik, penyelenggaraan call center 112, ruang command centre; UPIK; e-gov berbasis android dan internet; publikasi program pemerintah ke berbagai media |
| | | | | | Bagian Organisasi | konsep tunjangan kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik |
| | | | | | Inspektorat | pengawasan, SPIP |
| | | | | | Dinas PUPKP | penataan kompleks balaikota |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|--|
| | | | | | Bappeda | RAD PPK; Ran Ham; penguatan inovasi |
| | | | | | BPKAD | peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel |
| | | | | | BKPP | peningkatan kualitas ASN |

4.5. Tematik Dalam Mendukung Pembangunan di Kota Yogyakarta

4.5.1. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah

Secara garis besar, Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19" - 110°28'53" Bujur Timur dan 07°15'24" - 07°49'26" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 km² atau 1,02 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.

Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan, yaitu:

- Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota.
- Sungai Code yang mengalir di bagian tengah.
- Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2016 jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 412.704 jiwa, dengan luas wilayah 32,5 km² kepadatan penduduk Kota Yogyakarta sebesar 12.699 jiwa/km² (BPS, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 4.5. Road Map Kemiskinan Kota Yogyakarta

| DATA AWAL | RKPD |
|---|--------------------|
| Target RPJPD Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2025 | 3 % |
| Angka Kemiskinan Tahun 2016 | 8.75 % |
| Angka Kemiskinan yang akan diturunkan s.d tahun 2025 | 5.75 % |
| Rencana penurunan tiap tahun dari 2017 - 2025 | 0,72 % |
| Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta (BPS) 2016 | 35.980 |
| Rencana target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun | 2961 jiwa (740 KK) |

Pendekatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Menekan laju inflasi

3. Empat langkah strategi penanggulangan kemiskinan:
 - a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Rencana Intervensi Penanggulangan Kemiskinan OPD



Matriks Penanggulangan Kemiskinan 2017

| No | Instansi | Program/Kegiatan | Anggaran |
|----|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi | 17.667.328.000 |
| | | Jaminan Pembiayaan kesehatan bagi Masyarakat Kota Yang belum memiliki jaminan kesehatan | |
| | | Pemberian PMT bagi penderita TB | |
| 2 | Dinas Pendidikan | Jaminan Pendidikan Daerah | 33.386.000.000 |
| | | Bantuan Pendidikan | |
| | | Bantuan Beasiswa | |
| 3 | Dinas Sosial | Perlindungan dan Jaminan Sosial | 6.422.968.994 |
| | | Advokasi dan Rehabilitasi Sosial | |
| | | Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial | |
| | | Hibah Bansos (APBD dan APBN) | 25.864.130.000 |
| 4 | DPMP2A | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | 122.468.000 |
| 5 | Dinas PUPKP | Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan | 2.914.600.000 |
| 6 | Dinas Dalduk & KB | Pembinaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga | 3.129.199.294 |
| 7 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Pembinaan Perindustrian | 24.300.000 |

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------|
| 8 | Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 2.835.536.000 |
| | | Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| Jumlah Total | | | 92.366.530.288 |

Indikasi Program/Kegiatan Mendukung Tematik di Kota Yogyakarta

| No | OPD | Program | Kegiatan | Keterangan |
|-----------|--------------------------------------|--|---|--|
| 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Program Bidang Ekonomi | Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi, UKM, dan nakertrans | Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal pengentasan kemiskinan. |
| | | | Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian dan Pangan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk menjamin daya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok. |
| | | | Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah | Mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu. |
| | | Program Bidang Sosial | Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat | mengkoordinasikan pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan OPD terkait di bidang kesejahteraan rakyat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD | Pembinaan Lembaga Pendidikan keterampilan | Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat miskin/keluarga miskin yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup untuk mengembangkan usaha mandiri dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam upaya perbaikan kualitas hidup. |
| | | | Program Pengembangan Pendidikan | Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah |
| | | Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA | | Pemberian Bosda oleh Pemkot Yogyakarta untuk membantu biaya operasional pendidikan sekolah yang diselenggarakan Pemkot atau sekolah negeri untuk membantu anak yang berasal dari keluarga miskin agar dapat sekolah tanpa di bebani biaya operasional sekolah. |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 3 | DINAS KESEHATAN | Program Upaya Pelayanan Kesehatan | Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi | Berada di bawah asuhan PKK Kota Yogyakarta yang memiliki kepedulian terhadap upaya penurunan jumlah kasus balita gizi buruk yang terjadi pada masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. |
| | | | Jaminan Pembiayaan kesehatan bagi Masyarakat Kota Yang belum memiliki jaminan kesehatan | Dengan mengikutsertakan masyarakat miskin/keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah kota yang iuran Jaminan Kesehatan Daerah dibayar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Miskin 60.215 jiwa PBI : 34.833 jiwa PBI APBD 2018 : 11.562 jiwa Penduduk miskin yg berKTP kota yg belum mempunyai jaminan dijamin dg Jamkesda: 7.311 (Rp 14.075.712.000) |
| | | | Pemberian PMT bagi penderita TB | Untuk memberikan makanan gratis kepada para penderita TB yang berasal dari keluarga miskin, sekaligus untuk memberikan edukasi kepada penderita tentang pentingnya konsumsi tinggi protein bagi penderita TBC. Jadi pemberian makanan tambahan ini hanya untuk memberikan contoh dan membangkitkan kepedulian penderita terhadap gizi penderita TB. |
| 4 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Program Pemberdayaan Masyarakat | Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan | memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dengan penguatan kelembagaan kemasyarakatan agar lebih peka terhadap warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Dalam perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan sebenarnya ditujukan untuk memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada, maka dengan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin/keluarga miskin. |
| | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan | Pembinaan Pengarusutamaan Gender | Bertujuan untuk menyamakan persepsi pengintegrasian isu gender dan anak melalui PUG khususnya bagi masyarakat miskin dan untuk meningkatkan komitmen OPD melalui pelaksanaan program |

| | | | | |
|---|--------------|---|--|---|
| | | Perempuan | | kegiatan yang berbasis responsif gender. |
| | | | Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan | Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan bagi masyarakat miskin. |
| 5 | DINAS SOSIAL | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Perlindungan Sosial | kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. |
| | | | Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial | salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemkot guna menjamin warganya yang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. |
| | | | Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo | melaksanakan dan membina pengasuhan bagi anak terlantar dan miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, keterampilan dan spiritual anak. |
| | | | Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma | Pelayanan Pemberian Makanan Tambahan bagi warga lansia yang miskin tujuannya agar terpenuhinya kebutuhan pangan yang bernilai gizi setara dengan asupan gizi yang diperlukan. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, Pengobatan Ringan dan Bimbingan, tujuannya agar tercapai taraf kesehatan yang memenuhi syarat untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara wajar, baik sehat secara fisik, mental maupun sosial. |
| | | Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Program Data, Informasi dan Pemberdayaan | Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak atau miskin secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | Sosial | Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya khususnya masyarakat miskin. Advokasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. |
| | | | Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS | Kegiatan Pendataan ini dilaksanakan untuk menggali/mengetahui secara pasti data terkini masyarakat miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di masing-masing wilayah desa/kelurahan se-Kota Yogyakarta. |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Kegiatan Pemberdayaan PSKS untuk mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial dalam hal pengentasan kemiskinan. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. |
| 6 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Kemitraan dan Pembiayaan UMK | Kemitraan memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. |
| | | | Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK | Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan produktivitas, kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia untuk penanggulangan kemiskinan. |
| | | Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja | memberikan bimbingan dan pengurusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja khususnya masyarakat miskin. - Pringgokusuman : Kampung preneur manajemen wirausaha (olahan pangan) 20-30 org - Prawirodirjan : rajut - Pandeyan: jumpitan - Prenggan : perak, kulit, bordir - Gedongkiwo : - Terban : pengembangan manajemen dan aneka usaha |
| | | Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja | pengembangan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan standarisasi pelatihan kompetensi, produktivitas dan pemagangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan untuk mengurangi angka kemiskinan. | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | Penempatan Transmigrasi | Dilakukan monitoring dan pengecekan lokasi penempatan Transmigrasi bagi masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk kesempatan dalam memperbaiki kualitas hidup. |
| | | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja | Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan | pembinaan, perlindungan tenaga kerja, pemahaman dan pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan terhadap pekerja miskin, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan Pemantauan dan Pengawasan upah Minimum Provinsi (UMP), Penilaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pemantasan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Jaminan Kesehatan. |
| | | | Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja | Hubungan industrial harus diciptakan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak khususnya pekerja miskin yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. |
| 7 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan | Pembinaan Usaha Perdagangan | memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha terhadap kebijakan perdagangan khususnya yang terkait dengan kebijakan bina usaha perdagangan terhadap masyarakat miskin. |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri | pengembangan usaha dan sarana usaha perdagangan dan industri masyarakat miskin serta melakukan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan dan industri. |
| | | Program Pembinaan Perindustrian | Pembinaan Teknis Perindustrian | Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan di bidang Industri Sarana, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya masyarakat miskin. |
| | | | Pembinaan Sarana Produksi | Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan sarana produksi industri kecil menengah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin dalam hal usaha mandiri. Target Kota : 60 UKM + pelatihan kerajinan di Prenggan dan Terban @ 20 peserta 30 IKM, 6 IKM dr lokasi Segoro Amarto. |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar | Pengembangan Pasar Tradisional | Pasar-pasar tradisional dikemas dalam tata ruang yang nyaman, bersih, dan sejuk sehingga masyarakat tertarik untuk berbelanja di pasar tradisional sebagai penopang perekonomian yang sekaligus berdampak pada penanggulangan kemiskinan. |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan | Pengelolaan Rusunawa | Dalam pengelolaannya rusunawa di peruntukkan bagi masyarakat miskin atau keluarga miskin sehingga mereka dapat memperoleh tempat tinggal yang layak. |
| | | | Penataan Perumahan dan Permukiman | Pemerataan pembangunan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Jumlah 167 RTLH di 2 kec: 1,5 M RTLH yg belum tertangani Kota total : 2 rb-an |
| 9 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Pelayanan Keluarga Berencana | membina peserta KB aktif bagi rumah tangga miskin dalam rangka kelembagaan dan pembudayaan NKKBS. |
| | | | Pembinaan Pembangunan Keluarga | Membina jaringan pelayanan alat kontrasepsi pada masyarakat miskin sampai ke pos KB kelompok KB. |
| 10 | KECAMATAN TEGALREJO | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalarjo | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalarjo | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalarjo | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |

| | | | | |
|----|------------------------|--|--|---|
| | | | Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 11 | KECAMATAN JETIS | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat BerbasisKewilayahan Kecamatan Jetis | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 12 | KECAMATAN GONDOKUSUMAN | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan MasyarakatBerbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |

| | | | | |
|----|------------------------|--|--|---|
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian Kecamatan Gondokusuman | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat kecamatan Gondokusuman | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 13 | KECAMATAN DANUREJAN | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Suryatmajan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Tegalpanggung | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Bausasran | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 14 | KECAMATAN GEDONGTENGEN | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | | Gedongtengen | Pembinaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gedongtengen | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 15 | KECAMATAN PAKUALAMAN | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 16 | KECAMATAN NGAMPILAN | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 17 | KECAMATAN WIROBRAJAN | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|--|---|
| | | Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian Masyarakat kecamatan Wirobrajan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 18 | KECAMATAN MANTRIJERON | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mantrijeron | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 19 | KECAMATAN KRATON | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| | | Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian masyarakat Kecamatan Kraton | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 20 | KECAMATAN GANDOMANAN | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian Masyarakat kecamatan Gondomanan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 21 | KECAMATAN MERGANGSAN | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |

| | | | | |
|----|----------------------|---|--|---|
| | | Mergangsan | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Mergangsan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 22 | KECAMATAN UMBULHARJO | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | | rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 23 | KECAMATAN KOTAGEDE | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| | | | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede | Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. |
| 24 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Program Pembinaan Pertanian | Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian | Pembinaan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani miskin untuk menggunakan bibit unggul guna meningkatkan hasil produksi pertanian . |
| | | | Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian | Pengawasan mutu merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta manajerial dalam hal penanganan mutu pada proses produksi, perdagangan dan distribusi komoditas sehingga masyarakat miskin juga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan bahan yang bermutu. |
| | | Program Pembinaan Ketahanan Pangan | Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan | melaksanakan pemantauan, pembinaan dan analisis konsumsi pangan dan pengendalian standarisasi mutu konsumsi sehingga kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi. |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | | Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan | Melaksanakan pembinaan untuk mengidentifikasi, inventarisasi dan pemantauan permasalahan ketahanan pangan melalui koordinasi, untuk menyusun perumusan kebijakan dalam rangka pengaturan dan pembinaan, pengelolaan, distribusi, ketersediaan dan cadangan pangan bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| | | Program Pembinaan Kehewananan dan Perikanan | Pembinaan Usaha Budidaya Kehewananan dan Perikanan | standarisasi usaha peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan serta pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. |
| | | | Pengawasan Mutu Komoditas Kehewananan dan Perikanan | untuk mewujudkan jaminan pangan komoditas hewan dan perikanan yang aman, sehat, halal dan utuh sehingga dapat di capai oleh masyarakat miskin. |
| | TOTAL ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DANPENGANGGURAN | | | |
| | TOTAL BELANJA DAERAH RATIO ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DANPENGANGGURAN | | | |

4.5.2. Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan (disparity).

Dari studi empiris terdapat dua jenis ketimpangan (Kuncoro, 2014) yaitu: Ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan pendapatan. Diukur dengan indeks Gini atau Analisis Ketimpangan kriteria Bank dunia dan Ketimpangan antarwilayah. Diukur dengan Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil. Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada data PDRB per kapita masing-masing daerah dan jumlah penduduknya. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. $IW < 0,4$ artinya tingkat ketimpangan rendah.
- b. $0,4 < IW < 0,5$ artinya tingkat ketimpangan moderat.
- c. $IW > 0,5$ artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 itu artinya semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Tabel 2
PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Kecamatan | Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (juta rupiah) | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Mantrijeron | 9,21 | 9,59 | 10,05 | 10,24 |
| Kraton | 8,97 | 9,40 | 10,05 | 10,31 |
| Mergangsan | 9,98 | 10,44 | 11,08 | 11,36 |
| Umbulharjo | 17,09 | 17,75 | 18,11 | 18,13 |
| Kotagede | 8,21 | 8,44 | 8,50 | 8,50 |
| Gondokusuman | 23,46 | 24,51 | 25,94 | 26,64 |
| Danurejan | 32,02 | 34,35 | 36,55 | 37,77 |
| Pakualaman | 8,11 | 8,50 | 9,08 | 9,35 |
| Gondomanan | 40,62 | 42,74 | 44,76 | 45,91 |
| Ngampilan | 8,011 | 8,39 | 8,77 | 8,94 |
| Wirobrajan | 13,93 | 14,54 | 15,33 | 15,71 |
| Gedongtengen | 14,46 | 15,40 | 16,07 | 16,44 |
| Jetis | 20,30 | 21,44 | 23,06 | 23,82 |
| Tegalrejo | 8,98 | 9,30 | 9,78 | 9,94 |
| Rata-Rata PDRB per Kapita Kota Yogyakarta | 15,61 | 16,33 | 17,09 | 18,08 |

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
(BPS Kota Yogyakarta, 2016)

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2012-2015

| No | Kecamatan | Jumlah penduduk (jiwa) | | | |
|----|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Mantrijeron | 31.695 | 32.383 | 31.901 | 32.791 |
| 2 | Kraton | 17.561 | 17.874 | 17.217 | 17.547 |
| 3 | Mergangsan | 29.448 | 29.965 | 29.537 | 30.275 |
| 4 | Umbulharjo | 78.831 | 81.073 | 83.031 | 86.580 |
| 5 | Kotagede | 32.052 | 32.986 | 33.811 | 35.285 |
| 6 | Gondokusuman | 45.526 | 46.335 | 45.697 | 46.840 |
| 7 | Danurejan | 18.433 | 18.764 | 18.454 | 18.905 |
| 8 | Pakualaman | 9.366 | 9.533 | 9.164 | 9.336 |
| 9 | Gondomanan | 13.097 | 13.327 | 13.171 | 13.507 |
| 10 | Ngampilan | 16.402 | 16.696 | 16.429 | 16.829 |
| 11 | Wirobrajan | 24.969 | 25.411 | 25.039 | 25.662 |
| 12 | Gedongtengen | 17.273 | 17.583 | 17.549 | 18.042 |
| 13 | Jetis | 23.570 | 23.992 | 23.331 | 23.834 |
| 14 | Tegalrejo | 35.789 | 36.757 | 36.136 | 37.271 |
| | Jumlah | 394.012 | 402.679 | 400,467 | 412.704 |

*Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2012-2016
(BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016)*

Meski pertumbuhannya tergolong rendah, ketimpangan di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2015 tergolong kategori tinggi. Hal ini dikarenakan selisih nilai PDRB per kapita antara kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi dan kecamatan dengan PDRB per kapita terendah cukup jauh. Pada tahun 2015, Kecamatan Gondomanan menjadi kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 45,91 juta rupiah, sementara Kecamatan Kotagede berada di posisi terendah dengan PDRB per kapitasebesar 8,50 juta rupiah.

Tabel 2.3
Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

| Indikator | Indeks Williamson (%) | | | | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Indeks Williamson | 0,506 | 0,513 | 0,517 | 0,505 | -0,07 |
| Kategori Ketimpangan | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | |

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kota Yogyakarta yang maju secara ekonomi, namun ternyata masih terdapat daerah-daerah yang relative tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi sehingga ketimpangan antar daerah tidak semakin melebar.

Kota Yogyakarta melakukan intervensi terhadap ketimpangan wilayah antar kecamatan ini dengan cara mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah, dengan cara menetapkan tematik pembangunan wilayah. Setiap kecamatan memiliki tematik pembangunan masing-masing yang akan mewarnai prioritas program kegiatan yang direncanakan.

4.5.3. NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA)

Sejalan dengan pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) maka Kawasan Perkotaan Yogyakarta dikembangkan sebagai Kawasan Prioritas yang mendukung Pengembangan Destinasi Wisata. Lebih jauh lagi, program/kegiatan lintas sektor yang memungkinkan untuk diinisiasi pada tahun 2018 di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu adalah:

1. Pengembangan Industri Kreatif
2. Penyediaan Infrastruktur Pendukung
3. Pengembangan Destinasi Wisata
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Pengembangan budaya/atraksi seni
6. Pengembangan Sistem Transportasi Massal dan Tradisional

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Yogyakarta pada Tahun 2018 yang mendukung tematik NYIA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5.3
Program Kegiatan Terkait New Yogyakarta International Airport

| No. | OPD | Program | Kegiatan | Keterangan |
|-----|-------------------|--|---|--|
| 1 | Dinas Kesehatan | Program Upaya Pelayanan Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Khusus | Melaksanakan pelayanan kesehatan khusus baik itu masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. |
| | | | Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119 | merupakan layanan kegawatdaruratan kesehatan terpadu untuk membantu penanganan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak hanya berhubungan dengan kecelakaan tetapi juga dalam situasi kritis. |
| 2 | Dinas Kebudayaan | Program Pemanfaatan Seni Budaya | Kegiatan Festival Kesenian Yogyakarta | Merupakan komitmen serius Yogyakarta untuk memajukan daerahnya yang diharapkan mampu menyedot ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga dapat mendorong penambahan jumlah wisatawan mancanegara. |
| | | | Kegiatan Gelar Budaya Jogja | Sebagai wadah bagi seniman untuk memperkenalkan budaya Yogyakarta. |
| 3 | Dinas Perhubungan | Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas | Penyelenggaraan Angkutan | Sarana dan prasarana angkutan yang gampang di akses sehingga wisatawan maupun masyarakat dapat mencapai destinasi pariwisata dengan mudah. |
| | | | Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan | Perda yang telah di tetapkan dijalankan dengan sebenar-benarnya demi kenyamanan masyarakat dan wisatawan. |
| | | Program Penyelenggaraan Perpustakaan | Operasional Penyelenggaraan Perpustakaan | Tersedianya kantong-kantong parkir yang cukup untuk menampung kendaraan di lokasi wisata. |
| | | | Optimalisasi Penyelenggaraan Perpustakaan | Adanya pengawasan tarif parkir yang sudah ditetapkan di Perda untuk menghindari kenaikan tarif parkir. |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|--|
| 4 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Program Pembinaan Perindustrian | Pelatihan Intensif Industri Kreatif Berbasis TI/Animasi | Merupakan pengembangan ekonomi kreatif untuk menunjang pembangunan ekonomi. |
| 5 | Dinas Pariwisata | Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata | Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata | Dikembangkan Kampung Wisata di tiap-tiap Kelurahan sebagai daya tarik baru bagi wisatawan. Data kampung wisata di Kota Yogyakarta: |
| | | | Promosi dan Pemasaran Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> - Kampung Wisata Dipowinatan di Kel. Keparakan Kec. Mergangsan - Kampung Wisata Purbayan di Kel. Purbayan Kec. Kotagede - Kampung Wisata Cokrodiningratan di Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis - Kampung Wisata Pandeyan di Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo - Kampung Wisata Kadipaten di Kel. Kadipaten Kec. Kraton - Kampung Wisata Tahunan di Kel. Tahunan Kec. Umbulharjo - Kampung Wisata Prenggan di Kel. Prenggan Kec. Kota Gede - Kampung Wisata Tamansari di Kel. Patehan Kec. Kraton - Kampung Wisata Sosromenduran di Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen - Kampung Wisata Rejowinangun di Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede - Kampung Wisata "SekarNiti" Gedongkiwo di Kel. Gedongkiwo Kec. Mantriweron - Kampung Wisata Gunung Ketur di Kel. Gunung Ketur Kec. Mergangsan - Kampung Wisata Dewobronto di Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan - Kampung Wisata Warungboto di Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo - Kampung Wisata Kauman di Kel. Ngupasan Kec. Gondomanan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Kampung Wisata Sayidan di Kel. Prawirodirjan Kec. Gondomanan - Kampung Wisata Becak Maju di Kel. Kricak Kec. Tegalrejo - Kampung Wisata Ketandan |
| | | Pengelolaan Kawasan Malioboro | Dibuat semakin menarik tanpa melupakan ciri khas Kota Yogyakarta untuk menghilangkan kebosanan pengunjung/wisatawan. |
| | | Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan standarisasi ekonomi kreatif sesuai dengan aturan yang berlaku. |
| | | Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata | Untuk menarik pengunjung dalam hal ini masyarakat lokal dan wisatawan. |

4.5.4. Pembiayaan Pembangunan

Sumber-sumber pembiayaan terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil BUMD, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah dan (4) Penerimaan lain-lain yang sah. Daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan.

Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek pendapatan daerah, antara lain dilakukan dengan cara: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah. Salah satu pilar utama dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Pembiayaan non APBD dengan melibatkan CSR adalah salah satu cara pembiayaan yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun. Tabel berikut akan menjabarkan pembiayaan pembangunan yang telah dilakukan oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dengan pembiayaan non APBD:

I. Sektor Sosial Ekonomi

| No | Nama Kelompok | Rencana Anggaran | Dana Swadaya | CSR BPD 2017 | |
|----|--|------------------|---------------|---|--|
| | | | | Rencana Anggaran dalam Pengajuan Dana CSR | Pelatihan yang diinginkan |
| 1. | Kelompok Rintisan Usaha Rajut Sejahtera Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman | Rp 15.560.000 ,- | Rp 560.000 ,- | Rp 15.000.000 ,- | a. Pelatihan membuat tas sampai finishing b. Pelatihan finishing. |
| 2. | Kelompok Sekar Kinasih Jumputan, Patangpuluhan | Rp 11.885.000 ,- | Rp 0 ,- | Rp 11.885.000 ,- | Pelatihan batik cap kombinasi jumputan dengan pewarnaan alami. |
| 3. | Kelompok Truntum Batik Craft, Mantrijeron | Rp 13.680.750 ,- | Rp 0 ,- | Rp 13.680.750 ,- | a. Membuat peci b. Membuat seni aplikasi c. Membuat spreng dan sarung bantal batik. |
| 4. | Kelompok Batik Tulis, Rejowinangun | Rp 14.960.000 ,- | Rp 0 ,- | Rp 14.960.000 ,- | a. Pembuatan batik tulis b. Pembuatan batik cap c. Pembuatan batik untuk busana (Penghilangan lilin/lorod dilakukan oleh panitia). |
| 5. | Kelompok Jamu Mugi Waras, Kricak | Rp 10.000.000 ,- | Rp 0 ,- | Rp 10.000.000 ,- | a. Pelatihan untuk pembuatan jamu dengan kemasan kapsul b. Pelatihan untuk mendapatkan ijin usaha dan ijin produksi (IRT). |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 6. | Kelompok disabilitas KUBE Mata Hati | Rp 14.945.000 ,- | Rp 0 ,- | Rp 14.945.000 ,- | Pelatihan peningkatan ketrampilan Pijat Penyembuhan bagi KUBE penyandang disabilitas Netra. |
| 7. | Kelompok disabilitas KUBE Rakhmat Abadi | Rp 14.873.200 ,- | Rp 0 ,- | Rp 14.873.200 ,- | Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Kue Kering |
| 8. | Kelompok P2WKSS "Aneka Kue Kering", Brontokusuman | Rp 10.960.000 ,- | Rp 640.000 ,- | | |
| 9. | Paguyuban Batik Purwo Taruntum, Purwokinanti | Rp 10.343.000 ,- | Rp 338.000 ,- | | |
| 10. | Kelompok UP2K Jumput Shibori Noto Karyo, Notoprajan | Rp 10.000.000 ,- | Rp 325.000 ,- | | |
| 11. | Kelompok Mrican Kuliner, Giwangan | Rp 12.137.000 ,- | Rp 2.127.000 ,- | | |
| 12. | Kelompok Mrican Love Bird, Giwangan | Rp 10.857.000 ,- | Rp 857.000 ,- | | |
| Total Sektor Sosial Ekonomi | | | | Rp 95.343.950 ,- | |

II. Sektor Pendidikan (Sekolah Ramah Anak)

| No | Nama | Rencana Anggaran | |
|----|---------------|-------------------------|---|
| | | CSR BPD 2017 | Uraian |
| 1. | SD Jetisharjo | Rp. 15.000.000,- | <p>SD Jetisharjo menuju Sekolah Ramah Anak. Menurut Perwal no. 40 Tahun 2016, Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab. Prinsip Sekolah Ramah Anak : tanpa kekerasan; non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; penghargaan terhadap pendapat anak; partisipatif; akuntabilitas; transparansi; dan pembudayaan.</p> <p>RENCANA KEGIATAN yang akan dilaksanakan:</p> <p>1. Program Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan berupa Pelatihan, Workshop & Outbond, dengan materi : Konvensi Hak Anak dan Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Teknik Mengajar Menyenangkan / PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), Kekerasan dan Perlindungan Diri</p> <p>2. Program Penguatan Orang tua Kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan/workshop dengan materi : Konvensi Hak Anak dan Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pola Asuh Efektif dan Positif, Komunikasi yang Efektif</p> <p>3. Pelatihan SRA bagi siswa. Kegiatan : - Pelatihan SRA bagi siswa Kelas I s.d. VI secara bertahap. Tahap I : Kelas I - III & Tahap II : Kelas IV - VI. - Pembuatan buku DReAM (Daftar Rencana Anak Mandiri). Berisi rancangan dan usulan tentang kelas idaman anak, kegiatan sekolah yang diinginkan anak, tentang keluarga yang diidamkan anak, sesuai keinginan, minat, ataupun hobinya - Pohon harapan. Anak dapat menuliskan cita-citanya di kertas hias dan menggantungkannya di Pohon Harapan.</p> <p>4. Penyediaan Fasilitas Sekolah Ramah Anak Saat luang seperti menunggu bel apel pagi, waktu istirahat, dan saat menunggu dijemput orang tua setelah selesai pembelajaran, anak dapat bermain dengan fasilitas bermain yang aman yang</p> |

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | disiapkan oleh sekolah, diantaranya : catur, dakon, bekel, sundamanda/ingklik, buku pustaka hiburan. |
| Total Sektor Pendidikan | | Rp. 15.000.000,- | |

III. Sektor Kesehatan

| No | Nama | Rencana Anggaran | |
|----------|---|------------------|--|
| | | CSR BPD 2017 | Uraian |
| A | Posyandu (Posyandu Ramah Anak) | | Posyandu memiliki inovasi yang dapat membuat anak dan orang tua tertarik untuk mengikuti Posyandu. Posyandu dapat berperan dalam mengedukasi orang tua dan anak untuk menyiapkan anak masa depan. membuat anak dan orang tua tertarik untuk mengikuti Posyandu. |
| 1. | Pare Ayam 4, Tegalpanggung | Rp. 10.000.000,- | Rencana Kegiatan : a. Sosialisasi SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) b. Pelatihan membuat menu bergizi lengkap dan seimbang c. Sosialisasi Pola Asuh Anak d. Sosialisasi Kespro (Kesehatan Reproduksi) untuk Ibu Balita dan Catin (Calon Pengantin) e. FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) menjadi orang tua hebat f. Sosialisasi penyakit tidak menular & kejiwaan g. Pengadaan berbagai alat seperti : dudukan & tiang timbangan, alat ukur panjang badan dari stainless, APE (Alat Permainan Edukatif) Indoor, dan ayunan mobil kayu. |
| 2. | Dadap Lila 15, Prawirodirjan | Rp. 10.000.000,- | Rencana Kegiatan : a. Pelatihan mengolah menu sehat bagi ibu-ibu kelompok Dasa Wisma b. Pembelajaran luar kelas tentang permainan tempo doeloe, misal : bekel, sundamanda, gobag sodor, lompat tali c. Pelatihan administrasi untuk kader baru d. Pembuatan taman bacaan/perpustakaan bagi anak-anak e. Pengadaan berbagai alat seperti : tiang timbangan, APE (Alat Permainan Edukatif) untuk anak. |
| B | Puskesmas (Puskesmas Ramah Anak) | | |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 1 | Puskesmas Kotagede II | Rp. 15.000.000,- | Mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung ke Puskesmas. RENCANA : melengkapi playground/fasilitas penunjang anak di Poli Anak dan Tempat Bermain. |
| Total Sektor Kesehatan | | Rp. 35.000.000,- | |

IV. Sektor Fisik

| No | Nama | Rencana Anggaran | Dana Swadaya | CSR BPD 2017 | |
|----|--|------------------|--------------|---|--|
| | | | | Rencana Anggaran dalam Pengajuan Dana CSR | Uraian |
| 1 | Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 10 unit RTLH x Rp 15.000.000,- = Rp 150.000.000,- | | | | Rumah Tidak Layak Huni terdiri dari 10 unit rumah dengan ketentuan unit rumah belum pernah mendapat intervensi dan status tanah adalah hak milik sendiri. Lokasi RTLH berada di 5 kelurahan, yaitu : a. 2 unit di Kecamatan Mantrijeron, Kelurahan Mantrijeron b. 2 unit di Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Warungboto c. 2 unit di Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Muja |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Muju d. 2 unit di Kecamatan Danurejan, Kelurahan Suryatmajan e. 2 unit di Kecamatan Danurejan, Kelurahan Bausasran Rencana Anggaran berupa bahan material dan upah tenaga kerja, serta mengoptimalkan swadaya masyarakat sekitar melalui Gerakan Segoro Amarto. |
| | a. Kelurahan Mantrijeron a.n Yubiyanto | Rp. 17.600.000,- | Rp. 2.600.000,- | Rp. 15.000.000,- | Yang dikerjakan : - Perbaikan rangka atap - Atap - Peninggian atap |
| | b. Kelurahan Mantrijeron a.n Darmo Sumarto | Rp. 17.500.000,- | Rp. 2.500.000,- | Rp. 15.000.000,- | Yang dikerjakan : - Perbaikan rangka atap - Atap - Teras |
| | c. Kelurahan Warungboto a.n Siti Romzanah | Rp. 21.777.000,- | Rp. 6.777.000,- | Rp. 15.000.000,- | Yang dikerjakan : - Pengerjaan atap - Pengerjaan plafon |
| | d. Kelurahan Warungboto a.n Abadi | Rp. 18.370.000,- | Rp. 3.370.000,- | Rp. 15.000.000,- | Yang dikerjakan : - Pengerjaan lantai - Pengerjaan atap - Pengerjaan ventilasi dan pintu |
| | e. Kelurahan Muja Muju a.n Pujo Yuwono | Rp. 19.410.000,- | Rp. 4.410.000,- | Rp. 15.000.000,- | Yang dikerjakan : - Pembongkaran atap total - Mengganti usuk bambu dengan usuk glugu - Mengganti reng bambu dengan |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> reng kayu - Meningkatkan pasangan bata ruang samping setinggi 3,00 m - Mengganti bentuk atap ruang samping dari panggung pe ke pelana seng diganti genting (dengan catatan bila tidak ada penggantian blandar) |
| | f. Kelurahan Muja Mujua .n Dwiyanti | Rp. 19.260.000,- | Rp. 4.260.000,- | Rp. 15.000.000,- | <ul style="list-style-type: none"> - Pembongkaran atap total - Merubah bentuk atap (cere gancet) menjadi gedang selirang - Mengganti usuk bambu dengan glugu/kayu - Mengganti reng bambu dengan reng kayu - Memasang keramik kamar mandi/wc - Mengefektifkan ruang yang ada secara optimal. |
| | g. Kelurahan Suryatmajana .n Wagimin Harjo Utomo | Rp. 19.453.000,- | Rp. 4.453.000,- | Rp. 15.000.000,- | |
| | h. Kelurahan Suryatmajana .n Suparno | Rp. 19.500.000,- | Rp. 4.500.000,- | Rp. 15.000.000,- | |
| | i. Kelurahan Bausasrana .n Asih Darmopawiro | Rp. 19.692.000,- | Rp. 4.692.000,- | Rp. 15.000.000,- | <ul style="list-style-type: none"> Yang dikerjakan : - Kolom dan plat kaki - Ring back - Pasangan batu bata (gunung-gunung) - Talang kanan kiri - Perbaikan atap |
| | j. Kelurahan Bausasrana .n Fitra Basriansyah | Rp. 22.450.000,- | Rp. 7.450.000,- | Rp. 15.000.000,- | <ul style="list-style-type: none"> Yang dikerjakan : |

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| | | | | | - Atap |
| - | 5 Unit RTLH x Rp. 15.000.000,- = Rp. 75.000.000,- | | | | |
| | a. Kelurahan Prawirodirjan a.n Purwadi | Rp. 18.910.000,- | Rp. 3.910.000,- | | |
| | b. Kelurahan Purwokinanti a.n Sugiyarto | Rp. 17.480.026,- | Rp. 2.480.000,- | | |
| | c. Kelurahan Purwokinanti a.n Ny. Boniyem | Rp. 17.100.248,- | Rp. 2.100.000,- | | |
| Total Sektor Fisik | | | | Rp. 150.000.000,- | |

4.6. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang telah disampaikan. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 4.6
Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta

| No | Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | Lokasi | OPD | Yang Terdapat di Rancangan Renja | | | Belum Terdapat di Rancangan Renja | |
|-----------------|--|--------|---------------------------------|---|---------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018 | Anggaran (Rp) | Keterangan | Kebutuhan Anggaran (Rp) | Keterangan |
| KOMISI A | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Ruang Terbuka Hijau untuk setiap Kelurahan | | DLH | Penyempurnaan RTHP tersebar se-Kota Yk dan penyempurnaan RTHP Gajah Wong di Kel. Pandeyan, Umbulharjo | 439.500.000 | Pemeliharaan RTH di DLH yang rusak berat, sedangkan pemeliharaan ringan di Kec/LPMK | 621.000.000 | Digunakan untuk jasa konsultan identifikasi RTHP, DED pembuatan RTHP (4 lokasi) dan pembangunan RTHP 2 lokasi: Kel. Pringgokusuman dan Kel. Brontokusuman. |
| | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | Pengadaan tanah untuk RTH di Kel. Muja Muju | 1.600.000.000 | Sampai dengan Tahun 2016 sudah terdapat RTH di 33 Kelurahan (41 lokasi) | - | - |
| 2 | Transparansi mengenai program-program yang telah dilaksanakan dan belum terlaksana oleh Pemerintah | | Bappeda | Telah disusun dokumen Informasi pembangunan di wilayah | 200.000.000 | Informasi pembangunan di wilayah di OPD tingkat Kota YK | - | - |

| No | Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | Lokasi | OPD | Yang Terdapat di Rancangan Renja | | | Belum Terdapat di Rancangan Renja | |
|----|---|--------|----------------------|--|---------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018 | Anggaran (Rp) | Keterangan | Kebutuhan Anggaran (Rp) | Keterangan |
| | | | | | | disusun oleh Bappeda, sedangkan yang dilakukan oleh Kecamatan disusun oleh Kecamatan dan sudah di distribusikan di Kecamatan. | | |
| | | | Kecamatan Wirobrajan | - | - | - | 2.122.500 | akan dimasukkan renja 2018 Penyusunan Informasi Program & Kegiatan |
| | | | Kecamatan Gondomanan | Telah disusun dokumen Informasi Pembangunan di wilayah. Penyusunan buletin, sosialisasi Perundang-undangan | 20.470.000 | Buku Informasi Pembangunan di wilayah disusun oleh kecamatan kemudian didistribusikan ke wilayah melalui ketua RW. Dilaksanakan 2 x dalam setahun Murni dan Perubahan | - | - |
| | | | Kecamatan Ngampilan | Telah disusun dokumen Informasi Pembangunan di Wilayah | 6.050.000 | Informasi pembangunan di wilayah di OPD tingkat Kota Yk | - | - |

| No | Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | Lokasi | OPD | Yang Terdapat di Rancangan Renja | | | Belum Terdapat di Rancangan Renja | |
|----|--|--------|-------------|---|---------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | | Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018 | Anggaran (Rp) | Keterangan | Kebutuhan Anggaran (Rp) | Keterangan |
| | | | | | | disusun oleh Bappeda, sedangkan yang dilakukan oleh Kecamatan disusun oleh Kecamatan dan sudah didistribusikan di Kecamatan dan kelurahan | | |
| 3 | Kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya | | Disdukcapil | telah diakomodir dalam Renja 2018 dalam Program Pelayanan Pencatatan Sipil | 625.256.910 | Pelayanan jemput bola, layanan secara online , adanya kerjasama dengan RS, dan pelayanan Mobil Keliling. | - | Pelaksanaan pelayanan mobil keliling untuk pelayanan pencatatan peristiwa penting dalam renja 2019, yaitu pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian. |
| 4 | Usulan sosialisasi jemput bola pembuatan akta kelahiran ditingkatkan agar warga yang mempunyai kesibukan bekerja bisa mendapatkan pelayanan tersebut | | Disdukcapil | telah diakomodir dalam Renja 2018 dalam Program Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil | - | Pelayanan jemput bola di 45 Wilayah kelurahan. | - | - |
| 5 | Pemanfaatan sosial media untuk penyampaian info-info program Pemerintah Kota Yk | | Bappeda | Sudah disusun Jogja Smart Info kerjasama dengan UAD yaitu aplikasi informasi berbasis | 40.000.000 | Melalui Jarlit di tahun 2017 | - | - |

| No | Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | Lokasi | OPD | Yang Terdapat di Rancangan Renja | | | Belum Terdapat di Rancangan Renja | |
|----|---|--------|----------------|---|---------------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018 | Anggaran (Rp) | Keterangan | Kebutuhan Anggaran (Rp) | Keterangan |
| | | | | android | | | | |
| | | | Diskominfo | Telah diakomodir di Renja 2018 - Pembentukan Tim Koordinasi website Pemkot Yogyakarta | 69.875.000 | Pemanfaatan Sosial media di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk menyampaikan program Pemkot Yk sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya, namun sebelumnya tidak ada anggaran khusus untuk pengelolaan Media Social (website dan FB) | - | - |
| 6 | Terkait banyaknya aksi vandalisme (corat-coret dan merusak fasum), terjebak narkoba, aksi kekerasan seperti perkelahian dan tawuran, mohon untuk dibuatkan kegiatan-kegiatan positif sebagai sarana, minat-bakat. Dan segenap potensinya. Dalam hal ini segenap elemen pelajar,osis, kepemudaan, karang taruna harus dilibatkan | | Kantor Kesbang | kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah | 1.094.601.164 | Terkendalnya gangguan keamanan dan ketentraman ketertiban wilayah kota Yk | - | - |
| | | | Dinsos | Telah diakomodir dalam Renja 2018 dalam kegiatan Pemberdayaan | 125.620.000 | termasuk dalam program data informasi dan | - | - |

| No | Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2018 | Lokasi | OPD | Yang Terdapat di Rancangan Renja | | | Belum Terdapat di Rancangan Renja | |
|----|---|--------|---------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018 | Anggaran (Rp) | Keterangan | Kebutuhan Anggaran (Rp) | Keterangan |
| | | | | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui sub kegiatan Pembinaan bagi Karang Taruna dan Sarasehan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan | | pemberdayaan sosial | | |
| | | | Dispora | telah diakomodir kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan | 1.849.861.455 | | | |
| | | | | 1. Pemilihan Pemuda Pelopor | 149.855.000 | | | |
| | | | | 2. Jumlah peserta Kemah Bakti Pemuda Nusantara | 77.290.000 | | | |
| | | | | 3. Frekuensi Pemuda Jogja mencari bakat | 118.210.000 | | | |
| | | | | 4. Frekuensi Gebyar Sumpah Pemuda | 93.892.000 | | | |
| | | | | 5. Laporan seleksi, pendidikan, pelaksanaan dan pembinaan Paskibraka | 859.492.500 | | | |
| | | | | 6. Frekuensi sosialisasi pembentukan karakter Pemuda Anti NAPZA | 101.574.500 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--|-------------|-----------------------------------|
| | | | 7. Pembinaan Kepemudaan | 449.547.455 | - | 566.122.659 | Belum masuk Renja 2018 |
| | | Satpol PP | Tidak di akomodir | - | - | - | - |
| | | Dindik | Jembatan Persahabatan, Operasi Pelajar, OSN, O2SN, FLSN | 128.210.000, 210.885.000, 165.593.000 | - | - | - |
| 7 | Penguatan kelembagaan Pemuda melalui Karang Taruna | Dinsos | Yelah diakomodir dalam Renja 2018 dalam kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui sub kegiatan Pembinaan bagi Karang Trauna | 116.485.000 | Termasuk dalam program informasi dan pemberdayaan sosial | - | - |
| | | Dispora | Diakomodir kegiatan Pembinaan kelembagaan Kepemudaan | 213.009.500 | | | |
| | | | 1. Pemuda Cinta Damai Lintas Agama | 17.763.300 | | | |
| | | | a. pertemuan bulanan antar OKP | 0 | - | - | Jadi satu dengan kegiatan lain |
| | | | 2. Seminar Program Pemerintah | 17.713.000 | | | |
| | | | a. Kerjasama Organisasi Kepemudaan | 0 | - | - | Jadi satu dengan kegiatan lain |
| | | | a. Pemilihan Anjungan Daerah Asrama Mahasiswa Sabang Merauke | 0 | - | - | Jadi satu dengan kegiatan lain |
| | | | 3. Diskusi kelembagaan antar OKP | 17.393.300 | - | - | - |
| | | | 4. Fasilitasi kelembagaan OKP | 17.393.000 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-------------|---|---|---|
| | | | 5. Pelatihan manajemen bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan | 13.133.300 | - | - | - |
| | | | 6. Pendataan potensi kepemudaan | 129.613.000 | - | - | - |
| 8 | Pertemuan rutin silaturahmi kepada RT/RW bentuk sosialisasi kebijakan-kebijakan ataupun informasi-informasi dari pusat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat | Kecamatan Wirobrajan | telah terakomodir didalam renja 2018 | 19.531.000 | Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW Kec.Wirobrajan | - | - |
| | | Kecamatan Gondomanan | telah terakomodir didalam renja 2018 -Pemilihan RT/RW/LPMK -Sarasehan Kelembagaan | 164.173.000 | terbentuknya kepengurusan kelembagaan RT dan RW , pendampingan keagamaan,pemanfaatan hasil rakor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan | - | - |
| | | Kecamatan Ngampilan | telah terakomodir didalam renja 2018 untuk kegiatan Pemilihan Pengurus RT/RW , Rapat Tokoh Masyarakat, Rakor Pemerintahan dan Trantib | 152.707.000 | termanfaatkannya hasil kepengurusan kelembagaan RT dan RW , pendampingan keagamaan,pemanfaatan hasil rakor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|--|---------------|--|---|---|
| | | | Bag. TAPEM Kesra | | | | | |
| 9 | Sosialisasi ataupun penyuluhan-penyuluhan untuk menambah wawasan-wawasan atas kejadian terkini misalnya, mengenai terorisme dan bagaimana solusi pencegahannya. | | Dinsos | Telah diakomodir dalam kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui sub kegiatan Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial | 6.490.000 | termasuk dalam program data informasi dan pemberdayaan sosial | - | - |
| | | | Kantor Kesbang | Frekuensi Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat sebanyak 10 kali | 1.094.601.164 | - | - | - |
| | | | Kecamatan Wirobrajan | | 7.432.000 | Sosialisasi sadar bela negara, sosialisasi kerukunan umat beragama | - | - |
| | | | Kecamatan Gondomanan | Sarasehan antar umat beragama | 5.420.000 | Terciptanya kerukunan antar umat beragama yang harmonis | - | - |
| 10 | Tindakan tegas terhadap keberadaan toko jejaring yang tidak berizin dan merugikan para pengusaha kecil | | Dinzin, dinas koperasi dan UKM | | | | | |
| | | | Satpol PP | Telah diakomodir dalam rancangan Renja 2018 pada Kegiatan Operasi Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi, khususnya pada keluaran kegiatan operasi penindakan hukum | 5.295.996.416 | Jumlah anggaran merupakan anggaran total kegiatan pada Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|---------------|--|---|---|
| | | | terpadu dan operasi penegakan perda secara yustisi | | digunakan dalam rangka penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) Kota Yogyakarta melalui operasi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi | | |
| 11 | Keluhan mengenai banyaknya pembangunan hotel dan toko jejaring di kota Jogja, mohon adanya penertiban mengenai ijin dan penutupan hotel bagi hotel-hotel yang belum mengantongi ijin | Satpol PP | Telah diakomodir dalam rancangan Renja 2018 pada Kegiatan Operasi Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi, khususnya pada keluaran kegiatan operasi penindakan hukum terpadu dan operasi penegakan perda secara yustisi | 5.295.996.416 | Jumlah anggaran merupakan anggaran total kegiatan pada Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam rangka penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) Kota Yogyakarta melalui operasi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|----------------------|---|---------------|--|------------|-------------------------------------|
| | | | Dinzin | | | | | |
| 12 | Penertiban bagi PKL yang mengganggu ruas jalan | | Satpol PP | Telah diakomodir dalam rancangan Renja 2018 pada Kegiatan Operasi Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi, khususnya pada keluaran kegiatan operasi penindakan hukum terpadu dan operasi penegakan perda secara yustisi | 5.295.996.416 | Jumlah anggaran merupakan anggaran total kegiatan pada Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam rangka penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) Kota Yogyakarta melalui operasi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi | - | - |
| | | | Kecamatan Wirobrajan | - | 3.960.000 | Rapat Optimalisasi Ketertiban PKL | - | - |
| | | | Kecamatan Gondomanan | operasi ketertiban | 61.020.000 | - | - | - |
| 13 | Pembuatan Brojong Kali Winongo | Kec. Mantrijeron | Dinas PUPKP | Tidak diakomodir | - | - | - | - |
| 14 | Pembuatan MCK | RT 82 RW 18 Mantrijeron | Dinas PUPKP | belum ada di rancangan renja PUPKP | - | - | 70.000.000 | akan dimasukkan ke dalam Renja 2018 |
| 15 | Renovasi MCK | RW 08 Kel. Prawirodirjan | Kecamatan Gondomanan | sudah masuk dalam renja 2018 | 5.000.000 | Tersedianya MCK yang bersih dan sehat | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|--|-------------|----------------------|------------|---|
| 16 | Pembuatan kantor RW 18 | RW 18 Dukuh | Dinas PUPKP | - | - | - | 35.000.000 | Penyusunan DED catatan Tanah harus milik pemerintah kota Yogyakarta |
| 17 | Penggantian konblok | Gg. Harjoseno, RW 06, Kumendaman Mantrijeron | Dinas PUPKP | - | - | Kewenangan Kecamatan | - | - |
| | | Gg. Harjoseno, RW 06, Kumendaman Mantrijeron | Kecamatan Mantrijeron | diusulkan ke Dinas PU ESDM Prov. DIY. Keterangan lokasi pada Hasil Musrenbang: RW 07 / RT 23,24 (Gg Hardjoseno & Gg Badru Kohiman) | 101.750.000 | - | - | - |
| 18 | Pembuatan/perbaikan plafon RW 06 | RW 06 Kumendan Mantrijeron | Dinas PUPKP | - | - | - | - | desentralisasi pemeliharaan |
| 19 | Perbaikan rumah korban kebakaran, Slamet Wahyudi | RT 53 RW 14 Suryodiningrat an | Dinas PUPKP dan Dinas Kebakaran | - | - | - | - | - |
| 20 | Pembuatan Balai RW | RW 01, 03, Bintaran, Mergangsan | Dinas PUPKP | tidak diakomodir | - | - | - | - |
| 21 | Pembuatan SAH | RT 08, Bintaran, Mergangsan | Dinas PUPKP | tidak diakomodir | - | - | - | - |
| 22 | Penerangan | RT 08, 09, 10, Bintaran, Mergangsan | Dinas PUPKP, Kecamatan | akan dimasukkan dalam usulan 2018 | - | - | - | - |
| 23 | Pengaspalan | Jl. Nogosari RW 02, Kadipaten, Kraton | Dinas PUPKP | akan dimasukkan dalam usulan 2018 | - | - | - | - |
| 24 | Pengaspalan | Jl. Ngasem-Magangan, Kraton | Dinas PUPKP | akan dimasukkan dalam usulan 2018 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|--|---|-------------|--|--|
| 25 | Perbaiki kantor RW | RW 06 Kadipaten, Kraton | Kecamatan | | | | | | | | |
| 26 | Rehab Gedung LPMK | Kelurahan Ngupasan | Kecamatan Gondomanan | telah terakomodir didalam renja 2018 | 40.000.000 | Terpeliharanya Fasum | - | - | | | |
| 27 | Permohonan Konblokisasi dan perbaikan konblok rusak | RT 3 RW 1 Ngupasan | Kecamatan Gondomanan | telah terakomodir didalam renja 2018 | 15.000.000 | RTHP, pagar, konblok | - | - | | | |
| | | RT 6 RW 2 Ngupasan | | | 4.500.000 | | - | - | | | |
| | | RW 7 Ngupasan | | | 45.000.000 | | | | | | |
| | | RT 40 RW 12 Prawirodirjan | | | 10.000.000 | | Terpeliharanya Fasum | | | | |
| | | RT 36 RW 11 Prawirdirjan | | | 15.000.000 | | | | | | |
| | | Pendopo RW 06 Prenggan | | | Kecamatan Kotagede | | pemeliharaan fasilitas umum tersebar di wilayah | | 1 kecamatan | | pada Tahun 2016 sudah dilakukan melalui TMMD |
| | | RT 26 ke timur (RT 26 RW 6 Prenggan) | | | Kecamatan Kotagede | | pemeliharaan jalan tersebar di wilayah | | | | akan dilaksanakan pada Tahun 2019 |
| RT 29 RW 6 Prenggan | | Sudah masuk di usulan Musrenbang Tahun 2018 dan masuk ke stimulan LPMK | | | | | | | | | |
| | RT 30 belakang balai RW 6 Prenggan | Kecamatan Kotagede | pemeliharaan jalan tersebar di wilayah | 18.000.000 | Masuk di Usulan Renja Tahun 2018 | - | - | | | | |
| | Jl. Tahunan RT 8 Tahunan | Kecamatan Umbulharjo | untuk jl tahunan RT 8 belum terdapat dalam rancangan renja 2018 | 116.875.000 | pemasangan paving blok Gg Derkuku Rt 12 RW03, blok Rt23, Rt 44, RT 20, Gang | - | Karena bukan merupakan termasuk dalam skala prioritas yang akan dilaksanakan | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|---|--------------------|---|--|
| | | | | kunthi RT 20 | | pada tahun anggaran 2018 |
| Kompleks dalem gede Ngdiwinatan | Kecamatan | | | | | |
| Perbatasan wilayah RW 13 dan RW 09 jalan memanjangn ke utara kurang lebih 150 meter | Kecamatan | | | | | |
| RW 04 wilayah RT 18 Kelurahan Bumijo Kec. Jetis di belakang mesjid kurang lebih 70 meter | Kecamatan | untuk RT 18 tidak ada dalam renja 2018 | - | RT 08 RW 13 dan 16 | - | RW 04 wilayah RT 13-16 sedang kan untuk belakang masjid al-Mansyurin berada di perbatasan RW 13 dan RW 04 (RT16) utuk jalan dari utara masjid sudah ada perbaikan paving tahun 2016 melalui anggaran SKPD sedangkan untuk selanjutnya merupakan jalan cor beton kondisi memang kurang bagus dan tidak diusulkan dalam musrenbang. sedangkan untuk masjid al-iman |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------|------------------------------|------------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | | berada di RT 18 RW 05 untuk jalan di sebelah barat masjid sudah bagus sedangkan untuk jalan sebelah timur masjid kepemilikan persil. |
| 28 | Mohon pembuatan fasum bekas SD impres Kadipaten Kulon wilayah RW 05 Kelurahan Kadipaten dikarenakan gedung rusak dan sangat membahayakan keselamatan | Bekas SD Impres Kadipaten Kulon di wilayah RW 05 Kelurahan | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Penghapusan aset untuk disampaikan ke BPKAD, mengubah fungsi kekancingan tanahnya di Dispertaru baru bisa di buat DED |
| 29 | Mohon perbaikan pintu gardu | Pojok Beteng Lor demi keamanan wilayah di Lingkungan Njeron Beteng RW 05 Kelurahan Kadipaten | Dinas PUPKP | tidak diakomodir | - | - | - | - |
| 30 | Perbaikan pos ronda | Wilayah RT 07 keparakan | | | | | | |
| | | RW 01 Ngupasan | | | 10.000.000 | | - | - |
| | | RW 17 Prawirodirjan | Kecamatan Gondomanan | terakomodir dalam renja 2018 | 8.000.000 | Terpeliharanya Fasum | - | - |

| KOMISI B | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------------------------|---|-------------|---|-------------|---|
| 1 | Dana hibah untuk koperasi yang sudah berbadan hukum | | Dinas Koperasi dan UKM | | | | | |
| 2 | Fasilitas UMKM untuk pameran baik dalam Yogyakarta maupun luar Yogyakarta | | Dinas Koperasi dan UKM | | | | | |
| 3 | Dana hibah untuk koperasi yang sudah berbadan hukum | | Dinas Koperasi dan UKM | | | | | |
| 4 | Pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian perkotaan | | Dinas pertanian dan pangan | Sudah dilakukan oleh kelompok tani dan dianggarkan pada kegiatan pembinaan dan budidaya usaha pertanian | | | | |
| 5 | Usulan pembuatan perda yang mengatur tentang pramuwisata untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Yogyakarta | | Dinas Pariwisata | | | | | |
| 6 | Pengembangan potensi kesenian lokal kota Jogja untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta | | Dinas kebudayaan | Pengembangan potensi kesenian lokal telah terakomodir dengan sasaran kegiatan pada 18 rintisan desa/kelurahan budaya dan terintegrasi dalam tiga program, program Pelestarian dan Pengembangan seni Tradisi, Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahas serta Program Pelestarian warisan dan | 188.100.500 | Kelurahan Kotabaru, Semaki, Baciro, Tegalpanggung, Bausaran, Prawirodirjan, Keparakan, Warungboto, Purbayan, Prenggan, Pandeyan, Gedongkiwo, Wirobrajan, Ngampilan, | 396.000.000 | untuk mendukung pencapaian sasaran kota urusan kebudayaan, dengan menambah tenaga teknis pendamping seni budaya di 18 kelurahan rintisan budaya |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|------------|--|--|---|
| | | | | nilai budaya | | Pringgokusuman, Cokrodiningratan, Purwokinan dan Kelurahan Gunungketur | | |
| 7 | Kurangnya transportasi penunjang pariwisata dan perlu penambahan armada lagi | | Dishub | | | | Untuk penambahan armada belum ada dalam rancangan Renja Dinhub | Diampu dengan Danais oleh Dishub Propinsi, angkutan pariwisata "Si Tole" yang sudah ada sebanyak 5 armada, tahun 2016 gagal lelang, untuk tahun 2017 direncanakan tambahan sebanyak 10 unit . Dishub Propinsi sudah menjalin kerjasama dengan Koperasi FKAU dan hal ini sudah persetujuan Gubernur. Apabila dilaksanakan oleh Dishub Kota untuk proses hibah mengalami kesulitan karena syarat-syarat hibah mengalami kesulitan untuk dipenuhi dishub kota. |
| | | | | Untuk angkutan penunjang pariwisata sudah diakomodir di Renja 2018 pada Kegiatan Penyelenggaraan | 30.440.000 | Dengan Optimalisasi Kendaraan Tidak Bermotor sebagai Angkutan | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------------|---|------------|--|------------|---|
| | | | | Angkutan | | Penunjang Pariwisata, dengan kegiatan pemberian Reflektor KTB, TNKTB, SIOKTB, Identitas pengemudi KTP dan Pembinaan Ketertiban KTB | | |
| 8 | Pelatihan kewirausahaan | | Dinas Perindag | kegiatan pembinaan ekonomi sosial dan budaya kelurahan notoprajan, terselenggaranya pelatihan kewirausahaan | 81.549.000 | kel. Notoprajan, kec. Tegalrejo, kec. Pakualaman | 81.549.000 | Pelatihan Kewirausahaan terdapat di kegiatan Pembinaan Sarana Produksi, Program Pembinaan Perindustrian, sudah masuk pada Renja TA 2018 |
| | | | Kecamatan Kotagede | - | 22.950.000 | terdapat di Kegiatan Kecamatan Kotagede Tahun 2017 | - | - |
| | | | Dinas koperasi dan UKM | | | | | |
| 9 | Pembentukan fasilitas dan kampung wisata | | Dinas Pariwisata | | | | | |
| KOMISI C | | | | | | | | |
| 1 | Pembuatan dan Perbaikan SAH di beberapa lokasi | Perbaikan tutup SAH di RW 8 Baciro | Dinas PUPKP | | | | | akan diakomodir di perubahan tahun 2018 |
| | | Pembuatan SAH ukuran | Dinas PUPKP | | | | | akan diakomodir di tahun 2019 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---|------------|------------------------------------|---|--|
| | | 60cm x 100cm dan plat beton sepanjang 20 m di Gg Mawar V RW 12 Baciro | | | | | | |
| | | Pelumpuran SAH sepanjang 200 m dan perbaikan tutup SAH di Gg. Mawar RW 12 Baciro | Dinas PUPKP | - | - | - | - | akan dilaksanakan swakelola SAH tahun 2019 |
| | | Memperbanyak SPAH di RW 12 Jogoyudan | Dinas PUPKP | - | - | - | - | SPAH merupakan kewenangan DLH |
| | | Pembangunan SAH di RT 13 RW 4 Baciro | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Sudah dikerjakan di tahun 2016 |
| | | Rehab SAH RT 37 RW 11 Ngupasan | Kecamatan Gondomanan | | 7.500.000 | sudah terakomodir dalam renja 2018 | - | - |
| | | Rehab SAH RT 38 RW 11 Ngupasan | Kecamatan Gondomanan | | 7.500.000 | sudah terakomodir dalam renja 2019 | - | - |
| | | Rehab dan Pelumpuran SAH RT 17 RW 6 Prawirodirjan | Kecamatan Gondomanan | | 10.000.000 | sudah terakomodir dalam renja 2020 | - | - |
| | | Rehab dan Pelumpuran SAH RT 28,29 RW 10 Prawirodirjan | | - | 4.000.000 | sudah terakomodir dalam renja 2021 | - | - |
| | | Rehab dan Pelumpuran | | - | 5.000.000 | sudah terakomodir | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------|--|---|----------------|
| | | SAH RT 49,53 RW 15 Prawirodrjan | | | | dalam renja 2022 | | |
| | | Rehab dan Pelumpuran SAH RT 61 RW 18 Prawirodrjan | | - | 5.000.000 | sudah terakomodir dalam renja 2023 | - | - |
| | | Rehab dan Pelumpuran SAH RT 46,47,48 RW 14 Prawirodrjan | | - | 26.000.000 | sudah terakomodir dalam renja 2024 | - | - |
| | | RW 8 Kelurahan Ngampilan | Dinas PUPKP | | | | | |
| | | Jalan Gotong Royong Karangwaru RW 3 | Dinas PUPKP | | | | | |
| | | SAH di penggal Jalan Jembegan atau sisi barat wilayah RW 11 | Dinas PUPKP | | | | | |
| 2 | Pelumpuran dan Normalisasi SAH, Saluran Irigasi | Pengerukan salurah air hujan (SAH) di wilayah RW 6 Prenggan | Dinas PUPKP | dilaksanakan dengan swakelola | - | - | - | - |
| | | Saluran pembuangan Air hujan (SAH) di Jalan Mondorakan Prenggan | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Kewenangan DIY |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------|---|---|-------------------------|
| | | sepanjang 400 meter | | | | | | |
| | | Irigasi selokan di wilayah RW 12 Kelurahan Rejowinangun | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Kewenangan DIY |
| | | Daerah Pakel Mulyo , samping RS. Bhakti Ibu | Dinas PUPKP | dilaksanakan dengan swakelola | - | - | - | - |
| | | Revitalisasi saluran irigasi di belakang soto Sholeh RW 6 Tegalrejo | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Kewenangan SDA Propinsi |
| | | Perbaiki SAH dari RW 04 sampeai RW 06 dan tersambung sampai ke jalan Wiratama, Tegalrejo | Dinas PUPKP | akan dilaksanakan di tahun 2018 | - | - | - | - |
| | | Pengerukan SAH RT 6 RW 2 Ngupasan | Kecamatan Gondomanan | terakomodir dalam renja 2018 | 5.000.000 | - | - | - |
| 3 | Perbaiki SAL di beberapa lokasi | Penyambungan saluran rumah tangga ke SAL di wilayah RW 06 Tegalrejo | Dinas PUPKP | - | 120.000.000 | - | - | - |
| | | Wilayah RT 56 dan RW 14 Kel. Panembahan , | Dinas PUPKP | - | 90.000.000 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|---|---|---|--|
| | | Kraton | | | | | | |
| 4 | Perbaikan di beberapa ruas jalan yang rusak | Samping Mall Malioboro sampai jalan Mataram | Dinas PUPKP | - | - | - | - | perlu survey dan perencanaan |
| | | Pengaspalan jalan di wilayah RT 16-17 RW 4 Kalangangan , Pandeyan | Dinas PUPKP | - | - | - | - | perlu survey dan perencanaan |
| | | Sisi utara Jalan Lempuyangan | Dinas PUPKP | diusulkan di pemeliharaan jalan tahun 2018 | - | - | - | - |
| | | Pengaspalan Jalan Mayjen Sutoyo kurang lebih 23 meter | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Jln. Mayjen Sutoyo kondisi masih baik |
| | | Pengaspalan Jl. Pojok Beteng Kulon ke selatan (Jl. Bantul) sampai Pasty | Dinas PUPKP | - | - | - | - | perlu survey dan perencanaan |
| 5 | Pemasangan dan Perbaikan PJU, Pemindahan tiang PJU yang mengganggu jalan. | Pemasangan PJU 15 titik di Gg. Sukandara dan Jl. Widayati Sutardjo RW 5 Baciro | Dinas PUPKP | diusulkan di tahun 2018 | - | - | - | - |
| | | 70 titik disepanjang pinggir sungai Gajahwong di Sambirejo RT 1, RT 2, RT 5, | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Anggaran per tahun 400 titik sehingga permohonan 70 titik belum bisa diakomodir. |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------------------|---|---|---|--|
| | dan RT 6 RW 1 Prenggan | | | | | | |
| | RW 7 Ponggalan Giwangan 80 titik | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Anggaran per tahun 400 titik sehingga permohonan 70 titik belum bisa diakomodir. |
| | Gardu Pojok Beteng Lor Kulon di Wilayah RW 05 Kelurahan Kadipaten Kulon | Dinas PUPKP | dimasukan diusuln tahun 2018 | - | - | - | - |
| | Kampung Kalangan, Pandeyan | Dinas PUPKP | - | - | - | - | perlu survey lokasi |
| | RW 14 Karangwaru Kldul | Dinas PUPKP | dimasukan diusuln tahun 2018 | | | | |
| | RW 10 Pringgokusuman | Dinas PUPKP | dimasukan diusuln tahun 2018 | | | | |
| | Pemasangan lampu PJU pada RT 51, 56 dan 57 RW 11 Ngampilan | Dinas PUPKP | dimasukan diusuln tahun 2018 | | | | |
| | Pemasangan lampu PJU di RT 58,59,60,61 RW 12 Ngampilan sampai Jalan KHA Dahlan | Dinas PUPKP | dimasukan diusuln tahun 2018 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|--|
| 6 | Pemerataan tinggi trotoar, sehingga tidak menyulitkan kaum difabel | - | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Perlu survey lokasi |
| 7 | Permohonan agar tepi trotoar diberi tiang/pathok untuk lindungi pejalan kaki di se-jogja | - | Dinas PUPKP | - | - | - | - | perlu study kelayakan |
| 8 | Pembuatan jembatan penyeberangan orang di Sungai Code | - | Dinas PUPKP | - | - | - | - | perlu pembebasan tanah |
| 9 | Permohonan untuk renovasi balai kampung | Balai RW 3 Jlagran | Kecamatan Gedongtengen | belum ada di rancangan renja 2018 | - | - | - | Sertifikat Balai RW masih berupa kekancingan dari Kraton/Pengageng Panitikismo, sedangkan yang dikerjakan Kecamatan, sertifikat milik PEMKOT |
| | | Kampung Bausasran | Kecamatan Danurejan | belum ada di rancangan renja 2018 | - | - | - | - |
| | | Balai Tegalkemuning | Kecamatan Danurejan | belum ada dirancangan renja 2018 | - | - | - | belum menjadi prioritas musrenbang 2017 dan belum teranggarkan di OPD Tahun 2018 |
| | | Ruang pertemuan dan ruang kantor RT 28 RW 8, RW 9 dan RW 10 | Kecamatan | | | | | |
| 10 | Pembangunan dan Perbaikan Talud Sungai | RT 21 dan RT 22 RW 5 Terban yang rawan longsor | Dinas PUPKP | - | - | - | 250.000.000 | dilaksanakan tahun 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|---|---|---------------|-------------------------------------|
| | Winongo di wialyah RW 1 Pringgokusuman dan Wilayah RW 1 Karangrejo | Dinas PUPKP | - | - | - | 1.050.000.000 | Pekerjaan bertahap mulai tahun 2019 |
| | Talud Kali Code di wilayah RT 08 sebelah selatan jembatan Gondolayu | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Wewenang BBWSO |
| | Talud Kali Code di wilayah RT 42 RW 10 Kelurahan Gowongan karena sebagian tebing longsor sepanjang 16 meter sejak tahun 2009 | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Wewenang BBWSO |
| | Kali Gajah Wong khususnya di RT 12 Bintaran Kidul, Mergangsan | Dinas PUPKP | - | - | - | 975.000.000 | Mulai tahun 2019 |
| | RT 09 sampai RT 12 Bintaran Kidul, Mergangsan | Dinas PUPKP | - | - | - | 975.000.000 | Mulai tahun 2019 |
| | Kalicode RW XI Jogoyudan | Dinas PUPKP | - | - | - | 225.000.000 | Mulai tahun 2019 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------|--|---------------|---|-------------|----------------------------------|
| | | RW 11 Jogoyudan RT 44 Kel Gowongan | Dinas PUPKP | - | - | - | 975.000.000 | Mulai tahun 2019 |
| 11 | Perbaiki jalan aspal yang mengalami kerusakan di beberapa ruas jalan | Pengaspalan ulang di wilayah kampung Pilahan khususnya di jalan Retno Dumilah dan Jalan Nyi Ageng Nis | Dinas PUPKP | diusulkan di pemeliharaan jalan tahun 2018 | - | - | - | - |
| | | Jalan di samping lapangan tenis RW 10 Kelurahan Bausasran | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Sudah dilaksanakan di tahun 2016 |
| | | Perbaiki Jalan kampung Paleman RW 10 Rejowinangun | Dinas PUPKP | - | - | - | - | perlu cek lokasi |
| 12 | Pengadaan MCK di sepanjang Jalan Malioboro | | Dinas PUPKP | - | - | - | - | KEWENANGAN DIY |
| 13 | Pengadaan Water Torn dan mesin pompa air untuk ketersediaan air bersih | | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Kelengkapan MCK ada di Kecamatan |
| 14 | Pembangunan Pos Ronda | | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Bukan Tupoksi DPUPKP |
| 15 | Perbaiki Pasar Tradisional | | Dinas PUPKP | | | | | desentralisasi pemeliharaan |
| 16 | Perbaiki fisik beberapa kelurahan | | Dinas PUPKP | Pembangunan Kantor Kelurahan Panembahan, Wirobrajan, Keparakan | 8.000.000.000 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|--|-------------|--|------------|---|
| | | | | dan Gedongkiwo | | | | |
| | | | | Penyusunan DED Kantor Kelurahan Tahunan, Ngupasan, Patehan dan Brontokusuman | 200.000.000 | - | - | - |
| 17 | Mohon pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, tidak hanya dilakukan di bagian utara Kota Yogyakarta saja, tapi juga memperhatikan pinggiran kota yang berada di bagian selatan | | Dinas PUPKP | Diselaraskan dengan program ecodistrict untuk pengembangan wilayah selatan | - | Bekerjasama dengan Kementerian PU | - | - |
| 18 | Bantuan water drink | RTH RT 15 RW 05 Brontokusuman Mergangsan | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Tidak ada yang mengelola dan menggunakan karena di RTH |
| 19 | Belum adanya pembuatan gapura di gang Nakula, Arjuna, dan selatan Asri Medical Center | | Dinas PUPKP | - | - | - | - | Bukan Tupoksi DPUPKP |
| | | | Kecamatan Wirobrajan | - | - | - | 48.000.000 | Belum termasuk dalam usulan Musrenbang Kec.Wirobrajan |
| 20 | Dalam mengentaskan kemiskinan perlu ditopang dengan penataan kawasan kumuh | wilayah RW 08, RW 09, RW 11, RW 13 di Kelurahan Pandeyan | Dinas PUPKP | - | - | Pandeyan sudah menjadi sasaran penataan kawasan baik dari Satker maupun dari Ecodistrik (Rencana 2018) | - | - |
| 21 | Pembangunan fasilitas (pendopo) di fasum Jl. Bakung Baciro, Gondokusuman | | Dinas PUPKP | - | - | - | 40.000.000 | Penyusunan DED catatan Tanah harus milik pemerintah kota Yogyakarta |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------|--|---------------|---|-------------|---|
| 22 | Pembangunan kantor guru SD Lempuyangan I Danurejan | | Dinas PUPKP | - | - | - | 35.000.000 | Penyusunan DED |
| 23 | Pembuatan bronjong, batu dan anggaran pengerjaan | | Dinas PUPKP | Tidak diakomodir | - | - | - | - |
| 24 | Pengaspalan Jalan | | Dinas PUPKP | Tidak diakomodir | - | - | - | - |
| 25 | Penggantian alarm di Sungai Winongo karena sudah tidak berfungsi lagi | | BPBD | Pemeliharaan EWWS | 30.000.000 | - | - | - |
| 26 | Bantuan pengadaan alat penanggulangan bencana (gergaji mesin, dll) di setiap RW | | BPBD | Pengadaan Radio Komunikasi | 97.500.000 | peralatan radio komunikasi untuk 15 KTB | 750.000.000 | Peralatan (Genset, pompa air, gergaji mesin, peralatan rescue, dan motor roda 3) dan Pelatihan untuk 15 KTB |
| 27 | Rintisan Kampung Tanggah Bencana di Kampung Kepuh | | BPBD | Rintisan Kampung Tangguh Bencana | 600.000.000 | 15 kampung | - | - |
| 28 | Program Penghijauan ditingkatkan seperti penanaman pohon - pohon di jalan tabulapot | Tersebar se Kota Yogyakarta | DLH | Penanaman pohon perindang sebanyak 500 batang pohon. | 385.000.000 | - | - | - |
| 29 | Permohonan adanya aturan mengenai sampah - sampah berbahaya (sampah beracun dan bekas obat) agar tidak bertebaran di TPS - TPS di wilayah baciro | | DLH | Pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah B3 | 1.147.597.000 | - | - | - |
| 30 | Mohon bantuan modal untuk pengolahan limbah sampah agar menjadi bermanfaat | | DLH | Belum terakomodir untuk pengolahan limbah sampah | - | Terkait aturan hibah Bansos | - | - |
| 31 | Pemeliharaan dan penataan taman-taman | | DLH | Pemeliharaan taman kota | 1.577.818.000 | - | - | - |
| 32 | Usulan Program Kampung Hijau | | DLH | Pembinaan kampung Hijau dan evaluasi | 1.162.801.000 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|--|---------------|---|---------------|--|
| | | | | Kampung Hijau di 14 kecamatan | | | | |
| 33 | Usulan untuk membentuk Tim di setiap RT untuk mengatasi permasalahan sampah dan mendapat pelatihan dan juga penyuluhan | | DLH | - | - | - | - | Sebaiknya Tim berada di wilayah kecamatan atau kelurahan |
| 34 | Permohonan untuk dibuat aturan waktu pembuangan sampah, supaya sampah tidak menumpuk di jam-jam sibuk yang mengakibatkan bau tidak sedap dan membuat Jogja terlihat kotor | | DLH | Sudah dipasang papan informasi untuk waktu pembuangan sampah pada TPS atau transfer depo | - | - | - | - |
| 35 | Mohon bimbingan dan bantuan alat teknis untuk program bank sampah yang dikelola berbasis RW | | DLH | Pelatihan pemanfaatan sampah di 14 wilayah kecamatan | 2.318.397.320 | - | - | - |
| 36 | Bantuan tanaman buah dan sayur yang nantinya akan dikelola warga sekitar sebagai lahan hijau | | Dinas Pertanian & Pangan | - | - | - | 1.162.750.000 | Bantuan tanaman melekat pada kegiatan Kampung Agro. Dalam tahap penyusunan RAB |
| 37 | Adanya penindakan/sanksi terhadap juru parkir yang menarik tarif parkir di luar peraturan yang berlaku karena pada saat weekend atau pada saat hari libur nasional sering terjadi lonjakan tarif parkir | | DISHUB | Sudah diakomodir pada Kegiatan Operasional penyelenggaraan Perparkiran dan Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran | - | - | - | - |
| | | | | - Adanya pembinaan terhadap jukir | 42.075.000 | - | - | - |
| | | | | - Adanya penertiban parkir | 45.292.500 | - | - | - |
| | | | | - Adanya Pokja parkir | 87.450.000 | - | - | - |
| | | | | - Sosialisasi terhadap jukir | 59.200.000 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--|------------|---|------------------------------|---|
| | | | | - Himbauan dalam bentuk papan - papan tarif parkir yang dipasang di TJU dan TKP | 44.000.000 | - | - | - |
| 38 | Penertiban becak motor (bentor) yang mulai banyak di Kota Jogja | | DISHUB | Diakomodir pada kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan | 97.405.000 | Operasi yustisi yang dilaksanakan secara gabungan sudah masuk pada Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan | - | Mengingat kewenangan penegakan hukum ada di Kepolisian, maka pelaksanaan kegiatan ini dengan Operasi Gabungan. |
| 39 | Adanya kantong-kantong parkir tambahan di Kota Yogyakarta | | DISHUB | - | - | - | Belum ada dalam Renja Dishub | Perlu kordinasi dengan instansi terkait tentang penambahan kantong-kantong parkir di wiayah Kota Yogyakarta, menurut informasi dari Dishub Propinsi bahwa Propinsi merencanakan pembebasan lahan untuk menambah fasilitas / kantong parkir Dishub mendorong untuk munculnya kantong-kantong parkir milik swasta dengan |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--|-------------|---|---|---|
| | | | | | | | | mengeluarkan proses pemberian ijin pengelolaan perparkiran, yang nantinya nanti PAD bukan sebagai retribusi parkir tetapi menjadi Pajak Parkir yang dikelola oleh BPKAD |
| 40 | Pencegahan kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta | | DISHUB | Sudah diakomodir pada kegiatan Manajemen dan rekayasa lalu lintas | 502.260.000 | Kegiatan meliputi Survey normalisasi simpang, Manajemen dan rekayasa lalu lintas serta kegiatan forum komunikasi LLAJ | - | - |
| | | | | Sudah diakomodir pada Kegiatan kajian dan pengembangan lalu lintas | 560.720.000 | Kegiatan meliputi : kajian sarana transportasi berbasis non jalan, survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan kebutuhan parkir gedung pertemuan dan restoran, updating kinerja lalu lintas dan kajian andalalin yang terverifikasi | - | - |
| | | | | Diakomodir pada Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan | 58.575.000 | Pengendalian kelancaran lalu lintas | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|-------------|--|---|---|
| | | | | Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan | | | | |
| 41 | Adanya pembuatan zebra cross di beberapa ruas jalan yang membutuhkan | | DISHUB | - | - | - | - | belum ada di rancangan renja Dinhub |
| 42 | Penataan area parkir bis pariwisata supaya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya | | DISHUB | Diakomodir pada kegiatan Optimalisasi penyelenggaraan perparkiran | 209.600.000 | Dengan Pemeliharaan dan penambahan Sarpras TJU dan TKP | - | Mengoptimalkan penggunaan TKP-TKP milik Pemerintah |
| | | | | Manajemen jalur bus pariwisata merupakan bagian dari Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas | - | - | - | Misal pemasangan water barrier di lokasi sekitar Jl.KS Tubun untuk mengatur arus lalu lintas bus-bus pariwisata |
| 43 | Adanya antisipasi dari kemacetan menjelang libur panjang di Yogyakarta | | DISHUB | Ada di kegiatan Manajemen dan rekayasa lalu lintas | 502.260.000 | - | - | - |
| | | | | include pada kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan | 682.472.147 | - | - | - |
| | | | | - Pengaturan lalu lintas saat car free day | - | - | - | - |
| | | | | - Pengaturan lalu lintas saat hari libur, Lebaran, natal Tahun Baru | - | - | - | - |
| 44 | Pemasangan cermin cembung di beberapa ruas jalan untuk menghindari kecelakaan | | DISHUB | Sudah diakomodir pada kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 494.000.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--------|---|-------------|---|---------------|-----------------------|
| | | karena sering terjadi kecelakaan di jalan Sidat dan Gg. Lauhan RT 50 RW 13 | | | | | | |
| | | 3 cermin cembung untuk RW 7 Kel. Purbayan di Timur Pasar Kota Gede | | | | | | |
| | | Jl Wora Wari, Jl. Pacar, Baciro, Gondokusuman (Cermin tikungan ganda) | | | | | | |
| | | Jl. Mayang, Jl Anggrek, Baciro (Cermin tikungan | | | | | | |
| 45 | Bantuan kereta keranda untuk wilayah | | Dinsos | - | - | Sudah diberikan 1 setiap kelurahan tahun 2016, bila RW mengusulkan maka diharapkan lewat anggaran LPMK. Untuk Tahun 2018 adanya ialah bantuan santunan kematian dan pelayanan mobil jenazah | - | - |
| 46 | Pengadaan hidran di beberapa lokasi | | DinKar | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 195.375.000 | 1 lokasi | 1.200.000.000 | Ketersediaan anggaran |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|---|---------------|---|---|---|
| 47 | Pengadaan/Perluasan tanah untuk kebutuhan sarana pemakaman | | Dinas Petarung | tidak diakomodir | - | - | - | - |
| KOMISI D | | | | | | | | |
| 1 | Masyarakat masih banyak yang kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan yang semakin mahal, meskipun sudah dianggarkan, terutama biaya daftar | | Dinsos | Pada kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdapat sub kegiatan Advokasi dan Surat Rekomendasi bagi PMKS, salah satu jenis surat rekomendasi tersebut adalah rekomendasi keringanan biaya pendidikan | - | Termasuk dalam program Advokasi dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | - | - |
| 2 | Usulan agar dana Bansos dapat langsung diberikan kepada RT/RW tanpa melalui LPMK | | Dinsos | dana bansos telah dianggarkan dalam Renja 2018 | 2.640.450.000 | - | - | - |
| 3 | Mohon ketelitian dalam mensurvei masyarakat yang akan mendapat bantuan dari pemerintah seperti KMS dan KIP, karena masih banyak yang salah sasaran | | Dinsos | telah diakomodir dalam Renja 2018 dalam kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui sub kegiatan Pelatihan Bimbingan Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi PSM (Pendamping Sosial Masyarakat) | 707.060.100 | termasuk dalam program data informasi dan pemberdayaan sosial | - | - |
| 4 | Permohonan dibuatnya kampung peduli disabilitas sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap penyandang disabilitas | | Dinsos | Telah diakomodir dalam Renja 2018 pada kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 33.180.000 | Termasuk dalam program Advokasi dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--|----------------|--|---|---|
| | | | | (PMKS) melalui sub kegiatan Penumbuhan dan Pemantapan Kecamatan Inklusi | | Sosial (PMKS) | | |
| 5 | Permohonan bantuan dana bagi kaum rois yang sudah bekerja tanpa mengenal jam | | Dinsos | tidak diakomodir | - | bukan kewenangan Dinas Sosial | - | - |
| 6 | Permohonan bantuan sarana pendidikan untuk "PKBM Rangsang Imojoyo" (kelompok belajar masyarakat untuk menempu kerja paket A dan C) selama ini mengalami kesulitan karena terbentur persyaratan jumlah minimal peserta/siswa | | Kecamatan Wirobrajan | akan masuk renja 2018 diakomodir dalam sosialisasi PKBM Rangsang Imojoyo | 4.465.000 | - | - | - |
| 7 | Pemberian dana intensif bagi kader jentik-jentik | | Dinkes | - | - | Kementerian kesehatan sudah mencanangkan satu juru pemantau jentik untuk satu rumah, dan yang menjadi juru pemantau jentik di satu rumah adalah anggota keluarga rumah tersebut, jadi masing masing juru pemantau jentik harus bertanggung di rumah masing masing. | - | - |
| 8 | Perlu perbaikan pelayanan puskesmas dan infrastrukturnya perbaikan kualitas layanan, perbaikan kualitas SDM dan perbaikan kualitas obat | | Dinkes | - | 12.269.472.284 | Mutu pelayanan Kesehatan, selalu ditingkatkan antara lain dengan: Akreditasi Puskesmas (secara | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | <p>bertahap pada tahun 2015: 4 puskesmas, tahun 2016 : 9 puskesmas, tahun 2017 : 5 puskesmas. Pola pengelolaan keuangan secara BLUD (tahun 2012 : 4 puskesmas, tahun 2013 : 8 puskesmas, tahun 2014 : 18 puskesmas) sehingga Puskesmas bisa dengan fleksibel melakukan pemenuhan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan teknis maupun pelatihan pelayanan prima yang sudah dianggarkan melalui kegiatan upaya kesehatan perorangan maupun kegiatan upaya kesehatan masyarakat,</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|----------------|---|---|---|
| | | | | | | meskipun sudah BLUD untuk pemenuhan obat dan alat kesehatan Puskesmas masih mendapat dukungan penuh dari APBD yang dianggarkan melalui kegiatan Pengelolaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman tahun 2018. | | |
| 9 | Jaminan kesehatan sosial masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan terus terjadi, khususnya kelompok masyarakat miskin | | Dinkes | Sudah dianggarkan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin tahun dalam kegiatan pengelolaan penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan tahun 2018 | 20.441.078.010 | - | - | - |
| 10 | Prosedur pendaftaran dan penggunaan BPJS Kesehatan dan jangkauan pelayanan | | Dinkes | - | - | Saat ini Dinas kesehatan DIY sudah membuat kebijakan rujukan berjenjang bagi pelayanan kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota bersama kolegium Kedokteran untuk membuat | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | <p>pemetaan kompetensi RS berdasar SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) 2012. Kebijakan tersebut akan diujicobakan selama 6 bulan sejak bulan Maret 2017.</p> | | |
| 10 | <p>Keluhan belum sinkronnya data yang dimiliki oleh JKN, JKD, dan Jamkesda</p> | | Dinkes | - | - | <p>Kerja sama Jamkesda Kota dengan beberapa RS di luar Kota sudah kami lakukan diantaranya dengan RS Queen Latifa Sleman, RS Condong Catur Slemaan, RS KIA Sakina Idaman Sleman, RS UGM Sleman, RS Ghrasia Sleman, RS Sarjito Sleman, RS Respira Bantul, RS Patmasuri Bantul, RSKB Ring Road Selatan Bantul, dan RS Soeroyo Magelang. Kerja sama berdasar</p> | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | <p>spesifikasi RS dan kebutuhan akses pelayanan warga Kota Yogyakarta. Sampai saat ini kebutuhan tersebut kami anggap sudah cukup memenuhi dari sisi jumlah dan kemudahan akses. Untuk kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang sudah dan bisa dibiayai oleh PT Jasa Raharja, Jamkesda tidak bisa membiayai lagi. Hal ini dikarenakan mekanisme verifikasi penjaminan yang berbeda dengan mekanisme INA CBGs. Kesulitan yang lain adalah bila jumlah pasien yang mengakses RS luar kota tsb sangat sedikit, biasanya RS enggan bekerja sama. Jamkesda Kota masih membuka</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|----------------|---|---|---|
| | | | | | | kesempatan bila sekiranya ada RS luar kota yang ingin bekerja sama. | | |
| 11 | Perlu peningkatan pelayanan puskesmas pembantu | | Dinkes | Telah diakomodir dalam Renja 2018 dalam Program Pelayanan Kesehatan Dasar | 44.456.581.125 | Mutu pelayanan Kesehatan, selalu ditingkatkan antara lain dengan: Akreditasi Puskesmas (secara bertahap pada tahun 2015: 4 puskesmas, tahun 2016 : 9 puskesmas, tahun 2017 : 5 puskesmas. Pola pengelolaan keuangan secara BLUD (tahun 2012 : 4 puskesmas, tahun 2013 : 8 puskesmas, tahun 2014 : 18 puskesmas) sehingga Puskesmas bisa dengan fleksibel melakukan pemenuhan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|--|-------------|---|---|---|
| | | | | | | teknis maupun pelatihan pelayanan primayang sudah dianggarkan melalui kegiatan upaya kesehatan perorangan maupun kegiatan upaya kesehatan masyarakat, meskipun sudah BLUD untuk pemenuhan obat dan alat kesehatan Puskesmas masih mendapat dukungan penuh dari APBD yang dianggarkan melalui kegiatan Pengelolaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman tahun 2018. | | |
| 12 | Program Kampung Tanggap Bencana agar terus dilanjutkan | | BPBD | Rintisan Kampung Tangguh Bencana | 600.000.000 | 15 Kampung | - | - |
| 13 | Mohon pelatihan sembelih hewan Qurban | | Dinas Pertanian & Pangan | Difasilitasi pada output Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban kegiatan Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan | 68.715.500 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|----------------------------|---|---------------|---|---------------|--|
| | | | | dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan pangan | | | | |
| 14 | Permohonan penambahan anggaran dibidang pertanian di wilayah Kelurahan Rejowinangun khususnya kampung Pilahan karena ditetapkan sebagai Kampung Agro | Rejowinangun | Dinas Pertanian & Pangan | Belum ada di rancangan Dinas pertanian dan pangan | - | - | 1.083.950.000 | Tidak ada SDM yang mengelola |
| 15 | Permohonan agar Pemerintah Kota Yogyakarta bisa memberikan dana stimulant kembali pada paguyuban seni Kelurahan agar bisa memfasilitasi kegiatan seni di masyarakat | | Dinas Kebudayaan | Stimulan bagi group kesenian diberikan dalam bentuk kegiatan seperti gelar macapat, workshop, festival/lomba seni budaya, Pelestarian Tata Nilai Budaya, updating data seni budaya, festival adat tradisi, sesorah bahasa jawa, kampanye sadar budaya, dll yang terintegrasi dalam program Pelestarian dan Pengembangan seni Tradisi, Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahas serta Program Pelestarian warisan dan nilai budaya | 1.751.931.915 | Anggaran terdapat pada lima kegiatan, Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi, Pelestarian Tata Nilai Budaya, Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film, dan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi | - | Untuk pemberian Hibah/bansos diberikan dengan memperhatikan Permendagri No. 32 tahun 2011, permendagri Nomor 39 tahun 2012 dan permendagri nomor 14 tahun 2016 |
| 16 | Pendirian perpustakaan/taman bacaan masyarakat di tiap kampung untuk menumbuhkan budaya gemar membaca dilingkungan masyarakat dan anak-anak | | Dinas Arsip & Perpustakaan | Diakomodir dalam kegiatan Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan dengan bentuk bimtek untuk lembaga (Menjadi tupoksi Dinas Pendidikan) | 1.863.129.996 | anggaran merupakan anggaran satu kegiatan pengelolaan pendidikan masyarakat dan kesetaraan | - | - |
| 17 | Fasilitas penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan keliling belum | | Dinas Arsip & Perpustakaan | Frekuensi kunjungan Mobil keliling 220 kali, | 858.505.045 | Anggaran yang dimaksud adalah | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|---|---------------|---|---|---|
| | memadai | | | Frekuensi Kunjungan Mobil Internet Keliling 220 kali, Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling 220 kali | | anggaran satu kegiatan Pengelolaan Perpustakaan | | |
| 18 | Bidang pendidikan ada ketimpangan dalam pendidikan dan masih terjadi kasus anak yang sudah lulus ditahan ijazahnya | | Dindik | JPD masih menganggarkan bantuan pengambilan ijazah yang ditahan untuk SD, SMP Negeri dan Swasta | 150.000.000 | - | - | - |
| 19 | Fasilitasi beasiswa rutin untuk mahasiswa berprestasi non KMS | | Dindik | Tahun 2018 belum terfasilitasi karena Pendidikan Tinggi bukan Kewenangan Dindik Kota.Sedangkan Yang ber KMS dianggarkan | - | - | - | - |
| 20 | Bantuan pendidikan hanya bagi warga yang mendapatkan KMS menjadi keluhan | | Dindik | Kalau Non KMS akan kesulitan menentukan parameternya dan ada bantuan biaya pendidikan di akhir jenjang Pendidikan dengan rekomendasi Dinsos | 1.000.000.000 | - | - | - |
| 21 | Masyarakat masih banyak yang kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan yang semakin mahal, meskipun sudah dianggarkan, terutama biaya daftar | | Dindik | Mekanisme Penggunaan Dana JPD sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa sekolah | - | - | - | - |
| 22 | Untuk pendidikan PAUD sangat membutuhkan guru. Sejauh ini hanya ada pelatihan guru PAUD tetapi hanya untuk lulusan SLTA. Padahal banyak kader potensial tetapi latar belakang pendidikan mereka dibawah SLTA | | Dindik | Sudah ada Bimtek Pedagogik Pendidik PAUD | 13.000.000 | - | - | - |
| 23 | Tempat yang kurang memadai untuk pendidikan PAUD | TK N 3 Yogyakarta | Dindik | Sesuai permintaan TK N 3 Yogyakarta untuk bantuan TK | 40.000.000 | Belum dianggarkan | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|---|---|--|---|---|
| 24 | Permohonan bantuan pengelolaan PKBM Nastiti di Wilayah Bausasran yang bergerak untuk membantu anak-anak yang putus sekolah agar bisa mengikuti program Paket B maupun C | | Dindik | Pertanyaan kami : Kok ada permohonan tersebut sementara bulan April, Mei sudah di ikutkan UN 2017 | Dianggarkan lewat 1. Insentif Tutor 2. Panitia Ujian 3. Pengawas Ujian 4. Penyusun Soal | Ada jumlah minimal siswa dari setiap PKBM yang bisa diajukan lewat BOP | - | - |
| 25 | Pendirian perpustakaan/taman bacaan masyarakat di tiap kampung untuk menumbuhkan budaya gemar membaca dilingkungan masyarakat dan anak-anak | | Dindik | Pembinaan SDM Taman Bacaan Masyarakat | - | - | - | - |
| 26 | Fasilitas penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan keliling belum memadai | | Dindik | Pemberian Bantuan Sarana tidak bisa dilakukan | - | - | - | - |
| 27 | Mohon bantuan honor bagi guru PAUD/TPA Kadipaten Kulon RW 05 Kelurahan Kadipaten | | Dindik | Insentif guru TPA/SPS/KB sudah dianggarkan sekota dengan Syarat : Pendidik yang sudah mengikuti dan lulus Bimtek Pedagogik/ Diklat Dasar/ Diklat Lanjut | 1.310.700.000 | - | - | - |
| 28 | Mengoptimalkan teknologi pendidikan/komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan | | Dindik | - | - | Belum diakomodir | - | - |
| 29 | Meningkatkan pendidikan berbasis keterampilan (life skill) | | Dindik | - | - | Belum diakomodir | - | - |
| 30 | Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang ada supaya ditingkatkan kembali | | Dindik | - | - | Belum diakomodir | - | - |
| 31 | Permohonan agar Guru Tetap Yayasan (GTY) intensif APBD Kota Yogyakarta untuk sekolah swasta disamakan dengan sekolah negeri | | Dindik | | 11.133.830.000 | diakomodir dalam kegiatan Pengelolaan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|--|-------------|---|---|---|
| 32 | Menjadikan TKA dan TPA yang ada disetiap masjid menjadi bagian dari PNF (Pendidikan Non Formal) sehingga memungkinkan ustadnya mendapatkan insentif sebagai pengajar PNF | | Dindik | - | - | Belum diakomodir | - | - |
| 33 | Penggantian Alat Bermain Edukatif (APE) dibeberapa kampung yang sudah rusak | Kelurahan Ngampilan | Kecamatan Ngampilan | Tidak ada usulan penggantian yang ada anggaran Pelatihan pembuatan APE | 4.872.000 | - | - | - |
| 34 | Permohonan lanjutan program Kampung Ramah Anak | Kelurahan Prenggan | DPMP2A | telah diakomodir dalam Renja 2018 dalam program perlindungan anak di kegiatan pengarusutamaan hak anak | 615.000.000 | akan ada 10 kampung ramah anak di kota Yogyakarta | - | - |

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2019. Rencana program dan kegiatan tahun 2018 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2018. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2018 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Pertanian dan Pangan

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|----------------------------|---|--------|---|----------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 1,636,551,700 | 1,664,423,779 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Pertanian dan Pangan | | | Makan Minum Pegawai | 75 pegawai | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 199,950,000 | 203,399,850 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | | | | | Rapat Koordinasi | 45 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Tamu | 1000 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 92 kali | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Pertanian dan Pangan | | | Materai 6000 yang tersedia | 1.800 lembar | Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional | 100% | 1,166,721,700 | 1,186,555,969 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 1.200 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 Yang Terbayar | 8 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 3 Yang Terbayar | 6 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 Yang Terbayar | 29 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia | 25 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 56 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Cetak | 1 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 200.000 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 10 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Listrik | 2 lokasi | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Perbaikan peralatan kerja | 4 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia | 10 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia | 2 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Keamanan | 12 bulan | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Pertanian dan Pangan | | | Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun | 4 jenis | Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional | 100% | 269,880,000 | 274,467,960 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 14 dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga bantuan | 10 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 538,593,000 | 547,749,081 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Pertanian dan Pangan | | | Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin | 8 lokasi | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 240,780,000 | 244,873,260 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinas Pertanian dan Pangan | | | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional: kendaraan roda 4 | 8 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 297,813,000 | 302,875,821 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 3 | 6 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : kendaraan roda 2 | 29 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | | | | | | 6,000,000 | 6,102,000 | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|----------------------------|--|---------------------------|---|------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Ketuaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| 3.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | Dinas Pertanian dan Pangan | | | Frekwensi diklat formal yang diikuti | 2 kl | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 6,000,000 | 6,102,000 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 93,298,000 | 94,884,066 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinas Pertanian dan Pangan | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 93,298,000 | 94,884,066 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | 100% | | | | |
| 5 | Program Pembinaan Pertanian | Pertumbuhan Ekonomi | Pendapatan Masyarakat Meningkat | | Terwujudnya Pelayanan Pertanian | 100% | | | | | 729,096,670 | 741,491,313 | | |
| | | | | | Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Tani | 148 klp menjadi 153 klp | | | | | | | | |
| 5.1 | Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian | | | Kota Yogyakarta | | | Kebun yang terkelola dengan baik | 4 lokasi | | 5 jenis | 625,994,250 | 636,636,152 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | Kelompok tani /Gapoktan yang dibina | 153/45 poktan/gapoktan | | 4 keg | | | | |
| | | | | | | | Kontes tanaman hias | 1 kl | | 5 pemenang | | | | |
| | | | | | | | Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida | 4 kl | | 5 kec | | | | |
| | | | | | | | Dokumen data statistik pertanian | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | |
| 5.2 | Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian | | | Kota Yogyakarta | | | Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan | 12 bulan | Data mutu pangan tersedia | 1 dokumen | 103,102,420 | 104,855,161 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | Uji mutu bahan pangan | 250 sampel | Data deteksi bahan berbahaya pada bahan pangan segar tersedia | 1 dokumen | | | | |
| 6 | Program Pembinaan Ketahanan Pangan | Pertumbuhan Ekonomi | Pendapatan Masyarakat Meningkat | | Skor Pola Pangan Harapan | 85,2 | | | | | 1,002,605,895 | 1,019,650,195 | | |
| 6.1 | Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan | | | Kota Yogyakarta | | | Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) | 1 dokumen | Data SKPG tersusun | 1 dokumen | 810,999,715 | 824,786,710 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) | 1 dokumen | Kegiatan Ketahanan Pangan terinformasikan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan | 7 kali | Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pangan B2SA bertambah | 7 kali | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman) | 3 kali | Motivasi pelaku ketahanan pangan meningkat | 3 kali | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Lumbung Pangan Keluarga | 7 kali | | 7 kl | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Ketahanan Pangan | 3 jenis | | 14 kec | | | | |
| 6.2 | Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan | | | Kota Yogyakarta | | | Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan | 1 dokumen | Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan terlaksana | 1 kl | 191,606,180 | 194,863,485 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 dokumen | Data NBM tersusun | 1 dok | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Distribusi beras baru | 5 kali | Pangan di Kota Yogyakarta tersedia | 5 kali | | | | |
| 7 | Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan | Pertumbuhan Ekonomi | Pendapatan Masyarakat Meningkat | | Terwujudnya Pelayanan Kehewan dan Perikanan | 100% | | | | | 2,076,007,152 | 2,111,299,274 | | |
| | | | | | Peningkatan Unit Usaha Hasil Peternakan Yang ASUH | 163 unit menjadi 173 unit | | | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Unit Usaha Hasil Perikanan Yang Sehat dan Aman | 13 unit menjadi 14 unit | | | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Ternak | 15 klp menjadi 17 klp | | | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan | 11 klp menjadi 13 klp | | | | | | | | |
| 7.1 | Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan | | | Kota Yogyakarta | | | Pelayanan Poliklinik Hewan | 12 bulan | Pelayanan Poliklinik Hewan terlaksana | 59.191.000 rupiah | 1,316,214,462 | 1,338,590,108 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa | 100 persen | Penyakit Zoonosa di Kota Yk terkendali | 100 persen | | | | | |
| | | | | | | Balai Benih Ikan yang dikelola dengan baik | 2 lokasi | target pendapatan BBI tercapai dan Sub Raiser Ikan Hias dikelola | 74.320.000 rupiah | | | | | |
| | | | | | | Penguatan jejaring komunitas | 5 kl | Komunikasi dan relasi antar komunitas terjalin | 1 Kota Yk | | | | | |
| | | | | | | Dokumen Updating Data Peternakan | 1 dokumen | Data Peternakan tersedia | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | Dokumen Updating Data Perikanan | 1 dokumen | Data Perikanan tersedia | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | Restocking Ikan | 20.000 bibit | Restocking ikan terlaksana | 3 sungai | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan | 2 kelompok | Sumber Daya Kelompok Peternakan meningkat | 12 bulan | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan | 11 klp | Sumber Daya Kelompok Perikanan meningkat | 11 klp | | | | | |
| 7.2 | Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan | | | Kota Yogyakarta | | Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban | 415 TPH | Pengetahuan pemotongan hewan qurban meningkat | 415 TPH | 759,792,690 | 772,709,166 | sedang berjalan | Dinas Pertanian dan Pangan | |
| | | | | | | Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan | 7 kl | Pengetahuan tentang keamanan pangan meningkat | 7 kl | | | | | |
| | | | | | | Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan pangannya | 149 unit | Mutu dan keamanan pangan terkendali | 149 unit | | | | | |
| | | | | | | Pelayanan Rumah Potong Hewan | 12 bulan | Pelayanan Rumah Potong Hewan terlaksana | 12 bulan | | | | | |
| | | | | | | Uji Mutu Laboratoris | 2200 sampel | Uji Mutu Laboratoris terlaksana | 2200 sampel | | | | | |
| | | | | | | Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan | 9 kali | Frekuensi promosi, informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan meningkat | 9 kali | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 6,082,152,417 | 6,185,599,708 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|--------------------------------|--|----------------|---|--------|---|----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 1,017,382,190 | 1,017,382,190 | | |
| | | | | | | | Tersedianya makanan dan minuman untuk: | | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | |
| | | | | | | | rapat koordinasi | 79 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | tamu | 48 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Minum harian pegawai | 70 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | 124 kali | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec Umbulharjo | | | Perangko | 150 lbr | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 498,331,850 | 498,331,850 | sedang berjalan | DinKop | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 950 lbr | | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 2550 lbr | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengiriman / Paket | 175 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 6 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 23 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 18 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi Kebersihan Kantor | 12 bln | | | | | | | |
| | | | | | | | alat tulis kantor yang tersedia | 89 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | barang cetakan | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Penggandaan | 431.000 lbr | | | | | | | |
| | | | | | | | komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia | 53 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 2 bh | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia | 53 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Kebersihan | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Komputer | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Pengadaan Alat - Alat Studio | 2 unit | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec Umbulharjo | | | Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 185,770,340 | 185,770,340 | sedang berjalan | DinKop | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 53 dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga bantuan | 5 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | Pemeliharaan gedung kantor | 2 gedung | 544,357,000 | 544,357,000 | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec Umbulharjo | | | Pemeliharaan Griya UMKM | 1 paket | | | 251,325,000 | 251,325,000 | sedang berjalan | DinKop | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Gedung Dinas Kopukmnertrans | 1 paket | | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec Umbulharjo | | | kendaraan roda 4 | 6 unit | Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 29 unit | 293,032,000 | 293,032,000 | sedang berjalan | DinKop | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|--|-----------------|---|--------------|---|----------------------|----------------|--|----------------------|---------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec Umbulharjo | | | kendaraan roda 2 | 23 unit | | | 293,032,000 | 293,032,000 | sedang berjalan | DinKop | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 183,050,000 | 183,050,000 | | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec Umbulharjo | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | 183,050,000 | 183,050,000 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik) | 3 dokumen | | Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik) | 3 dokumen | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Kualitas Koperasi | Pertumbuhan Ekonomi | Pendapatan Masyarakat Meningkat | | Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT | 220 koperasi | | | | | 1,003,910,800 | 1,003,910,800 | | | |
| 4.1 | Pembinaan Kelembagaan Koperasi | | | Kota Yogyakarta | | | Bimbingan Kelembagaan Koperasi | 20 koperasi | | Peningkatan kelembagaan dan usaha koperasi | 20 koperasi | 401,512,000 | 401,512,000 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi | 10 kelompok | | Kepastian hukum bagi Kelompok Pra Koperasi | 10 kelompok | | | | |
| | | | | | | | Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan | 14 kelompok | | Peningkatan kelembagaan bagi Kelompok Pra Koperasi | 14 kelompok | | | | |
| | | | | | | | Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional | 25 koperasi | | Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Pengurus Koperasi Konvensional | 25 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah | 20 koperasi | | Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Pengurus Koperasi Syariah | 20 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional | 20 koperasi | | Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Pengawas Koperasi Konvensional | 20 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah | 20 koperasi | | Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Pengawas Koperasi Syariah | 20 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Perkoperasian di 7 Kecamatan | 20 koperasi | | Peningkatan pengetahuan perkoperasian bagi masyarakat | 20 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok | 20 koperasi | | Peningkatan tata kelola koperasi sesuai dengan ketentuan | 20 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke-71 | 20 orang | | Partisipasi pada peringatan Harkopnas ke-71 | 20 orang | | | | |
| | | | | | | | Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian | 15 SMP, 15 SMA, 5 PT | | | 15 SMP, 15 SMA, 5 PT | | | | |
| | | | | | | | Workshop /Sarasehan dalam Rangka Harkop ke-71 | 50 orang | | | 50 orang | | | | |
| | | | | | | | Monev Koperasi Syariah | 15 koperasi | | | 15 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Monev Koperasi yang belum RAT | 30 koperasi | | | 30 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Monev Kantor Cabang KSP/USP Koperasi | 20 koperasi | | | 20 koperasi | | | | |
| 4.2 | Pembinaan dan Pengembangan Koperasi | | | Kota Yogyakarta | | | Monitoring dan Evaluasi | 17 macam | | Tersedianya data perkembangan program-program pembiayaan dan bantuan perkuatan kepada koperasi, LKM/BUKP dan PKL | 17 macam | 602,398,800 | 602,398,800 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Penilaian Kesehatan Koperasi | 1 kegiatan | | Data koperasi sehat | 75 kegiatan | | | | |
| | | | | | | | Pengawasan Koperasi | 3 kegiatan | | Koperasi yang patuh terhadap perundang undangan yang berlaku | 330 koperasi | | | | |
| | | | | | | | Forum Pembina Koperasi | 1 kegiatan | | Sinergitas dan koordinasi antar forum pembina koperasi | 1 kegiatan | | | | |
| | | | | | | | Klinik Koperasi Sehat (KKS) | 2 kegiatan | | Tersedianya layanan berbasis online tentang perkoperasian yang memberikan kemudahan layanan pendampingan, konsultasi, informasi, sistem pelaporan dan rekomendasi.dengan instansi terkait. | 2 kegiatan | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP | 1 kali | | Meningkatnya pengetahuan dan kualitas kinerja dalam menjalankan organisasi BUKP | 1 kali | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|--------------------------------|---|-----------------|---|-------------|---|---------------|--|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keeluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Cooperative Fair | 1 kali | Sarana Promosi melalui Cooperative Fair | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | Gelar Produk Koperasi dan UKM | 2 kali | Sarana Promosi melalui Gelar Produk Koperasi dan UKM | 2 kali | | | | |
| | | | | | | | Jogja Expo | 1 kali | Sarana Promosi melalui Jogja Expo | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | Pemeringkatan Koperasi | 1 paket | Data Koperasi Berdasarkan Peringkat Lembaga dan Usahanya | 1 paket | | | | |
| | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 5 Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Pertumbuhan Ekonomi | Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun | | Jumlah Wirausaha Baru | 40 orang | | | | | 2,664,415,136 | 2,664,415,136 | | |
| | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Mikro | 60 orang | | | | | | | | |
| 5.1 | Kemitraan dan Pembiayaan UMK | | | Kota Yogyakarta | | | Terlaksananya : | | | | 1,200,315,121 | 1,200,315,121 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM) | 14 Kecamatan | Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Mikro (IUM) di Kecamatan | 14 Kecamatan | | | | |
| | | | | | | | Pameran dan Promosi Produk UMK | 6 kali | Meningkatnya Pemasaran UMK | 70 UMK | | | | |
| | | | | | | | Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak | 5 kali | Pemberitaan Mengenai UMKM di Media elektronik dan Media Cetak | 5 Pemberitaan | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK | 8 kali | Penambahan Wawasan Bagi Pelaku UMKM | 530 Pelaku UMKM | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Mekanisme Tentang UMK | 1 draft | Tersusunnya Mekanisme Tentang UMK | 1 draft | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Legalitas bagi UMK | 10 pelaku UMK | Meningkatnya Pengakuan Terhadap Produk UMK | 10 pelaku UMK | | | | |
| | | | | | | | Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi | 2 draft | Terjalinnnya Kemitraan dengan Hotel dan Perguruan Tinggi | 2 draft | | | | |
| 5.2 | Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK | | | Kota Yogyakarta | | | Penumbuhan Wirausaha Baru (HBC) | 2 kali | Bertambahnya Wirausaha Muda Baru | 80 UMK | 1,464,100,015 | 1,464,100,015 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda | 2 kali | Menambah wawasan pengurus dan member dekranasda | 185 UMK | | | | |
| | | | | | | | Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro | 1 kali | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Produk yang dihasilkan pelaku usaha | 300 UMK | | | | |
| | | | | | | | Promosi Produk UMK | 8 lokasi | Sarana Informasi dan Promosi Produk UMK | 8 lokasi | | | | |
| | | | | | | | Kajian Promosi Usaha Mikro | 1 kali | Adanya pasar baru untuk mempromosikan dan mengembangkan produk UMK di luar daerah | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Manajemen Pemasaran | 1 kali | Pelaku Usaha Mikro memahami dan mengetahui cara memasarkan produknya dengan baik dan benar | 30 UMK | | | | |
| | | | | | | | Updating Database UMK | 1 kali | Bertambahnya Update data base UMK | 4.000 UMK | | | | |
| | Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun | | Jumlah Tenaga Kerja Penganggur yang mengikuti Pelatihan | 6400 orang | | | | | 4,082,266,100 | 4,082,266,100 | | |
| | | | | | Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui AKAD, AKAL, AKAN dan transmigrasi serta Perluasan Kesempatan Kerja | 1000 orang | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Angkatan Pelatihan Kerja | 32 angkatan | | | | | | | | |
| 6.1 | Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja | | | Kota Yogyakarta | | | Pencari Kerja yang dilatih melalui: | | Dukungan terhadap peningkatan jumlah pencari kerja yang terlatih | 100% | 2,686,912,800 | 2,686,912,800 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Pelatihan MTU: | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Membuat (Kec. Gedongtengen) | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Membuat Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede) | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo) | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Institusional : | | | | | | | |
| | | | | | | | Satpam | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Stir Mobil dan SIM A | 140 orang | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|--|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keulauan Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| | | | | | | | Perhotelan | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Front Office | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Travel Agent | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pembuatan Kue Roti | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Tata Boga | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Tata Rias Kecantikan | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Tata Rias Pengantin | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Tata Rias Pengantin Paes Ageng | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Menjahit Dasar | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Menjahit Mahir | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Menjahit kebaya dan Surjan | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Spa Terapis | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan untuk Difabel | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Calon Peserta Pelatihan yang mendapat Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Peserta Bimtek Jumalistik bagi LPK | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi | 5 LPK | | | | | | |
| | | | | | | | LPK yang memperoleh penilaian Kinerja | 20 LPK | | | | | | |
| | | | | | | | LPK yang memperoleh pembinaan (2 kali) | 20 LPK | | | | | | |
| 6.2 | Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja | | | Kota Yogyakarta | | | Calon tenaga kerja terseleksi | 1200 orang | Dukungan terhadap pengurangan pengangguran di Kota Yogyakarta | 100% | 1,395,353,300 | 1,395,353,300 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN | 1000 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Job Canvasing | 7 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS | 4 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk | 7 angkatan | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan AKAN | 300 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Data penganggur Kota YK yang tersedia | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) | 50 perusahaan | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK | 22.000 orang/15BKK | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015 | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Bursa kerja (Job Fair) | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Data IPK KotaYk yang tersedia | 12 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA | 30 perusahaan | | | | | | |
| | | | | | | | Padat Karya Infrastruktur | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) | 1 dokumen | | | | | | |
| 6.3 | Penempatan Transmigrasi | | | Kota Yogyakarta | | | Calon Transmigran trampil Pra PDU pertanian | 12 KK | Peningkatan transmigran yang ditempatkan | 12 KK | 850,803,200 | 850,803,200 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan | 14 Kali | | | | | | |
| | | | | | | | Komunikasi transmigran ke Kab se DIY dan pusat | 6 Kali | | | | | | |
| | | | | | | | Calon transmigran yang terealisasi penempatannya | 12 KK | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|--------------------------------|---|-----------------|---|--------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Lokasi Penjajagan /checking/monitoring dan pengawalan transmigrasi dengan daerah penempatan | 12 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Seleksi calon transmigran yang siap berangkat | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Uang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia | 12 KK | | | | | | |
| | | | | | | | Calon transmigran Metode Sharing | 5 KK | | | | | | |
| 7 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun | | Upah Minimum Kota | 10% | | | | 1,038,127,100 | 1,038,127,100 | | | |
| | | | | | Menurunnya tingkat kerawanan di bidang ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja | 2% | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial | 1500 | | | | | | | | |
| 7.1 | Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan | | | Kota Yogyakarta | | | Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) | 1 laporan | Usulan Upah Minimum Kota | 100% | 397,975,500 | 397,975,500 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial | 24 perusahaan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja | 24 perusahaan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 | 24 perusahaan | | | | | | |
| | | | | | | | Pemantauan THR Keagamaan dan uang servis | 24 perusahaan | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Penetapan UMK 2019 | 200 perusahaan | | | | | | |
| 7.2 | Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja | | | Kota Yogyakarta | | | Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan. | 100 perusahaan | Dukungan terhadap kondisi usaha yang kondusif | 100% | 640,151,600 | 640,151,600 | sedang berjalan | DinKop |
| | | | | | | | Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial | 30 kasus | | | | | | |
| | | | | | | | Deteksi Dini Ketenagakerjaan | 24 perusahaan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB | 40 perusahaan | | | | | | |
| | | | | | | | Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah | 3 kesepakatan | | | | | | |
| | | | | | | | Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh. | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Temu Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY. | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Workshop Teknik Negosiasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain. | 11 dokumen | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 11,384,311,526 | 11,384,311,526 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Lingkungan Hidup

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|--------|--|--------|-------------------|--|--|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. | 100% | | | Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran lancar. | 100% | 2,324,097,256 | 2,236,025,734 | | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | DLH | | | | Makanan dan minuman untuk pegawai. | 321 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. | 100% | 403,992,000 | 388,682,748 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | | Makanan dan minuman untuk koordinasi. | 71 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. | 32 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | DLH | | | | Alat tulis kantor . | 64 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. | 100% | 855,476,000 | 823,057,790 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | | Alat listrik dan elektronik. | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Materai. | 400 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih. | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Bahan komputer. | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Peralatan rumah tangga. | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Pembayaran tagihan listrik dan telepon. | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar. | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa keamanan kantor. | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Pembayaran STNK Kendaraan Dinas dan Operasional | 130 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | Barang cetakan. | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Penggandaan surat-surat dan dokumen lainnya. | 30.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | | Pakaian kerja lapangan. | 10 set | | | | | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja. | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa kebersihan kantor dan Lab. | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Pemeliharaan komputer. | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Pengadaan perlengkapan kantor dan alat kerja. | 15 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Pengadaan kelengkapan komputer. | 7 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | DLH | | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun. | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. | 100% | 1,064,629,256 | 1,024,285,196 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola. | 283 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen arsip yang tertata. | 50 box | | | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen penatausahaan barang yang terkelola. | 7 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa tenaga bantuan (NABAN) | 41 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai. | 100% | | | | Sarana dan prasarana aparatur terpelihara dengan baik. | 100% | 2,298,220,000 | 2,211,129,095 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | DLH | | | | Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor DLH, laboratorium lingkungan dan kantor sektor. | 9 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. | 100% | 201,325,000 | 193,695,802 | sedang berjalan | DLH |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | DLH | | | | Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 2 | 22 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. | 100% | 2,096,895,000 | 2,017,433,293 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 3 | 41 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 4 | 15 unit | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung jawab | | | |
|---------|--|--------------------------------|---|---------|-------------------|--------|---|---------------------|----------------|--------|----------------|--|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 6 | 50 unit | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional alat berat | 3 unit | | | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | | | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. | 100% | | | | Kapasitas sumber daya aparatur meningkat. | 100% | 68,000,000 | 65,423,144 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | DLH | | | Diklat pegawai yang diikuti. | 7 jenis | | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. | 100% | 68,000,000 | 65,423,144 | sedang berjalan | DLH |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | | | Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. | 100% | | | | Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan meningkat. | 100% | 196,800,000 | 189,342,276 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | DLH | | | Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan. | 9 dokumen | | | | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu dan kualitas. | 100% | 196,800,000 | 189,342,276 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD. | 7 dokumen | | | | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. | B | | | | |
| 5 | Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan | Lingkungan Hidup | Kualitas Lingkungan Hidup meningkat. | | | | % usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan. | 67,07% | | | | | | 1,740,127,000 | 1,674,184,994 | | |
| | | | | | | | % usaha yang telah memiliki izin PPLH. | 8,92% | | | | | | | | | |
| 5.1 | Kajian Dampak Lingkungan | | | Kota Yk | | | Kajian lingkungan hidup yang tersusun. | 2 dokumen | | | | Pedoman dalam penataan lingkungan hidup tersedia. | 28% | 592,530,000 | 570,076,112 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan. | 855 dokumen | | | | Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan meningkat. | 12,92% | | | | |
| | | | | | | | Kebijakan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan. | 2 regulasi | | | | Peraturan dalam penataan lingkungan hidup tersedia. | 25% | | | | |
| 5.2 | Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 | | | Kota Yk | | | Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun. | 76 unit | | | | Permukaan air tanah terkendali. | 10-20 cm | 1,147,597,000 | 1,104,108,882 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan. | 25 izin | | | | Usaha yang memiliki izin PPLH meningkat. | 16,56% | | | | |
| | | | | | | | Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dipantau. | 40 usaha / kegiatan | | | | Potensi pencemaran dari kegiatan usaha terkendali. | 18,18% | | | | |
| 6 | Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Kualitas Lingkungan Hidup meningkat. | | | | Penghargaan lingkungan yang diterima. | 2 penghargaan | | | | | | 2,477,584,000 | 2,383,696,107 | | |
| | | | | | | | % sekolah yang telah berwawasan lingkungan. | 84,16% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | % perusahaan yang telah mentaati dokumen lingkungan. | 28,87% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | % layanan pengujian parameter kualitas air yang telah terakreditasi. | 15,56% | | | | | | | | | |
| 6.1 | Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup | | | Kota Yk | | | Sekolah/PP yang dibina menjadi sekolah/PP berwawasan lingkungan. | 17 sekolah/PP | | | | Sekolah berwawasan lingkungan meningkat. | 5,28% | 1,165,801,000 | 1,121,623,043 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Kelembagaan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai kampung hijau. | 14 kampung | | | | Kampung hijau di kota Yogyakarta meningkat. | 11,57% | | | | |
| | | | | | | | Informasi lingkungan hidup yang dipublikasikan. | 18 publikasi | | | | Cakupan publikasi lingkungan meningkat. | 10,59% | | | | |
| 6.2 | Penaatan dan Pemantauan Lingkungan | | | Kota Yk | | | Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara. | 5 dokumen | | | | Laporan kualitas udara tersedia. | 20,83% | 443,283,000 | 426,484,818 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air. | 3 dokumen | | | | Laporan kualitas air tersedia. | 20,00% | | | | |
| | | | | | | | Perusahaan telah memiliki izin lingkungan yang dipantau. | 115 usaha | | | | Perusahaan yang mentaati pengelolaan lingkungan meningkat. | 13,56% | | | | |
| 6.3 | Pengujian Kualitas Lingkungan | | | Kota Yk | | | Parameter kualitas air yang dapat dilayani pengujiannya. | 33 parameter | | | | Parameter kualitas air yang dapat terlayani meningkat. | 73,33% | 868,500,000 | 835,588,246 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Parameter kualitas udara yang dapat dilayani pengujiannya. | 11 parameter | | | | Parameter kualitas udara yang dapat terlayani meningkat. | 64,71% | | | | |
| | | | | | | | Parameter pengujian kualitas air yang telah terakreditasi pengujiannya. | 7 parameter | | | | Parameter kualitas air yang terakreditasi meningkat. | 53,85% | | | | |
| 7 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik | Lingkungan Hidup | Kualitas Lingkungan Hidup meningkat. | | | | IKM layanan pengelolaan RTH Publik. | 67,81 | | | | | | 7,596,283,654 | 7,308,422,952 | | |
| | | | | | | | % RTH Publik yang dikelola DLH dari seluruh RTH Publik. | 0,45% | | | | | | | | | |
| 7.1 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik | | | | | | RTH Publik yang dibangun. | 3 lokasi | | | | RTH Publik meningkat. | 4,65% | 1,709,034,850 | 1,644,271,079 | sedang berjalan | DLH |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|---|------------------|--------------------------------------|---------|---|-------------|--|----------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | RTH Publik yang kondisinya terpelihara. | 35 lokasi | RTH Publik yang kondisinya terpelihara meningkat. | 6,06% | | | | |
| | | | | | | | RTH Publik yang direnovasi dengan penambahan elemen taman. | 4 lokasi | RTH Publik yang dapat diakses oleh semua kelompok afirmatif gender meningkat | 12% | | | | |
| 7.2 | Pertamanan dan Perindang Jalan | | | Kota Yk | | | Taman kota yang kondisinya terpelihara. | 154 lokasi | Taman kota dalam kondisi terpelihara. | 100,00% | 5,887,248,804 | 5,664,151,873 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Taman kota yang direnovasi dengan penambahan elemen taman dekoratif. | 6 lokasi | Taman yang kondisinya terenovasi meningkat. | 20,00% | | | | |
| | | | | | | | Pot taman, pergola dan elemen taman yang kondisinya terpelihara. | 3.132 unit | Pot taman, pergola dan elemen taman terpelihara. | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | Pot taman, pergola dan elemen taman yang dipasang. | 80 unit | Pot taman, pergola dan elemen taman bertambah. | 2,46% | | | | |
| | | | | | | | Pohon perindang jalur hijau yang kondisinya terpelihara. | 19.182 pohon | Pohon perindang dalam kondisi terpelihara. | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | Pohon perindang jalur hijau yang ditanam. | 500 pohon | Pohon perindang jalan bertambah. | 2,45% | | | | |
| 8 | Program Pengelolaan Persampahan | Lingkungan Hidup | Kualitas Lingkungan Hidup meningkat. | | Sampah yang diolah/dimanta-atkan kembali. | 50 ton/hari | | | | | 18,340,236,060 | 17,645,233,943 | | |
| | | | | | Retribusi Kebersihan/ Persampahan meningkat 2% per tahun. | 3,38 M | | | | | | | | |
| | | | | | IKM layanan pengelolaan kebersihan dan persampahan. | 70,11 | | | | | | | | |
| 8.1 | Pengurangan Sampah | | | Kota Yk | | | Kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan pemanfaatan kembali sampah. | 448 kelompok | Pendaaurulangan sampah di masyarakat termasuk penyandang disabilitas masyarakat miskin dan perempuan | 1,15% | 2,315,697,320 | 2,227,944,112 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola. | 2 lokasi | Volume sampah yang didaurulang meningkat. | 11,11% | | | | |
| 8.2 | Penanganan Sampah | | | Kota Yk | | | Sarana/prasarana pengelolaan sampah yang telah menggunakan teknologi modern. | 12 unit | Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah meningkat. | 38% | 7,849,741,000 | 7,552,275,548 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Sarana prasarana TPS/Depo/Landasan container yang direnovasi. | 8 unit | Sarana prasarana TPS kondisi sesuai standar. | 19% | | | | |
| 8.3 | Pemungutan Retribusi Kebersihan | | | Kota Yk | | | Wajib Retribusi yang dipungut Retribusi Kebersihan/ Persampahan. | 51.153 WR | Retribusi kebersihan meningkat. | 1,28% | 1,653,081,040 | 1,590,437,636 | sedang berjalan | DLH |
| 8.4 | Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah | | | Kota Yk | | | Sampah yang diangkut dari TPS ke TPA. | 170,4 ton/hari | Seluruh sampah dari TPS terangkut ke TPA. | 100,00% | 6,521,716,700 | 6,274,576,647 | sedang berjalan | DLH |
| | | | | | | | Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari. | 66 penggal | Kebersihan jalan meningkat. | 13,79% | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 35,041,347,970 | 33,713,458,245 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|---------------------|---|--------|---|----------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Outcome : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 1,032,919,750 | 1,084,565,738 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Kominfo sandi | | | Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | 52 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 310,260,000 | 325,773,000 | sedang berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | Makan dan Minum Yang Tersedia | 115 kali | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Kominfo sandi | | | Materai 3000 yang tersedia | 340 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 582,759,050 | 611,897,003 | sedang berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 290 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi sewa mesin foto kopi | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya | 24 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya | 4 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 13 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi perbaikan peralatan kerja | 46 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 109 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 70.000 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Penjilidan | 230 buku | | | | | | | |
| | | | | | | | Percetakan | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 11 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia | 38 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang tersedia | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan taman | 1 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Kominfo sandi | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 139,900,700 | 146,895,735 | sedang berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 50 dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga bantuan | 3 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 288,892,400 | 303,337,020 | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Kominfo sandi | | | Pembuatan Kanopi parkir kendaraan | 1 paket | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 118,991,400 | 124,940,970 | sedang berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) | 4 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) | 24 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Outcome : Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 89,758,750 | 94,246,688 | | | |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Dinas Kominfo sandi | | | Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Renstra, renja, RKT, RKA DPA, Tapkin yang tersusun | 6 jenis | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran | 100% | 89,758,750 | 94,246,688 | sedang berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan Isik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai akuntabilitas kinerja OPD | B | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|--------------------------------|---|-----------------|---|--------|---|--------------------|---|---------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Dokumen SKM | 1 dokumen | Nilai SKM Diskominfo | B | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat | | Outcome : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | | | | | 100,000,000 | 105,000,000 | | |
| 4.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Kec. UH | | | Frekwensi Pendidikan dan Pelatihan formal | 15 orang | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100,000,000 | 105,000,000 | sedang berjalan | Sekretariat |
| 5 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat | | Persentase aplikasi yang terintegrasi | 30% | | | | | 12,239,237,700 | 12,851,199,585 | | |
| 5.1 | Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika | | | Kota Yogyakarta | | | E-Gov yang dikelola | 26 unit | Kelancaran akses data | 50 OPD | 1,614,110,000 | 1,694,815,500 | sedang berjalan | Seksi Perangkat Lunak |
| | | | | | | | Aplikasi Publik yang dikelola | 24 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi | 10 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan/Pengembangan/redisain aplikasi | 5 paket | | | | | | |
| 5.2 | Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika | | | Kota Yogyakarta | | | monitoring jaringan informasi | 12 kali | | | 10,379,330,300 | 10,898,296,815 | sedang berjalan | Seksi Perangkat Keras dan Infrastruktur telematika |
| | | | | | | | Perawatan dan Perbaikan perangkat keras dan jaringan TI | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | perawatan dan perbaikan server | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet | 45 kelurahan/bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan belanja modal komputer pendukung Aplikasi E-Gov | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | pengadaan CCTV | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | pengadaan hardware ruang riset teknologi | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan perangkat free hotspot | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa koneksi internet | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa koneksi internet layanan E-Gov, 200 Mbps | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | koneksi internet perpustakaan, 30 Mbps | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | koneksi internet DPRD, 20 Mbps | 112 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | koneksi internet pendidikan, 50 Mbps | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | koneksi internet sub domain, 50 Mbps | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | koneksi internet non SKPD | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | koneksi internet Pengelola TI | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Koneksi Intranet Luar Komplek Balaikota | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan licency pengamanan jaringan | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan layanan Virtual Server Privat (VPS) | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan Jaringan optik luar komplek Balaikota | 1 paket | | | | | | |
| 5.3 | Pengelolaan dan Pengembangan Smart City | | | Kota Yogyakarta | | | Perencanaan Infrastruktur Ruang Smart City Operation Center | 1 dokumen | Implementasi Smart City | 3 layanan | 245,797,400 | 258,087,270 | sedang berjalan | Seksi Pengembangan Smart City |
| | | | | | | | Implementasi dan sosialisasi aplikasi Smart City | 45 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Perangkat Lunak/aplikasi yang terintegrasikan | 2 aplikasi | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi Egovernment | 46 aplikasi | | | | | | |
| | | | | | | | Pelayanan Call Center | 1 dokumen | | | | | | |
| 6 | Program Pengelolaan Informasi dan Statistik | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Pengelolaan Informasi Melalui semua media dan statistik | 100% | | | | | 1,639,328,265 | 1,721,294,678 | | |
| 6.1 | Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi | | | Kota Yogyakarta | | | Pameran Sekaten | 1 kali | Terlaksananya deseminasi hasil pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta | 100% | 1,401,976,965 | 1,472,075,813 | sedang berjalan | Seksi Promosi, Publikasi dan Kemitraan Informasi |
| | | | | | | | Penerbitan Media Pemerintah | 8 kali | Deseminasi hasil pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dan best praktis masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan Website Jogjakota.go.id | 12 bulan | Deseminasi dan distribusi informasi melalui media baru internet | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | | |
|---------|--|--------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--------|--|-----------|----------------|---|---------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat | 12 bulan | | -Deseminasi dan distribusi informasi melalui media tatap muka | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Radio | 1514 kali | | TerlaksananyaDeseminasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Radio | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Televisi | 522 kali | | Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Televisi | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Luar Ruang | 365 kali | | Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Luar Ruang | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui PERTUNRA | 3 kali | | Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui PERTUNRA yang bisa disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki /perempuan dewasa maupun anak-anak | | | | | |
| | | | | | | | Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta | 6 dokumen | | tersusunnya dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta | | | | | |
| 6.2 | Pengelolaan Informasi dan Data Statistik | | | Kota Yogyakarta | | | Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2018 | 1 dokumen | | Tersedianya data penunjang Maten Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta | 100% | 237,351,300 | 249,218,865 | sedang berjalan | Seksi Statistik |
| | | | | | | | Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2018 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2018 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2017 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Analisis PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2017 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku ICOR Kota Yogyakarta Tahun 2017 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2017 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2016 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Statistik Perhotelan Kota Yk. Tahun 2016 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2016 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2016 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2016 | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Indeks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2016 | 1 dokumen | | | | | | | |
| 7 | Program Peningkatan Komunikasi Publik | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Komunikasi Publik | 100% | | | | | | 1,457,447,242 | 1,530,319,604 | | |
| 7.1 | Kehumasan dan Pelayanan Informasi | | | Kota Yogyakarta | | | Pengkajian Berita | 1 tahun | | | | 904,862,828 | 950,105,969 | sedang berjalan | Seksi Humas dan Pelayanan Informasi Publik |
| | | | | | | | Deseminasi Perda / Perwal | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Deseminasi LPPD Akhir Tahun 2017 | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi APBD Tahun 2018 | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2017 | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Kerjasama penulisan | 86 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Advetorial | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Ucapan Selamat | 17 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumpa Pers Wartawan | 55 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Peliputan Wartawan | 44 kali | | | | | | | |
| 7.2 | Pengelolaan Keluhan dan Aduan | | | Kota Yogyakarta | | | Pegelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) | 12 bulan | | Terkelolanya keluhan dan aduan masyarakat | 100% | 552,584,414 | 580,213,635 | sedang berjalan | Seksi Pengelola Keluhan dan Aduan |
| | | | | | | | Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | 12 bulan | | Terkelolanya permohonan informasi di PPID Kota Yogyakarta | | | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Perhubungan

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|--------|---|--------|---|----------------|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 1,989,245,109 | 2,029,030,012 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinhub | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 145 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 341,400,000 | 348,228,000 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 34 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinhub | | | ATK yang tersedia | 64 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 1,181,434,333 | 1,205,063,020 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 1500 bh | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 2400 bh | | | | | | |
| | | | | | | | Perangko yang tersedia | 4500 bh | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengiriman Paket | 5 kali | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Sky Lift yang terbayar | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 38 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 11 unit | | | | | | |
| | | | | | | | KIR yang terbayar | 5 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran Listrik, Telepon, dan Bantuan Komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan dan Bahan Kebersihan yang tersedia | 13 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi sampah TKP yang terbayar | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi repeater yang terbayar | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Taman | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Kerumahtanggaan | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan komputer/printer yang tersedia | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa Lokasi Repeater yang terbayar | 1 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Cetak foto | 2 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Percetakan | 45 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 306.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 54 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan-peralatan Rumah Tangga yang tersedia | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Buku perpustakaan yang tersedia | 15 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Harian | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 6 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinhub | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 466,410,776 | 475,738,992 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Dokumen administrasi barang berjalan lancar | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 81 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Informasi Website terkelola | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelolaan Arsip | 3 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 15 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan | | Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | | | | | 656,142,050 | 669,264,891 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinhub | | | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat | 2 lokasi | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 12 bulan | 301,875,000 | 307,912,500 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|---|--|-------------------|--|--------|--|------------|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinhub | | | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : | | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparat yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 354,267,050 | 361,352,391 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | roda 2 (dua) | 38 unit | | | | | | |
| | | | | | | | roda 4 (empat) | 11 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Sky Lift | 1 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan | | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | | | | | 54,000,000 | 55,080,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | Dinhub | | | Pengiriman pegawai mengikuti Diklat Teknis | 9 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 54,000,000 | 55,080,000 | Baru | Dinas Perhubungan |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 145,078,000 | 147,979,560 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinhub | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Renja Perubahan, KUAPPAS, KUPPA, Penetapan Kinerja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, RUP Murni, RUP Perubahan) | 11 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 145,078,000 | 147,979,560 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, Laporan Pencapaian Penetapan Kinerja, LPPD/LKPJ) | 3 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Indeks kepuasan masyarakat | | | | | |
| 5 | Program Pengelolaan Lalu Lintas | Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur | Ketimpangan Antar Wilayah Menurun | | Kinerja Lalu Lintas Jalan Kota (Visi Rasio) | 80% | | | | | 5,219,091,000 | 6,064,604,100 | | |
| 5.1 | Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas | | | sekota Yogyakarta | | | Dokumen Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan kebutuhan parkir bangunan perkantoran dan jasa keuangan | 1 dokumen | Peningkatan perencanaan manajemen lalu lintas | 100% | 599,435,000 | 611,423,700 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Dokumen Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan kebutuhan parkir gedung pertemuan dan restoran | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Updating Kinerja Lalu Lintas Tahun 2018 | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Kajian Andalalin yang terverifikasi | 1 laporan | | | | | | |
| 5.2 | Manajemen dan Rekayasa lalu lintas | | | | | | Dokumen Kajian Normalisasi Simpang | 1 dokumen | Peningkatan perencanaan manajemen lalu lintas jalan | 100% | 502,260,000 | 512,305,200 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Laporan Manajemen dan Rekayasa LL | 2 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Forum Komunikasi LLAJ | 1 dokumen | | | | | | |
| 5.3 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | sekota Yogyakarta | | | Cermin tikungan yang tersedia & terpasang | 200 unit | Peningkatan jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan bidang Perhubungan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan bidang Perhubungan | | 4,117,396,000 | 4,940,875,200 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Rambu Lalu Lintas yang tersedia dan terpasang | 100 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Papan Nama Jalan Antik yang tersedia dan terpasang | 10 unit | | | | | | |
| | | | | | | | RPPJ yang tersedia dan terpasang | 10 unit | | | | | | |
| | | | | | | | FO ATCS yang terpasang | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | APILL ATCS yang tersedia dan terpasang | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | APILL Tenaga Surya yang tersedia dan terpasang | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Rambu Lalu Lintas yang terpelihara | 100 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Marka Jalan yang terpelihara | 5000 m2 | | | | | | |
| | | | | | | | Marka Jalur Sepeda yang terpelihara | 500 m2 | | | | | | |
| | | | | | | | Marka Ruang Tunggu Sepeda yang terpelihara | 500 m2 | | | | | | |
| | | | | | | | Marka ZOSS yang terpelihara | 500 m2 | | | | | | |
| | | | | | | | APILL yang terpelihara | 50 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Papan Nama Jalan Antik Lingkungan yang tersedia dan terpasang | 30 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Baterai yang terbeli | 20 buah | | | | | | |
| 6 | Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan | | Persentase pemenuhan standart keselamatan bagi angkutan umum di dalam kota | 95% | | | | | 2,629,586,806 | 2,682,178,542 | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|---|-----------------------------------|-------------------|---|--------|---|---|--|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| 6.1 | Penyelenggaraan Angkutan | | | sekota Yogyakarta | | | Perijinan Angkutan yang diterbitkan | 1000 ijin dispensasi jalan, 30 rekomendasi | Optimalisasi perizinan angkutan dan Peningkatan Ketertiban kendaraan tidak bermotor | 100% | 473,140,000 | 482,602,800 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Dokumen Penyusunan Database Perusahaan Angkutan Umum, Agen Angkutan Umum, dan Pool Angkutan Umum di Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) yang mengikuti kampanye ketertiban tahap V | 600 KTB | | | | | | |
| | | | | | | | Plat KTB/TNKTB yang tersedia | 200 pasang | | | | | | |
| | | | | | | | SIOKTB yang tersedia | 200 set | | | | | | |
| | | | | | | | Reflektor KTB yang tersedia | 500 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Identitas Pengemudi KTB yang tersedia | 200 set | | | | | | |
| | | | | | | | Dukungan APEKSI | 3 jeni | | | | | | |
| 6.2 | Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor | | | sekota Yogyakarta | | | Perengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB yang direhab | 1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor | Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor | 100% | 1,059,414,659 | 1,080,602,952 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Stiker tanda samping yang tersedia | 18.200 set | | | | | | |
| | | | | | | | Buku uji berkala yang tersedia | 8.000 buku | | | | | | |
| | | | | | | | Tanda uji berkala yang tersedia | 35.300 set | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi pengujian kendaraan bermotor/PKB yang dipungut | Rp. 1.161.468.400 | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Keamanan PKB | 4 orang | | | | | | |
| 6.3 | Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas | | | sekota Yogyakarta | | | Pelajar dan masyarakat umum yang mengikuti bimbingan keselamatan lalu lintas | 420 orang | Peningkatan pengetahuan keselamatan transportasi untuk anak dan masyarakat baik laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas, kaum miskin | 100% | 414,560,000 | 422,851,200 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Alat peraga taman keselamatan LL yang dibangun | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Taman keselamatan LL yang terpelihara | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Operasional kegiatan taman keselamatan LL | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan angkutan jalan | 1 dokumen | | | | | | |
| 6.4 | Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan | | | sekota Yogyakarta | | | Patroli, pengendalian dan pengawasan penegakan perda bidang perhubungan | 240 kali | Peningkatan ketertiban dan keselamatan transportasi | 100% | 682,472,147 | 696,121,590 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Operasi bersama penegakan Perda bidang perhubungan | 44 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Piket di hari libur | 120 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pengaturan dan pengendalian angkutan dan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru, hari besar keagamaan dan Sekaten | 72 hari | | | | | | |
| 7 | Program Pengelolaan Perparkiran | Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur | Ketimpangan Antar Wilayah Menurun | | Kinerja Lalu Lintas Jalan Kota (Visi Rasio) | 80% | | | | | 7,870,598,500 | 8,028,010,470 | | |
| 7.1 | Operasional Penyelenggaraan Perparkiran | | | sekota Yogyakarta | | | Operasional penyelenggaraan perparkiran | 12 bulan | Peningkatan operasional penyelenggaraan perparkiran | 100% | 7,389,483,500 | 7,537,273,170 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Pengadaan karcis parkir dan tanda bukti setoran/penerimaan | 15 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan pakaian jukir | 900 bh | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi parkir yang dipungut | Rp. 7.398.000.000 | | | | | | |
| | | | | | | | Pengawasan perparkiran | 12 bulan | | | | | | |
| 7.2 | Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran | | | sekota Yogyakarta | | | Laporan koordinasi di bidang perparkiran | 1 dokumen | Peningkatan operasional penyelenggaraan perparkiran | 91% | 481,115,000 | 490,737,300 | sedang berjalan | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Laporan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran, | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Juru parkir yang terbina | 850 jukir | | | | | | |
| | | | | | | | Petugas parkir dan pedagang TKP yang terbina | 4 TKP | | | | | | |
| | | | | | | | Papan tarif parkir TJU yang tersedia | 20 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Papan tarif parkir TKP yang tersedia | 8 bh | | | | | | |
| | | | | | | | Papan tarif parkir yang diperbaiki | 200 buah | | | | | | |
| | | | | | | | TKP (Ngabean, Senopati, Sriwedani) yang diperlihara | 3 buah | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--|-------------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | TKP Limaran yang dipelihara | 1 buah | | | | | | | |
| | | | | | | Sarpras parkir IJU (marka, rambu, papan informasi) yang tersedia | 1 paket | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 18,563,741,465 | 19,676,147,575 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Pariwisata

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|------------------|---|--------|--|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas | | Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 509,985,499 | 535,484,774 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Pariwisata | | | makan minum harian karyawan | 28 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 92,770,000 | 97,408,500 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | makan minum tamu | 58 kali | | | | | | |
| | | | | | | | makan minum rapat | 100 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Langganan Telepon Dinas | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Langganan Telepon UPT | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Bantuan biaya komunikasi Kepala | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 16 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Pariwisata | | | Materai 6000 an yang tersedia | 100 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 316,058,157 | 331,861,065 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | Materai 3000 an yang tersedia | 400 buah | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya | 3 Unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya | 1 Unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya | 8 Unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Clearing Service | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | bahan kebersihan | 14 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor Dinas | 49 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor UPT Malioboro | 49 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Percetakan | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 134.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | pemeliharaan peralatan kantor | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | pemeliharaan peralatan kantor | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Komputer | 22 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan komputer | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan/Peralatan Kantor/Rumah tangga | 9 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Surat Kabar/majalah Dinas dan UPT | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | White board | 3 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Kursi kerja putar | 3 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Meja rapat | 2 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Kursi rapat | 15 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Kabinet besi laci 4 | 2 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Mesin fax | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jam dinding | 5 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Wireless microphone | 2 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Tiang microphone | 1 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Amplifier | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Laptop | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | LCD Projector | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Layar Proyektor | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Printer toner | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Sofa TIC | 1 unit | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--|---|---|--|-----------------|--|---|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Pariwisata | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 5 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 101,157,342 | 106,215,209 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola | 12 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Tenaga bantuan | 2 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 123,453,500 | 129,626,175 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Pariwisata | | | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor UPT malioboro | 1 paket | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 25,840,000 | 27,132,000 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas | 1 paket | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinas Pariwisata | | | Kendaraan Roda 4 , Kendaraan Roda 3 , Kendaraan Roda 2 | Roda 4 : 3 Unit , Roda 3 : 1 Unit , Roda 2 : 8 Unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 97,613,500 | 102,494,175 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 86,080,000 | 90,384,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Dinas Pariwisata | | | Tersusunnya Perencanaan Kerja dan Penganggaran OPD (Renstra, RENJA, PK, RKA, DPA) | 5 Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran | 100% | 86,080,000 | 90,384,000 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | Tersusunnya Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SKM, SPIP, Profil SKPD) | 5 Dokumen | Nilai akuntabilitas kinerja OPD | | | | | |
| 4 | Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata | Wisatawan, stakeholder pariwisata, objek daya tarik wisata | Jumlah kunjungan wisatawan | | Jumlah kunjungan wisatawan meningkat | 3.250.681 orang | | | | | 9,385,868,202 | 9,855,161,612 | | |
| 4.1 | Promosi dan Pemasaran Pariwisata | | | Kota Yogyakarta, Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri | | | Analisa pasar wisatawan | 2 kegiatan | Dukungan terhadap Promosi dan Pemasaran Pariwisata | 100% | 3,657,859,244 | 3,840,752,206 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | Penghitungan jumlah kunjungan wisatawan | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Teknologi Informasi pariwisata | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata | 4 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Promosi dalam dan luar negeri | 2 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelayanan informasi pariwisata | 3 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Event pariwisata unggulan | 1 kegiatan | | | | | | |
| 4.2 | Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata | | | Tersebar se kota Yogyakarta | | | Pengembangan ODTW unggulan | 2 kegiatan | Dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan ODTW | 100% | 974,699,900 | 1,023,434,895 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | Pengembangan ODTW unggulan | 3 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan sarana dan prasarana ODTW | 2 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan kampung wisata | 4 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Sadar wisata | 5 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring ODTW | 1 kegiatan | | | | | | |
| 4.3 | Pengelolaan Kawasan Malioboro | | | Kawasan Malioboro | | | Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro | 12 bulan | Dukungan terhadap Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro | 100% | 4,753,309,058 | 4,990,974,511 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | Pengawasan CCTV | 12 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo Mulyo), Jl.Malioboro dan TKP ABA | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyemprotan Jalan dan trotoar | 300 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Jaringan Listrik kawasan Malioboro | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan CCTV | 1 ruang kendali, 22 cctv | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Studio Radio dan jaringan bawah tanah | 1 studio dan jaringannya | | | | | | |
| | | | | | | | Pruning | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro | 12 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | TIC dan Layanan Pengaduan dan Perijinan | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Cetak blanko | 8 jenis cetak | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|------------|---|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 | 12 dokumen | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaku ekonomi kreatif, usaha jasa pariwisata, SDM pariwisata, atraksi pariwisata, wisatawan | Lama tinggal wisatawan | | Lama tinggal wisatawan meningkat | 2,35 hari | | | | | 2,757,824,040 | 2,895,715,242 | | |
| 5.1 | Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif | | | Tersebar se kota Yogyakarta | | | Gelar potensi ekonomi kreatif | 2 kali | Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif, usaha jasa pariwisata, dan SDM pariwisata | 100% | 786,081,000 | 825,385,050 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | Updating Jasa Usaha Pariwisata | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata | 40 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata | 2 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Survey Kepuasan Wisatawan | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Jogja Kreatif | 10 kali | | | | | | |
| 5.2 | Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata | | | Tersebar se kota Yogyakarta | | | Pentas Kangen Jogja | 10 kali | Dukungan Terhadap Pembinaan & Pengembangan Atraksi Wisata | 100% | 1,971,743,040 | 2,070,330,192 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | PMPS | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pentas Kawasan | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Event Khusus | 20 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pengiriman misi kesenian luar DIY | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pengiriman misi kesenian dalam DIY | 1 kali | | | | | | |
| 6 | Program Pengembangan Taman Pintar | Pengunjung Taman Pintar | Jumlah pengunjung Taman Pintar | | Pengunjung Taman Pintar meningkat | 820.000 orang | | | | | 14,500,000,000 | 14,650,000,000 | | |
| 6.1 | Operasional Layanan BLUD Taman Pintar | | | Taman Pintar | | | laksanakan layanan kepada pengunjung Taman Pintar | 12 bulan | Dukungan terhadap pengelolaan dan pengembangan Taman Pintar | 100% | 14,500,000,000 | 14,650,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pariwisata |
| Total | | | | | | | | | | | 27,363,211,241 | 28,156,371,803 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Kebudayaan

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|------------------|---|--------|--|----------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 655,595,888 | 531,606,409 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Kebudayaan | | | Makan dan Minum yang tersedia untuk | | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 33,30% | 188,420,000 | 108,724,195 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | a. Koordinasi | 100 kali | | | | | | |
| | | | | | | | b. Pegawai | 242 kali | | | | | | |
| | | | | | | | c. makan minum tamu | 58 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 38 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Kebudayaan | | | Materai 6000 an yang tersedia | 100 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 33,30% | 363,391,728 | 310,558,677 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | Materai 3000 an yang tersedia | 400 buah | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya | 5 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga teknis taman | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Retribusi sampah | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Kebersihan Kantor | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 16 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor Yang tersedia | 60 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Peggandaan / FC | 100.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia | 13 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Komputer yang tersedia | 22 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Rumah tangga yang tersedia | 9 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Keamanan Kantor | 1 paket | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Kebudayaan | | | - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 33,30% | 103,784,160 | 112,323,537 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | - Dokumen Admisitrasi Kepegawaian yang terkelola | 12 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | - Jasa pengelola arsip | 4 orang | | | | | | |
| | | | | | | | - Jasa Tenaga Bantuan | 2 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadal | 100% | | | | | 100,895,146 | 105,844,704 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Kebudayaan | | | - Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat | 1 unit | | | 31,595,446 | 32,574,009 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | - Bahan baku bangunan | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | - Bahan / Bibit Tanaman | 2 jenis | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinas Kebudayaan | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional | | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 50% | 69,299,700 | 73,270,695 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|--------|---|-----------|--|--------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | - Roda 4 | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Roda 3 | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Roda 2 | 5 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 74,067,600 | 76,306,145 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinas Kebudayaan | | | Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran | 5 dokumen | Tersedianya dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran | 100% | 74,067,600 | 76,306,145 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | Laporan Kinerja OPD | 6 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | BB | | | | |
| 4 | Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya | Sosial Budaya | Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat | | Jumlah Pelestarian Warisan dan nilai Budaya yang tersosialisasikan di masyarakat | 43% | | | | | 833,144,705 | 945,234,550 | | |
| 4.1 | Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi | | | Kota Yk | | | 1. Frekuensi Updating Data Kebudayaan | 1 kali | Dukungan Terhadap Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya | 33,30% | 197,225,000 | 299,791,195 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | 2. Dokumen Kajian Budaya | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Frekuensi Kemitraan kebudayaan | 1 kali | | | | | | |
| 4.2 | Pelestarian Tata Nilai Budaya | | | Kota Yk | | | 1. Laporan pelestarian tata nilai budaya | 4 laporan | Dukungan Terhadap Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya | 33,30% | 260,731,705 | 258,842,160 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | 2. Dokumen potensi tata nilai Budaya | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.3 | Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman | | | Kota Yk | | | 1. Laporan pelayanan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan | 1 laporan | Dukungan Terhadap Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya | 33,30% | 375,188,000 | 386,601,195 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | 2. Jumlah penghargaan Pelestari Bangunan Heritage | 10 orang | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Laporan Pelestarian Permuseuman | 1 laporan | | | | | | |
| 5 | Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa | Sosial Budaya | Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat | | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Sejarah yang tersosialisasikan di masyarakat | 18% | | | | | 499,823,450 | 507,755,890 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Pelestarian dan Pengembangan Sejarah | | | Kota Yk | | | 1. Frekuensi Inventarisasi Data Kesejarahan | 1 kali | Dukungan Terhadap Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah , Bahasa dan Sastra | 50% | 181,100,500 | 185,066,695 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | 2. Dokumen Kajian Sejarah | 1 dokumen | | | | | | |
| 5.2 | Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra | | | Kota Yk | | | 1. Laporan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra | 5 laporan | Dukungan Terhadap Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah , Bahasa dan Sastra | 50% | 318,722,950 | 322,689,195 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| 6 | Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi | Sosial Budaya | Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat | | Persentase Pelestarian Pengembangan Seni dan Tradisi | 13% | | | | | 1,096,045,714 | 917,785,340 | | |
| 6.1 | Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film | | | Kota Yk | | | 1. Laporan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film | 3 laporan | Dukungan terhadap Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi | 50% | 675,657,914 | 477,574,145 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | 2. Jumlah Film Dokumenter | 1 film | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Data Tempat dan Sarana Kesenian | 1 dokumen | | | | | | |
| 6.2 | Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi | | | Kota Yk | | | 1. Laporan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi | 2 laporan | Dukungan terhadap Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi | 50% | 420,387,800 | 440,211,195 | sedang berjalan | Dinas Kebudayaan |
| | | | | | | | 2. Frekuensi Kampanye Sadar Budaya | 8 kali | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 3,259,572,503 | 3,084,533,038 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|--------|---|--------|--|-------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 2,447,704,398 | 2,570,089,618 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | UH | | | Penyediaan makanan dan minuman pegawai | 95 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 706,607,500 | 741,937,875 | sedang berjalan | Dinzin |
| | | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman rapat | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman tamu | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 44 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | UH | | | Materai | 450 buah | dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 1,198,117,650 | 1,258,023,533 | sedang berjalan | dinzin |
| | | | | | | | Perangko | 7000 buah | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 15 unit | | | | | | |
| | | | | | | | bahan dan peralatan kebersihan | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | alat tulis kantor yang tersedia | 75 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | jasa percetakan | 16 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | jasa penggandaan | 90.000 lbr | | | | | | |
| | | | | | | | komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 19 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 4 eksemplar | | | | | | |
| | | | | | | | jasa perbaikan peralatan kerja | 9 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 34 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | peralatan rumah tangga yang tersedia | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | penyediaan pakaian dinas harian | 95 stel | | | | | | |
| | | | | | | | peralatan kantor dan perlengkapan kantor | 10 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | UH | | | dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun | 4 jenis | | | 542,979,248 | 570,128,210 | sedang berjalan | dinzin |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 64 dok ASN | | | | | | |
| | | | | | | | jasa tenaga bantuan | 20 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 464,193,000 | 487,402,650 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | UH | | | jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor dinas PMP | 7 jenis | dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 335,075,000 | 351,828,750 | sedang berjalan | dinzin |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | UH | | | pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 129,118,000 | 135,573,900 | sedang berjalan | dinzin |
| | | | | | | | kendaraan roda 4 | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | kendaraan roda 2 | 15 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 87,119,000 | 91,474,950 | | |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | UH | | | - dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (renstra, reiew renstra, Renja, PK, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun) | 6 dokumen | dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 87,119,000 | 91,474,950 | sedang berjalan | dinzin |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|--------------------------------|--|--------|--|---|---|-----------------|---|-------------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | - laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun) | 6 jenis laporan | | | | | | | |
| 4 | Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | penerbitan izin sesuai standar pelayanan perizinan | | Penerbitan izin sesuai standar pelayanan perizinan | 100% | | | 3,016,083,380 | 3,166,887,549 | | | | |
| 4.1 | Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan | | | UH | | | 1. pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan | 400 izin | 1. meningkatnya kegiatan membangun bangunan gedung dan kegiatan berusaha yang memiliki izin melalui Dinas PMP | 2.798 izin | 692,753,380 | 727,391,049 sedang berjalan | dinzin | |
| | | | | | | | 2. penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di DinPMP | 2798 izin | 2. meningkatnya kepastian hukum di bidang pembangunan gedung dan usaha di Kota Yogyakarta | 2.798 izin | | | | |
| | | | | | | | 3. analisa gambar situasi di Dinas PMP | 900 GS | 3. selesainya gambar situasi IMB di Dinas PMP | 900 GS | | | | |
| | | | | | | | 4. analisa struktur bangunan gedung | 129 IMB | 4. perhitungan struktur bangunan gedung sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI) | 129 IMB | | | | |
| | | | | | | | 5. pengolahan berkas permohonan IMB | 1.300 berkas | 5. meningkatnya kepastian berkas yang terkendali | 1.300 berkas | | | | |
| | | | | | | | 6. klinik pelayanan perizinan | 129 berkas | 6. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang | 129 berkas | | | | |
| | | | | | | | 7. koordinasi pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun | 10 dok | 7. terselesaikannya dokumen gambar dan uraian pertelaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 10 dok | | | | |
| | | | | | | | 8. koordinasi pencermatan dan penelitian dokumen pertelaan | 10 dok | 8. selesainya dokumen gambar dan pertelaan sesuai persyaratan teknis dan administrasi | 10 dok | | | | |
| 4.2 | Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan | | | UH | | | 1. pelayanan pemohon izin | 8000 pemohon | izin terbit tahun 2018 termasuk pelayanan blangko huruf braille dan loket khusus penyandang disabilitas | 8000 izin | 2,087,565,000 | 2,191,943,250 sedang berjalan | dinzin | |
| | | | | | | | 2. Pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin | 8000 berkas | | | | | | |
| | | | | | | | 3. pelaksanaan Pencermatan Permohonan Advice Planing | 500 berkas | | | | | | |
| | | | | | | | 4. laporan hasil pengendalian administrasi perizinan | 12 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | 5. pelaksanaan pencermatan permohonan SKKTR | 200 berkas | | | | | | |
| | | | | | | | 6. pelaksanaan koordinasi izin PM | 50 izin | | | | | | |
| 4.3 | Pelaksanaan Penerbitan Perizinan | | | UH | | | 1. pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin | 8000 pemohon | izin terbit tahun 2018 | 8000 izin | 235,765,000 | 247,553,250 sedang berjalan | dinzin | |
| | | | | | | | 2. laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian pasca penerbitan izin | 12 kali laporan | | | | | | |
| | | | | | | | 3. penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak | 8 kel izin | | | | | | |
| | Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | kesesuaian pelaksanaan izin dengan izin yang diterbitkan | 60% | | | | | 517,366,000 | 543,234,300 | | |
| 5.1 | Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta | | | UH | | | 1. pelaksanaan pengawasan izin yang diterbitkan Dinas PM dan Perizinan | 1500 izin | 1. terlaksananya pengawasan izin yang diterbitkan di Kota Yogyakarta | 1500 Berita Acara | 316,909,000 | 332,754,450 sedang berjalan | dinzin | |
| | | | | | | | 2. Analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin | 1 dokumen | 2. tersusunnya dokumen hasil analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin | 1 dok | | | | |
| | | | | | | | 3. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kota Yogyakarta | 1 dokumen | 3. tersusunnya laporan hasil evaluasi pelaksanaan perizinan di kota yogyakarta | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | 4. Proses permohonan sertifikat laik fungsi (SLF) | 50 permohonan | 4. terlaksananya proses pencermatan permohonan SLF | 50 dok | | | | |
| 5.2 | Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta | | | UH | | | 1. pelayanan pengaduan perizinan | 60 pengaduan | 1. terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat | 60 pengaduan | 200,457,000 | 210,479,850 sedang berjalan | dinzin | |
| | | | | | | | 2. analisa permasalahan pengaduan perizinan | 1 dokumen | 2. tersusunnya dokumen hasil analisa permasalahan pengaduan perizinan | 1 dok | | | | |
| | | | | | | | 3. pengecekan lokasi pengaduan | 30 pengaduan | 3. terlaksananya pengecekan lokasi pengaduan perizinan | 30 pengaduan | | | | |
| | | | | | | | 4. evaluasi permasalahan perizinan | 1 dokumen | 4. tersusunnya laporan hasil evaluasi permasalahan perizinan | 1 dokumen | | | | |
| 6 | Program Pengembangan Penanaman Modal | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | investasi meningkat | 10% | | | | | 1,101,435,000 | 1,156,506,750 | | |
| 6.1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan | | | UH | | | - pemeliharaan aplikasi SIM PM dan Perizinan, SPIPISE, SIPO, Simjaki | 4 aplikasi SIM | - tersedianya aplikasi SIM PM dan Perizinan, SPIPISE, SIPO, Simjaki | 4 aplikasi SIM | 597,220,000 | 627,081,000 sedang berjalan | dinzin | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|--|-----------|---|--------|--|---|--|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | - pemeliharaan sub domain Dinas PM dan Perizinan | 1 sub domain | - sub domain Dinas PM dan Perizinan | 1 sub domain | | | | | |
| | | | | | | - pengembangan SIM aplikasi penanaman modal dan perizinan | 1 unit | - tersedianya SIM di bidang Perizinan | 1 unit | | | | | |
| | | | | | | - penyediaan hardware | 2 macam | - tersedianya hardware | 2 macam | | | | | |
| | | | | | | a. printer dot matrik | 4 unit | - tersedia berkas arsip dalam pelayanan data | 92.400 berkas | | | | | |
| | | | | | | b. monitor | 10 unit | - tersedianya alih media (scan & entri) gambar pada berkas IMB | 19.482 | | | | | |
| | | | | | | - berkas arsip perizinan terkelola dengan baik | 31 jenis izin | - tersusunnya arsip in aktif | 7.500 berkas | | | | | |
| | | | | | | - alih media (scan & entri) dokumen gambar pada berkas IMB | 19.482 lembar | - terlayannya duplikat dan legalisir izin | 220 pemohon | | | | | |
| | | | | | | - penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur | 7500 berkas | | | | | | | |
| | | | | | | - duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur | 220 pemohon | | | | | | | |
| 6.2 | Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | | | UH | | identifikasi potensi PM | 1 dok | teridentifikasinya potensi PM | 1 dok | 291,280,000 | 305,844,000 | sedang berjalan | dizin | |
| | | | | | | penyusunan bahan promosi investasi | 1 jenis | tersusunnya bahan promosi investasi | 1 jenis | | | | | |
| | | | | | | pelayanan informasi PM | 1 dok | terlaksananya pelayanan informasi PM | 1 dok | | | | | |
| | | | | | | updating materi isi sub domain investasi.jogjakota.go.id | 18 update | sub domain investasi.jogjakota.go.id terupdate | 18 update | | | | | |
| 6.3 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM | | | UH | | pemantauan pelaksanaan penanaman modal | 1 dok | tersedianya data perkembangan investasi | 1 dok | 212,935,000 | 223,581,750 | sedang berjalan | dizin | |
| | | | | | | pembinaan pelaksanaan PM | 1 dok | terfasilitasinya permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal | 1 dok | | | | | |
| | | | | | | monev kegiatan PM | 1 dok | terkumpulnya LKPM | 1 dok | | | | | |
| | Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan | | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan | | ketersediaan Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan | | 100% | | | 800,346,000 | 840,363,300 | | | |
| 7.1 | Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan | | | UH | | 1. kajian peraturan dibidang pelayanan PM dan perizinan | 3 dokumen kajian | kepastian hukum dalam bidang PM dan perizinan | 100% | 318,182,000 | 334,091,100 | sedang berjalan | dizin | |
| | | | | | | 2. draft rancangan peraturan daerah/peraturan walikota/keputusan kepala dinas | 4 dok draft peraturan perizinan | | | | | | | |
| | | | | | | 3. sosialisasi peraturan perizinan melalui: | | | | | | | | |
| | | | | | | -dialog interaktif melalui radio | 3 x siaran | | | | | | | |
| | | | | | | -sosialisasi/dialog tatap muka | 2x pertemuan | | | | | | | |
| | | | | | | -penyederhanaan perizinan IMB dan izin gangguan | proses izin lebih sederhana | | | | | | | |
| | | | | | | -penyelenggaraan izin IMB dan HO di Kec. Sesuai dengan ketentuan | proses izin IMB dan HO sesuai dengan SPP dan SOP | | | | | | | |
| 7.2 | Pengukuran Kinerja Pelayanan | | | UH | | 1. Pengukuran kinerja melalui: | | Peningkatan kinerja pelayanan PM dan perizinan | 81,26 (skor) | 482,164,000 | 506,272,200 | sedang berjalan | dizin | |
| | | | | | | -Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 6000 resp | | | | | | | |
| | | | | | | -pelaksanaan IHT | 6 kali | | | | | | | |
| | | | | | | -pelaksanaan evaluasi pelayanan PM dan Perizinan | 12 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | 2. Pemantapan pelebmbagaan ISO pada DinPMP Kota Yogyakarta | 1 dok | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 8,434,246,778 | 8,855,959,117 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Pemuda dan Olah Raga

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|---------|--|--------|---|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 441,045,725 | 570,000,000 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dispora | | | makan dan minum yang tersedia untuk | | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional | 100% | 131,828,000 | 150,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | | a. Koordinasi | 30 kali | | | | | | |
| | | | | | | | b. Pegawai | 22 orang | | | | | | |
| | | | | | | | c. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke laur daerah | 15 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dispora | | | Materi 6000 yang tersedia | 75 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional | 100% | 204,517,365 | 350,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | | Materi 3000 yang tersedia | 250 buah | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 6 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 19 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor tersedia | 69 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 30 bendel | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengandaan | 125,000 lb | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran pembayaran telepon dan bantuan komunikasi tersedia | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia | 12 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar nasional tersedia, bahan bacaan lokal tersedia | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 5 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bahan komputer tersedia | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 12 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 22 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 20 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dispora | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 104,700,360 | 70,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 35 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelola arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga bantu | 2 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 95,320,000 | 110,000,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dispora | | | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat | 1 jenis | dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana apaaratur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 39,940,000 | 50,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dispora | | | Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opers | | dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana apaaratur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 55,380,000 | 60,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | | | | | a. Roda 4 (empat) | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | b. Roda 2 (dua) | 6 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur | 100% | | | | | 6,000,000 | 10,000,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Dispora | | | Fekkuensi diklat formal yang diikuti | 1 kali | Meningkatnya kapasitas sumberdaya Aparatur | 100% | 6,000,000 | 10,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|---------|---|------------|--|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | 15,125,000 | 30,000,000 | | | |
| 4.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Dispora | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 15,125,000 | 30,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga | | |
| 5 | Program Pengembangan Kepemudaan | pemuda dalam berorganisasi | Keaktifan pemuda dalam berorganisasi meningkat | | Terwujudnya lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif | 86% | | | 2,346,700,164 | 3,043,589,500 | | | | |
| 5.1 | Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan | | | Dispora | Pemilihan Pemuda Pelopor | 1 dokumen | terpilihnya Pemuda Pelopor | 100% | 2,133,690,664 | 2,372,500,000 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | | frekuensi Pelatihan Kepemimpinan pemuda | 3 kali | Jiwa kepemimpinan Pemuda terlatih | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah peserta Kemah bakti Pemuda Nusantara | 1 kali | terselenggarakannya Kemah bakti Pemuda Nusantara | | | | | | | |
| | | | | | Frekuensi Pemuda Jogja mencari Bakat | 1 kali | terpilihnya Pemuda Jogja berbakat | | | | | | | |
| | | | | | Frekuensi Gebyar Sumpah Pemuda | 1 kali | Terselenggarakannya Gebyar Sumpah Pemuda | | | | | | | |
| | | | | | Laporan seleksi, pendidikan, pelaksanaan, dan pembinaan Paskibraka | 1 laporan | terselenggaranya seleksi, pendidikan, pelaksanaan, dan pembinaan Paskibraka | | | | | | | |
| | | | | | Frekuensi sosialisasi pembentukan karakter Pemuda anti NAPZA | 3 kali | tersosialisasi pembentukan karakter Pemuda anti NAPZA | | | | | | | |
| | | | | | frekuensi Road show anti NAPZA | 5 kali | Terselenggaranya Road show anti NAPZA | | | | | | | |
| | | | | | Fekuensi Pembinaan Kepemudaan | 3 kali | Terlaksananya pembinaan kepemudaan | | | | | | | |
| 5.2 | Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan | | | Dispora | Pemuda Cinta Damai Lintas Agama | 2 kali | terlaksananya kegiatan Pemuda Cinta Damai | 100% | 213,009,500 | 671,089,500 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | | Seminar Program Pemerintah | 2 kali | terinfentarisir Program Pemerintah | | | | | | | |
| | | | | | Diskusi Kelembagaan antar OKP | 2 kali | terlaksannya diskusi Kelembagaan antar OKP | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kelembagaan OKP | 2 kali | terfasilitasinya Kelembagaan OKP | | | | | | | |
| | | | | | Pelatihan Manajemen bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan | 2 kali | terselenggarakannya pelatihan Manajemen bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan | | | | | | | |
| | | | | | Pendataan Potensi Kepemudaan | 1 kali | terdatanya Potensi Kepemudaan | | | | | | | |
| 6 | Program Pengembangan Olahraga | olahraga masyarakat | Minat olahraga masyarakat meningkat | | kelompok olahraga masyarakat yang aktif | 70% | | | 5,586,902,079 | 5,238,002,959 | | | | |
| 6.1 | Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat | | | Dispora | Pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam 1 tri Lomba Juang | 1 laporan | terkirrimya Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang | 100% | 4,621,627,700 | 4,154,722,700 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | | laporan Seleksi Penerimaan dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga | 2 laporan | terseleksi dan terbinanya Kelas Khusus Olahraga | | | | | | | |
| | | | | | frekuensi Pekan Olahraga bagi masyarakat dan olahraga prestasi | 1 kali | terselenggaranya pekan Olahraga masyarakat dan olahraga prestasi | | | | | | | |
| | | | | | Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihanya | 6 cabor | terlatihnya Atlet Kota Yogyakarta | | | | | | | |
| | | | | | jumlah Pertandingan Walikota CUP | 4 cabor | terselenggaranya Pertandingan Walikota CUP | | | | | | | |
| | | | | | Laporan seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tk. Propinsi | 1 laporan | terseleksinya dan terkirrimya Atlet Kota YK. ke Tk Propinsi | | | | | | | |
| | | | | | Frekuensi Pelatihan keolahragaa pegawai pemerintah kota | 1 laporan | terfasilitasi pelatihan keolahragaa pegawai pemerintah kota | | | | | | | |
| 6.2 | Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan | | | Dispora | Kelompok senam yang terbina | 7 kelompok | Kelompok senam yang terbina | 100% | 965,274,379 | 1,083,280,259 | sedang berjalan | Dinas Pemuda dan Olahraga | | |
| | | | | | frekuensi Lomba Senam anatar kecamatan se Kota Yogyakarta | 1 kali | terselenggaranya Lomba Senam anatar kecamatan se Kota Yogyakarta | | | | | | | |
| | | | | | laporan pelaksanaan Internasional Disability Day | 1 kelompok | terselenggaranya Internasional Disability Day | | | | | | | |
| | | | | | frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga | 1 kegiatan | terlatihnya Pelaku Olahraga | | | | | | | |
| | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tersedia | 1 jenis | terpenuhinya Sarana dan Prasarana olahraga | | | | | | | |
| | | | | | laporan Pendataan kelompok/kumunitas/organisasi Olahraga | 1 laporan | terterkoordinasinya kelompok/kumunitas/organisasi Olahraga termasuk NPC(National Paralympic Committee) yang membina atlet penyandang disabilitas | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Goes Pesona Nusantara 2018 | 1 laporan | terlaksananya goes Pesona Nusantara 2018 | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | 8,491,092,968 | 9,001,592,459 | | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Sosial

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|--------|---|--------|-------------------|--------|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinsos | Kelancaran administrasi perkantoran meningkat | 100% | | | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 226,770,000 | 249,447,000 | sedang berjalan | Sekretariat |
| | | | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 75 pegawai | | | | |
| | | | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 50 kali | | | | |
| | | | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk tamu | 29 kali | | | | |
| | | | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 18 laporan | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinsos | | | | | Materai 6000 | 1.050 buah | 691,976,798 | 761,174,478 | sedang berjalan | Sekretariat |
| | | | | | | | | | Materai 3000 | 1.950 buah | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa pengiriman/paket | 100 paket | | | | |
| | | | | | | | | | STNK Roda 4 yang terbayar | 17 unit | | | | |
| | | | | | | | | | STNK Roda 3 yang terbayar | 1 unit | | | | |
| | | | | | | | | | STNK Roda 2 yang terbayar | 35 unit | | | | |
| | | | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 13 jenis | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa tenaga keamanan | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 50 jenis | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa Percetakan | 2 jenis | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa Penggandaan | 330.000 lembar | | | | |
| | | | | | | | | | Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 10 jenis | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 3 jenis | | | | |
| | | | | | | | | | Buku Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 4 jenis | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa perbaikan perlengkapan kerja | 3 jenis | | | | |
| | | | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 12 jenis | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 kali | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinsos | | | | | 1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang disusun | 5 dokumen | 318,166,712 | 349,983,383 | sedang berjalan | Sekretariat |
| | | | | | | | | | 2. Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia | 5 dokumen | | | | |
| | | | | | | | | | 3. Jasa Tenaga Bantuan | 11 orang | | | | |
| | | | | | | | | | 4. Jasa pengelola arsip | 3 orang | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | 100% | | | | | 714,115,670 | 785,527,237 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinsos | | | | | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor | 3 jenis | 202,522,600 | 222,774,860 | sedang berjalan | Sekretariat |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinsos | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4 | 17 unit | 511,593,070 | 562,752,377 | sedang berjalan | Sekretariat |
| | | | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3 | 1 unit | | | | |
| | | | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2 | 35 unit | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | B | | | | | 74,750,000 | 82,225,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinsos | | | | | 1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | 74,750,000 | 82,225,000 | sedang berjalan | Sekretariat |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | | |
|---------|---|---------------|-------------------------------|---------|---|--------|---|------------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, Profil) | 4 dokumen | | | | | | | | | |
| 4 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Sosial Budaya | Kemiskinan masyarakat menurun | | Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial | 80% | | | | Persentase lansia potensial yang mendapatkan perlindungan sosial | 100% | 3,943,599,259 | 4,337,959,185 | | | | |
| 4.1 | Perlindungan Sosial | | | Kota Yk | | | 1. Frekuensi Gelar Potensi Anak Panti Asuhan Kota Yogyakarta | 1 kali | | Persentase korban bencana yang menerima bantuan | 100% | 801,776,100 | 881,953,710 | sedang berjalan | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | | | | 2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana Bantuan Korban Bencana | 12 laporan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Jasa piket Tagana | 56 orang | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan | 8 kelompok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Frekuensi Komunikasi Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial | 2 kali | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Frekuensi Gelar Potensi Lansia Dalam Rangka HLUN | 1 kali | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7. Frekuensi Sarasehan Komisi Daerah Lansia | 15 kali | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8. Frekuensi Peningkatan Kapasitas Tagana | 3 kali | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9. Laporan seleksi penghuni RPLU dan RPA | 1 laporan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10. Laporan Sarasehan Pelopor Perdamaian | 1 laporan | | | | | | | | | |
| 4.2 | Jaminan dan Bantuan Sosial | | | Kota Yk | | | 1. Frekuensi fasilitas penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlarang | 3 kali | | Persentase lansia terlarang yang memperoleh asistensi lanjut usia terlarang | 100% | 844,137,950 | 928,551,745 | sedang berjalan | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | | | | 2. Frekuensi fasilitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | 12 kali | | Persentase jenazah terlarang dan orang terlarang kehabisan bekal dalam perjalanan yang dilayani | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Frekuensi fasilitas penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) | 4 kali | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Laporan pelayanan Santunan Kematian. | 1 laporan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah | 12 bulan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Laporan Jenazah terlarang yang dimakamkan | 1 laporan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7. Laporan fasilitas pengaduan subsidi listrik | 1 laporan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8. Laporan Penanganan Orang Terlarang yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta | 1 laporan | | | | | | | | | |
| 4.3 | Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo | | | JT | | | Anak terlarang yang dilayani | 12 bulan | | Persentase anak terlarang yang dilayani RPA | 100% | 886,353,100 | 974,988,410 | sedang berjalan | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| 4.4 | Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma | | | UH | | | Lanjut usia yang dilayani | 12 bulan | | Persentase lanjut usia yang dilayani RPLU | 100% | 1,411,332,109 | 1,552,465,320 | sedang berjalan | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| 5 | Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial | Sosial Budaya | Kemiskinan masyarakat menurun | | Prosentase PMKS yang tertangani | 70% | | | | | | 2,029,231,300 | 2,232,154,430 | | | | |
| 5.1 | Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | | Kota Yk | | | 1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha | 55 orang | | Persentase PMKS yang mendapatkan bimbingan mental dan keterampilan | 100% | 589,105,700 | 648,016,270 | sedang berjalan | | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | | | | 2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha | 20 orang | | Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan modal usaha | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha | 40 orang | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha | 20 orang | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha | 40 orang | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi | 1 laporan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7. Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan | 20 orang | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS Jiwa | 55 orang | | | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|--|---------------|-------------------------------|---------|----------------------------|--------|--|-----------|--|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | 9. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis | 20 orang | | | | | | |
| 5.2 | Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | | Kota Yk | | | 1.Laporan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas | 1 laporan | Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh alat bantu | 100% | 1,440,125,600 | 1,584,138,160 | sedang berjalan | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | | | | | 2. Laporan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas | 1 laporan | Persentase PMKS yang memperoleh layanan advokasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3. Laporan penanganan dan rekomendasi anak terlantar | 1 laporan | Persentase PMKS yang mendapat pendampingan pengembangan potensi | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4. Laporan advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Laporan pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Frekuensi Peringatan HDI | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | 7. Laporan Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | 8. Buku KUBE yang tersusun | 1 dokumen | | | | | | |
| | Program Data, Informasi dan 6 Pemberdayaan Sosial | Sosial Budaya | Kemiskinan masyarakat menurun | | Prosentase PSKS yang aktif | 80% | | | | | 2,119,331,300 | 2,331,264,430 | | |
| 6.1 | Pendataan PMKS dan PSKS | | | Kota Yk | | | 1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial | 1 dokumen | Database keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, PSKS, PBI Jaminan Kesehatan, Penyandang Disabilitas | 100% | 1,323,818,600 | 1,456,200,460 | sedang berjalan | Bidang Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | | | 2. Data base PSKS | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Data base Penyandang Disabilitas | 1 dokumen | | | | | | |
| 6.2 | Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) | | | Dinsos | | | 1. Jumlah PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut | 80 orang | Persentase PSM, TSKK yang dibina | 100% | 795,512,700 | 875,063,970 | sedang berjalan | Bidang Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial |
| | | | | | | | 2. Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mendapat pelatihan | 45 orang | Persentase organisasi sosial/LKS, KI, WRKSBM yang dibina | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN | 100 anak | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Jenis seleksi PSKS berprestasi | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Frekuensi Optimalisasi PSKS | 5 kali | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial | 80 orang | | | | | | |
| | | | | | | | 7. Laporan pelaksanaan Workshop PSKS | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | 8. Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | 9.Frekuensi KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | 10. Frekuensi Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan | 1 kali | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 10,117,941,039 | 11,129,735,143 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|-------------------------|---|--------|---|--------------------|---|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 997,782,680 | 1,047,112,800 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Makan dan minum koordinasi | 60 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 354,200,000 | 383,482,000 | lanjutan | Bappeda | |
| | | | | | | | Makan dan minum pegawai | 46 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 40 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Materai 6000 | 1000 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 563,870,000 | 584,730,800 | lanjutan | Bappeda | |
| | | | | | | | Materai 3000 | 750 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengiriman / paket | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayar | 19 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Roda 4 | 3 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Roda 2 | 16 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 1 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 20 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 1 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengadaan | 1.500.000 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 9 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 4 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 15 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 20 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | 100% | 79,712,680 | 78,900,000 | lanjutan | Bappeda | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 46 dokumen pegawai | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 340,955,000 | 288,589,400 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat | 1 unit | Dukungan sarana dan prasarana aparatur kenyamanan dan kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 173,435,000 | 161,095,000 | lanjutan | Bappeda | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 19 unit | Dukungan sarana dan prasarana aparatur kenyamanan dan kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 167,520,000 | 127,494,400 | lanjutan | Bappeda | |
| | | | | | | | Roda 4 | 3 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Roda 2 | 16 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | | | | | | 29,600,750 | 32,560,825 | | |
| 3.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | 1 kali | Terlaksananya Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | | 29,600,750 | 32,560,825 | lanjutan | Bappeda | |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | | | | | | 178,720,000 | 196,592,000 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran SKPD | 100% | 178,720,000 | 196,592,000 | lanjutan | Bappeda | |
| | | | | | | | Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | BB | | | | | |
| 5 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Persentase capaian kinerja target program sektoral ekonomi | 95% | | | | | | 1,001,315,850 | 1,101,447,435 | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|-----------|----------------|-------------------------|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 5.1 | Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan: | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | 395,155,700 | 434,671,270 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1. Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan sebagai tindak lanjut evaluasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2. Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4. Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 5. Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I,II,III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 6. Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional | 100% | | | | |
| 5.2 | Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM | 100% | 282,381,200 | 310,619,320 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Dokumen Review Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sebagai tindak lanjut evaluasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Tahun 2019 Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I,II,III dan IV OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi | 100% | | | | |
| 5.3 | Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah | 100% | 323,778,950 | 356,156,845 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut evaluasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Updating Data dan Analisa Indikator Fiskal Daerah | 1 laporan | Tersedianya laporan Updating Data dan Analisa Indikator Fiskal Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kajian Potensi Investasi di Kota Yogyakarta | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kajian Potensi Investasi di Kota Yogyakarta | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah | 1 laporan | Tersedianya Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|-------------------------|--|--------|-------------------|--|----------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|---------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 6 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Persentase capaian kinerja target program sektoral fisik | 95% | | | | | 2,033,525,000 | 2,328,747,830 | | | |
| 6.1 | Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo | 100% | 402,228,300 | 442,451,130 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo sebagai tindak lanjut evaluasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Laporan Strategis Perhubungan | 1 laporan | Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Perhubungan | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Laporan Strategis Kominfo | 1 laporan | Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Kominfo | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Laporan Koordinasi Pokja Smartcity | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Pokja Smartcity | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Kajian Model Rekamaya Lalu Lintas Perkotaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kajian Model Rekamaya Lalu Lintas Perkotaan | 100% | | | | |
| 6.2 | Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman | 100% | 729,814,680 | 849,814,680 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | | Dokumen Pendampingan Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU | 1 laporan | Tersedianya dokumen Laporan Perencanaan Strategis Sektor PU | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman | 1 laporan | Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Sektor Permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Laporan Koordinasi Sanitasi | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Sanitasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Iuran Sekber Kartamantul | 1 kali | Iuran Sekber Kartamantul | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Kajian Energi Berkelanjutan Perkotaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kajian Energi Berkelanjutan Perkotaan | 100% | | | | |
| 6.3 | Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 100% | 901,482,020 | 1,036,482,020 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan | 1 laporan | Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Pertanahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Laporan Koordinasi Strategis Tata Ruang | 1 laporan | Tersedianya Laporan Perencanaan Tata Ruang | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|-------------------------|---|--------|---|-----------|---|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Strategis Lingkungan Hidup | 1 laporan | Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Lingkungan Hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakuwas) | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakuwas) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Ecodistrict | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Ecodistrict | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis Lingkungan | 1 laporan | Tersedianya Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis Lingkungan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Monitoring Alih Fungsi Lahan | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Alih Fungsi Lahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim | 100% | | | | |
| 7 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Persentase capaian kinerja target program sektoral sosial | 95% | | | | | 1,566,397,400 | 1,723,037,140 | | |
| 7.1 | Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan | 100% | 280,248,700 | 308,273,570 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut evaluasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pendidikan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Sektor Kebudayaan | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Kebudayaan | 100% | | | | |
| 7.2 | Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat | 100% | 986,346,500 | 1,084,981,150 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) | 1 laporan | Tersedianya Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan | 1 laporan | Tersedianya Laporan Kota Sehat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Sektor Sosial | 1 laporan | Tersedianya Laporan Kota Sehat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto | 1 laporan | Tersedianya Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan | 100% | | | | |
| 7.3 | Perencanaan dan Pengendalian Aparatur | | | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Aparatur | 100% | 299,802,200 | 329,782,420 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------|---|------------|----------------|---|----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur | 1 dokumen | | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Aparatur | 1 dokumen | | Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Sektor Pemerintahan | 1 laporan | | Tersedianya Laporan Strategis Sektor Pemerintahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia | 1 laporan | | Tersedianya Laporan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 laporan | | Tersedianya Laporan RAD PPK | 100% | | | | | |
| | Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | | Persentase capaian kinerja target program pengembangan | 95% | | | | 3,860,168,290 | 4,246,185,119 | | | |
| 8.1 | Perencanaan Program Pembangunan Daerah | | | | | | Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah | 100% | 1,870,684,450 | 2,057,752,895 | lanjutan | Bappeda | |
| | | | | | | | Dokumen Review RPJMD 2017-2021 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Review RPJMD 2017-2021 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen RKPD Tahun 2019 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2019 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2019 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2019 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2018 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2018 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Renja OPD | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Renja OPD | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Review Renstra OPD | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Review Renstra OPD | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta 2019 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta 2019 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2019 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2019 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Hasil Forum OPD | 1 kali | | Tersedianya Dokumen Hasil Forum OPD | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Analisis "Money Follow Program" dalam RPJMD 2017-2022 | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Analisis "Money Follow Program" dalam RPJMD 2017-2022 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Analisis Tindak Lanjut Perencanaan Teknokratis | 1 dokumen | | Tersedianya dokumen analisis tindak lanjut perencanaan teknokratis | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Buku Pedoman Musrenbang RKPD 2019 | 1 dokumen | | Tersedianya Buku Pedoman Musrenbang RKPD 2019 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen SDG's Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | Tersedianya Dokumen SDG's Kota Yogyakarta | 100% | | | | | |
| 8.2 | Pengendalian Program Pembangunan Daerah | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah | | | Tersedianya Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah | 100% | 782,295,900 | 860,525,490 | lanjutan | Bappeda | |
| | | | | | | | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD | 2 dokumen | | Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV | 6 dokumen | | Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD | 2 dokumen | | Tersedianya Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV | 6 dokumen | | Tersedianya Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari Pusat | 1 laporan | | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari Pusat | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan | 1 laporan | | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari DIY | 1 laporan | | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari DIY | 100% | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|--|--------|---|--------------|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan | 1 laporan | Tersedianya Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Daerah | 1 laporan | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal | 1 laporan | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang | 1 laporan | Tersedianya Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang | 100% | | | | |
| 8.3 | Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Dokumen Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan | | Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100% | 1,207,187,940 | 1,327,906,734 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2018 | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2018 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Data Sektoral Tahun 2018 | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Data Sektoral Tahun 2018 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Analisa Data Tahun 2018 | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Analisa Data Tahun 2018 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Data Series SIPD Tahun 2018 | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Data Series SIPD Tahun 2018 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2019 | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2019 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS | 1 laporan | Tersedianya Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta | 100% | | | | |
| 9 | Program Penelitian dan Pengembangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada dan Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis | 100% | | | | | 1,646,840,500 | 1,811,840,500 | | |
| 9.1 | Penelitian Strategis Pembangunan Daerah | | | Bappeda Kota Yk | | | Dokumen Penelitian | 5 dokumen | Tersedianya dokumen penelitian | 100% | 597,276,250 | 682,276,250 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Buku Jurnal Jarlit 2018 | 1 jenis buku | Tersusunnya Buku Jurnal Jarlit 2018 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Buku Inventarisasi Hasil Penelitian 2018 | 1 jenis buku | Tersusunnya Buku Inventarisasi Hasil Penelitian 2018 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Penelitian Strategis Tematik | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Dokumen Penelitian Strategis Tematik | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD | 1 dokumen | Tersedianya dokumen laporan koordinasi hasil penelitian di OPD | 100% | | | | |
| 9.2 | Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis | | | Bappeda Kota Yk | | | Dokumen Analisa Kebijakan | 4 dokumen | Tersusunnya dokumen analisa kebijakan | 100% | 455,997,800 | 525,997,800 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis) | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kajian Optimalisasi Aset Daerah | 100% | | | | |
| 9.3 | Pemantapan Inovasi Daerah | | | Bappeda Kota Yogyakarta | | | Anugerah Inovasi dan Penelitian | 2 jenis | Anugerah/Apresiasi terhadap Inovasi Daerah dan Penelitian | 100% | 593,566,450 | 603,566,450 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi | 1 laporan | Tersedianya Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Perancangan Inovasi Daerah | 1 dokumen | Tersusunnya Dokumen Perancangan Inovasi Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Forum Inovasi Daerah | 1 laporan | Tersusunnya laporan Forum Inovasi Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | 1 dokumen | Tersusunnya dokumen Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | 100% | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 11,655,305,470 | 12,776,113,049 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|--------|---|--------|--|----------------|--|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 1,777,860,990 | 2,050,000,000 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | DPUPKP | | | Makan dan minum yang tersedia untuk : | | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | 332,820,000 | 450,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | a.koordinasi, | 145 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | b.pegawai | 180 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 16 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | DPUPKP | | | Materai 6000 yang tersedia | 2.490 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | 932,849,550 | 1,000,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 700 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengiriman/paket | 6 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 14 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 12 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 yang terbayar | 11 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 6 yang terbayar | 9 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | KIR roda 6 | 9 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | KIR roda 4 | 14 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | SIM B | 1 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 20 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 17 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 400.000 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran listrik | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 2 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 4 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 19 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 20 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Rekening telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | DPUPKP | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | 512,191,440 | 600,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 50 dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 13 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola arsip | 2 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 1,053,381,000 | 1,225,000,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | DPUPKP | | | Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat | 1 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | | 200,000,000 | 350,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|---|---|-----------------|--|--------|---|-------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | DPUPKP | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. | | | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 853,381,000 | 875,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | a.roda 2 (dua) | 12 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | b.roda 3 (tiga) | 11 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | c.roda 4 (empat). | 14 uni | | | | | | | |
| | | | | | | | d.roda 6 (enam) | 8 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | 291,500,000 | 350,000,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | DPUPKP | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | | Tersejadinya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 291,500,000 | 350,000,000 | sedang berjalan | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPM, Ev Renja, Profil) | 6 dokumen | | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | B | | | | |
| 4 | Program Pembangunan Gedung Pemerintah | Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur | Ketimpangan Antar Wilayah Menurun | | Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai dengan standar kebutuhan | 87% | | | | | | 20,500,000,000 | 47,250,000,000 | | |
| 4.1 | Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah | | | Kota Yogyakarta | | | DED Pembangunan Gedung Pemerintah | 16 Dokumen | | Terpenuhinya perencanaan gedung sesuai dengan standar kebutuhan | Kota Yk | 1,804,002,416 | 2,250,000,000 | Rutin | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | Updating Data Ledger Bangunan | 1 Bidang Bangunan | | | | | | | |
| | | | | | | | Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah | 51 OPD | | | | | | | |
| 4.2 | Pembangunan Gedung Pemerintah | | | Kota Yogyakarta | | | Renovasi Bangunan Pemerintah | 15 lokasi | | Berfungsinya secara optimal gedung-gedung milik pemerintah | Kota Yk | 18,695,997,584 | 45,000,000,000 | Rutin | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya | 1 paket | | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase | Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur | Ketimpangan Antar Wilayah Menurun | | Persentase kualitas saluran Pengairan /Penyediaan Bangunan Talud | 73,50% | | | | | | 39,215,056,000 | 33,000,000,000 | | |
| | | | | | | | Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak terhambat | 93,50% | | | | | | | |
| 5.1 | Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase | | | Kota Yogyakarta | | | Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase | 2.000 m | | Terbangunnya Saluran Pengairan dan Drainase | Kota Yk | 8,000,000,000 | 25,000,000,000 | Rutin | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| 5.2 | Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase | | | Kota Yogyakarta | | | Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase | 10.000 m | | Terpeliharanya Pengairan dan Drainase | Kota Yk | 31,215,056,000 | 8,000,000,000 | Rutin | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| 6 | Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur | Ketimpangan Antar Wilayah Menurun | | Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan , Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan | 92,85% | | | | | | 44,572,489,000 | 54,000,000,000 | | |
| | | | | | | | Persentase kualitas penerangan jalan umum | 96% | | | | | | | |
| 6.1 | Peningkatan Jalan dan Jembatan | | | Kota Yogyakarta | | | Peningkatan Jalan | 3125 m2 | | Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan | 3 ruas jalan | 8,000,000,000 | 15,000,000,000 | Rutin | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| 6.2 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | Kota Yogyakarta | | | Pemeliharaan jalan | 14.097 m2 | | Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 5 ruas jalan | 10,402,489,000 | 11,000,000,000 | Rutin | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | Pemeliharaan Jembatan | 1 unit | | | | | | | |
| 6.3 | Pengelolaan Penerangan Jalan Umum | | | Kota Yogyakarta | | | Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan | 1.900 titik | | Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan | Kota Yk | 26,170,000,000 | 28,000,000,000 | Rutin | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | Penggantian Lampu PJU habis umur pakai | 442 titik | | Terlaksananya penggantian Lampu PJU habis umur pakai | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran rekening air dan rekening listrik | 12 bulan | | Terlaksananya pembayaran rekening air dan rekening listrik | | | | | |
| | | | | | | | Peningkatan PJU Kampung | 150 titik | | Terlaksananya peningkatan PJU kampung | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|--------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|--|--------|--|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|------------------|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| | | | | | | | Pemeliharaan lampu Hias | 13 unit | Terlaksananya pemeliharaan lampu hias | | | | | |
| 7 | Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan | Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur | Ketimpangan Antar Wilayah Menurun | | Persentase kualitas perumahan dan permukiman | 93,50% | | | | 14,207,392,038 | 15,150,000,000 | | | |
| | | | | | Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai | 80% | | | | | | | | |
| 7.1 | Penataan Perumahan dan Permukiman | | | Kota Yogyakarta | | | Pekerjaan Talud Permukiman | 62,5 m | Terseedianya sarana prasarana dasar permukiman | wilayah kota Yk | 4,485,189,445 | 5,000,000,000 | Baru | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan |
| | | | | | | | Sumur Komunal | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Sambungan Rumah | 175 SR | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Sarparas Permukiman | 3 unit | | | | | | |
| 7.2 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | Kota Yogyakarta | | | Penataan Kawasan | 2 kawasan | Terpeliharanya sarana prasarana dasar permukiman | Kota Yk | 5,130,000,000 | 5,500,000,000 | Baru | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan |
| | | | | | | | Peningkatan Kualitas RTLH | 80 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeriksaan Kelaikan Bangunan | 13 unit bangunan | | | | | | |
| 7.3 | Pengelolaan Rusunawa | | | Kec DN | | | Operasional pengelolaan Rusunawa | 2 unit | Terkelolanya rusunawa | 2 unit | 509,363,391 | 650,000,000 | Baru | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan |
| 7.4 | Pengelolaan Air Limbah | | | Kota Yogyakarta | | | Operasional Pengelolaan Saluran air limbah | 540 m | Terpeliharanya saluran air limbah | Kota Yk | 4,082,839,202 | 4,000,000,000 | Baru | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan |
| Total | | | | | | | | | | 121,617,679,028 | 153,025,000,000 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|----------------------------------|--|--------|--|--------------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 1,853,414,202 | 2,224,097,042 | | |
| 1.1 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | Materai 3000 | 900 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 1,448,849,531 | 1,738,619,437 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | Materai 6000 | 1.800 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengiriman/ paket | 50 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran telepon | 2 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran Modem Internet | 20 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Bantuan komunikasi kepala | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran Handphone | 1 buah | | | | | | |
| | | | | | | | KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya | 6 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya | 5 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Plat Kendaraan roda 2 yang diganti | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 18 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa retribusi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 2 paket | | | | | | |
| | | | | | | | jasa perbaikan peralatan kerja | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 67 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 25 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 125.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penjiplakan | 100 bendel | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Laminating | 50 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 14 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan komputer/printer yang tersedia | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Kantor yang t erseada | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Keamanan | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Genset yang tersedia | 3 unit | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 106,654,671 | 127,985,605 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 44 dokumen pegawai | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 1 orang | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | Makan dan minum yang tersedia untuk: | | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 297,910,000 | 357,492,000 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | - pegawai | 46 orang | | | | | | |
| | | | | | | | - Koordinasi | 308 kali | | | | | | |
| | | | | | | | - pengunjung | 880 galon | | | | | | |
| | | | | | | | - Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 27 laporan | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 357,023,000 | 428,427,600 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | DPK | | | Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat | 1 paket | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 201,455,000 | 241,746,000 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|---------|--|---------------------|---|------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | DPK | | | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 155,568,000 | 186,681,600 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | roda 2 | 8 unit | | | | | | |
| | | | | | | | roda 3 | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | roda 4 | 5 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | | | | | 20,000,000 | 24,000,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | DPK | | | Frekuensi diklat yang diikuti | 10 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 20,000,000 | 24,000,000 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 39,050,000 | 46,860,000 | | |
| 4.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | DPK | | | Dokumen Perencanaan, pengendalian & Penganggaran : (Renstra, Renja, PK,RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 39,050,000 | 46,860,000 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | Laporan Kinerja OPD :LKIP, Lap Keuangan & Fisik, SPIP, Profil | 5 dokumen | nilai akuntabilitas kinerja OPD | BB | | | | |
| 5 | Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Penambahan khasanah arsip statis di LKD | 2 buah | | | | | 715,310,420 | 858,372,504 | | |
| | | | | | Meningkatnya jumlah OPD/Unit Kerja yang dibina | 152 SKPD/Unit Kerja | | | | | | | | |
| 5.1 | Pengelolaan Arsip | | | Kota Yk | | | Buku Inventaris Arsip yang tercipta | 2 buku | Meningkatnya pengelolaan Arsip inaktif sesuai standar | 4000 berkas | 362,068,500 | 434,482,200 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | Daftar Arsip statis yang tercipta | 2 dokumen | Meningkatnya pengelolaan Arsip Statis sesuai standar | 6 buah/khasanah | | | | |
| | | | | | | | Arsip Pemerintah Kota yang dinilai | 2 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan | 2 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Arsip inaktif yang diolah | 4.000 berkas | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Personil yang menangani arsip Dinamis OPD/Unit Kerja | 152 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Jenis Sarana dan Prasarana Kendali Arsip | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pedoman Kearsipan JRA | 1 dokumen | | | | | | |
| 5.2 | Pengembangan Arsip | | | Kota Yk | | | Jumlah pengelola arsip yang dibina | 152 orang | 1. Meningkatnya OPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar | 24 OPD menjadi 42 OPD | 353,241,920 | 423,890,304 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | Jumlah Pengelola arsip Ormas/orpol yang dibimtek | 35 orang | 2. Meningkatnya pengetahuan pengelola arsip OPD/Unit Kerja | 235 orang | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Bintek Pengelola Arsip | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) | 12 kali FKA | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah OPD yang terdampingi pengelolaan arsip dinamis konvensional dan elektronik nya | 152 OPD/Unitkerja | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Lomba Pengelolaan Arsip OPD/Unit Kerja | 1 kali | | | | | | |
| 6 | Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Khasanah arsip yang terlindungi dan terselamatkan setiap tahun | 2 buah | | | | | 548,350,850 | 658,021,020 | | |
| 6.1 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | | | Kota Yk | | | Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta | | | | 277,109,000 | 332,530,800 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | Jumlah Arsip yang direstorasi | 200 lembar arsip | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Arsip yang dialih mediakan | 3000 lembar arsip foto | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Khasanah Arsip yang ditelusuri | 2 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen OPD yang teridentifikasi dan terlindungi arsip vitalnya | 3 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi | 3 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Arsip yang selamat dari bencana | 2 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi | 60 orang | | | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|------------|------------------------------------|---------|-------------------|--------|---|------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| | | | | | | | Pedoman Kearsipan | 1 pedoman | | | | | | |
| 6.2 | Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional | | | Kota Yk | | | Frekuensi Pameran Kearsipan | 1 kali | Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta | 1 kali | 271,241,850 | 325,490,220 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | Frekuensi penerbitan majalah ARYA | 4 kali | Tersedianya Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta melalui media elektronik dan cetak | 1400 lbr buletin | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Aplikasi Kearsipan | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pedoman Kearsipan | 1 pedoman | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan | 1200 lbr buletin | Tersedianya Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta melalui media elektronik dan cetak | | | | | |
| | | | | | | | Prosentase Jumlah perpustakaan yang dibina | 2% | | | | | | |
| 7 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan | Pendidikan | Aksesibilitas pendidikan meningkat | | | | Meningkatnya angka kunjungan Perpustakaan Kota Yogyakarta | 2% | | | 1,117,240,045 | 1,340,688,054 | | |
| | | | | | | | jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah pengelola perpustakaan khusus instansi yang dilatih | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah pedoman perpustakaan | 1(satu) | | | | | | |
| | | | | | | | jumlah inovasi layanan perpustakaan | 1 jenis | | | | | | |
| 7.1 | Pengelolaan Perpustakaan | | | Kota Yk | | | 1. Frekuensi kunjungan Mobil keliling | 220 kali | 1. Intensitas layanan perpustakaan keliling di masyarakat | 220 kali | 858,505,045 | 1,030,206,054 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | 2. Frekuensi Kunjungan Mobil Internet Keliling | 220 kali | 2. Intensitas layanan Kunjungan Mobil Internet Keliling | 220 kali | | | | |
| | | | | | | | 3. Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta | 12 bulan | 3. Implementasi Pelayanan perpustakaan | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | 4. Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling | 220 kali | 4. Intensitas tayanan motor perpustakaan keliling | 220 kali | | | | |
| | | | | | | | 5. Pedoman pengelolaan perpustakaan khusus | 1 dokumen | 5. Pedoman perpustakaan sebagai panduan dalam pelayanan di bidang perpustakaan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | 6. Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan khusus | 120 orang | 6. Implementasi pengelolaan Perpustakaan sekolah yang berbasis IT | 60 orang | | | | |
| | | | | | | | 7. Jumlah Peserta pendampingan perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus/ OPD | 100 perpustakaan | 7. Implementasi pembinaan perpustakaan sekolah | 50 sekolah, 6 bulan | | | | |
| 7.2 | Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca | | | Kota Yk | | | 1. Jumlah Peserta Lomba Berceita Siswa SD Tingkat Kota Yk. | 100 peserta | 1. Minat dan Kemampuan membaca siswa SD berkembang | 40 peserta: 2 angkatan | 258,735,000 | 310,482,000 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | 2. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio | 30 kali | 2. Pelestarian cerita rakyat melalui media radio | 30 kali | | | | |
| | | | | | | | 3. Jumlah Siswa SD Peserta Sanggar Menulis "Cahaya" | 40 peserta | 3. Anak-anak berani dan gemar menulis | 40 peserta, 2 angkatan | | | | |
| | | | | | | | 4. Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca" | 60 peserta | 4. Masyarakat dan pemustaka meningkat minat bacanya | 60 peserta | | | | |
| | | | | | | | 5. Frekuensi Diskusi Buku | 6 kali | 5. Masyarakat dan pemustaka memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas | 300 peserta | | | | |
| | | | | | | | 6. Frekuensi Diskusi Komunitas Gemar Membaca | 2 kali | 6. Jalanan antar komunitas dalam menumbuhkan budaya literasi | 100 peserta | | | | |
| | | | | | | | 7. Frekuensi Festival Literasi | 1 kali | 7. Budaya literasi masyarakat berkembang | 1 kali, 200 peserta | | | | |
| | | | | | | | 8. Frekuensi Ramadan di Perpus Kota | 1 kali | 8. Peran Perpus Kota dalam menyemarakkan bulan Ramadan | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | 9. Frekuensi aktivitas Liburan di Perpus Kota: liburan di perpus kota, movie maker, junior smart camp | 1 kali | 9. Peran Perpus Kota dalam mengisi Liburan sekolah | 150 peserta | | | | |
| | | | | | | | 10. Operasional Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku | 12 bulan | 10. Distribusi buku sumbangan dari masyarakat untuk yang membutuhkan meningkat | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | | 11. Frekuensi Seminar Regional Perpustakaan | 1 kali | 11. Kajian komprehensif untuk kemajuan perpustakaan Kota Yk | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | 12. Frekuensi Koordinasi Forkom Perpustakaan Kab/Kota se_Diy | 1 kali | 12. Jaringan kerjasama antar perpustakaan umum kab/Kota dan Diy | 100 peserta | | | | |
| | | | | | | | 13. Frekuensi Lomba Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yk | 1 kali | 13. Kemampuan berkompetisi dalam pengelolaan perpustakaan sekolah | 6 pemenang dari 100 peserta | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|------------|------------------------------------|---------|---|------------|--|-----------|--|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 8 | Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan | Pendidikan | Aksesibilitas pendidikan meningkat | | Jumlah sistem perpustakaan yang dikelola | 1 sistem | | | | | 258,593,000 | 310,311,600 | | |
| | | | | | Jumlah otomasi dan digital library yang dikelola | 2 aplikasi | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen data perpustakaan yang selalu ter-update | 1 dokumen | | | | | | | | |
| 8.1 | Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno | | | Kota Yk | | | 1. Bahan pustaka kuno yang dilestarikan | 20 buku | 1. Naskah kuno semakin terpelihara | 20 naskah | 173,678,000 | 208,413,600 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | 2. Koleksi pustaka yang dipelihara | 12 bulan | 2. Bahan pustaka semakin terpelihara | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | | 3. Operasional Stock Opname Bahan Pustaka | 1 kali | 3. Koleksi bahan pustaka semakin tertata sesuai kaidah perpustakaan | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | 4. Koleksi bahan pustaka baru | 1000 eks | 4. Masyarakat dan pemustaka memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas | 1000 eks | | | | |
| 8.2 | Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan | | | Kota Yk | | | 1. Operasional pengelolaan otomasi dan digital library | 12 bulan | 1. Implementasi pengelolaan otomasi dan digital library | 12 bulan | 84,915,000 | 101,898,000 | sedang berjalan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | 2. Laporan aktivitas perpustakaan | 1 dokumen | 2. Data perpustakaan semakin tertata dan akurat | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | 3. Frekuensi penerbitan Majalah Bookie (Triwulanan) | 4 kali | 3. Kegiatan Perpus Kota semakin dikenal oleh masyarakat melalui Majalah Bookie | 4 kali | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 4,908,981,517 | 5,890,777,820 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|--|-----------------|-------------------|---|--|----------------|---|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 1,161,937,612 | 1,032,031,044 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kota Yogyakarta | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi | 32 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 458,646,000 | 504,510,600 | Lanjutan | BKPP | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai | 66 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 40 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kota Yogyakarta | | | Materai 6000 yang tersedia | 156 lbr | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 525,771,436 | 350,000,000 | Lanjutan | BKPP | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 420 lbr | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengiriman/paket | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK kendaraan roda 4 yang terbayar | 3 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK kendaraan roda 2 yang terbayar | 16 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bln | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 51 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengadaan | 433.666 lbr | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 2 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran listrik, air, dan telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 714 xlempar | | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 24 buku | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 51 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 45 macam | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengadaan printer | 5 unit | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kota Yogyakarta | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun | 5 dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 177,520,176 | 177,520,444 | Lanjutan | BKPP | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 59 Dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 5 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | 258,849,000 | 258,848,000 | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kota Yogyakarta | | | Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/tempat | 3 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 159,840,000 | 159,840,000 | Lanjutan | BKPP | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kota Yogyakarta | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 | 3 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 99,009,000 | 99,008,000 | Lanjutan | BKPP | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 | 16 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | | | | 28,000,000 | 20,000,000 | | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Kota Yogyakarta | | | Frekwensi Diklat formal yang diikuti | 2 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 28,000,000 | 20,000,000 | Lanjutan | BKPP | |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | 100% | 45,460,000 | 45,460,000 | | | |
| 4.1 | Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan | | | Kota Yogyakarta | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran. | 100% | 45,460,000 | 45,460,000 | Lanjutan | BKPP | |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan keuangan dan fisik, SKM, SPP, dan Profil). | 5 dokumen | Nilai kinerja akuntabilitas kinerja SKPD | 100% | | | | | |
| 5 | Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta | 100% | | | | 1,802,748,900 | 1,839,228,750 | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|--------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 5.1 | Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara | | | Kota Yogyakarta | | | Dokumen Formasi pegawai | 3 dokumen | Terlaksananya penataan dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara | 100% | 1,002,459,500 | 1,002,459,500 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Laporan Pelaksanaan Rekrutment ASN | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penataan ASN Pemkot Yk | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan pemrosesan Pindah masuk/keluar/titipan ASN | 1 dokumen | | | | | | |
| 5.2 | Pengembangan Karier ASN | | | Kota Yogyakarta | | | Jumlah ASN yang dinilai kompetensinya | 120 orang | Terlaksananya pengembangan | 100% | 716,904,400 | 746,685,000 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang dikelola Talent Pool | 50 orang | karier Aparatur Sipil Negara | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengjian formasi JPT Pratama Secara Terbuka | 13 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah JPT Pratama Administrator dan pengawas yang ditata | 82 org | | | | | | |
| 5.3 | Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian | | | Kota Yogyakarta | | | Website kepegawaian yang dikelola | 12 bulan | Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kepegawaian. | 100% | 83,385,000 | 90,084,250 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Data elektronik pegawai yang dikelola | 15.000 data | | | | | | |
| | | | | | | | Data manual pegawai yang dikelola | 15.000 data | | | | | | |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang akuntabel | 100% | | | | | 1,069,983,300 | 1,089,330,450 | | |
| 6.1 | Mutasi Data Kepegawaian | | | Kota Yogyakarta | | | Frekuensi Crash program kenaikan pangkat ASN | 2 kali | Terlaksananya mutasi kepegawaian | 100% | 394,854,300 | 399,339,750 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Laporan Peninjauan Masa Kerja | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Status kepegawaian | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Penilaian Angka Kredit | 1.024 Pjb. Fgs | | | | | | |
| | | | | | | | Terbitnya SK jabatan fungsional | 50 SK | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan pejabat fungsional | 120 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Terbitnya SK Kenaikan Pangkat | 800 orang | | | | | | |
| 6.2 | Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai | | | Kota Yogyakarta | | | Laporan Terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai | 1 dokumen | | | 384,556,000 | 395,747,500 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Laporan presensi dan tambahan penghasilan pegawai | 12 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Administrasi perceraian | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pembinaan mental spiritual | 10 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pegawai yang melaksanakan uji kesehatan | 10 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Konseling pegawai | 50 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang diproses pemberhentian dan pensiun | 350 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Fasilitasi Korpri | 4 kali | | | | | | |
| 6.3 | Penatausahaan Kepegawaian | | | Kota Yogyakarta | | | Laporan Rekapitulasi Surat keterangan cuti | 1 dokumen | Terlaksananya penatausahaan kepegawaian sesuai SOP. | 100% | 290,573,000 | 294,243,200 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Karis/Karsu/Karpeg/ KPE yang diterbitkan | 300 kartu | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang mendapatkan Satyalancana | 500 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang terlayani Bapertarum | 150 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang terlayani TASPEN | 150 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang terlayani Kenaikan gaji berkala, KP4, dan inpassing gaji | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Penilaian kinerja pegawai | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang terproses jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan | 3 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang terlayani LHKPN dan LHKASN | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan pegawai non PNS BLUD yang diproses | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah tenaga bantuan yang dikelola | 1.031 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tanda pengenalan pegawai | 5.500 orang | | | | | | |
| 7 | Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terlaksana-nya pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara. | 100% | | | | | 4,092,489,852 | 4,371,018,200 | | |
| 7.1 | Analisa Kebutuhan Diklat | | | Kota Yogyakarta | | | Laporan Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi | 1 dokumen | tersedianya data kebutuhan Diklat, ujian dinas, dan standar kompetensi. | 100% | 278,281,352 | 278,281,300 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Laporan Perencanaan peningkatan kualifikasi pendidikan formal | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Analisaa kebutuhan Diklat | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Data kepegawaian alumni Diklat | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang mengikuti Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Penyusunan standar kompetensi | 1 dokumen | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|--|-----------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 7.2 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | Kota Yogyakarta | | | Jumlah Pengiriman Diklat teknis / fungsional bagi PNS | 53 Org | Terlaksananya penyelenggaraan Diklat struktural dan Diklat teknis. | 100% | 2,785,284,000 | 3,063,812,400 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Jumlah Pengiriman Diklatpim II | 2 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengiriman Diklatpim III | 15 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengiriman Diklatpim IV | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Diklat teknis/fungsional bagi ASN | 950 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi praktek kerja lapangan bagi peserta Diklat | 24 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sosialisasi jabatan fungsional | 60 orang | | | | | | |
| 7.3 | Pengendalian dan Pengembangan Diklat | | | Kota Yogyakarta | | | Laporan Monitoring dan evaluasi pasca-Diklat | 1 dokumen | Terlaksananya pengendalian dan pengembangan Diklat, izin belajar, tugas belajar, dan izin keluar negeri. | 100% | 1,028,924,500 | 1,028,924,500 | Lanjutan | BKPP |
| | | | | | | | Frekuensi Monitoring dan evaluasi pegawai | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Seleksi calon peserta diklat dan tugas belajar | 165 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang diberi izin belajar dan tugas belajar PNS | 67 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang diberi bantuan biaya tugas belajar bagi PNS | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang dimonitoring dan evaluasi peserta tugas belajar dan izin belajar | 67 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an | 25 orang | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 8,459,468,664 | 8,655,916,444 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|---|--------|---|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|--|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 217,708,816 | 227,996,213 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Makan minum yang tersedia untuk koordinasi | 242 | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 15,884,000 | 16,678,200 | sedang berjalan | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan | |
| | | | | | | | Koordinasi | 33 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pegawai | 14 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Tamu | 22 kali | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 60 Jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 176,049,916 | 184,254,368 | sedang berjalan | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 350 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 120 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia | 17 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia | 19 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga tersedia | 6 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya | 2 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya | 3 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 167421 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 30 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan komputer | 10 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 16 buku | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala | 12 bulan | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi) | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | | 25,774,900 | 27,063,645 | sedang berjalan | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 11 dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola arsip | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100% | | | | | | 170,137,209 | 178,644,069 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 121,234,209 | 127,295,919 | sedang berjalan | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | 2 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 48,903,000 | 51,348,150 | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | 3 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | 38,265,250 | 40,178,460 | | |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 38,265,250 | 40,178,460 | sedang berjalan | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan | |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | BB | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|--------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|---|---|------------|---|--------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kesesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan | Prosentase capaian kegiatan pembangunan | | | | 93% | 8% | 1,076,295,898 | 1,130,706,689 | | |
| 4.1 | Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Renja Setda | 1 dokumen | Tersusunnya renja Sekda yang menjadi acuan penyusunan RKA dan DPA Sekda | 100% | | 142,585,666 | 142,417,449 | sedang berjalan | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan |
| | | | | | | | LAKIP Setda | 1 dokumen | Tersusunnya dokumen lakip setda sebagai wujud akuntabilitas dan alat perbaikan kinerja | 100% | | | | | |
| | | | | | | | RUP Setda | 1 laporan | Tersusunnya RUP setda sebagai unsur perencanaan dan pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Review Renstra Setda | 1 dokumen | Tersusunnya review renstra setda untuk mengakomodir perubahan perencanaan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pokja Sanitasi | 1 Laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Perjanjian kinerja setda | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengukuran Kinerja Setda | 1 dokumen | | | | | | | |
| 4.2 | Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Laporan Evaluasi Dokumen Kontruksi | 1 laporan | Terwujudnya laporan evaluasi dokumen kontrak | 100% | | 631,990,466 | 674,884,226 | sedang berjalan | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan |
| | | | | | | | Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan | 12 laporan | Terwujudnya Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan laporan evaluasi SIM Pelaporan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | 4 laporan | Terwujudnya Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan | 1 dokumen | Terwujudnya Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik kontruksi | 1 dokumen | Terwujudnya Laporan hasil pengendalian fisik kegiatan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan pengendalian Kontrak Kritis | 1 laporan | Terwujudnya laporan pengendalian kontrak kritis | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan kontruksi | 1 laporan | Tersedianya Uji Lab Konstruksi | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan peta pembangunan berbasis digital | 1 laporan | Tersedianya peta pembangunan berbasis digital | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Expose hasil pekerjaan koonstruksi | 1 laporan | | | | | | | |
| 4.3 | Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan | | | Bag Adm & Pengendalian Pemb | | | Pedoman Pelaksanaan Kegaiatn APBD | 1dokumen | Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan | 100% | | 301,719,766 | 313,405,014 | sedang berjalan | Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan |
| | | | | | | | Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya | 1 laporan | Tersedianya kajian AHS | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Buku Daftar Registrasi Perusahaan | 1dokumen | Tersedianya Buku Daftar Register Perusahaan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan | 1 laporan | Tersedianya Peraturan Walikota tentan Analisa Harga Satuan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD | 1dokumen | Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD | 100% | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 1,502,407,173 | 1,577,525,431 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|--------|-------------------|---|---|-------------------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 100% | | | | 7,558,350,734 | 7,558,350,734 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | BPKAD | | | Makan dan minum koordinasi | 144 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 325,500,000 | 325,500,000 | sedang berjalan | BPKAD | |
| | | | | | | | Makan dan minum pegawai | 130 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum tamu | 48 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 26 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | BPKAD | | | Materai @6000 yang tersedia | 320 lembar | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 6,974,098,500 | 6,974,098,500 | sedang berjalan | BPKAD | |
| | | | | | | | Materai @3000 yang tersedia | 1.384 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Perangko @5100 yang tersedia | 17.760 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengiriman / paket | 865 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa komunikasi yang tersedia | 1 OPD | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebutuhan air yang tersedia | 36 OPD | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Kebutuhan listrik yang tersedia | 44 OPD dan 8 unit kerja | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 yang dibayar | 16 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 yang dibayar | 35 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 3 yang dibayar | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa KIR kend roda 4 | 6 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 26 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 7 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 86 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 574.600 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 12 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 36 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Rumah tangga yang tersedia | 12 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 4 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan logistik kantor jas hujan | 96 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan logistik tas kerja | 69 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair | 10 Jenis | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | BPKAD | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 258,752,234 | 258,752,234 | sedang berjalan | BPKAD | |
| | | | | | | | Dokumen ASN yang dikelola | 130 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 5 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai | | 100% | | | | 496,298,915 | 496,298,915 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | BPKAD | | | Jasa pemeliharaan gedung kantor | 2 jenis pekerjaan | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 148,215,000 | 148,215,000 | sedang berjalan | BPKAD | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | BPKAD | | | Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 | 16 unit | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 348,083,915 | 348,083,915 | sedang berjalan | BPKAD | |
| | | | | | | | Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3 | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 | 35 unit | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|---------|---|--------|--|------------|--|-------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Prosentase meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 69,375,000 | 69,375,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | BPKAD | | | Frekuensi diklat formal yang diikuti | 4 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | | 69,375,000 | 69,375,000 | sedang berjalan | BPKAD |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Prosentase meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 179,613,000 | 179,613,000 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec. UH | | | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran : Renstra, Renja, RKA/RKPA, DPA/DPPA, IKU, Perjanjian Kinerja | 6 dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 4 keg | 179,613,000 | 179,613,000 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LAKIP), Laporan Fisik dan Keuangan, SPIP, SPeKOP, SKM, Profil SKPD | 6 dokumen | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi diklat formal yang diikuti | 4 kali | Buku profil keuangan daerah | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Profil Keuangan Daerah | 1 dokumen | | | | | | |
| 5 | Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | tepat waktu | 364,245,415 | 364,245,415 | | |
| 5.1 | Perencanaan Anggaran | | | BPKAD | | | Dokumen tentang Perda APBD TA. 2019 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2019 | 2 dokumen | Penetapan Raperda APBD tepat waktu. | 95% | 259,426,415 | 259,426,415 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2018 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018 | 2 dokumen | | 2 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan RAPBD TA. 2018 dan Nota Keuangan RAPBD TA. 2019 | 2 dokumen | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2018 | 3 dokumen | | 4 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Penguji usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2018 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2019 | 2 kegiatan | | 40 SKPD | | | | |
| | | | | | | | Dokumen tentang Kode Rekening | 1 dokumen | | | | | | |
| 5.2 | Pengendalian Anggaran | | | Kec. UH | | | SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2018 | 44 SKPD | DPA SKPD & DPA SKPKD, DPPA & DPPA -SKPKD sebagai dasar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasi kegiatan | 44 SKPD | 104,819,000 | 104,819,000 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2018 | 44 SKPD | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi pencairan dana hibah | 22 SKPD | Fasilitasi pencairan dana hibah | 22 SKPD | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi pencairan dana Bantuan Sosial | 2 SKPD | Fasilitasi pencairan dana Bantuan Sosial | 2 SKPD | | | | |
| | | | | | | | Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas | 2 dokumen | Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas | 2 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Ijin diatas/diluar SHBJ | 10 SKPD | Ijin diatas/diluar SHBJ | 10 SKPD | | | | |
| 6 | Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer | | | | Prosentase Pengendalian Belanja Daerah sesuai perencanaan yang tepat waktu dan akuntabel | 100% | | | | | 607,021,406 | 607,021,406 | | |
| 6.1 | Pengendalian Anggaran Belanja Daerah | | | BPKAD | | | OPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah | 44 OPD | Pelaksanaan Belanja Daerah dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan. | 44 OPD | 500,958,406 | 500,958,406 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Dokumen TPTGR | 6 dokumen | terselesaikannya penerimaan Ganti Rugi Daerah. | 6 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2017 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2018 | 1 dokumen | Jumlah Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2017 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2018 | | | | | |
| | | | | | | | Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji | 12 dokumen | Pengembalian kelebihan gaji | 12 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,54% iuran Pemda kepada PT. TASPEN : | 12 dokumen | Jumlah Laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,54% iuran Pemda kepada PT. TASPEN : | 12 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Laporan SKPP yang diterbitkan | 12 dokumen | Jumlah SKPP yang diterbitkan | 12 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Cakupan OPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah | 44 OPD | OPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah | 44 OPD | | | | |
| 6.2 | Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer | | | BPKAD | | | Laporan Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola | 6 dokumen | Laporan Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola | 6 dokumen | 106,063,000 | 106,063,000 | sedang berjalan | BPKAD |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|---------|---|--------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 7 | Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 1,155,215,406 | 1,155,215,406 | | |
| 7.1 | Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | BPKAD | | | Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 | 1 dokumen | Data dan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 | 1 dokumen | 784,958,406 | 784,958,406 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2017 | 1 dokumen | Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBD berbasis sistem informasi keuangan daerah | 44 OPD, 1 SKPKD/OPD | | | | |
| | | | | | | | Dokumen LRA, LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah | 1 dokumen | Terwujudnya laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah | 44 SKPD/OPD, 1 SKPKD/OPD | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Neraca, LO, LPE dan Calk Pemerintah Daerah | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Realisasi APBD TA.2018, Semester I | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Realisasi APBD TA.2017 Tribunal Iv dan TA. 2018 Tribunal I, II, III | 4 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Cakupan Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual | 44 OPD, 1 SKPKD/OPD | | | | | | |
| | | | | | | | Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat | 12 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Pendampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual | 44 OPD, 1 SKPKD/OPD | | | | | | |
| 7.2 | Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | | | BPKAD | | | Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah | 16 kali | Laporan piutang dan dana cadangan dapat disajikan secara akuntabel | 2 kali | 370,257,000 | 370,257,000 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah | 20 kali | Pendapatan bunga deposito | Rp 6.000.000.000,- | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Penyertaan Modal | 24 dokumen | Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang transparan dan akuntabel | 23 BLUD (1 SKPD/OPD, 22 unit kerja) | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Laporan perforasi | 4 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Laporan piutang daerah | 4 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Laporan hasil kerjasama dengan Pihak ke3 | 12 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Laporan pendapatan diterima di muka | 12 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Laporan Dana Cadangan | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Cakupan Pengesahan laporan bulanan BLUD | 23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja) | | | | | | |
| | | | | | | | Cakupan OPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | 23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja) | | | | | | |
| 8 | Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 4,00% | | | | | 1,933,093,020 | 1,933,093,020 | | |
| 8.1 | Pelayanan Pajak Daerah | | | BPKAD | | | Sinkronisasi Data Obyek Pajak PBB-P2 dengan BPHTB | 240 objek pajak | Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah | | 414,434,720 | 414,434,720 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Pemeliharaan Obyek PBB-P2 Hasil Penilaian Individu | 12 objek pajak | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Data SISMOIP dan Data SIG PBB-P2 | 300 objek pajak | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Data SIMPADA | 500 wajib pajak | | 0,50% | | | | |
| | | | | | | | Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Online | 100 wajib pajak | | | | | | |
| 8.2 | Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah | | | Kec. UH | | | Pemantauan SPTPD yang dikirim | 22.000 SPTPD | Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah | | 426,407,000 | 426,407,000 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan WP | 60 WP | | | | | | |
| | | | | | | | Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah baru | 500 WP | | | | | | |
| 8.3 | Penetapan Pajak Daerah | | | Kec. UH | | | WP BPHTB yang diteliti | 2000 WP | Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah | | 1,092,251,300 | 1,092,251,300 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | WP Hotel yang diperiksa secara lengkap | 140 WP | | 3300 WP | | | | |
| | | | | | | | WP Hotel yang diperiksa secara sederhana | 25 WP | | | | | | |
| | | | | | | | WP Restoran yang diperiksa secara lengkap | 110 WP | | | | | | |
| | | | | | | | WP Restoran yang diperiksa secara sederhana | 30 WP | | | | | | |
| | | | | | | | WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap | 20 WP | | 400 WP | | | | |
| | | | | | | | WP Hiburan yang diperiksa secara sederhana | 20 WP | | | | | | |
| | | | | | | | WP Parkir yang diperiksa secara lengkap | 20 WP | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|---------------------------------------|---|---------|--|--------------|---|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | WP Parkir yang diperiksa secara sederhana | 20 WP | | | | | | | |
| | | | | | | | WP yang dilakukan penilaian individu | 12 WP | | | | | | | |
| | | | | | | | WP yang dilakukan pendataan & penilaian massal (Kec.Ngampilan) | 4000 WP | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah | 9.500 Surat Ketetapan | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyampaian SPPT PBB-P2 | 95.000 SPPT PBB-P2 | | | | | | | |
| | Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 4,00% | | | | | | 3,645,758,955 | 3,645,758,955 | | |
| 9.1 | Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah | | | BPKAD | | | Tunggakan pajak daerah yang ditagih | 500 WP | Tercapainya realisasi tunggakan pajak daerah | | | 3,041,830,000 | 3,041,830,000 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Buku kendali wajib pajak yang dilaporkan | 84 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Surat Teguran Pajak Daerah yang dikirim ke WP | 3000 WP | | | | | | | |
| | | | | | | | Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah | 600 WP | | 0,50% | | | | | |
| | | | | | | | SPPT PBB-P2 yang ditagih | 7500 WP | | | | | | | |
| | | | | | | | WP yang mendapat pembinaan | 750 WP | | | | | | | |
| | | | | | | | WP yang mendapat kompensasi /Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran | 425 WP | | 279 WP | | | | | |
| | | | | | | | WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB | 325 WP | | 3240 WP | | | | | |
| | | | | | | | WP daerah yang mendapat penghargaan | 30 WP | | | | | | | |
| | | | | | | | WP yang mendapat penyuluhan | 3250 WP | | | | | | | |
| 9.2 | Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah | | | Kec. UH | | | Wajib pajak PBB yang terverifikasi | 4500 wajib pajak | Laporan WP PBB yang telah diverifikasi | 4500 wajib pajak | | 603,928,955 | 603,928,955 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame yang terverifikasi | 1000 wajib pajak | Laporan WP Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Reklame yang telah diverifikasi | 1000 wajib pajak | | | | | |
| | | | | | | | Laporan realisasi penerimaan pajak daerah | 24 dokumen | Laporan realisasi penerimaan pajak daerah | 24 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Telaah restitusi pajak daerah | 12 dokumen | Laporan telaah restitusi pajak daerah | 12 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Laporan jaminan bongkar reklame | 12 dokumen | Laporan jaminan bongkar reklame | 12 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Laporan realisasi tunggakan pajak daerah | 12 dokumen | Laporan realisasi penerimaan tunggakan pajak daerah | 12 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Perforasi karcis, tiket, bill dll | 27.000 buku | Laporan pengoperasian tiket, karcis dan bill dll | 27.000 buku | | | | | |
| | | | | | | | Pengoperasian komputer POS PBB | 62 KomputeAr | Laporan pengoperasian komputer POS PBB | 62 KomputeAr | | | | | |
| | | | | | | | Laporan rekonsiliasi PPJ dan PBB | 24 dokumen | Laporan Hasil Rekonsiliasi PPJ yang telah dicapai | 24 dokumen | | | | | |
| | Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | | | | | | | 5,498,250,940 | 5,498,250,940 | | |
| 10.1 | Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset | | | BPKAD | | | Dokumen RKBMD Pengadaan | 2 dokumen | RKBMD Pengadaan | 2 dokumen | | 2,118,222,500 | 2,118,222,500 | sedang berjalan | BPKAD |
| | | | | | | | Dokumen RKBMD Pemeliharaan | 2 dokumen | RKBMD Pemeliharaan | 2 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen RKBMD Pemanfaatan | 2 dokumen | RKBMD Pemanfaatan | 2 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen RKBMD Pemindahtanganan | 2 dokumen | RKBMD Pemindahtanganan | 2 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen RKBMD Penghapusan | 2 dokumen | RKBMD Penghapusan | 2 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Buku Agenda | 800 buah | Buku Agenda | 800 buah | | | | | |
| | | | | | | | Kalender | 10.000 eksemplar | Kalender | 10.000 eksemplar | | | | | |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor | 1 paket | Alat Tulis Kantor | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | | Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul | 1 paket | Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | | Gambar Walikota dan Wakil Walikota | 1 paket | Gambar Walikota dan Wakil Walikota | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | | Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Station wagon/minibus | 2 unit | Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Station wagon/minibus | 2 unit | | | | | |
| | | | | | | | Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Sepeda motor | 34 unit | Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Sepeda motor | 34 unit | | | | | |
| | | | | | | | Alat Kantor & Rumah Yanga Pemkot. Yogyakarta Perlengkapan Kantor | 1 paket | Alat Kantor & Rumah Yanga Pemkot. Yogyakarta Perlengkapan Kantor | 1 paket | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|--|-----------|----------------|---------|-------------------|---|-------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Barang Cetak | 4 paket | Barang Cetak | 4 paket | | | | | |
| 10.2 | Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset | | | Kec. UH | | Dedaktible klaim asuransi | 1 tahun | Terjaminnya resiko kerugian atas kerugian yang timbul | 1 tahun | 2,382,781,425 | 2,382,781,425 | sedang berjalan | BPKAD | |
| | | | | | | Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan | 1 paket | | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | Jasa asuransi bangunan gedung Kesehatan | 1 paket | | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | Jasa asuransi bangunan gedung Perekonomian | 1 paket | | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta | 1 paket | Terjaminnya resiko Kendaraan Milik Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | Penataan dan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah | 1 paket | Tertatanya Status Barang Milik Daerah | 1 paket | | | | | |
| | | | | | | Survey pemanfaatan barang daerah | 1 dokumen | Termanfaatkannya Barang Milik daerah | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | Distribusi barang stok /barang lama | 10 SKPD/ OPD | Terdistribusikannya Barang Stok/Barang lama | 10 SKPD/ OPD | | | | | |
| | | | | | | Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 1 dokumen | Tersedianya data optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | Penilaian Barang Milik Daerah | 1 dokumen | Terminalnya barang milik daerah | 1 dokumen | | | | | |
| 10.3 | Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan | | | Kec. UH | | Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta | 4 bangunan | Efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan barang daerah | 4 bangunan | 997,247,015 | 997,247,015 | sedang berjalan | BPKAD | |
| | | | | | | Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset | 44 SKPD/OPD | Penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD berbasis sistem informasi barang daerah | 44 SKPD/OPD | | | | | |
| | | | | | | Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit | 2 Dokumen | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi | 1 buku | | | | | |
| | | | | | | Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD | 44 SKPD/OPD | Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan barang daerah | 44 SKPD/OPD | | | | | |
| | | | | | | Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta | 2 kali | Kejelasan status kepemilikan dan pengamanan Barang Milik Daerah | 2 kali | | | | | |
| | | | | | | Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus | 1 dokumen | Terinventarisasinya barang milik daerah se-Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | Pemasangan dan penggantian papan nama OPD dan Papan R1HP yang rusak | 22 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Pelaksanaan Sensus Barang Daerah | 1 dokumen | Nilai Barang Persediaan Pemkot Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 21,507,222,791 | 1 21,507,222,791 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Sekretariat DPRD

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|---------------------------------------|---|------------------|-------------------|--|-------------------|---|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 10,418,504,939 | 11,460,355,434 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Sekretariat DPRD | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Frekuensi Koordinasi | 375 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 5,383,629,658 | 5,921,992,624 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai | 47 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 47 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | | Frekuensi Bimtek DPRD | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Frekuensi Adeksi DPRD | 3 kali | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 720 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 4,840,076,866 | 5,324,084,553 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 1200 buah | | | | | | |
| | | | | | | | | Frekuensi Jasa pengiriman / paket | 100 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 22 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 16 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 65 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Percetakan | 17 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Penggandaan | 500.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 34 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Pembayaran listrik dan telepon | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 9 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 18 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 64 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Tenaga Keamanan | 12 bulan | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Sekretariat DPRD | | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan - SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 194,798,415 | 214,278,257 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 47 ASN | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 6 orang | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 892,537,660 | 981,791,426 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Sekretariat DPRD | | | | Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat | 3 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 100,360,000 | 110,396,000 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Sekretariat DPRD | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 4 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 792,177,660 | 871,395,426 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat) | 18 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua) | 16 unit | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | | | | | 527,400,000 | 580,140,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Sekretariat DPRD | | | | Frekuensi diklat formal dan Asdeski yang diikuti | 74 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 527,400,000 | 580,140,000 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 56,725,000 | 62,397,500 | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|--------------------------------|--|------------------|---|--------|--|---|----------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Sekretariat DPRD | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 56,725,000 | 62,397,500 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil , LHKPN DPRD) | 6 dokumen | | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | BB | | | | |
| | Program Fasilitasi Penyusunan 5 Perundang-undangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Presentase Jumlah Produk Hukum yang dibahas | 100% | | | | | | 24,686,885,000 | 27,155,573,500 | | |
| | | | | | Persentase jumlah media publikasi informasi ke masyarakat | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Draft Raperda Prakarsa DPRD | 8 dokumen | | Naskah Akademik dan Draft Raperda Prakarsa DPRD | | | | | |
| | | | | | | | Draft Peraturan DPRD | 1 draft | | Rancangan Peraturan DPRD yang siap dibahas | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Draft Keputusan DPRD | 25 draft | | Keputusan DPRD | 25 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Draft Keputusan Pimpinan DPRD | 25 draft | | Keputusan Pimpinan DPRD | 25 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Draft Persetujuan Bersama | 20 draft | | Persetujuan Bersama | 20 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Pengkajian / Telaah Hukum | 15 telaah | | Kajian / telaahan yang disusun | 15 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Buku Peraturan Perundang-undangan | 30 buku | | Buku Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan | 30 buku | | | | |
| 5.2 | Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD | | | Kota Yogyakarta | | | Raperda yang mendapatkan Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD | 20 Raperda | | Raperda yang mendapatkan Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD ditindaklanjuti sampai Penetapan Perda | 20 Raperda | 19,285,175,000 | 21,213,692,500 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | Keputusan DPRD / Peraturan DPRD | 4 Keputusan DPRD/Peraturan DPRD | | Keputusan DPRD/Peraturan DPRD yang ditetapkan | 4 Keputusan DPRD/Peraturan DPRD | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Rencana Kerja DPRD | 2 Rencana Kerja | | Rencana Kerja DPRD | 2 Rencana Kerja | | | | |
| | | | | | | | Kajian ilmiah bid pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, kesejahteraan rakyat | 5 Kajian | | Dokumen Kajian | 5 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | Propemperda yang disusun | 1 Dokumen | | Propemperda | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | Buku Risalah Rapat Paripurna | 60 Risalah | | Risalah Rapat Paripurna yang tersusun | 60 Risalah | | | | |
| | | | | | | | Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD | 108 Catatan Hasil Rapat Alat kelengkapan DPRD | | Data hasil Rapat Alat Kelengkapan yang tersusun | 108 Dokumen | | | | |
| 5.3 | Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD | | | Kota Yogyakarta | | | Frekuensi Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif di Media Cetak | 6 kali | | Terpublikasikannya Draft Raperda dan Perda Inisiatif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat | 6 kali | 3,001,725,000 | 3,301,897,500 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | Frekuensi Publikasi kegiatan Dewan di media cetak | 40 kali | | Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui berbagai media massa | 99 kali | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Talkshow DPRD di Radio | 22 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Talkshow DPRD di Televisi | 21 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Kolom Khusus DPRD di media cetak | 16 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Plaquet cinderamata | 200 buah | | Plaquet cinderamata untuk tamu dan daerah kunjungan yang dituju | 200 buah | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Ucapan selamat di media cetak | 10 kali | | Profil DPRD tersampaikan ke masyarakat | 19 kali | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Greetings di Televisi | 6 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembuatan kalender DPRD | 4000 eks | | Publikasi kegiatan DPRD, gagasan dan profil DPRD melalui media kalender sampai ke masyarakat | 4000 eks | | | | |
| | | | | | | | Majalah DPRD | 4 edisi | | Publikasi kegiatan DPRD, gagasan dan profil DPRD melalui media majalah DPRD sampai ke masyarakat | 4 edisi | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Penerimaan tamu DPRD dan Sekretariat DPRD | 143 kali | | Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD mendapat informasi Program dan Kegiatan di DPRD dan Sekretariat DPRD | 143 kali | | | | |
| | | | | | | | Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan pengelola media sosial lainnya yang dikelola | 12 bulan | | Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media website, SIM Agenda Dewan dan Media Sosial lainnya | 12 bulan | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|--|--------------------------------|--|-----------------|---|--------|---|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | Program Fasilitasi Penganggaran dan 6 Pengawasan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Persentase Jumlah Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan | 100% | | | | | 19,591,295,000 | 21,550,424,500 | | |
| | | | | | Persentase Jumlah kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Raperda | Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Persetujuan Bersama | | | | |
| | | | | | | | Raperda APBD danPerubahan APBD | 2 Raperda | Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD dan Perubahan APBD | 2 Persetujuan Bersama | | | | |
| | | | | | | | Nota Kesepakatan KUAPPAS dan KUAPPAS Perubahan | 4 Nota Kesepakatan | Dokumen Nota Kesepakatan KUAPPAS dan KUAPPAS Perubahan | 4 Nota Kesepakatan | | | | |
| 6.2 | Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD | | | Kota Yogyakarta | | | Frekuensi Pengawasan Mitra Kerja Komisi | 163 kali | Laporan Pengawasan Mitra Kerja Komisi | 163 Laporan | 11,603,475,000 | 12,763,822,500 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota | 1 Rekomendasi | Keputusan DPRD atas LKPJ Walikota | 1 Keputusan | | | | |
| | | | | | | | Rekomendasi DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan | 4 Rekomendasi | Keputusan DPRD | 4 Keputusan | | | | |
| 6.3 | Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat | | | Kota Yogyakarta | | | Aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota Yogyakarta | 12 dokumen | Dokumen Aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota sebagai materi penyusunan perencanaan berikutnya | 12 dokumen | 4,633,795,000 | 5,097,174,500 | sedang berjalan | Sekretarit DPRD |
| | | | | | | | Frekuensi Audiensi | 48 kali | Aspirasi masyarakat yang terserap melalui Audiensi dengan DPRD | 48 Laporan | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Kaukus Perempuan | 2 kali | Aspirasi masyarakat yang terserap melalui Kaukus Perempuan | 2 Laporan | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Reses DPRD | 3 kali | Dokumen reses Sebagai masukan bagi perencanaan berikutnya | 3 Laporan | | | | |
| | | | | | | | Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD | 1 Pokir | Dokumen Pokir sebagai masukan bagi perencanaan berikutnya | 1 Pokir | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 56,173,347,599 | 61,790,682,360 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Bagian Hukum

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|--------------|---|--------|--|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 534,675,540 | 588,143,094 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Bagian Hukum | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 21 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran | 100% | 359,006,000 | 394,906,600 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk tamu dinas | 14 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 34 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Bagian Hukum | | | alat tulis kantor yang tersedia | 63 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 96,491,580 | 106,140,738 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 200 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 300 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 17 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bantuan Komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 surat kabar | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 yang terbayar | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 yang terbayar | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | jasa Penggandaan | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer | 10 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia | 14 buku | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Bagian Hukum | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 79,177,960 | 87,095,756 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 2 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 15 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 45,200,000 | 49,720,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Bagian Hukum | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | 4 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 45,200,000 | 49,720,000 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | 2 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | | | | | 18,000,000 | 19,800,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | Bagian Hukum | | | frekuensi bintek yang diikuti | 5 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 18,000,000 | 19,800,000 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | | | | | 41,464,000 | 41,464,000 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | UH | | | Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Pejerjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA | 6 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 41,464,000 | 41,464,000 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| | | | | | | | Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | BB | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|---|---------------------------------|--|--------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 5 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum | Kinerja aparaturn dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan | 60 produk hukum | | | | | 3,173,524,730 | 3,548,025,803 | | |
| | | | | | Jumlah Perda/Perwal yang Tersusun | 8 Raperda & 40 Perwal | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK | 8 perkara/sengketa | | | | | | | | |
| 5.1 | Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | | | DIY | | | Draft Raperda | 8 Raperda | Tersusunnya Produk Hukum Daerah | 448 produk hukum | 1,445,660,000 | 1,590,226,000 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| | | | | | | | Naskah Paripurna Raperda | 8 naskah | | | | | | |
| | | | | | | | Perwal | 40 perwal | Terpublikasikannya Raperda Ke Media Cetak | 5 Raperda | | | | |
| | | | | | | | Kepwal | 400 kepwal | | | | | | |
| | | | | | | | Analisis Perwal | 7 perwal | | | | | | |
| | | | | | | | Publikasi Raperda ke media cetak | 3 raperda | | | | | | |
| | | | | | | | Naskah Akademik Raperda | 3 Naskah Akademik | | | | | | |
| 5.2 | Layanan Bantuan Hukum | | | | | | Perkara/sengketa yang ditangani | 8 perkara | Terselesainya perkara/sengketa yang ditangani | 8 perkara | 1,018,740,000 | 1,177,762,600 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| | | | | | | | konsultasi hukum untuk masyarakat | 11 Bulan | Terdampinginya masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum | 11 Bulan | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai Ham yang terharmonisasi | 3 Raperda, 3 Raperwal | Tervujudnya nilai-nilai HAM dalam Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta | 3 Raperda, 3 Raperwal | | | | |
| 5.3 | Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah | | | DIY | | | Kejasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN | 11 Bulan | Terselenggaranya kerjasama pengembangan JDIH dengan BPHN | 11 Bulan | 709,124,730 | 780,037,203 | sedang berjalan | Bag. Hukum |
| | | | | | | | Database Produk Hukum Pemkot Yk | 1 program database | Terbentuknya database produk hukum Pemkot Yk | 1 program database | | | | |
| | | | | | | | Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah | 250 buku | Tersusunnya Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah | 250 buku | | | | |
| | | | | | | | Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina | 14 kecamatan | Terbinanya Anggota JDIH Pemkot Yk | 14 kecamatan | | | | |
| | | | | | | | Dokumen inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum | 1 dokumen | Inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum yang terdokumentasi | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Buku Saku Peraturan | 3300 buku | Tersusun dan tersampainya buku saku peraturan | 3300 buku | | | | |
| | | | | | | | Website Hukum yang dikelola | 1 website | Terinformasikannya produk hukum Pemkot Yk melalui website | 1 website | | | | |
| | | | | | | | Masyarakat Sadar Hukum yang dibina | 14 kecamatan | Terbinanya masyarakat sadar hukum | 14 kecamatan | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat | 6 kali sosialisasi | Terselenggaranya sosialisasi produk hukum kepada masyarakat | 4 kali sosialisasi | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat | 2 kali penyuluhan hukum | Terselenggaranya penyuluhan hukum | 2 kali penyuluhan hukum | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,812,864,270 | 4,247,152,897 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Inspektorat

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|-------------|---|--------|--|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 1,083,674,649 | 1,013,525,750 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Inspektorat | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 70 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 354,480,000 | 355,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai | 55 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu | 24kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 44 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Inspektorat | | | Materai 6000 yang tersedia, | 150 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 655,339,969 | 583,525,750 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia, | 450 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengiriman/paket | 15 kali | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yg terbayar | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yg terbayar | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan peralatan kebersihan yg tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 61 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 176,000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 9 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 14 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | peraturan per uu yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan surat kabar yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga keamanan | 3 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan taman | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran telepon dan komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan sarana prasarana kantor | 1 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Inspektorat | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi yg tersusun. | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 73,854,680 | 75,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 51 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelola arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 1 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 108,697,000 | 108,697,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Inspektorat | | | Jasa pemeliharaan Gedung/ bangunan kantor /tempat | 2 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 18,000,000 | 18,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Inspektorat | | | Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 4 | 4 unit | | 100% | 90,697,000 | 90,697,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 2 | 13 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur | 100% | | | | | 211,154,500 | 211,000,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Inspektorat | | | Frekuensi Diklat formal (Pengawasan) yang diikuti | 6 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 211,154,500 | 211,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya peningkatan Capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 36,365,250 | 37,000,000 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Inspektorat | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja,RKA,DPA, PK) | 6 dokumen | % kesesuaian (konsistensi) dokumen perenc, pengendalian dan penganggaran | 100% | 36,365,250 | 37,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|--------------------------------|--|-------------|---|--------|---|--------------------|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, SPIP, Pengkin, Eval renja | 6 jenis | Nilai akuntabilitas kinerja OPD | BB | | | | |
| 5 | Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | % tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan APIP | 80% | | | | | 265,044,563 | 265,000,000 | | |
| 5.1 | Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan | | | Inspektorat | | | Nilai kapabilitas APIP | Level 3 (3 elemen) | | | 265,044,563 | 265,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Sistem Prosedur Pengawasan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen PKPT | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Dok.Hasil Pemutakhiran data TLHP | 1 dokumen | Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan | 80% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Gelar Pengawasan Daerah | 2 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Statistik Pengawasan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Pendampingan Pemeriksaan Eksternal | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Mekanisme Pengawasan | 1 dokumen | | | | | | |
| 6 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | % rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur | 83% | | | | | 933,383,800 | 919,500,000 | | |
| 6.1 | Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | | | Kota Yk | | | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pemerintahan dan aparatur | 20 dokumen | %Tindak lanjut hasil pengawasan bid. Pem.aparatur | 80% | 296,104,800 | 300,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| 6.2 | Pembinaan Kepatuhan Aparatur | | | | | | Laporan Pemantauan Jalan Raya | 2 laporan | Kepatuhan aparatur meningkat | 10% | 637,279,000 | 619,500,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan rekapitulasi pemantauan LHKASN | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan SPIP | 1 lap evaluasi | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi | 2 lap evaluasi | | | | | | |
| | | | | | | | laporan PMPRB online | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Lap. Monitoring eval. PPK | 4 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian gratifikasi | 2 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan pembangunan ZIWBK (Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi) | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi) | 12 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Satgas Saber Pungli | 11 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | laporan hasil Whistle Blower System | 1 laporan | | | | | | |
| 7 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | % rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset | 83% | | | | | 465,824,000 | 466,264,000 | | |
| 7.1 | Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset | | | Kota Yk | | | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangan dan aset | 20 dokumen | %Tindak lanjut hasil pengawasan bid keu dan aset | 80% | 276,264,000 | 276,264,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| 7.2 | Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan | | | | | | Laporan hasil reviu LKPD | 2 laporan | %Tindak lanjut hasil Reviu Keu dan aset | 80% | 189,560,000 | 190,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran 1 ahunan Daerah | 2 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Reviu Penyerapan Anggaran | 4 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan stock opname | 1 Dokumen | | | | | | |
| 8 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | % rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Fisik | 83% | | | | | 315,519,000 | 305,000,000 | | |
| 8.1 | Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik | | | Kota Yk | | | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan fisik | 20 dokumen | %Tindak lanjut hasil pengawasan bid pembd fisik | 75% | 286,264,000 | 275,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| 8.2 | Review Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | Laporan hasil reviu PBJ | 4 laporan | %Tindak lanjut hasil Reviu PBJ | 75% | 29,255,000 | 30,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Laporan hasil monitoring PBJ | 4 laporan | %Tindak lanjut hasil monitoring PBJ | 75% | | | | |
| 9 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | % rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya | 83% | | | | | 486,671,200 | 475,000,000 | | |
| 9.1 | Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya | | | Kota Yk | | | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan sosial ekonomi budaya | 20 dokumen | %Tindak lanjut hasil pengawasan bid pemb. sosekbud | 80% | 276,264,000 | 265,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| 9.2 | Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja | | | | | | Lap evaluasi SAKIP | 51 LHE | % OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP kategori B ke atas | 75% | 210,407,200 | 210,000,000 | sedang berjalan | Inspektorat Kota Yk |
| | | | | | | | Juklak evaluasi SAKIP | 1dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Juklak Reviu laporan kinerja | 1dokumen | %Tindak lanjut hasil Reviu akuntabilitas kinerja | 80% | | | | |
| | | | | | | | Laporan reviu capaian kinerja | 4 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil reviu Lap kinerja Pem Kota | 1 laporan | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Notisi Hasil Revie LKJ | | 4 dokumen | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,906,333,962 | 3,800,986,750 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kantor Kesatuan Bangsa

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|-------------------|---|------------------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik | 3 bentuk kegiatan | | | | | | 376,896,421 | 412,586,000 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kota Yogyakarta | | | Makan minum yang tersedia untuk koordinasi | 48 kali | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik | 100% | 125,590,000 | 138,149,000 | sedang berjalan | Kantor Kesatuan Bangsa | |
| | | | | | | | Makan minum yang tersedia untuk tamu | 24 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah | 15 dokumen | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kota Yogyakarta | | | Materi 6000 yang tersedia | 75 lembar | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik | 100% | 181,827,750 | 198,010,500 | sedang berjalan | Kantor Kesatuan Bangsa | |
| | | | | | | | Materi 3000 yang tersedia | 250 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 10 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 53 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 1 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 135.000 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang tersedia | 7 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen printer yang tersedia | 8 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia | 2 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 10 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-ndangan yang tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja | 12 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kota Yogyakarta | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi) yang tersusun | 5 jenis | Terwujudnya administrasi keuanagn | 100% | 69,478,671 | 76,426,500 | sedang berjalan | Kantor Kesatuan Bangsa | |
| | | | | | | | Dokumen admionistrasi kepegawaian yang terkelola | 15 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terpenuhihnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 2 bentuk kegiatan | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 81,905,000 | 90,095,500 | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | Kota Yogyakarta | | | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat | 1 unit gedung / kantor | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 20,000,000 | 22,000,000 | sedang berjalan | Kantor Kesatuan Bangsa | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kota Yogyakarta | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional roda 4 | 2 unit | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 61,905,000 | 68,095,500 | sedang berjalan | Kantor Kesatuan Bangsa | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional roda 2 | 2 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terpenuhihnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 2 bentuk kegiatan | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 15,000,000 | 16,500,000 | | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Kota Yogyakarta | | | Diklat Formal dan Non Formal | 5 paket | SDM Aparatur meningkat | 100% | 15,000,000 | 16,500,000 | sedang berjalan | Kantor Kesatuan Bangsa | |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | | | Terbangunnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik | 1 bentuk kegiatan | | | Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat | | 12,650,000 | 13,915,000 | | | |
| 4.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kota Yogyakarta | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | | 100% | 12,650,000 | 13,915,000 | sedang berjalan | Kantor Kesatuan Bangsa | |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan Itisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung jawab | |
|--------------|---|--------------------------------|--|-----------------|--|--------|--|---------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 5 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat | | | | | Kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di masyarakat | 3 kegiatan | 1,194,601,164 | 1,304,000,000 | | |
| 5.1 | Pemantapan Wawasan Kebangsaan | | | Kota Yogyakarta | | | Frekuensi Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat | 10 kali | | Menurunnya konflik sosial di masyarakat | 100% | 1,194,601,164 | 1,304,000,000 | | |
| | | | | | | | Peringatan Serangan Umum 1 Maret | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda) Kota Yogyakarta | 24 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta | 7 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pengawasan Orang Asing (PORA) | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta | 13 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Koordinasi Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta | 18 kali | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 1,681,052,585 | 1,837,096,500 | | | |

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|-------------------|---|--------|--|---|---|--------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | k | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 649,082,757 | 681,536,895 | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Umbulharjo | | | makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 49 kali | dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 273,628,000 | 287,309,400 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | makan dan minum yang tersedia untuk tamu | 25 orang | | | | | | |
| | | | | | | | makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 23 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | 21 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Umbulharjo | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 61 jenis | dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 266,206,966 | 279,517,314 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 9 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 620 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 21 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 25 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 surat kabar | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengiriman/paket | 21 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 yang terbayar | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 yang terbayar | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | jasa percetakan | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 309,933 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer | 2 mesin ketik, 10 komputer/laptop, 5 AC, 2 Kipas angin, 8 printer | | | | | | |
| | | | | | | | buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia | 8 buku | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Umbulharjo | | | dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 109,247,791 | 114,710,181 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 50 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga bantuan | 3 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 48,958,500 | 51,406,425 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Bagian Organisasi | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) | 2 unit | | | 48,958,500 | 51,406,425 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) | 3 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | | | | | 25,000,000 | 26,250,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Bagian Organisasi | | | frekuensi diklat formal yang diikuti | 5 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 25,000,000 | 26,250,000 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 41,628,000 | 43,709,000 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Bagian Organisasi | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (renstra, renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 41,628,000 | 43,709,000 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | nilai akuntabilitas kinerja SKPD | BB | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|--------------------------------|--|---------|---|--------|---|--|---|--|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 5 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | persentase implementasi indikator standar pelayanan yang tercapai | 70% | | | | 3,578,084,015 | 3,756,988,216 | | | |
| 5.1 | Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur | | | Kec. UH | | | -Laporan Pembinaan Analisa Jabatan | 1 dokumen laporan | sebagai bahan penataan kelembagaan, penataan pegawai, dan penyusunan formasi | 100% | 846,675,415 | 889,009,186 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | -Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Penyelarasan hasil Analisa Jabatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | - Laporan Analisa jabatan evaluasi dinas | 21 OPD/ unit kerja | | | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan | 13 OPD/unit kerja | sebagai bahan penataan kelembagaan, penataan pegawai, dan penyusunan formasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan | 14 OPD/unit kerja | | | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Analisa Jabatan Komprehensif | 12 OPD / unit kerja | | | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Evaluasi Jabatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | - Laporan analisa jabatan fungsional tertentu | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | - Laporan informasi jabatan badan, Setda dan Setwan | 15 OPD/Unit Kerja | | | | | | |
| | | | | | | | - Laporan Pengembangan Aparatur | 1 dokumen | bahan penataan, pengembangan dan pendayagunaan aparatur | 100% | | | | |
| | | | | | | | - Laporan Implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja | 2 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | - Laporan evaluasi pola karier | 1 dokumen | | | | | | |
| 5.2 | Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas | | | Kec. UH | | | draft perwal/kepwal sistem & prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah | 1 draft perwal/kepwal | pengembangan sistem & prosedur ketatalaksanaan | 1 dokumen | 1,609,323,185 | 1,689,789,344 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota | 2 kali penyelenggaraan | Pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur daerah | 2 kali penyelenggaraan | | | | |
| | | | | | | | Workshop Hospitality Management | 1 kali penyelenggaraan | Diseminasi Informasi Hospitality Management | 1 kali penyelenggaraan | | | | |
| | | | | | | | Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa | 1 draft perwal | Penerapan standarisasi harga barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 draft perwal | | | | |
| | | | | | | | Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja | 1 draft perwal | Penerapan analisa standar belanja di Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 draft perwal | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pendampingan penyusunan SOP | SOP 45 kelurahan | kesesuaian SOP dengan tupoksi | SOP 45 kelurahan | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pendampingan Tatalaksana | 15 OPD/unit kerja | Kesesuaian Penyusunan Ketatalaksanaan dengan tupoksi Fungsi OPD | 15 OPD/unit kerja | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pembinaan Pelayanan Publik | 1 dokumen | Bahan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan publik | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik | 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik | sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik SKPD/unit kerja | 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pendampingan SPP | 1 OPD/Unit Kerja | peningkatan pelayanan OPD/unit kerja | 1 OPD/Unit Kerja | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|---------|-------------------|--------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM | 2 laporan pencapaian SPM | Pencapaian target SPM sesuai yang telah ditetapkan sehingga terjadi peningkatan pelayanan OPD/unit kerja | 2 laporan pencapaian SPM | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti | 1 kali | Partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan | 1 Dokumen pelayanan perizinan | Grand Design pelayanan perizinan | 1 Dokumen pelayanan perizinan | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta | 1 Dokumen | sebagai bahan rekomendasi kebijakan SKM | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD | 2 Dokumen | sebagai capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dan peningkatan capaian akuntabilitas OPD | 2 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja | 2 dokumen | kinerja akuntabilitas yang diukur Pemerintah Kota Yogyakarta dan OPD | 2 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Laporan Move pengukuran capaian perjanjian kinerja | 1 dokumen | bahan monitoring capaian kinerja akuntabilitas Kota Yogyakarta dan OPD | 1 dokumen | | | | |
| 5.3 | Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah | | | Kec. UH | | | - Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD | 1 dokumen | kapasitas kelembagaan yang rightsizing | 100% | 1,122,085,415 | 1,178,189,686 | sedang berjalan | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | - Dokumen evaluasi kelembagaan Pengelolaan Taman Hutan dan pasar | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | - Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | - Laporan evaluasi rincian tugas Dinas | 1 dokumen | penjabaran tugas dan fungsi sesuai dengan urusan | 100% | | | | |
| | | | | | | | - Laporan evaluasi rincian tugas Setda dan Setwan | 1 dokumen | | 100% | | | | |
| | | | | | | | - Laporan evaluasi rincian tugas Badan,Inspektorat, Kecamatan | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi | 1 laporan | rekomendasi penyempurnaan SIM Aplikasi Organisasi | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | -Dokumen Kajian Kelembagaan | 1 dokumen kajian | rekomendasi kebijakan peningkatan kelembagaan | 1 dokumen kajian | | | | |
| | | | | | | | -Laporan penataan kelembagaan UPT | 1 dokumen | kelembagaan UPT yang rightsizing | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area manajemen perubahan | 1 dokumen | rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area manajemen perubahan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan organisasi | 1 dokumen | rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan organisasi | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan | 1 dokumen | rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan | 1 dokumen | rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik | 1 dokumen | rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik | 1 dokumen | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--|-------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| | | | | | | -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area akuntabilitas | 1 dokumen | rekomen-dasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area akuntabilitas | 1 dokume-n | | | | | |
| | | | | | | -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area pengawasan | 1 dokumen | rekomen-dasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area pengawasan | 1 dokume-n | | | | | |
| | | | | | | -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area Penataan dan managemen SDM Aparatur | 1 dokumen | rekomen-dasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan dan managemen SDM Aparatur | 1 dokume-n | | | | | |
| | | | | | | -Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi | 1 dokumen | peningkatan kinerja organisasi | 1 dokume-n | | | | | |
| | | | | | | -Laporan Kajian Kebijakan | 1 dokumen | rekomen-dasi kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 dokume-n | | | | | |
| | | | | | | -Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan | 1 dokumen | rekomen-dasi peningkatan kualitas kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 dokume-n | | | | | |
| | | | | | | -Laporan Pengukuran Indeks Administrasi Pemerintahan yang baik | 1 dokumen | rekomen-dasi peningkatan kualitas pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 dokume-n | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 4,342,753,272 | 4,559,890,536 | | | |

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|--|--------|--|--------|--|----------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | 100% | | | | | | 491,391,110 | 500,000,000 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | UH | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 44 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran | 100% | 216,058,000 | 200,000,000 | sedang berjalan | P3ADK | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 21 pegawai | | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk tamu | 18 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 20 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 300 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran | 100% | 164,699,150 | 200,000,000 | sedang berjalan | P3ADK | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 175 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengiriman/paket | 2 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 2 kendaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 4 kendaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 9 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 1 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 34 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 120.000 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 6 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 2 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 7 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 14 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 1 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan taman | 6 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 4 jenis | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran | 100% | 110,633,960 | 100,000,000 | sedang berjalan | P3ADK | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 20 dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 3 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelolaan arsip | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | | | | | 100,007,140 | 195,000,000 | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | UH | | | Jasa pemeliharaan gedung pemerintah | 1 paket | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD | 100% | 30,800,000 | 120,000,000 | sedang berjalan | P3ADK | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 | 2 buah | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD | 100% | 69,207,140 | 75,000,000 | sedang berjalan | P3ADK | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 | 4 buah | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | 100% | | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | UH | | | Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti | 4 kali | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | sedang berjalan | P3ADK | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|--------------------------------|--|--------|--|-----------------|---|--|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | 100% | | | | 28,845,000 | 30,000,000 | | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | UH | | | Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil) | | 28,845,000 | 30,000,000 | sedang berjalan | P3ADK | |
| | | | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA,DPA) | 6 jenis laporan | | | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Target Pendapatan Asli Daerah | 473 Miliar | | | 100% | 2,554,900,640 | 1,313,695,884 | | | |
| 5.1 | Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | UH | | | Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 1 dokumen | Tersedianya Data Target Pendapatan Asli Daerah | 100% | 674,143,800 | 500,000,000 | Baru | P3ADK |
| | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah Th 2018 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah Th 2018 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Rencana Target Perubahan Lain-lain PAD yang sah th 2018 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Rencana Target pajak Daerah th 2019 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah th 2019 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Rencana Target Lain-lain PAD yang sah th 2019 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Studi/kajian Perekonomian | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Update Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Update Data Perekonomian Daerah | 1 dokumen | | | | | | |
| 5.2 | Pembinaan BUMD dan BLUD | | | | | | Data Pendapatan BLUD | 1 dokumen | Tersedianya Data Pendapatan BLUD dan BUMD | 100% | 625,781,840 | 413,695,884 | sedang berjalan | P3ADK |
| | | | | | | | Data Pendapatan BUMD | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Updating Laporan Kinerja BUMD | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan pendukung Kebijakan BLUD | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Pendukung Kebijakan BUMD | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi BLUD | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi BUMD | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2018 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2019 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Rencana Target Bagi Hasil Pendapatan BUMD Tahun 2019 | 1 rencana target | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan data SIM BLUD | 1 data BLUD | | | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan data SIM BUMD | 1 data BUMD | | | | | | |
| 5.3 | Kerjasama Daerah | | | | | | Kajian/telaah rencana kerjasama daerah | 50 kajian/telaah | Tersedianya Data kerjasama baik dan baik untuk ditingkatkan | 100% | 1,254,975,000 | 400,000,000 | sedang berjalan | P3ADK |
| | | | | | | | Penawaran kerjasama daerah | 2 penawaran | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen kerjasama daerah | 50 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Updating sistem informasi kerjasama daerah | 24 update | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan | 1 dokumen | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris | 10 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC | 10 koordinasi | | | | | | | |
| | | | | | | Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC | 4 iuran | | | | | | | |
| | | | | | | Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018 | 1 kali | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 3,195,143,890 | 2,058,695,884 | | | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Bagian Layanan Pengadaan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-Jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|--------|--|--------|---|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 519,038,885 | 544,990,829 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | BLP | | | Makan dan Minum yang tersedia Untuk koordinasi | 33 Kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 74,614,000 | 78,344,700 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| | | | | | | | Makan dan Minum yang tersedia Untuk pegawai | 32 Orang | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan Minum yang tersedia Untuk tamu | 22 Kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 6 Laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | BLP | | | Materai 3000 yang tersedia | 600 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 281,710,525 | 295,796,051 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 100 buah | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 Yang terbayar | 4 Unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 Yang terbayar | 2 Unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 18 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Kebersihan Kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 70 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Percetakan | 1 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 30,000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Sewa Mesin Foto Copy | 1 Unit | | | | | | |
| | | | | | | | komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia | 2 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 20 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Perbaikan peralatan kerja | 5 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia | 3 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan pAeralatan dan perlengkapan kantor | 2 Kali | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia | 2 Jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga tersedia | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bantuan komunikasi | 12 Bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia | 2 Jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | BLP | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 Jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 162,714,360 | 170,850,078 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| | | | | | | | Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola | 32 Dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 Orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 5 Orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 413,556,000 | 434,233,800 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | BLP | | | Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat | 1 Jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 360,250,000 | 378,262,500 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 | 2 Unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 53,306,000 | 55,971,300 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 | 4 Unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 76,400,000 | 80,220,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | BLP | | | Frekuensi Diklat Formal yang diikuti | 6 Kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 76,400,000 | 80,220,000 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | | | | | | 100% | 36,630,000 | 38,461,500 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | BLP | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 36,630,000 | 38,461,500 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD/LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|--------------------------------|--|---------|--|--------|--|------------|---|--------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 5 | Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Prosentase Paket Pengadaan melalui pelelangan terlaksana secara efisien akuntabel dan professional berbasis teknologi informasi 100% | 100% | | | | | 1,706,270,029 | 1,791,583,531 | | |
| 5.1 | Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa | | | Kec. UH | | | Aplikasi SPSE yang terkendali | 1 laporan | Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE | 100% | 377,715,897 | 396,601,692 | | |
| | | | | | | | Laporan Pendampingan SIRUP | 1 laporan | Terwujudnya kelancaran dalam entry SIRUP | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pendampingan Institusi | 1 laporan | Terwujudnya kelancaran implementasi SPSE | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk | 1 laporan | Terwujudnya kemudahan implementasi SPSE kepada Penyedia Barang/Jasa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Implementasi Surveillance ISO | 1 laporan | Terlaksananya implementasi ISO | 100% | | | | |
| | | | | | | | Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi | 1 Laporan | Terwujudnya Laporan/Verifikasi Berkas | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa | 1 Laporan | Terselenggaranya Pelatihan Penyedia/Institusi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan | 1 Aplikasi | Terwujudnya pengembangan aplikasi layanan pengadaan | 100% | | | | |
| 5.2 | Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | | | Kec. UH | | | Laporan Pendampingan RPP dan RUP | 1 Laporan | Terselenggaranya Pendampingan RPP dan RUP | 100% | 890,192,216 | 934,701,827 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| | | | | | | | Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah | 1 Laporan | Terwujudnya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah | 1 Laporan | Meningkatnya Pengelolaan Proses Pelelangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan ULP Percontohan | 1 Laporan | Meningkatnya Pengembangan ULP Percontohan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Analisa Survey | 1 Laporan | Terwujudnya Analisa Survey | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan SOP Pengadaan | 1 Laporan | Tersusunnya SOP Pengadaan Barang/Jasa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang | 1 dokumen | Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang | 100% | | | | |
| 5.3 | Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa | | | Kec. UH | | | Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan | 1 laporan | Terdokumentasikan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan | 100% | 438,361,916 | 460,280,012 | sedang berjalan | Bagian Layanan Pengadaan |
| | | | | | | | Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa | 1 laporan | Terselenggaranya Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Manajemen Resiko Pengadaan | 1 laporan | Terwujudnya Laporan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan | 1 laporan | Terdokumentasikan aktifitas peningkatan kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa | 1 Dokumen | Tersusunnya Strategi Pengadaan Barang/Jasa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa | 1 Dokumen | Tersusunnya Perwal tentang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah | 100% | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 2,751,894,914 | 2,889,489,660 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Bagian Protokol

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|--------------|--|--------------------------------|--|-----------------|---|--------|-------------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 1,363,755,100 | 1,431,942,855 | | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Bagian Protokol | | | | Koordinasi dan konsultasi luar daerah | 50 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 454,144,000 | 476.851,200 | sedang berjalan | Bagian Protokol |
| | | | | | | | | Makan dan minum pegawai | 41 orang | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Bagian Protokol | | | | Alat tulis kantor yng tersedia | 70 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 620,108,500 | 651,113,925 | sedang berjalan | Bagian Protokol |
| | | | | | | | | Materai 6000 | 650 buah | | | | | | |
| | | | | | | | | Materai 3000 1000 buah | 1000 buah | | | | | | |
| | | | | | | | | Perangko | 70 buah | | | | | | |
| | | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 17 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 9 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Pengiriman | 15 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 14 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 8 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | Cetak | 3.695 eks dan 26 box | | | | | | |
| | | | | | | | | Penggunaan | 45.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | | Jilid | 50 jilid | | | | | | |
| | | | | | | | | Sewa mesin fotokopi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Kelengkapan Pakaian dinas walikota dan wakil walikota | 4 buah | | | | | | |
| | | | | | | | | Servis HT | 10 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja modal | 8 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | | | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 289,502,600 | 303,977,730 | sedang berjalan | Bagian Protokol |
| | | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 41 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 9 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 342,693,750 | 359,828,438 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Bagian Protokol | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4(empat) | 14 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 342,693,750 | 359,828,438 | sedang berjalan | Bagian Protokol |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2(dua) | 8 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | 44,220,000 | 46,431,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Bagian Protokol | | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 44,220,000 | 46,431,000 | sedang berjalan | Bagian Protokol |
| | | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM) | 4 dokumen | Tersedianya dokumen kinerja | 100% | | | | |
| 4 | Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Persentase Pimpinan dan Tamu yang Menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan | 79 | | | | | | 1,963,119,200 | 2,061,275,160 | | |
| 4.1 | Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota | | | Kota Yogyakarta | | | | Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja | 300 kali | Terlaksananya pemanduan kegiatan kepala daerah | 100% | 243,260,800 | 255,423,840 | sedang berjalan | Bagian Protokol |
| | | | | | | | | Frekuensi Penerimaan Audiensi dan silaturahmi | 296 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga | 8 orang | | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta | | | Kota Yogyakarta | | | | Frekuensi Apel dan Upacara | 13 kali | Terselenggaranya Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta | 100% | 1,376,192,900 | 1,445,002,545 | sedang berjalan | Bagian Protokol |
| | | | | | | | | Frekuensi Latihan Korps musik | 20 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta | 200 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Frekuensi Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta | 45 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah | 580 naskah | | | | | | |
| 4.3 | Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta | | | Kota Yogyakarta | | | | Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli | 176 kali | Terselenggaranya pemanduan dan rapat Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli | 100% | 343,665,500 | 360,848,775 | sedang berjalan | Bagian Protokol |
| | | | | | | | | Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli | 240 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli | 70 kali | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 3,713,788,050 | 3,899,477,453 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|-----------------|---|--------|---|------------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 562,559,744 | 615,212,851 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 22 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 337,304,000 | 371,034,400 | sedang berjalan | Bag. Tapem |
| | | | | | | | makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walkota | 10 kali | | | | | | |
| | | | | | | | makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 16 orang | | | | | | |
| | | | | | | | makan dan minum yang tersedia untuk tamu | 5 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | 21 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | 5 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | - Penyediaan materai 6000 | 457 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 153,198,400 | 168,518,240 | sedang berjalan | Bag. Tapem |
| | | | | | | | - Penyediaan materai 3000 | 599 buah | | | | | | |
| | | | | | | | - STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | - Pemeliharaan gedung pemerintah | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | - Jasa perbaikan peralatan kerja | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | - Alat Tulis Kantor yang tersedia | 33 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | - Bantuan komunikasi kepala | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | - Penyediaan barang cetakan | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | - Penyediaan penggandaan | 80.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 7 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | | | | - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan laporan akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 72,057,344 | 75,660,211 | sedang berjalan | Bag. Tapem |
| | | | | | | | - Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola | 18 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | - Jasa Tenaga bantuan | 2 orang | | | | | | |
| | | | | | | | - Jasa pengelola kearsipan | 1 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | | | | | | | | | 62,123,000 | 68,000,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat | 2 unit | | 100% | 62,123,000 | 68,000,000 | sedang berjalan | Bag. Tapem |
| | | | | | | | asa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda dua | 3 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | | x | | | | | | | 37,300,000 | 39,165,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | | | | Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 5 dokumen | Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 37,300,000 | 39,165,000 | sedang berjalan | Bag. Tapem |
| | | | | | | | Laporan Kinerja SKPD, Laporan Keuangan dan Isik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun | 5 jenis laporan | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | Ketepatan waktu penyusunan laporan | 100% | | | | | 4,444,295,153 | 4,600,706,489 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | Kota Yogyakarta | | | Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya | 4 buku, 600 eksp | tenormaskannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD | 100% | 747,435,898 | 822,000,000 | sedang berjalan | Bag. Tapem |
| | | | | | | | Dokumen Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA.2017 | 1 dokumen | tersusunnya penjelasan rekomendasi atas LKPJ TA. 2017 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017 | 1 buku, 65 eksp | tenormaskannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda Tahun 2017 | 100% | | | | |
| | | | | | | | ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016 | 1 dokumen | tenormaskannya ILPPD melalui media massa kepada masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah anggota Forpi yang difasilitasi | 6 orang | terlaksananya pemantauan pakta integritas | 100% | | | | |
| | | | | | | | Buku toponimi | 25 eksp | inventarisasi unsur buatan toponimi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pathok batas antar kota dan kabupaten yang terpelihara | 50 buah | terpeliharanya pathok batas wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peta Administrasi Kelurahan yang tercetak | 22 kelurahan | kejelasan batas wilayah administrasi antar kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Papan Batas Wilayah yang terpelihara | 15 buah | kejelasan batas wilayah administrasi antar kota dan kabupaten | 100% | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan | | | Umbulharjo | | | Dokumen Money Pelaksanaan Urusan Pemda | 1 dok | Adanya Dukungan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan UPD | 3 dok | 3,170,762,446 | 3,200,000,000 | sedang berjalan | Bag. Tapem |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|--|-----------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 | 1 dok | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah | 1 dok | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat | 1 dok | Adanya Laporan Monev Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota | 1 dok | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi sosialisasi Perwal Pelimpahan Kewenangan | 1 kali | Dukungan terhadap peningkatan pelaksanaan Pelimpahan kewenangan sesuai peraturan yang ada | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan | 1 dok | Adanya Dukungan bahan Pertimbangan Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan | 1 dok | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi bimbingan teknis Pendampingan Teknis pelimpahan Kewenangan | 1 kali | Dukungan peningkatan terhadap kualitas petugas teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | .Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta | 2 buku | Penyediaan bahan dan data perencanaan pembangunan masyarakat di Tingkat Kelurahan | 2 dokumen (semester I dan II) | | | | |
| | | | | | | | Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta | 1 dok | Penyediaan data potensi, perkembangan dan data dasar keluarga berbasis Kelurahan | 1 dok | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi rakor Camat dan lurah | 12 kali | Pemanfaatan hasil rakor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan | 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan | | | | |
| | | | | | | | SIM Pelayanan kecamatan dan kelurahan yang di upgrade | 1 SIM | Peningkatan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kecamatan dan Kelurahan | 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan | | | | |
| | | | | | | | Laporan evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta | 1 laporan | Penetapan status tertentu dari capaian hasil perkembangan Kel | 45 Kelurahan | | | | |
| | | | | | | | | | Penyediaan bahan dan data pengembangan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan berbasis Kel | 6 Kelurahan | | | | |
| | | | | | | | frekuensi pelepasan, pengenalan kepengurusan lembaga RT, RW, dan LPMK se-Kota Yogyakarta | 1 kali | Termanfaatkannya hasil pemilihan kepengurusan kelembagaan RT dan RW sebagai bahan untuk penguatan kapasitas kelembagaan RT dan RW | 45 Kelurahan | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW masa bakti 2018-2021 | 1 kali | | | | | | |
| 4.3 | Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat | | | Kota Yogyakarta | | | Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji | 1 dokumen | Terwujudnya pendampingan pelaksanaan ibadah haji | 1 dokumen | 526,096,809 | 578,706,489 | sedang berjalan | Bag. Tapem |
| | | | | | | | Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan | 1 dokumen | Terwujudnya pendampingan kegiatan keagamaan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pemanjatan Nasionalisme Umas dan Organisasi Keagamaan | 1 dokumen | Terwujudnya Penguatan Kelembagaan bagi Umas dan Organisasi Keagamaan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 5,106,277,897 | 5,323,084,340 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Bagian Umum

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|--|-------------|---|--------|--|------------------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | | | | | | 647,323,025 | 712,055,328 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Bagian Umum | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 35 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 32,098,000 | 35,307,800 | sedang berjalan | Bagian Umum | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 44 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 76 Jenis | | 100% | 320,258,525 | 352,284,378 | sedang berjalan | Bagian Umum | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 17 Jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 200 Buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 500 Buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 22 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jenis BBM dan pelumas genset | 5 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Komputer dan Printer yang tersedia | 13 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia | 2 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 6 yang terbayar | 1 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 8 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 7 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 5 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengandaan | 85.000 Lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan kerumah tanggaan | 8 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Belanja bahan/ bibit tanaman | 8 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan kerja | 1 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Mesin pompa air | 2 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Tangga lipat | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Notebook | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Kursi rapat | 50 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Meja TV LED | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Mic | 5 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Mesin Fax | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Dispenser | 1 unit | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 294,966,500 | 324,463,150 | sedang berjalan | Bagian Umum | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 35 dokumen kepegawaian | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 5 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | | | | | | 189,224,000 | 208,146,400 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Bagian Umum | | | Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat | 2 unit gedung | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 50,250,000 | 55,275,000 | sedang berjalan | Bagian Umum | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Bagian Umum | | | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 6 (enam) | 1 Unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 138,974,000 | 152,871,400 | sedang berjalan | Bagian Umum | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (empat) | 8 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua) | 7 Unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | | | | | | 43,586,400 | 47,945,040 | | |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Bagian Umum | | | Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun | 5 dokumen | tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 43,586,400 | 47,945,040 | sedang berjalan | Bagian Umum | |
| | | | | | | | Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|--------------------------------|--|-------------|--|--------|---|----------------------|----------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan | Kinerja aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. | | terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | 73 | | | | | 3,080,551,556 | 3,388,606,712 | | |
| 4.1 | Pelayanan Kerumahtanggaan | | | Bagian Umum | | | Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah | 1 Dokumen | Indeks Kepuasan Masyarakat | 73 | 2,321,932,896 | 2,554,126,186 | sedang berjalan | Bagian Umum |
| | | | | | | | Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta | 10 Lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar | 2 Lokasi Almari | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | 2 Lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing | 1 Kompleks Balaikota | | | | | | |
| | | | | | | | Almari | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | TV | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Meja Rapat Lipat | 20 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Kursi Kerja | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Kursi Hadap | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Kursi Rapat | 24 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Kasur spring bed | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Kasur lipat | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Dispenser | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Mesin Coffee Maker | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jam Dinding | 9 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Gorden | 2 Lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Cover kursi | 4 set | | | | | | |
| 4.2 | Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah | | | Bagian Umum | | | Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda | 1 Dokumen | Indeks Kepuasan Masyarakat | 73 | 635,714,160 | 699,285,576 | sedang berjalan | Bagian Umum |
| | | | | | | | Laporan Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Betanja Setda | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah | 1 Dokumen | | | | | | |
| 4.3 | Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | | | Bagian Umum | | | Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 Dokumen | Indeks Kepuasan Masyarakat | 73 | 122,904,500 | 135,194,950 | sedang berjalan | Bagian Umum |
| | | | | | | | Laporan Pengolahan, Penilaian dan Penyusunan Arsip Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta | 3 Dokumen | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 3,960,684,981 | 4,356,753,480 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-Jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|---|-------------------|---|----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | | | | | 5,513,897,306 | 5,875,103,056 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kecamatan Gondokusuman | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 208 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 343,222,000 | 363,222,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | | Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi | 88 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Makan dan minum harian umum | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 50 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 2182 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 3,408,632,250 | 3,649,838,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 2090 buah | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya | 8 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya | 10 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya | 5 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya | 30 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya | 8 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya | 6 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 96 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Percetakan | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Penggandaan | 400.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | | komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 24 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 37 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 63 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kecamatan Gondomanan | | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 1,762,043,056 | 1,862,043,056 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 50 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 73 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Meningkat | | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 674,478,150 | 674,478,150 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kecamatan Gondomanan | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 53 unit | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 674,478,150 | 674,478,150 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 100% | | | | | 40,000,000 | 46,000,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Kecamatan Gondomanan | | | | Kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 10 orang | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 40,000,000 | 46,000,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 149,538,500 | 159,538,500 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kecamatan Gondomanan | | | | Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun | 6 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 149,538,500 | 159,538,500 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | | Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun | 4 dokumen | Nilain Akuntabilitas Kinerja SKPD | BB | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|--|------------|--|-----------|---|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 5 | Program Pembinaan Perindustrian | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi bagi IKM | 80% | | | | | 4,666,820,200 | 4,716,820,200 | | |
| | | | | | Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan sarana produksi bagi IKM | 6% | | | | | | | | |
| 5.1 | Pembinaan Teknis Perindustrian | | | Kota Yogyakarta | | | Pelatihan teknis industri bagi IKM | 14jenis | Meningkatnya pengetahuan pemasaran dan ketrampilan bagi IKM | 320o rang | 1,649,290,000 | 1,659,290,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk | 90orang | meningkatkan pemahaman PIRT, sertifikasi halal dan merk | 90 orang | | | | |
| | | | | | | | EKspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP | 6 IMK | Meningkatnya produktifitas sehingga potensi pangsa pasar dapat tercapai | 6 IMK | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Sentra produksi Batik | 1Sentra | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi di Sentra Batik | 1 Sentra | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Sentra Produksi Kulit | 1 Sentra | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi di Sentra Kulit | 1 Sentra | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan OVOP Produk Batik | 1 OVOP | Terjaganya Batik sebagai Produk OVOP | 1 OVOP | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan OVOP Produk Kulit | 1 OVOP | Terjaganya Kulit sebagai Produk OVOP | 1 OVOP | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Produk Unggulan Batik | 1PUD | Meningkatnya daya saing dan potensi Sumber Daya Lokal serta meningkatnya pendapatan & kemampuan SDM | 1 PUD | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Produk Unggulan Kulit | 1 PUD | Meningkatnya daya saing dan potensi Sumber Daya Lokal serta meningkatnya pendapatan & kemampuan SDM | 1 PUD | | | | |
| | | | | | | | Pendataan Industri Mikro Kecil | 1300 IMK | Tersedianya Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta | 1300 IMK | | | | |
| 5.2 | Pembinaan Sarana Produksi | | | Kota Yogyakarta | | | Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator | 4 dokumen | Pengelolaan dana bergulir PEW dapat dipantau dan dimanfaatkan dengan baik | 836 kelompok | 3,017,530,200 | 3,057,530,200 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Koordinasi Program dan Pengembangan PEW di Kecamatan | 14 kali | Terfasilitasinya Koordinasi Forum Komunikasi Kelompok PEW di 14 Kecamatan | 14 forkom | | | | |
| | | | | | | | Kajian Pengembangan Kelompok PEW menjadi Koperasi Induk berbasis Kelompok | 1 dokumen | Analisa Metode Pengembangan Kelompok PEW menjadi Koperasi berbasis kelompok | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan E-Commerce | 80 IKM | Meningkatnya kemampuan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mengelola usaha | 80 IKM | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Managemen Resiko Bencana Bagi IKM | 90 IKM | Kesiapsiagaan IKM dalam menghadapi keadaan darurat bencana | 90 IKM | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kewirausahaan Lanjut | 90 IKM | Meningkatnya kemampuan dalam berwirausaha | 90 IKM | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pengolahan Makanan | 120 IKM | Meningkatnya kemampuan pengolahan makanan | 120 IKM | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Intensif Industri Kreatif Berbasis TI/Animasi | 30 Orang | Meningkatnya kemampuan pelaku usaha kreatif animasi | 30 Orang | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Penerapan Gemba Kaizen IKM Aluminium | 10 IKM | Mampu menerapkan Perbaikan Tempat Usaha | 10 IKM | | | | |
| | | | | | | | Kajian Analisa Kebangkrutan IKM Aluminium Kota Yogyakarta berdasar Siklus Hidup Produk dan Trend Pasar | 1 dokumen | Meningkatnya Pemahaman tetang Resiko Kebangkrutan Usaha IKM Aluminium | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Kajian Benchmarking Produktivitas IKM Fashion dan Konveksi Jogja, Solo dan Pekalongan | 1 dokumen | Meningkatnya Pemahaman Potensi Peningkatan Produktivitas IKM Fashion dan Konveksi | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Pameran/Expo Industri Kreatif TI (Animasi, Film, DKV) | 4 IKM | Meningkatnya kemampuan dan pengalaman dari masing-masing IKM Industri Kreatif Berbasis Animasi | 4 IKM | | | | |
| | | | | | | | Pameran/Expo Industri Kreatif Fesyen dan Kerajinan | 16 IKM | Meningkatnya kemampuan dan pengalaman dari masing-masing IKM Industri Kreatif Berbasis Fashion | 16 IKM | | | | |
| | | | | | | | Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM | 4 alat | Rancangan Teknologi / Peralatan untuk meningkatkan daya saing produk IKM Rancangan Teknologi / Peralatan untuk mengurangi emisi berbahaya ke lingkungan | 3 alat 1 alat | | | | |
| 6 | Program Pengembangan Industri Logam | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam | 1 Kegiatan | | | | | 3,237,118,222 | 3,354,397,229 | | |
| 6.1 | Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam | | | Kec. Umbulharjo | | | Operasional Pelayanan UPT Logam | 12 bulan | Pelayanan prima terhadap semua pelanggan | 12 bulan | 1,088,068,000 | 1,088,068,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin UPT Logam | 22 mesin | Mesin dapat diandalkan dalam membenkan pelayanan pemesinan | 22 mesin | | | | |
| | | | | | | | Pendampingan tenaga ahli untuk revitalisasi pelayanan UPT Logam | 6 dokumen | laporan hasil pendampingan tenaga ahli | 6 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Komputer | 5 unit | tersedianya sarana pelayanan desain berbasis komputer yang memadai | 5 unit | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|--------|---|---|--|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Pengadaan Furniture | 4 jenis | Tersedianya prasarana furniture ruang Seminar yang memadai | 4 jenis | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Projector dan kelengkapannya | 3 jenis | Tersedianya sarana presentasi yang memadai | 3 jenis | | | | |
| 6.2 | Optimalisasi Pelayanan UPT Logam | | | Kec. Umbulharjo | | | Pameran INAPA 2018 | 1 kali | Dikenalnya potensi IKM Logam Kota Yogyakarta di tengah persaingan komponen presisi internasional | 1 kali | 2.149,050,222 | 2.266,329,229 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | MOU Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam | 5 perusahaan | Meningkatkan daya tawar (bargaining position) IKM Logam di tingkat Nasional | 5 perusahaan | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam | 12 bulan | Meningkatkan Teknologi proses produksi IKM Logam | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | | Penelitian dan Pengembangan Inovasi Produk IKM Logam | 10 produk | Berkembangnya teknologi produksi IKM Logam | 10 produk | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam | 1 unit | Meningkatkan kapasitas pelayanan pemesinan | 1 unit | | | | |
| 7 | Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | | | Meningkatnya PKL berijin | 5% | | | 5,197,439,400 | 5,092,139,400 | | |
| | | | | | | | Meningkatnya optimalisasi nilai ekspor | 4% | | | | | | |
| | | | | | | | Meningkatnya jumlah ter, tera ulang UTTP | 5% | | | | | | |
| 7.1 | Pembinaan Usaha Perdagangan | | | Kota Yogyakarta | | | Pameran dan gelar potensi di 12 lokasi | 132 pengusaha | Telah diikutsertakannya UKM dalam event pameran dan bertambahnya informasi peluang pasar yang baru | 132 UMKM | 3,257,789,100 | 3,280,789,100 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Kontak Dagang Potensi Bisnis bagi UMKM | 5 UMKM | Kemitraan UMKM dengan pelaku Usaha Luar daerah | 5 UKM | | | | |
| | | | | | | | Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS | 45 hari | Sarana promosi produk UKM dan potensi Kecamatan serta pelayanan publik | 42 UKM | | | | |
| | | | | | | | Pemanfaatan lahan di area PMPS | 5 zona | Sarana lahan bagi UMKM | 5 zona | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Tata Cara Ekspor | 1 kali | Peningkatan pengetahuan UMKM tentang tata cara ekspor | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pemasaran Online | 1 kali | Peningkatan pengetahuan UMKM tentang pemasaran secara online | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Kemitraan Pedagang dengan Distributor/Toko Modern | 6 kali | Terjalin Kemitraan pedagang eceran dengan distributor/Toko Modern | 6 kali | | | | |
| | | | | | | | Operasi pasar | 14 kecamatan | Masyarakat mendapatkan harga bahan pokok dibawah harga pasar yang tinggi | 14 kecamatan | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan Kemitraan UMKM dengan Toko Modern | 2 kali | Terjalin Kemitraan antar toko modern dengan UMKM | 2 kali | | | | |
| | | | | | | | Workshop Display Toko Kelontong | 2 kali | Pedagang menjadi lebih paham mengenai penataan display yang benar | 2 kali | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong | 2 kali | Omzet penjualan para pemilik warung kelontong meningkat | 2 kali | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Konsumen Cerdas | 4 kali | Konsumen lebih kritis dan selektif dalam membeli suatu produk | 4 kali | | | | |
| | | | | | | | Pasar Rakyat | 1 kali | Masyarakat mendapatkan kebutuhan menjelang Hari Raya dengan harga dibawah harga pasar | 1 kali | | | | |
| 7.2 | Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri | | | Kota Yogyakarta | | | Monitoring harga bahan pokok | 8 pasar | Data monitoring harga sembako | 8 pasar | 871,875,300 | 871,875,300 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar | 1 kali | Terjalin kemitraan ketersediaan bahan dan pasar | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya | 2 kali | Data Pengawasan barang berbahaya | 2 dok | | | | |
| | | | | | | | Monitoring Penggunaan BTM/P | Kota YK, 4 kali | Data Pengawasan BTMP | Kota YK, 4 lokasi | | | | |
| | | | | | | | Monitoring LPG 3 Kg dan BBM | 12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU | Data Pengawasan LPG 3 kg dan BBM | 12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU | | | | |
| | | | | | | | Monitoring Distributor dan Pergudangan | 12 distributor, 30 gudang 12 distributor, 30 gudang | Data Pengawasan Distributor dan Gudang | 12 distributor, 30 gudang | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|-----------------|--|--------|--|--------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Pakaian Juru Parkir | 1 kali | Pakaian juru parkir yang tersedia | 1 kali | | | | |
| 9.2 | Penataan Lahan dan Pedagang | | | | | | Penataan Fasilitas Penunjang Pasar | 10 kali | Intensitas fasilitas penunjang pasar | 10 kali | 1,225,686,500 | 1,447,920,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Pemutakhiran data pedagang pasar | 31 pasar | data pedagang pasar yang termutakhir | 31 pasar | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi pedagang pasar | 15 kegiatan | Tersampainya informasi pelayanan pasar | 15 kegiatan | | | | |
| | | | | | | | Pelayanan Administrasi Pedagang | 88 kali | Administrasi Pedagang yang terlayani | 88 kali | | | | |
| | | | | | | | Workshop Peningkatan SDM | 1 Keg | Pengetahuan SDM yang meningkat | 1 kegiatan | | | | |
| | | | | | | | Sewa Tanah Pasar | 3 pasar | Lahan pasar yang tersedia | 3 pasar | | | | |
| | | | | | | | Pra Revitalisasi pasar tradisional | 1 dokumen | Terencanaknya revitalisasi pasar tradisional | 1 dokumen | | | | |
| 9.3 | Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I | | | Kota Yogyakarta | | | Retribusi pelayanan pasar yang dipungut | 16 pasar | Pendapatan retribusi pasar yang tercapai | 100% | 1,662,345,950 | 1,730,490,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Petugas pungut yang dibina | 55 orang | Tertib administrasi pemungutan | 55 orang | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola | 16 pasar | Tagihan biaya penggunaan Listrik pasar | 16 pasar | | | | |
| | | | | | | | Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan | 4 jenis | Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang diterima sesuai MOU | 4 jenis | | | | |
| | | | | | | | Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code | 2 pasar | pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code | 2 pasar | | | | |
| 9.4 | Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II | | | Kota Yogyakarta | | | Retribusi pelayanan pasar yang dipungut | 16 pasar | Pendapatan retribusi pasar yang tercapai | 100% | 1,467,323,700 | 1,527,300,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Petugas pungut yang dibina | 55 orang | Tertib administrasi pemungutan | 55 orang | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola | 16 pasar | Tagihan biaya penggunaan Listrik pasar | 16 pasar | | | | |
| | | | | | | | Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan | 4 jenis | Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang diterima sesuai MOU | 4 jenis | | | | |
| | | | | | | | Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code | 2 pasar | pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code | 2 pasar | | | | |
| 9.5 | Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta | | | Kec. Minggiran | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar | 6 kegiatan | Tersedianya Sarana prasarana dan Fasilitas pasar yang terpelihara | 6 kegiatan | 1,213,773,400 | 1,251,480,000 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Pelatihan dan Pembinaan Pedagang PASTY | 360 pedagang | Pengetahuan dan integritas Pedagang PASTY meningkat | 360 pedagang | | | | |
| | | | | | | | Pelayanan dan Promosi Pasar | 2 Lokasi | Terlaksananya Pelayanan dan Promosi Pasar | 2 lokasi | | | | |
| | | | | | | | Pendapatan Retribusi pelayanan pasar yang dipungut | 420 pedagang | Pendapatan retribusi Pelayanan pasar meningkat | 420 pedagang | | | | |
| | | | | | | | Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan | 2 jenis | Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang diterima sesuai MOU | 2 jenis | | | | |
| | | | | | | | Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis Quick Response Code | 1 pasar | pelayanan retribusi pasar berbasis Quick Response Code | 1 pasar | | | | |
| 9.6 | Pengembangan Pasar Tradisional | | | Gondomanan | | | Promosi melalui berbagai kegiatan | 5 kegiatan | Eksistensi pasar tradisional terjaga | 31 pasar | 2,007,165,713 | 2,004,765,713 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | Kajian pasar tradisional | 4 dokumen | Dokumen hasil kajian | 4 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan data pedagang menggunakan SIM Pasar | 3 pasar | Database pedagang pasar melalui SIM Pasar | 3 pasar | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan radio pasar | 3 pasar | Radio pasar yang dikelola | 3 pasar | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan pedagang pasar | 12 keg | Intensitas sarasehan pedagang pasar | 12 keg | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan bisnis bagi pedagang | 2 keg | Meningkatnya pengetahuan pedagang dalam berbisnis | 120 orang | | | | |
| | | | | | | | FGD Pedagang Pasar Tradisional | 2 Keg | Rancangan kegiatan hasil FGD | 57 paguyuban | | | | |
| | | | | | | | Grand desain Pengembangan Pasty | 1 dokumen | Dokumen Grand Desain Pengembangan Pasty | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis Quick Respon Code | 5 pasar | Meningkatkan efektivitas Pelayanan retribusi pasar | 5 pasar | | | | |
| 10 | Program Pengembangan Pusat Bisnis | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis | 77% | | | | | 6,752,871,532 | 6,752,871,532 | | |
| 10.1 | Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis | | | Gondomanan | | | Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan | 1 kegiatan | Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang terlaksana | 1 kegiatan | 6,752,871,532 | 6,752,871,532 | Sedang Berjalan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Total | | | | | | | | | | | 44,759,730,022 | 45,718,203,079 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---|--------|--|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 921,887,620 | 981,956,382 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 132 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 251,445,000 | 276,589,500 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk tamu | 180 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 24 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Materai 6000 yang tersedia | 300 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 529,035,676 | 554,439,244 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 300 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengiriman/paket | 17 kali | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 15 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 12 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 69 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Percetakan | 23 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 170.000 lbr | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundangan-undangan yang tersedia | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 14 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 10 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 141,406,944 | 150,927,638 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 38 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 4 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Nabab | 3 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 351,315,000 | 386,446,500 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat | 1 Jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 220,100,000 | 242,110,000 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat | 4 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 131,215,000 | 144,336,500 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda dua | 15 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 174,477,832 | 178,615,615 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 174,477,832 | 178,615,615 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | B | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|---|--|-----------------|---|--------|--|-----------------|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | |
| 4 | Program Pengelolaan Pertanahan | Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang. | Tertib administrasi pertanahan. | | Prosentase tertib administrasi pertanahan. | 41,91% | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan | | | Kec. Umbulharjo | | | Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta | 25 bidang tanah | Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. | 70% | 671,137,832 | 450,000,000 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | |
| | | | | | | | Pelacakan dan inventarisasi tanah negara/Permok sepanjang pinggiran sungai. | 3 kelurahan | Teridentifikasi dan terinventarisasi tanah negara/Permok yang berada di sepanjang sungai. | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | Inventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Permok Yk. | 9 Kelurahan | Validitas Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Permok Yk. | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | Digitalisasi dokumen-dokumen vital pertanahan | 1 dokumen | terdokumentasi secara digital dokumen-dokumen pertanahan | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | database sistem inventarisasi pertanahan | 1 dokumen | tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai database sistem informasi pertanahan | 100% | | | | | | |
| 4.2 | Penyelesaian Masalah Pertanahan | | | Kec. Umbulharjo | | | Penyelesaian masalah pertanahan | 1 dokumen | Kejelasan status pertanahan | 1 dokumen | 85,630,000 | 72,765,000 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | |
| | | | | | | | Pencegahan Permasalahan Pertanahan | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | Prosentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingns umum | 94,46% | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Pemanfaatan Pertanahan | | | Kec. Umbulharjo | | | Pengadaan tanah pembangunan kantor. | 2 kelurahan | Bertambahnya aset/fasilitas publik milik permok Yogyakarta | 8 lokasi | 18,732,556,416 | 28,100,000,000 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | |
| | | | | | | | Pengadaan tanah untuk RTHP | 3 lokasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum. | 3 lokasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara. | 60 Permohonan | Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan | 100% | | | | | | |
| 5 | Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang. | Kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan Berkelanjutan. | | Persentase Penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang. | 61,39% | | | | | 1,519,040,748 | 1,592,731,000 | | | | |
| 5.1 | Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci | | | Kec. Umbulharjo | | | Naskah Akademik Revisi Perda RTRW | 1 dokumen | Tersedianya Draft Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. | 1 dokumen | 601,111,416 | 631,240,500 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | |
| | | | | | | | Draft Album Peta Revisi Perda RTRW | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | Draft Revisi Perda RTRW | 1 dokumen | | | | | | | | |
| 5.2 | Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan | | | Kec. Umbulharjo | | | Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) | 2 dokumen | Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan. | 2 dokumen | 648,861,416 | 678,990,500 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | |
| | | | | | | | Draft Perwal RTBL | 2 dokumen | | | | | | | | |
| 5.3 | Pembinaan Tata Ruang | | | Kec. Umbulharjo | | | Laporan Telaah penataan ruang | 1 peraturan | Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta. | 14 kecamatan | 269,067,916 | 282,500,000 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | |
| | | | | | | | Sosialisasi/Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | Studi model dan bentuk kompensasi terhadap pemanfaatan ruang di Kota Yk. | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kajian evaluasi dan identifikasi potensi rumah susun di Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | | | | |
| 6 | Program Pengendalian Tata Ruang | Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang. | Kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan Berkelanjutan. | | Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang. | 33,78% | | | | | 1,211,552,658 | 1,394,335,173 | | | | |
| 6.1 | Pengendalian Tata Ruang | | | Kec. Umbulharjo | | | Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan | 1 dokumen | Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah | 2 dokumen | 285,027,600 | 375,157,610 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1 dokumen | | | | | | | | |
| 6.2 | Pengawasan Tata Ruang | | | Kec. Umbulharjo | | | Laporan Penaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas) | 1 dokumen | Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan. | 5 dokumen | 579,825,058 | 637,807,563 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|--|-----------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Laporan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Penataan Ruang. | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang. | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Neraca Penatagunaan Tanah. | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang | 1 dokumen | | | | | | |
| 6.3 | Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang | | | Kec. Umbulharjo | | | Kajian database spasial penataan ruang | 1 dokumen | Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang. | 2 dokumen | 346,700,000 | 381,370,000 | Sedang Berjalan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
| | | | | | | | Updating Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1 dokumen | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 23,667,598,106 | 33,156,849,670 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|-------------|---|--------|---|----------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Peemerintah Meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | | | | | 764,840,680 | 787,785,900 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dindukcapil | | | Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai | 63 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 178,732,000 | 184,093,960 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | Makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi | 88 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Makanan dan minuman yang tersedia untuk tamu dinas | 151 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 41 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dindukcapil | | | Materai Rp. 3000 | 400 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 400,534,200 | 412,550,226 | Sedang berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | Materai Rp. 6000 | 400 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Perangko | 150 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengiriman | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Jasa Komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 18 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Kebersihan Kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Perbaikan peralatan kerja | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 55 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Percetakan | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 9000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penjilidan | 150 buku | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 13 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 17 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Buku kependudukan/capil dan surat kabar yang tersedia | 2 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dindukcapil | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan laporan Akuntansi tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 185,574,480 | 191,141,714 | Sedang berjalan | Dindukcapil |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian terkelola | 63 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 6 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelola kearsipan | 2 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai | 100% | | | | | 173,250,000 | 178,447,500 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dindukcapil | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan roda 2 | 17 unit | Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100% | 173,250,000 | 178,447,500 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan roda 4 | 4 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja pemerintah Meningkat | | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | | | | | 59,000,000 | 60,770,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Dindukcapil | | | Pelaksanaan diklat teknis jaringan | 1 Paket | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 59,000,000 | 60,770,000 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | | | Pelaksanaan diklat teknis servis excellent | 1 Paket | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja keuangan | 100% | | | | | 88,643,000 | 91,302,290 | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|--------------------------------|---|-------------|---|---|--|--|--|--|----------------|---------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dindikcapil | | | Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Anggaran: RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA | 5 dokumen | | Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen perencanaan, pengendalian dan anggaran, dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 88,643,000 | 91,302,290 | Sedang Berjalan | Dina Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | | | | Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fiskal, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun | 7 dokumen | | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 100% | | | | | |
| 5 | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Persentase Pelayanan Dokumen dan Surat - Surat Kependudukan | 100% | | | | | | 819,614,320 | 844,202,749 | | |
| 5.1 | Pelayanan Identitas Penduduk | | | Kota YK | | | Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT | 25 dokumen | Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat - surat kependudukan | 100% | 549,043,740 | 565,515,052 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |
| | | | | | | | Frekuensi Pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk | 154 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pelayanan Percepatan KTP-EL di 14 Kecamatan | 154 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk | 18 lokasi | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lokar Pelaksanaan Mobile KTP EL untuk lansia dan keterbatasan fisik | 45 kelurahan | | | | | | | |
| | | | | | | | Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan Mobile KIA | 44 sekolah | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Penilaian dan Penghapusan Arsip Adminduk | 1 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelayanan Identitas Penduduk | 66 laporan | | | | | | | |
| 5.2 | Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk | | | Kota YK | | | Laporan Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk | 20 laporan | Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat - surat kependudukan | 100% | 270,570,580 | 278,687,697 | Sedang Berlangsung | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Rentan Adminduk Yang Diverifikasi | 150 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Data Penduduk Non Permanen | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelayanan Pindah Datang Pendaftaran Penduduk | 22 laporan | | | | | | | |
| 6 | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Persentase Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil | 100% | | | | | | 625,256,910 | 644,014,617 | | |
| 6.1 | Pelayanan Kelahiran dan Kematian | | | Kota YK | | | Jasa Pengadaan Documen Sekuriti dan Non Sekuriti Pencatatan Sipil | 22 jenis | Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil | 100% | 482,612,870 | 497,091,256 | Sedang Berlangsung | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Pencatatan Kelahiran dan Penyelenggaraan Adminduk lainnya | 45 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Layanan Percepatan Akta di wilayah | 45 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran | 4 rumah sakit | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Pencatatan Sipil | 33 laporan | | | | | | | |
| 6.2 | Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan | | | Kota YK | | | Jumlah Persidangan & Pencatatan Perkawinan di Lokasi | 450 persidangan | Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil | 100% | 142,644,040 | 146,923,361 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | | Data Register Perkawinan dan Perceraian Lama yang Dientry dalam Database SIAK | 5000 data | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Cetak Non Sekuriti | 30 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Pencatatan Sipil | 11 laporan | | | | | | | |
| 7 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | | | | SIAK berfungsi dengan baik | 100% | | | | | | 943,053,890 | 971,345,507 | | |
| 7.1 | Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | | | Kota YK | | | Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1 laporan | SIAK berfungsi dengan baik | 100% | 380,045,000 | 391,446,350 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | | Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan | 4 kerjasama | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Administrasi kependudukan | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan sarpras kerjasama pelayanan administrasi kependudukan | 4 paket | | | | | | | |
| 7.2 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | Kota YK | | | Profil Perkembangan Penduduk Tahun 2017 | 1 buku profil | SIAK berfungsi dengan baik | 100% | 563,008,890 | 579,899,157 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | | | | Laporan Pengelolaan Data Kependudukan Tahun 2018 | 19 buku laporan (bulanan, triwulan, semester, tahunan) | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|---|-------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Web Adminduk yang Dikelola | 1 web | | | | | | | |
| | | | | | | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Kependudukan | 4 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | Frekuensi Pembinaan SDM Teknologi Informasi dan komunikasi | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Laporan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 11 laporan | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,473,658,800 | 3,577,868,563 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Kesehatan

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|--------------------------------|---|-----------------|--|--------|---|----------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran | 100% | | | | | | 4,037,745,486 | 4,441,520,035 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Kesehatan | | | Minuman Karyawan Dinas, Farmakes, Lab PKA | 38.720 orang | Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional Perkantoran | 100% | 382,610,000 | 420,871,000 | Sedang Berjalan | Dinkes | |
| | | | | | | | Makanan dan Minuman untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | 8.830 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Makanan dan Minuman untuk Tamu | 435 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Koordinasi dan Kosultasi Keluar Daerah Dapat Terselenggara dengan Lancar | 96 ok | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Kesehatan | | | Alat Tulis Kantor | 1 paket | Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 687,568,490 | 756,325,339 | Sedang Berjalan | Dinkes | |
| | | | | | | | Alat listrik dan elektronik | 12 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Materai @ Rp. 6.000 | 400 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Materai @ Rp. 3.000 | 250 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat) | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 2 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang diisi | 5 tabung | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pengisian Tabung Gas Farmakes | 6 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan | 4 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes; Lab. Kualitas Air dapat dimanfaatkan | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Surat Kabar Harian untuk Dinkes | 24 eksemplar | | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi kebersihan untuk Dinas dan Puskesmas dibayarkan tepat waktu | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang diuji kelayakannya | 5 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu | 23 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu | 27 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu | 17 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu | 5 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Cetak blanko untuk Dinas dan Puskesmas | 4 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 992.534 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 1 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD Proyektor, dan Printer | 10 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan | 38 buku | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Kesehatan | | | Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 2,967,566,996 | 3,264,323,696 | Sedang Berjalan | Dinkes | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan | 111 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Administrasi kepegawaian yang dikelola | 52 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelola arsip | 2 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelola perpustakaan | 2 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Keamanan Farmakes | 1 paket | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 366,125,000 | 402,737,500 | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|---------------------------------------|--|---|---|-------------|---|-----------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Kesehatan | | | Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Lab. PKA, Farmakes, Rusela, gedung SBH & RPG | 10 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 98,275,000 | 108,102,500 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 2.2 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinas Kesehatan | | | Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/opersional roda 4 | 23 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 267,850,000 | 294,635,000 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/opersional roda 2 | 27 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 219,450,000 | 241,395,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinas Kesehatan | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD | 9 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tepat waktu | 100% | 219,450,000 | 241,395,000 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Laporan Kinerja OPD | 9 laporan | | | | | | |
| 4 | Program Pelayanan Kesehatan Dasar | Kesehatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | | Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas | 78% | | | | | 44,456,581,125 | 48,902,249,238 | | |
| 4.1 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 | | | Danurejan (Tegal panggung) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN I sesuai ketentuan | 12 bulan | 987,805,313 | 1,086,585,844 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.2 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 | | | Danurejan (Bausaran, Suryatmajan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN-II sesuai ketentuan | 12 bulan | 664,802,834 | 731,283,117 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.3 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen | | | Gedongtengen (Sosromenduran, Pringgokusuman) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GT sesuai ketentuan | 12 bulan | 1,338,032,065 | 1,471,835,272 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.4 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 | | | Gondokusuman (Klitren, Demangan, Baciro) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-I sesuai ketentuan | 12 bulan | 1,455,975,747 | 1,601,573,322 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.5 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 | | | Gondokusuman (Terban, Kotabaru) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II sesuai ketentuan | 12 bulan | 873,312,514 | 960,643,765 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.6 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan | | | Gondomanan (Ngupasan, Prawirodirjan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GM sesuai ketantuan | 12 bulan | 967,482,122 | 1,064,230,334 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.7 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis | | | Jetis (Bumijo, Gowongan, Cokrodingratan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas JT sesuai ketentuan | 12 bulan | 1,901,161,144 | 2,091,277,258 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.8 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 | | | Kotagede (Prenggan, Purbayan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-I sesuai ketentuan | 12 bulan | 1,649,129,136 | 1,814,042,050 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.9 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 | | | Kotagede (Rejowinangun) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-II sesuai ketentuan | 12 bulan | 996,128,111 | 1,095,740,922 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.10 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton | | | Kraton (Panembahan, Kadipaten, Patehan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KT sesuai ketantuan | 12 bulan | 1,165,443,748 | 1,281,998,123 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.11 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron | | | Mantrijeron (Suryodiningratan, Gedongkiwo, Mantrijeron) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MJ sesuai ketentuan | 12 bulan | 1,947,700,000 | 2,142,470,000 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.12 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan | | | Mergangsan (Brontokusuman, Keparakan, Wirogunan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MG sesuai ketantuan | 12 bulan | 1,989,925,897 | 2,188,918,487 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.13 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan | | | Ngampilan (Notoprajan, Ngampilan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas NG | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas NG sesuai ketantuan | 12 bulan | 896,317,477 | 985,949,225 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.14 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman | | | Pakualaman (Purwokinanti, Gunungketur) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas PA sesuai ketentuan | 12 bulan | 845,546,594 | 930,101,253 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.15 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo | | | Tegalrejo (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas TR sesuai ketentuan | 12 bulan | 2,678,844,000 | 2,946,728,400 | Sedang Berjalan | Dinkes |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|--|-------------------|--------|---|-----------|---|-----------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 4.16 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 | | | Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan, Giwangan, Sorosutan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-I sesuai ketentuan | 12 bulan | 2,512,452,000 | 2,763,697,200 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.16 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 | | | Umbulharjo (Semaki, Tahunan, Muja muju) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-II sesuai ketentuan | 12 bulan | 1,459,185,000 | 1,605,103,500 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.17 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan | | | Wirobrajan (Pakuncen, Wirobrajan, Patangpuluhan) | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB | 12 bulan | Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas WB sesuai ketentuan | 12 bulan | 1,777,061,566 | 1,954,767,723 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 4.18 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 | | | Danurejan (Tegal panggung) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-I sesuai ketentuan | 1 dokumen | 1,121,111,150 | 1,233,222,265 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Danurejan I | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.19 | Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 | | | Danurejan (Bausaran, Suryatmajan) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-II sesuai ketentuan | 1 dokumen | 782,289,472 | 860,518,419 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Danurejan II | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.20 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen | | | Gedongtengen (Sosromenduran, Pringgokusuman) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT sesuai ketentuan | 1 dokumen | 1,055,296,720 | 1,160,826,392 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gedongtengen | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.21 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 | | | Gondokusuman (Klitren, Demangan, Baciro) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I sesuai ketentuan | 1 dokumen | 912,153,000 | 1,003,368,300 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gondokusuman I | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.22 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 | | | Gondokusuman (Terban, Kotabaru) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II sesuai ketentuan | 1 dokumen | 1,518,285,275 | 1,670,113,803 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gondokusuman II | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|-----------|----------------|---|-------------------|--------|---|-----------|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.23 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan | | | Gondomanan (Ngupasan, Prawirodirjan) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM sesuai ketentuan | 1 dokumen | 804,555,700 | 885,011,270 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Gondomanan | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.24 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis | | | Jetis (Bumijo, Gowongan, Cokrodingratan) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT sesuai ketentuan | 1 dokumen | 1,311,844,973 | 1,443,029,470 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Jetis | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.25 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 | | | Kotagede (Prenggan, Purbayan) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I sesuai ketentuan | 1 dokumen | 469,837,952 | 516,821,747 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kotagede I | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.26 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 | | | Kotagede (Rejowinangun) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II sesuai ketentuan | 1 dokumen | 746,063,750 | 820,670,125 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kotagede II | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.27 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton | | | Kraton (Panembahan, Kadipaten, Patehan) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT sesuai ketentuan | 1 dokumen | 877,104,950 | 964,815,445 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kraton | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.28 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron | | | Mantrijeron (Suryodiningratan, Gedongkiwo, Mantrijeron) | | | Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketentuan | 1 dokumen | 1,877,652,205 | 2,065,417,426 | Sedang Berjalan | Dinkes |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|--|-------------------|--------|---|-----------|--|-----------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mantrijeron | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.29 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan | | | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG sesuai ketentuan | 1 dokumen | 1,457,098,000 | 1,602,807,800 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mergangsan | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.30 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan | | | Ngampilan (Notoprajan, Ngampilan) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG sesuai ketentuan | 1 dokumen | 1,074,312,284 | 1,181,743,512 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Ngampilan | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.31 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman | | | Pakualaman (Purwokinanti, Gunungketur) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA sesuai ketentuan | 1 dokumen | 683,536,326 | 751,889,959 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Pakualaman | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.32 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo | | | Tegalrejo (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR sesuai ketentuan | 1 dokumen | 896,789,100 | 986,468,010 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Tegalrejo | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.33 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 | | | Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan, Giwangan, Sorosutan) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I sesuai ketentuan | 1 dokumen | 751,153,000 | 826,268,300 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo 1 | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|------------------|---|--|---|-------------|--|----------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.34 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 | | | Umbulharjo (Semaki, Tahunan, Muja muju) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II sesuai ketentuan | 1 dokumen | 1,025,061,000 | 1,127,567,100 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo II | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.35 | Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan | | | Wirobrajan (Pakuncen, Wirobrajan, Patangpuluhan) | | | laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB | 1 dokumen | Penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB sesuai ketentuan | 1 dokumen | 986,131,000 | 1,084,744,100 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan | 1 dokumen | Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Wirobrajan | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | | | |
| 5 | Program Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kesehatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | | Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama | 70% | | | | | 31,285,104,270 | 34,413,614,698 | | |
| 5.1 | Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama" | | | RS Pratama | | | Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" | 12 bulan | Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama" | 70% | 3,840,468,925 | 4,224,515,818 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 5.2 | Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama" | | | RS Pratama | | | Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" | 9 dokumen | Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama" | 70% | 27,444,635,345 | 30,189,098,880 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 6 | Program Upaya Pelayanan Kesehatan | Kesehatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | | Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan | 100% | | | | | 35,346,545,517 | 38,881,198,969 | | |
| 6.1 | Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan | | | Kota YK | | | Tenaga kerja di puskesmas dan dinas kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar | 600 orang | Semua tenaga kesehatan puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar | 18 puskesmas | 12,247,584,403 | 13,472,342,843 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan | 1 dokumen | Tersusunnya laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan termasuk layanan poli lansia, poli anak, dan pli KIA | 18 Puskesmas | | | | |
| | | | | | | | Data hasil Penilaian kinejpa puskesmas | 1 dokumen | Tersusunnya hasil Penilaian Kinerja Puskesmas | 18 Puskesmas | | | | |
| | | | | | | | Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 2 dokumen | Tersusunnya data Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Data hasil ASPAK | 1 dokumen | Tersusunnya data ASPAK | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada KTP & FKTL | 1 dokumen | FKTP & FKTL mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan pelayanan kesehatan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan | 12 rumah sakit | Rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan lanjutan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK | 2 laporan | Terlaksananya kegiatan bersumberdana DAK | 2 laporan | | | | |
| 6.2 | Pelayanan Kesehatan Khusus | | | Kota YK | | | Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji | 18 Puskesmas | Semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan haji | 18 Puskesmas | 689,859,557 | 758,856,513 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes | 1 Laporan | Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes | 1 Laporan | | | | |
| | | | | | | | Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani | 1 dokumen | Semua calon jamaah haji dilakukan pemeriksaan kebugaran jasmani | 500 org | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan | 3 kegiatan | Tersosialisasinya pedoman penanganan bencana bidang kesehatan | 3 kegiatan | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---|--------|--|-------------|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 6.3 | Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan | | | Kota YK | | | Frekwensi Pembinaan Batra Komplementer | 4 kegiatan | Pelayanan Batra Sesuai Standar | 4 kegiatan | 20,863,996,010 | 22,950,383,511 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Dokumen MOU & Perwal Jamkesda | 2 dokumen | Cakupan layanan Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100% | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan | 31 kali | Cakupan wilayah desiminasi informasi mekanisme pelayanan jamkesda | 45 kelurahan | | | | |
| | | | | | | | Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan | 1 laporan | Persentase kasus yang dijamin pembiayaan perawatan kesehatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Segow Segawe dan pemeriksaan kesehatanbagi Anggota DPRD beserta keluarga inti serta persalinan | 12 kegiatan | Cakupan faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam sistem JKN | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN | 1 laporan | Cakupan FKTP milik Pemerintah yang melaksanakan pengelolaan dana kapitasi dan kegiatan anti Fraud sesuai ketentuan yang berlaku | 18 puskesmas | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk | 1 laporan | Cakupan wilayah mendapatkan informasi akreditasi Puskesmas | 5 kecamatan | | | | |
| | | Laporan sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi puskesmas | 1 laporan | Cakupan Puskesmas terakreditasi | 100% | | | | | | | | | |
| 6.4 | Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119 | | | Kota YK | | | Laporan Pelaksanaan Kegiatan PSC 119 YES | 12 Laporan | PSC 119 YES dapat beroperasi dalam melayani masyarakat | 12 Bulan | 1,545,105,547 | 1,699,616,102 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| 7 | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar | 100% | | | | | 4,552,389,114 | 5,007,628,026 | | |
| | | | | | Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase rumah tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan | 85,20% | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan | 85,40% | | | | | | | | |
| | | | | | Cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri) | 33% | | | | | | | | |
| 7.1 | Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | | | Kota Yk | | | Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi | 491 orang | Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S) | 85% | 1,470,142,030 | 1,617,156,233 | sedang berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi | 318 orang | Cakupan ibu hamil mendapat Fe 90 tablet | 90% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Surveilans KIA Gizi | 15 laporan | Cakupan Keluarga Sadar Gizi dan garam beryodium | 90% | | | | |
| | | | | | | | Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi | 7 dokumen | Cakupan K1 | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi | 24 faskes | Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan | 95% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Perencanaan KIA Gizi | 1 dokumen | deteksi faktor resiko oleh masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital | 1 laporan | cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita | 90% | | | | |
| | | | | | | | | | cakupan penanganan komplikasi obstetri dan neonatus | 80% | | | | |
| | | | | | | | | | cakupan peserta KB aktif | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk | 2 kali | | 76% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|---------|-------------------|--------|---|---|---|---|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 7.2 | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan | | | KOTA YK | | | Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | 20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes) | Pengunjung Institusi Kesehatan terpapar program kesehatan | 20 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes) | 2.272,120,825 | 2.499,332,908 | Sedang berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan | 300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA) | Peserta Didik terpapar program kesehatan | 300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA) | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan | 200 Lokasi (Masjid) | Masyarakat terpapar program kesehatan melalui Tempat Ibadah | 200 Lokasi (Masjid) | | | | |
| | | | | | | | | | Diterimanya pesan kesehatan dari media massa | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | | | | Tersedianya informasi data UKBM dan PHBS sebagai dasar untuk perencanaan program | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi Siaran Radio, TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan | 18 kali | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah kelurahan siaga mandiri | 45 kelurahan | | | | |
| | | | | | | | | | Tersedianya layanan preventif dan promotif pada lansia di rumah sehat lansia | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal | 1 kegiatan (Pameran Sekaten) | | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | | | | Tersedianya pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat | 3 kegiatan | | | | |
| | | | | | | | Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Profil PHBS | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Data layanan lansia di rumah sehat lansia | 12 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat | 3 kali | | | | | | |
| 7.3 | Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja | | | Kota YK | | | Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta | 2000 sampel | Tersedianya data Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | 810,126,259 | 891,138,885 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan | 50 sekolah | Tersedianya data Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan | 1 dokumen | Pedagang pasar dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan | 1 kali | | | | |
| | | | | | | | Data Kesehatan Lingkungan | 1 dokumen | Masyarakat pengguna pokmair mendapat air yang memenuhi syarat | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | 2 kali | Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di penyelenggara air minum | 100% | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan | 2 kali | Permasalahan kesehatan lingkungan sudah mempunyai payung hukum | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Data pengelolaan limbah medis cair | 1 dokumen | Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan kota sehat tertinggi | 7 tanaman | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM | 6 kali | Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk pekerja di tempat kerja | 2 kali | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya | 18 Puskesmas | Persentase PKL pangan, jasa boga, rumah makan dan DAM memenuhi syarat kesehatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor | 5 Puskesmas | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|-----------|------------------------------------|---------|--|--------|---|------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi sosialisasi penerapan prinsip kesehatan kerja | 2 kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen kajian review EHRA | 1 dokumen | | | | | | | | |
| 8 | Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | Kesehatan | Harapan Hidup Masyarakat Meningkat | | Presentasi fasilitas kesehatan yang sesuai standar | 82% | | | | | | 12,469,472,284 | 13,716,419,512 | | | |
| | | | | | Presentase tenaga kesehatan yang berijin | 75% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Presentase penyehat tradisional yang terdaftar | 65% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat | 65% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas | 90% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan obat, vaksin dan aikes | 96% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nakes yang sesuai kompetensi | 85% | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan | | | Kota YK | | | Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di Kota Yogyakarta | 1200 orang | | Tersertifikasinya penanggung jawab industri rumah tangga | 1200 orang | 1,003,124,244 | 1,103,436,668 | Sedang Berjalan | Dinkes | |
| | | | | | | | Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga | 400 orang | | Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat PIRT | 200 sarana | | | | | |
| | | | | | | | Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan, Pengelola jasa boga dan rumah makan, Pengelola Depot Air Minum dalam kemasan, pengelola kantin sekolah di Kota Yogyakarta | 200 orang | | Masyarakat mendapatkan sertifikat Hygiene Sanitasi | 150 orang | | | | | |
| | | | | | | | Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 600 orang | | Stikerisasi izin kerja/praktik bagi tenaga kesehatan dan surat tanda terdaftar | 550 orang | | | | | |
| | | | | | | | Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya | 1 dokumen | | Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai izi operasional dan izin kerja/praktik | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi | 2 dokumen | | Sarana dan tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada | 2 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP_IRT | 200 orang | | Masyarakat sadar akan pentingnya sertifikasi industri rumah tangga | 150 orang vv | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan | 1 dokumen | | Terselesainya Peraturan walikota yogyakarta | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan | 14 kali | | Terselesainya Perda Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten | 1 laporan | | Laporan hasil monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi lintas kab/kota | 1 laporan | | | | | |
| | | | | | | | Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan | 1 dokumen | | sarana kesehatan yang berizin mendapatkan stiker | 1 dokumen | | | | | |
| 8.2 | Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) | | | Kota YK | | | Tenaga kesehatan tetapan terpilih di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta | 5 orang | | Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi | 5 profesi | 533,508,040 | 586,858,844 | Sedang Berjalan | Dinkes | |
| | | | | | | | Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta | 10 bulan | | Kelancaran pelaksanaan PKL dan penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta | 10 bulan | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen perencanaan SDM | 1 dokumen | | Tersedianya perencanaan SDM Dinas Kesehatan | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi pembinaan SDM | 17 kali | | Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan | 12 bulan | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan | 1 laporan | | Diketahuinya kompetensi tenaga kesehatan | 6 bulan | | | | | |
| | | | | | | | Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS | 19 orang | | penambahan Jumlah dokter Puskesmas dengan kemampuan penanganan kasus trauma akut dan atau kegawatan jantung | 19 orang | | | | | |
| | | | | | | | Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan | 19 Orang | | Penambahan jumlah tenaga kesehtan dengan sertifikat pelatihan | 19 orang | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pembaruan Data SDM tingkat Kota Yogyakarta | 2 kali | | Update data SDM Kota Yogyakarta | 2 kali | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT | 1 laporan | | Nakes di UPT sesuai regulasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | | Peserta seminar/kursus/workshop | 165 orang | | SDMK mendapat sertifikat seminar/workshop | 165 orang | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|-----------|----------------|---------|--|--------|--|--------------|---|---------------|----------------|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 8.3 | Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | | | Kota YK | | | Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia | 12 bulan | Ketersedian obat, vaksin dan reagen untuk pelayanan kesehatan | 96% | 10,932,840,000 | 12,026,124,000 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Data Monitoring penggunaan obat rasional | 4 dokumen | Penggunaan obat rasional di Puskesmas | 90% | | | | |
| | | | | | | | Data ketersediaan obat dan vaksin | 12 dokumen | Data ketersediaan obat dan vaksin | 12 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis tentang kefarmasian | 150 orang | Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan bagi Puskesmas | 18 Puskesmas | | | | |
| | | | | | | | Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update knowledge tentang pengelolaan laboratorium sesuai standar | 50 orang | Pengadaan sarana pengolahan data kefarmasian | 1 paket | | | | |
| | | | | | | | Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat | 1 kegiatan | Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat | 1 kegiatan | | | | |
| | | | | | | | Data penghapusan obat, vaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa | 1 dokumen | Sampling makanan jajanan anak sekolah | 100 sample | | | | |
| | | | | | | | Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai standar | 18 Puskesmas | Mobil distribusi Farmasi | 1 unit | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina | 1200 orang | Mobil sampling makanan | 1 unit | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah | 100 sekolah | Pembinaan kepada Pemilik/Penanggung jawab PIRT dan Kantin Sekolah | 1200 orang | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sample pangan jajanan anak sekolah yang diperiksa | 100 sample | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak sekolah | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Mobil distribusi farmasi tersedia | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Sarana pengolahan data kefarmasian tersedia | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Mobil sampling makanan tersedia | 1 unit | | | | | | |
| 9 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Kesehatan | Harapan Hidup | | Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar | 100% | | | | | 4,164,609,313 | 4,581,071,345 | | |
| | | | | | Setiap penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Setiap Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Setiap orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, Waria/Trnsgender, pengguna Napza dan Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Semua penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi | 100% | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase tersedianya data dan informasi kesehatan yang tepat dan lengkap | 76% | | | | | | | | |
| 9.1 | Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan | | | Kota YK | | | Laporan survailens epidemiologi | 3 laporan | Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 100% | 758,675,595 | 834,544,255 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Laporan penyelidikan epidemiologi | 12 laporan | Persentase ketepatan, kelengkapan dan verifikasi alert dalam sistem kewaspadaan dini dan respon | 90% | | | | |
| | | | | | | | Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) | 12 laporan | Persentase ketepatan dan kelengkapan data dan informasi kesehatan | 73% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|-----------|----------------|---------|-------------------|--------|---|-------------|---|-----------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) | 52 edisi | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit | 12 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan penyebab kematian (cause of death) | 12 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT) | 17 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan survey kepuasan masyarakat | 2 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Data profil kesehatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal | 18 sistem | | | | | | |
| | | | | | | | Websit kesehatan berjalan optimal | 1 sistem | | | | | | |
| 9.2 | Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi | | | Kota YK | | | Data DBD (Demam Berdarah Dengue) | 12 dokumen | prosentase kasus DBD yang ditangani | 100% | 3,110,849,302 | 3,421,934,232 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB | 400 focus | presentase penemuan kasus TB paru | 56% | | | | |
| | | | | | | | Laporan survei angka bebas jentik kelurahan | 1 laporan | Prosentase keberhasilan pengobatan TB Paru | 90% | | | | |
| | | | | | | | Laporan pengendalian DBD | 12 laporan | cakupan penanganan ISPA | 100% | | | | |
| | | | | | | | Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis) | 12 laporan | Angka Kesembuhan Diare | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB | 200 orang | Kasus Penyakit Kusta tertangani | 100% | | | | |
| | | | | | | | Data permasalahan TB-HIV | 2 dokumen | Kasus HIV/ AIDS tertangani | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB puskesmas dan RS | 120 orang | Tersedianya informasi untuk pengambilan langkah selanjutnya untuk program imunisasi | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training | 30 orang | Praktisi swasta ikut berperan serta dalam pengendalian penyakit menular | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR | 6 fasyankes | Tersedianya informasi untuk langkah tingkat lanjut pencegahan kematian akibat penyakit menular | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare | 24 dokumen | Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder dll dalam upaya pengendalian penyakit menular | 625 orang | | | | |
| | | | | | | | Laporan pelacakan kasus kusta | 1 laporan | Penatalaksanaan penyakit menular di fasyankes dilaksanakan sesuai evidence based terbaru | 30 orang | | | | |
| | | | | | | | Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risi pada pasien IMS dan HIV/AIDS | 320 data | | | | | | |
| | | | | | | | Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual) | 4 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Peningkatan kapasitas layanan HIV | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Data imunisasi, pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru | 12 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) | 177 sekolah | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta penguatan layanan praktisi swasta | 70 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas | 6 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi sosialisasi tentang pngendalian penyakit menular | 25 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya | 270 orang | | | | | | |
| 9.3 | Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | | | Kota YK | | | Jumlah peserta Workshop Pencegahan, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa | 400 orang | Prosentase rujukan kasus penyakit kanker ke fasilitas kesehatan yang sudah lengkap | 15% | 295,084,416 | 324,592,858 | Sedang Berjalan | Dinkes |
| | | | | | | | Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA | 900 orang | Terinformasikannya tentang penyakit tidak menular | 180 orang | | | | |
| | | | | | | | Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th | 1800 orang | Diketahuinya Permasalahan PMT di kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM | 100 orang | Masyarakat mampu mencegah terjadinya Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | 400 orang | | | | |
| | | | | | | | Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas | 12 dokumen | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|---|-----------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular | 400 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Peningkatan kapasitas POSBINDU | 175 orang | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 136,898,022,109 | 150,587,834,323 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|---|--|-----------------|---|--------|-------------------|--|---|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 663,325,172 | 729,657,689 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | DPMPPA | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 26 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasi perkantoran | 100% | 250,534,400 | 275,587,840 | Sedang Berjalan | DPMPPA |
| | | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 72 oh | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | DPMPPA | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 125 jenis | | | 299,671,360 | 329,638,496 | Sedang Berjalan | DPMPPA |
| | | | | | | | | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 300 buah | | | | | | |
| | | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 500 buah | | | | | | |
| | | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 50 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Pembayaran listrik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa percetakan | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Penggandaan | 148.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 60 kali | | | | | | |
| | | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 10 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | DPMPPA | | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 113,119,412 | 124,431,353 | Sedang Berjalan | DPMPPA |
| | | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 25 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa pengelola arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 3 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 150,000,000 | 165,000,000 | | |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat | 7 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | DPMPPA | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat | 4 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 87,966,000 | 96,762,600 | Sedang Berjalan | DPMPPA |
| | | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda dua | 6 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | 131,000,000 | 144,100,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | DPMPPA | | | | Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (RENSTRA, RENJA, PENGKIN, PERKIN, RKA, DPA,LPPD) | 8 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 131,000,000 | 144,100,000 | | |
| | | | | | | | | Laporan kinerja OPD (LKPJ, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 7 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | BB | | | | |
| 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatkan toleransi, inklusitas, moralitas, etika dan budaya | Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat | 100% | | | | | | 1,218,537,707 | 1,340,391,477 | | |
| 4.1 | Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan | | | Kota Yogyakarta | | | | Pendampingan Kelembagaan LPMK | 45 LPMK | Kelembagaan LPMK yang terdampingi | 100% | 735,967,500 | 809,564,250 | Sedang Berjalan | DPMPPA |
| | | | | | | | | Pendampingan Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta | TP PKK Kota Yogyakarta | Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta yang terdampingi | | | | | |
| 4.2 | Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | | Kota Yogyakarta | | | | Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | 100% | | | 482,570,207 | 530,827,227 | Sedang Berjalan | DPMPPA |
| | | | | | | | | Pendataan Swadaya Murni Masyarakat | 1 dokumen | Kelembagaan LPMK dan RW yang terdampingi | 100% | | | | |
| | | | | | | | | Pendataan Swadaya Murni Masyarakat | 1 dokumen | Kelembagaan LPMK dan RW yang terdampingi | | | | | |
| | | | | | | | | Frekuensi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 kali | Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang terlaksana | | | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Satuan Polisi Pamong Praja

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--|---|---------------------------|---|--------|--|-------------------------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Kota Yogyakarta | | Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 3,415,218,852 | 3,756,740,737 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Satpol PP Kota Yogyakarta | | | Minuman harian pegawai yang tersedia | 242 hari | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | 100% | 387,068,000 | 425,774,800 | Sedang Berjalan | Satpol PP | |
| | | | | | | | Makanan dan minuman rapat yang tersedia | 112 sesi | | | | | | | |
| | | | | | | | Makanan dan minuman tamu yang tersedia | 24 sesi | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 30 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Satpol PP Kota Yogyakarta | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 67 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | 100% | 1,351,185,140 | 1,486,303,654 | Sedang Berjalan | Satpol PP | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 15 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Materai yang tersedia | 1.300 helai | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengiriman surat | 60 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia | 11 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia | 18 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia | 17 Jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Surat kabar yang tersedia | 12 bulan (4 jenis tiap bulan) | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa KIR kendaraan dinas/operasional | 22 unit, 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya | 64 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Nomor Polisi (Piat Nomor) kendaraan dinas/operasional yang diganti | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 13 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 449.170 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penjiplakan | 100 buku | | | | | | | |
| | | | | | | | Sepatu dinas harian (PDH) pegawai terpenuhi | 237 stel | | | | | | | |
| | | | | | | | Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi | 237 stel | | | | | | | |
| | | | | | | | Pakaian Dinas Upacara (PDU) pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi | 237 stel | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor dan gudang | 12 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa cuci / laundry | 12 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC | 10 unit, 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT | 48 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin ketik | 13 buah, 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang elektronik | 5 unit, 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera | 8 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer | 13 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan printer | 10 unit, 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan perbaikan laptop | 7 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Sarana / Peralatan kerja yang tersedia | 20 jenis | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan dan barang yang tersusun (SPP,SPM,SPJ,Laporan akuntansi & Laporan persediaan barang) | 5 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | 100% | 1,676,965,712 | 1,844,662,283 | Sedang Berjalan | Satpol PP | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 54 Dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen pengelola arsip | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan : | | | | | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--|----------------|---------------------------|--|--------|---|---------------------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | a. Pol PP | 73 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | b. dan ops lap (polisi) | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 1,224,804,000 | 1,347,284,400 | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Satpol PP Kota Yogyakarta | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor | 2 unit | | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 391,200,000 | 430,320,000 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Satpol PP Kota Yogyakarta | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : roda dua | 36 unit | | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 833,604,000 | 916,964,400 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : roda empat | 27 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : roda enam | 3 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : sepeda ontel | 7 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | 119,624,000 | 131,586,400 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Satpol PP Kota Yogyakarta | | | Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran yang tersusun | 15 dokumen | | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran | 100% | 119,624,000 | 131,586,400 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Laporan kinerja yang tersusun | 22 dokumen | | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | BB | | | | |
| 4 | Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan | | | | Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) | 80% | | | | | | 5,295,996,416 | 5,825,596,058 | | |
| 4.1 | Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi | | | Kota Yogyakarta | | | Operasi penegakan perda secara yustisi di luar jam kerja | 700 pelanggaran | | Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi | 100% | 1,080,659,000 | 1,188,724,900 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Penyidikan tindak pidana ringan | 700 kasus | | | | | | | |
| | | | | | | | Sidang tindak pidana ringan | 700 kasus | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pememksaan kasus dengan Berita Acara Singkat / Biasa | 4 kasus | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa | 4 kasus | | | | | | | |
| | | | | | | | Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah | 7 saksi / tersangka | | | | | | | |
| | | | | | | | Kebijakan Optimalisasi penegakan perda | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Penegakan hukum terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS | 24 kasus | | | | | | | |
| | | | | | | | Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS | 10 orang | | | | | | | |
| 4.2 | Operasi Ketertiban Umum | | | Kota Yogyakarta | | | Operasi Penindakan Hukum Terpadu | 48 laporan | | Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi | 100% | 4,215,337,416 | 4,636,871,158 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Operasi Penerbitan Gabungan | 80 Laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Kawasan Tertib Tugu | 96 Laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Kawasan Tertib Margo Utomo | 96 Laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Kawasan Tertib Malioboro | 180 Laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Kawasan Tertib Margo Mulyo | 96 Laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus | 12 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Praktek Kerja Lapangan/ Magang Pol. PP Opsnal | 10 orang | | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | | | | Cakupan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 60% | | | | | | 3,815,046,000 | 4,196,550,600 | | |
| 5.1 | Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus | | | Kota Yogyakarta | | | Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot | 140 laporan | | Kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta | 100% | 3,403,985,000 | 3,744,383,500 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara | 2 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan tempat penting milik Pemkot | 3 obyek vital | | | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan monitoring penjagaan khusus | 288 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan Komplek Balaikota | 12 bulan | | | | | | | |
| 5.2 | Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat | | | Kota Yogyakarta | | | Operasional petugas Intel Pol.PP dilaporkan | 12 laporan | | Terkendalinya gangguan keamanan, Kelentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta | 100% | 411,061,000 | 452,167,100 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Patroli Bina Pelajar | 32 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung | 168 pos kamling | | | | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|--|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|--------|---|----------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Intelijen untuk penyelidikan kasus | 5 kasus | | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan monitoring dan penyelidikan | 12 laporan | | | | | | |
| | Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan | | | | | | Persentase peningkatan kapasitas Pol PP | 20% | | | | 571,123,182 | 628,235,500 | |
| 6.1 | Pemantapan Kapasitas Pol.PP | | | Satpol PP Kota Yogyakarta | | | Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP | 34 laporan | Meningkatnya kesiapsiagaan PPNS dan Pol.PP | 100 orang | 302,759,182 | 333,035,100 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Tes kesamaptaan | 4 dokumen | Meningkatnya kecepatan dan ketepatan PPNS dan Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda | 40 orang | | | | |
| | | | | | | | Bimbingan mental bagi Satpol PP | 3 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Pemahaman peraturan perundang-undangan | 11 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Bimbingan Teknis Satpol PP | 8 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Workshop Sat Pol.PP | 2 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Profil Sat Pol PP | 100 buku | | | | | | |
| 6.2 | Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan | | | Satpol PP Kota Yogyakarta | | | Hasil kajian penegakan produk hukum daerah yang tersusun | 5 dokumen | Tersedianya hasil kajian, resume, dan kodifikasi peraturan perundang-undangan serta naskah kerjasama | 37 perda | 268,364,000 | 295,200,400 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Hasil kajian rancangan produk hukum daerah | 10 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Hasil kajian penanganan aduan | 8 kasus | | | | | | |
| | | | | | | | Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar | 4 kasus | | | | | | |
| | | | | | | | Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun | 8 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Hasil naskah kerjasama yang tersusun | 8 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah yang dilaporkan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Gelar hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah | 1 kali | | | | | | |
| | 7 Program Perlindungan Masyarakat | | | | | | Persentase kampung dalam perlindungan masyarakat | 57,60% | | | | 3,348,924,896 | 3,683,817,386 | |
| 7.1 | Pembinaan dan Mobilisasi Linmas | | | Kota Yogyakarta | | | Pembekalan Sat Linmas | 18 laporan | Meningkatnya kemampuan petugas linmas dalam penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas Kota Yogyakarta | 100% | 1,746,427,416 | 1,921,070,158 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas | 24 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas | 9 laporan | Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi | 450 stel | | | | | | |
| | | | | | | | KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi | 2500 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan wilayah dilaporkan | 365 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Piket rescue linmas dilaporkan | 365 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Penanganan musibah dan bencana dilaporkan | 36 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan HUT Linmas dilaporkan | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan Sat Linmas | 1 kali | | | | | | |
| 7.2 | Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib | | | | | | Operasional Duta Ketertiban dilaporkan | 2688 laporan | Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta | 38.613 orang | 1,602,497,480 | 1,762,747,228 | Sedang Berjalan | Satpol PP |
| | | | | | | | Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung | 60 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib | 135 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib | 10 kampung | | | | | | |
| | | | | | | | Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib | 6 laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib | 33.000 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Gelar sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota Yogyakarta | 1 kali | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 17,790,737,346 | 19,569,811,081 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|--------|--|--------|---|--|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemerataan Pelayanan Kesehatan | Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | 100% | | | Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 549,555,266 | 604,510,793 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | DPPKB | | | Minum pegawai yang tersedia | 11 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 171,336,000 | 188,469,600 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | 12 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | DPPKB | | | Materai yang tersedia | 530 materai Rp 3000 dan 530 materai Rp 6000 | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 257,173,590 | 282,890,949 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi | 2 saluran telepon, 2 sambungan listrik | | | | | | |
| | | | | | | | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumah-tangga/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara | Komputer, printer, AC, kipas angin, dispenser, wireless, pompa air, vertical blind, karpet, mesin ketik, meubelair | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 37 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 18 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 25 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 166.416 lembar, 65 jilid | | | | | | |
| | | | | | | | Jenis cetak | 10 digital print | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Rumah Tangga yang tersedia | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia | 6 buah buku, 2 jenis harian | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa keamanan Kantor | 1 paket | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | DPPKB | | | Dokumen administrasi Penatausahaan keuangan dan barang: SPP, SPM, SP2D, lap. Akuntansi yg tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 121,045,676 | 133,150,244 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 35 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 2 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelola arsip | 1 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | | | Dukungan 100% terhadap pemeliharaan aset SKPD | 100% | 201,799,500 | 221,979,450 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | DPPKB | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor | 1 paket | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 42,500,000 | 46,750,000 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | DPPKB | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 | 4 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 159,299,500 | 175,229,450 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 | 37 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 52,536,000 | 57,789,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | DPPKB | | | Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 52,536,000 | 57,789,000 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | B | | | | |
| 4 | Program Pengendalian Penduduk | | | | Mempertahankan raa-rata jumlah anak dalam keluarga | 100% | | | | | 1,529,308,800 | 1,682,239,680 | | |
| | | | | | Jumlah perjanjian kerjasama kependudukan, keluarga berencana dan pmbangunan keluarga | 100% | | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggungjawab | |
|---------|--|-----------|----------------|---------|---|--------|---|------------|----------------|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | Cakupan laporan data program KKBPB | 100% | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pengendalian Penduduk | | | DPPKB | | | Dokumen Parameter Pengendalian Kuantitas Kependudukan | 1 dokumen | | Parameter pengendalian kuantitas kependudukan dapat dijadikan sebagai alat kontrol dalam perencanaan dan pengendalian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPB) | 20% | 247,800,800 | 272,580,880 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Frekuensi pembinaan FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) | 18 kali | | Rumusan program kerja FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi isi-isu strategis kependudukan bagi Camat, Lurah dan PKB | 1 kali | | Camat, lurah dan PKB memahami isu-isu strategis kependudukan | 95 orang | | | | |
| | | | | | | | Modul Edukasi Pengendalian Penduduk | 1 dokumen | | Modul Edukasi Pengendalian Penduduk dapat dijadikan acuan dalam kegiatan advokasi dan KIE kepada sekolah/universitas dan pelajar/mahasiswa | 1 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Aparatur | 1 kali | | Aparatur Sipil Negara memahami permasalahan pengendalian penduduk | 54 orang | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Remaja | 1 kali | | Remaja memahami permasalahan pengendalian penduduk | 70 orang | | | | |
| 4.2 | Pengetahuan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi | | | Kota YK | | | Updating data keluarga dan pencatatan pelaporan | 2 Dokumen | | Dokumen data keluarga dan pencatatan dan pelaporan dapat dijadikan acuan evaluasi capaian kinerja | 2 dokumen | 1,281,508,000 | 1,409,658,800 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Cetak formulir SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga) | 1 paket | | Pemenuhan sarana updating data keluarga dan pencatatan dan pelaporan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Media promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPB (media radio, televisi, Mobil Unit Penerangan, PMPS) | 4 media | | Jangkauan promosi, publikasi dan KIE program KKBPB | 100% | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi pembinaan IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) | 1 kali | | Rumusan program kerja IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga pemerintah yang diadvokasi | 3 lembaga | | Terlaksananya MOU dengan lembaga pemerintah | 3 MOU | | | | |
| 5 | Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | | | | Presentase pasangan usia subur eserta KB aktif | 73,74% | | | | | | 2,430,608,350 | 2,673,669,185 | | |
| | | | | | Presentase cakupan usia subur yang berKB yang tidak terpenuhi | 11,24% | | | | | | | | | |
| 5.1 | Pelayanan Keluarga Berencana | | | Kota YK | | | Laporan monitoring pelayanan fasilitas kesehatan KB | 1 dokumen | | Fasilitas kesehatan KB tertib pencatatan dan pelaporan pelayanan KB | 50 fasilitas kesehatan | 1,466,169,240 | 1,612,786,164 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Frekuensi pelayanan KB Bergerak / Mobile, pemeriksaan papsmear dan IVA. | 9 kali | | Pasangan Usia Subur terlayani pelayanan KB Bergerak / Mobile, pemeriksaan papsmear dan IVA. | 1130 PUS | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kampung KB yang dibina | 14 kampung | | Menyokong penurunan persentase unmetneed | 0% | | | | |
| | | | | | | | laporan kesertaan KB Responsif Gender | 1 laporan | | Menyokong peningkatan persentase peserta KB pria | 5% | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi) | 28 kali | | Kelompok masyarakat/ komunitas disabilitas, pekerja seks komersial, pelajar dan remaja, dan lansia memahami permasalahan kesehatan reproduksi | 4 kelompok sasaran | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan | 204 kali | | Cakupan remaja kelompok PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang memahami pendewasaan usia perkawinan | 60 kelompok | | | | |
| | | | | | | | Jenis Pembinaan dan lomba bidang KB | 5 jenis | | Kelompok/keluarga/individu terpilih mewakili Kota Yogyakarta dalam lomba tingkat propinsi | 5 juara | | | | |
| | | | | | | | Laporan pembinaan dan evaluasi program KB | 1 dokumen | | PPKBD dan Sub PPKBD tertib pencatatan dan pelaporan indikator pelayanan KB | 1 dokumen | | | | |
| 5.2 | Pembinaan Pembangunan Keluarga | | | Kota YK | | | Laporan monitoring Pembangunan Keluarga | 1 dokumen | | Kader BKS dan UPPKS tertib pencatatan dan pelaporan indikator pembangunan keluarga | 1 dokumen | 964,439,110 | 1,060,883,021 | Sedang Berjalan | DPPKB |
| | | | | | | | Frekuensi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (pertemuan rutin kelompok, monitoring dan pertemuan dengan mitra kerja) | 7 kali | | Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera perempuan dan laki-laki mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan | 4 kelompok sasaran | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera | 4 kali | | Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera perempuan dan laki-laki memperbarui pengetahuan tata kelola kelompok | 190 orang | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (penerapan 8 fungsi keluarga) | 14 kali | | Anggota dan sasaran kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja memahami penerapan 8 fungsi keluarga | 100% | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi penguatan PPKS | 2 kali | | Sasaran kelompok BKS dan BKR memahami tumbuh kembang anak dan permasalahan remaja | 150 orang | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggungjawab |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|---|-------------------|--------|----------------|---|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | | | | 14 Kelom pok UPPK S | | | | |
| | | | | | | Frekuensi promosi hasil kelompok UPPKS | 5 kali | | | Cakupan pembinaan pemasaran hasil produksi kelompok UPPKS | | | | |
| | | | | | | Jenis seleksi dan Pembinaan bidang Pembangunan Keluarga | 8 jenis | | | Kelompok/keluarga/individu terpilih mewakili Kota Yogyakarta dalam lomba tingkat propinsi | 8 juara | | | |
| Total | | | | | | | | | | 4,763,807,916 | 5,240,188,108 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|--------------|---|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|---|----------------|--|----------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja | Kesehatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | 77,75 | | | | | | 129,383,000,000 | 135,852,150,000 | | |
| 1.1 | Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja | | | Umbulharjo | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan | 12 bulan | Pelayanan Kesehatan RS Rujukan yang sesuai standar | 12 bulan | 74,604,000,000 | 76,280,000,000 | Sedang Berjalan | RSUD Kota Jogja | |
| 1.2 | Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja | | | Umbulharjo | | | Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan | 2 jenis 1 unit | Pelayanan Kesehatan RS Rujukan yang sesuai standar | 100% | 54,779,000,000 | 59,572,150,000 | Sedang Berjalan | RSUD Kota Jogja | |
| Total | | | | | | | | | | | 129,383,000,000 | 135,852,150,000 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Kebakaran

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan & Operasional Perkantoran | 100% | | | | | | 1,459,361,391 | 1,532,329,461 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Kebakaran | | | Makanan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 22 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 238,440,000 | 250,362,000 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran | |
| | | | | | | | Makanan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 88 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah | 12 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Kebakaran | | | Materai 6000 yang tersedia | 200 lembar | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 729,696,650 | 766,181,483 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 700 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 10 yang terbayar | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 6 yang terbayar | 7 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 7 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 yang terbayar | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 8 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 36 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 75 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 250000 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 12 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia | 2 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 12 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 12 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 20 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan pakaian dinas harian | 88 uah | | | | | | | |
| | | | | | | | Pakaian kerja lapangan | 30 buah | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Dinas Kebakaran | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan laporan Akuntansi tersusun) | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 491,224,741 | 515,785,978 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 88 dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 19 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola arsip | 1 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 1,167,291,384 | 1,225,655,953 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Kebakaran | | | Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat | 3 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 180,243,884 | 189,256,078 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinas Kebakaran | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. roda 10 | 2 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi | 100% | 987,047,500 | 1,036,399,875 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional roda 6 | 8 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional roda 4 | 7 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional roda 3 | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional roda 2 | 7 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | 40,000,000 | 42,000,000 | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | Dinas Kebakaran | | | Frekuensi diklat formal yang diikuti | 4 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 40,000,000 | 42,000,000 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrkiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|--------------|--|--------------------------------|---|-----------------|--|--------|--|------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | | | | | 94,650,000 | 99,382,500 | | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinas Kebakaran | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA) | 5 dokumen | | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 94,650,000 | 99,382,500 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | | Nilai akuntabilitas kinerja SKPD | | | | | |
| 5 | Program Pencegahan Kebakaran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit | 99% | | | | | 877,455,000 | 921,327,750 | | | |
| 5.1 | Pencegahan Bahaya Kebakaran | | | Kota YK | | | Laporan pelayanan rekomendasi kebakaran | 1 laporan | | Terbitnya rekomendasi sarana perlindungan bangunan | 12 bulan | 586,235,000 | 615,546,750 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran |
| | | | | | | | Pemeriksaan sarana perlindungan bangunan | 200 kali | | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan proteksi kebakaran | 200 bangunan | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan DED Hidran Kampung | 1 paket | | Tersedianya Detail Engineering Desain Hidran Kampung | 5 dokumen | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan konstruksi Hidran Kampung | 2 lokasi | | Terbangunnya konstruksi Instalasi Hidran Kampung | 2 paket | | | | |
| 5.2 | Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran | | | Kota YK | | | Penyuluhan penanggulangan kebakaran | 50 kali | | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan kebakaran | 2500 orang | 291,220,000 | 305,781,000 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran |
| | | | | | | | Simulasi penanggulangan kebakaran | 14 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penerimaan Kunjungan siswa KB/ TK/ SD | 100 kali | | Meningkatnya kesadaran anak-anak/ siswa dalam penanggulangan kebakaran | 11 bulan | | | | |
| | | | | | | | Pameran PMPS | 50 hari | | Terlaksananya pameran PMPS | 50 hari | | | | |
| 6 | Program Penanggulangan Kebakaran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit | 93,60% | | | | | 2,095,023,000 | 2,199,774,150 | | | |
| 6.1 | Penanganan Kebakaran | | | Kota YK | | | Pemadaman kebakaran | 140 kali | | Pemadaman kebakaran berhasil | 140 kali | 1,989,763,000 | 2,089,251,150 | Sedang Berjalan | Dinas Kebakaran |
| | | | | | | | Operasi Penyelamatan/ Evakuasi | 50 kali | | Operasi Penyelamatan/Evakuasi Dilakukan | 50 kali | | | | |
| | | | | | | | PAM kegiatan insidentil/ sewa mobil PK/ penyiraman | 125 kali | | Kegiatan insidentil aman/ sewa mobil PK dilayan/ penyiraman terlaksana | 125 kali | | | | |
| | | | | | | | PAM PMPS | 50 kali | | PMPS aman | 50 kali | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan rutin petugas pemadam | 8 kali | | Meningkatnya ketrampilan petugas pemadam | 8 kali | | | | |
| | | | | | | | Piket pemadam kebakaran | 365 hari | | Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran | 365 hari | | | | |
| | | | | | | | Pakaian Kerja Lapangan | 80 stel | | Pakaian Kerja Lapangan | 80 stel | | | | |
| 6.2 | Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran | | | Kota YK | | | Pengisian tabung pemadam kebakaran | 200 tabung | | Tabung pemadam kebakaran siap pakai | 200 tabung | 105,260,000 | 110,523,000 | Sedag Berjalan | Dinas Kebakaran |
| | | | | | | | Pengadaan alat pemadam kebakaran | 2 paket | | Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran dan Rescue | 2 paket | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 5,733,780,775 | 6,020,469,814 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Dinas Pendidikan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|------------------|---|--------|--|------------------|--|--------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 12,955,473,062 | 13,086,640,129 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Dinas Pendidikan | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 450 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 491,310,000 | 496,223,100 | Sedang Berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 263 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk tamu | 255 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 25 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Pendidikan | | | Materai 6000 yang tersedia | 1600 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 2,621,121,998 | 2,648,945,554 | Sedang Berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 450 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengiriman/paket | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 6 yang terbayar | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 6 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 75 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 20 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Keamanan | 2 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 63 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Percetakan | 8 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.100.000 lembar | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 23 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Listrik | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 1 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Perpustakaan | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 17 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumahtanggaan/komunikasi/studio | 6 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 15 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja | 25 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Dinas Pendidikan | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 9,843,041,064 | 9,941,471,475 | Sedang Berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 4 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelolaan arsip | 6 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan/PTT | 406 orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 1,091,634,000 | 1,102,550,340 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Dinas Pendidikan | | | Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat | 5 Jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 756,500,000 | 764,065,000 | Sedang Berjalan | Sekretariat | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Dinas Pendidikan | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6 | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 335,134,000 | 338,485,340 | Sedang Berjalan | Sekretariat | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4 | 6 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2 | 75 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | 150,703,060 | 153,717,121 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Dinas Pendidikan | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 150,703,060 | 153,717,121 | Sedang Berjalan | Sekretariat | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung jawab | |
|---------|---|------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|--|--------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | BB | | | | |
| 4 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar | Pendidikan | Daya saing pendidikan meningkat | | Rerata Ujian Sekolah Daerah SD | 67 | | | | | | 7,322,641,100 | 7,430,398,592 | | |
| | | | | | Persentase SD akreditasi A | 75% | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah siswa berprestasi tk Nas | 6 medali | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD | | | Dinas Pendidikan | | | Frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah | 30 kali | | Rerata US SD | 67 | 1,832,393,600 | 1,869,041,472 | Sedang Berjalan | Bidang SD |
| | | | | | | | Frekuensi Pendalaman Materi | 30 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan wrokshop penyusunan dok kurikulum 2013 dan mulok | 21 laporan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian | 30 guru | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Ulangan Umum Bersama (UUB) kelas 3 | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Ujian Sekolah IPS dan PKn | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Ujian Sekolah Daerah 3 mapel | 1 kali | | | | | | | |
| 4.2 | Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD | | | Dinas Pendidikan | | | Jumlah sekolah peserta Workshop manajemen sekolah Dasar | 166 sekolah | | Jumlah Sekolah Memenuhi SNP | 96% | 3,869,533,000 | 3,908,228,330 | Sedang Berjalan | Bidang SD |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang terdampangi Akreditasi Sekolah Dasar | 20 sekolah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah | 5 sekolah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kejuaraan Lomba Sekolah sehat | 3 kejuaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kejuaraan Lomba Budaya Mutu | 1 kejuaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Lomba Gugus Depan Unggul | 1 kejuaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengadaan Meja Kursi Siswa | 1 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengadaan Almari Klas | 2 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah paket Rehab Sekolah | 4 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | BOS SD Negeri | 90 Sekolah | | | | | | | |
| 4.3 | Pengelolaan Kesiswaan SD | | | Dinas Pendidikan | | | Kegiatan Klinik Sainst | 1 kegiatan | | Jumlah Siswa Berprestasi Tingkat Nasional | 6 Medali | 1,620,714,500 | 1,653,128,790 | Sedang Berjalan | Bidang SD |
| | | | | | | | Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD) | 6 kejuaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN) | 6 kejuaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga siswa Nasional (OOSN) SD | 6 kejuaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil | 2 kejuaraan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) SD | 24 Kejuaraan | | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pendidikan | Daya saing pendidikan meningkat | | Rerata UN SMP | 72,5 | | | | | | 10,928,778,598 | 11,147,354,170 | | |
| | | | | | Persentase SMP akreditasi A | 85% | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah siswa berprestasi tk Nas | 6 Medali | | | | | | | | | |
| 5.1 | Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP | | | Dinas Pendidikan | | | Jumlah Mapel Pendalaman materi UN SMP | 4 mapel | | Rerata UN SMP | 72,5 | 1,323,616,000 | 1,350,088,320 | Sedang Berjalan | Bidang SMP |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah pelaksana Tes Pendalaman Materi UNBK SMP | 65 sekolah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah mapel pelaksanaan Bedah SKL UN SMP | 4 mapel | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Workshop penyusunan dokumen Kurikulum | 1 dok | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan penulisan soal ujian | 20 guru | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Kajian Mulok | 2 dok | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kredit Semester) | 4 sekolah | | | | | | | |
| 5.2 | Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP | | | Dinas Pendidikan | | | Jumlah sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah | 59 sekolah | | Persentase SMP akreditasi A | 85% | 7,935,024,500 | 8,093,724,990 | Sedang Berjalan | Bidang SMP |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang dilakukan Pendampingan Akreditasi Sekolah | 10 sekolah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop Evaluasi Diri Sekolah | 59 sekolah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah | 4 sekolah | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengadaan Meubelair Ruang Kelas | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Pengadaan Komputer | 576 unit | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|---|--------------------------|---|----------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pemeliharaan gedung sekolah | 1 paket | | | | | | | | |
| | | | | | | | BOS SMP Negeri | 16 sekolah | | | | | | | | |
| 5.3 | Pengelolaan Kesiswaan SMP | | | Dinas Pendidikan | | | Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN) | 5 kejuaraan | Jumlah siswa berprestasi tingkat Nasional | 6 medali | 1,670,138,098 | 1,703,540,860 | Sedang Berjalan | Bidang SMP | | |
| | | | | | | | Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD | 5 kejuaraan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD) | 5 kejuaraan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kejuaraan dalam olimpiade literasi siswa nasional SMP | 4 kejuaraan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja | 4 kejuaraan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kejuaraan dalam Liga Pelajar Indonesia | 2 medali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi pelaksanaan Gelar Pelajar Jogja | 10 kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum | 12 kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekwensi pelaksanaan Pameran Pendidikan | 1 kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah siswa peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa | 25 siswa | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar | 200 siswa | | | | | | | | |
| 6 | Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD | Pendidikan | Aksesibilitas pendidikan meningkat | | Rerata UNPK | 35.00 | | | | | 5,051,343,896 | 5,133,739,474 | | | | |
| | | | | | Jumlah LKP terakreditasi | 10 lembaga | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi | 20 lembaga | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan | | | Dinas Pendidikan | | | Frekuensi Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C | 3 kali | Rerata UNPK | 35 | 1,863,129,996 | 1,881,761,296 | Sedang Berjalan | Bidang PNF | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C | 3 kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C | 2 kali | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP) | 10 MTMP | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah insentif Tutor Kesetaraan yang dikelola | 100 orang | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga yang memperoleh bimbingan Akreditasi lembaga PKBM | 5 lembaga | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga yang memperoleh bimbingan Teknis Pengelola TBM | 20 lembaga | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelurahan yang memperoleh bimbingan Teknis Program JBM | 15 kelurahan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah rombel yang mendapat BOSDA SPNF SKB | 11 rombel | | | | | | | | |
| 6.2 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | | | Dinas Pendidikan | | | Jumlah layanan Layanan Lembaga PAUD yang dibina | 4 Jenis Layanan PAUD | Jumlah lembaga PAUD siap terakreditasi | 20 lbg | 2,612,381,100 | 2,664,628,722 | Sedang Berjalan | Bidang PNF | | |
| | | | | | | | Jumlah juara Lomba Gugus PAUD | 3 juara | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Insentif Pendidik PAUD yang dikelola | 918 pendidik | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD | 80 orang tersertifikasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD | 670 orang tersertifikasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS | 50 orang tersertifikasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP PAUD | 450 lembaga | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Pendataan PAUD | 1 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Gebyar PAUD | 1000 peserta | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga peserta Workshop Akreditasi PAUD | 50 lembaga | | | | | | | | |
| 6.3 | Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan | | | Dinas Pendidikan | | | Jumlah lembaga dalam Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF | 30 lembaga | Jumlah LKP terakreditasi | 10 lbg | 575,832,800 | 587,349,456 | Sedang Berjalan | Bidang PNF | | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus | 10 lembaga | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan | 7 dokumen | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Pendidikan Vokasional | 60 orang | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus | 20 orang | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi | 2 kejuaraan | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kejuaraan dalam Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas | 16 kejuaraan | | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung jawab |
|--------------|--------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------|--------|---|-------------|------------------------|--------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional | 318 sekolah | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan | 318 sekolah | | | | | | |
| 7.6 | Pengelolaan Pendidikan Inklusi | | | Dinas Pendidikan | | | Laporan hasil Workshop Kurikulum ABK | 1 dokumen | Jumlah sekolah inklusi | 45 sek | 1,429,918,500 | 1,458,516,870 | Sedang Berjalan | Bidang Inklusi |
| | | | | | | | Laporan hasil Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Workshop pemenuhan Sarpras pendidikan inklusi | 45 sek | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK) | 110 GPK | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Pendataan ABK di SPPI | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Pelatihan pendidikan inklusi TK dasar untuk guru/GPK | 100 guru | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah siswa yang melaksanakan Assesmen | 150 siswa | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Diklat vokasi membuat kue | 15 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar | 35 orang | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 137,495,811,146 | 139,883,831,152 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

BPBD

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrkiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|----------|--|---------------------------------------|--|--------|---|--------|---|----------------|--|--------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 422,193,000 | 480,393,000 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | BPBD | | | Makanan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 52 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 126,288,000 | 126,288,000 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | | | | | | | Makanan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 12 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 9 laporan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | BPBD | | | Materai Rp 3000 yang tersedia | 200 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 241,305,000 | 299,505,000 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | | | | | | | Materai Rp 3000 yang tersedia | 400 buah | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 6 yang terbayar | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 yang terbayar | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 3 yang terbayar | 65 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 yang terbayar | 7 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 36 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 24 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Telepon | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Listrik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 50,000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 26 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan Taman | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan pakaian dinas Harian | 12 stel | | | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan pakaian kerja lapangan | 12 stel | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | BPBD | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 Jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 54,600,000 | 54,600,000 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 12 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola arsip | 1 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 274,662,000 | 274,662,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | BPBD | | | jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat | 2 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 30,000,000 | 30,000,000 | Sedang Berjalan | BPBD |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | BPBD | | | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 6 | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 244,662,000 | 244,662,000 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3 | 65 unit | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|---|---------------------------------------|--|---------|--|-------------|---|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | 7 unit | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Meningkat | | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | |
| 3.1 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | | | BPBD | | | Frekuensi diklat formal yang diikuti | 2 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 36,000,000 | 36,000,000 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Mengkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 17,050,000 | 17,050,000 | | |
| 4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | BPBD | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 17,050,000 | 17,050,000 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | | | | | | | Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SRM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 100% | | | | |
| | Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat | | Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam | 100% | | | | | 2,636,251,050 | 2,636,251,050 | | |
| 5.1 | Pencegahan Bahaya Bencana Alam | | | Kota YK | | | Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB) | 15 Kampung | Terbentuknya masyarakat tangguh bencana baik laki-laki maupun perempuan termasuk lansia, anak-anak, dan disabilitas | 100% | 1,568,236,550 | 1,568,236,550 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | | | | | | | Pelatihan Penanggulangan bencana | 12 kali | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Penanggulangan Bencana baik laki-laki maupun perempuan termasuk lansia, anak-anak, dan disabilitas | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional Pusdalops PB | 12 bulan | Terseleenggaranya operasi penanggulangan bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | 1 dokumen | Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kerja bakti kesiapsiagaan bencana | 12 kali | Terlaksananya antisipasi bencana | 100% | | | | |
| 5.2 | Penanganan Bencana Alam | | | Kota YK | | | Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) | 12 bulan | Terseleenggaranya Tim Reaksi Cepat (TRC) | 100% | 919,112,500 | 919,112,500 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | | | | | | | Manajemen Logistik | 12 bulan | Terwujudnya Manajemen Logistik | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kedaruratan Bencana | 10 kali | Terbentuknya komunitas Kedaruratan Bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana | 50 kali | Terlaksananya Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Apel Siaga Bencana | 1 Kali | Terlaksananya Apel Siaga Bencana | 100% | | | | |
| 5.3 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | | Kota YK | | | Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi | 12 bulan | Pemeriksaan Bencana | 100% | 148,902,000 | 148,902,000 | Sedang Berjalan | BPBD |
| | | | | | | | Monitoring daerah rawan bencana | 12 bulan | Monitoring daerah rawan bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kerja bakti pasca kejadian bencana | 20 kali | Kerja bakti pasca bencana | 1000 orang | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,386,156,050 | 3,444,356,050 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Kraton

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|--------------------------------|---|--------|--|--------|---|--|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 785,440,200 | 785,440,200 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kraton | | | Makan dan minum yang tersedia Koordinasi | | | | 114,414,500 | 114,414,500 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia Pegawai | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kraton | | | Jasa Perlengkapan Kantor yang tersedia (piket) | 12 orang, 365 hari | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 459,830,900 | 459,830,900 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 43 Jenis | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia | 10 Jenis | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 505 buah | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 1290 buah | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia. Jasa Kebersihan Kantor | 28 jenis, 12 bulan | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 43 Buah | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia | 3 Jenis | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia | 7 Jenis | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Keluaran : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 11.000 VA,7000 m3,1300 VA 12 bln | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Belanja Surat Kabar/Majalah yang tersedia | 2 Jenis | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia | 3 Jenis | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Perijinan kendaraan dinas.-(STNK) Roda 4-Roda 3 dan Roda 2 yang terbayar | 1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3 | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jasa cetakan dan penggandaan | 145.000 lbr | | 100% | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|--------------------------------|---|--------|---|--------|---|---|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang tersedia | 6 hari | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | meja 70 bh kursi 490 bh,tenda 8 hr pkt sound system 10 pkt | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Belanja Pemeliharaan yang tersedia | 10 Jenis | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Belanja Modal yang tersedia | 9 Jenis | | 100% | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kraton | | | Jasa Pengelola Keuangan/Barang | 12 bln, 21 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 211,194,800 | 211,194,800 | | |
| | | | | | | | Jasa Pelaksana Kegiatan Kearsipan | 2 orang | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 6 orang, 14 bulan | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pelaksana Kegiatan (Penatalaksana Kepegawaian) | 1 orang, 11 bulan | | 100% | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 112,165,000 | 112,165,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kraton | | | Jasa pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor | 5 unit, 1 jenis, 12 bulan | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 44,500,000 | 44,500,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kraton | | | Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas | 1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 67,665,000 | 67,665,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100% | | | | | 34,283,000 | 34,283,000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kraton | | | Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran | 100% | 34,283,000 | 34,283,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| | | | | | | | Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik , SKM, SPIP, Profil) | 5 Dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | 100% | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton | | | | Terwujudnya Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton | 100% | | | | | 2,222,448,650 | 2,267,448,650 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton | | | Kraton | | | Sosialisasi,Pemilihan dan Penguohan RT,RW dan LPMK | | Sosialisasi,Pemilihan dan Penguohan RT,RW dan LPMK | 100% | 384,747,950 | 384,747,950 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| | | | | | | | Kegiatan Evaluasi Kelurahan, | 3 Kelurahan | Kegiatan Evaluasi Kelurahan, | 100% | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|--------|-------------------|---|-------------------------|---|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat, | 256 orang | Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat, | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat. | 225 orang | Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat. | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan | Kec dan 3 kelurahan | Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Monitoring Kampung Hijau | 10 kali | Monitoring Kampung Hijau | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan | 7 eksemplar | Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Rakorpem | 3 Kelurahan | Rakorpem | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) | 50 orang | Pemantauan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) | 100% | | | | | |
| | | | | | | Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika) | 10 orang, 11 bulan | Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika) | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelayanan Masyarakat (Sekaten) | 45 kegiatan | Pelayanan Masyarakat (Sekaten) | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Anggota Satlinmas | 150 orang | Pembinaan Anggota Satlinmas | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pengamanan Umum; | 4 kali | Pengamanan Umum; | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sambang Kampung | 6 kali | Sambang Kampung | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pendataan Izin Pondokan | 6 kali | Pendataan Izin Pondokan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pendataan Izin HO | 6 kali | Pendataan Izin HO | 100% | | | | | |
| | | | | | | Operasi Ketertiban | 96 kali | Operasi Ketertiban | 100% | | | | | |
| | | | | | | Operasi Vandal | 24 kali | Operasi Vandal | 100% | | | | | |
| | | | | | | Operasi Gabungan | 9 kali | Operasi Gabungan | 100% | | | | | |
| | | | | | | PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran) | PAM 61 kali | PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran) | 100% | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton | | | Kraton | | Verifikasi dan distribusi E-KTP | Kecamatan dan Kelurahan | Verifikasi dan distribusi E-KTP | 100% | 148,656,400 | 148,656,400 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton | |
| | | | | | | Penyuluhan, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame | Kecamatan dan Kelurahan | Sosialisasi, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame | 100% | | | | | |
| | | | | | | Verifikasi dan Penerbitan IMB, HO, dan Ijin Pondokan | Kecamatan dan Kelurahan | Verifikasi dan Penerbitan IMB, HO, dan Ijin Pondokan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penetapan Terpadu Kecamatan (PATEN) | 6 Orang, 11 bulan | Penetapan Terpadu Kecamatan (PATEN) | 100% | | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|--|----------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton | | | Kraton | | | Kecamatan | | | 430,367,000 | 430,367,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton | |
| | | | | | | | TKPK Kecamatan Kraton | 8 Kali | TKPK Kecamatan Kraton | 100% | | | | |
| | | | | | | | Administrasi TP PKK se Kec. Kraton. | Kecamatan dan 3 Kelurahan. | Penyuluhan TP PKK se Kec. Kraton. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan pariwisata dan budaya | Kecamatan dan 3 Kelurahan. | Penyuluhan pariwisata dan budaya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kecamatan Sehat | 50 orang | Penyuluhan Kecamatan Sehat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian | Kecamatan dan 3 Kelurahan. | Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton. | Kecamatan dan 3 Kelurahan. | Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Kesenian (Festival Kelurahan) | Kecamatan dan 3 Kelurahan. | Kegiatan Kesenian (Festival Kelurahan) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Senam dan Kerja Bakti Massal | 300 orang | Senam dan Kerja Bakti Massal | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan | 60 orang | Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kethoprak | 60 orang | Penyuluhan Kethoprak | 100% | | | | |
| | | | | | | | TKSK | 3 Kegiatan | TKSK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Penyandang Disabilitas | 3 Kegiatan | Penyuluhan Penyandang Disabilitas | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pokdarwis | 2 Kegiatan | Penyuluhan Pokdarwis | 100% | | | | |
| | | | | | | | TPUKS | 3 kegiatan | TPUKS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Latihan Karawitan | 10 Kegiatan | Latihan Karawitan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Perwosi | 1 Kegiatan | Penyuluhan Perwosi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Formi | 1 Kegiatan | Formi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Koni | 2 Kegiatan | Koni | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan GOPTKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia) | 25 orang | GOPTKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sekretariat PKK | | | | | | | |
| | | | | | | | Lomba Administrasi Sim PKK | 90 orang | Lomba Administrasi Sim PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pertemuan Pengurus TP PKK Kec | 30 Orang | Pertemuan Pengurus TP PKK Kec | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pertemuan TP PKK Kec dan Kel se Kec Kraton | 75 Orang | Pertemuan TP PKK Kec dan Kel se Kec Kraton | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pokja 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME | 60 orang | Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Obat Terlarang | 50 orang | Penyuluhan Obat Terlarang | 100% | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|--------------|-------------------|--------|--|------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Penguatan Kader MK | 50 orang | Penguatan Kader MK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba Simulasi | 30 orang | Lomba Simulasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pokja 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Public Speaking | 50 orang | Penyuluhan Public Speaking | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | 30 orang | Penyuluhan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pertemuan Pokja II se Kecamatan | 180 orang | Pertemuan Pokja II se Kecamatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kader UP2K | 30 orang | Penyuluhan Kader UP2K | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pokja 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Peran PKK dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi | 60 orang | Penyuluhan Peran PKK dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi PKK dalam Pemeriksaan IVA dan kanker leher rahim | 60 orang | Sosialisasi PKK dalam Pemeriksaan IVA dan kanker leher rahim | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba Bayi Sehat | 70 orang | Lomba Bayi Sehat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Ketahanan Keluarga melalui PKK | 60 orang | Sosialisasi Ketahanan Keluarga melalui PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba KKG PKK Kota ke Kec | 90 orang | Lomba KKG PKK Kota ke Kec | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monitoring KKG Kecamatan ke Kelurahan | 50 orang | Monitoring KKG Kecamatan ke Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pencatatan Pelaporan KKG 3 Kelurahan | 60 orang | Penyuluhan Pencatatan Pelaporan KKG 3 Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pertemuan Rutin Pokja IV Kecamatan dan Kelurahan | 180 orang | Pertemuan Rutin Pokja IV Kecamatan dan Kelurahan | 100% | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan | | | Kel. Patehan | | | Gebyar PAUD | Masyarakat | Gebyar PAUD | 100% | 206,751,000 | 221,751,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| | | | | | | | Pawai/ Karnaval Kel | Masyarakat | Pawai Budaya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan FKPT Ngadisuryan | 50 orang | Pembinaan FKPT Ngadisuryan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan FKPT Patehan | 50 orang | Pembinaan FKPT Patehan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Penanganan PMKS | 40 orang | Sosialisasi Penanganan PMKS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pemaksimalan PSKS | 40 orang | Sosialisasi Pemaksimalan PSKS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kader Untuk Penanganan Bencana | 40 orang | Sosialisasi Pemaksimalan Kebencanaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Keluarga di Kampung Ngadisuryan | 90 orang | Pembinaan Keluarga ke Kampung Ngadisuryan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Keluarga di Kampung Taman | 90 orang | Pembinaan Keluarga ke Kampung Taman | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|---|-------------------------------------|---|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Keluarga di kampung Patehan/Nagan | 120 orang | Pembinaan Keluarga di kampung patehan/ngadisuryan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sos.Website www.siwardapatehan di ngadisuryan | 84 orang | Sos.Website www.siwardapatehan di ngadisuryan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sos.Website www.siwardapatehan di Taman | 84 orang | Sos.Website www.siwardapatehan di Taman | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sambang Wilayah | 10 kali | Sambang Wilayah | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Penyusunan proposal dan lap.RT/RW | 55 orang | Pelatihan Penyusunan proposal dan lap.RT/RW | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Penyusunan Proposal dan Laporan bagi Lembaga- Lembaga | 60 orang | Pelatihan Penyusunan Proposal dan Laporan bagi Lembaga- Lembaga | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gerakan Jum'at Bersih | 10 kali | Gerakan Jum'at Bersih | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pendidikan PAUD | 40 orang | Pelatihan Pendidikan PAUD | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sarasehan Lansia | 90 orang | Sarasehan Lansia | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi peran dan fungsi kader KESI | 40 orang | Sosialisasi peran dan fungsi kader KESI | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi STBM | 40 orang | Sosialisasi STBM | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan simulasi | 50 orang | Pelatihan simulasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan perilaku budi pekerti dan ketahanan kelurahan | 50 orang | Pelatihan perilaku budi pekerti dan ketahanan kelurahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan mendongeng | 40 orang | Pelatihan mendongeng | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan UP2K | 40 orang | Pelatihan UP2K | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Aneka Olahan Ikan | 40 orang | Aneka Olahan Ikan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Inerbeauty dan interbeauty | 40 orang | Pelatihan Inerbeauty dan interbeauty | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan kader posyandu | 40 orang | Pelatihan kader posyandu | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan kader lansia | 40 orang | Pelatihan kader lansia | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sos.Website www.siwardapatehan.id bagi kader PKK | 85 orang | Sos.Website www.siwardapatehan.id bagi kader PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | Intervensi Untuk Penduduk Miskin/rentan | Masyarakat Patehan | Intervensi Untuk Penduduk Miskin/rentan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJMD | 10 RW | Penyusunan RPJMD | 100% | | | | | |
| | | | | | | Operasional Kesi | Kader Kes RW dan Kader Kes RW siaga | Operasional Kesi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Operasional JBM | 10 RW | Operasional JBM | 100% | | | | | |
| | | | | | | Administrasi PKK RT | PKK RT | Administrasi PKK RT | 100% | | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|---|-------------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK RW | PKK RW | Administrasi PKK RW | 100% | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan | | | Kraton | | | Penyuluhan SIM Administrasi PKK | 220 orang | Penyuluhan SIM Administrasi PKK | 100% | 281,588,000 | 296,588,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| | | | | | | | Workshop tentang Makanan Berbahaya, Kosmetik yang aman & keamanan Obat & Obat Tradisional | 40 orang | Workshop tentang Makanan Berbahaya, Kosmetik yang aman & keamanan Obat & Obat Tradisional | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Surveyor | 40 orang | Penyuluhan Surveyor | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan IKPSM | 40 orang | Penyuluhan IKPSM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan WKSMB | 40 orang | Penyuluhan WKSMB | 100% | | | | |
| | | | | | | | Keg. Seni Budaya Tari & Karawitan | 60 orang | 7. Keg. Seni Budaya Tari & Karawitan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Keg. Pelestarian Bdy Dolanan Anak | 30 orang | Keg. Pelestarian Bdy Dolanan Anak | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kader PHBS | 90 orang | Penyuluhan Kader PHBS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kampung Ramah Anak | 90 orang | Penyuluhan Kampung Ramah Anak | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kegiatan Posyandu | 40 orang | Penyuluhan Kegiatan Posyandu | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Administrasi Kader Paud | 40 orang | Penyuluhan Administrasi Kader Paud | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kegiatan Lansia | 80 orang | Penyuluhan Kegiatan Lansia | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pengurus Bank Sampah | 40 orang | Penyuluhan Pengurus Bank Sampah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Wawasan Nusantara | 40 orang | Wawasan Nusantara | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jemparingan Siliran | 25 orang | Jemparingan Siliran | 100% | | | | |
| | | | | | | | Festival Batik & Kuliner | | Festival Batik & Kuliner | 100% | | | | |
| | | | | | | | Workshop Budidaya Tanaman Hydroponik | 40 orang | Workshop Budidaya Tanaman Hydroponik | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kursus M.C. Bahasa Indonesi/Jawa | 40 orang | Kursus M.C. Bahasa Indonesi/Jawa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Membuat hantaran | 25 orang | Pelatihan Membuat hantaran | 100% | | | | |
| | | | | | | | Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan | masyarakat Miskin | Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD | 18 RW | Penyusunan RPJMD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional Kesi | RW Siaga | Operasional Kesi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM | Murid SD/SMP,SMA | Operasional JBM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK RT | PKK RT | Administrasi PKK RT | 100% | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK RW | PKK RW | Administrasi PKK RW | 100% | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|---|-------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten | | | Kraton | | | Penyuluhan SIM Kader PKK RT, RW dan TP. PKK | 90 orang | Penyuluhan SIM Kader PKK RT, RW dan TP. PKK | 100% | 200,860,000 | 215,860,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| | | | | | | | Penyuluhan Administrasi PKK RT dan RW | 70 orang | Penyuluhan Administrasi PKK RT dan RW | 100% | | | | |
| | | | | | | | Festival Kesenian | 100 orang | Festival Kesenian | 100% | | | | |
| | | | | | | | Festival Jeron Beteng | 200 orang | Festival Jeron Beteng | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Remaja dan Generasi Muda | 30 orang | Penyuluhan Remaja dan Generasi Muda | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pangrukti Laya | 30 orang | Pelatihan Pangrukti Laya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Administrasi Pos Yandu | 53 orang | Penyuluhan Administrasi Pos Yandu | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kader Lansia | 53 orang | Penyuluhan Kader Lansia | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Memakai Blangkon tanpa dijahit | 30 orang | Pelatihan Memakai Blangkon tanpa dijahit | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan Karang Taruna dalam rangka Sumpah Pemuda | 100 orang | Sarasehan Karang Taruna dalam rangka Sumpah Pemuda | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Asesoris | 30 orang | Pelatihan Pembuatan Asesoris | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan web marketing/online shop | 30 orang | Pelatihan Pembuatan web marketing/online shop | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bazar Potensi Wilayah | 50 orang | Bazar Potensi Wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan | 1 kel | Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD | 1 kel | Penyusunan RPJMD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional Kesi | 1 kel | Operasional Kesi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM | 15 RW | Operasional JBM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK RT | 53 RT | Administrasi PKK RT | 100% | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK RW | 15 RW | Administrasi PKK RW | 100% | | | | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton | | | Kraton | | | Kecamatan | | | | 569,478,300 | 569,478,300 | Sedang berjalan | Kecamatan Kraton |
| | | | | | | | Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, | 15 kali | Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan | 7 eksemplar | Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Profil Kelurahan | 4 buku; | Penyusunan Profil Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Petugas Surveyor | 58 orang | Penyuluhan Petugas Surveyor | 100% | | | | |
| | | | | | | | BELANJA PEMELIHARAAN | | BELANJA PEMELIHARAAN | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|---|-------------------|---|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Administrasi Pendukung Kelurahan Patehan | 3 kegiatan | Administrasi Pendukung Kelurahan Patehan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Belanja Pemeliharaan/ Pembersih Jalan | | Belanja Pemeliharaan/ Pembersih Jalan | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Jalan Lingkungan | 59m2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Jalan Lingkungan | 310m2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Jalan Conblok | 30m2 | Pemeliharaan Jalan Conblok | 100% | | | | | |
| | | | | | | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan PJU Kelurahan Patehan | 110 titik | Pemeliharaan PJU Kelurahan Patehan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kelurahan Panembahan | | Kelurahan Panembahan | | | | | | |
| | | | | | | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasana Fasilitas Umum | | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasana Fasilitas Umum | | | | | | |
| | | | | | | Tangkap air | 6m x 0,7 m | Tangkap air | 100% | | | | | |
| | | | | | | SPAH | 10 buah | SPAH | 100% | | | | | |
| | | | | | | SPAH | 10 buah | SPAH | 100% | | | | | |
| | | | | | | SPAH | 10 buah | SPAH | 100% | | | | | |
| | | | | | | SPAH | 8 buah | SPAH | 100% | | | | | |
| | | | | | | SPAH | 5 buah | SPAH | 100% | | | | | |
| | | | | | | SPAH | 1 buah | SPAH | 100% | | | | | |
| | | | | | | Normalisasi SPAH | 10 paket | Normalisasi SPAH | 100% | | | | | |
| | | | | | | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan PJU Kelurahan Penembahan | 104 titik | Pemeliharaan PJU Kelurahan Penembahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kelurahan Kadipaten | | Kelurahan Kadipaten | | | | | | |
| | | | | | | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasana Fasilitas Umum | | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasana Fasilitas Umum | | | | | | |
| | | | | | | Ganti Paving Blok | 100 m2 | Ganti Paving Blok | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemasangan Paving Blok | 96 m2 | Pemasangan Paving Blok | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Paving Blok | 100 m2 | Pemeliharaan Paving Blok | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Paving Blok | 200 m | Pemeliharaan Paving Blok | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Paving Blok | 100 m2 | Pemeliharaan Paving Blok | 100% | | | | | |

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|---|---------------------------|----------------|---|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum | | | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum | | | | |
| | | | | | | | SPAH | | | SPAH | 100% | | | |
| | | | | | | | SPAH | 4 buah | | SPAH | 100% | | | |
| | | | | | | | SPAH | 5 buah | | SPAH | 100% | | | |
| | | | | | | | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | | | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan PJU Kelurahan Kadipaten | 94 titik | | Pemeliharaan PJU Kelurahan Kadipaten | 100% | | | |
| | | | | | | | Kecamatan | | | Kecamatan | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi Ekonomi Wilayah | Kecamatan dan 3 Kelurahan | | Gelar Potensi Ekonomi Wilayah | 100% | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan UMKM Kewilayahan | Kecamatan dan 3 Kelurahan | | Penyuluhan UMKM Kewilayahan | 100% | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Motif Batik khas Kraton Yogyakarta | 75 orang | | Sosialisasi Motif Batik khas Kraton Yogyakarta | 100% | | | |
| | | | | | | | Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA | 6 Kelompok | | Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA | 100% | | | |
| | | | | | | | Pokja 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan PMTAS Jajanan anak sekolah yang aman | 40 orang | | Penyuluhan PMTAS Jajanan anak sekolah yang aman | 100% | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan keamanan pangan dan kemasannya | 60 orang | | Penyuluhan keamanan pangan dan kemasannya | 100% | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Garnish | 60 orang | | Pelatihan Pembuatan Garnish | 100% | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan fungsi dan makna tanaman Maskot Kecamatan Kraton | 60 orang | | Penyuluhan fungsi dan makna tanaman Maskot Kecamatan Kraton | 100% | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Rumah Layak Huni | 60 orang | | Penyuluhan Rumah Layak Huni | 100% | | | |
| | | | | | | | Pertemuan Pokja 3 | 150 orang | | Pertemuan Pokja 3 | 100% | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,154,336,850 | 3,199,336,850 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Kotagede

| No Urut | Usuran/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|--|----------|---|--------|---|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 715,998,688 | 787,598,557 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kotagede | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai. | 60 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 100,822,000 | 110,904,200 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk kordinasi. | 186 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring Wilayah | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Konsultasi ke luar daerah | 2 kali | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kotagede | | | jasa piket kantor | 8 org x 365 hr | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 444,362,000 | 488,798,200 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 43 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6.000 yang tersedia | 480 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3.000 yang tersedia | 600 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Pengisian tabung pemadam | 45 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Komputer/printer yang tersedia | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 13 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Telephone | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Air | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Listrik | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi kebersihan yang terbayar | 12 bin | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya | 14 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 175.000 lbr | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penjilidan | 70 exp | | | | | | |
| | | | | | | | sewa tenda | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | sewa sound sistem | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan telepon | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan mesin ketik | 11 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan mebelair | 8 kali | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--|---|----------|--|-------------|--|----------------|---|--------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Taman | 5 unit | | | | | | |
| | | | | | | | jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan komputer | 34 kali | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kotagede | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 170,814,688 | 187,896,157 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola | 46 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 4 orang | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | | | | | 152,580,000 | 167,838,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kotagede | | | Jasa pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 1 paket | Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 96,400,000 | 106,040,000 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Gedung kantor | 27kali | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kotagede | | | Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | 1 unit | Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 56,180,000 | 61,798,000 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3 | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | 14 unit | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | | | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 51,095,000 | 56,204,500 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kotagede | | | Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 51,095,000 | 56,204,500 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | BB | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede | Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede | 100% | | | | | 2,594,629,112 | 2,854,092,024 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Keteraturan Kecamatan Kotagede | | | Kotagede | | | Koordinasi RT RW yang terselenggara | 14 kali | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede | 100% | 300,704,200 | 330,774,620 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Kelurahan yang terpilih | 1 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelaporan buku monografi kelurahan | 3 buku | | | | | | |
| | | | | | | | Linmas yang terbina | 10 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Kelembagaan masyarakat yang bersinergi | 2 kali | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|----------|-------------------|--------|--|-------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Sambang Kampung, operasi ketertiban dan vandalisme yang terlaksana | 100 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan RT, RW dan LPMK yang terlaksana | 11 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi Forkompika yang terlaksana | 8 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Hari Raya yang lancar | 3 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Lomba Poskamling yang terlaksana | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Relawan yang terlatih untuk mengatasi kebakaran | 2 kali | | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede | | | Kotagede | | | HO IMBB yang diterbitkan | 47 izin | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede | 100% | 174,709,912 | 192,180,904 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Operasional PATEN yang terlaksana | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Buletin Warta Kotagede yang terbit | 6 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Warga yang tersosialisasi tentang perizinan | 80 orang | | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede | | | | | | Kader PKK yang tertib administrasi | 100 orang | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede | 100% | 440,012,550 | 383,534,305 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | Pelatih PAUD yang terlatih | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Instruktur senam yang terlatih | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD yang terlaksana | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | TP PKK Kecamatan yang terkoordinasi | 11 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Kelembagaan Sosial Masyarakat Kec KG yang bersinergi | 12 lembaga | | | | | | |
| | | | | | | | Warga yang terlatih Kesenian Macapat | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Komisi Lansia yang terbina | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Anggota GOPTKI yang terlatih | 80 orang | | | | | | |
| | | | | | | | KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Kader PSM yang terlatih | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Warga yang terlatih Kesenian Kethoprak | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | PKADD yang tersosialisasi | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Keluarga yang terlatih antisipasi terhadap KDRT | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Posyandu Kecamatan yang terkoordinasi | 21 posyandu | | | | | | |
| | | | | | | | Warga yang tersosialisasi untuk terapi penyakit tidak menular | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Lomba masak ikan yang terlaksana | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Warga yang tersosialisasi tentang etika berbusana | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi Wilayah Kecamatan yang terselenggara | 5 hari | | | | | | |
| | | | | | | | Warga PKH yang terlatih untuk mengembangkan diri | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi TKPK yang terselenggara | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pengurus TP UKS yang tersosialisasi | 45 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga yang terkoordinasi | 2 hari | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|--|--------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Warga yang tersosialisasi pentingnya donor darah | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pembina Pramuka yang terbina | 45 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Anggota BMR yang terbina | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Warga yang terlatih seni baca alquran | 200 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kampung KB yang tersosialisasi | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring dan Evaluasi Bantuan warga miskin yang terlaksana | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Data kewilayahan yang tersusun | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Pentas seni tingkat kecamatan | 3 kel | | | | | | |
| | | | | | | | Pawai Budaya tingkat kecamatan | 3 kel | | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun | | | | | | Koordinasi TKPK yang terselenggara | 4 kali | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kelurahan Rejowinangun | 100% | 209,539,600 | 261,871,060 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | TP PKK Rejowinangun yang terkoordinasi | 13 RW, 49 RT | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga yang terbina | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Manajemen dan kelembagaan cluster yang terbina | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kampung Agro yang terbentuk | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kampung Kuliner yang terbentuk | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kampung Kerajinan yang terbentuk | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kampung Herbal yang terbentuk | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kampung Budaya yang terbentuk | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kader terpadu yang terbina | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kader jumatik yang terbina | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Panca tertib yang tersosialisasi | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Manajemen Kelembagaan Sosial yang terbina | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Linmas dan FKPM yang terlatih | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi | 13 RW | | | | | | |
| | | | | | | | RPJMD yang tersusun | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan | | | | | | Koordinasi TKPK yang terselenggara | 4 kali | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kelurahan Prenggan | 100% | 260,171,700 | 320,888,370 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede |
| | | | | | | | TP PKK Prenggan yang terkoordinasi | 13 RW, 57 RT | | | | | | |
| | | | | | | | Warga yang terlatih baca tulis aksara jawa | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Kelembagaan Kelurahan yang tersosialisasi | 3 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Warga yang terlatih Kesenian Kethoprak | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi | 13 RW | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga yang terbina | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kelompok Kesenian yang terbina | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | RPJMD yang tersusun | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Kader Kesehatan yang terbina | 60 orang | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|-------------------|--|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| | | | | | | Paguyuban Batra yang terbina | 40 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan HKG yang terlaksana | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih Kesenian Keroncong | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih Kesenian Karawitan | 50 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih memasak kudapan | 80 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih menarik tari klasik dan modern | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga Tuna netra yang terbina | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih membuat tas rajut | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih membuat aneka kripik | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga lansia yang terbina | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Gebyar Anak yang terlaksana | 1 kali | | | | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan | | | | | Koordinasi TKPK yang terselenggara | 4 kali | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kelurahan Purbayan | 100% | 151,141,150 | 200,657,765 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede | |
| | | | | | | TP PKK Purbayan yang terkoordinasi | 14 RW, 58 RT | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih membuat roti basah | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih Budidaya Jamur | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Warga yang terlatih membuat hantaran | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Karnaval PAUD yang terlaksana | 200 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Kelompok Kethoprak yang terlatih | 25 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Kelompok FKPM yang terbina | 25 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Kampung wisata yang terbentuk | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Karang Taruna yang Terbina | 40 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Kelurahan Siaga yang terbina | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | RPJMD yang tersusun | 1 dokumen | | | | | | | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede | | | | | Dokumen Inmen yang tersusun | 1 buku | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede | 100% | 1,058,350,000 | 1,164,185,000 | Sedang berjalan | Kec. Kotagede | |
| | | | | | | Dokumen perencanaan yang tersusun | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Dokumen Profil yang tersusun | 40 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah | 3 Kelurahan | | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Jalan tersebar di wilayah | 1 Kecamatan | | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Fasilitas Umum tersebar di wilayah | 1 Kecamatan | | | | | | | |
| | | | | | | UMKM yang terbina tentang perpajakan | 40 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pasar Rakyat yang terlaksana | 3 hari | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | 3,514,302,800 | 3,865,733,081 | | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Mergangsan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|---------------------------------------|--|----------------------|--|-------------|--|------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 100% | 511,402,220 | 562,542,800 | |
| 1.1 | Penyediaan Kapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Mergangsan | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi | 70 kali | | | 81,888,500 | 90,077,708 | Sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai | 52 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu | 440 org | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kecamatan Mergangsan | | | Meterai 6000 yang tersedia | 120 buah | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 296,077,708 | 325,685,479 | Sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | Meterai 3000 yang tersedia | 370 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran rekening listrik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran rekening air | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran rekening telpon | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 yang terbayar | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan Alat kebersihan tersedia | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 47 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pencetakan | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan | 66.388 lbr | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia | 19 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 17 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari) | 4 kali | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Mergangsan | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | | | 133,436,012 | 146,779,613 | Sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 27 ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 3 orang | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 294,162,500 | 323,578,750 | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|--|--|-----------------|---|--------|--|------------------|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Mergangsan | | | Jasa pemeliharaan Rumah Dinas | 1 jenis | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 234,912,500 | 258,403,750 | Sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor | 3 jenis | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Mergangsan | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4 | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 59,250,000 | 65,175,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 3 | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2 | 13 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 46,621,266 | 51,283,393 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec. Mergangsan | | | Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun | 6 dok. | Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 46,621,266 | 51,283,393 | Sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun | 6 jenis laporan | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi serta Sosial Budaya | Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik dan peningkatan kualitas sosial masyarakat | | | 100% | | | | | 2,581,683,165 | 2,839,851,122 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan | | | Kec. Mergangsan | | | Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan | 8 buku | Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban | 100% | 323,507,150 | 355,857,865 | Sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | Penguatan Kelembagaan dan pembinaan adm RT RW | 278 org | | | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Pembangunan Kelurahan | 3 kel | | | | | | |
| | | | | | | | Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 10 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan Hari Raya/Hari Besar | 14 hari | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kampung | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Linmas | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan PKL | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan RT RW dan LPMK | 278 RT RW 3 LPMK | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring dan Pembinaan pengurangan risiko bencana | 4 kali | | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan | | | Kec. Mergangsan | | | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 5 jenis | Dukungan terhadap terwujudnya penjangkaran aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang pelayanan | 100% | 89,752,415 | 98,727,656 | Sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | Pengelolaan Retribusi TPU Sasanalaya | 26.000.000 | | | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan Retribusi Retribusi IMB = 3 ijin | 1.206.000 | | | | | | |
| | | | | | | | Survey Kepuasan Masyarakat | 1 kec. 3 kel | | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman | | | Kec. Mergangsan | | | Pelatihan kelompok masyarakat | 10 kegiatan | | 100% | 461,103,000 | 531,264,800 | sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan |
| | | | | | | | Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat | 8 kegiatan | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Gebyar Lansia | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD dan pendidik PAUD | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | 7 organisasi kemasy kel | | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan | | | Kec. Mergangsan | | | Pelatihan kelompok masyarakat | 10 kegiatan | 100% | 335,055,000 | 400,125,000 | sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan | |
| | | | | | | | Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat | 10 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar Lansia | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | 7 org kemasy kel | | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan | | | Kec. Mergangsan | | | Pelatihan kelompok masyarakat | 8 kegiatan | 100% | 498,988,000 | 575,154,800 | sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan | |
| | | | | | | | sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat. | 11 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar Lansia | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan | 7 org kemasy kel | | | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan | | | Kec. Mergangsan | | | Pembinaan dan pengarahannya tugas TKPK | 3 TKPK | 100% | 405,901,000 | 364,607,100 | sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan | |
| | | | | | | | Monitoring Keluarga Miskin | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan pendidik PAUD | 2 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang kesehatan | 1 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Pemberdayaan dan pembinaan TP PKK | 5 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) | 3 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Olah Raga | 2 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pemberdayaan organisasi kemasy tingkat kecamatan | 5 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Workshop pengembangan kesenian | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pentas Seni | 1 kali | | | | | | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan | | | Kec. Mergangsan | | | Musrenbang Kecamatan dan kelurahan | 8 dok | 100% | 467,376,600 | 514,113,901 | sedang berjalan | Kecamatan Mergangsan | |
| | | | | | | | Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan | 70 buku | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan | 6 buku | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Jalan | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan PJU | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Makam | 1 makam | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Konsultansi perencanaan | 1 dok | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa konsultan pengawas | 1 dok | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|---|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan UMK | 2 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Karang Taruna | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan ketrampilan PKH | 1 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan ekonomi PKK | 2 kegiatan | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,433,869,151 | 3,777,256,065 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Mantrijeron

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrkiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|-------------|--|--|--|--------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 568,464,972 | 590,141,680 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Mantrijeron | | | Penyediaan makanan dan minuman | 11 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 121,670,000 | 136,044,090 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 2 jenis laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Mantrijeron | | | Jasa Piket Harian | 360 oh | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 351,816,300 | 357,504,281 | sedang berjalan | Kec. Mantrijeron | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 33 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 12 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 & 3000 yang tersedia | 425 lembar materai 6000 dan 1000 lembar materai 3000 | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 20 macam | | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan APAR | 4 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen bahan komputer & printer yang tersedia | 2 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan & perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia | 10 macam | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran telpon | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran listrik | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | pembayaran retribusi | 3 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4, 2 & 3 yang terbayar | 1 unit kend. roda 4, 13 unit kend. roda 2, 1 unit kend. roda 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan & penjiilidan | 106.000 lbr & 77 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3 event | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja | 6 jenis | | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Mantrijeron | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 94,978,672 | 96,593,309 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron | |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 40 dokumen ASN | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelola arsip | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 12 bulan | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | | 163,645,900 | 156,180,080 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Mantrijeron | | | Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat | 4 paket | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 102,495,900 | 93,990,530 | sedang berjalan | Kec. Mantrijeron | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|---------------------------------------|--|------------------|---|-------------|---|--|--|--------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Mantrijeron | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional: a.roda 4 (empat); b.roda 2 (dua); c. Roda 3 (tiga) | 1 unit kend. roda 4, 13 unit kend. roda 2, 1 unit kend. roda 3 | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 61,150,000 | 62,189,550 | sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 34,860,000 | 35,452,620 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec. Mantrijeron | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 34,860,000 | 35,452,620 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron | | | | Terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan | 100% | | | | | 2,830,479,780 | 2,877,077,013 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Keteriban Kecamatan Mantrijeron | | | Kec. Mantrijeron | | | Laporan Monografi | 4 Laporan | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan | 100% | 320,238,800 | 339,215,062 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Kelembagaan R1/ RW | 3 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi Pemerintahan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | PAM hari raya dan Insidentil | 5 hari raya | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Penyakit Masyarakat | 2 sub keg | | | | | | |
| | | | | | | | KTB & KSB | 3 Kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan dan Pelantikan R1, RW dan LPMK | 3 Kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Kelurahan | 3 Kelurahan | | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron | | | | | | Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron | 1 dokumen | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan | 100% | 147,411,080 | 148,404,789 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| | | | | | | | Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Pendataan Perizinan Kewenangan Kecamatan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan | 1 dokumen | | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo | | | Kec. Mantrijeron | | | Penyulhn Gizi & Kesehatan Lansia | 1 kali | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan | 100% | 340,281,600 | 389,852,305 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| | | | | | | | Penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba, Reproduksi remaja | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Gelar senam massal lansia | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pemanfaatan Kali Winongo | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kesehatan lingkungan | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi SIP | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Lomba Olah raga Tradisional | 3 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan simulasi Mitra keluarga | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan PSM | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Manajemen Karang Taruna & PIK-R | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | pelatihan Pembuatan Mural dan Pembersihan Vandalisme | 3 kali | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|-----------|----------------|------------------|-------------------|--------|---|---------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | Lomba permainan tradisional untuk anak PAUD | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan pemantapan paguyuban Seni | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan siaga bencana | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Antawacana | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan karawitan | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelat. pembuatan film untuk remaja | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan pidato bahasa Jawa | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Teater remaja & Anak | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelat. Bergodo Niti Manggolo | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelat. kesenian wayang Jemblung | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Tari | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan sablon kaos | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya kelinci | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya ikan dan manajemen pemasaran | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya Toga | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK | 3 lembaga PKK | | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga | 1 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | RPJMD Kelurahan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 1 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | JBM | 1 kel | | | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan | | | Kec. Mantrijeron | | | FGD Inovasi Cegah dan Berantas Demam Berdarah Dengue dan Cikungunya (Community Deals Inovasi PSN) | 3 kali | | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan | 100% | 299,319,300 | 347,431,913 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| | | | | | | | Gebyar Lansia Tingkat Kelurahan | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Penataan Rumah Sehat | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Tingkat RW | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | FGD Sinergitas Kelembagaan Kelurahan | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kader Jumantik Anak | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Linmas | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | sambang kamling | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Advokasi Perempuan dan Anak berhadapan dengan Hukum | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Undang-Undang ITE dan Etika Penggunaan Media Sosial | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Tim Kreatif Pawai Budaya | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi Ekonomi Wilayah (SURYA EXPO 2018) | 1 kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Profile UMKM Unggulan | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Perdagangan Elektronik (e-commerce) | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Batik Jumputan | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Ikan | 2 kali | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|-----------|----------------|------------------|-------------------|--------|---|----------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran dan Toga dalam Pot | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pengolahan Toga/Herbal | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya Sayuran dan Toga Di TPS Pugeran | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK | 3 lembaga PKK | | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga | 1 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | RPJMD Kelurahan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 1 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | JBM | 1 kel | | | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron | | | Kec. Mantrijeron | | | Penyuluhan Lansia | 2 kali | | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan | 100% | 318,976,000 | 366,588,837 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| | | | | | | | Penyuluhan Kesehatan bagi Masyarakat | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Keamanan pangan | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Sosialisasi Jumantik | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Gelar Senam Lansia | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Linmas | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Sim PKK | 5 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan IMP | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan PSM | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kader Yandu | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan kelompok Seni | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan berbusana daerah | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan MC berbahasa jawa | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pengolahan Tanaman Herbal | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Tata Boga | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Tanaman Hidroponik | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Hantaran | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Sablon | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan batik | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK | 3 lembaga PKK | | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga | 1 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | RPJMD Kelurahan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 1 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | JBM | 1 kel | | | | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron | | | Kec. Mantrijeron | | | Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk | 3 Kelurahan | | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan | 100% | 402,119,500 | 262,957,554 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| | | | | | | | TKPK | 3 Kelurahan | | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin | 3 Kelurahan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan PKK | 7 Sub Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Karang Taruna | 2 Sub Kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Seni dan Budaya | 3 kegiatan | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|-----------|----------------|------------------|-------------------|--------|---|-----------|--|--------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron | | | Kec. Mantrijeron | | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan | 1 paket | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan | 100% | 1,002,133,500 | 1,022,626,553 | Sedang berjalan | Kec. Mantrijeron |
| | | | | | | | Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Fasilitas Umum | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Makam Sarilaya | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Penyelenggaraan kegiatan pembangunan | 2 keg | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan | 4 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron | 130 exp | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan | 3 kel | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan UMKM | 4 keg | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Ekonomi Wilayah | 2 keg | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan PK5 | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Pondokan | 24 kali | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 3,597,450,652 | 3,658,851,393 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Wirobrajan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|---------------------------------------|--|-----------------|---|--------|---|---------------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan operasional perkantoran | 100% | | | | | 764,913,882 | 803,159,576 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Wirobrajan | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 24 kali | | | 190,407,500 | 199,927,875 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 41 orang x 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 44 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Wirobrajan | | | Materai 6000 yang tersedia | 1500 bh | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 389,216,700 | 408,677,535 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 900 bh | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 yang terbayar | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 yang terbayar | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Kebersihan Kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Percetakan | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 107.000 lbr | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 9 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran Telepon | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Bantuan Komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran Air | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Listrik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Bacaan / surat kabar yang tersedia | 4 jenis x 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Peraturan peundang-undangan yang tersedia | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 20 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia Jasa Pemeliharaan taman | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Taman | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Piket Pengamanan Kantor | 12 bulan | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Wirobrajan | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis x 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 185,289,682 | 194,554,166 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 50 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penata laksana kepegawaian | 1 orang x 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 4 orang x 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga kearsipan | 1 orang x 12 bulan | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 84,028,000 | 88,229,400 | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|---------------------------------------|--|-----------------|---|-------------|---|-------------------|----------------|---|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Wirobrajan | | | Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat | 4 jenis | | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 12,200,000 | 12,810,000 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Wirobrajan | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4 (empat) | 1 unit | | Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 71,828,000 | 75,419,400 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 3 (tiga) | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2 (dua) | 13 unit | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | 39,006,280 | 40,956,594 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec. Wirobrajan | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | | Tersedianya dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran | | 39,006,280 | 40,956,594 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun | 5 dokumen | | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan | | | | Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 81,5% menjadi 82,5 % | 100% | | | | | | 2,727,770,424 | 2,864,158,945 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan | | | Kec. Wirobrajan | | | Pelatihan Penanggulangan Bencana KTB | 3 kel | | | | 369,510,000 | 387,985,500 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Sosialisasi Pondokan | 90 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Jagawarga | 60 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pekat bagi generasi Muda | 65 orang x 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Linmas | 45 orang x 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Data Monografi | 8 buku | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW | 165 RT dan 34 RW | | | | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Kelurahan | 15 orang x 5 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Verifikasi & Distribusi E-KTP | 3 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan dan pengukuhan RT, RW dan LPMK | 3 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelaksana Optimalisasi Ketertiban | 11 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Piket Non PNS (keagamaan, hari raya dan sosial) | 17 hari | | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kampung Panca Tertib | 45 orang x 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan PK5 | 90 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 38 buah | | | | | | | |
| | | | | | | | Operasi vandal dll | 130 keg | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Tim E-KTP | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Optimalisasi Ketertiban PKL | 22 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Optimalisasi Ketertiban spanduk | 22 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Optimalisasi Ketertiban Pondokan | 22 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Optimalisasi Ketertiban Vandalsme | 22 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Penyelenggaraan Sambang Kampung | 22 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Forum Komunikasi penyelenggaraan Pemerintahan tk. Kec | 11 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Forum Kemitraan Polisi Masyarakat | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat PAM Hari besar | 5 kali | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|---|---------------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan | | | Kec. Wirobrajan | | | Sosialisasi Ijin Usaha Mikro | 50 orang x 2 | Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat | 100% | 89,150,244 | 93,607,756 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Sosialisasi IMB dan HO | 40 orang x 2 | | | | | | |
| | | | | | | | Pelayanan Paten | 4 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelayanan Terpadu | 10 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi masalah makam Pracimalaya | 30 orang x 2 | | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan | | | Kec. Wirobrajan | | | Penyuluhan Pendidikan Kewirausahaan | 1 kali | Meningkatnya swadaya Masyarakat Kec. WB | 100% | 436,492,520 | 346,712,646 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Sosialisasi Hatinya PKK | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Gemar Makan Ikan | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Administrasi Pokja IV | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Jenis dan Bahaya Penyakit Menular | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Menu Gizi Sederhana dan Seimbang Bagi Balita | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Administrasi UP2K se-Kecamatan Wirobrajan | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan KKG PKK, KB KES | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pengelolaan Keuangan TP PKK kec, Kel dan PKK RW | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Sadar Bela Negara | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok | 3 kali/ 3 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Deklarasi Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok | 3 kali/ 3 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kelompok KB Pria | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Posyandu Remaja | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak dan Perempuan | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kegiatan PKBN (Simulasi) | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Penguatan Kelembagaan TKPK | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan Lanjut Usia | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PSM | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi STBM | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Orientasi Kepala Merahan | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelembagaan Forum Masyarakat Sehat | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rakor FPKK Kecamatan Wirobrajan | 12 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rakor FK PAUD | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Komisi Lansia | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat PSM | 3 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Forum Kecamatan Sehat | 3 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat PMI | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat GOP TKI | 3 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Rumongso | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat FORMI | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Pembinaan Seni Tk Kecamatan | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Persiapan Lomba Kesenian | 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rakor Tim Pangan Gizi | 2 kali | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|-----------|----------------|---------------|-------------------|--------|---|---------------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | Rakor Tim Pembina UKS se Kec. Wirobrajan | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Senam Massal Hari Ibu | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budi Daya Jamur Konsumsi | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Ketrampilan dari Bahan Bekas 1ak Terpakai | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya Tanaman Komoditas (Sayuran) Pada Lahan Sempit | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Gamelan | 12 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Senam Perwosi | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan STBM | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Desiminasi STBM | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Petugas Pemantau Jentik | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kepemimpinan Kader Perempuan | 3 kali/ 3 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Lomba Paduan Suara | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Lomba Tumpeng | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Lomba Yel-yel | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Lomba Memasak | 5 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Lomba Senam | 6 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi Lomba Kesenian | 4 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan dan pembekalan spiritual untuk kaum muda | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi PKBM Rangsang Imojoyo | 1 kali | | | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen | | | Kel. Pakuncen | | | Rapat TKPK Kel. Pakuncen | 8 kali | | Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Pakuncen | 100% | 235,487,500 | 284,463,375 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Pentas Seni HUT Kota | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pawai Budaya | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat) | 12 RW | | | | | | | |
| | | | | | | | Operasional Kelurahan Siaga | 50 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | PKK | 1 kel | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Tanaman hidroponik dan organik untuk ketahanan pangan | 2 hari | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kreasi Batik Jumputan | 2 hari | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Administrasi TP-PKK Kelurahan (Pokja I s/d IV) | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pemanfaatan kain perca | 2 hari | | | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Bhineka Unggal Ika dan Penyelesaian konflik sosial wilayah | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Satgaslinmas Siaga Bencana | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Ramah Anak | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Publik Speaking untuk Anak / Remaja | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan KTB | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Hidup sehat | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Seni Karawitan | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Bank Sampah dan Kampung hijau | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Fasilitasi latihan Senam | 6 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Karang Taruna | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Jagawarga | 2 kali | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|---|----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Rapat FKPM | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Sambang Poskamling | 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Linmas | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Kelurahan Ramah Anak | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Forum Anak Kelurahan Pakuncen | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat KTB Pakuncen | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Komisi Lansia | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Forum Prolanis | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat PSM | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat IKPSM | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat dengan tokoh agama | 6 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Gerakan bersih masjid menyongsong Ramadhan | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Paguyuban kesenian | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Fasilitasi latihan Karawitan | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Fasilitasi sesaroh Basa Jawa | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Fasilitasi latihan paduan suara Pakuncen | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat RW Siaga | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan Administrasi Kesi | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Bank Sampah | 2 kali | | | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan | | | Kel. Wirobrajan | | Rapat TKPK Kel. WB | 8 kali | Meningkatnya swadaya Masyarakat Kel. Wirobrajan | 100% | 189,617,000 | 236,299,350 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan | |
| | | | | | | Pentas Seni HUT Kota | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Pawai Budaya | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat) | 12 RW | | | | | | | |
| | | | | | | Operasional Kelurahan Siaga | 50 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan Karang Taruna | 40 orang | | | | | | | |
| | | | | | | PKK | 1 kel | | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan menjahit | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan berkebun dilahan sempit | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi manajemen keuangan dan modal usaha | 20 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Posyadu balita | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pemantauan PHBS untuk masyarakat | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan MC bahasa jawa | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi bahaya miras dan narkoba | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan membuat bunga / bros dari Ackrilic | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan administrasi yandu lansia | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan administrasi yandu balita | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Simulasi yandu balita | 30 orang | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Paguyuban PAUD (40 org x 2 sidang) | 40 x 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Koordinasi Kesenian (40 org x 3 sidang) | 40 x 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | IK-PSM (40 org x 2 sidang) | 40 x 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan Lansia (40 org x 3 sidang) | 40 x 3 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Koordinasi Raskin Kel. WB (40org x 1sidang) | 40 x 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Rapat Koordinasi LPMK(40 org x 3sidang) | 40 x 3 kali | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|-----------|----------------|--------------------|-------------------|--------|--|--------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Rapat Koordinasi Bimbingan sosial PSM (40 org x 2sidang) | 40 x 2 kali | | | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan | | | Kel. Patangpuluhan | | | Pelatihan Tabulaport, Pembasmian Hama dan Pengelolaan Sampah | 1 kali | Meningkatnya Swadaya Masyarakat Kel. Patangpuluhan | 100% | 190,100,060 | 236,806,563 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Budidaya Tanaman Hias Dan Tanaman Hidroponik | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Penanganan Keamanan Dan Ketertiban | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Ngrukti / Pemularasan Jenazah Khusus Wanita | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kesehatan, Kenakalan Remaja Dan Pemuda | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembinaan Karang Taruna Kel. Patangpuluhan | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Administrasi UP2K | 40 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya Semut Rangrang | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga | 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pentas seni | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 15 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM | 10 RW | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi JBM | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Anak Usia Dini Dalam Kegiatan Parenting | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | PKK | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD | 150 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Koordinasi Kesenian (40 org x 2 sidang) | 40 x 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | IK-PSM (50 org x 2 sidang) | 50 x 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Lansia (40 org x 4 sidang) | 40 x 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Koordinasi Raskin Kel. PTP (40org x 1sidang) | 40 x 4 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Koordinasi Karang Taruna (40 org x 1sidang) | 40 x 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Koordinasi Bimbingan sosial PSM (50 org x 2sidang) | 50 x 2 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Senam Lansia (60orang x 11sidang) | 60 x 11 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Instruktur Senam (20 org x 11 sidang) | 20 x 11 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Pawai Budaya | 1 kali | | | | | | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan | | | Kec. Wirobrajan | | | Pelatihan manajemen kewirausahaan | 30 orang | | | 1,217,413,100 | 1,278,283,755 | sedang berjalan | Kec. Wirobrajan |
| | | | | | | | Pelatihan cukur rambut | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan budidaya belut | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan kerajinan limbah kaca | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan teknis HP | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pasar rakyat | 90 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pemetakan UMKM | 3 kel | | | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan kios UMKM | 6 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Musrenbang | 3 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan informasi Program & Kegiatan | 6 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan | 1 paket | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|--|----------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Saluran Air Hujan | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Kamling, Balai RW, TK, PAUD & MCK Umum. | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan & Pemeliharaan Talud, Jalan Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang terbuka hijau | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan & Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Makam Umum | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | 99 titik | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,615,718,586 | 3,796,504,515 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Ngampilan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|---------------------------------------|---|----------------|--|-------------|---|-----------------|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 672,103,583 | 739,313,941 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Ngampilan | | | Makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi | 11 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 74,656,000 | 82,121,600 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai | 55 orang | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Ngampilan | | | Kebersihan kantor Kecamatan dan Kelurahan | 1 paket | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 465,760,850 | 512,336,935 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Jasa keamanan kantor yang tercukupi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | ATK Kantor yang tersedia | 43 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen alat listrik dan elektronik kantor yang tersedia | 12 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Meterai yang tersedia | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan komputer/printer yang tersedia | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan/Peralatan Kantor/Kumah Tangga Kecamatan yang tersedia | 20 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Sumber daya telepon yang tersedia | 3 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Bantuan komunikasi camat dan lurah | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Sumber daya air yang tersedia | 2 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Sumber daya listrik yang tersedia | 3 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | Surat kabar yang tersedia | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi Kebersihan yang tercukupi | 3 lokasi | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4, roda 3, roda 2 yang terbayar | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa cetak dan penggandaan yang terlaksana dengan baik | 2 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa sewa yang tercukupi | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Peralatan/perlengkapan Kantor | 2 kegiatan | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Ngampilan | | | Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 5 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 131,686,733 | 144,855,406 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola | 30 dok ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Arsip kantor yang tersusun dengan baik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan yang tersedia | 3 orang | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja aparatur dan birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | | | | | 259,001,000 | 292,188,600 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Ngampilan | | | Gedung yang terpelihara | 4 gedung kantor | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 203,276,000 | 227,907,108 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Ngampilan | | | Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Kendaraan Roda 4 yang terawat | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 55,725,000 | 64,281,492 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Kendaraan Roda 3 yang terawat | 1 unit | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | | |
|---------|--|--------------------------------|--|----------------|--|--------|--|-----------------|----------------|---|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Kendaraan Roda 2 yang terawat | 11 unit | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja aparatur dan birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan | 100% | | | | 40,112,000 | 44,123,200 | | | | |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kec. Ngampilan | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, target fisik dan keuangan) yang tersusun dengan baik | 7 dokumen | | Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 40,112,000 | 44,123,200 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fiskal, SKM, SPIP, Profil yang tersusun dengan baik | 5 jenis | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan | | | | Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik | 100% | | | | | | 1,549,877,969 | 1,697,578,266 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan | | | Kec. Ngampilan | | | Sosialisasi adm RT/RW | 1 kegiatan | | Terselenggaranya Sosialisasi adm RT/RW | 100% | 233,330,640 | 258,115,704 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Penyusunan Monografi Kec. & Kel. | 3 dokumen | | Terselenggaranya Penyusunan Monografi Kec. & Kel. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Kelurahan | 1 kegiatan | | Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pengamanan Wilayah | 1 kegiatan | | Terselenggaranya Pelatihan Pengamanan Wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Rakordasi bidang PKKU | 12 bulan | | Terselenggaranya Rakordasi bidang PKKU | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Tata Tertib PKL | 12 bulan | | Terselenggaranya Sosialisasi Tata Tertib PKL | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Penanggulangan bencana | 1 kegiatan | | Terselenggaranya Pelatihan Penanggulangan bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan RT, RW dan LPMK | 1 kegiatan | | Terselenggaranya Pemilihan RT, RW dan LPMK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba ketertiban antar RW | 1 kegiatan | | Terselenggaranya Lomba ketertiban antar RW | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan Wilayah | 12 bulan | | Terselenggaranya Pengamanan Wilayah | 100% | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan | | | Kec. Ngampilan | | | Terselenggaranya PATEN | 1 kegiatan | | Terlaksananya PATEN | 100% | 65,162,499 | 71,678,749 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Verifikasi dan distribusi E-KTP | 1 jenis layanan | | Terlaksananya Verifikasi dan distribusi E-KTP | 100% | | | | |
| | | | | | | | Verifikasi dan Penerbitan Perizinan | 5 jenis layanan | | Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan Perizinan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Perijinan | 1 kegiatan | | Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Adminduk | 1 kegiatan | | Terselenggaranya Sosialisasi Adminduk | 100% | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan | | | Kec. Ngampilan | | | Pendampingan sosial budaya kecamatan ngampilan | 10 bulan | | Terciptanya Sosial Budaya masyarakat | 100% | 299,088,400 | 292,359,540 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | monev sosial budaya kecamatan ngampilan | 10 bulan | | terwujudnya peningkatan sosial budaya masyarakat Kecamatan Ngampilan yang semakin baik | 100% | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi TKPK | 12 bulan | | Terlaksananya koordinasi TKPK | 100% | | | | |
| | | | | | | | monev bantuan warga miskin | 10 bulan | | Terlaksananya monev bantuan warga miskin | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Lansia | 1 bulan | | Terlaksananya sosialisasi lansia | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD | 1 bulan | | Terlaksananya Gebyar PAUD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba Paduan suara antar TK | 1 keg | | Terlaksananya lomba paduan suara anatar TK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Latihan kepemimpinan pemuda | 1 keg | | Terlaksananya latihan kepemimpinan pemuda | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi wahana kesejahteraan sosial berbasis kemasyarakatan | 1 keg | | Terlaksananya sosialisasi wahana kesejahteraan sosial berbasis kewilayahan | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|--------|--|-----------|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan APE bagi PAUD | 1 keg | Terlaksananya pealtihan pembuatan APE bagi PAUD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi PMKS | 1 keg | Terlaksananya sosialisasi PMKS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Tari | 1 keg | Terlaksananya pelatihan tari | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan kethoprak | 1 keg | Terlaksananya pealtihan ketoprak | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba gerak jalan | 1 keg | Terlaksananya lomba gerak jalan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi penyakit HIV untuk remaja | 1 keg | Terlaksananya sosialisasi penyakit HIV untu kremaja | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Pentas Budaya | 1 keg | Terlaksananya gelar pentas budaya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pawai Budaya | 1 keg | Terselenggaranya Pawai Budaya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monev JBM | 10 bulan | Terlaksananya monev JBM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monev Kesi | 10 bulan | Terlaksananya Monev kesi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Penggerak PKK | 12 bulan | Terlaksananya Pembinaan Penggerak PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Rakor Pemberdayaan Kecamatan | 12 bulan | Terlaksananya Rakor Pemberdayaan Kecamatan | 100% | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan | | | Kel. Ngampilan | | | Pendampingan pembinaan eksosbud | 12 bulan | Terselenggaranya pembinaan eksosbud | 100% | 288,363,380 | 348,470,518 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Pelaksanaan Gerbangmas (JBM) | 13 RW | Terselenggaranya JBM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional Kelembagaan PKK Kel. | 1 klpmk | Terselenggaranya Operasional Kelembagaan PKK Kel. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bintek Pengurus RW siaga | 1 klpmk | Terselenggaranya bintek RW siaga | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan pembuatan makanan /jajanan pasar bagi warga miskin | 1 Keg | Terselenggaranya Pelatihan pembuatan makanan /jajanan pasar bagi warga miskin | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD Kelurahan | 1 Keg | Terselenggaranya Penyusunan RPJMD Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Rakordasi Kewilayahan | 12 bulan | Terselenggaranya Rakordasi Kewilayahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gebyar Lansia Kel. Ngampilan | 100 orang | Terselenggaranya Gebyar Lansia Kel. Ngampilan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan | 250 warga | Terselenggaranya Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Senam Massal Kelurahan | 60 warga | Terselenggaranya Senam Massal Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kadarkum | 25 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Kadarkum | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pembentukan Kampung Wisata | 20 warga | Terselenggaranya Sosialisasi Pembentukan Kampung Wisata | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Keterpaduan BKB, Paud, SDIDTKA | 60 warga | Terselenggaranya Sosialisasi Keterpaduan BKB, Paud, SDIDTKA | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan PPGD Lansia | 50 warga | Terselenggaranya Pelatihan PPGD Lansia | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kader KB | 70 warga | Terselenggaranya Pelatihan Kader KB | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Karawitan | 40 warga | Terselenggaranya Pelatihan Karawitan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Potong Rambut putra putri | 30 warga | Terselenggaranya Pelatihan Potong Rambut putra putri | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Batik canting dan jumputan | 30 warga | Terselenggaranya Pelatihan Batik canting dan jumputan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan aneka masakan dari Ikan | 30 warga | Terselenggaranya Pelatihan aneka masakan dari Ikan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Aneka rajutan dari benang | 30 warga | Terselenggaranya Pelatihan Aneka rajutan dari benang | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan menu olahan sehat untuk remaja putri | 40 warga | Terselenggaranya Pelatihan menu olahan sehat untuk remaja putri | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Wawasan Kebangsaan | 100 warga | Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | KESI | 1 Keg | Terlaksananya KESI | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional Kelembagaan PKK RT/RW | 83 Klmpk | Terselenggaranya Operasional Kelembagaan PKK RT/RW | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|--|------------|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan | | | Kel. Notoprajan | | | Pembinaan Peningkatan ekonomi sosila budaya masyarakat | 12 Bulan | Terselenggaranya Pendampingan Peningkatan Ekonomi Sosial Budaya | 100% | 221,757,000 | 282,863,900 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | Pelatihan pengisian raport keluarga bagi pemegang JPS | 2 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan Raport Keluarga Bagi Pemegang JPS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional administrasi PKK | 10 bulan | Terselenggaranya Operasional Administrasi PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM | 8 kegiatan | Terselenggaranya Operasional JBM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD | 1 kegiatan | Terselenggaranya Penyusunan RPJMD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional kelurahan siaga | 10 bulan | Terselenggaranya Operasional Kelurahan Siaga | 100% | | | | |
| | | | | | | | Rapat koordinasi kewilayahan | 12 Bulan | Terselenggaranya Rapat Koordinasi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bimtek pendidik SPS PAUD | 1 kegiatan | Terselenggaranya Bimtek Pendidik SPS PAUD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bimtek KP Ibu | 1 kegiatan | Terselenggaranya Bimtek KP Ibu | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan kader BKB, SDIDTK, PAUD di posyandu balita | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan Kader BRKB, SDIDTK, PAUD di Posyandu Balita | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan publik speaking | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan Publik Speaking | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi wawasan Kebangsaan | 1 kegiatan | Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kewirausahaan | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan kader posyandu lansia | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan kader Posyandu Lansia | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bimtek kader IPSM | 1 kegiatan | Terselenggaranya Bimtek Kader IPSM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Senam Massal | 1 kegiatan | Terselenggaranya Senam Massal | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi penanggulangan NAPZA | 1 kegiatan | Terselenggaranya Sosialisasi Penanggulangan NAPZA | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi tanaman toga dan sayuran | 1 kegiatan | Terselenggaranya Sosialisasi tanaman TOGA dan sayuran | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pembentukan RW siaga | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pembentukan RW siaga | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan budi daya tanaman hias | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan budidaya tanaman hias | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan menghias hantaran nikah | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan menghias hantaran nikah | 100% | | | | |
| | | | | | | | pelatihan jelly art | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan Jelly Art | 100% | | | | |
| | | | | | | | pelatihan tata rias | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan rias wajah | 100% | | | | |
| | | | | | | | pelatihan packaging | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan Packaging | 100% | | | | |
| | | | | | | | workshop penumbuhan wirausaha muda mandiri | 1 kegiatan | Terselenggaranya Workshop Penumbuhan Wirausaha Muda Mandiri | 100% | | | | |
| 4.6 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan | | | Kec. Ngampilan | | | monev pondokan | 1 kegiatan | Terselenggaranya Monev Pondokan | 100% | 442,176,050 | 444,089,855 | Sedang berjalan | Kec. Ngampilan |
| | | | | | | | pelatihan manajemen UMKM | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pelatihan Manajemen UMKM | 100% | | | | |
| | | | | | | | sosialisasi penataan PKL | 6 kali | Terselenggaranya Sosialisasi Penataan PKL | 100% | | | | |
| | | | | | | | gelar potensi UMKM | 1 kegiatan | Terselenggaranya Gelar Potensi UMKM | 100% | | | | |
| | | | | | | | musyawarah perencanaan pembangunan | 3 dokumen | Terselenggaranya Musyawarah perencanaan Pembangunan | 100% | | | | |
| | | | | | | | penyusunan informasi program dan kegiatan pembangunan | 1 kegiatan | Terselenggaranya Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan | 100% | | | | |
| | | | | | | | sosialisasi teknik musrenbang | 1 kegiatan | Terselenggaranya Sosialisasi Teknis Musrenbang | 100% | | | | |
| | | | | | | | penyusunan profil kecamatan dan kelurahan | 3 dokumen | Terselenggaranya Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pendampingan kegiatan fisik wilayah | 10 bulan | Terselenggaranya Pendampingan Keg Fisik Wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Konblok Kecamatan Ngampilan | 1 paket | Terselenggaranya Pemeliharaan Konblok Kecamatan Ngampilan | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | pemeliharaan PJU | 1 paket | Terselenggaranya Pemeliharaan PJU | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan SAH Kel. Notoprajan | 1 paket | Terselenggaranya Pemeliharaan SAH Kel. Notoprajan | 100% | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 2,521,094,552 | 2,773,204,007 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Pakualaman

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|---------|-------------------|--------|--|---|---|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | | 100% | | | | | 500,784,331 | 550,862,765 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. PA | | | Makan minum rapat yang tersedia untuk pegawai | 43 orang | dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 77,232,000 | 84,955,200 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Makan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi | 108 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Makan minum rapat yang tersedia untuk tamu | 2 keg | | | | | | |
| | | | | | | | Makan minum rapat yang tersedia untuk harian umum | 11 bulan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. PA | | | Tenaga piket kantor yang tersedia | 365 hari | dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 296,716,315 | 326,387,947 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 45 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Materai Rp 6.000.- yang tersedia | 300 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Materai Rp 3.000.- yang tersedia | 600 buah | | | | | | |
| | | | | | | | bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 24 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 17 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya | 11 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 86.400 lbr | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Sewa meja 10 buah, Sewa kursi 100 buah, Sewa Tenda 3 unit, Sewa Sound System 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 6 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa retribusi kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. PA | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 126,836,016 | 139,519,618 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 28 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 3 orang | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|--------------------------------|---|---------|---|--------|---|-------------|----------------|--|----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 115,687,000 | 127,255,700 | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. PA | | | Gedung kantor yang terpelihara dengan baik | 3 unit | | dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 55,850,000 | 61,435,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. PA | | | Kendaraan Roda 4 yang terawat | 1 unit | | dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 59,837,000 | 65,820,700 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman | |
| | | | | | | | Kendaraan Roda 3 yang terawat | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Kendaraan Roda 2 yang terawat | 11 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 34,102,000 | 37,512,200 | | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec. PA | | | Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun | 7 dokumen | | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 34,102,000 | 37,512,200 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD : Lakip, Laporan Keuangan dan Itisik, SPM, IKM, SPIP yang tersusun | 5 dokumen | | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik | | Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik dan Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat | 100% | | | | | 1,262,475,998 | 1,388,723,598 | | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman | | | Kec. PA | | | Dokumen Monografi yang tersusun | 3 dokumen | | Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan | 100% | 159,956,600 | 175,952,260 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Penyuluhan Hukum Kepada RT/RW | 1 kegiatan | | Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya | 83 RT | | Terverifikasi dan termonitoringnya proposal Hibah dan pelaksanaan Hibah | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelurahan yang dievaluasi | 1 Kelurahan | | Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan) | | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan | 12 bulan | | Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Keamanan & Ketertiban Masyarakat Kecamatan & Kelurahan | 3 kali | | Terselenggaranya peningkatan Kemampuan SDM Linmas | | | | | |
| | | | | | | | Pedagang Kaki Lima yang dibina dan diawasi | 80 pedagang | | Terselenggaranya peningkatan jumlah PKL yang tertib dan teratur | | | | | |
| | | | | | | | PAM hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial | 12 kali | | Terselenggaranya pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Kegiatan Sosial | | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan Lebaran | 10 hari | | Terselenggaranya Pengamanan Lingkungan saat Lebaran | | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan Umum | 7 kali | | Terselenggaranya peningkatan Keamanan Lingkungan | | | | | |
| | | | | | | | Sambang Kampung | 2 kali | | Terselenggaranya peningkatan Kemanan Lingkungan dan menjangar aspirasi masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Ketertiban | 24 kali | | Terselenggaranya peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|---------|-------------------|--------|---|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Operasi Vandalisme | 4 kali | Terlaksananya pengurangan aksi vandalisme dan kebersihan tembok di wilayah | | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan RT RW dan LPMK | 1 kali | terlaksananya pemilihan pengurus RT RW dan LPMK se Kecamatan Pakualaman | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman | | | Kec. PA | | | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 12 bulan | Terselenggaranya pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan | 100% | 96,985,748 | 106,684,323 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Pelayanan Perizinan & Adminduk | 12 bulan | Terbitnya administrasi perizinan dan kependudukan | | | | | |
| | | | | | | | Verifikasi dan distribusi e-ktp dan KK | 12 bulan | Terlaksananya Kelancaran perekaman dan pengambilan E-KTP | | | | | |
| | | | | | | | Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan | 4 bulan | Tersedianya database pelaku usaha di kecamatan pakualaman | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Standar Pelayanan Publik | 1 kali | Tersosialisasinya standar dan aturan kegiatan kewenangan kecamatan | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman | | | Kec. PA | | | Penanganan masalah sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, Bantuan Pemerintah Non Tunai/BPNT) | 12 bulan | Lancarnya bantuan untuk warga miskin | 100% | 315,330,993 | 244,310,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Rangkaian Kegiatan Seni dan Budaya tingkat Kecamatan | 12 bulan | Peningkatan seni budaya masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Rangkaian Kegiatan Bidang Kesehatan Kecamatan Pakualaman | 12 bulan | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 12 bulan | Terselenggaranya peningkatan kelembagaan PKK dan pemberdayaan anggota PKK | | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Evaluasi dan pembinaan PKK | | | | | |
| | | | | | | | Rangkaian Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pakualaman | 12 bulan | Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan | | | | | |
| | | | | | | | Focused Group Discussion (FGD) Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) | 1 kegiatan | Pemecahan permasalahan TKPK | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) | 12 bulan | Terlaksananya Penurunan Angka Kemiskinan | | | | | |
| | | | | | | | Rangkaian Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan Pakualaman | 4 sub kegiatan | Terselenggaranya Peningkatan keimanan masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD | 1 kegiatan | Menambah pengetahuan dan pengalaman anak | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Ijin & Keteriban Penyelenggaraan Pondokan | 1 kegiatan | Pondokan tertata | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) | 4 kali | Terjalin komunikasi antar anggota | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Gizi Seimbang | 1 kegiatan | Terselenggaranya penambahan pengetahuan tentang gizi | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) | 1 kegiatan | Terselenggaranya peningkatan pengetahuan P3K | | | | | |
| | | | | | | | Rapat Koordinasi Tim Pembina Kelurahan Siaga Tingkat Kecamatan | 12 bulan | Terjalin komunikasi dalam pemantauan Kesi. | | | | | |
| | | | | | | | Pentas Seni Karang Taruna Tingkat Kecamatan | 1 kegiatan | Terselenggara Pentas Seni KT | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | 1 kegiatan | Peningkatan Pengetahuan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 1 kegiatan | Peningkatan Pengetahuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | | | | | |
| | | | | | | | Gebyar Lansia | 1 kegiatan | Peningkatan Pengetahuan | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK) | 1 kegiatan | Peningkatan Pengetahuan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Hantaran | 1 kegiatan | Peningkatan ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Lomba Masak berbahan dasar ikan | 1 kegiatan | Peningkatan ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kreasi Puding | 1 kegiatan | Peningkatan ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya Tanaman Toga | 1 kegiatan | Peningkatan ketrampilan | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|-----------|----------------|---------|-------------------|--------|--|---------------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Administrasi Posyandu | 1 kegiatan | Peningkatan ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kampung Wisata | 1 kegiatan | Peningkatan Pengetahuan | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti | | | Kec. PA | | | Kegiatan PKK RT | 47 kelompok | Penguatan kelembagaan PKK | 100% | 280,970,000 | 360,950,700 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Kegiatan PKK RW | 10 kelompok | Penguatan kelembagaan PKK | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Administrasi Dasawisma | 2 kegiatan | Penguatan lembaga | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Administrasi PKK Tingkat Kelurahan | 2 kegiatan | Penguatan lembaga | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Senam PKK | 10 bulan | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM) | 10 bulan | Terciptanya suasana belajar mengajar yang kondusif | | | | | |
| | | | | | | | Rangkaian Kegiatan Gerakan Kelurahan Siaga (Kesi) | 7 sub kegiatan | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Penyusunan RPJMD Kelurahan | 1 kegiatan | Tersusunnya RKP tahunan dan RPJM 5 tahunan kelurahan | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kelompok/Lembaga tingkat kelurahan Purwokinanti | 11 kelompok/lembaga | Peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat kelurahan | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Senam Lansia | 10 bulan | Peningkatan derajat kesehatan | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban | 8 sub kegiatan | Terciptanya keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Perijinan | 1 Kegiatan | Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan dan Perijinan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Kue | 1 Kegiatan | Peningkatan Ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kewirausahaan | 1 Kegiatan | Meningkatkan Pengelolaan Usaha | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Rajut Sulam | 1 Kegiatan | Peningkatan Ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Batik | 1 Kegiatan | Peningkatan Ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Abon Ayam | 1 Kegiatan | Peningkatan Ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budidaya Toga | 1 Kegiatan | Peningkatan Ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik | 1 Kegiatan | Peningkatan Ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Budi daya Sayuran | 1 Kegiatan | Peningkatan Ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Kue Bakpia | 1 Kegiatan | Peningkatan Ketrampilan | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur | | | Kec. PA | | | Kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM) | 9 RW | Terselenggaranya Jam Belajar Masyarakat | 100% | 208,905,000 | 280,465,892 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Penyuluhan Kelembagaan RT dan RW | 4 Kegiatan | Peningkatan kapasitas pengurus RT RW | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Gerakan Rembug Kampung Panca Tertib | 4 Kegiatan | terbentuknya kampung yang menangani masalah ketertiban | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) | 2 Kegiatan | Peningkatan kapasitas anggota linmas | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Penyusunan RPJMD Kelurahan | 1 Kegiatan | Tersusunnya RKP tahunan dan RPJM 5 tahunan kelurahan | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 9 kelompok | Peningkatan keterampilan kader | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Kelompok Pengelola Bank Sampah | 9 kelompok | Meningkatkan wawasan dalam mengelola sampah rumah tangga | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan PKK RT | 36 kelompok | Penguatan kelembagaan PKK | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan PKK RW | 9 kelompok | Penguatan kelembagaan PKK | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Lansia Potensial | 2 Kegiatan | Peningkatan kapasitas pengurus | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Komisi Lansia | 2 Kegiatan | Peningkatan kapasitas pengurus | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan RW Siaga | 9 RW | Terciptanya Kelancaran dalam administrasi, kelengkapan dan kegiatan RW Siaga | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|--------------|--|-----------|----------------|---------|-------------------|--------|--|------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Paguyuban Kesenian | 9 RW | | Pengembangan potensi seni budaya warga | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Batik Jumptan Tingkat Lanjut | 1 Kegiatan | | Peningkatan Ketrampilan dan dapat menambah pendapatan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Ampyang dan Rempeyek | 1 Kegiatan | | Peningkatan Ketrampilan dan dapat menambah pendapatan | | | | | |
| | | | | | | | Workshop Pendampingan bagi Penduduk Rentan Miskin di wilayah kelurahan | 2 Kegiatan | | Peningkatan derajat hidup masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Usaha Pertanian Perkotaan dengan media Hidroponik | 1 Kegiatan | | Peningkatan Ketrampilan dan dapat menambah pendapatan | | | | | |
| 4.6 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman | | | Kec. PA | | | Dokumen Musrenbang yang tersusun | 3 dokumen | | Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan | 100% | 200,327,657 | 220,360,423 | Sedang berjalan | Kecamatan Pakualaman |
| | | | | | | | Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang tersusun | 2 Dokumen | | Tersusunnya Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan | 1 kegiatan | | Tersusunnya Profil Kelurahan dan Kecamatan | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | 95 titik | | Terpeliharanya PJU | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Jalan di wilayah kecamatan Pakualaman | 1 paket | | Terpeliharanya akses jalan yang baik | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman | 1 paket | | Terpeliharanya Kelancaran SPAH | | | | | |
| | | | | | | | Pendampingan Pengembangan Dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Dan Kelompok Masyarakat Tk Kec. (UPPKS) | 6 kali | | Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Tk Kecamatan | | | | | |
| | | | | | | | Pakualaman Expo | 1 kali | | Terselenggaranya ajang promosi & pengenalan produk | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan | 2 kali | | Terselenggaranya peningkatan kemampuan dalam perencanaan pembangunan | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 1,913,049,329 | 2,104,354,263 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Gedongtengen

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|-------------------|---|--------|---|---------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 718,946,113 | 790,840,724 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Gedongtengen | | | Minuman Harian untuk Pegawai yang Tersedia | 11 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 99,282,000 | 71,713,537 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen |
| | | | | | | | Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Koordinasi yang Tersedia | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Makanan dan Minuman Umum yang tersedia | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Wilayah | 11 bulan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Gedongtengen | | | Piket Kantor | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 463,749,425 | 547,621,030 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 44 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 3 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 | 310 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 | 650 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia | 15 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Telepon & Bantuan Komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Air | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran Listrik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | STNK kendaraan dinas roda 4 yang terbayar | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK kendaraan dinas roda 3 yang terbayar | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK kendaraan dinas roda 2 yang terbayar | 11 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Cetak (Bend 26, Bend STS, Bend BTP, kartu kendali, Disposisi, Boks Arsip, Folder Arsip, Amplop) | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 60.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penjilidan | 40 buku | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Tersedia | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Bij.Modal Pengadaan 2 bh Komputer/PC, 3 bh Laptop | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bij.Modal Pengadaan 4 bh Printer warna, | 4 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bij.Modal Pengadaan 1 set Audio/Sound System | 4 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Gedongtengen | | | Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan, SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun dan jasa pengelola arsip | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 155,914,688 | 171,506,157 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 14 bulan | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 138,010,000 | 130,250,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Gedongtengen | | | Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 75,427,000 | 71,185,905 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|--------------------------------|---|-------------------|--|--|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Rumah Dinas Camat | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Gedung Kantor Kecamatan | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Gedung Kantor Kel. Sosromenduran | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Gedung Kantor Kel. Pringgokusuman | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Taman | 3 unit | | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Gedongtengen | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 62,583,000 | 59,064,095 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen | |
| | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda tiga | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua | 11 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 100% | | | 80,980,000 | 70,870,000 | | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec. Gedongtengen | | Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (Rensta, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 80,980,000 | 70,870,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen | |
| | | | | | | Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Pelayanan Prima | 2 kali | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | |
| | | | | | | Pembuatan Film Dokumenter Profil Kecamatan Gedongtengen | 1 kali | Tersedianya dokumen profil pemberdayaan Kecamatan Gedongtengen | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik | | | | | | | 1,486,904,289 | 1,684,387,998 | | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen | | | Kec. Gedongtengen | | Monografi Kecamatan & Kelurahan | 3 dokumen | Tersedianya data kependudukan dan monografi kecamatan gedongtengen | 100% | 283,093,100 | 311,402,410 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen | |
| | | | | | | Hasil Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan | 2 dokumen | Menjadikan dasar bagi kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Penyuluhan RT,RW dan LPMK Se- Kecamatan Gedongtengen | 1 kegiatan | Meningkatnya koordinasi dan komunikasi untuk memenuhi kewajiban peran masing-masing lembaga sosial dalam pembangunan wilayah | 100% | | | | | |
| | | | | | | Monitoring Hibah Stimulan RW | | Tersedianya data penerima Hibah/Bansos RT dan stimulan RW dan termonitornya penggunaannya | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemilihan dan Pengukuhan RT,RW, dan LPMK | 3 kegiatan | Terpilihnya ketua RT, RW dan LPMK baru | 100% | | | | | |
| | | | | | | Monitoring, Penyuluhan dan Penataan PKL | 6 bulan | Meningkatnya Ketertiban PKL | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pengawasan Perijinan | 8 bulan | Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman dalam lingkungan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana | 12 bulan | Adanya suasana tertib dan aman dalam kegiatan kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota, Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Monitoring Trantibum | 11 bulan | Sinergitas aparat wilayah Kecamatan Gedongtengen terjalin dengan baik | 100% | | | | | |
| | | | | | | Operasional Keterlibatan (Vandalisme,Sambang Kampung,Operasional Keterlibatan,Pengamanan Umum) | 11 bulan | Terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan masyarakat Gedongtengen | 100% | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen | | | Kec. Gedongtengen | | Jumlah E-KTP | 1 kegiatan | Dokumen E-KTP yang berhasil terdistribusikan ke masyarakat | 100% | 155,262,689 | 170,788,958 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen | |
| | | | | | | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) | 2 kegiatan | Meningkatnya Pelayanan PATEN kepada Masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 11 bulan | Meningkatnya Pelayanan PATEN kepada Masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan | 1 kegiatan | Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Retribusi HO & IMBB Kecamatan | 1 kegiatan | Meningkatnya pendapatan retribusi HO dan IMBB Kecamatan | 100% | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen | | | Kec. Gedongtengen | | TKPK se Kecamatan | 4 bulan | Forum TKPK | 100% | 189,121,000 | 194,794,630 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|--------|---|------------|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | TP PKK Kecamatan, Pembinaan Kader PKK se-Kecamatan | 3 kegiatan | Facilitasi Kegiatan TP PKK Kecamatan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pawai Budaya | 1 kegiatan | Partisipasi warga se-Kecamatan Gedongtengen dalam melestarikan kebudayaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monitoring E-Warong/Bantuan Rakyat Miskin | 1 kegiatan | Tersedianya data penerima raskin dan termonitornya bantuan secara tepat sasaran | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monitoring JBM | 1 kegiatan | Termonitornya Jam Belajar Masyarakat secara baik dan benar | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monitoring KESI | 1 kegiatan | Termonitornya Kelurahan Siaga secara baik dan benar | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan GOPTKI | 2 kegiatan | Facilitasi kegiatan sosial se Kecamatan Gedongtengen | 100% | | | | |
| | | | | | | | GT Sehat | 1 kegiatan | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monitoring PosYandu Pokjantal | 1 kegiatan | Tersedianya data pengelolaan SIP dan termonitornya posyandu di wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Parade kesenian HUT Kota Yogyakarta | 1 kegiatan | Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman | 100% | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman | | | Kec. Gedongtengen | | | Gelar Potensi Seni Budaya dan Kerajinan | 1 kegiatan | Meningkatnya Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman dalam melestarikan kebudayaan | 100% | 249,514,800 | 307,419,530 | Sedang berjalan | Kelurahan Pringgokusuman |
| | | | | | | | Genduri Jenang Suran | 1 kegiatan | Meningkatnya Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman dalam melestarikan kebudayaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | KESI | 2 kegiatan | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kader KESI | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM | 1 kegiatan | Meningkatnya kesadaran belajar menjadi budaya masyarakat Yogyakarta | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD | 1 kegiatan | Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPJMD secara baik dan benar | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kewirausahaan | 1 kegiatan | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kewirausahaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Workshop Kader TP PKK dan Kegiatan Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan | 3 kegiatan | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional Posyandu | 1 kegiatan | Mantapnya kesinambungan Posyandu | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gebyar Paud | 1 kegiatan | Meningkatnya aktivitas anak usia dini untuk mengembangkan kreativitasnya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pendidik PAUD | 1 kegiatan | Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendidikan PAUD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gebyar lansia | 1 kegiatan | Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat dalam melaksanakan perannya di tengah-tengah keluarga serta masyarakat. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan dasar LINMAS | 1 kegiatan | "Meningkatnya peran serta anggota linmas dalam proses pembangunan di wilayahnya" | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kebencanaan Bantaran Sungai Winongo | 1 kegiatan | Meningkatnya upaya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bimtek Penatausahaan dan Pengadministrasian Gardu Lumbung "KSB Rescue" Pringgokusuman | 1 kegiatan | Meningkatnya upaya pengetahuan masyarakat dalam penatausahaan dan pengadministrasian Gardu Lumbung | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan MC Bahasa Jawa | 1 kegiatan | Meningkatnya ketrampilan sebagai MC dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat | 100% | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran | | | Kec. Gedongtengen | | | Penyusunan RPJMD | 1 Kegiatan | Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPJMD secara baik dan benar | 100% | 199,779,800 | 248,836,280 | Sedang berjalan | Kelurahan Sosromenduran |
| | | | | | | | Gebyar PAUD & Pelatihan Pembelajaran PAUD | 2 Kegiatan | Meningkatkan aktivitas anak usia dini untuk mengembangkan kreativitasnya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gebyar Lansia | 1 Kegiatan | Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat dan melaksanakan perannya dalam keluarga serta masyarakat. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Workshop Karang Taruna | 1 Kegiatan | "Meningkatnya peran serta anggota karang taruna dalam proses pembangunan di wilayahnya" | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|--------|--|------------|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Pembinaan Kader PIK-R dan Yandu Remaja | 1 Kegiatan | Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi untuk mencetak remaja yang aktif, sehat dan berkualitas serta jauh dari risiko kenakalan remaja, seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kesenian Tari Barongsai dan Tari Naga | 1 Kegiatan | Meningkatnya ketrampilan berkesenian warga serta melestarikan seni budaya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apeman | 1 Kegiatan | Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan tradisi lokal | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan | 3 Kegiatan | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan dan Operasional KESI | 2 Kegiatan | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kader KESI | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM | 1 Kegiatan | Meningkatnya kesadaran belajar menjadi budaya masyarakat Yogyakarta | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kampung wisata | 1 Kegiatan | Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha pariwisata di wilayah Kelurahan Sosromenduran | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pemandu Wisata | 1 Kegiatan | Meningkatnya kualitas pemandu wisata dan kesejahteraan anggotanya. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Congdut Kelurahan Sosromenduran | 1 Kegiatan | Meningkatnya seni budaya masyarakat kelurahan pariwisata Sosromenduran | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan kader posyandu dan Operasional Posyandu | 3 Kegiatan | Meningkatnya kemampuan dan partisipasi aktif peran kader dan mantapnya kesinambungan Posyandu. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan dasar Linmas | 1 kegiatan | Meningkatnya peran serta anggota linmas dalam proses pembangunan di wilayahnya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan kesehatan HIV dan AIDS | 1 kegiatan | Meningkatnya upaya peduli HIV AIDS | 100% | | | | |
| 4.6 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen | | | Kec. Gedongtengen | | | GT Expo | 1 kegiatan | Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengekspos potensi perekonomian wilayah. | 100% | 410,132,900 | 451,146,190 | Sedang berjalan | Kecamatan Gedongtengen |
| | | | | | | | Penyuluhan KUBE PKH | 1 kegiatan | Meningkatnya ketrampilan anggota PKH dan kesejahteraan warga masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan | 2 dokumen | Tersedianya informasi Program dan kegiatan Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta | 100% | | | | |
| | | | | | | | Profil Kecamatan | 1 dokumen | Tersajinya Profil Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 3 dokumen | Satu rujukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pada Umumnya dan Kecamatan Gedongtengen pada khususnya yang selanjutnya menjadi APBD Pemerintah Kota Yogyakarta. | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | 144 Titik | Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum di wilayah Kecamatan Gedongtengen | 100% | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan Paving Block tersebar se-Kec.Gedongtengen | 860,03 m2 | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Pos Ronda se-Kelurahan Pringgokusuman | 2 unit | | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan MCK se-Kelurahan Sosromenduran | 2 unit | | 100% | | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Danurejan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------------------|---|----------------|---|--------|---|------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 862,485,026 | 948,733,529 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Danurejan | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi | 254 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 135,415,500 | 148,957,050 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu | 5 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Umum | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Monitoring | 7 jenis | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Danurejan | | | materai 6000 tersedia, | 495 lembar | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 601,612,185 | 661,773,404 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan |
| | | | | | | | materai 3000 tersedia | 990 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 terbayar | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 terbayar | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 terbayar | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 50 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 50 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penjiplakan | 100 buku | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa penggandaan dan cetak Bend 26 | 100,000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 26 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran telepon dan bantuan telekomunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran listrik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pembayaran air | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 14 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan komputer | 8 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Piket kantor | 365 hari | | | | | | |
| | | | | | | | Pengisian tabung APAR | 53 tabung | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa tenda, meja, kursi, sound system | 10 unit, 45 buah, 110 buah, 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan komputer | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang tersedia (kearsipan) | 12 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Perlengkapan kantor | | | | | | | |
| | | | | | | | alat listrik dan elektronik | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | alat komunikasi | 1 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Danurejan | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 125,457,341 | 138,003,075 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 50 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 2 orang | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|----------------|--|--------|-------------------|---|----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 181,881,300 | 200,069,430 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Danurejan | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat | | 5 lokasi | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 90,824,000 | 99,906,400 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Danurejan | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (empat) | | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 91,057,300 | 100,163,030 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan | |
| | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 3 (tiga) | | 3 unit | | | | | | | |
| | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua) | | 13 unit | | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 38,378,900 | 42,216,790 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Danurejan | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | | 5 dokumen | Tersedianya Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 38,378,900 | 42,216,790 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan | |
| | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | | 5 dokumen | Nilai Akuntabilitas kinerja OPD | 100% | | | | | |
| | | | | | Sosialisasi SPIP dan SOP | | 1 kali | Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur | 100% | | | | | |
| | | | | | Sosialisasi Pelayanan Prima | | 2 kali | Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur | 100% | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan | Hukum dan Aparatur | | | Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan | 100% | | | | | 2,407,757,159 | 2,648,532,875 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan | | | Danurejan | Dokumen Monografi kecamatan dan kelurahan yang tersusun | | 8 dokumen | Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec. Danurejan | 100% | 433,714,000 | 477,085,400 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan | |
| | | | | | PKL tertata dengan baik | | 80 orang | | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | | 12 kali | | | | | | | |
| | | | | | Pembinaan Linmas | | 9 kali | | | | | | | |
| | | | | | Pencegahan pelanggaran Perda | | 5 kali | | | | | | | |
| | | | | | Pembinaan forum relawan dan Pengurangan Risiko Bencana | | 19 kali | | | | | | | |
| | | | | | Jogobaran | | 10 kali | | | | | | | |
| | | | | | Pengamanan kegiatan | | 24 kali | | | | | | | |
| | | | | | Sambang kampung operasi ketertiban, operasi vandalisme, pengamanan Umum dan kewilayahan | | 28 orang | | | | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan | | 6 kali | | | | | | | |
| | | | | | Perombaan Kelurahan | | 3 kelurahan | | | | | | | |
| | | | | | Pemilihan RT,RW,LPMK | | 1 kali | | | | | | | |
| | | | | | Hibah Administrasi RW, RT | | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | Penguatan Kapasitas RT,RW,LPMK | | 3 kelurahan | | | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan | | | Danurejan | PATEN | | 2 kegiatan | Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan | 100% | 180,187,059 | 198,205,765 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan | |
| | | | | | Jemput Bola Tuntas | | 16 kali | | | | | | | |
| | | | | | Inovasi Sistem Pelayanan | | 1 kegiatan | | | | | | | |
| | | | | | Sosialisasi Pelayanan Prima | | 2 kali | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Tenaga Teknis | | 11 bulan | | | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan | | | Danurejan | Penyelenggaraan Lomba-Lomba Masyarakat | | 2 kali | Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan | 100% | 539,274,000 | 593,201,400 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan | |
| | | | | | Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan | | 1 paket | | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|-----------|-------------------|--------|---|-------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kapasitas Kader wanita | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Penguatan Kader Kesehatan | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Balita Sehat | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 8 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Penanganan KDRT | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pemuda dan OR | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kesehatan Berbasis Masyarakat | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pondokan & Sapa Anak Kos | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | | | PAUD | 200 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pokjantal Posyandu | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Monev Pemberdayaan | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan PKK | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Monev BPNT | 43 RW | | | | | | |
| | | | | | | | Kesenian | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Paguyuban/Forum lembaga kemasyarakatan | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Lansia | 150 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laskar bertian | 320 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi pemberdayaan Kampung | 2 Kampung | | | | | | |
| | | | | | | | Budaya Bergodo & Apeman | 3 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Pentas Seni dan Pawai Budaya | 200 orang | | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan | | | Danurejan | | | Pelatihan Berbasis masyarakat | 12 kegiatan | Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan | 100% | 203,654,000 | 224,019,400 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan |
| | | | | | | | Kelembagaan Kelurahan | 100 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan Lansia | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi berbasis masyarakat | 2 macam | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | PKK | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | JBM | 14 RW | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga | 1 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJM Kelurahan Suryatmajan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Pemberdayaan Kelurahan | 50 orang | | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung | | | Danurejan | | | Pelatihan berbasis masyarakat | 13 kegiatan | Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan | 100% | 247,091,000 | 271,800,100 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan |
| | | | | | | | Sosialisasi berbasis masyarakat | 3 macam | | | | | | |
| | | | | | | | PKK | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Forkom PEW | 30 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga dan Pendampingan Laskar Bertian | 20 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Senam Lansia | 1 Kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Jalan Sehat | 150 orang | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | JBM | 1 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJM Kelurahan | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Pemberdayaan Kelurahan | 50 orang | | | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasaran | | | Danurejan | | | Pelatihan berbasis masyarakat | 8 kegiatan | Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan | 100% | 140,902,800 | 154,993,080 | Baru | Kecamatan Danurejan |
| | | | | | | | Sarasehan Macapat dan budi pekerti | 12 bulan | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------|-------------------|--------|---|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kadarkum (antara lain perkawinan, kdrt, dll) | 2 pkt | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Rintisana Pengemb. Industri & penataan wilayah (kerajinan seng) | 2 macam | | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | PKK RT/RW | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | JBM | 12 RW | | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga | 1 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJM Kelurahan Bausasran | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | | | Pemberdayaan Kelurahan | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Lomba Tenis meja | 1 paket | | | | | | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan | | | Danurejan | | | dokumen musrenbang yang tersusun | 4 dokumen | Dukungan terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec. Danurejan | 100% | 662,934,300 | 729,227,730 | Sedang berjalan | Kecamatan Danurejan |
| | | | | | | | Jumlah buku informasi pembangunan yang dihasilkan | 5 eksemplar | | | | | | |
| | | | | | | | Petugas pemantau PJU | 198 orang | | | | | | |
| | | | | | | | PJU lingkungan | 100 titik | | | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan conblok, corblok, & paving blok | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan pos ronda | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan MCK Umum | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | SAH | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Taman vertikal | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi dan movev pembangunan | 180 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Konsultan Perencana dan pelaksana kegiatan | 5 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Danurejan Expo | 60 UMKM | | | | | | |
| | | | | | | | Sentra berbasis kewilayahan | 60 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan usaha wanita | 80 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan | 3 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Forum PEW, KUBE,UEDSP | 3 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Wirasahawan Berbasis Gender | 180 orang | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,490,502,385 | 3,839,552,624 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Gondokusuman

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|---------------------------------------|--|--------|--|-------------|---|----------------|--|--------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | | | | | 900,742,180 | 990,816,398 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | GK | | | Makan dan minum yang tersedia kordinasi | 77 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan oprasional perkantoran | 100% | 94,494,000 | 103,943,400 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia pegawai | 52 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan monitoring dan evaluasi | 4 laporan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | GK | | | Jasa pengamanan kantor | 17 orang | Dukungan terhadap keamanan, kelancaran administrasi keuangan dan oprasional perkantoran | | 701,635,500 | 771,799,050 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| | | | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | 70 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan alat listrk dan elektronik | 17 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 | 600 lbr | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 | 300 lbr | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan alat-alat perlengkapan kantor | 12 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan bahan komputer | 11 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran listrik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran air | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran telepon | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 yang terbayar | 8 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 yang terbayar | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 yang terbayar | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengandaan | 215.300 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 6 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran retribusi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga yang memadai | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan/surat kabar | 3 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | GK | | | Dokumentasi administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan oprasional perkantoran | 100% | 104,612,680 | 115,073,948 | sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| | | | | | | | dokumen administrasi ASN yang terkelola | 46 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengelola arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Nabab | 12 bulan | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | | 398,410,000 | 438,251,000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | GK | | | Jasa pengadaan barang dan jasa | 6 bulan | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 282,100,000 | 310,310,000 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| | | | | | | | Penyediaan alat rumah tangga | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan gedung kantor | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kelengkapan bangunan kantor | 1 unit | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|---------------------------------------|--|--------|---|-------------|---|-----------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | GK | | | Perawatan kendaraan bermotor | 1 mobil, 18 roda dua, 2 roda tiga | Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD | 100% | 116,310,000 | 127,941,000 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 80,106,000 | 88,116,600 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | GK | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN) | 5 dokumen | Dokumen perencanaan, penganggaran dan nilai akuntabilitas kinerja OPD tepat waktu | 100% | 80,106,000 | 88,116,600 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| | | | | | | | Laporan kinerja OPD (LKIP, SKM, SPIP, Profil, laporan keuangan) | 5 dokumen | Nilai akuntabilitas kinerja OPD | 100% | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman | | Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik | | Meningkatnya Indeks indeks kepuasan layanan masyarakat dari 79 menjadi 79.50 | 100% | | | Masyarakat semakin puas terhadap pelayanan | 0,50% | 3,524,208,738 | 3,876,629,612 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman | | | GK | | | Frekuensi Sosialisasi RT RW | 5 kali | Terselenggaranya Sosialisasi RT RW | 100% | 392,265,600 | 431,492,160 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| | | | | | | | Pelaksanaan Pemilihan RT RW | 5 Kelurahan | Terselenggaranya Pemilihan RT RW | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Pemilihan LPMK | 5 Kelurahan | Terselenggaranya Pemilihan LPMK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Pengukuhan RT RW dan LPMK | 2 kali | Terselenggaranya pengukuhan RT, RW dan LPMK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Peningkatan kapasitas RT RW dan LPMK | 350 orang | Terselenggaranya peningkatan kapasitas RT, RW dan LPMK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Pelatihan penanggulangan bencana | 50 orang | Terselenggaranya Pelatihan penanggulangan bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan | 5 Kelurahan | Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Forkompinka | 12 kali | Terselenggaranya Forkompinka | 100% | | | | |
| | | | | | | | frekuensi Monografi | 5 dokumen | Tersedia data Monografi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan koordinasi Linmas | 4 kali | Terselenggaranya Rakor Linmas | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jasa pelaksanaan Hibah | 5 Kelurahan | Terselenggaranya Hibah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan ketertiban, pengamanan umum, vandalisme dan sambang kampung | 4 jenis | Terkondisinya pengamanan di wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jasa pengamanan bencana dan keramaian | 4 kali | Pengamanan wilayah terkendali | 100% | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman | | | GK | | | Pelaksanaan pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan | 2 dokumen | Terselenggaranya pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan | 100% | 59,303,832 | 65,234,215 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman | | | GK | | | Pelaksanaan movev bantuan keluarga miskin | 5 Kelurahan | Terselenggaranya movev bantuan keluarga miskin | 100% | 394,228,500 | 433,651,350 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman |
| | | | | | | | Pelaksanaan Lomba HKG | 1 kali | Terselenggaranya Lomba HKG | | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan pertemuan rutin PKK | 12 kali | Terselenggaranya pertemuan rutin PKK | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Segoro amarto | 11 kali | Terselenggaranya Segoro amarto | 100% | | | | |
| | | | | | | | frekuensi Pembinaan kader jumatik | 1 kali | Terciptanya lingkungan yang sehat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Pelatihan seni budaya | 10 kali | Terselenggaranya Pelatihan seni budaya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Pentas seni budaya dan HUT kota | 5 kegiatan | Pelestarian budaya | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Pembinaan mental dan spiritual bagi anak dan remaja | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pembinaan mental dan spiritual bagi anak dan remaja | | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Pembinaan Generasi muda | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pembinaan Generasi muda | | | | | |
| | | | | | | | Pelaksanaan Pembinaan UKS | 4 kali | Terselenggaranya Pembinaan UKS | | | | | |
| | | | | | | | Pemberdayaan lansia | 1 kegiatan | Terselenggaranya Pemberdayaan lansia | | | | | |
| | | | | | | | Bina keluarga sejahtera | 1 kegiatan | Terselenggaranya Bina keluarga sejahtera | | | | | |
| | | | | | | | Penyegaran kader PSM | 1 kegiatan | Terselenggaranya Penyegaran kader PSM | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|-----------|----------------|--------|-------------------|---|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | frekuensi Sosialisasi Bank sampah | 65 orang | terselenggaranya Sosialisasi Bank sampah | | | | | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan organisasi sosial masyarakat | 4 kali | terselenggaranya Kegiatan organisasi sosial masyarakat | 100% | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan | | | GK | | Tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dll | 4 bulan | Tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dll | 100% | 223,828,800 | 246,211,680 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman | |
| | | | | | | Operasional JBM | 5 bulan | Tertib belajar | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan MC Jawa | 30 orang | Terampil | 100% | | | | | |
| | | | | | | Operasional Kelurahan siaga | 12 bulan | Siaga kesehatan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJM Kelurahan | 1 kegiatan | RPJM Kelurahan | 100100% | | | | | |
| | | | | | | Penguatan kelembagaan komisi lansia | 2 kegiatan | Tertib administrasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pertemuan rutin lansia | 12 bulan | Tertib administrasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Bantuan operasinal kegiatan kelompok lansia RW | 12 RW | Tertib administrasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan karawitan | 6 kali | Pelestarian budaya jawa | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan pertemuan institusi masyarakat perkotaan | 12 kali | Kerukunan lingkungan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan pengelolaan sampah organik dan daur ulang non organik | 1 kegiatan | ramah lingkungan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Bimtek PAUD | 1 kegiatan | Pendidik PAUD berkualitas | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pertemuan rutin PAUD | 12 bulan | Pendidik PAUD berkualitas | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan kesenian hadroh | 10 kali | Pelestarian kesenian | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan PKK | 3 kegiatan | Tertib administrasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan komputer kader PKK | 24 orang | Peningkatan pengetahuan komputer | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi kesehatan PKK | 1 kegiatan | Kesehatan keluarga | 100% | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas linmas | 1 kegiatan | Keamanan terkendali | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Linmas | 2 kegiatan | Keamanan terkendali | 100% | | | | | |
| | | | | | | Intervensi penduduk miskin | 1 kegiatan | mengurangi kemiskinan | 100% | | | | | |
| | | | | | | monev bantuan keluarga miskin | 1 kegiatan | mengurangi kemiskinan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Piket hari besar keagamaan | 3 kegiatan | Keamanan wilayah | 100% | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru | | | GK | | Peningkatan kapasitas remaja | 50 orang | Generasi muda berkualitas | 100% | 204,765,000 | 225,241,500 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman | |
| | | | | | | Sosialisasi kesehatan lansia | 75 orang | lansia sehat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Festival kampung lampion | 1 kegiatan | Terciptanya kampung wisata | 100% | | | | | |
| | | | | | | peningkatan kapasitas pendidik PAUD | 50 orang | pendidik paud berkualitas | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi PHBS, BUMI, KIA dan P3M | 75 orang | terlaksananya Sosialisasi PHBS, BUMI, KIA dan P3M | 100% | | | | | |
| | | | | | | FGD penurunan Unmeetneed | 50 orang | terlaksananya FGD penurunan Unmeetneed | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kelurahan siaga | 2 kegiatan | terlaksananya tertib administrasi kelurahan siaga | 100% | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas jagawarga | 50 orang | terlaksananya Peningkatan kapasitas jagawarga | 100% | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas linmas | 50 orang | Linmas berkualitas | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan jatilan anak | 2 kali | Pelestarian budaya | 100% | | | | | |
| | | | | | | sarasehan sadranan dan suran | 100 orang | Pelestarian budaya | 100% | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan JBM | 140 orang | peningkatan pendidikan anak | 100% | | | | | |
| | | | | | | PKK RT RW Kelurahan | 4 kali | peningkatan kesejahteraan keluarga | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan yandu plus | 4 RW | Kesehatan balita | 100% | | | | | |
| | | | | | | RPJM kelurahan | 25 orang | Program Kelurahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | intervensi keluarga miskin | 90 orang | mengurangi kemiskinan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Bimtek pengelolaan simpan pinjam | 1 kegiatan | tertib adminstrasi | 100% | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|--------|-------------------|--|-------------------|---|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Bimtek UMKM | 1 kegiatan | Terselenggaranya bimtek UMKM | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan membuat | 1 kegiatan | Keterampilan membuat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kursus membuat kue | 1 kegiatan | Keterampilan membuat kue | 100% | | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren | | | GK | | Pelatihan pembuatan ayam panggang | 32 orang | Tingkat pengetahuan usaha mandiri | 100% | 287,777,000 | 316,554,700 | sedang berjalan | Kec. Gondokusuman | |
| | | | | | | Pelatihan membuat sabun dan softener | 40 orang | Tingkat pengetahuan usaha mandiri | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan tas tali koor | 40 orang | Tingkat pengetahuan usaha mandiri | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan hidroponik | 48 orang | Pemanfaatan lahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan kewirausahaan | 20 orang | Penambahan wahana usaha | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan linmas | 60 orang | Peningkatan kedisiplinan anggota linmas | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja | 40 orang | Pemahaman generasi muda | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi posbindu | 40 orang | Pengetahuan posbindu | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sapaan anak kost | 490 orang | Ketertiban masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Forum Kebinekaan (FBUB) | 160 orang | kerukunan umat beragama | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gebyar Lansia | 160 orang | Lansia Kreatif dan Produktif | 100% | | | | | |
| | | | | | | Fasilitasi Seni Budaya | 2 kelompok | Melestarikan seni dan Budaya | 100% | | | | | |
| | | | | | | JBM | 16 RW | Penertiban jam belajar | 100% | | | | | |
| | | | | | | Stimulan PKK RT/RW | 12 bulan | Tertib administrasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | RPJMD | 1 kegiatan | Tersusunnya program kelurahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan kerajinan bagi KMS | 1 kegiatan | mengurangi kemiskinan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Uang pikket keagamaan | 40 orang | meningkatkan keamanan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sarasehan kesehatan sendi dan tulang | 50 orang | pengetahuan kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Kelompok Pendukung ibu | 50 orang | Pemahaman ibu terhadap fungsi ASI | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi kegawatdaruratan | 40 orang | kesiagaan masyarakat | | | | | | |
| 4.7 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro | | | GK | | Pelatihan MC bahasa jawa | 1 kegiatan | Menambah pengetahuan | 100% | 252,658,000 | 277,923,800 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman | |
| | | | | | | Pelatihan jahit | 1 kegiatan | Tercipta lapangan kerja | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan masak Gudog | 1 kegiatan | Tercipta lapangan kerja | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan bagi difabilitas | 1 kegiatan | Tercipta lapangan kerja | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan peningkatan kapasitas karang taruna | 1 kegiatan | Tercipta lapangan kerja | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan posyandu | 21 RW | Terjaganya balita | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan daur ulang sampah dan limbah rumah | 2 kegiatan | Menambah Keterampilan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan PKK | 12 bulan | Keluarga sejahtera | 100% | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas DBKS | 1 kegiatan | Keluarga sejahtera | 100% | | | | | |
| | | | | | | kapasitas FKPM | 1 kegiatan | Optimalisasi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas kesi | 1 kegiatan | Potensi ekonomi kerakyatan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan PKADD | 85 orang | berbudaya | 100% | | | | | |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas linmas | 12 bulan | Kegiatan lancar | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan pekerti | 1 paket | Kegiatan lancar | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelaksanaan movev bantuan keluarga miskin | 10 bulan | Kelancaran distribusi voucher | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJMD | 1 kegiatan | RPJMD | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi/bimtek pengelola UED-SP | 50 orang | semangat bekerja, SDM | 100% | | | | | |
| 4.8 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban | | | GK | | Terlaksananya Administrasi PKK Kelurahan, RT, RW | 12 bulan | Tertib administrasi | 100% | 275,302,000 | 302,832,200 | Sedang berjalan | Kec. Gondokusuman | |
| | | | | | | Terlaksananya Oprasional JBM Terban | 12 bulan | Terlaksananya kegiatan JBM | 100% | | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Operasional Kelurahan Siaga | 1 kegiatan | Terlaksananya Kelurahan Siaga | 100% | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|-------------------|---|-------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Terlaksananya Pembinaan pokmair | 100 orang | Terlaksananya Pembinaan pokmair | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gebyar PAUD | 1 kegiatan | Pengembangan kreatifitas anak | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan dan gebyar Lansia | 2 kegiatan | Terlaksananya Gebyar Lansia | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan P2WKSS | 100 orang | Terlaksananya Pembinaan P2WKSS | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pembinaan Lembaga Kebudayaan Terban | 50 orang | Melestarikan Budaya Jawa | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan PKK | 1 kegiatan | Terlaksananya Penyuluhan PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | Latihan kesenian dan festival kali belik | 2 kegiatan | melestarikan seni budaya | 100% | | | | | |
| | | | | | | TKPK | 12 bulan | mengentas kemiskinan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Piket keagamaan | 2 kegiatan | keamanan terkendali | 100% | | | | | |
| 4.9 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman | | | GK | | Pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan UMKM | 50 UMKM | Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan UMKM | 100% | 1,434,080,006 | 1,577,488,007 | Sedang berjalan Kec. Gondokusuman | | |
| | | | | | | Pelaksanaan Gelar potensi UMKM | 3 kali | Terselenggaranya Gelar potensi UMKM | 100% | | | | | |
| | | | | | | Frekuensi Sosialisasi bagi pemilik pondokan | 50 pemilik pondokan | terselenggaranya Sosialisasi bagi pemilik pondokan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelaksanaan Pembinaan PKL | 50 PKL | Terselenggaranya Pembinaan PKL | 100% | | | | | |
| | | | | | | Perbaikan jalan | 4 Kelurahan | terciptanya kenyamanan wilayah | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan fasum | 5 kelurahan | terciptanya kenyamanan wilayah | 100% | | | | | |
| | | | | | | PJU lingkungan | 5 kelurahan | terciptanya kenyamanan wilayah | 100% | | | | | |
| | | | | | | Konsultan perencanaan dan pelaksanaan | 1 paket | terciptanya kenyamanan wilayah | 100% | | | | | |
| | | | | | | Musrenbang | 1 Kecamatan 5 Kelurahan | Terselenggaranya Musrenbang | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan profil | 1 kali | Tersedinya informasi wilayah | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pembuatan inmen | 2 semester | Tersedinya informasi wilayah | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelaksanaan Lomba kampung bersih dan sehat | 1 kegiatan | terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat | 100% | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 4,903,466,918 | 5,393,813,610 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Jetis

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|--------------------------------|--|--------|---|--------|--|--|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | | 902,702,631 | 992,972,894 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | JETIS | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 41 Orang | Dukungan terhadap kelancaran koordinasi dan monitoring kewilayahan | 100% | 110,976,500 | 122,074,150 | Sedang berjalan | Kecamatan Jetis | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 187 kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk harian umum | 11 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah | 33 laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | JETIS | | | Materai 3000 | 1250 lbr | Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 593,968,790 | 653,365,669 | Sedang berjalan | Kecamatan Jetis | |
| | | | | | | | Materai 6000 | 425 lbr | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa komunikasi, jasa sumber daya air, jasa listrik dan bantuan komunikasi yang tersedia | Telp : 4 kantor 1 rumah dinas Air : 4 meteran Listrik : 4 meteran Bantuan Komunikasi : 4 Org | | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa peralatan & perlengkapan kantor | Kursi : 400 buah Meja : 150 buah Soundsystem : 3 kali Tenda : 9 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 4 | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 2 | 13 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | STNK roda 3 | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 30 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Retribusi kebersihan & assenering | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 11 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan | 9 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Perlengkapan kantor dan rumah tangga | 23 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Alat tulis kantor yang tersedia | 55 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Cetakan | 1 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Penggandaan | FC : 2 jenis Jilid : 2 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 24 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan komputer yang tersedia | 19 jenis | | | | | | | |
| | | | | | | | Surat Kabar Lokal | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bacaan dan buku pendukung | 21 buku | | | | | | | |
| | | | | | | | Piket Kantor | 12 bulan | Keamanan kantor terjaga | 100% | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | JETIS | | | Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntansi | 4 Dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 197,757,341 | 217,533,075 | Baru | Kecamatan Jetis | |
| | | | | | | | Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola | 50 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 5 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 2 Orang | | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Hukum dan Aparatur | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana aparatur | 100% | | | | | 213,434,000 | 234,777,400 | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|--------|---|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | JETIS | | | Pemeliharaan Taman Kantor | "100 batang 21 kg pupuk" | Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 138,800,000 | 152,680,000 | Sedang berjalan | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Pemeliharaan Gedung kantor | 4 kantor 1 rumah dinas | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | JETIS | | | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas : | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 74,634,000 | 82,097,400 | Sedang berjalan | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Roda 4 | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Roda 2 | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Roda 3 | 2 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Hukum dan Aparatur | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik | 100% | | | | | 41,712,000 | 45,883,200 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | | | JETIS | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Kebersihan kantor terpelihara denga baik | | 41,712,000 | 45,883,200 | Baru | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis | Hukum dan Aparatur | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Meningkatnya swadaya masyarakat | 100% | | | | | 2,404,940,352 | 2,645,434,387 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis | | | JETIS | | | PEMILIHAN RT/RW/LPMK (3 bln) | 3 bulan | Demokrasi warga meningkat | 100% | 345,143,500 | 379,657,850 | Baru | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Monografi Kelurahan dan Kecamatan , | 4 dokumen | Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penguatan Kapasitas RT/RW | 203 orang | Kapasitas RT/RW Meningkat | undefined100 % | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan | 1 kelurahan | Terpilhnya kelurahan sebagai wakil kecamatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Hibah LPMK atau RT/RW | 3 LPMK 166 RT 37 RW | Dukungan terhadap kegiatan LPMK dan RT/RW meningkat | undefined100 % | | | | |
| | | | | | | | Sambang Kampung dan Keamanan Wilayah | 11 bulan | Keamanan dan ketertiban kampung meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Linmas yang diberdayakan | 3 kelurahan | keberdayaan Linmas meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Forum Pemerintahan | 12 kali | Keamanan dan ketertiban kampung meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | PAM | 7 kegiatan | Keamanan wilayah terjaga | 100% | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis | | | JETIS | | | Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) | 203 orang | Tersalurkannya informasi terkait pelayanan | 100% | 181,226,317 | 195,565,700 | Baru | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Perekaman dan pengambilan E_KTP | 12 bulan | Tersalurnya informasi-informasi terbaru terkait pelayanan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Retribusi IMBB | 2 dokumen | Perizinan IMBB yang terdata meningkat | 100% | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis | | | JETIS | | | Pengembangan dan pelestarian budaya daerah | 5 kegiatan | Peran serta masyarakat dalam kebudayaan meningkat | 100% | 504,954,800 | 504,954,800 | Baru | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Peningkatan harapan hidup masyarakat | 25 kegiatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Peningkatan kapasitas lembaga sosial | 18 kegiatan | Kemampuan lembaga sosial meningkat | 100% | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo | | | JETIS - Kelurahan Bumijo | | | Peningkatan kapasitas lembaga sosial | 9 kegiatan | Kemampuan lembaga sosial meningkat | 100% | 244,571,575 | 289,091,409 | Baru | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Peningkatan harapan hidup masyarakat | 9 kegiatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan dan pelestarian budaya daerah | 1 kegiatan | Peran serta masyarakat dalam kebudayaan meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | peningkatan perekonomian masyarakat | 2 kegiatan | Perekonomian masyarakat meningkat | 100% | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan | | | JETIS - Kelurahan Cokrodingratan | | | Peningkatan kapasitas lembaga sosial | 7 kegiatan | Peningkatan kapasitas lembaga sosial | 100% | 207,116,700 | 241,944,446 | Baru | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Peningkatan harapan hidup masyarakat | 10 kegiatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan dan pelestarian budaya daerah | 2 kegiatan | Peran serta masyarakat dalam kebudayaan meningkat | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|------------------|----------------|--|-------------------|--|--|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan | | | JETIS - Kelurahan Gowongan | | | peningkatan perekonomian masyarakat | 2 kegiatan | Perekonomian masyarakat meningkat | 100% | 194,628,400 | 234,191,216 | Baru | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Peningkatan kapasitas lembaga sosial | 5 kegiatan | Kemampuan lembaga sosial meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Peningkatan harapan hidup masyarakat | 7 kegiatan | Harapan hidup masyarakat meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengembangan dan pelestarian budaya daerah | 0 kegiatan | Peran serta masyarakat dalam kebudayaan meningkat | 100% | | | | |
| 4.7 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis | | | JETIS | | | peningkatan perekonomian masyarakat | 3 kegiatan | Perekonomian masyarakat meningkat | 100% | 727,299,060 | 800,028,966 | Baru | Kecamatan Jetis |
| | | | | | | | Conblokisasi | 2233 m2 | Kualitas akses jalan meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Handrilling | 63 m2 | Keselamatan warga meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan pintu pengaman pinggir sungai | 2 unit | Keselamatan warga meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Rehab SAH | 12 m2 | kualitas lingkungan hidup meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Rehab SAH tertutup | 100 m2 | kualitas lingkungan hidup meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan tangga naik | 32 m2 | Keselamatan warga meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan PJU | 3 kelurahan | kualitas lingkungan hidup meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Profil Kewilayahan | 4 Dokumen | Data kewilayahan yang relevan | 100% | | | | |
| | | | | | | | PKL yang dibina | 107 pkl | Wawasan PKL meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Informasi Pembangunan | 10 Dokumen | Dokumen informasi pembangunqn yang relevan | 100% | | | | |
| | | Pasar Rakyat | 50 UMKM | Pangsa pasar pelaku usaha kecil dan menengah meningkat | 100% | | | | | | | | | |
| | | UMKM yang dibina | 2 kegiatan | Sinergitas anggota meningkat | 100% | | | | | | | | | |
| | | KUBE yang dibina | 2 kegiatan | Sinergitas anggota meningkat | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | Pengembangan Ekonomi Kreatif | 50 Orang | Membuka wawasan baru dan meningkatkan kerjasama dalam strategi mengembangkan ekonomi kreatif | 100% | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 3,562,788,983 | 3,919,067,881 | | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Tegalrejo

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|--------------------------------|---|----------------|--|--------|--|----------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 841,912,322 | 926,103,554 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Tegalrejo | | | Makan Minum Rapat Koordinasi | 11 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 133,923,000 | 147,315,300 | Sedang berjalan | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Minum Pegawai | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Makan Minum Tamu | 2 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Makan Minum Harian Umum | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Monitoring | 11 bulan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Tegalrejo | | | Piket Kantor | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 605,210,650 | 665,731,715 | Sedang berjalan | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor | 35 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 | 1100 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 | 400 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 17 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | BBM Peralatan Kerja | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Tabung Pemadam | 25 tabung | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan Komputer | 5 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga | 12 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran Air | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran Listrik | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Surat Kabar | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi Kebersihan | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Kendaraan Roda 4 | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Kendaraan Roda 3 | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Kendaraan Roda 2 | 15 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Percetakan | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 155.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa Meja | 150 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa Kursi | 600 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa Tenda | 10 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa Sound System | 5 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Kebersihan Kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Komputer | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komputer dan perlengkapannya | 2 jenis | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Tegalrejo | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 102,778,672 | 113,056,539 | Sedang berjalan | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Jasa Penatalaksana Kepegawaian | 41 dokumen ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa tenaga bantuan | 14 bulan | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--|--|----------------|--|--------|---|------------------------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | | | | | 124,372,700 | 136,809,970 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Tegalrejo | | | Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor | 5 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 53,457,700 | 58,803,470 | Sedang berjalan | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Bahan dan Bibit Tanaman | 2 jenis | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Tegalrejo | | | Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD | 100% | 70,915,000 | 78,006,500 | sedang berjalan | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 | 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 15 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan | Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 48,555,000 | 53,410,500 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec. Tegalrejo | | | Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun | 6 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 48,555,000 | 53,410,500 | Baru | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Laporan Kinerja SKPD : Laki, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun | 6 laporan | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan | Terwujudnya Kelembagaan dan Keterlaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 3,319,371,078 | 3,651,308,186 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo | | | Kec. Tegalrejo | | | Monografi Kelurahan dan Kecamatan | 10 dokumen | Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan | 100% | 394,134,000 | 433,547,400 | Baru | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK | 2 kegiatan | Meningkatnya kemampuan perangkat RT/ RW/ LPMK | | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan | 1 kegiatan | Terpilihnya pemenang tingkat Kecamatan untuk mewakili tingkat Kota | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan dan Penataan PKL | 107 PKL | Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan teratur | | | | | |
| | | | | | | | Pengawasan Perizinan | 12 bulan | Peningkatan ketertiban perizinan, wilayah aman | | | | | |
| | | | | | | | Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan | 12 kali | Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Anggota Satuan Linmas | 4 kelurahan | Peningkatan kemampuan anggota satuan Linmas | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Panca Tertib | 12 bulan | Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah | | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan RT, RW dan LPMK | 3 kegiatan | Kelancaran kegiatan pemilihan RT, RW, LPMK | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo | | | Kec. Tegalrejo | | | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 12 bulan | Kelancaran pelayanan | 100% | 216,722,828 | 238,395,111 | Baru | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Perekaman dan pengambilan E-KTP | 12 bulan | Kelancaran perekaman dan pengambilan E-KTP | | | | | |
| | | | | | | | Pemungutan Retribusi HO dan IMB | 2 izin IMB, 80 izin HO | Kelancaran pelayanan perizinan HO dan IMB | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi SPP | 1 kegiatan | Inf. tentang SPP dapat diterima masy. | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo | | | Kec. Tegalrejo | | | Penguatan Paguyuban Lansia | 2 kegiatan | Peningkatan Wawasan dan Kesehatan Lansia | 100% | 618,556,200 | 680,411,820 | Baru | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai | 2 kegiatan | Peningkatan Kebersihan Sungai | | | | | |
| | | | | | | | PSN Jumantik Anak | 2 kegiatan | Pengurangan jentik-jentik nyamuk penyebab penyakit DBD | | | | | |
| | | | | | | | Sapaan Anak Kos | 2 kegiatan | Ketertiban Izin Pondokan dan Peningkatan Kesadaran Penghuni Kos untuk Bermasyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Lintas Hijau | 2 kegiatan | Peningkatan Kesadaran akan Kelestarian Wilayah | | | | | |
| | | | | | | | Monev Bantuan Warga Miskin | 12 bulan | Kelancaran Kartu Pangan Non Tunai | | | | | |
| | | | | | | | Gerbang Mas | 2 kegiatan | Peningkatan Kedisiplinan Anak | | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK | 1 Kec, 4 kel | Kelancaran Administrasi PKK Kecamatan & Kelurahan | | | | | |
| | | | | | | | Gelar Kesenian | 2 kegiatan | Pelestarian Budaya | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|--|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | KKG KB Kes | 1 kegiatan | Pelaksanaan KKG berjalan lancar | | | | | | |
| | | | | | | Pentas Seni Wilayah | 1 kegiatan | Pelestarian Budaya | | | | | | |
| | | | | | | Gebyar PAUD | 1 kegiatan | Peningkatkan dan Pengembangan Kreativitas Anak | | | | | | |
| | | | | | | Pawai Budaya | 2 kegiatan | Pelestarian Budaya | | | | | | |
| | | | | | | PMPS | 1 kegiatan | Pelestarian Budaya | | | | | | |
| | | | | | | Penguatan Kelembagaan FKPSM dan IPSM | 1 kegiatan | Peningkatan Wawasan tentang Masalah Sosial | | | | | | |
| | | | | | | Gemar Makan Ikan | 1 kegiatan | Peningkatan Kesadaran Makan Ikan | | | | | | |
| | | | | | | Festival Olahraga dan Permainan Anak Tradisional | 1 kegiatan | Pelestarian Budaya | | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo | | | Kel. Tegalrejo | | Sosialisasi Bahaya Narkoba dengan kesehatan Reproduksi | 1 kegiatan | terbukanya wawasan, cakrawala pikir remaja | 100% | 228,235,700 | 251,059,270 | Baru | Kelurahan Tegalrejo | |
| | | | | | | Jumantik Remaja | 1 kegiatan | terciptanya lingkungan yang sehat, bebas dari nyamuk terutama DB | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan KesenianTradisional | 1 kegiatan | terbentuknya kelompok kesenian angklung | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Kepemimpinan bagi Remaja | 1 kegiatan | Menggal potensi diri remaja sebagai asit bangsa | | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan System informasi Posyandu | 1 kegiatan | terciptanya manajemen data posyandu yang handal | | | | | | |
| | | | | | | Seminar Pembentukan Budaya dan Karakter Bangsa | 1 kegiatan | warga masyarakat mempunyai karakter positif | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Tanggap Bencana | 1 kegiatan | Masyarakat memahami ttg cara tanggap bencana | | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan HIV & AID | 1 kegiatan | mengurangi resiko penyebaran HIV AIDS | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Bahasa Inggris | 1 kegiatan | memberi peluang wira usaha pada warga masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | Pel. Pengelolaan Bank Sampah | 1 kegiatan | terciptanya lingkungan yang bersih dan masyarakat yang kreatif | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional | 1 kegiatan | memberi bekal ketrampilan kepada remaja dan masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Media Janur (Lanjutan) | 1 kegiatan | tambahnya keterampilan masyarakat dalam merangkai janur | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pangkas Rambut (Lanjutan) | 1 kegiatan | memberi peluang wira usaha pada warga masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Usaha Syariah | 1 kegiatan | memberi pengetahuan pengelolaan usaha sesuai syariah islam | | | | | | |
| | | | | | | Kursus Meracik Kopi | 1 kegiatan | memberi peluang wira usaha pada warga masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Hydroponik | 1 kegiatan | memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Sablon (Lanjutan) | 1 kegiatan | memberi peluang wira usaha pada warga masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat | 1 kegiatan | Menurunnya angka Kemiskinan | | | | | | |
| | | | | | | Administrasi PKK RW (12 RW) | 12 RW | Kelancaran Kegiatan PKK | | | | | | |
| | | | | | | Administrasi PKK RT (47 RT) | 47 RT | Kelancaran Kegiatan PKK | | | | | | |
| | | | | | | Operasional JBM (12 RW) | 12 RW | Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak Usia Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Kelurahan siaga | 1 kegiatan | Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJMD Kel Tegalrejo | 1 kegiatan | Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo | | | | | | |
| | | | | | | Pentas Seni Wilayah | 1 kegiatan | Pelestarian Budaya | | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak | | | Kel. Kricak | | Penyuluhan Kesehatan dan Bantuan administrasi lansia segoro werdho Mulyo | 1 kegiatan | Meningkatkan Kesehatan Lansia | 100% | 329,512,900 | 362,464,190 | Baru | Kecamatan Tegalrejo | |
| | | | | | | Pelatihan kader PKK dan Kader Yandu balita dan Lansia | 1 kegiatan | Meningkatkan pengetahuan tentang peran PKK dan Yandu | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan saji Menu Sehat dan Lokakarya Kelompok GSI | 1 kegiatan | meningkatkan keluarga sehat dan cerdas | | | | | | |
| | | | | | | pelatihan tata rias dan Busana untuk pentas | 1 kegiatan | melatih kemandirian untuk rias dan busana pentas | | | | | | |
| | | | | | | Latihan kesenian :Iari modern ,Karawitan dan jatilan | 1 kegiatan | Melestarikan Budaya Kelurahan Kricak | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan MC bahasa jawa dan Bahasa Indonesia | 1 kegiatan | Melestarikan Budaya | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | Pelatihan Baca tulis aksara Jawa dan adat istiadat dalam berbagai macam jenis | 1 kegiatan | meningkatkan pengetahuan tentang baca tulis aksara Jawa | | | | | | |
| | | | | | | Sarasehan Kesenian keroncong | 1 kegiatan | meningkatkan minat seni bidang keroncong | | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan dan Pembinaan Manfaat hidup berkoperasi | 1 kegiatan | untuk menanamkan manfaat Hidup berkoperasi | | | | | | |
| | | | | | | Worksop dan diklat Media Bagi Pendidik Anak PAUD | 1 kegiatan | Menambah Kompetensi pendidik PAUD dalam membuat media belajar untuk Anak | | | | | | |
| | | | | | | Senam Bersama pendidik dan Peserta Didik PAUD | 1 kegiatan | terselenggaranya Program Senam PAUD dan meningkatkan Kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Seminar Parenting Pengasuhan Anak Usia Dini (PAUD) | 1 kegiatan | Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pola asuh Anak dalam masa Emas Anaka usia Dini | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Tanggap Bencana | 1 kegiatan | menambah pengetahuan dalam menghadapi Bencana | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Perawatan Jenazah | 1 kegiatan | menambah pengetahuan tentang perawatan Jenazah baik islam maupun Non Islam | | | | | | |
| | | | | | | melestarikan dan menumbuh kembangan mainan tradisional: mainan egrang,gobak sodor,lomba bakiak,gobak sodor | 1 kegiatan | Melestarikan dotlan anak supaya tidak punah | | | | | | |
| | | | | | | Gebyar PAUD dan Lomba Kreativitas Seni Anak Usia Dini | 1 kegiatan | menambah pengetahuan tentang Seni dan Budaya | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pembuatan Aneka Sirup dan Inovasi Produk Jamu | 1 kegiatan | Mengoptimalkan potensi warga dalam mengolah minuman ringan jenis sirup, dan diharapkan menambah pendapatan warga | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pengelolaan Home Stay | 1 kegiatan | Mengoptimalkan potensi warga dalam mengelola Home Stay, dan diharapkan menambah pendapatan warga | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Teknik Pengawetan Non Kimia Produk Makanan | 1 kegiatan | Mengoptimalkan potensi kuliner warga dalam mengolah produk makanan, dan menambah pendapatan warga | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pembuatan, Teknik Pengemasan dan Pemasaran Souvenir dari Daur Ulang Sampah dan Bahan Baku Jadi | 60 orang | Meningkatkan keterampilan mengolah daur ulang sampah dan bahan baku jadi menjadi produk kerajinan | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Teknik Pembinaan Kelompok Sadar Wisata | 1 kegiatan | Meningkatkan kompetensi pengurus wisata dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam membina kelompok sadar wisata | | | | | | |
| | | | | | | Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat | 1 kegiatan | Menurunnya angka Kemiskinan | | | | | | |
| | | | | | | Administrasi PKK RW (13 RW) | 13 RW | Kelancaran Kegiatan PKK | | | | | | |
| | | | | | | Administrasi PKK RT (61 RT) | 61 RT | Kelancaran Kegiatan PKK | | | | | | |
| | | | | | | Operasional JBM (13 RW) | 13 RW | Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak Usia Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Operasional Kelurahan Siaga | 1 kegiatan | Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJMD Kelurahan | 1 kegiatan | Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo | | | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru | | | Kel. Karangwaru | | Sarasehan Sehat Dan Bugar Hari Tua/Senam/Rapat | 1 kegiatan | Peningkatan SDM | 100% | 168,814,900 | 185,696,390 | Baru | Kecamatan Tegalrejo | |
| | | | | | | Seminar Kenakalan Remaja, Premanisme, Narkoba | 1 kegiatan | Peningkatan SDM | | | | | | |
| | | | | | | Workshop Kampung Panca Tertib | 1 kegiatan | FKPT | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Pembentukan Rw. Siaga | 1 kegiatan | Peningkatan SDM | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Inisiasi Kampung Wisata | 1 kegiatan | Peningkatan SDM | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pembuatan Agropolitan | 1 kegiatan | Peningkatan SDM | | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Budidaya Burung Kenari | 1 kegiatan | Peningkatan SDM | | | | | | |
| | | | | | | Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat | 1 kegiatan | Menurunnya angka Kemiskinan | | | | | | |
| | | | | | | Administrasi PKK RW (14 RW) | 14 RW | Kelancaran Kegiatan PKK | | | | | | |
| | | | | | | Administrasi PKK RT (56 RT) | 56 RT | Kelancaran Kegiatan PKK | | | | | | |
| | | | | | | Operasional JBM (14 RW) | 14 rRW | Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak Usia Sekolah | | | | | | |
| | | | | | | Operasional Kelurahan Siaga | 1 kegiatan | Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJMD Kelurahan | 1 kegiatan | Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo | | | | | | |
| | | | | | | Pentas Seni Wilayah | 1 kegiatan | Pelestarian Budaya | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|--------|--|------------|--|--------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 4.7 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener | | | Kel. Bener | | | Pelatihan IPSM dasar | 1 kegiatan | Peningkatan data PMKS | 100% | 183,176,900 | 201,494,590 | Baru | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Bimbingan Remaja terhadap Kenakalan Remaja | 1 kegiatan | Pemuda berprestasi | | | | | |
| | | | | | | | Penguatan Kesenian Angguk | 1 kegiatan | Demi keseimbangan dalam masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) | 1 kegiatan | "Masyarakat keluarga bahagia" | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia | 1 kegiatan | Menjadi jelas apabila warga yang akan menjadi Tki/ TKW | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Administrasi Lembaga RT dan RW | 1 kegiatan | Meningkatkan wawasan | | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Kampung Wisata | 1 kegiatan | Mencari pekerjaan yang benar | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Penunjang Kampung Wisata | 1 kegiatan | Meningkatkan wawasan | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Mainan Anak Tradisional | 1 kegiatan | Pengenalan Mainan Anak Tradisional | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Daur Ulang Sampah Anorganik | 1 kegiatan | Menjaga kebersihan lingkungan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan kreasi hijab | 1 kegiatan | Meingkatkan kreatifitas | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan membuat Hantaran Pengantin | 1 kegiatan | Meningkatkan Ketrampilan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Ketrampilan Membuat Kue Kering | 1 kegiatan | Peningkatan Kesejahteraan | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Telur Asin | 1 kegiatan | Pendapatan Warga/Kemahiran berusaha | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pemasaran Produk secara On line | 1 kegiatan | Peningkatan Ekonomi | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Sayuran Perkotaan | 1 kegiatan | Peningkatan Ekonomi | | | | | |
| | | | | | | | Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat | 1 kegiatan | Menurunnya angka Kemiskinan | | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK RW (7 RW) | 7 RW | Kelancaran Kegiatan PKK | | | | | |
| | | | | | | | Administrasi PKK RT (26 RT) | 26 RT | Kelancaran Kegiatan PKK | | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM (7 RW) | 7 RW | Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak Usia Sekolah | | | | | |
| | | | | | | | Operasional Kelurahan Siaga | 1 keg | Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD Kelurahan | 1 keg | Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo | | | | | |
| | | | | | | | Pentas Seni Wilayah | 1 kegiatan | Pelestarian Budaya | | | | | |
| 4.8 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo | | | Kec. Tegalrejo | | | Pemeliharaan Jalan Conblok | 1 paket | Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas jalan | 100% | 1,180,217,650 | 1,298,239,415 | Baru | Kecamatan Tegalrejo |
| | | | | | | | Pemeliharaan SAH | 1 paket | Kelancaran saluran air hujan | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Fasilitas Umum | 1 paket | Fasilitas Umum terawat dengan baik | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan TPU Utaralaya | 1 paket | TPU terpelihara dan terawat dengan baik | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan PJU | 225 titik | PJU wilayah terawat dan terpelihara dengan baik | | | | | |
| | | | | | | | Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan | 5 dokumen | Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan TPU Utaralaya | 12 bulan | Pemeliharaan dan Perawatan TPU Utaralaya | | | | | |
| | | | | | | | Buku Informasi Program Kegiatan | 2 dokumen | Informasi Pembangunan dan Kegiatan Wilayah tercukupi | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Profil Kecamatan & kelurahan | 5 dokumen | Tersusunnya Profil Kelurahan dan Kecamatan | | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi UMKM | 1 kegiatan | Peningkatan Usaha UMKM Warga | | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 2 kegiatan | Penurunan Angka Kemiskinan | | | | | |
| | | | | | | | Pasar Rakyat | 1 kegiatan | Peningkatan Usaha Promosi Warga | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 4,334,211,100 | 4,767,632,210 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Umbulharjo

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|--------------------------------|--|-----------------|--|--------|---|---------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | | | | | 1,413,685,740 | 1,555,054,314 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Umbulharjo | | | Makan minum harian Pegawai | 73 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 158,136,000 | 173,949,600 | sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Makan minum rapat koordinasi | 20 macam | | | | | | |
| | | | | | | | Makan minum tamu kunjungan | 18 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Makan minum harian umum | 11 bulan | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Umbulharjo | | | Jasa Piket Kantor | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 986,699,046 | 1,085,368,951 | sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | 78 macam | | | | | | |
| | | | | | | | Alat Listrik dan elektronik yang tersedia | 12 macam | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 1750 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 380 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia | 29 macam | | | | | | |
| | | | | | | | Bahan bakar minyak dan gas yang tersedia | 40 liter | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 70 tabung | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Bahan Komputer/Printer | 7 macam | | | | | | |
| | | | | | | | Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia | 6 macam | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran telepon | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pembayaran rekening Air | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Retribusi Kebersihan | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Langganan Surat Kabar | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 4 | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 3 | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | STNK Roda 2 | 22 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Barang Cetak | 3250 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Penggandaan | 354850 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Jilid | 195 bdl | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Sewa Kursi | 1000 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Sewa Meja | 100 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Sewa Taplak | 100 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Sewa Tenda | 15 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Sewa Perlengkapan/Peralatan | 5 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Bj Modal Alat Kantor | 9 item | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah-tanggaan/Komunikasi/Studio | 7 macam | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pemeliharaan Komputer | 51 unit | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Umbulharjo | | | Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 268,850,694 | 295,735,763 | sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola | 71 ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Pengelola Arsip | 1 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 7 orang | | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|---------|--|---------------------------------------|--|-----------------|--|--------|---|--|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | | | | 291,907,000 | 321,097,700 | | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Umbulharjo | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 168,524,500 | 185,376,950 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | pemeliharaan rumah dinas | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | pemeliharaan gedung kantor | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | pemeliharaan mebelair | 3 macam | | | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Umbulharjo | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1 unit roda 4 4 unit roda 3 22 unit roda 2 | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 123,382,500 | 135,720,750 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 102,583,750 | 112,842,125 | | |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kec. Umbulharjo | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 5 dokumen | Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD | 100% | 102,583,750 | 112,842,125 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Laporan Kinerja OPD/LKIP/Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) | 5 dokumen | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | | Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Swadaya Murni | 100% | | | | | 5,203,219,728 | 5,723,541,701 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo | | | Kec. Umbulharjo | | | Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan | 16 dokumen | Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100% | 710,245,000 | 781,269,500 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Sosialisasi Kelembagaan RT dan RW | 340 RT, 87 RW | | | | | | |
| | | | | | | | Penilaian Evaluasi Kelurahan | 7 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Sinergitas Kelembagaan Kelurahan | 200 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pengawasan dan Penyuluhan Pelanggaran Perda | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Penataan dan Penertiban PKL | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan LINMAS | 640 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Upacara Bendera HUT RI 17 Agustus | 1 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Sambang kampung | 14 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Ketertiban | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Vandalisme | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan Umum | 10 kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | Operasi Gepeng | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Ketertiban oleh MUSPIKA | 7 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan KTB | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan dan Pengukuhan RT, Rw dan LPMK | 7 kelurahan | | | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo | | | Kec. Umbulharjo | | | Pelayanan Perijinan Kecamatan | 5 jenis perijinan | Dukungan terhadap terwujudnya Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100% | 208,879,488 | 229,767,437 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Pelayanan Administrasi Terpadu | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Perijinan dan Pelayanan | 435 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Tekhnis | 11 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Inovasi Kecamatan | 2 bulan | | | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo | | | Kec. Umbulharjo | | | TKPK | 8 bulan | menanggulangi permasalahan kemiskinan di wilayah | 100% | 752,261,580 | 507,287,374 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin | 8 bulan | evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pentas Seni dan Budaya | 1 kali | Mengkoordinir pentas seni 7 kelurahan | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|--------|---|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| | | | | | | | Lomba Bidang Kesehatan | 1 kali | Seleksi Lomba untuk Tingkat Kota | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gebyar PAUD | 1 kali | menampilkan potensi PAUD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Keterisian Data PKK | 4 bulan | keterisian data | 100% | | | | |
| | | | | | | | Ketahanan Pangan | 4 bulan | Pembentukan Forum dan Kader Ketahanan Pangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gerakan Sapaan Anak Kos | 6 bulan | Pembinaan kedisiplinan dan Ketertiban anak Kos dan induk semang | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba KKG PKK | 1 kali | Seleksi Lomba Tingkat Kota | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi dan sarasehan PKK | 5 kali | menambah pengetahuan bagi PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bintek Administrasi PKK | 40 orang | menambah pengetahuan bagi PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi Forum Kecamatan | 15 forum | menyatukan persepsi dalam kegiatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pentas Mocoplat | 1 kali | menampilkan potensi masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bimtek Keterpaduan BKB-PAUD-Posyandu-SDIDTK | 30 orang | menambah ketrampilan bagi masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelegar Kecamatan Umbulharjo | 2 hari | menampilkan potensi Umbulharjo dalam HUT Umbulharjo | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pembina JBM | 4 bulan | evaluasi pelaksanaan JBM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pembinaan Kelurahan Siaga | 4 bulan | evaluasi pelaksanaan Kelurahan Siaga | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba Tari Klasik Tk SD dan SMP | 40 orang | menggali potensi budaya Jawa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Ketahanan Pangan | 30 orang | menambah pengetahuan dan untuk mendapatkan sertifikat PIRT | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan Mocoplat | 4 kali | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Perencanaan Bagi Kader PKK | 40 orang | menambah ketrampilan bagi kader PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Packaging | 30 orang | menambah ketrampilan bagi UMKM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Poetnsi Diffabel | 1 kali | menampilkan potensi diffabel | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pengelola UKS | 60 orang | menambah pengetahuan bagi pengelola UKS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kaji Banding Pola Pemberdayaan | 24 orang | menambah wawasan dan menerapkan hasil study banding | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan PKH | 300 orang | Menambah pengetahuan bagi peserta PKH | 100% | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan | | | Kel. Giwangan | | | Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk | 10 bulan, 42 RT | mencegah wabah demam berdarah di wilayah | 100% | 230,597,000 | 296,654,600 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Jam Belajar Masyarakat | 13 RW | menambah minat belajar | 100% | | | | |
| | | | | | | | Workshop RW Siaga | 1 kali | mengembangkan kesi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan | 5 kali | manambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RW | 13 RW | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | sarasehan PKK RT | 42 RT | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional) | 30 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD Kelurahan Giwangan | 1 kali | RPJMD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin | 8 bulan | evaluasi penyaturan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD | 200 orang | Potensi Paud dan Pendidk PAUD tebin maningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Worshop Kampung Wisata | 30 orang | Pengembangan Wisata pinggir sungai | 100% | | | | |
| | | | | | | | BIMTEK Kampung Wisata | 40 orang | menambah ketrampilan manajemen wisata | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Pola Asuh Anak dan UP2K | 70 orang | menambah pengetahuan tentang pola asuh anak | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Hatinya PKK dan PHBS | 70 orang | menambah pengetahuan tentang PHBS | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gebyar Lansia | 200 orang | menjaga potensi lansia | 100% | | | | |
| | | | | | | | Upaca Adat Nyadran | 1 kali | mempertahankan adat tradisi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Sablon Tingkat Dasar | 30 orang | menambah ketrampilan remaja | 100% | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan | | | Kel. Sorosutan | | | Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk | 10 bulan, 70 RT | mencegah wabah demam berdarah di wilayah | 100% | 380,117,100 | 467,061,650 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Jam Belajar Masyarakat | 18 RW | menambah minat belajar | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi RW Siaga | 1 kali | mengembangkan kesi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan | 5 kali | manambah wawasan PKK | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| | | | | | | Sarasehan PKK RW | 18 RW | manambah wawasan PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sarasehan PKK RT | 70 RT | manambah wawasan PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan makanan tradisional) | 40 orang | menambah ketrampilan bagi warga rentan/miskin | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJMD Kelurahan Sorosutan | 1 kali | RPJMD | 100% | | | | | |
| | | | | | | Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin | 8 bulan | evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD | 250 orang | Potensi Paud dan Pendidk PAUD lebih maningkat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pembuatan Makanan Kecil | 30 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Rias Karakter | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan hantaran Manten Tingkat Lanjut | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pembuatan Blankon | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pembuatan sekam untuk Media Tanam | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Penangkaran Tanaman Hias | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong dan Pisang | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Komputer Lanjutan (PKK) | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gerakan Sapaan Anak Kos | 18 RW, 4 bulan | memberi contoh kebersamaan dan kedisiplinan pada anak kos | 100% | | | | | |
| | | | | | | Panen Raya (April dan Desember) | 2 kali | hasil panen yang melimpah | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gebyar Lansia | 200 orang | menjaga potensi lansia | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB | 30 orang | menambah ketrampilan pada anggota KTB | 100% | | | | | |
| 4.6 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean | | | Kel. Pandeyan | | Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk | 1 kali, 10 bulan | mencegah wabah demam berdarah di wilayah | 100% | 216,904,000 | 284,435,800 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo | |
| | | | | | | Jam Belajar Masyarakat | 8 bulan | menambah minat belajar | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Kelurahan Siaga | 1 kali | mengembangkan kesi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan | 5 kali | manambah wawasan PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sarasehan PKK RW | 13 RW | manambah wawasan PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sarasehan PKK RT | 52 RT | manambah wawasan PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional) | 40 orang | menambah ketrampilan bagi warga rentan/miskin menambah ketrampilan bagi warga rentan/miskin | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJMD Kel. Pandeyan | 1 kali | RPJMD | 100% | | | | | |
| | | | | | | Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin | 8 bulan | evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB | 30 orang | menambah ketrampilan bagi anggota KTB | 100% | | | | | |
| | | | | | | Worshop Sosio Entrepreneurship | 30 orang | menambah pengetahuan bagi remaja | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gelar Potensi Anak | 150 orang | penampilan Potensi PAUD | 100% | | | | | |
| | | | | | | Lomba Futsal Karang Taruna | 13 RW | menjaga kebersamaan dan kedisiplinan | 100% | | | | | |
| 4.7 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto | | | Kel. Warungboto | | Pelatihan Budi Daya Sayuran dan Cabe | 22 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | 202,633,000 | 271,768,200 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo | |
| | | | | | | Pelatihan Produk Kreatif Kain Perca | 22 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Promosi hasil Karya | 1 hari | menampilkan hasil karya masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Bisnis Berbasis Web | 22 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Kesehatan Lansia | 50 orang | menambah pengetahuan kesehatan Lansia | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Solusinya | 70 orang | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gelar Potensi PAUD | 110 orang | menampilkan Potensi PAUD | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Daur Ulang Sampah | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gelar Senam Suka-suka | 300 orang | menjaga kesehatan dan kebugaran | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gelar Potensi Lansia | 1 kali | menjaga potensi Lansia | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Membuat Tas Rajut | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Jam Belajar Masyarakat | 9 RW | meningkatkan minat belajar | 100% | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | |
|---------|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|--------|--|------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | | | | | Target |
| | | | | | | | Lomba Balita Tingkat Kelurahan | 100 orang | menjaga generasi penerus bangsa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk | 1 kali, 10 bulan | mencegah wabah demam berdarah di wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pentas Seni dan Budaya | 1 kali | mengembangkan budaya dan kreativitas masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin | 8 bulan | evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar) | 30 orang | menambah ketrampilan bagi warga rentan/miskin | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan | 5 kali | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RW | 9 RW | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RT | 38 RT | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| 4.8 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan | | | Kel. Tahunan | | | Penyuluhan dan Pemantauan jentik Nyamuk | 1 kali 10 bulan | mencegah wabah demam berdarah di wilayah | 100% | 229,507,160 | 293,242,400 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Jam Belajar Masyarakat | 12 RW | meningkatkan minat belajar | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kelurahan Siaga | 1 kali | mengembangkan kesi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD Kel. Tahunan | 1 kali | RPJMD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan | 5 kali | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RW | 12 RW | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RT | 50 RT | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Intervensi Penduduk Rentan /Miskin (Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar bagi Pemegang KMS) | 30 orang | menambah ketrampilan bagi warga rentan/miskin | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin | 8 bulan | evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD | 200 orang | Potensi Paud dan Pendidik PAUD lebih meningkat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan Budaya Jawa | 50 orang | menjaga budaya jawa | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Buku Smart Kel. Tahunan | 100 buku | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB | 30 orang | menambah ketrampilan bagi anggota KTB | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Jumpitan Warna Alam | 30 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Batik Tulis | 30 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Tas dan Sandal Batik | 30 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| 4.9 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju | | | Kel. Muja-muju | | | Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk | 1 kali 10 bulan | mencegah wabah demam berdarah di wilayah | 100% | 264,760,000 | 337,797,900 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Jam Belajar Masyarakat | 12 RW | meningkatkan minat belajar | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Kelurahan Siaga | 1 kali | mengembangkan kesi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan | 5 kali | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RW | 12 RW | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RT | 55 RT | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan makanan dari Umbi-Umbian) | 30 orang | menambah ketrampilan bagi warga rentan/miskin | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD Kel. Muja-muju | 1 kali | RPJMD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin | 8 bulan | evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD | 200 orang | Potensi Paud dan Pendidik PAUD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Manajemen Usaha | 30 orang | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Workshop Kesehatan Bagi Lansia | 30 orang | menambah pengetahuan kesehatan lansia | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Ecobrik | 30 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Makanan dari Ikan | 30 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Workshop Posyandu | 50 orang | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Senam PKK | 4 kali | menjaga kesehatan anggota PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Workshop Parenting PAUD | 65 orang | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Workshop PIK R | 30 orang | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan SDIDTK | 30 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB | 30 orang | menambah ketrampilan bagi anggota KTB | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|--------------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|--|------------------|--|--------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | | Workshop Kampung Cyber | 30 orang | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kesehatan Reproduksi | 30 orang | menambah pengetahuan masyarakat | 100% | | | | |
| 4.10 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki | | | Kel. Semaki | | | Penyuluhan dan pemantauan Jentik Nyamuk | 1 kali, 10 bulan | mencegah wabah demam berdarah di wilayah | 100% | 179,820,180 | 244,012,098 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Jam Belajar Masyarakat | 10 RW | meningkatkan minat belajar | 100% | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan Siaga | 1 kali | mengembangkan kesi | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan | 5 kali | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RW | 10 RW | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sarasehan PKK RT | 34 RT | menambah wawasan PKK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan Kue) | 30 orang | menambah ketrampilan bagi warga rentan/miskin | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJMD Kelurahan Semaki | 1 kali | RPJMD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin | 8 bulan | evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Hydroponik | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pembuatan Bakpia | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan membuat Kreasi Menu Balita | 20 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi PAUD | 100 orang | Penampilan potensi PAUD | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kegawat Daruratan | 50 orang | menambah ketrampilan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gelar Potensi Lansia | 100 orang | menjaga potensi lansia | 100% | | | | |
| 4.11 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo | | | Kec. Umbulharjo | | | Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan | 8 dokumen | Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang mendukung Pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sosial | 100% | 1,827,495,220 | 2,010,244,742 | Sedang berjalan | Kec. Umbulharjo |
| | | | | | | | Perbaikan Paving Blok | 6 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan SAH | 6 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan balai RW | 6 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Pemasangan Kanopi Ex Balai RK | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan taman Apotik Hidup | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan PJU | 7 kelurahan | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Perencanaan | 102 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kader Pembangunan | 35 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Profil Kecamatan dan Kelurahan | 4 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Informasi Pembangunan Wilayah | 6 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Gelar Expo Industri | 3 hari, 7 kel | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan PKL | 400 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pemilik Pondokan | 200 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi bahan makanan berbahaya | 50 orang | | | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi UMKM | 11 bulan | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 7,011,396,218 | 7,712,535,840 | | |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Kecamatan Gondomanan

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | | | | 637,002,756 | 700,703,032 | | |
| 1.1 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Kec. Gondomanan | | | Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 27 orang | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 156,412,000 | 172,053,200 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 14 jenis rapat | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu | 18 kali | | | | | | |
| | | | | | | | Makan dan minum yang tersedia untuk Harian umum untuk pelayanan | 14 jenis rapat | | | | | | |
| | | | | | | | Frekuensi Koordinasi (pemantauan pengamanan) | 19 kali | | | | | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kec. Gondomanan | | | Pengamanan Kantor | 12 bulan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 382,065,400 | 420,271,940 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| | | | | | | | ATK | 34 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 3 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 6000 yang tersedia | 400 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Materai 3000 yang tersedia | 100 buah | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan dan perlengkapan kantor | 12 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Peralatan rumah tangga | 23 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 4 rekening listrik 1 rekening air kel. Prawirodirjan 4 rekening telp | | | | | | |
| | | | | | | | Bacaan surat kabar lokal | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Retribusi kebersihan | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 1 paket 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Perizinan kendaraan dinas | roda 4, 1 unit roda 2, 11 unit roda 3, 2 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa percetakan | 1 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Penggandaan | 133.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | Sewa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa perbaikan peralatan kerja | 14 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa kebersihan kantor | 1 paket | | | | | | |
| | | | | | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 3 paket | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | | | Kec. Gondomanan | | | Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun | 4 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 98,525,356 | 108,377,892 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| | | | | | | | dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | 28 ASN | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa Tenaga Bantuan | 2 orang | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | | | | | 259,093,250 | 285,002,574 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Kec. Gondomanan | | | Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat | 3 gedung | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 195,600,000 | 210,536,263 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|--|--------------------------------|---|-----------------|--|--------|---|-------------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kec. Gondomanan | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) | 1 unit | Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 63,493,250 | 74,466,311 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3 (tiga) | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) | 11 unit | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat | | Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 41,165,000 | 45,281,500 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Kec. Gondomanan | | | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) | 6 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu | 100% | 41,165,000 | 45,281,500 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan | | | | Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan | 100% | | | | | 1,741,904,378 | 1,916,094,816 | | |
| 4.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan | | | Kec. Gondomanan | | | Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan | 4 kali | Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan | 100% | 444,608,200 | 489,069,020 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| | | | | | | | Penyuluhan Kelembagaan | 50 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Kelembagaan Masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monografi Kelurahan | 10 buku | Buku Monografi Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan | 2 kelurahan | Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Kewaspadaan Bencana | 30 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Kewaspadaan Bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Pengelola Parkir | 30 orang | Pengelolaan Parkir yang Baik | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemantauan Wilayah se Kecamatan Gondomanan | 2 kelurahan | Terpantaunya Wilayah Kec. Gondomanan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jogobaran | 1 kec | Terciptanya kondisi lebaran yang tertib dan aman | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pengamanan Hari Besar dan Insidentil | 12 bulan | Penyelenggaraan Kegiatan hari besar yang aman | 100% | | | | |
| | | | | | | | Piket Siaga Bencana | 15 orang | Terantisipasinya Bencana | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Satlinmas | 60 orang | Terciptanya perlindungan masyarakat | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasi Ketertiban | 12 bulan | Terpantaunya pelaksanaan perda | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Bela Negara | 1 keg | Terlaksananya Upacar HUT RI | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemilihan RT, RW, dan LPMK | 2 kelurahan | Terpelihannya kepengurusan RT, RW dan LPMK | 100% | | | | |
| 4.2 | Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan | | | Kec. Gondomanan | | | PATEN (Tenaga Teknis, BBM Genset, Jemput Bola KIA, IMBB,HO) | 11 bulan | Terselenggaranya PATEN | 100% | 105,925,278 | 116,517,806 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| | | | | | | | Penyusunan SOP | 4 bulan | Tersusunnya SOP Kecamatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Buletin | 320 eks | Buletin Gondoarum | 100% | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Perundangan | 2 kali | Terselenggaranya Sosialisasi Perundangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jemput Bola KIA | 4 bulan | Terselenggaranya Jemput Bola KIA | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pendataan HO | 6 bulan | Data permohonan HO | 100% | | | | |
| | | | | | | | Optimalisasi Pendapatan Kecamatan | 10 bulan | Tercapainya target pendapatan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Informasi Masyarakat | 10 bulan | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Informasi Masyarakat terlaksanan dengan baik | 100% | | | | |
| 4.3 | Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan | | | Kec. Gondomanan | | | Kegiatan Seni Budaya dan Olahraga | 2 keg | Terlaksananya pelatihan, Pentas Seni Budaya dan Olahraga | 100% | 257,535,000 | 283,288,500 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| | | | | | | | Sapaan Anak Kost | 8 bulan | Terlaksananya Sapaan Anak Kost | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monev Bantuan Warga Miskin | 11 bulan | Terselenggaranya Monev Bantuan Warga Miskin | 100% | | | | |
| | | | | | | | TKPK | 10 bulan | Terlaksananya TKPK | 100% | | | | |
| | | | | | | | Lomba Mewarnai Tingkat TK | 6 TK | Terlaksananya Lomba Mewarnai Tingkat TK | 100% | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab |
|---------|---|-----------|----------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|---|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | | Sarasehan Kerukunan Antar Umat Beragama | 250 orang | Terbinanya Kerukunan Antar Umat Beragama | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Senam Jemparing | 62 orang | Terlaksanya Kegiatan Kesatuan Gerak PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 10 bulan | Terselenggaranya Pelatihan Senam Jemparing | 100% | | | | | |
| | | | | | | Gebyar PAUD | 24 SPS | Terselenggaranya Gebyar PAUD | 100% | | | | | |
| | | | | | | Administrasi PKK Kecamatan dan Kesatuan Gerak PKK | 2 Keg. | Administrasi PKK Kecamatan yang lancar dan Terselenggaranya KKG PKK | 100% | | | | | |
| | | | | | | Kelurahan Siaga | 10 bulan | Terselenggaranya Operasional Kelurahan Siaga | 100% | | | | | |
| 4.4 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan | | | Kel. Ngupasan | | TKPK Kelurahan | 6 bulan | Terselenggaranya TKPK Kelurahan | 100% | 201,513,000 | 221,664,300 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan | |
| | | | | | | Penyuluhan Forum Anak Kelurahan | 40 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Forum Anak Kelurahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Rajut | 30 orang | Terselenggaranya Pelatihan Rajut | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama | 150 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan tentang Penyakit Masyarakat Bagi Generasi Muda | 65 orang | Terselenggaranya Penyuluhan tentang Penyakit Masyarakat Bagi Generasi Muda | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Membatik | 20 orang | Terselenggaranya Pelatihan Membatik | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pentas Seni HUT Kota | 1 keg | Terselenggaranya Pentas Seni HUT Kota | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pawai Budaya Kelurahan | 1 keg | Terselenggaranya Pawai Budaya Kelurahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Manajemen Wira Usaha dan Pemasaran bagi Warga Miskin | 40 orang | Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Wira Usaha dan Pemasaran bagi Warga Miskin | 100% | | | | | |
| | | | | | | Admint PKK RT RW dan Kel | 1 kel | Admint PKK RT RW dan Kel yang lancar | 100% | | | | | |
| | | | | | | Jam Belajar Masyarakat | 10 bulan | Terselenggaranya Jam Belajar Masyarakat | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan RPJM Kelurahan | 1 keg | Tersusunnya RPJM Kelurahan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Operasional Kelurahan Siaga | 1 keg | Terselenggaranya Operasional Kelurahan Siaga | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pawai Budaya Tingkat Kota Yogyakarta | 1 keg | Terselenggaranya Pawai Budaya Tingkat Kota Yogyakarta | 100% | | | | | |
| 4.5 | Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan | | | Kel. Prawirodirjan | | TKPK Kelurahan | 6 bulan | Terselenggaranya TKPK Kelurahan | 100% | 290,911,000 | 320,002,100 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan | |
| | | | | | | Penyuluhan Kader dan Gizi | 50 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Kader dan Gizi | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Tari Gaya Jogja dan Solo "Aruming Prawiro" | 35 orang | Terselenggaranya Pelatihan Tari Gaya Jogja dan Solo "Aruming Prawiro" | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Photography | 30 orang | Terselenggaranya Pelatihan Photography | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Payet | 50 orang | Terselenggaranya Pelatihan Payet | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Reproduksi dan Napza | 100 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Reproduksi dan Napza | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pentas Seni HUT Kota | 1 keg | Terselenggaranya Pentas Seni HUT Kota | 100% | | | | | |
| | | | | | | Karnaval Budaya (PAF#7) | 1 keg | Terselenggaranya Karnaval Budaya (PAF#7) | 100% | | | | | |
| | | | | | | Workshop Wira Usaha Muda | 30 orang | Terselenggaranya Workshop Wira Usaha Muda | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama | 250 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama | 100% | | | | | |
| | | | | | | Penyuluhan Kelembagaan | 90 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Kelembagaan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Festival Dolanan | 1 keg | Terselenggaranya Festival Dolanan | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Hydroponik | 40 orang | Terselenggaranya Pelatihan Hydroponik | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Membuat Kue Basah dan Kering | 50 orang | Terselenggaranya Pelatihan Membuat Kue Basah dan Kering | 100% | | | | | |
| | | | | | | Pelatihan Manajemen Wira Usaha dan Pemasaran bagi Warga Miskin | 45 orang | Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Wira Usaha dan Pemasaran bagi Warga Miskin | 100% | | | | | |
| | | | | | | Adminsitasi RT RW dan Kelurahan | 1 kel | Adminsitasi RT RW dan Kelurahan yang lancar | 100% | | | | | |

| No Urut | Urusan/Program/Kegiatan | Prioritas | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif | PrakiraanMaju | JenisKegiatan | Penanggung-jawab | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|---|----------|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | | | | | Hasil Kegiatan | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | Tolok Ukur | Target |
| | | | | | | | Pawai Budaya Tingkat Kota Yogyakarta | 1 keg | Terselenggaranya Pawai Budaya Tingkat Kota Yogyakarta | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional JBM | 10 bulan | Terselenggaranya Operasional JBM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Operasional Kelurahan Siaga | 1 keg | Terselenggaranya Operasional Kelurahan Siaga | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan RPJM Kelurahan | 1 keg | Terselenggaranya Penyusunan RPJM Kelurahan | 100% | | | | |
| 4.6 | Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan | | | Kec. Gondomanan | | | Pembangunan Fisik | 4 bulan | Pembangunan wilayah yang terlaksana dengan baik | 100% | 441,411,900 | 485,553,090 | Sedang berjalan | Kecamatan Gondomanan |
| | | | | | | | Musrenbang | 3 bulan | Terselenggaranya Musrenbang | 100% | | | | |
| | | | | | | | Bintek Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pembangunan | 1 hari | Tersusunnya Hasil Musrenbang yang Berkualitas | 100% | | | | |
| | | | | | | | Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa | 6 kali | Terwujudnya Kebersihan Wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Informasi Program Pembangunan | 6 bulan | Tersusunnya Buku Inmen | 100% | | | | |
| | | | | | | | Profil Kelurahan | 40 eks | Profil Kelurahan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan RW se Kecamatan Gondomanan | 2 kel | Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan lingkungan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Monev Perencanaan dan Pembangunan Fisik | 10 bulan | Termonitornya pembangunan wilayah | 100% | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan konblok se-Kelurahan Ngupasan | 1 paket | Perbaikan konblok se-Kelurahan Ngupasan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Perbaikan konblok se-Kelurahan Prawirodirjan | 1 paket | Terlaksananya perbaikan jalan konblok se Kelurahan Prawirodirjan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum se-Kec. Gondomanan | 1 paket | Terpeliharanya Fasum se Kecamatan Gondomanan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan SAH Se-Kecamatan Gondomanan | 1 paket | Tersedianya Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik | 100% | | | | |
| | | | | | | | Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik | 1 paket | Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik | 100% | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan lampu | 22 titik | Terpeliharanya PJU se Kecamatan Gondomanan | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan PKL | 50 orang | Terselenggaranya Penyuluhan PKL | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan UMKM | 50 orang | Terselenggaranya Penyuluhan UMKM | 100% | | | | |
| | | | | | | | Penyuluhan Wira Usaha bagi Penerima PKH | 30 orang | Terselenggaranya Penyuluhan Wira Usaha bagi Penerima PKH | 100% | | | | |
| Total | | | | | | | | | | 2,679,165,384 | 2,947,081,922 | | | |

BAB VI

PENUTUP

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh walikota dan penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

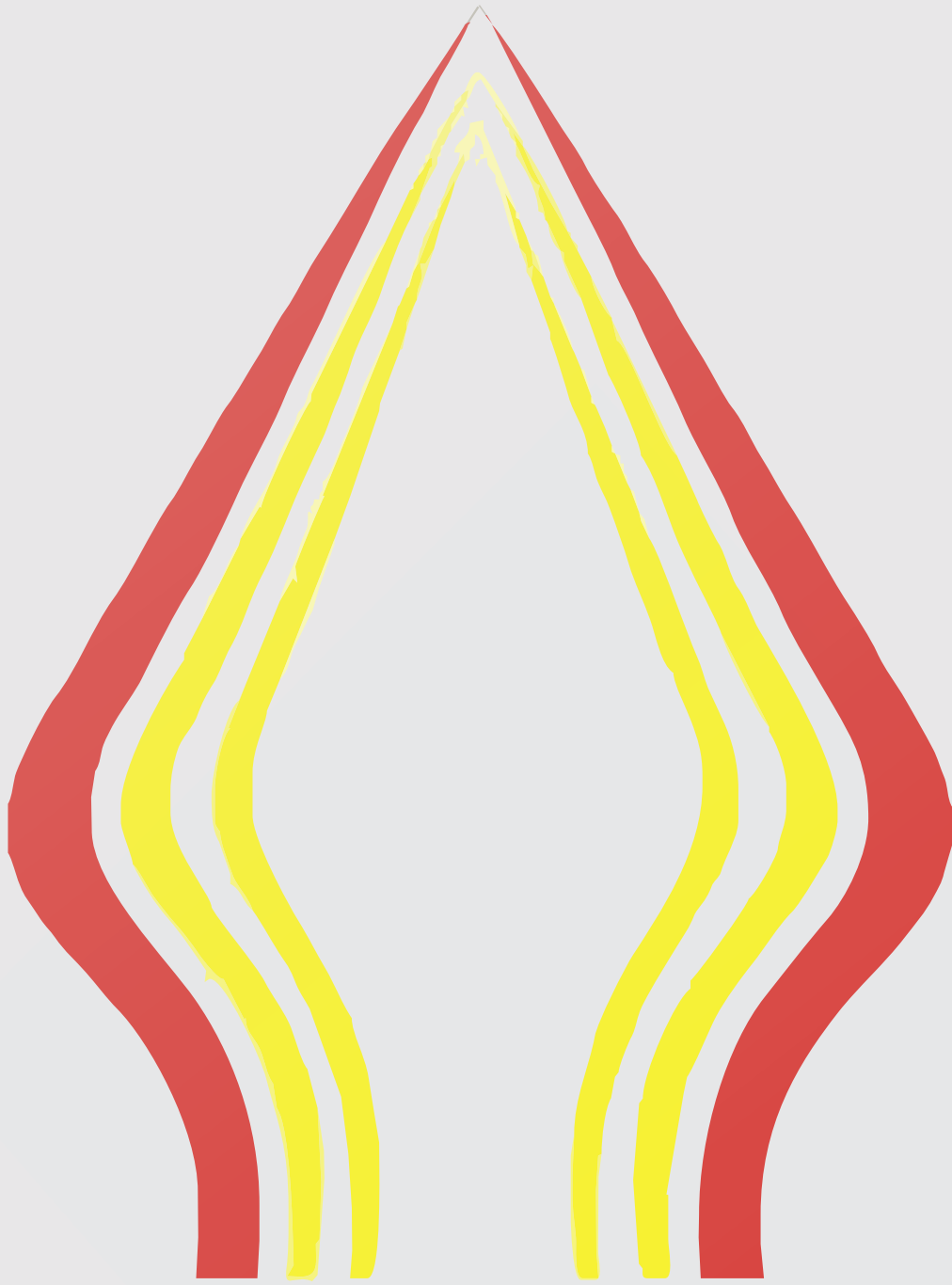
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2018, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI



SEGORO AMARTO

